Laporan Tahunan
PosIND 2023

Jl. Banda No. 30
Bandung 40115
Jawa Barat - Indonesia

Laporan Tahunan
PosIND 2023

To Become a Logistic Company

The Transformation of Pos Indonesia Towards SOE Green Logistics Company

BUMN UNTUK INDONESIA

Pos Bloc POSPAY Pos Aja! GLID LOGISTIK BUMN POS IND Logistik Indonesia

To Become a Logistic Company

The Transformation of Pos Indonesia Towards SOE Green Logistics Company



POS IND Logistik Indonesia

Laporan Tahunan
PosIND 2023

POS IND
Logistik Indonesia

To Become a Logistic Company

The Transformation of Pos Indonesia Towards SOE Green Logistics Company





Laporan Tahunan PosIND 2023

To Become a Logistic Company

The Transformation of Pos Indonesia Towards SOE Green Logistics Company

Pos Indonesia memiliki peran penting dalam turut membantu pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain sebagai penggerak perekonomian masyarakat, alat komunikasi untuk keselarasan politik dan persatuan nasional, perantara efektif hubungan dengan berbagai institusi dan alat pertahanan/kedaulatan Negara. Dalam hubungan antar-masyarakat salah satunya dengan menampilkan perangko kebudayaan.

Tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, ritel, dan properti, yang didukung oleh titik jaringan sebanyak 4.308 cabang pembantu yang berlokasi di kecamatan dan *drop point* atau *outlet* kecil yang berjumlah lebih dari 46 ribu. Pos Indonesia juga hadir di 228 negara.

PosIND

Logistik Indonesia

Kesinambungan Tema



2019

Digitalisasi Layanan Bisnis



2020

Transformasi Digital yang Berkelanjutan – Untuk meningkatkan kinerja Bisnis Pos Indonesia dalam kerangka budaya AKHLAK



2021

Retaking Market Share – Courier Service, Logistic Service and Fintech Service



2022

Improving Operasional Quality – to provide better customer service and profitability

Daftar Isi

1. *Highlight* 2023

Pengantar	2
Kesinambungan Tema	3
Daftar Isi	4
Kinerja Utama	6
Pencapaian	10
Ikhtisar Posisi Keuangan	11
Informasi Hasil Usaha	12
Rasio Keuangan	13
Efek Lainnya	14
Kaleidoskop	18

2. Laporan Kepada Pemegang Saham

Sambutan Dewan Komisaris	22
Sambutan Direksi	28
Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	32

3. Profil Perusahaan

Identitas Perusahaan	36
Riwayat Singkat	37
Bidang Usaha	45
Struktur Organisasi	46
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	48
Dewan Komisaris	52
Direksi	58
Sumber Daya manusia	66
Pengembangan Kompetensi Karyawan	68
Komposisi Pemegang saham	69
Anak Perusahaan dan Entitas Asosiasi	70
Struktur Grup Perusahaan	70
Kronologi Penerbitan Saham	73
Kronologi Penerbitan Dan/Atau Pencatatan Efek Lainnya	73
Lembaga dan Profesi Penunjang	73
Penghargaan dan Sertifikasi	74
Alamat Anak Perusahaan dan Kantor Regional	80
Informasi pada Website Pos Indonesia	81
Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris, Komite-Komite dan Unit Audit Internal	82
Wilayah Operasi	84

4. Pembahasan dan Analisis Manajemen

Tinjauan Kinerja Operasi	88
Kinerja Keuangan Perusahaan	93
Kemampuan Membayar Utang Dan Tingkat Kolektibilitas Piutang	99
Permodalan	101

Ikatan Yang Material Untuk Investasi Barang Modal	102
Investasi Barang Modal	102
Kebijakan Dividen	103

5. Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance	106
Struktur Tata Kelola	111
RUPS	113
Dewan Komisaris	115
Komisaris Independen	127
Direksi	128
Penilaian Pelaksanaan GCG 2022	136
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	137
Rapat Dewan Komisaris	143
Rapat Direksi	145
Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi	156
Hubungan Afiliasi Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dan Pemegang Saham	159
Komite Audit	160
Komite Nominasi Dan Remunerasi	174
Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha Dan Investasi	190
Sekretaris Perusahaan	202
Internal Audit	205
Akuntan Perseroan	216
Manajemen Risiko	217
Sistem Pengendalian Internal	226
Perkara Penting	229
Akses Informasi Dan Data Perusahaan	230
Kode Etik	231
Whistleblowing System	234
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi	246

6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	250
Kinerja Program TJSL	257
Laporan Keuangan PUMK	264
TJSL Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia	270
TJSL Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, Dan Keselamatan Kerja	271
TJSL Terkait Tanggung Jawab Kepada Konsumen	274
TJSL Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan	277

7. Lampiran

Laporan Keuangan Konsolidasi	
Laporan Audit TJSL	

Kinerja Utama 2023

Sektor logistik merupakan salah satu sektor yang menentukan daya saing suatu negara. Dalam hal ini, tentunya sangat terkait infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia dengan didukung manajemen logistik yang mengelola seluruh aktivitas logistik mulai dari hulu sampai ke hilir atau yang dikenal dengan manajemen rantai pasok (*supply chain management*). Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif agar dapat bersaing dalam menghadapi persaingan di pasar domestik dan mancanegara. Lahirnya PosIND merupakan langkah Transformatif dan awal babak baru dalam sejarah panjang industri Pos di Indonesia. PosIND memiliki semangat baru, guna mempercepat kemajuan sektor logistik di Indonesia.

Logo Baru PosIND Logistik Indonesia, dimana POS diambil dari Pos Indonesia membawa aspirasi perusahaan untuk menjadi solusi layanan logistik

POS IND
Logistik Indonesia

yang terintegrasi dan efesien, IND singkatan dari Integrated National Ditribution, kata Integrated mencerminkan sinergi dan kerjasama. National Distribution sebagai cerminan komitmen dan dedikasi melayani berbagai kebutuhan logistik di Indonesia. Bagaimana persiapan dan akselerasi PosIND sebagai holding logistik di Indonesia, dapat dilihat dari Kinerja Keuangan di tahun 2023.

Kinerja Keuangan

Terkait kinerja keuangan, terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu realisasi Laba/ Rugi dan realisasi *capex* (*capital expenditure*). Pada periode 2023 Perusahaan telah meraih pendapatan dan laba sebagai berikut:

1. *Net Income*

728 milliar
14% dari 2022

2. Pendapatan Usaha

5.479 milliar
18% dari 2022

3. Ebitda

1.194 milliar
29% dari 2022

4. Realisasi *Capex*

261,23 milliar
141% dari 2022

Realisasi *capex* meningkat singnifikan 140,72%. Pada tahun 2022 *capex* terealisasi sebesar Rp 108,52M. Pada tahun 2023, *capex* dapat direalisasikan Rp 261,23.

Tumbuhnya realisasi *capex* yang lebih dari 140% ini merupakan sebuah sinyal penting kepada para pemangku kepentingan bahwa Perusahaan sedang menuju perubahan besar dengan melakukan investasi pada kegiatan-kegitan yang mempunyai efek langsung kepada kinerja keuangan. Hal ini juga sebagai Informasi yang sangat penting bahwa Pos Indonesia telah berjalan di *track* yang benar cerminan komitmen dan dedikasi melayani berbagai kebutuhan logistik di Indonesia.

Pos Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan bahkan meningkatkan indikator kualitas operasi yang sudah berjalan baik selama ini. Selain pencapaian kualitas operasi tersebut, perusahaan juga sukses dalam melaksanakan penyaluran bantuan pemerintah, diantaranya:

1. Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahap I (Bulan Maret, April, Mei) dengan jumlah tonase 132 juta kilogram setiap bulan tercapai 100%.
2. Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahap II dan Alokasi Tambahan (Bulan Oktober, November, Desember) dengan jumlah tonase 132 juta kilogram setiap bulan tercapai 100% untuk semua daerah selain Nusa Tenggara Timur. Masih dilakukan upaya-upaya percepatan penyaluran di Nusa Tenggara Timur sebesar 2% dari total alokasi. Hal ini dikarenakan kondisi daerah dan cuaca di perairan yang tidak menentu dengan curah hujan yang cukup tinggi.
3. Penyaluran Bantuan Stunting Tahap I dan Tahap II dengan masing-masing tahap menyalurkan kepada 4.338.267 penerima bantuan telah tercapai 100%.

Dengan telah mulai beroperasinya mesin sortir robotik di SPP Surabaya dan peresmian logo baru PosIND pada 16 November 2023, *Customer Experience* dan kualitas operasi kurir akan terus membaik, kehadiran mesin sortir robotik telah mampu meningkatkan produktivitas karyawan dan efisiensi biaya secara cukup signifikan.

Cost efficiency

- *Operation Cost* (+5%)
- *HC Cost* (-4%)

Competitiveness

- *Market Share CEP 2023* 4th

Productivity

- *HR Productivity* (+19%)

Customer satisfaction

- *CSI : 8,6* (+4.3%)
- *NPS : 46,61* (+6.4%)

Employee satisfaction

- *EE : 82,15* (+0.2%)
- *ES : 79,04* (+0.3%)

*) data YoY 2023

Dalam mendukung tercapainya *service excellent*, baik di Bisnis Kurir dan Logistik, Bisnis Jasa Keuangan dan Peningkatan Mutu Operasi, peran Digitalisasi *Information Technology* (IT) demikian vital. Saat ini transformasi digital Pos Indonesia terus berkembang, dimana Tata Kelola IT dan Tata Kelola Perusahaan sudah mengikuti kemajuan Informasi & Teknologi. Dengan telah beralihnya infrastruktur IT ke *Cloud*, Digital *Work Place* sudah mulai dibentuk dengan adanya NDE, *e-Learning*, *dane-proc*.

Sementara, *Digital Touch Point* yang menjadi pintu layanan *customer* juga sudah bergulir seperti POSPAY dan PosAja. *Development* superapps guna mengintegrasikan aplikasi POSPAY dan PosAja! menjadi satu platfom sudah selesai menjadi Pospay *Superapps*, sehingga diharapkan menjadi *one-stop-solution* kemudahan bagi *customer* dan tentunya akan menarik lebih banyak jumlah pengguna. Bagian dari upaya peningkatan mutu operasi, beberapa platform telah dan sedang dikembangkan, yaitu CBA *Online* Versi 2, *PosClaim* untuk melayani *complain* pelanggan dan *platform logistic* (GLID) guna mendukung arah transformasi perusahaan menjadi perusahaan logistik.

Tahun 2023 ditutup dengan beberapa catatan prestasi yang cukup membanggakan atas penerapan GCG dan *Risk Management* di Perusahaan serta ***"Point of Concern"*** pada pelaksanaan RKAP berbasis risiko di Tahun 2023.

Prestasi yang berhasil diraih

TOP GRC Award 2023

- *Top GRC Awards* 2023 dengan predikat bintang 5
- *The Most Commited GRC Leader* 2023 untuk Direktur Utama Faizal Rochmad Djoemadi
- *The High Performing Board of Comissioners on GRC* 2023 oleh Jajaran Komisaris Pos Indonesia
- *The High Performing Chief Financial Officer & Risk Management Director on* GRC 2023 oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Endy Pattia Rahmadi Abdurrachman.

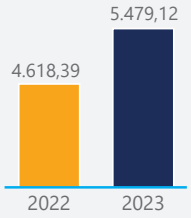


Gambar :
Gedung Heritage Filateli jakarta

Pencapaian 2023

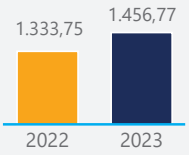
Pendapatan Usaha

▲ Naik
18,63%
Dalam miliar rupiah



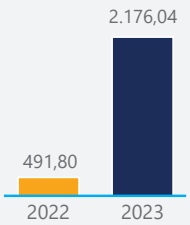
Pendapatan Kurir

▲ Naik
9,22%
Dalam miliar rupiah



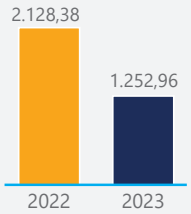
Pendapatan Logistik

▲ Naik
342,46%
Dalam miliar rupiah



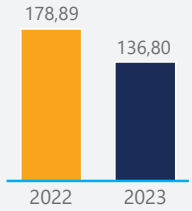
Pendapatan Jasa Keuangan

▼ Turun
43,42%
Dalam miliar rupiah



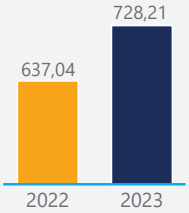
Pendapatan Properti

▼ Turun
23,53%
Dalam miliar rupiah



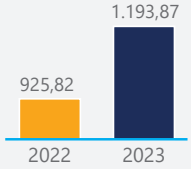
Laba Tahun Berjalan

▲ Naik
14,31%
Dalam miliar rupiah



Ebitda

▲ Naik
28,95%
Dalam miliar rupiah



Skor GCG

89,04
Sangat Baik

Rating Tingkat Kesehatan

Kategori
A

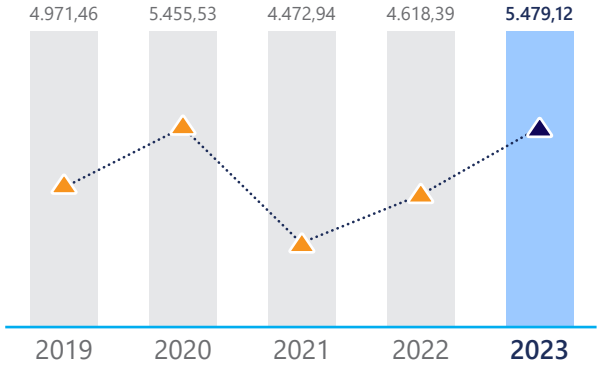
Ihktisar Keuangan

Uraian	YoY 2022 -2023		2023	2022	2021	2020	2019
	Rp.	%					
Aset							
Aset lancar	1.749,42	48,28	5.372,71	3.623,29	3.531,05	4.003,64	3.824,09
Aset Tidak Lancar	771,10	10,26	8.286,13	7.515,03	6.158,11	5.442,44	5.006,43
Jumlah Aset	2.520,53	22,63	13.658,84	11.138,31	9.689,16	9.446,08	8.830,52
Liabilitas							
Liabilitas Jangka Pendek	1.800,75	85,56	3.905,45)	2.104,70	2.777,65	3.725,50	3.742,34
Liabilitas Jangka Panjang	(465,72)	(22,35)	1.618,32	2.084,04	1.318,03	1.655,38	1.064,78
Jumlah Liabilitas	1.335,03	31,87	5.523,77	4.188,74	4.095,68	5.380,88	4.807,12
Ekuitas							
Modal saham			455,02	455,02	455,02	455,02	455,02
Saldo laba (Appropriated)	650,37	24,88	3.264,31	2.613,94	2.024,40	1.576,34	1.455,60
Saldo Laba (Unappropriated)	105,26	16,18	755,63	650,37	589,54	120,20	120,74
Komponen Ekuitas Lainnya	457,33	14,09	3.702,78	3.245.45	2.528,74	1.912,31	2.016,66
Kep non pengendali	(27,46)	156,38	(45,02)	(17,56)	(4,23)	1,30	(24,62)
Jumlah Ekuitas	1.185,50	17,06	8,135.07	6.949,57	5.593,47	4.065,19	4023,4
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**2.520,53**	**22,63**	**13.658,84**	**11.138,31**	**9.989,16**	**9.446,08**	**8.830,52**

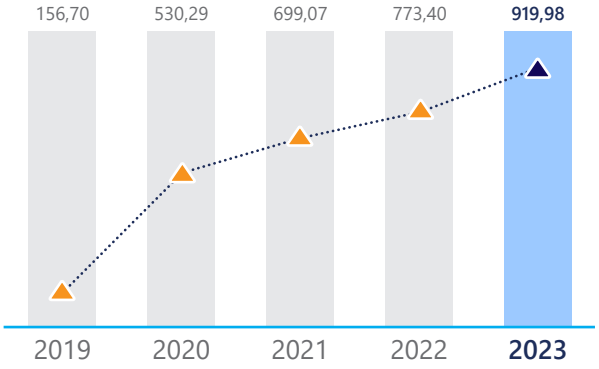
Informasi hasil Usaha

(Rp. Miliar kecuali laba per saham)

Pendapatan usaha

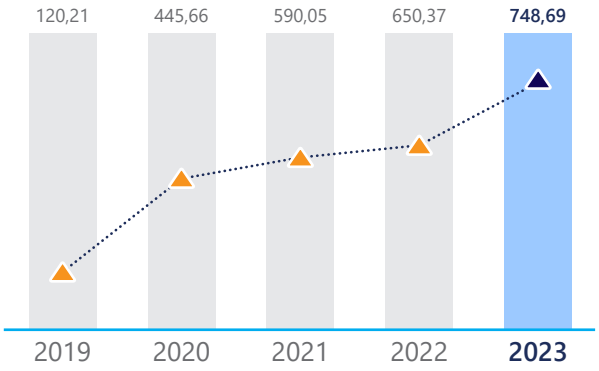


Laba usaha

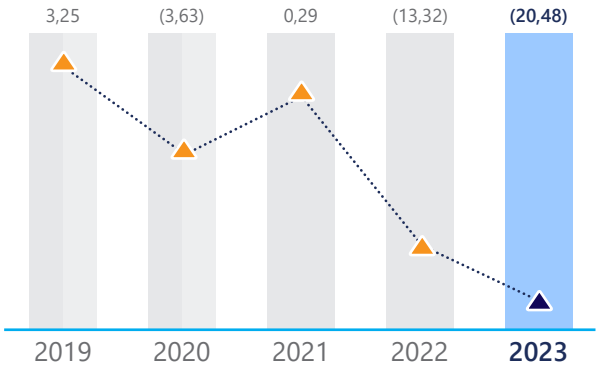


Laba bersih

a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk

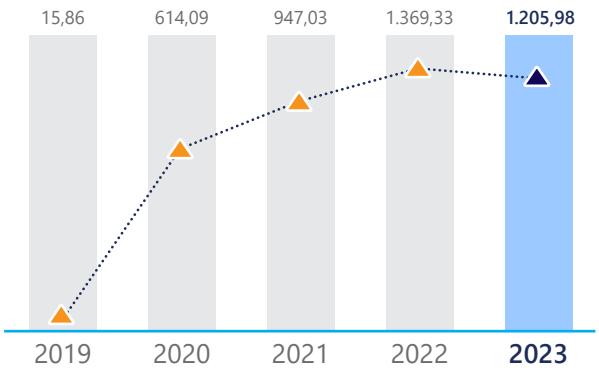


b. Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali

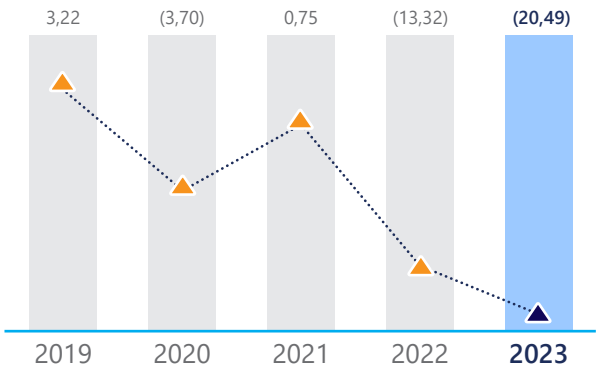


Penghasilan komprehensif periode berjalan

a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk



b. Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali



Rasio Keuangan

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Likuiditas					
Rasio Lancar (%)	137,57	174,86	127,12	108,40	107,47
Rasio Kas (%)	68,00	109,49	68,76	66,28	80,65
Rasio Cepat (%)	136,45	172,28	124,79	106,22	105,96
Aktifitas					
Perputaran Aset (%)	65,37	48,57	54,71	60,15	63,15
Perputaran Modal Kerja (kali)	2,75	2,93	6,13	20,84	17,87
Perputaran Aset Tetap (kali)	0,69	0,76	0,94	4,94	4,32
Perputaran Persediaan (hari)	4,18	3,97	5,37	71,36	110,53
Rata-rata Periode Penagihan (hari)	23,60	25,68	46,46	21,72	31,05
Profitabilitas					
Marjin Laba Kotor (%)	29,19	28,98	26,89	19,65	8,78
Marjin Laba Operasi (%)	13,29	16,75	15,63	9,72	3,15
Marjin Laba Bersih (%)	13,29	13,79	13,19	6,27	2,48
Rasio Laba terhadap Aset / ROA (%)	5,33	5,71	6,09	3,75	1,31
Marjin EBITDA (%)	21,79	18,73	17,27	14,24	8,18
Investasi					
Rasio Laba terhadap Ekuitas / ROE (%)	8,95	10,04	13,51	8,05	3,04
Rasio Laba Atas Investasi / ROI (%)	8,68	8,68	9,65	8,56	2,41
Solvabilitas					
Rasio Utang terhadap Ekuitas (kali)	0,65	0,60	0,73	0,96	1,32
Rasio Utang terhadap Aset (kali)	0,40	0,37	0,42	0,49	0,57
Rasio Cakupan Bunga (%)	366,39	405,12	497,76	277,79	194,80

Informasi Harga Saham dan Efek Lainnya

Informasi Harga Saham

PT Pos Indonesia belum pernah melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat dan sahamnya belum tercatat di Bursa Efek manapun. Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%. Sehingga tidak ada informasi mengenai harga saham perusahaan.

Informasi Mengenai Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konvertibel.

Pada tahun 2023 PT Pos Indonesia tidak melakukan penerbitan efek lain

MTN Posindo-03 Tahap 1 Tahun 2021

Nilai Penerbitan	: Rp.325.000.000.000,-
Tingkat Bunga	: 10,50%
Tanggal jatuh Tempo	: 30 Desember 2024
Peringkat Rating	: BBB+ (Pefindo)

Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Seri A

Nilai Penerbitan	: Rp.100.000.000.000,-
Tingkat Bunga	: 10,90%
Tanggal jatuh Tempo	: 28 Desember 2025
Peringkat Rating	: A- (PT Kredit Rating Indonesia)

Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Seri B

Nilai Penerbitan	: Rp.400.000.000.000,-
Tingkat Bunga	: 11,75%
Tanggal jatuh Tempo	: 28 Desember 2027
Peringkat Rating	: A- (PT Kredit Rating Indonesia)



Kapabilitas Digital Pos Indonesia

Hingga tahun 2023 telah diwujudkan berbagai inisiasi untuk pembangunan kapabilitas digital Pos Indonesia.

1. CORE SYSTEM JASA KEUANGAN

Core System Jasa Keuangan yang terdiri dari Core Giro System, SOPP (Sistem *Online Payment Point*), *Remmitansi*, *Fund Distribution* (Penerima & Distribusi Keuangan seperti Dana Pensiun), PGC (Distribusi Dana Tunai, BLT), *Payment Switching*, *CMS (Cash Management Services)*

2. CORE SYSTEM KURIR

Core System Kurir: System layanan kurir surat dan barang baik paket kilat maupun *regular*, kiriman dalam negeri, luar negeri, pengiriman kedalam negeri, *booking* kiriman, *pickup service* dan layanan COD.

3. DIGITAL CHANNEL & PHYSICAL CHANNEL

Mobile Apps POSPAY dilengkapi QRIS untuk layanan keuangan *Retail Customer*, POSPAY Kios untuk *Agent*, POSPAY Komunitas, POSPAY *Kanvasing*, POSPAY PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan Mobile Apps POSAJA untuk layanan kurir. Juga Aplikasi Layanan di cabang POS sebagai aplikasi *Physical Channel*.

4. TECHNOLOGY & PLATFORM

Seluruh Core System terimplementasi diatas *Infrastruktur Cloud*, dengan kemampuan HA dan DRC.

Pengembangan system baru telah menerapkan *Arsitektur Microservices* dan *Container Platform* dan *Methodology Scrum* dan *DevSecOps*

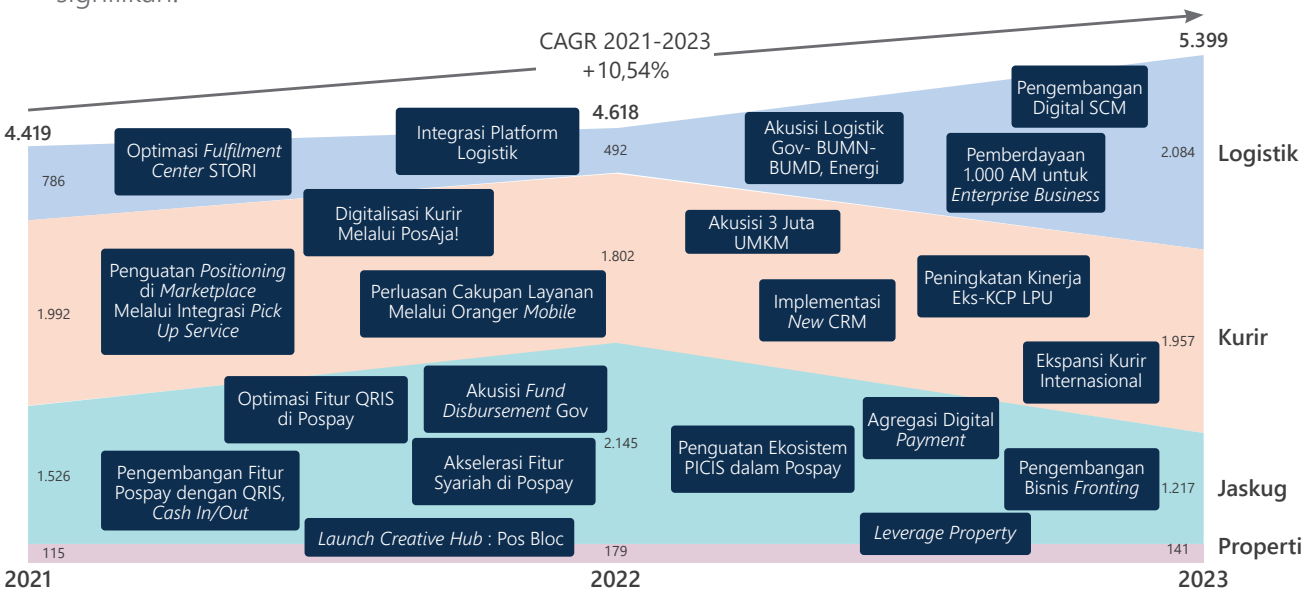
5. BIG DATA ANALYSIS

Platform Data Lake dan Data *Warehouse* untuk keperluan Analisa *business* dan operasional

SUPER APPS, B2B CRM, BIG DATA, DIGITAL WORKPLACE & LOGISTIC PLATFORM

- Sinergi Layanan Digital keuangan POSPAY dan kurir POSAJA kedalam *single platform SuperApps*.
- *Platform* CRM untuk *customer* B2B dan B2G.
- Analisa Data *Customer Behavior, Business* dan Operasional menggunakan *platform Big Data*.
- *Digitalisasi Internal Process*: *Corporate Portal Digital Workplace Project Management & Helpdesk*
- *Platform Logistic* untuk mendukung *business* 3PL
- *Platform* Integrasi ESB dan API *Management* untuk mendukung kerjasama dengan partner dan mitra.

Transformasi Bisnis pada tahun 2021-2023 menghasilkan dampak peningkatan pendapatan usaha hingga 10,54% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2021, di mana bisnis logistik tumbuh paling signifikan.



Milestone Portfolio Bisnis

Logistik

2021	2022	2023
STORI	Platform Digital Logistik	
Logee	Infrastruktur kargo & warehousing	
	Freighter (Air Cargo Domestic)	Logistik Gov-BUMN/D Energi
	Material Handling Equipment	Pasar Wholesale & Int'l

Kurir

2021	2022	2023
Integrasi Pick Up Service PosAja!		Akusisi 3 Juta UMKM
PosAja!	Database Kurlog di *Clouds*	1.000 AM
CRM Tools		
Oranger Mawar & Komunitas	SPP Jakarta Timur (RFID, RPA, *Conveyor*)	
	War Room	
New Platform Bisnis End-to-End	Optimalisasi Jam Layanan	
	Uji Coba EV/e-bike	Pasar Wholesale & Int'l
	New CRM	

Jasa Keuangan

2021	2022	2023
Pospay	SuperApps	
Fund Dist Pemerintah Pusat/Daerah		
Fitur QRIS di Pospay	Fitur Syariah di Pospay	Digital *Payment* & *Solution*
Pospay Agen Platinum	Fitur *Lending, Saving, Insurance & Invesment* di Pospay	Sistem *Fronting* di Pospay

Properti

2021	2022	2023
Creative Hub (Pos Bloc Jkt)	Bisnis Konstruksi	
	Optimalisasi KC/KCU	
	Creative Hub (Pos Bloc Mdn, Sby)	*Creative Hub* (Pos Bloc Bdg)
	Asset Management System	SIM Aset

Peristiwa Penting Tahun 2023

Peristiwa Penting Perseroan yang berdampak pada Laporan Keuangan :



Dukungan Proyek Pemerintah dan BUMN

- Proyek pemerintah : Penyaluran **Bansos** (sembako, PKH, Yatim Piatu, El Nino), distribusi bantuan kerawanan pangan & alat masak listrik
- Proyek BUMN : penyaluran **CBP** dan penyaluran bantuan **Stunting**.

Corporate Action

Perseroan melakukan Program ***Debt to Equity Swap (DES)*** untuk penyehatan PT Pos Logistik Indonesia sebanyak **69.500 lembar** saham atau setara dengan 69,5 M sehingga komposisi kepemilikan modal Perseroan menjadi **99,80%.**

Transformasi Pos Indonesia menjadi Logistic Company

Sebagai bagian dari Transformasi menjadi **Perusahaan Logistik** dan pembaruan *Brand-image*, Perseroan meluncurkan logo baru "**PosIND**".



Perluasan Coverage Layanan PosIND

- Pembukaan **84 Kantor Cabang Pembantu LPU Baru** bekerja sama dengan Kominfo.
- Pembukaan **Mitra LPU** sebanyak **1.322 Mitra LPU**.

Digitalisasi dan Otomasi untuk meningkatkan Pelayanan

- Digitalisasi Sinergi dan Integrasi Logistik Ekosistem BUMN melalui Platform **GLID**.
- Otomasi proses bisnis dengan menerapkan ***Robotic Sorting Machine***.



Meningkatkan peran PosIND dalam program ESG

- Program **TJSL** telah melakukan **penyaluran dana kolaborasi** ke Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. **sebesar 17 M** & penyaluran bantuan **CSR** sebesar 10,4 M.
- Peningkatan Digitisasi Internal Process melalui ***Paperless Invoice & Paperless Letter.***

Kaleidoskop 2023

JANUARI



- Pada tanggal 9 Januari 2023, penandatanganan PKS dengan PT Baru Tama, Bank Muamalat Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, PT Trisenta Interior *Manufacturing*, PT Industri Kereta Api, PT Macanan Jaya Cemerlang dan MoU dengan Saung Angklung Udjo.
- Pada tanggal 20 Januari 2023 penandatanganan MoU Bank Sulutgo

APRIL



- 13 April 2023 Award Katadata25 Pejuang Anticovid - 19

FEBRUARI



- Pada 1 Februari 2023 PT Pos Indonesia (Persero) memperluas jangkauan layanan dengan menambah 37 kantor cabang pembantu (KCP) Pos Indonesia atau Layanan Pos Universal (LPU) baru di kawasan terdepan, terpencil, tertinggal dan perbatasan (3TP), Rabu (1/2/2023). Adapun 37 KCP itu terdiri dari 9 kantor LPU di wilayah Regional 1 Sumatera, 13 kantor LPU di wilayah Regional 5 Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Nusra), serta 15 kantor LPU di wilayah Regional 6 Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

MEI



- 10 Mei 2023 Penandatanganan PKS dengan Bank BRI

MARET



- Pada tanggal 01 Maret 2023, Sentral Pengolahan Pos Yogyakarta 55400 menerima sertifikat ISO 9001 Tahun 2015 yang diserahkan langsung oleh Pimpinan Badan Sertifikasi BSI (*British Standard Institution*) Emmanuel Herve kepada Direktur Operasi dan Digital Service Hariadi. PT Pos Indonesia (Persero) juga sudah mengantongi sertifikat ISO 14001, 27001, 45001 untuk unit layanan Pos di Denpasar, Kantor Tukar Soekarno Hatta, serta SPP Bandung.
- Pada 8 Maret 2023, PT Pos Indonesia menandatangani MoU dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ID FOOD
- 15 Maret 2023 12th Anugrah BUMN Track Award 2023:
- CEO Driving Execution Terbaik / FRD
- POS Indonesia, BUMN Strategi Pemulihan Terbaik I
- Pos Properti, Anak Perusahaan BUMN Strategi Pemulihan Terbaik II
- 16 Maret 2023 Indonesia CSR *Excellence Award* 2023

JUNI



- Pada bulan Juni 2023, PT Pos Indonesia (Persero) menerima kembali dua asetnya dari Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Pertama, satu unit bangunan ruko di Ternate Utara, Maluku Utara. Kedua, ruko di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset, Syaifudin Tagamal kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pos Indonesia (Persero) Bapak Endy P.R. Abdurrahman.
- 14 Juni 2023 Tinjauan Menteri BUMN di Proyek PosBloc Surabaya

SEPTEMBER



- 27 September 2023 Upacara Hari Bhakti Postel ke-78

DESEMBER



- 13 Desember 2023 Kunjungan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyaluran Bantuan Sosial Elnino | Pekalongan
- 14 Desember 2023 Kunjungan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyaluran Bantuan Sosial Elnino | KCU Malang
- 21 Desember 2023 FGD Sinergi dan Integrasi BUMN *Logistic Service Provider* dengan BUMN Cargo Owner

JULI



- 5 Juli 2023 Penghargaan Human Capital 2023
- Pada tanggal 20 Juli 2023 penandatanganan Kesepakatan Kerjasasama Pos Indonesia dan Bina Karya

OKTOBER



- 2 Oktober 2023 Penandatangan PKS dengan Bank BCA
- 10 Oktober 2023 FGD Percepatan Peningkatan Sinergi dan Integrasi Logistik Ekosistem BUMN.
- 24 – 25 Oktober 2023 UPU Parcel and PostExpo 2023

AGUSTUS



- Pada tanggal 26 Agustus 2023, yang bertepatan dengan acara puncak Hari Ulang Tahun Pos Indonesia ke-277, PT Pos Indonesia (Persero) meresmikan *creative hub* yang diberi nama *Corporate Brand* POSCO. Seperti Pos *Bloc* Jakarta, POSCO Bandung merupakan wadah kreativitas bagi penggiat industri kreatif mulai dari kuliner, musik, *craft*, maupun hobi. Berlokasi di pusat kota, POSCO Bandung menyasar kaum muda Bandung maupun wisatawan.

NOVEMBER



- Pada tanggal 16 November 2023, Pos Bloc Surabaya akhirnya diresmikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Erick Thohir. Pos Bloc sendiri difungsikan sebagai ruang kreatif bagi berbagai acara seni, budaya, pertemuan komunitas kreatif, hiburan, pemberdayaan bisnis UKM dan UMKM yang telah dikurasi.
- Pada tanggal 27 November 2023 Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen PPI Kementerian Kominfo) Wayan Toni Supriyanto didampingi oleh Direktur Utama PosIND Faizal Rochmad Djoemadi meresmikan Pembukaan 84 Kantor Cabang Pembantu Layanan Pos Universal (KCP LPU) Baru dan Standardisasi KCP LPU



2

Laporan Kepada Pemegang Saham


POS
IND
Logistik Indonesia



Transformasi dan inovasi merupakan elemen penting perusahaan untuk terus bertumbuh dan berkembang. Pada tahun 2023 PT Pos Indonesia (Persero) telah berhasil mengimplementasikan 27 program kerja yang terdiri dari 14 Program Transformasi dan 13 Program Inovasi. Dari 27 program kerja tersebut, 13 program memberikan *impact* kepada pendapatan, 10 program memberian *impact* kepada peningkatan kualitas operasi, dan 4 program pengembangan bisnis dan inovasi perusahaan.

Dewan Komisaris terus berupaya melakukan pengawasan jalannya Perusahaan agar tetap dalam koridor *Governance, Risk, and Compliance* yang telah disepakati bersama untuk tetap relevan sepanjang masa.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami selaku Dewan Komisaris menyampaikan laporan Pengawasan pengurusan PT Pos Indonesia (Persero) tahun buku 2023. Ditengah persaingan yang semakin ketat pada industri kurir logistik dan jasa keuangan, PT Pos Indonesia (Persero) berupaya memperbesar pangsa pasarnya. Tentu saja upaya ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan disertai dengan pengawasan yang baik. Dewan Komisaris terus mendorong Direksi agar *mindset* digital melekat pada setiap kebijakan dan strategi perusahaan.

Dewan Komisaris yakin segala upaya dan strategi yang dijalankan Direksi beserta seluruh jajarannya mampu menjadikan PT Pos Indonesia (Persero) lebih baik, menuju Perusahaan logistik yang terkemuka sesuai dengan Aspirasi Pemegang Saham.

Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan Perusahaan dan dasar penilaiannya.

Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris yaitu memastikan proses transformasi berkelanjutan tetap konsisten dan sesuai dengan koridor yang disepakati baik dalam rencana jangka pendek (RKAP) maupun jangka panjang (RJPP). Sepanjang 2023 Dewan Komisaris melakukan pengawasan melalui evaluasi atas Laporan Manajemen bulanan, triwulanan dan laporan lainnya dalam Rapat Internal Dewan Komisaris. Penyampaian saran/pendapat maupun nasihat kepada Manajemen dilakukan pada Rapat Komisaris dengan Direksi (Rakomdir) dan Rapat Komisaris/Komite dengan Manajemen.

Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara individu selama tahun 2023. Penilaian dilakukan berdasarkan parameter *capacities* dan *performance*, yang salah satu aspeknya berupa realisasi KPI Direksi per Direktorat. Hasil penilaian Dewan Komisaris terhadap Direksi per Direktorat adalah sebagai berikut:

Ringkasan evaluasi Dewan Komisaris untuk Direksi antara lain:

1. Melakukan langkah-langkah eksekusi yang kuat dan konsisten untuk memastikan tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RKAP.
2. Merealisasikan program kerja untuk menjaga pertumbuhan bisnis dan target pendapatan.
3. Meningkatkan efektivitas strategi pengembangan pendapatan Perusahaan, melalui produk-produk yang telah didukung aplikasi agar diikuti dengan tenaga operasional dan infrastruktur jaringan yang memadai.
4. Realisasi anggaran modal (*capital expenditure*) dilakukan berbasis *outcome* dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan dampak langsung terhadap pendapatan.
5. Memanfaatkan *Data Analytic* untuk menetapkan strategi yang tepat, serta menaikkan *profit margin* dengan menambah pangsa pasar yang spesifik, fokus kepada kebutuhan pelanggan.
6. Melakukan evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga agar dipastikan saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
7. Melakukan evaluasi kinerja berbasis regional dan produk agar pertumbuhan kinerja menjadi lebih baik di tahun-tahun berikutnya.
8. Menjaga *governance* dalam pengelolaan biaya agar pengeluaran biaya lebih efisien dan memberikan dampak positif terhadap laba.
9. Melakukan percepatan penyelesaian NPP (Nota Permintaan Pembayaran) dalam upaya pengendalian biaya.
10. Untuk perbaikan mutu produk dan layanan yang diindikasikan oleh perbaikan kinerja SWP (Standar Waktu Penyerahan) dan CCH (*Customer Complain Handling*), Direksi agar lebih intens meningkatkan citra perusahaan guna meningkatkan volume penjualan.
11. Memastikan pelaksanaan Program Transformasi dan Inovasi yang telah ditetapkan agar dapat berdampak positif terhadap kinerja dan pendapatan PT Pos Indonesia (Persero).

12. Optimalisasi ekspansi bisnis logistik dan jasa keuangan melalui kolaborasi dengan Pemerintah/BUMN/BUMD.
13. Mengefektifkan tugas *Task Force* piutang yang telah dibentuk untuk melakukan upaya penagihan piutang perusahaan.
14. Perlu adanya fungsi di organisasi yang melakukan A/B Testing Marketing secara berkala agar dapat menemukan formulasi terbaik untuk memaksimalkan layanan *retail* yang berpotensi menjadi *product champion*.
15. Meningkatkan transformasi *human capital* pada kompetensi *digital talent* untuk mendukung *Data Driven Decision Making*.
16. Memperbaiki sistem pengendalian internal dan manajemen risiko untuk melakukan pengawasan yang bersifat proaktif, sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan yang bisa merugikan perusahaan (*early warning system*).
17. Menerapkan sanksi atau penindakan disiplin yang tegas atas setiap *fraud* yang terjadi, sehingga bisa terbangun wibawa Manajemen serta terciptanya *control environment* yang baik.
18. Melakukan percepatan dan penguatan transformasi perusahaan dalam rangka peningkatan *revenue*, efisiensi biaya dan peningkatan *company value*.
19. Menjalankan kegiatan perusahaan dengan selalu mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.

Pandangan atas prospek usaha Perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya

Dewan Komisaris telah melakukan telaah atas Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RRKAP) Tahun 2024 yang termasuk di dalamnya prospek usaha Perusahaan. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024 mengusung tema **"Mewujudkan Pos Indonesia sebagai Orkestrator Logistik yang Terpercaya dan Terkemuka dalam Ekosistem BUMN"**. RKAP disusun dengan memperhatikan Analisis Strategi yang mencakup perubahan lingkungan bisnis Perusahaan, berpedoman kepada Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal (APS).

Dewan Komisaris menyampaikan bahwa komitmen yang kuat serta upaya yang sungguh-sungguh dari manajemen dan segenap jajaran PT Pos Indonesia (Persero) adalah prasyarat agar seluruh program kerja dan target yang ditetapkan dalam RKAP Tahun 2024 dapat tercapai, sehingga harapan seluruh *stakeholders* dapat terpenuhi. Berkenaan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi hal-hal sebagai berikut:

1. Memohon persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas perbedaan target keuangan dan besaran jumlah peruntukan anggaran Investasi (*CAPEX*) RKAP Tahun 2024 dengan target dan anggaran Tahun 2024 dalam RJPP Tahun 2020-2024.
2. Segera menyosialisasikan RKAP Tahun 2024 agar menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari oleh seluruh insan Pos.

3. Segera melakukan *cascading* dan menjabarkan RKAP Tahun 2024 kedalam rencana bulanan, menurunkan *key performance indicator* kepada unit-unit kerja dan target kinerja individual. Hendaknya matriks RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*) dapat terimplementasikan dengan baik di Regional dan Kantor Cabang Utama/ Kantor Cabang.
4. Mempersiapkan kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan dari berbagai aspek untuk bertransformasi menjadi Orkestrator BUMN Logistik seperti aspek: Leadership, SDM, Teknologi dan Operasional.
5. Menerapkan *performance management* berbasis *outcome* per kuartal dan menetapkan *profile* dari *digital capabilities front liner* beserta targetnya.
6. Melakukan percepatan digitalisasi dan digitisasi secara terintegrasi pada seluruh proses bisnis, terutama bisnis kurir, logistik dan jasa keuangan yang mampu menyediakan fitur-fitur layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan.
7. Meningkatkan *brand awareness* atas layanan unggulan PT Pos Indonesia (Persero) kepada generasi milenial dan gen-z melalui strategi komunikasi marketing yang jelas, tertata dan konsisten.
8. Mengusahakan peningkatan jumlah transaksi yang berkelanjutan pada Pospay (PDAM, Pulsa, PLN, PBB, KAI dan lain-lain)
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan kas (*cash management*), melalui perbaikan pengelolaan piutang usaha termasuk administrasi penagihan piutang usaha.
10. Meningkatkan kualitas:
    a. Penguatan dan penerapan manajemen risiko dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang mungkin mempengaruhi pencapaian target RKAP. Implementasi manajemen risiko dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
    b. Peran SPI dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal dengan cara yang lebih tajam dan tuntas, sehingga dapat diidentifikasikan sebab-sebab mendasar kelemahan yang ada.
    c. Penerapan GCG yang lebih baik dan konsisten sesuai Peraturan Menteri BUMN RI Nomor : PER-2/ MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
    d. Meningkatkan akuntabilitas dan tertib administrasi dengan menindaklanjuti seluruh temuan dari auditor eksternal (BPK dan Kantor Akuntan Publik) maupun auditor internal perusahaan (SPI).

Dewan Komisaris berkeyakinan seluruh rencana kerja dan prospek usaha yang disampaikan oleh Direksi telah melalui proses analisis yang baik, sehingga target–target yang telah ditetapkan akan tercapai dan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Pandangan atas penerapan/pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) di Perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut

Dewan Komisaris mendorong penerapan WBS yang efektif dan optimal serta terus memperbarui acuan penerapan WBS sesuai dengan *best practice* yang berlaku umum. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi Pos Indonesia pada tahun 2022 menerbitkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.026/DIRUT/0322 dan Nomor 072/DEKOM/0322 tanggal 31 Maret 2022 tentang *Whistleblowing system* di PT Pos Indonesia (Persero) sebagai acuan dalam penerapan WBS yang efektif.

WBS berperan memberikan pedoman kepada seluruh Insan Pos atas diketahuinya tindak pidana korupsi, kecurangan dan/ atau pelanggaran terhadap perusahaan. Memberikan pedoman pimpinan perusahaan, sehingga memiliki kesempatan untuk mengatasi permasalahan secara internal terlebih dahulu, sebelum permasalahan tersebut merebak ke ruang publik yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. WBS harus menjadi pedoman bagi seluruh Insan Pos dalam menindak lanjuti terjadinya pelaporan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Untuk itu penerapan WBS secara efektif diperlukan sebagai sarana untuk mendorong partisipasi karyawan dan masyarakat melaporkan pelanggaran, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dalam mencegah terjadinya pelanggaran, kecurangan dan korupsi di perusahaan. Komite audit selaku pengadministrasi WBS selalu mengawasi pengelolaan WBS, laporan administrasi pengelolaan WBS dibuat tiap triwulan dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris yaitu:

1. Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan IV tahun 2022 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.13031/ KAD 100/KA/2023 tanggal 27 Januari 2023, perihal : Laporan Pengelolaan Administrasi *Whistle Blowing System* (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan IV Tahun 2022.
2. Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan I tahun 2023 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.46339/ KAD 100/KA/2023 tanggal 17 April 2023, perihal: Laporan Pengelolaan Administrasi *Whistle Blowing System* (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan I Tahun 2023.
3. Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan I tahun 2023 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.71150/KAD 100/KA/2023 tanggal 31 Juli 2023, perihal: Laporan Pengelolaan Administrasi *Whistle Blowing System* (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan II Tahun 2023.
4. Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan I tahun 2023 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.90646/ KAD 100/KA/2023 tanggal 18 Oktober 2023, perihal: Laporan Pengelolaan Administrasi *Whistle Blowing System* (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan III Tahun 2023

Dewan Komisaris menilai pengelolaan/ pelaksanaan WBS pada Tahun 2023 sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian penyempurnaan WBS tetap perlu dilakukan agar berjalan baik dan efektif

Perubahan komposisi Dewan Komisaris.

Berikut adalah komposisi Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2023:

1. Rhenald Kasali Komisaris Utama
2. Condro Kirono Komisaris Independen
3. Robben Rico Komisaris
4. Guntur Iman Nefianto Komisaris
5. Gunawan Hutagalung Komisaris

Dengan adanya pengunduran diri Bapak Condro Kirono sebagai Komisaris Independen yang dikukuhkan pada tanggal 18 Januari 2024, maka telah diangkat Bapak I Gde Made Kartikajaya sebagai Komisaris dengan SK Menteri no SK-14/MBU/01/2024





Tahun 2023 menjadi tahun yang sangat penting bagi PT Pos Indonesia. Melalui implementasi program Transformasi yang terus dilakukan secara konsisten, berhasil memberikan impact terhadap pencapaian kinerja Perusahaan yang sangat membanggakan yaitu ***Double Digit Growth*** di mana *Revenue* growth 18,6%, *Net Income growth* 14,3% serta *Asset growth* 22,6%. Seluruh capaian kinerja ini merupakan buah dari Kerja Keras, Kerja Cerdas & Integritas yang dibangun oleh seluruh insan Pos Indonesia.

Secara garis besar, capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pendapatan tercapai Rp. 5.479,1 miliar atau tumbuh 18,6% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 4.618,4 miliar;
- Laba bersih setelah pajak tercapai Rp. 728,2 miliar atau tumbuh 14,3% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 637,1 miliar.
- Aset tercapai Rp. 13,7 triliun atau tumbuh 22,6% dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 11,1 triliun.
- Skor Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2023 tercapai sebesar 79,00 dengan kategori Sehat "A".

Selama tahun 2023, perusahaan telah meng-eksekusi berbagai program kerja yang terdiri dari 14 Program Transformasi dan 13 Program Inovasi yang terbagi menjadi 13 program memberikan impact kepada pendapatan, 10 program memberian impact kepada peningkatan kualitas operasi & 4 program pengembangan bisnis dan inovasi perusahaan. Seluruh implementasi program tersebut memberikan impact yang signifikan terhadap peningkatan kualitas operasi & pelayanan kepada *customer*. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja operasional yang sangat menggembirakan yaitu :

- Standar Waktu Penyerahan (SWP) tercapai >98% dari *benchmarking* SLA yang ditetapkan *marketplace*
- Tingkat Irregularitas kiriman tercapai < 0,3 PPM, dibawah target maksimum 2 PPM
- Availability aplikasi, teknologi dan jaringan tercapai >99,99%
- Customer Complain Handling (CCH) < 24 jam tercapai 99,76%

Program kerja utama yang berhasil dieksekusi selama tahun 2023 diantaranya,

- *Launching platform* Pospay *Super apps*, merupakan *mobile platform* yang menggabungkan layanan kurir dan layanan jasa keuangan yang akan memberikan kemudahan pelanggan dalam melakukan transaksi.
- Perubahan *brand* menjadi POSIND sebagai langkah perusahaan menuju *Logistics Company*
- Peningkatan *value asset* Perusahaan melalui pembangunan *Creative Hub PosCo* di Bandung, merupakan penyediaan sarana dalam mewadahi usaha UMKM dan kegiatan komunitas kreatif.
- Pemanfaatan *Cloud Technology* seluruh aplikasi dan *database* yang ber*impact* kepada peningkatan kelincahan dan kehandalan serta *realtime* 24/7 data *processing* & *analytics*.
- Peningkatan kapasitas *War Room 24/7* untuk melakukan monitoring & kontrol seluruh proses operasional
- Peningkatan *Journey Customer Experience* melalui berbagai perubahan fitur & layanan berbasis *Voices* of *Customer*

Untuk mendukung penerapan dan penguatan manajemen risiko perusahaan, telah dilakukan digitalisasi proses monitoring implementasi manajemen risiko yaitu dengan peluncuran Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIS) yang berfungsi melakukan Asesmen Risiko Mandiri untuk kegiatan perencanaan bisnis dan strategis Perusahaan. Pencapaian hasil *assessment* RMI dengan *score* 3,61 kriteria *Good Practice* AA menunjukan bahwa tingkat *Risk Awareness* Pos Indonesia semakin baik.

Selama perjalanan tahun 2023 terdapat beberapa peristiwa penting yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja tahun 2023 diantaranya,

1. Penugasan Pemerintah

Perusahaan telah melakukan beberapa proyek & penugasan pemerintah diantaranya adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyaluran Bantuan El Nino, penyaluran Cadangan Bantuan Pangan (CBP) dan penyaluran Bantuan Sosial Daerah dengan total *revenue* sebesar 1,33 triliun.

2. Merek dan Logo

Perusahaan telah melakukan perubahan merek dan logo baru yang telah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan nomor surat : S-532/MBU/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Persetujuan Perubahan Merek dan Logo PT Pos Indonesia (Persero). Merek dan logo baru Perusahaan yang telah disetujui adalah POSIND.

3. Loan

Perseroan pada Tahun 2023 melakukan *Debt to Equity Swap (DES)* atau konversi hutang pokok (*shareholder loan*) pada anak perusahaan Pos Logistik Indonesia (PosLog) sebanyak 69.500 lembar saham atau setara dengan Rp 69.500.000.000. Dengan adanya penambahan saham tersebut, maka yang semula saham milik perusahaan sebanyak 174.000 lembar saham naik menjadi sebanyak 243.500 lembar saham atau setara dengan Rp 243.500.000.000.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksanaan KAP terhadap Kinerja Perusahaan tahun 2023 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut,

1. Opini Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2023 disajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi Keuangan Konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja Keuangan Konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 mencatat Total Aset sebesar 13,66 triliun atau terdapat pertumbuhan Aset sebesar 22,62% dari tahun 2022 sebesar 11,14 triliun. Ekuitas (hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban) tercatat sebesar 8,18 triliun atau terdapat perubahan ekuitas sebesar 17,36% dibanding tahun 2022 sebesar 6,97 triliun. Perubahan ekuitas selain dipengaruhi oleh kinerja laba Perusahaan, juga dipengaruhi oleh *Other Comprehensive Income* (OCI) yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari penyajian Laporan Laba Rugi perusahaan secara keseluruhan akibat revaluasi Properti Investasi.
3. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain, mencatat Revenue sebesar 5,479 triliun. Terdapat kenaikan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,64% dibanding tahun 2022 sebesar 4,618 triliun, sehingga Perusahaan bisa menutup tahun buku 2023 dengan Laba Bersih tahun berjalan (EAT) sebesar 728,21 miliar atau tumbuh sebesar 14,31% dibanding laba tahun 2022 sebesar 637,05 miliar.
4. Laporan Arus Kas Konsolidasian menunjukkan posisi arus kas operasi sebesar 66,79 miliar dalam posisi positif artinya semua arus kas keluar operasional perusahaan mampu dibiayai dengan arus penerimaan kas pendapatan.
5. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja menunjukkan Tingkat Kesehatan Perusahaan yang dihitung berdasarkan SK Menteri BUMN nomor: KEP-100/MBU/2002, dengan total skor atas hasil penilaian kinerja tahun 2022 sebesar 79,00 dengan predikat/ dikategorikan "SEHAT A".

6. Laporan Hasil Evaluasi *Key Performance Indicators* (KPI) menunjukkan bahwa Skor *key performance indicator* (KPI) atas hasil penilaian kinerja manajemen PT Pos Indonesia (Persero) secara Kolegial tercapai sebesar 84,90.

Pada tahun 2023 terjadi perubahan susunan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) yang didasarkan pada salinan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia No.SK-260/MBU/09/2023 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia.

Berdasarkan keputusan menteri tersebut, maka susunan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) menjadi sebagai berikut :

1. Faizal Rochmad Djoemadi sebagai Direktur Utama,
2. Tonggo Marbun sebagai Direktur Bisnis Kurir dan Logistik,
3. Haris sebagai Direktur Bisnis Jasa Keuangan,
4. Prasabri Pesti sebagai Direktur *Business Development* dan *Portfolio Management*,
5. Hariadi sebagai Direktur Operasi dan *Digital Services*,
6. Asih Kurniasari K. sebagai Direktur *Human Capital Management*,
7. Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Semoga apa yang telah kita capai selama tahun 2023 dapat memberikan sumbangsih terbaik bagi seluruh stake holder Pos Indonesia. Kita tidak boleh cepat berpuas diri atas apa yang telah berhasil diraih, akan tetapi harus bertekad untuk terus melakukan perbaikan di tahun-tahun mendatang yang akan penuh dengan tantangan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Aamiin.



Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2023 PT Pos Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Bandung, 2024

Dewan Komisaris

Rhenald Kasali
Komisaris Utama

Guntur Iman Nefianto
Komisaris

Gunawan Hutagalung
Komisaris

Robben Rico
Komisaris

I Gde Made Kartikajaya
Komisaris

Direksi



Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur Utama



Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko



Hariadi
Direktur Operasi dan Digital Services



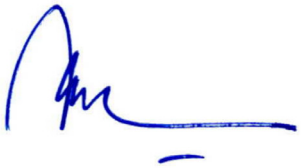
Tonggo Marbun
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik



Haris
Direktur Bisnis Jasa Keuangan



Prasabri Pesti
Direktur Business Development dan Portfolio Management



Asih Kurniasari Komar
Direktur Human Capital Management



3

Profil Perusahaan


POS
IND
Logistik Indonesia

Identitas Perusahaan

Dasar Hukum Pendirian Usaha

Akta Notaris Sutjipto, S.H Nomor : 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir pada Tahun 2023 dengan Akta Notaris Nomor : 1 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Raisha Kinanti S.H., M.KN., di Kota Bogor.

Status

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Perusahaan beroperasi sebagai entitas bisnis yang berorientasi laba, dan sebagai perusahaan layanan publik ditugaskan negara untuk menyelenggarakan *Public Service Obligation (PSO)* dengan memberikan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (BO LPU).

Modal Dasar Rp.1.500.000.000.000,00
Modal ditempatkan dan disetor penuh Rp.455.023.000.000,00

NPWP : 01.001.620.2-093.000
NIB : 9120405752938
Berdiri : 26 agustus 1746
Beroperasi : 26 agustus 1746

Telepon : (022) 421 3640
Faksimili : (022) 422 4552
E-mail : halopos@posindonesia.co.id
Website : www.posindonesia.co.id

Bidang Usaha

- Usaha jasa pos dan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (*account*);
- Usaha jasa komunikasi, jasa logistik, jasa ritel, jasa keagenan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Usaha pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang kegiatan utama Perseroan.

Alamat dan Domisili Usaha

Jl. Banda No. 30 Bandung 40115 Jawa Barat - Indonesia

Perubahan Nama Perusahaan

PT Pos Indonesia (Persero) sebelumnya menggunakan nama Dinas PTT (Post, Telegraaf, en Telefoondienst) kemudian berubah menjadi Djawatan PTT (Pos, Telegrap, Telepon) pada tahun 1945; kemudian berubah status menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) di tahun 1961; dan menjadi PN Pos & Giro di tahun 1965, serta kemudian menjadi Perum Pos dan Giro di tahun 1978. Nama PT Pos Indonesia (Persero) secara resmi digunakan pada tahun 1995 hingga saat ini.

Sejarah panjang Pos Indonesia bermula ketika Kantor Pos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jenderal G.W Baron Van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik.

Setelah Kantor Pos Batavia didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan Kantor Pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan.

Pada awalnya Pos Indonesia berstatus Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Dinamika di sektor pos dan telekomunikasi berkembang begitu cepat membuat Pos Indonesia harus menyesuaikan diri maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri.

Masa-masa keemasan industri perposan ada di tahun-tahun 1970 hingga 1980an. Masyarakat pengguna jasa pos sangat setia memanfaatkan layanan pos. Namun pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan gaya hidup, serta tren liberalisasi bisnis jasa pos membuat PT Pos Indonesia (Persero) mengalami pergeseran bisnis yang sangat signifikan. Seperti juga dialami banyak perusahaan pos di dunia, PT Pos Indonesia (Persero) sempat mengalami penurunan kinerja usahanya di tahun 2000-2007. Bisnis suratpos di tahun-tahun tersebut menurun drastis. Penggunaan pesan singkat melalui telepon selular dan internet menggantikan peran surat pos individu. Demikian juga persaingan kiriman barang dengan para perusahaan kurir swasta membuat pangsa pasar PT Pos Indonesia (Persero) tergerus. Keadaan tersebut memaksa PT Pos Indonesia (Persero) untuk berubah dan melakukan transformasi bisnis.

Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi,

Jejaring Pos Indonesia

3.870 Kantor Pos online,

23 e-mobile pos

266 loket extension,

13.878 agenpos kurir,

101.324 agenpos jasa keuangan

3.500 Oranger,

1.166 Oranger mawar,

56.111 PosAja! Drop Point.

Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid & terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah *processing* kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat.

Sejak tahun 2009 hingga saat ini manajemen terus berbenah untuk membangun kompetensi perusahaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui berbagai program transformasi internal dan bisnis perusahaan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat telah menjadi pemicu percepatan proses komunikasi sehingga lebih cepat, praktis dan mudah. Sebagai salah satu penyedia jasa penyaluran informasi dan komunikasi, industri pos juga mengalami dampak dari perkembangan tersebut. Beberapa dampak yang dialami oleh perusahaan adalah terjadinya penurunan volume kiriman surat serta penurunan transaksi jasa keuangan akibat banyak bermunculannya *provider payment poin online bank* (PPOB) berbasis aplikasi maupun web.

Terjadi perubahan signifikan pada pasar sejak 2020 sehingga Pos harus bergerak lebih cepat dan tepat diantaranya:

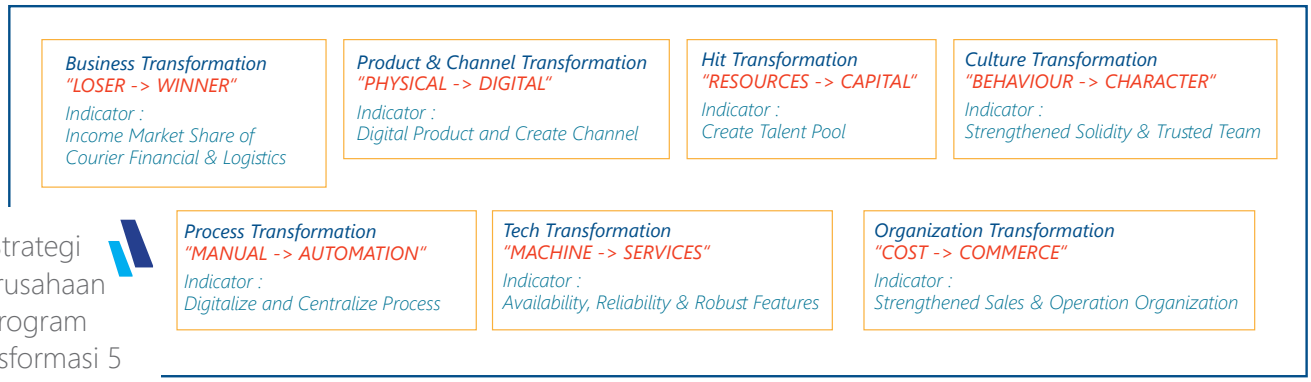
1. Pandemi mengakibatkan penurunan ekonomi makro yang sangat signifikan pada tahun 2020 Akibatnya, sempat terjadi perlambatan ekonomi pada banyak sektor bisnis di Indonesia yang mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ke depan.
2. Layanan digital semakin berkembang pesat akibat perubahan gaya hidup masyarakat pasca pandemi Akibatnya, solusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat semakin banyak dikemas dalam bentuk digital yang mendorong bisnis untuk semakin fleksibel dalam berinovasi.
3. Kompetitor semakin gencar melakukan inovasi dan akuisisi.

4. Banyak Korporasi akan mengurangi space untuk bisnisnya pada masa *New Normal* (*Virtual Activity)* Dampak dari *New Normal* setelah pandemic akan mempengaruhi perilaku dunia usaha dimana akan terjadi kolaborasi dan aktivitas secara *Virtual*.
5. Terganggunya kegiatan ekspor dan impor akibat berkurangnya kegiatan cargo udara sehingga mendorong aktivitas melalui kontainer laut. Akibat *pandemic* menyebabkan kegiatan *cargo* udara banyak yang terhenti karena tidak adanya aktivitas penerbangan antarnegara, sehingga akan lebih banyak ekspor dan impor melalui jalur laut *via* kontainer.
6. Industri Kurir, Logistik, Jasa Keuangan dan Properti telah mengalami perubahan signifikan pada masa pandemi. Dampak dari kondisi pandemic telah merubah tatanan perekonomian dan kebiasaan baru dari masyarakat. Hal ini berdampak juga pada perubahan ekosistem bisnis.
7. Meningkatnya *Touchless Interaction* sehingga mendorong untuk inovasi dalam *Digital Service* Dalam *New Normal* aktivitas akan semakin didorong pada interaksi secara digital dan hal ini akan mendorong transaksi uang *via* uang *virtual*.
8. Oleh karena itu, seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis yang memicu kepada persaingan yang semakin kompetitif, maka PT Pos Indonesia (Persero) terus melakukan transformasi dan melakukan perubahan *landscape* bisnis, sehingga tetap dapat memiliki daya saing yang kuat untuk bersaing dengan seluruh kompetitor bisnisnya.

Pada 2021 Pos Indonesia mencanangkan transformasi pada 7 elemen antara lain:

1. Transformasi pada sektor bisnis, yang dilakukan demi meningkatkan pangsa pasar di bidang bisnis inti, yaitu kurir, jasa keuangan dan logistik.
2. Transformasi *product and channel*, yang dilakukan melalui pembaruan operasional dan layanan teknologi informasi dari semula fisik menjadi digital.
3. Transformasi proses, yaitu melakukan program transformasi proses dari manual menjadi otomasi dengan digitalisasi dan sentralisasi proses.
4. Transformasi teknologi, yaitu untuk meningkatkan kelincahan, ketersediaan, keandalan, dan penguatan fitur pada setiap *platform* yang dimiliki Pos Indonesia.
5. Transformasi sumber daya manusia (SDM), melalui program transformasi dengan membangun SDM yang kompetitif. Selain itu, membangun kinerja yang produktif, dengan membangun sistem manajemen karyawan.
6. Transformasi organisasi dengan memperkuat proses penjualan dan operasional.
7. Transformasi budaya, yaitu dalam rangka mengubah dari perilaku menjadi karakter untuk membangun soliditas dan tim yang terpercaya.

Strategi perusahaan Program Transformasi 5 Tahun



Pada 2022 berbagai langkah transformasi yang dijalankan Pos Indonesia telah membuat proses bisnis dan internal terdigitalisasi sehingga layanan dan kinerja Perusahaan semakin baik dalam menghadapi tantangan yang semakin beragam. Komitmen PT Pos Indonesia (Persero) dalam memberi kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara tercermin dari peran-peran PT Pos Indonesia (Persero) sebagai berikut:

1. PT Pos Indonesia (Persero) sebagai *community center*, yaitu untuk melayani masyarakat melalui jasa-jasa yang diberikan;
2. PT Pos Indonesia (Persero) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melayani masyarakat;
3. PT Pos Indonesia (Persero) sebagai perantara komunikasi antar masyarakat, organisasi, hingga negara;
4. Menjadi salah satu infrastruktur negara, khususnya di bidang komunikasi dan logistik.

Sebagai BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas maka PT Pos Indonesia (Persero) tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, keberadaan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang bergerak dalam layanan bisnis surat, logistik dan jasa keuangan juga tunduk kepada berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Sebagai anggota *Universal Postal Union (UPU)*, PT Pos Indonesia (Persero) harus memperhatikan dua prinsip dasar dalam penyelenggaraan layanan pos, yaitu:

1. *SINGLE POSTAL TERRITORY*
   Berdasarkan prinsip ini, seluruh wilayah negara anggota UPU termasuk dalam wilayah pos tunggal sehingga Indonesia dianggap sebagai bagian dari wilayah pos tunggal yang merupakan kesatuan bagi pertukaran kiriman pos.
2. *FREEDOM OF TRANSIT*
   Berdasarkan prinsip ini, PT Pos Indonesia (Persero) dalam kapasitasnya sebagai operator ditugaskan dan mewakili negara, wajib menyalurkan atau meneruskan seluruh kiriman pos negara lain dengan sarana yang paling aman dan rute tercepat

1875 PTT (Post, Telegraaf,en Telefoondienst)

1945 Djawatan PTT (Pos, Telegrap, Telepon)

1961 Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel)

1965 PN Pos & Giro

1978 Perum Pos dan Giro

1995 PT Pos Indonesia (Persero)

Perubahan Nama Perusahaan



1875 POST EN TELEGRAAFDIENST

Dinas pos disatukan dengan dinas telegrap dengan status jawatan dengan nama POST EN TELEGRAFDIENST.

1877 UNION POSTALE UNIVERSELLE

Sejak pemerintahan kolonial dinas pos pemerintahan Hindia Belanda sudah berhubungan dalam pengiriman surat dan barang secara internasional, sehingga tercatat sebagai anggota Union Postale Universelle (UPU).

1906

Pemerintah Hindia Belanda membentuk Dinas PTT (Post, Telegraaf, en Telefoondienst)

1945 HARI BAKTI POSTEL

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, jawatan PTT dikuasai oleh militer Jepang, 27 September 1945 Angkatan Muda PTT mengambil alih kekuasaan PTT dan secara resmi berubah menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Peristiwa tersebut diperingati menjadi Hari Bakti PTT atau Hari Bakti POSTEL.

1965 PN POS DAN GIRO

Mengamati perkembangan zaman di mana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro).

1978 PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO

Pada tahun 1978 berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas suratpos dan dinas giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri.

1988 DANA PENSIUN POS INDONESIA

Berdiri sebagai Badan Hukum yang menyelenggarakan Program Pensiun yaitu suatu program yang menjajikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

1991 PT DAPENSI DWI KARYA.

Salah satu unit usaha Dapenpos yang bergerak dibidang jasa layanan transportasi yang mendukung kegiatan PT Pos Indonesia (Persero) dan perusahaan-perusahaan lainnya

1992 PT DAPENSI TRIO USAHA

Salah satu unit usaha Dapenpos sekaligus sebagai afiliasi PT Pos Indonesia (Persero) dengan konsentrasi bisnis Business Process Outsourcing (BPO), Cleaning Service, Security Service, Main Agent Pospay dan General Trading.

1995 PT POS INDONESIA (PERSERO)

Selama 17 tahun berstatus Perusahaan Umum. Pada tanggal 20 Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).

2000 YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA (YPBPI)

(YPBPI) bernaung sacara langsung dibawah pengawasan PT Pos Indonesia (Persero) berdiri dibidang institusi pendidikan tinggi.

2001 POLITEKNIK POS INDONESIA

Politeknik Pos Indonesia merupakan institusi yang didirikan oleh YPBPI berdiri dengan bidang Perguruan Tinggi pada jalur Diploma III dan Diploma IV

2012 PT POS LOGISTIK INDONESIA

PT Pos Logistik Indonesia berdiri dengan bidang usaha jasa transportasi, jasa pergudangan, pengiriman kargo, dan regulated agent atau agen inspeksi.

2013 PT POS PROPERTI INDONESIA

PT Pos Properti Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk memberikan solusi bisnis dalam bidang property development dan property management consultant.

2013 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN LOGISTIK (STIMLOG)

STIMLOG merupakan institusi yang didirikan oleh YPBPI, berdiri dengan bidang Perguruan Tinggi Manajemen Logistik untuk jenjang strata-1 (S1) yang pertama di Indonesia.

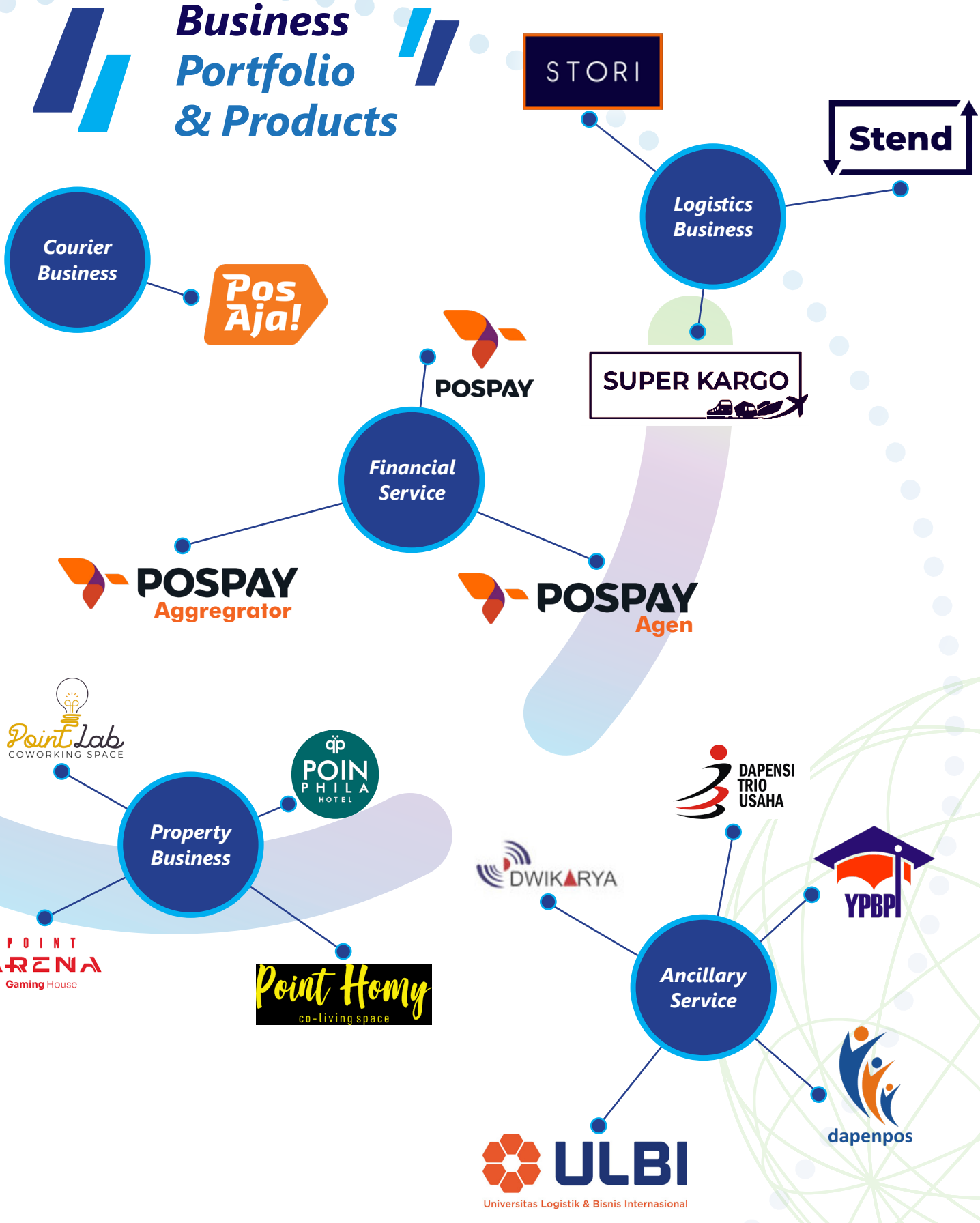
2019 PT POS FINANSIAL INDONESIA

PT Bhakti Wasantara Net bertransformasi menjadi PT Pos Finansial Indonesia (PosFin) dengan wajah baru dengan layanan berbasis teknologi yaitu digital payment dan digital solution

2021 PENATAAN DAN PENGUATAN FONDASI

Penataan kembali dan penguatan fondasi digitalisasi layanan Pos Indonesia dengan transformasi berkelanjutan untuk merebut kembali pangsa pasar dan menjadi "Top 25 Global Operator in UPU Rank" dan "Top 3 Domestic E-commerce Courier Provider

Business Portfolio & Products



Bidang Usaha

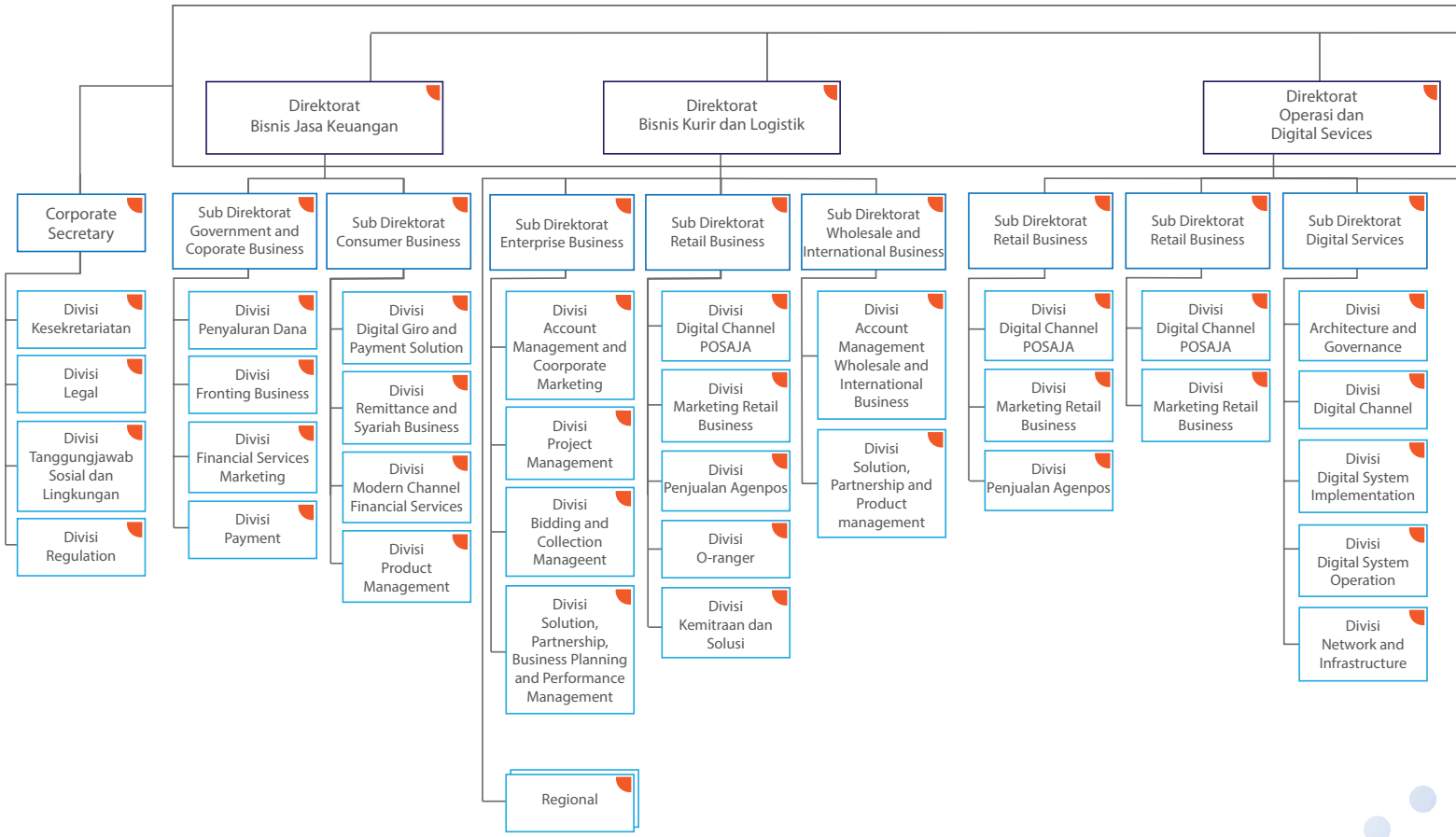
Berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 11 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. di Jakarta, perusahaan bertujuan untuk menyelenggarakan usaha pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

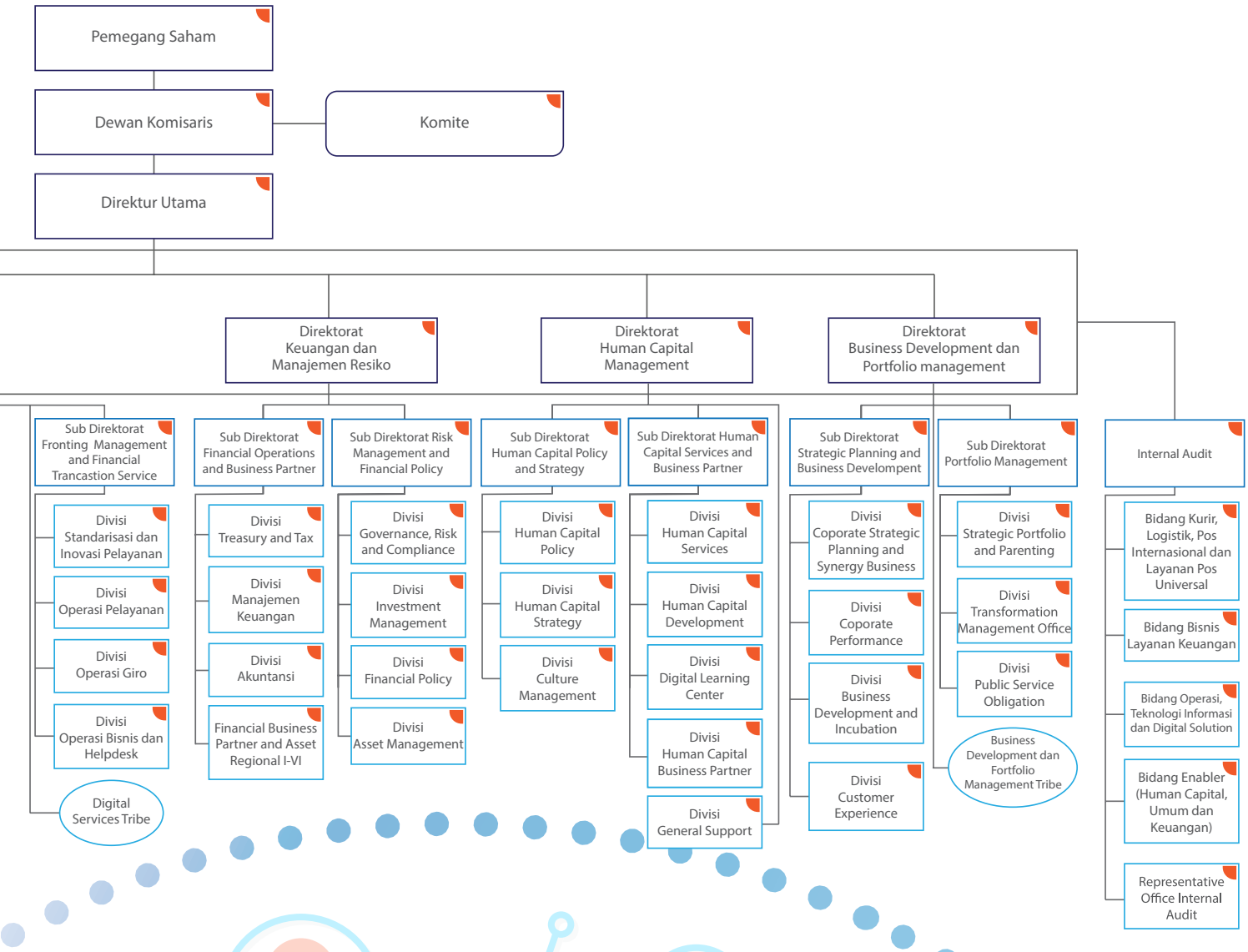
PT Pos Indonesia (Persero) senantiasa bertekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga mampu turut serta memajukan perekonomian nasional melalui paduan layanan yang diberikan hingga ke seluruh pelosok negeri. Hingga saat ini, PT Pos Indonesia (Persero) melaksanakan kegiatan pos dengan bertumpu kepada tiga bisnis inti yaitu layanan pengiriman surat dan paket, logistik, jasa keuangan, serta bisnis pendukung yaitu bisnis teknologi informasi dan bisnis ritel dan properti. Di masa depan, melalui sebaran dan luasnya jaringan yang dimiliki, PT Pos Indonesia (Persero) akan memanfaatkan jaringan tersebut untuk mengembangkan keseluruhan portfolio bisnisnya, sehingga PT Pos Indonesia (Persero) tidak hanya menjadi penyelenggara pos, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi perusahaan logistik yang terintegrasi dan mampu memberikan solusi.



Struktur organisasi

Berdasarkan Keputusan Direksi KD.072/DIRUT/0923 Tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (persero) Nomor KD.013/ DIRUT0323 Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia




Pemegang Saham
Dewan Komisaris
Komite
Direktur Utama
Direktorat Keuangan dan Manajemen Resiko
Direktorat Human Capital Management
Direktorat Business Development dan Portfolio management
Sub Direktorat Fronting Management and Financial Trancastion Service
Divisi Standarisasi dan Inovasi Pelayanan
Divisi Operasi Pelayanan
Divisi Operasi Giro
Divisi Operasi Bisnis dan Helpdesk
Digital Services Tribe
Sub Direktorat Financial Operations and Business Partner
Divisi Treasury and Tax
Divisi Manajemen Keuangan
Divisi Akuntansi
Financial Business Partner and Asset Regional I-VI
Sub Direktorat Risk Management and Financial Policy
Divisi Governance, Risk and Compliance
Divisi Investment Management
Divisi Financial Policy
Divisi Asset Management
Sub Direktorat Human Capital Policy and Strategy
Divisi Human Capital Policy
Divisi Human Capital Strategy
Divisi Culture Management
Sub Direktorat Human Capital Services and Business Partner
Divisi Human Capital Services
Divisi Human Capital Development
Divisi Digital Learning Center
Divisi Human Capital Business Partner
Divisi General Support
Sub Direktorat Strategic Planning and Business Developmpent
Divisi Coporate Strategic Planning and Synergy Business
Divisi Coporate Performance
Divisi Business Development and Incubation
Divisi Customer Experience
Sub Direktorat Portfolio Management
Divisi Strategic Portfolio and Parenting
Divisi Transformation Management Office
Divisi Public Service Obligation
Business Development dan Fortfolio Management Tribe
Internal Audit
Bidang Kurir, Logistik, Pos Internasional dan Layanan Pos Universal
Bidang Bisnis Layanan Keuangan
Bidang Operasi, Teknologi Informasi dan Digital Solution
Bidang Enabler (Human Capital, Umum dan Keuangan)
Representative Office Internal Audit

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor: 1 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Raisha Kinanti, S.H., M.Kn. Notaris di Bogor. Dengan status sebagai perseroan terbatas, Perusahaan beroperasi sebagai perusahaan layanan publik dan entitas bisnis yang berorientasi laba.

VISI, MISI dan TUJUAN

Visi

"Menjadi *Postal Operator*, Penyedia Jasa Kurir dan Keuangan Paling Kompetitif".

Misi

Bertindak efektif untuk mencapai *performance* terbaik.

Tujuan

Membangun bangsa yang lebih berdaya saing sejahtera.

Untuk mewujudkan visi dan misi, persyaratan utama (*key words*) yang perlu dilakukan adalah:

1. Memberikan produk yang relevan sesuai kebutuhan pasar;
2. Memberikan jasa layanan yang prima;
3. Menjalankan proses bisnis secara efisien;
4. Membangun solusi teknologi informasi yang prima dan *human capital* yang handal;
5. Memperkuat sistem pengendalian internal, governance, dan manajemen risiko untuk mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk mengamankan pencapaian tujuan perusahaan.

OBJEKTIF STRATEGIS

Objektif Strategis dibagi menjadi dua kategori yaitu objektif strategis "*primary*" dan objektif strategis "*secondary*" sebagai berikut :

Primary

"*Top 25 Global* Operator in UPU Rank"

Secondary

"*Top 3 Domestic E-commerce Courier Provider*"

Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan adalah karakter dan kepribadian dari Perusahaan, budaya perusahaan juga merupakan ringkasan dari nilai-nilai perusahaan, tradisi, interaksi, sikap dan perilaku dari setiap Insan Pos Indonesia. Untuk mendorong kinerja yang positif maka budaya perusahaan haruslah selaras dengan strategi dan kepemimpinan. Untuk mendukung terwujudnya visi, misi tujuan dan strategi bisnis, Pos Indonesia telah menetapkan AKHLAK sebagai nilai utama Budaya Perusahaan.

Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

Kompeten

Terus belajar mengembangkan kapabilitas

Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

Loyal

Berdedikasi & mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan

Kolaboratif

Membangun kerjasama yang sinergis

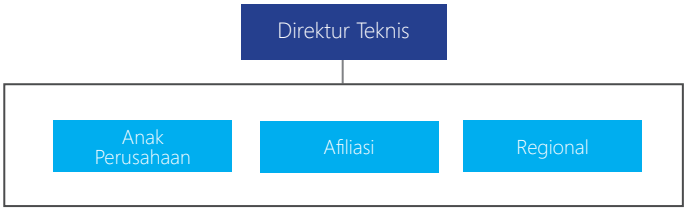
Kami bekerja secara amanah dan kompeten, dengan membangun hubungan yang harmonis dan sikap loyal, menjalankan bisnis secara adaptif, serta mengembangkan kerjasama kolaboratif.

Nilai-nilai AKHLAK

Selanjutnya diinternalisasikan dan dilaksanakan oleh setiap insan Pos Indonesia sehingga menjadi budaya kerja, diintegrasikan ke dalam sistem dan prosedur yang berlaku, dan menjadi dasar pembentukan karakter Sumber Daya Manusia di PT Pos Indonesia.

1. Memenuhi janji dan komitmen.
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
4. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
5. Membantu orang lain belajar.
6. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
7. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
8. Suka menolong orang lain.
9. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
10. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
11. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
12. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
13. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
14. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
15. Bertindak proaktif.
16. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
17. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
18. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Induk memiliki kontrol yang ketat terhadap strategi bisnis anak perusahaan & afiliasi agar tetap *inline* dengan strategi korporat. Oleh karena itu direktur yang terkait langsung dengan bisnis anak perusahaan & layanan afiliasi ditunjuk sebagai komisaris anak perusahaan



Parenting Strategy

PT Pos Indonesia (Persero) menentukan *parenting strategy* dengan pilihan *Strategic Control*. Pilihan strategi yang mengutamakan hubungan induk dengan anak :

1. *Strategi control* dengan memberikan otonomi dan otoritas korporasi.
2. Mekanisme *control* dengan *score card company performance*
3. Membuka *opportunity* kolaborasi optimasi *resources* dan *economies of scale*
4. *Sinergi Business lebih flesxible* dan *focus*.
5. Pengembangan Korporasi dengan *inorganic*.

Strategic Control

Filosofi Strategis
Sinergi dan Kompetensi inti

Peran *Holding*
Menentukan strategi anak perusahaan berbasis potensi sinergi dan kompetensi antar anak perusahaan

Peran Anak Perusahaan
Fokus di eksekusi operasional memberi masukan untuk strategi usaha

Ekosistem Bisnis
Low Similiar Businesses

Metode Kendali
- *Corporate Scorecard* yang komprehensif
- Target *Parenting Style* Selama Periode Transformasi

Makna logo

POS IND

POS

Diambil dari "Pos Indonesia", membawa aspirasi perusahaan untuk menjadi solusi layanan logistik yang terintegrasi dan efisien.

IND

Singkatan dari *Integrated National Distribution*. Kata "*Integrated*" mencerminkan sinergi dan kerja sama; "*National Distribution*" sebagai cerminan komitmen dan dedikasi untuk melayani berbagai kebutuhan logistik negara.

Logistik Indonesia

Merupakan deskripsi merek, sebagai penguat identitas dan tujuan perusahaan serta *statement* bahwa ini adalah Logistik Indonesia

Logo

Logo **POS IND** terdiri dari 2 elemen, yaitu:

Logotype

Menggunakan huruf kapital (*uppercase*) untuk memberi kesan perusahaan yang profesional dan terpercaya.

Deskripsi Merek

Ditulis dengan kapitalisasi judul (*title case*) untuk memberi tampilan profesional, serta untuk membedakannya dari elemen-elemen lain dalam logo.

Responsibility, Trust

Melambangkan perusahaan logistik yang bersinergi kuat, terpercaya, dan berkomitmen penuh untuk melayani kebutuhan sektor logitik negara.

Delft Blue

Hex	#1C205A
CMYK	100/90/35/30
RGB	28/45/90

Growth, Connection

Terinspirasi dari warna batu Cinnebar yang membawa filosofi tentang konektivitas, pertumbuhan, dan transformasi.

Cinnabar

Hex	#EF4123
CMYK	0/90/100/0
RGB	239/65/35



DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN susunan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	SK Menteri
Rhenald Kasali	Komisaris Utama	SK-223/MBU/07/2021
Condro Kirono	Komisaris Independen	SK-223/MBU/07/2021
Robben Rico	Komisaris	SK-85/MBU/04/2023
Guntur Iman Nefianto	Komisaris	SK-75/MBU/04/2019
Gunawan Hutagalung	Komisaris	SK-231/MBU/10/2022

Dengan adanya pengunduran diri Bapak Condro Kirono sebagai Komisaris Independen yang dikukuhkan pada tanggal 18 Januari 2024, maka telah diangkat Bapak I Gde Made Kartikajaya sebagai Komisaris dengan SK Menteri no SK-14/MBU/01/2024





Rhenald Kasali

Komisaris Utama

Lahir : Jakarta, 13 Agustus 1960
Usia : 63 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pos Indonesia (Persero) sejak 02 Juli 2021 berdasarkan SK-223/MBU/07/2021

Pendidikan

- S1 Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi & Bisnis, 1985
- S2 University of Illinois at Urbana & Champaign, USA, Faculty of Business Adminitration/MS, 1993
- S3 University of Illinois at Urbana & Champaign, USA, Faculty of Consumer Economics/Ph.D, 1998

Perjalanan Karir

- Yayasan Rumah Perubahan, 2007-sekarang
- Komisaris Utama PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, 2019 -2021
- Komisaris Utama PT. Angkasa Pura II (Persero), 2015-2019
- Wakil Ketua, Tim Independen Reformasi Birokrasi dan Penataan Organisasi Pemerintahan RI di bawah pimpinan Wapres & Kementerian PAN RB, 2015-Sekarang
- Komisaris Independen PT Indomobil Finance Indonesia, 2004-2009
- Pengajar Sespim dan Sespimti POLRI, 2000-sekarang
- Komisaris PT Dirgantara Indonesia, 2003- 2006
- Komisaris Independen PT Indofarma, Tbk, 2003-2006
- Komisaris PT Radio Smart FM, 2002-2009
- Komisaris PT Kemenangan Jaya, 2000-2007
- PLH Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional, 2005-2006
- Kepala Bagian Publikasi & Data Lembaga Manajemen FEUI, 1998-1992
- Director PT Djemat, Samhani & Partners, 1986-1988

Rangkap Jabatan

Tidak memliki rangkap jabatan di instansi, lembaga, atau perusahaan selain PT Pos Indonesia (Persero).



I Gde Made Kartikajaya

Komisaris

Lahir : Tabanan, 11 Desember 1966
Usia : 57 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) sejak 18 januari 2024 berdasarkan SK-14/MBU/01/2024

Pendidikan

- Pendidikan Doktor (S3) Jurusan Ekonomi pada Universitas Borobudur (2017)
- Pasca Sarjana (S2) Jurusan Administrasi Publik pada Universitas Medan Area (2009)
- Pasca Sarjana (S2) Jurusan Manajemen pada Institut Megister Manajemen Indonesia (2007)
- Pasca Sarjana (S2) Jurusan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Daerah pada Universitas Sumatera Utara (1996)
- Sarjana Strata (S1) Jurusan Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Jayanegara, Malang (1986)

Perjalanan Karir

- CO. Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) (1995)
- Kasubdit Ekonomi BIN (2011)
- Dosen Pengajar pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) (2014)
- Direktur Ekonomi BIN (2015)
- Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2022 - 2023)
- Deputi Intelijen Ekonomi BIN (2019 - sekarang)

Rangkap Jabatan

Deputi Intelijen Ekonomi BIN



Robben Rico

Komisaris

Lahir : Madiun, 13 September 1980
Usia : 43 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) sejak 13 April 2023 berdasarkan SK-85/MBU/06/2023

Pendidikan

- S-2 Ilmi Administrasi Universitas DR. Soetomo, 2018
- S-1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2008
- S-1 Ilmu Hukum Universitas Merdeka Surabaya, 2002
- DIII LLAJ STTD Bekasi, 2002

Perjalanan Karir

- Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas, Dishub Kota Surabaya, 2010 - 2017
- Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Surabaya, Dishub Kota Surabaya, 2017 - 2018
- Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Setda Kota Surabaya, 2018 - 2019
- (Plt) Kepala Bagian Administrasi Perekonomian , Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Surabaya, 2019
- Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, 2020 - 2021
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2021 - 2022
- (Plt) Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2022 - 2023
- Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2023

Rangkap Jabatan

Tidak memliki rangkap jabatan di instansi, lembaga, atau perusahaan selain PT Pos Indonesia (Persero)



Guntur Iman Nefianto

Komisaris

Lahir : Malang, 14 November 1963
Usia : 60 tahun.
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Bekasi, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) sejak 1 April 2019 berdasarkan SK-75/MBU/04/2019

Pendidikan

- DIII Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN (Jurusan Akuntansi), Jakarta, 1986
- S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Jurusan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), Jakarta/Depok, 1992
- S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (Jurusan Akuntansi), Jakarta/Depok, 1997
- S2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Magister Hukum Bisnis), Yogyakarta, 2010

Perjalanan Karir

- Auditor, BPKP, 1986-1996
- Auditor Investigasi, BPKP, 1996-2006
- Asisten Deputi Pengawasan Intern Pemerintah,Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, 2013
- Asisten Deputi Reformasi Birokrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, 2016
- Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, 2017-sekarang.

Rangkap Jabatan

Merangkap jabatan sebagai Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara.



Gunawan Hutagalung

Komisaris

Lahir : Tarutung, 19 Agustus 1975
Usia : 47 tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Tangerang, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) sejak 19 Oktober 2022 berdasarkan SK-231/MBU/10/2022.

Pendidikan

- Sarjana Teknik Informatika, STT Telkom, Bandung, 1998
- Magister Teknik Elektro, Universitas Indonesia, 2007

Perjalanan Karir Career

- Direktur Pos di Direktorat Pos, Ditjen PPI, Kemenkominfo 6 Januari 2023 - Sekarang
- Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, di Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Ditjen PPI, Kemenkominfo 6 Januari 2023 - Sekarang
- Direktur Pengendalian Pos dan Informatika di Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Ditjen PPI, Kemenkominfo 2021 - 5 Januari 2023
- Anggota Komite Auditee Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di BAKTI, Kemenkominfo, 2019 - Sekarang
- Kasubdit Jasa Telekomunikasi/ Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Jasa Telekomunikasi di Direktorat Telekomunikasi, Ditjen PPI, Kemenkominfo, 2018 - 2021
- Kasubdit Telekomunikasi Khusus dan Kelayakan Penyelenggaraan Telekomunikasi di Direktorat Telekomunikasi, Ditjen PPI, Kemenkominfo, 2016-2018
- Kasi Penerapan Teknologi Telekomunikasi di Direktorat Telekomunikasi, Ditjen PPI, Kemenkominfo, 2011 - 2016
- Koordinator Lelang Desa Berdering di Direktorat Telekomunikasi, Ditjen Postel, Kemenkominfo 2009
- Kasi Tarif Telekomunikasi di Direktorat Telekomunikasi, Ditjen Postel, Kemenkominfo, 2006-2011

Rangkap Jabatan

Merangkap jabatan sebagai Direktur Pos, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), Kemkominfo dan Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, Ditjen PPI, Kemenkominfo

Direksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pos Indonesia (Persero), tanggal 23 Desember 2020 nomor: SK-301/MBU/09/2020, tanggal 18 Maret 2021 nomor: SK-91/MBU/03/2021, tanggal 16 April 2022 nomor: 97/DEKOM/0422, tanggal 25 Juli 2022 nomor: 192/DEKOM/0722, tanggal 19 Oktober 2022 nomor: SK-230/MBU/10/2022, dan tangga 21 September 2023 SK-260/MBU/09/2023 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pos Indonesia (Persero), susunan jabatan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Faizal Rochmad Djoemadi	Direktur Utama
Tonggo Marbun	Direktur Bisnis Kurir dan Logistik
Hariadi	Direktur Operasi dan *Digital Services*
Endy P.R. Abdurrahman	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Haris	Direktur Bisnis Jasa Keuangan
Prasabri Pesti	Direktur *Business Development* dan *Portfolio Management*
Asih Kurniasari Komar	Direktur *Human Capital Management*





Faizal Rochmad Djoemadi

DIREKTUR UTAMA

Lahir : Blitar, 12 Desember 1967
Usia : 55 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) sejak 23 September 2020 berdasarkan SK-301/MBU/09/2020

Pendidikan

- *Doctor of Management*, Brawijaya University, Malang - Indonesia, 2019
- *Master of Electrical Engineering*, University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan - Canada, 1998
- *Bachelor of Electrical Eng. - Telecommunication*, Sepuluh Nopember Institute of Technology(ITS), Surabaya - Indonesia, 1991

Perjalanan Karir

- *Chief of Digital Business & Innovation Officer* - Telkom Indonesia (2019-2020)
- BoC *Chairman* - Telkom Sigma (2019-2020)
- BoC *Chairman* - Metranet (2019-2020)
- President Director - TELIN (2016-2019)
- BoD *Chairman* - TELIN Singapore, Hongkong & Australia (2016-2019)
- *Board of Commisioner* - Mitratel (2015-2019)
- *Board of Commisioner* - Patrakom (2013-2015)
- EVP *Wholesale Service Division* - Telkom Indonesia (2015-2016)

Rangkap Jabatan

Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan di instansi atau perusahaan manapun selain di PT Pos Indonesia (Persero).



Tonggo Marbun

DIREKTUR BISNIS KURIR DAN LOGISTIK

Lahir : Jakarta, 20 Desember 1970
Usia : 52 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Bisnis Kuris dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) sejak 21 September 2023 berdasarkan SK-260/MBU/09/2023

Pendidikan

- Great Leadership Program Cohort 2 Modul 3 & 4, IESE Business School, Jakarta & Silicon Valley San Fransisco, Amerika Serikat (2019)
- Great Leadership Program Cohort 2 Modul 1 & 2, IESE Business School, Jakarta & Madrid, Spanyol (2018)
- Leadership for Senior Manager, INSEAD (France) The Business School for the World, Jakarta(2008)
- Talent Management & Succession Planning, Asia Business Forum, Kualalumpur, Malaysia (2003)
- IKIP, Jakarta (1994)

Perjalanan Karir

- SVP Human Capital Engagement PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020)
- Komisaris PT Sumberdaya Andalan Mandiri (MPRO), 2020
- SVP Government, Project Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2020)
- SVP ERO Government Relation PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018)

Rangkap Jabatan

Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan di instansi atau perusahaan manapun selain di PT Pos Indonesia (Persero)



Hariadi

DIREKTUR OPERASI DAN *DIGITAL SERVICES*

Lahir : Duri, 05 Oktober 1979
Usia : 43 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Operasi dan *Digital Services* PT Pos Indonesia (Persero) sejak 19 Oktober 2022 berdasarkan SK-230/MBU/10/2022

Pendidikan

- Master of Science (M.Sc) Universitat Duisburg - Essen (Gerhard Mercator Universitat Duisburg) Departement of Mechanical Engineering, Specialization in Production and Logistics (2006)
- S1 Fakutas Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung, 2002

Perjalanan Karir

- *Country Head - Indonesia, Director Representative for* PT Quantium Solutions Logistics Indonesia, a member of The Singapore Pos Group of Companies (2017 - 2020)
- *Director of Industrial Project : Board Member,* DHL Global Forwarding (2015 - 2017)
- *Director of Contract Logistics - Logistics Management Services; Director of Oil & Energy - Industrial Project; Director of Domestic Freight; Board Member,* DHL Global Forwarding (2011 - 2015)
- *Head of Strategy & Revenue Management Executive Assistant Managing Director,* DHL Global *Forwarding* (2007 - 2010)

Rangkap Jabatan

Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan di instansi atau perusahaan manapun selain di PT Pos Indonesia (Persero)



Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman

DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Lahir : Palembang, 03 Januari 1963

Usia : 59 Tahun

Kebangsaan : Indonesia

Domisili : Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pos Indonesia (Persero) sejak 18 Maret 2021 Berdasarkan SK-91/MBU/03/2021

Pendidikan

- S2 - Master of Business Administration, South New Hampshire University, Amerika Serikat (1989)
- S1-Teknik Mesin, Boston University, Amerika Serikat (1988)
- S1 - Teknik Mesin, Roger William College Rhode island, Amerika Serikat (1984)

Perjalanan Karir

- Komisaris Independen, PT Asuransi Adira DInamika Tbk (2020)
- Komisaris Independen, FinAccel Indonesia (Kredivo) (2019)
- Komisaris Independen. PT Zurich Topaz Life Indonesia (2018)
- Direktur Utama and CEO, PT Bank Muamalat Indonesia TBK (2014-2017)
- Credit and Operational Risk Director, Bank Ekonomi Raharja (2011-2014)

Rangkap Jabatan

Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan di instansi atau perusahaan manapun selain di PT Pos Indonesia (Persero).



Haris

DIREKTUR BISNIS JASA KEUANGAN

Lahir : Medan, 21 November 1967.
Usia : 55 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat Direktur Bisnis Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Nomor: SK-230/MBU/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022

Pendidikan

- *Magister Management*, Administrasi Bisnis, Universitas Sumatera Utara, 2012.
- *Bachelor of Social Sciences*, Administrasi Negara, STIA LPPN Padang, 2002.
- *Bachelor's degree*, Keuangan, Universitas Sumatera Utara, 1988.

Perjalanan Karir

- SVP *Sales and Marketing Financial Service*, 2021-2022;
- *Vice President* Penyaluran Dana dan Kemitraan Perbankan, 2018-2021;
- *Vice President* Pelatihan dan Pengembangan, 2017-2018;
- Manajer Pengelolaan Karir dan Assesmen, 2016-2017;
- Manajer Pengembangan Karir, 2015-2016;
- Manajer *Job Management*, 2014-2015;
- Manajer Pelatihan, SDM, 2012-2014;
- Manajer Produk Keuangan Ritel dan Filateli, 2006-2009;
- Manajer Pengembangan Usaha, 2005-2006;

Rangkap Jabatan

Merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Pos Financial Indonesia



Prasabri Pesti

DIREKTUR *BUSINESS DEVELOPMENT* DAN *PORTFOLIO MANAGEMENT*

Lahir : Lampung, 11 September 1971

Usia : 51 Tahun

Kebangsaan : Indonesia

Domisili : Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur *Business Development* dan *Portfolio Management* PT Pos Indonesia (Persero) sejak 19 Oktober 2022 berdasarkan SK-230/MBU/10/2022

Pendidikan

- S3 - Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia (2020)
- S2 - Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia (2009)
- S1 - Elektro Umum, STT Telkom, Bandung, Indonesia (1996)

Perjalanan Karir

- *Head of Digital Vertical Ecosystem* - Direktorat *Digital Business*, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (2019-2022)
- *Coordinator Group of Faculty Member*, Telkom *Corporate University* (2017-2019)
- Dewan Komisaris, PT Tiphone Mobile Indonesia, Tbk (2016-2017)
- Direktur Utama, PT PINS Indonesia (2016-2017)
- Dewan Komisaris, PT Telkom Akses (2015-2016)
- *Executive Vice President* Telkom Regional II, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (2015-2016)
- Dewan Komisaris, PT Finnet Indonesia (2014-2015)
- *Executive General* Manager Telkom Regional II, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (2014-2015)

Rangkap Jabatan

Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan di instansi atau perusahaan manapun selain di PT Pos Indonesia (Persero)



Asih Kurniasari Komar

DIREKTUR *HUMAN CAPITAL MANAGEMENT*

Lahir : Sukabumi, 29 Januari 1970

Usia : 54 Tahun

Kebangsaan : Indonesia

Domisili :

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur *Human Capital Management* PT Pos Indonesia (Persero) Sejak 21 September 2023 berdasarkan SK-260/MBU/09/2023

Pendidikan

- S2 - Magister Akuntansi, Universitas Padjadjaran Bandung 2004
- S1 - Akuntansi , Universitas Padjadjaran Bandung 1993

Perjalanan Karir

- Senior *Vice President Financial Operations and Business Partner* PT Pos Indonesia (Persero) (2022-2023)
- *Vice President Akuntansi* PT Pos Indonesia (Persero) (2021-2022)
- *Vice President* Manajemen Keuangan (2018-2021) PT Pos Indonesia (Persero),

Rangkap Jabatan

Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan di instansi atau perusahaan manapun selain di PT Pos Indonesia (Persero)

SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu aset perusahaan yang akan menentukan keberhasilan dan keberlangsungan jalannya perusahaan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang handal, profesional dan berintegritas tinggi merupakan sumber daya yang diinginkan oleh setiap perusahaan. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang sesuai dengan harapan perusahaan tentunya dimulai dari proses rekrutmen yang tepat, dilanjutkan dengan proses pembelajaran/*training* yang dapat menjadi bekal untuk terjun di lapangan serta untuk kedepannya diperlukan program-program untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mampu meningkatkan performa perusahaan.

Program peningkatan kompetensi tetap dilakukan di tengah suasana pandemi seperti saat ini tentunya dengan metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI) yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya mulai tahun 2023 akan digantikan dengan *Objective Key Result* (OKR) untuk menjamin penilaian yang objektif dan terukur. Selain itu lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Sinergi yang bagus antara Serikat Pekerja dan manajemen salah satunya ditandai dengan pertemuan secara berkala antara Manajemen dan Serikat Pekerja ditengarai mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis.



Komposisi SDM Pos Indonesia pada 2023

MANAJERIAL (STRUKTURAL & FUNGSIONAL)

	2022	2023
Pusat	1.791	1.612
Regional	475	282
UPT	12.824	11.925
Non Job/CBS/ MPP/CLTP	1.907	1.800
Pengkaryaan/ Penugasan Khusus	27	29

BERDASARKAN PENDIDIKAN

	2022	2023
S3	7	7
S2	182	186
S1	3.510	3.384
Diploma	1.950	1.895
SMA	10.677	9.690
SMP	617	473
SD	56	33

BERDASARKAN USIA

	2022	2023
>51	5.158	4.570
45-50	2.401	2.113
40-44	2.033	2.175
35-39	3.259	3.375
30-34	3.118	2.694
25-29	919	602
<=24	111	119

BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

	2022	2023
Karyawan Tetap	16.999	15.648
Karyawan kontrak	239	392

Total

2022	2023
17.238	16.040

Tahun 2023 jumlah TKK berjumlah **392** orang sedangkan untuk tenaga Oranger secara keseluruhan berjumlah **16.469** orang yang terdiri dari Oranger Loket **1.893** orang, Oranger Mobile **2.617** orang, Oranger Mawar **551** orang, Drop Point **6.233** orang, dan Oranger Antaran **5.175** orang

KEIKUTSERTAAN DALAM PROGRAM BPJS KESEHATAN

Sejak adanya program wajib BPJS bagi perusahaan - perusahaan termasuk BUMN di Indonesia, PT Pos Indonesia (Persero) sdh mendaftarkan diri keikutsertaan dalam Program Jaminan Kesehatan - BPJS Kesehatan tersebut. Menunjuk pada Surat Edaran Meneg BUMN tanggal 11 Oktober 2017 Nomor: SE-06/MBU/10/2017 tentang Kepesertaan BUMN dalam Program BPJS, dengan ini disampaikan bahwa dalam tahun 2022 jumlah total karyawan PT Pos Indonesia beserta keluarga yang sudah menjadi Peserta BPJS Kesehatan dimaksud sebanyak 46.919 orang. Dengan jumlah dana BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia selama tahun 2023 sebesar Rp 56.883.958.887,-

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Program peningkatan kompetensi berupa pelatihan internal maupun eksternal tetap dilakukan di tengah suasana pandemi seperti saat ini tentunya dengan metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI) yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya mulai tahun 2021 disempurnakan dengan *Key Performance Indicators* (KPI) Individu untuk menjamin penilaian yang obyektif dan terukur dengan mengacu kepada KPI Korporat. Selain itu lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Sinergi yang bagus antara Serikat Pekerja dan manajemen salah satunya ditandai dengan pertemuan secara berkala antara Manajemen dan Serikat Pekerja ditengarai mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Untuk itu PT Pos Indonesia (Persero) selama 2023 telah menjalankan program pendidikan dan pelatihan bagi semua jenjang karir dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.6,05 miliar.



Selama tahun 2023 kegiatan pelatihan/seminar/*workshop* baik untuk peserta MT (*Management Trainee*) maupun untuk pegawai yang bertujuan peningkatan kompetensi baik di dalam negeri maupun luar negeri tersaji pada tabel berikut ini:

Komposisi dan Jumlah Pelatihan Tahun 2023

No	Program Kerja	Jumlah Pelatihan	Jumlah Peserta	Jam Pelatihan
1	Pelatihan Induksi	-	-	-
2	Pelatihan Fungsi	22	41836	141
3	Pelatihan Standarisasi Kompetensi	4	48	29
4	Pelatihan Luar Negeri	-	-	-
5	Sertifikasi dan Pelatihan	1	49	132
6	Pengembangan Diri	2	191	-
7	Corporate Inspiring Forum	-	-	-
8	Pelatihan Leadership	12	473	184
9	Pelatihan Entrpreneurship	1	50	8
10	Pelatihan Digital Kompetensi	1	2	7
11	Internal Audit	1	6	8
12	Pelatihan Oranger Antaran	1	1562	4
	TOTAL	45	44217	513

Komposisi Pemegang Saham

PT Pos Indonesia (Persero) belum pernah melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat dan sahamnya belum tercatat di Bursa Efek manapun sehingga baik masyarakat dan pihak lain selain Pemerintah Republik Indonesia tidak mempunyai kepemilikan saham atas PT Pos Indonesia (Persero). Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%. Kepemilikan Saham oleh Karyawan atau Manajemen PT Pos Indonesia (Persero) tidak memiliki program opsi kepemilikan saham oleh karyawan atau manajemen sehingga baik karyawan, direksi, maupun dewan komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tidak mempunyai kepemilikan saham atas PT Pos Indonesia (Persero). Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%.

Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

PT Pos Indonesia (Persero) tercatat memiliki penyertaan saham di tiga perusahaan anak. Kepemilikan saham di tiga anak perusahaan tersebut merupakan kepemilikan yang mayoritas, dengan persentase kepemilikan Perseroan dan jumlah aset Entitas Anak adalah PT Pos Finansial Indonesia (54,76%), PT Pos Logistik Indonesia (99,80%) dan PT Pos Properti Indonesia (99,00%).

Nama perusahaan	Bidang usaha	Domisili	Kepemilikan Saham	Tahun pendirian/ Tahun akuisisi	Status Operasi*
PT Pos Finansial Indonesia	IT Solution & Fintech	Bandung	54,76%	2001	Telah Beroperasi
PT Pos Logistik Indonesia	Jasa Pengurusan Transportasi	Jakarta	99,80%	2012	Telah Beroperasi
PT Pos Properti Indonesia	Properti	Bandung	99,00%	2013	Telah Beroperasi

Struktur Grup Anak Perusahaan



PT Pos Finansial Indonesia

Beroperasi sejak 2001 dan dimiliki 54,76% oleh PT Pos Indonesia (Persero).

PT Pos Finansial Indonesia (d/h PT Bhakti Wasantara Net) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 dari Notaris Ivonne Barnetha Sinyal, SH. Notaris di Jakarta tanggal 2 April 2001. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-02567. HT.01.01.Th. 2001 tanggal 28 Juni 2001. Pada tanggal 24 April 2019, Perseroan mengubah nama PT Bhakti Wasantara Net menjadi PT Pos Finance Indonesia melalui Akta Notaris No. 69 dari Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. Perubahan tersebut telah mendapat persetujan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0022339. AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 24 April 2019. Berbekal pengalaman selama 18 tahun, kini POSFIN melakukan diversifikasi bisnis pada layanan jasa keuangan berbasis teknologi. Menggunakan spesialisasi dalam bidang IT solution, membuat dan menyediakan platform pembayaran yang lengkap dan sederhana untuk konsumen. Melalui dukungan dari PT Pos Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan, dengan mendayagunakan 4.146 Kantor pos dan jumlah titik layanan sebanyak 58.700 titik, memberikan kesempatan untuk POSFIN memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan pelayanan yang Prima dan harga kompetitif. Melalui peran serta ini, diharapkan mampu berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat kelas menengah.

PT Pos Logistik Indonesia

Beroperasi sejak 2012 dan dimiliki 99,80% oleh PT Pos Indonesia (Persero).

PT Pos Logistik Indonesia adalah anak perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) yang dalam aktivitas bisnisnya menangani jasa transportasi, jasa pergudangan, pengiriman kargo, dan regulated agent atau agen inspeksi. Pos Logistik Indonesia berusaha mengembangkan bisnis dengan mengutamakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan baik dengan mitra internal maupun eksternal, serta membangun jaringan bisnis secara fokus dan tumbuh bersama pelanggan. PT Pos Logistik Indonesia mengembangkan strategi fokus pada penciptaan nilai tambah bagi pelanggan dengan sasaran penurunan biaya, peningkatan mutu layanan, serta eksekusi proses bisnis yang lebih cepat dan fleksibel untuk kepuasan pelanggan. PT Pos Logistik Indonesia bersinergi mengerahkan sumber daya baik milik PT Pos Indonesia (Persero) sendiri maupun mitra 3PL Logistics yang bisa diandalkan. Didukung dengan pekerja dan tim profesional dalam merumuskan strategi dan positioning bisnis, maka PT Pos Logistik Indonesia optimis mampu menjadi Indonesia's #1 *Logistics. Solutions* Provider yang beroperasi secara independen untuk dapat memaksimalkan peluang bisnis logistik di Indonesia, sekaligus mengoptimalkan jaringan dari Pos Indonesia yang sudah terbangun di seluruh Indonesia, dengan 4.146 Kantorpos dan 33.000 titik penjualan.

PT Pos Properti Indonesia

Beroperasi sejak 2013 dan dimiliki 99% oleh PT Pos Indonesia

Pada tahun 2014 PT Pos Indonesia (Persero) membentuk Unit/SBU *Real Property* PT Pos Properti Indonesia adalah unit bisnis di bawah PT Pos Indonesia (Persero) yang dikelola secara fokus dan mandiri dalam menyelenggarakan usaha *Real Property Management*. Jasa penyewaan properti PT Pos Properti Indonesia untuk dimanfaatkan oleh intitusi bisnis dalam mengembangkan jaringannya, baik untuk penyewaan lahan, penyewaan gedung, maupun ruangan atas seluruh properti PT Pos Indonesia (Persero) yang tersebar di tanah air. Karakteristik properti PT Pos Indonesia (Persero) memiliki lokasi yang cukup strategis, sehingga potensial untuk dikembangkan utilitasnya. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang properti baik dalam skala nasional maupun internasional, PT Pos Properti berkomitmen untuk memberikan solusi bisnis dalam bidang *property development* dan *property management consultant*.



Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham

PT Pos Indonesia (Persero) belum pernah melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat dan sahamnya belum tercatat di Bursa Efek manapun. Oleh sebab itu, informasi kronologis pencatatan saham dan jenis aksi korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah saham tidak tersedia.

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Pada tahun 2021 Pos Indonesia menerbitkan:

Nama MTN	: MTN Posindo-03 Tahap 1
Nilai Penerbitan	: Rp. 325.000.000.000,-
Imbal Hasil	: 10,50%
Tanggal Jatuh Tempo	: 30 Desember 2024
Peringkat	: BBB+ (Pefindo)
Bursa Pencatatan	: Bursa Efek Indonesia

Pada tahun 2022 Pos Indonesia Menerbitkan:

Nama Obligasi	: Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Seri A
Nilai Penerbitan	: Rp.100.000.000.000,-
Tingkat Bunga	: 10,90%
Tanggal jatuh Tempo	: 28 Desember 2025
Peringkat	: A- (PT Kredit Rating Indonesia)
Bursa Pencatatan	: Bursa Efek Indonesia

Nama Obligasi	: Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Seri B
Nilai Penerbitan	: Rp.400.000.000.000,-
Tingkat Bunga	: 11,75%
Tanggal jatuh Tempo	: 28 Desember 2027
Peringkat	: A- (PT Kredit Rating Indonesia)
Bursa Pencatatan	: Bursa Efek Indonesia

Lembaga dan Profesi Penunjang

Kantor Akuntan Publik
Paul Hadiwinata, Hidajat, arsono, Retno, Palilingan dan rekan
42nd Floor, UOB Plaza Building
Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10
Jakarta Pusat 10230, Indonesia
Tel : (62-21) 29932121
Fax: (62-21) 29932113

Pemeringkat Efek
PT Kredit Rating Indonesia
Sinarmas Land Plaza Tower 3 Lantai 11,
Jl. M.H. Thamrin No.51 Kav. 22,
Jakarta Pusat 10350

Penghargaan dan Sertifikasi 2023

Top 10 *Awards*

12th Anugerah BUMN *Track Award* 2023 (15 Maret 2023)

1. *CEO Driving Execution* Terbaik (Faizal R. Djoemadi)
2. BUMN Strategi Pemulihan Terbaik I (PosIND)

Digital *Technology and Innovation Award* 2023 (29 Maret 2023)

Top 10 *Awards*

1. *The Best IT Planning & Project* Portfolio (Faizal R. Djoemadi)
2. *The Best Digital* Transformation (Faizal R. Djoemadi)
3. *The Best CEO For Corporate Digital Transformation Of The Year* (Faizal R. Djoemadi)
4. *The Best Chief Digital Officer Of The Year* (Hariadi)

Top CSR *Award* 2023 (31 Mei 2023)

1. TOP CSR Awards 2023 on # Star 4
2. TOP Leader on CSR Commitment 2023 (Tata Sugiarta)

GRC & Performance Excellence Award 2023 (30 Agustus 2023)

1. *The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023*
2. *The Best Chief Risk Management Officer* 2023 diraih oleh Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman selaku Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Pos Indonesia
3. *The Best Chief Human Capital for GRC Culture Transformation* 2023 diraih oleh Tonggo Marbun selaku Direktur Human Capital Management Pos Indonesia sekaligus menjadi pembicara pada kegiatan ini
4. *The Best Corporate Secretary* 2023 diraih oleh Tata Sugiarta selaku *Corporate Secretary* Pos Indonesia

Prominent Award 2023 **(22 September 2023)**

The Most Prominent State-Owned Company In Business Process Transformation

People of The Year **2023 (24 November 2023)**

State Owned Enterprise di sektor Suistainability Logistic

Best Employer Award **2023 (28 November 2023)**

State Owned Enterprise di sektor Suistainability Logistic

Evaluasi Capaian Kerja Tahun Buku 2022 (12 Desember 2023)

- KCP LPU Rengel, KC Tuban sebagai Kantor dengan Pertumbuhan Pendapatan Terbesar.
- KCP LPU Pangkalan, KCU Karawang sebagai Kantor dengan Kualitas Operasi Terbaik.
- KCP LPU Samarinda Seberang, KC Samarinda sebagai Kantor dengan Pengelolaan dan Fasilitas UMKM Terbanyak.
- KCP LPU Jaken, KC Pati sebagai Kantor dengan Pembelajaran Digital dan Inovasi Terbaik.
- KCP LPU Susut, KC Gianyar sebagai Kantor dengan Pemeliharaan Fasilitas dan Kebersihan Terbaik.







Award List







15-03-2023	12th Anugerah BUMN Track Award 2023	• CEO Driving Execution Terbaik diraih oleh Faizal R. Djoemadi (Direktur Utama PosIND) • Pos Indonesia, BUMN Strategi Pemulihan Terbaik I • Pos Properti, Anak Perusahaan BUMN Strategi Pemulihan Terbaik II
29-03-2023	Digital Technology and Innovation Award 2023 T	• Best CSR in corporation programs with cooperatives • Best CSR Program based on Digital Culture • The best company in managing cash transfers and compliance • The Best Leadership Focus on CSR Program diraih oleh Prasabri Pesti (Direktur Business Development dan Portfolio Management)
29-03-2023	Digital Technology and Innovation Award 2023	• The Best IT Planning & Project Portfolio diraih oleh Faizal R. Djoemadi (Direktur Utama PosIND) • The Best Digital Transformation diraih oleh Faizal R. Djoemadi (Direktur Utama PosIND) • The Best CEO For Corporate Digital Transformation Of The Year diraih oleh Faizal R. Djoemadi (Direktur Utama PosIND) • The Best Chief Digital Officer Of The Year diraih oleh Hariadi (Direktur Operasi dan Digital Services)

12-04-2023	Top Digital Awards 2023	• TOP Digital Implementation 2023 #Level Stars 5 • TOP Leader on Digital Transformation 2023 untuk Direktur Utama PosIND diraih oleh Faizal R. Djoemadi (Direktur Utama PosIND) • TOP CIO on Digital Implementation 2023 untuk Direktur Operasi dan Digital Services PosIND diraih oleh Hariadi (Direktur Operasi dan Digital Services)
13-04-2023	Award Katadata25 Pejuang Anticovid - 19	• diraih oleh Faizal R. Djoemadi (Direktur Utama PosIND)
25-05-2023	5th Indonesia CSR Awards 2023	• The Best TJSL in Logistic Sector Industry 2023
25-05-2023	Indonesia Best CEO Awards 2023 Indonesia "Employees' Choice" 4th Anniversary"	• Most Popular CEO 2023 diraih oleh Faizal R. Djoemadi (Direktur Utama PosIND)
31-05-2023	Top CSR Award 2023	• TOP CSR Awards 2023 on # Star 4 • TOP Leader on CSR Commitment 2023 diraih oleh Tata Sugiarta (Corporate Secretary)
05-07-2023	HCREA 2023	• The Best Recruitment of Logistics Specialists • Most Innovation HR • The Best Company of Culture and Employee Experience • The Most Resillience Company 2023 • The Best Leadership Development Focus On HC
20-07-2023	HR Excellence Award 2023	• kategori learning & development and knowledge management • reward management and talent retention strategy
01/08/23	Penghargaan versi SWA	• Most Extraordinary Woman Business Leader 2023 diraih oleh Siti Choiriana (Direktur Bisnis Kurir dan Logistik) • Most Powerful Women 2023 diraih oleh Siti Choiriana (Direktur Bisnis Kurir dan Logistik)
10-08-2023	3th TJSL & CSR AWARD 2023	• Pilar Sosial (*Gold*) bintang 4 • Pilar Ekonomi (*Gold*) bintang 4 • Pilar Lingkungan (*Platinum*) bintang 5

30-08-2023	GRC & Performance Excellence Award 2023	• The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023 • The Best Chief Risk Management Officer 2023 diraih oleh Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) • The Best Chief Human Capital for GRC Culture Transformation 2023 diraih oleh Tonggo Marbun selaku Direktur Human Capital Management Pos Indonesia sekaligus menjadi pembicara pada kegiatan ini diraih oleh Tonggo Marbun (Direktur Human Capital Management)
31-08-2023	Indonesia Award 2023	• The Best Corporate Secretary 2023 diraih oleh Tata Sugiarta (Corporate Secretary) Special Recognition of Outstanding Initiative
06-09-2023	TOP GRC Award 2023	• TOP GRC Awards 2023 # 5 Star • The Most Committed GRC Leader 2023 diraih oleh Faizal R. Djoemadi (Direktur Utama PosIND) • The High Performing Board of Commissioners on GRC 2023 diraih oleh Jajaran Komisaris Pos Indonesia diraih oleh Komisaris PosIND • The High Performing Chief Financial Officer & Risk Management Director on GRC 2023 diraih oleh Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko)
22-09-2023	Prominent Award 2023	• The Most Prominent State-Owned Company In Business Process Transformatio
05-10-2023	Indonesia Human Capital Brilliance Awards (IHCBA) 2023	• Most Brilliant Overall Pillars of Human Capital Drivers 2023 • Most Brilliant Vision and Mission of Year 2023 • Most Brilliant Leadership Quality 2023 • Most Brilliant Strategic Alignment 2023 • Most Brilliant Company Agility 2023 • Most Brilliant Strategic Communication 2023 • CEO of Year 2023 for Brilliant Human Capital diraih oleh Faizal R. Djoemadi (Direktur Utama PosIND) • Most Brilliant Human Capital Director fo Year 2023
08-11-2023	Stellar Workplace Award 2023	• Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment. • Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction
24-11-2023	People of The Year 2023	• State Owned Enterprise di sektor Suistainability Logistic

27-11-2023	Keterbukaan Informasi Digital 5.0 Keterbukaan Informasi Publik BUMN Awards 2023	• Best of All of BUMN Director by Audience, Activity and Engagement Pimpinan BUMN diraih oleh Faizal R. Djoemadi (Direktur Utama PosIND) • Best of All of BUMN Director by Audience, Activity and Engagement Sektor Jasa Logistik • Excellent in Communication and Collaboration Related to Information Disclosure
28-11-2023	Best Employer Award 2023	• Top 5 Best Industry - Wide Impact 2023
29-11-2023	Human Capital & Performance Award (HCPA) 2023	• Best Digital Transformation Strategy 2023 • Best Recruitment and Workforce Planning Strategy • Best Human Capital Women Director of The Year untuk Direktur Human Capital Management PosIND diraih oleh Asih Kurniasari Komar (Direktur Human Capital Management)
01-12-2023	Naker Award 2023	• Penghargaan Produktivitas Paramakarya
07-12-2023	Marketeer Of The Year 2023	• The Best Industry Marketing Champion 2023-Logistics Sector/ FRD diraih oleh Faizal R. Djoemadi (Direktur Utama PosIND)
12-12-2023	Evaluasi Capaian Kerja	• KCP LPU Rengel, KC Tuban sebagai Kantor dengan Pertumbuhan Pendapatan Terbesar. • KCP LPU Pangkalan, KCU Karawang sebagai Kantor dengan Kualitas Operasi Terbaik. • KCP LPU Samarinda Seberang, KC Samarinda sebagai Kantor dengan Pengelolaan dan Fasilitas UMKM Terbanyak. • KCP LPU Jaken, KC Pati sebagai Kantor dengan Pembelajaran Digital dan Inovasi Terbaik. • KCP LPU Susut, KC Gianyar sebagai Kantor dengan Pemeliharaan Fasilitas dan Kebersihan Terbaik.

NAMA, ALAMAT ENTITAS ANAK, ALAMAT KANTOR CABANG ATAU PERWAKILAN

Anak Perusahaan

PT POS FINANSIAL INDONESIA

Jl. Jamuju No. 2
Cihapit, Bandung Wetan
Bandung 40114 Indonesia
Telp +62-22-7275001

PT POS LOGISTIK INDONESIA

Gedung Pos Ibukota, Lantai 4
Jl. Lapangan Banteng Utara No.1 Jakarta Pusat 10710
Telepon : +6221 3483 2552, +6221 352 0175 +6221 351 1144
Fax : +6221 3519 967
Email: info@poslogistics.co.id

PT POS PROPERTI INDONESIA

Graha Pos Indonesia, Lantai 5, Blok A
Jl. Banda No. 30 Bandung 40115
Jawa Barat - Indonesia
Tel. (022) 4212515, (022) 4218996,
Fax. (022) 4261569
Email:info@posproperti.co.id

Alamat Kantor Regional

KANTOR REGIONAL 1 MEDAN
Jln. Prof. H.M. Yamin, S.H. No. 44,
Medan 20231

KANTOR REGIONAL 2 JAKARTA
Jln. Gedung Kesenian No. 2,Jakarta 10710

KANTOR REGIONAL 3 BANDUNG
Jln. Pahlawan No. 87, Bandung 40123

KANTOR REGIONAL 4 SEMARANG
Jln. Sisingamangaraja No. 45,
Semarang 50253

KANTOR REGIONAL 5 SURABAYA
Jln. Krembangan Barat 73 - 75,
Surabaya 60175

KANTOR REGIONAL 6 MAKASSAR
Jln. A. P. Pettarani,
Makassar 90222

Alamat Kantor Afiliasi

DANA PENSIUN POS
Jl. Tasikmalaya No. 1, Bandung 40271

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
Gedung YPBPI
Jl. Sari Asih No. 54, Bandung 40151

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Gedung ULBI
Jl. Sari Asih No. 54, Bandung 40151

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

Untuk memudahkan *stakeholders* dan *shareholder* maupun kepada masyarakat umum mengakses informasi tentang Pos Indonesia dan mengakses produk serta layanan Pos Indonesia sejak tahun 2020 .

Pos Indonesia melakukan penyegaran dan perbaikan informasi pada *website* Perusahaan https://www.posindonesia.co.id dengan berbagai informasi terkini perusahaan. Selain informasi yang bersifat umum, *website* Perseroan juga memberikan informasi yang lebih spesifik diantaranya sebagai berikut:

- Profil perusahaan yang terdiri dari Profil Dewan Komisaris dan Profil Direksi
- Adanya Informasi pemegang saham sampai dengan kepemilikan akhir individu. (Tidak ada)
- Kode Etik Perusahaan yang terdiri berupa *e-book* kode etik yang bisa *download* di menu GCG atau bisa ditempatkan ditempat yang mudah diakses oleh pengunjung *website*.
- Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang teridiri dari Agenda, Ringkasan Risalah, dan Tanggal (Pengumuman, Pemanggilan, RUPS, Ringkasan Risalah). (Tidak ada).
- Menampilkan informasi seputar Piagam/ *Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. (tidak ada).
- Menampilkan Produk-produk dan Jasa yang diberikan oleh Pos Indonesia.
- Menampilkan Solusi Bisnis
- Menampilkan Media dan Informasi baik *news release*, *e-paper*, dan galeri pada kegiatan-kegiatan
- Adanya Informasi karir (lowongan kerja) pada Perusahaan.
- Menampilkan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan (*Annual Report*).
- Menampilkan Informasi kontak *center* yang bisa dihubungi dan memiliki media sosial perusahaan.
- Menampilkan menu Lacak Kiriman yang dapat dengan sangat mudah diakses. Dapat menghitung Tarif Pengiriman dengan sangat mudah.
- Terdapat menu Pencarian Kantorpos Terdekat.
- Menampilkan Program Pos Indonesia
- Memiliki menu bantuan yang memuat Informasi tentang *Frequently Asked Question* (FAQ) tentang seluruh produk dan layanan yang diberikan oleh Perusahaan.
- Menambah fitur *Livechat* VIDAPOS Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, yaitu layanan informasi kepada pelanggan berbasis aplikasi *chatting* yang dapat diakses langsung oleh pengguna dengan cepat dan mudah.



PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, KOMITE-KOMITE, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan daya saing dengan mengembangkan kapasitas kantor cabang pembantu dan kapabilitas Dewan Komisaris dan Komite-komite. Perseroan tiap tahunnya selalu menganggarkan anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan kompetensi manajemen seperti pendidikan dan pelatihan. Pelatihan, workshop, seminar dan kegiatan konstruktif lainnya. Perseroan menetapkan pengembangan kompetensi sebagai salah satu program kerja utama. Hal ini merupakan wujud komitmen Perseroan dalam upaya melahirkan kepemimpinan yang handal dan berkompeten sehingga mampu bersaing di level nasional bahkan internasional, serta mampu manjawab tuntutan bisnis perseroan dalam usaha mencapai target seperti yang diharapkan oleh pemegang saham pemangku kepentingan. Beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan Dewan Komisaris, dan Komite-komite yang terealisasi selama tahun 2023 adalah Pendidikan dan/ atau pelatihan untuk Dewan Komisaris;



Dewan komisaris

1. Bapak Guntur Imam Nefianto/Komisaris telah mengikuti Webinar "Cara mudah menentukan *Key risk Indicator* dalam Rencana *Strategic* Organisasi" yang diselenggarakan oleh GRC Managemen pada tanggal 2 -3 Mei 2023.
2. Bapak Condro Kirono/Komisaris, Bapak Gunawan Hutagalung/Komisaris, Bapak Guntur Imam Nefianto/Komisaris dan Bapak Robben Rico/Komisaris Independen telah menegikuti *in-house* training "*Financial Report for Non-Financial Person*" yang diselenggarakan oleh YPIA pada tanggal 13 Mei 2023
3. Bapak Guntur Imam Nefianto/Komisaris telah mengikuti "Pelatihan Khusus Profesi Advokat" yang diselenggarakan oleh Imran Ganie & Partners pada 7 - 24 Agustus 2023
4. Bapak Guntur Imam Nefianto/ Komisaris telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi "*Certification in Audit Commitee Practices*" Batch 32 yang diselenggarakan oleh IKAI dengan tanggal pelatihan 8 - 10 Agustus 2023 sedangkan ujian pada tanggal 28 Agustus 2023
5. Bapak Condro Kirono/Komisaris, Bapak Gunawan Hutagalung/Komisaris, dan Bapak Robben Rico/Komisaris Independen telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi "Pelatihan Organ Pengelola Resiko" yang diselenggarakan oleh RAP Indonesia, dengan tanggal pelatihan 20 - 21 September 2023 dan ujian pada tanggal 27 September 2023.
6. Bapak Guntur Imam Nefianto/Komisaris, Bapak Gunawan Hutagalung/Komisaris, dan Bapak Robben Rico/Komisaris Independen telah mengikuti pelatihan "Master *Class Risk Governance*" yang diselenggarakan oleh ERMA pada tanggal 6 Desember 2023.
7. Bapak Guntur Imam Nefianto/Komisaris telah mengikuti pelatihan dalam "Seminar International IAI - Dialog Pengelolaan Keuangan Negara" yang diselenggarakan oleh IAI pada tanggal 12 Desember 2023.

Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi

1. Pelatihan Manajemen Risiko "*Enterprise Risk Management*" TW 4
2. Konferensi Nasional Professional Manajemen Risiko TW 4
3. Pelatihan Dan Sertifikasi Cafo (*Certified Anti Fraud Officer*) TW 1
4. Penyusunan Rjp Dan Rkat Berbasis Risiko TW 1
5. *Certified Risk Management Officer* (CRMO) Level II TW 3
6. *Certified Risk Management* Professional (CRMP) Level III TW 3
7. Webinar Strategi Penanganan Terhadap Pelaku *Fraud* Di Perusahaan

Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Webinar Hukum online 2023 "Strategi dan Mekanisme *Anti-Fraud* dalam Pengelolaan Organisasi dan Badan Usaha" (Online)
2. *Financial Report for Non-Financial* Person (*In house training*)
3. Pelatihan Organ Pengelola Risiko (CRGP)
4. *Master Class Risk Governance*

Internal Audit

1. Pelatihan dan Sertifikasi QIA Tingkat Lanjutan TW 2
2. Pelatihan dan Sertifikasi QIA Manajerial TW 3
3. Pelatihan Dan Sertifikasi Qia Tingkat Pra Manajerial TW 3

Wilayah Operasi

Jaringan Internasional

232
UPU

Negara Tujuan

211
Pos Cepat Internasional

27
Quick Internatioal XPress

266
Loket Extensian

23
Mobile Pos Service



Physical Presents

Jaringan Domestik

12.819
Agenpos Kurir

5.945
Oranger

101.324
Agenpos Jaskug

38 Provinsi
98 Kota
416 Kabupaten
7.288 Kecamatan
81.616 Desa



6
Regional

42
Kantor Cabang Utama

168
Kantor Cabang

3.666
Kantor Cabang Pembantu



4

Analisis Manajemen


POS
IND
Logistik Indonesia

Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan tantangan yang semakin beragam, manajemen berupaya melakukan penyesuaian strategi bisnis yang lebih inovatif untuk lebih meningkatkan kapabilitas perusahaan. Sampai akhir Tahun 2023, PT Pos Indonesia (Persero) membukukan pendapatan usaha sebesar **Rp 5.361,44** Miliar dan laba bersih Tahun Berjalan sebesar **Rp 703,04** Miliar.

TINJAUAN KINERJA OPERASI

Kinerja Operasi

Kinerja produksi tahun 2023 dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

URAIAN	SATUAN	2023	2022	Pertumbuhan %
SURATPOS				
Pos Next Day	pucuk	3.126.861	2.977.879	5,00
Pos Reguler	pucuk	7.508.345	7.400.230	1,46
Pos Sameday Dokumen	pucuk	92.571	143.913	-35,68
PAKETPOS				
Paketpos Biasa	buah	526.185	1.327.724	-60,37
Paketpos Reguler	buah	15.758.113	16.462.688	-4,28
Pos Sameday Barang	buah	77.095	78.573	-1,88
Q COMMERCE	buah	400.056	-	
POS CARGO	transaksi	159.827	36.589	336,82
POS INTERNASIONAL				
Paketpos LN	buah	313.287	385.781	-18,79
EMS	buah	161.326	153.922	4,81
KONTRAK & PROYEK				
Korporat	transaksi	32.722.982	28.928.887	13,12
JASA KEUANGAN				
Remitansi	transaksi	3.091.137	4.110.924	-24,81
Pospay	transaksi	93.321.482	98.356.785	-5,12
RITEL				
Benda Konsinyasi	keping	547.141.654	566.510.460	-3,42
Filateli	keping	3.231.374	3.765.640	-14,19

Sarana Operasi

Pada tahun 2023 jumlah fasilitas fisik/kapasitas produksi dan layanan perusahaan mengalami Pertumbuhan sebesar 47.53% . Rincian fasilitas fisik layanan yang dimiliki perusahaan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	2023	2022	Pertumbuhan YoY (%)
1	**KANTOR POS**			
a	Revenue Center			
	- Kantor Cabang Utama	42	42	-
	- Kantor Cabang	167	167	-
	- Kantor Cabang Pembantu	3.715	3.652	1,73
	- Loket Ekstensi	258	264	(2,27)
	- Kantor Filateli	1	1	
b	SUPPORT			
	- KTPU Jakartasoekarnohatta (Tipe C)	1	1	
	- KTPL Tanjungpriok (Tipe D)	1	1	
	- SPP	12	11	9,09
	Jumlah Kantor Pos	4,197	4,139	1,40
2	**UNIT PELAYANAN POS BERGERAK**	22	24	(8,33)
3	**UNIT PELAYANAN POS LAINNYA**			
	Agenpos Kurir	10.701	10.564	1,30
	Agenpos Jaskug	179.152	116.818	53,36
	Jumlah Unit Pelayanan Pos Lainnya	189.853	127.382	49,04
	Total	**194.073**	**131.546**	**47,53**

Selain fasilitas fisik berupa gedung, perusahaan juga memiliki sarana alat angkutan khususnya untuk kegiatan operasi baik yang dimiliki sendiri melalui *CAPEX* ataupun sewa.

Inovasi teknologi yang telah dilakukan untuk menghasilkan dan meningkatkan kapasitas produksi serta penunjang untuk peningkatan kinerja perusahaan antara lain:

- Inovasi *Digital Super Apps* sudah *launching* dan akan dilanjutkan dengan pengembangan platform superapps menggabungkan aplikasi *mobile* layanan kurir dan aplikasi *mobile* jasa keuangan.
- Inovasi *Digital Super Apps* pada bagian *Human Capital Management* dengan nama aplikasi Livie

Selain itu, untuk mendukung kelancaran organisasi dan operasional perusahaan terdapat beberapa Sistem Informasi yang dimiliki oleh perusahaan yaitu:

1. Direktorat *Human Capital Management*
    - Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIM-SDM) untuk pengelolaan karyawan organik.
    - Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kontrak Karya (SIM-TKK) untuk pengelolaan Tenaga Kontrak Karya.
    - Pengembangan sistem SPPD Online untuk mengontrol dan mengendalikan biaya perjalanan dinas pegawai.
    - Pengembangan sistem aplikasi PosHadir untuk mengontrol kehadiran karyawan.
2. Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko
    - SAP HANA untuk pertanggungan dan pelaporan keuangan.
    - ITEMS untuk mengawasi arus kas seluruh Unit Pelaksana Teknis.
    - Sistem Informasi Perpajakan (SIP) untuk pengelolaan dan pengendalian pelaporan perpajakan secara terpusat
    - Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM-ASET) untuk pengelolaan dan pengawasan aset perusahaan.
    - *Whistle Blower System* (WBS) untuk melaporkan dugaan tindak kecurangan.
    - Sistem Pra NPP untuk pengelolaan proses pengajuan NPP mulai dari KCU sampai dengan persetujuan di PA Pusat.
    - Sistem Pelimpahan Bank (VA)
    - Aplikasi Simaris (Sistem Manajemen Risiko), sistem pengendalian dan alat bantu dalam mendapatkan profil risiko perusahaan dan mampu mengurangi potensi-potensi kerugian dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.
    - Sistem Perencanaan Anggaran berbasis Program kerja, untuk proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari level Kantor Cabang sampai dengan level Pemilik Anggaran dan Pemilik Program Kerja di tingkat pusat.
3. Direktorat *Business Development* dan *Portfolio Management*
    - Sistem Informasi Manajemen KPC LPU (SIM-LPU).

4. Direktorat Bisnis Jasa Keuangan
    - Sistem Informasi Manajemen Konsinyasi dan Filateli (SIM-KONSFILA).
    - Aplikasi POSPAY untuk memudahkan transaksi pelanggan secara *mobile*.

5. Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik
    - Sistem Informasi Manajemen O-Ranger mobile (SIM-O-Ranger mobile).
    - *Customer Complain Handling* (CCH) untuk mempercepat penanganan pengaduan pelanggan.
    - Aplikasi POS AJA untuk memudahkan pelanggan dalam mengirim barang dengan cara *pickup services*.
6. Direktorat Operasi dan Digital *Services*
    - Sistem Informasi Manajemen O-Ranger Antaran (SIM-O-Ranger Antaran).

PENDAPATAN USAHA PER SEGMEN

PT Pos Indonesia (Persero) merumuskan sasaran, strategi, dan program-program untuk meningkatkan kinerja perusahaan pada tahun 2023 dengan tema "**Mempercepat Transformasi dan Inovasi untuk Mmenuhi Harapan Pelanggan Menuju Perusahaan Logistik Terkemuka**"

Dalam pencapaian kinerja perusahaan Tahun 2023, perusahaan masih mendapat dukungan dan dorongan pencapaian kinerja bisnis jasa keuangan yang bersumber dari kebijakan pemerintah yaitu penyaluran bantuan baik yang bersifat nasional maupun lokal di masing-masing kabupaten/kota.

Selain itu perusahaan juga diberi penugasan oleh negara untuk penyaluran bantuan Cadangan Beras Pemerintah sebanyak 3(tiga) tahap, dimana sampai dengan akhir Tahun 2023 telah berhasil menyalurkan sebanyak 39,87 juta penerima manfaat dengan kontribusi pendapatan sebesar Rp 552,41 Miliar. Kemudian perusahaan juga menyalurkan bantuan Program Stunting dengan kontribusi pendapatan sebesar Rp 89,42 Miliar. Perusahaan juga menyalurkan bantuan EL NINO kepada 3,5 juta penerima, dimana sampai Desember telah tersalurkan sebanyak 3,2 juta dengan kontribusi pendapatan sebesar Rp 48,3 Miliar. Perusahaan juga menyalurkan bantuan Permakanan lansia dan disabilitas sebanyak 16.694 KPM Dengan persentase berhasil salur di atas 90%. Perusahaan juga menyalurkan bantuan LDP PENA dan ATENSI YAPI yang telah berhasil salur sebanyak 193.770 KPM dengan pendapatan sebesar Rp 2,8 Miliar.

Pencapaian kinerja pendapatan Tahun 2023 terhadap RKAP sebesar 100,08%, sedangkan growth pendapatan terhadap periode yang sama tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 16,09%. Implementasi program kerja pada Tahun 2023 memberikan hasil yang cukup optimal terhadap target RKAP 2023 yang telah ditetapkan. Pencapaian pendapatan bisnis Kurir Logistik sebesar 133,99%, sedangkan growth pendapatan bisnis kurir logistik tahun 2023 naik sebesar 73,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Kontribusi Bisnis Kurir dan Logistik tahun 2023 sebesar 74% atau naik 24,53% dari tahun 2022, hal ini disebabkan antara lain kenaikan pendapatan surat domestik, dan kenaikan pada pendapatan paket pos luar negeri, serta kenaikan pendapatan logistik dikarenakan adanya proyek pendistribusian beras (CBP), Stunting, dan ASN (Papua dan Papua Barat).

Sementara itu, pencapaian pendapatan Bisnis Layanan Jasa Keuangan, Meterai dan Ritel sebesar 55,12%, sedangkan growth pendapatannya turun 43,42% dibanding periode yang sama tahun 2022. Kontribusi Bisnis Jasa Keuangan, Meterai dan Ritel tahun 2023 sebesar 23,37% atau turun 22,96% dari tahun 2022.

Di tengah persaingan dari para kompetitor lama maupun baru yang semakin ketat, perusahaan terus melaksanakan program-program kerja yang simultan untuk mempertahankan dan mencari peluang bisnis baru langkah-langkah yang dilaksanakan oleh manajemen antara lain :

1. LAYANAN BISNIS KURIR DAN LOGISTIK

a. Strategi penjualan yang agresif dan masif di semua *channel* baik *channel* fisik maupun digital
a. Promo kirim 2 kg bayar 1 kg di semua *channel* fisik
a. Promo *double point* PosAja setiap transaksi kelipatan Rp. 10.000
a. *Voucher* potongan ongkos kirim sebesar Rp. 2.000 dan Rp. 5.000 pada *event* Harbolnas, *Flash Sale*, dan Nataru
a. Penyesuaian imbal jasa Shopee pada *event* Harbolnas 1-31 Desember 2023
b. Pilot project pembuatan Studio Live Streaming di Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Bandar Lampung
c. Kerjasama cross agent antara Pos Indonesia dengan BRILink
d. Kerjasama dengan BRImo pemanfaatan aplikasi BRImo sebagai akses point layanan PosAja
e. Akuisisi UMKM menjadi PosAja Drop Point telah berkontribusi sebesar 87 milyar dan mendorong pertumbuhan Oranger tahun 2023 sebesar 39,4%

2. LAYANAN BISNIS JASA KEUANGAN

a. Peningkatan kualitas layanan Pospay (*availability* : 99,5% dan *latency* < 3 detik).
b. Penambahan fitur pembelian *voucher* game, top up e-toll, dan pembayaran video *streaming*.
c. Perbaikan tata Kelola penjualan meterai di Loket dan Agenpos untuk peningkatan transaksi dengan target transaksi tumbuh 10% dari tahun sebelumnya.
d. Sosialisasi KD Tata Kelola Meterai dan akuisisi agen meterai.
e. Launching layanan Pos Kios, Pospay Kolektor dan Syariah (layanan sosial, komersial dan perdagangan emas).
f. Optimalisasi loket untuk melakukan *cross selling* dengan menempatkan eks karyawan alfamart/indomart yang telah memiliki GGC (*Greeting*, *Grooming*, *Cross Selling*)
g. Implementasi Pospay *Canvassing* untuk meningkatkan transaksi melalui pola imbal jasa
h. Fokus penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
i. Campaign Pembayaran Pajak melalui media *offline/online*

3. LAYANAN BISNIS PROPERTI

a. Salah satu penyebab bisnis Properti *growth* karena adanya pengalihan bisnis persewaan (inovasi) dari induk.
b. Layanan *Hospitality* tumbuh karena kenaikan pendapatan dari seluruh unit bisnis eksisting dan adanya penambahan pendapatan dari unit bisnis baru seperti Pos Bloc, PointMeal, PointBrew. Dimana Pos Bloc Bandung dan Pos Bloc Surabaya beroperasi pada tahun 2023.
4. Lainnya

Tambahan pendapatan dalam Pendapatan lainnya terdiri dari tambahan penugasan Pemerintah dalam penyelenggaraan LPU (Layanan Pos *Universal*) dalam bentuk Bantuan Operasional Pemerintah melalui program PSO (*Public Service Obligation*). Ini merupakan komitmen dalam UPU (*Universal Postal Union)* yang menjamin terselenggaranya pelaksanaan program tersebut melalui penugasan kepada PT Pos Indonesia (Persero). Selain Penugasan Pemerintah terdapat penyesuaian dan terhadap kondisi kini dengan program Optimalisasi Aset dan *leverage* terhadap pendapatan Perusahaan melalui revaluasi aset. Program ini dilakukan pada aset potensial yang memberikan nilai tambah dan potensi komersialisasi pada aset utama dan strategis di beberapa kota besar di Indonesia.

KINERJA KEUANGAN

Aset

Pada tahun 2023, jumlah aset Pos Indonesia tercatat sebesar Rp. 13.658,84 miliar, naik 22,63% dibandingkan Rp.11.138,31 miliar pada tahun 2022. Hal ini terjadi karena peningkatan aset tidak lancar sebesar 10,26% ditambah dengan peningkatan aset lancar sebesar 48,28% .

Aset lancar

Total aset lancar PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 5.372,71 miliar, naik 48,28% dari Rp. 3.623,29 miliar pada tahun 2022. Peningkatan terbesar terjadi pada pos Pendapatan yang masih harus diterima, peningkatan sebesar 366,55% jika dibandingkan dengan tahun 2022 atau sebesar Rp. 930,90 milyar. Perseroan mendapatkan kompensasi pelepasan hak atas tanah dan bangungan KCP Nunukan Solo karena terdampak pembangunan underpass Simpang Joglo Solo. Nilai tercatat merupakan nilai kompensasi penggantian yang akan diterima oleh perseroan. Dan fee penyaluran atas bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk masyarakat penerima. Peningkatan pada kas dan setara kas sebesar 15,29% menjadi Rp. 2.653,92 miliar pada 2023, pada 2022 kas dan setara kas tercatat Rp.2.301,80 miliar, Kenaikan kas setara kas ini dikarenakan pada akhir periode pelaporan Perseroan telah mendapatkan penerimaan dari fee bantuan pemerintah.

Aset tidak lancar

Pada tahun 2023 jumlah aset tidak lancar PT Pos Indonesia (Persero) tercatat sebesar Rp. 8.286,13 miliar, tumbuh 10,26% dari Rp.7.515,03 miliar pada tahun 2022.

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan YoY
Aset Lancar	5.372,71	3.623,29	48,28
Aset Tidak Lancar	8.286,13	7.515,03	10,26
Jumlah Aset	13.658,84	11.138,31	22,63

Liabilitas

Secara umum liabilitas perusahaan sepanjang tahun 2023 mengalami kenaikan dan masih terkendali dengan baik. Perusahaan mencatatkan jumlah liabilitas pada tahun 2023 sebesar Rp. 5.523,77 miliar dan terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 31,87% dengan jumlah liabilitas sebesar Rp. 4.188,74 miliar pada tahun 2022.

Liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 85,56% kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp. 1.515,60 miliar atau 196,83% dibandingkan tahun 2022, Komponen terbesar dari liabilitas jangka pendek perusahaan adalah pinjaman bank jangka pendek dengan porsi 58,52% terhadap total liabilitas jangka pendek.

Liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar 22,34% dibandingkan tahun 2022. Komponen terbesar dari liabilitas jangka panjang adalah liabilitas imbalan kerja yang merupakan liabilitas imbalan kerja kepada karyawan atas jasa yang telah diberikan. Secara keseluruhan komposisi utang jangka pendek perusahaan masih lebih besar dibandingkan liabilitas jangka panjang dengan perbandingan 70,70% dan 29,30% terhadap total liabilitas.

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan YoY (%)
Liabilitas Jangka Pendek	3.905,45	2.104,70	85,56
Liabilitas Jangka Panjang	1.618,32	2.084,04	(22,34)
Jumlah Liabilitas	5.523,77	4.188,74	31,87

Ekuitas

Realisasi jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.135,07 miliar, tumbuh sebesar Rp 1.185,50 miliar atau 17,06% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Perubahan komponen ekuitas adalah sebagai berikut:

- Peningkatan saldo laba sudah ditentukan penggunaannya sebesar 24,88% menjadi Rp. 3.264,31 miliar
- Peningkatan komponen ekuitas lainnya sebesar 14,09% menjadi Rp. 3.702,78 miliar
- Realisasi kepentingan Rp (45,02) miliar

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan YoY (%)
Modal Saham	455,02	455,02	-
Saldo Laba sudah ditentukan Penggunaannya	3.264,31	2.613,95	24,88
Saldo laba belum ditentukan Penggunaannya	755,63	650,37	16,18
Komponen ekuitas lainnya	3.702,78	3.245,45	14,09
Kep non pengendali	(45,02)	(17,56)	(156,38)
Jumlah Ekuitas	**8.135,07**	**6.949,57**	**17,06**

Profitabilitas

Uraian	Pendapatan	Beban Pokok Layanan	Profitabilitas
Suratpos	437.098.907.316	425.907.312.173	2,63%
Paketpos	1.456.773.750.070	1.035.197.356.677	40,72%
Jasa keuangan	1.256.664.342.262	1.050.441.914.990	19,63%
Logistik	2.176.037.721.479	1.335.772.630.029	62,90%
Properti	152.546.415.548	32.421.498.083	370,51%
Jumlah Pendapatan	**5.479.121.136.675**	**3.879.740.711.952**	**41,22%**

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Pencapaian Kinerja Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun 2023 merupakan kinerja hasil konsolidasi antara induk dan anak perusahaan (PT Pos Finansial Indonesia, PT Pos Logistik Indonesia, dan PT Pos Properti Indonesia). Pencapaian kinerja pendapatan mengalami pertumbuhan sebesar 18.64% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Secara garis besar, kinerja keuangan konsolidasian Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Usaha sebesar Rp 5.479,12 Miliar mengalami pertumbuhan sebesar 18,64% dibandingkan periode yang sama tahun 2022.
- Beban Pokok Layanan terealisasi sebesar Rp 3.879,74 Miliar mengalami kenaikan sebesar 19,22% dibandingkan periode yang sama tahun 2022.
- Laba Kotor sebesar Rp 1.599,38 Miliar mengalami kenaikan sebesar 17,24% dibandingkan periode yang sama tahun 2022.
- Laba Usaha sebesar Rp 919,98 Miliar mengalami kenaikan sebesar 18,96% dibandingkan periode yang sama tahun 2022.
- EBITDA sebesar Rp 1.193,87 Miliar mengalami pertumbuhan sebesar 28,95% dibanding periode yang sama tahun 2022.
- Laba Sebelum Pajak (EBT) tercapai sebesar Rp 701,89 mengalami pertumbuhan sebesar 13,44% dibandingkan periode yang sama tahun 2022.
- Laba Bersih Tahun Berjalan tercapai sebesar Rp 728,21 Miliar mengalami pertumbuhan sebesar 14,31% dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

Secara lengkap, potret pencapaian keuangan tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Pertumbuhan YoY (%)
Pendapatan Usaha	5.479,12	4.618,39	4.472,94	5.455,53	4.971,46	18,64
Beban Pokok Layanan	3.879,74	3.254,25	3.270,27	4.383,66	4.534,90	19,22
Laba Kotor	1.599,38	1.364,14	1.202,58	1.071,87	436,55	17,24
Beban Usaha						
Pemasaran	70,26	67,96	54,85	172,68	101,54	3,38
Umum Dan Administrasi	911,64	906,98	1.004,91	978,62	837,41	0,51
Pendapatan Lainnya	628,73	726,58	799,77	682,99	917,40	(13,47)
Beban Lainnya	(326,23)	(342,37)	(243,52)	(183,60)	(258,29)	(4,71)
Laba Usaha	919,98	773,40	699,07	530,29	156,70	18,95
Pendapatan Keuangan	43,56	58,84	63,20	56,78	75,97	(25,97)
Beban Keuangan	(261,65)	(213,52)	(155,15)	(211,92)	(144,49)	22,54
Laba Sebelum Pajak	701,89	618,72	607,12	375,15	88,18	13,44
Beban Pajak						
Pajak Kini	(1,39)	(0,19)	(1,42)	(0,96)	(3,49)	631,58
Pajak Tangguhan	27,72	18,52	(15,94)	(32,16)	38,77	49,68
Jumlah Manfaat Pajak	26,33	18,33	17,36	(33,12)	35,28	43,64
Laba Tahun Berjalan	728,21	637,05	589,76	342,03	123,46	14,31
Jumlah Laba Komprehensif	457,27	718,96	357,20	268,40	(104,38)	(36,40)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	1.185,49	1.356,01	946,96	610,43	19,98	(12,58)
EBITDA	1.193,87	925,82	772,27	776,62	406,56	28,95

Arus Kas

Pada tahun 2023, PT Pos Indonesia (Persero) mengalami kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp. 351,24 miliar, kenaikan kas dan setara kas berasal dari kenaikan aktivitas pendanaan. Jumlah kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi sebesar Rp. 66,79 miliar. Kas netto dari aktifitas investasi perusahaan turun signifikan yaitu sebesar Rp. 223,89 miliar atau turun -172% dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena ada kenaikan realisasi investasi jika dibandingkan dengan periode tahun 2022

Kas netto Perusahaan dari aktivitas pendanaan naik dari Rp. 145,50 miliar pada 2022 menjadi Rp. 508,34 miliar pada 2023 , kenaikan kas netto dari aktivitas pendanaan disebabkan naiknya penerimaan pendanaan eksternal menjadi Rp. 10.024,00 miliar atau naik 70.53% bila dibandingkan tahun 2022 lalu.

Secara lengkap potret laporan arus kas konsolidasian Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan YoY (%)
Arus kas dari Aktifitas Operasi	66,79	327,86	(79,63)
Arus kas dari Aktifitas Investasi	(223,89)	(82,10)	(172,70)
Arus kas dari Aktifitas Pendanaan	508,34	145,50	249,38
Arus kas bersih	352,12	391,25	(10,00)

Upaya untuk meningkatkan pengelolaan posisi arus kas dilakukan dengan cara:

1. Membentuk *task force* untuk percepatan penagihan piutang dan PYMHD.
2. Melakukan efisiensi pada beban SDM dan operasi.
3. Melakukan penjadwalan pembayaran kepada pihak mitra.
4. Bekerjasama dengan Bank Sinarmas dan BCA untuk menambah fasilitas pinjaman sebagai solusi untuk menutup mismatchkas DPK dan pembiayaan operasional BPS.
5. Sentralisasi keuangan di Kantor Pusat sejak Juli 2021

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan perusahaan membayar utang, baik jangka pendek ataupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh sumber likuiditas perusahaan. Tingkat likuiditas yang baik mencerminkan perusahaan tidak mengalami kesulitan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Hal tersebut diindikasikan oleh rasio lancar sebesar 137,57% turun dari 174.86% di tahun 2022 walau mengalami penurunan tetap mengindikasikan bahwa manajemen mampu menjaga dengan baik stabilitas hutang jangka pendek dan menjaga rasio aset lancar terhadap hutang jangka pendek untuk memastikan terjaminnya pembayaran hutang yang akan jatuh tempo 12 bulan ke depan. Secara keseluruhan kondisi keuangan perusahaan masih baik, hal ini tercermin dari rasio utang terhadap aset sebesar 0.39 kali, tidak terlalu jauh dibandingkan dengan tahun 2022 0.37 kali , mengindikasikan jumlah aset perusahaan lebih besar dari utang yang dimiliki dan menunjukan upaya manajemen dalam mengendalikan pertumbuhan liabilitas agar dapat seimbang dengan asetnya. Dengan semakin rendahnya rasio utang terhadap aset akan membuat perusahaan semakin baik karena kemampuan membayar hutangnya semakin baik.

Jangka Pendek

Kemampuan untuk membayar utang jangka pendek dapat dilihat antara lain dari rasio lancar, walau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 174,86% menjadi 137,57% di tahun 2023, rasio lancar perusahaan tetap terjaga dengan baik. Sedangkan posisi rasio kas mengalami penurunan dari 109,36% ditahun 2022 menjadi 68,00% tahun ini. Hal ini menunjukkan manajemen menjaga dengan baik stabilitas utang jangka pendek melalui pengelolaan rasio aset lancar terhadap hutang jangka pendek untuk memastikan terjaminnya pembayaran hutang yang akan jatuh tempo 12 bulan ke depan.

Kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendeknya dapat dilihat melalui rasio-rasio pada tabel berikut:

Rasio	2023	2022
Rasio Lancar (%)	137,57	174,86
Rasio Kas (%)	68,00	109,49

Jangka Panjang

Pada tahun 2023, Perusahaan memiliki kinerja liabilitas yang cukup baik terlihat dari terjaganya rasio liabilitas jangka pendek dan rasio liabilitas jangka panjang. Rasio utang terhadap ekuitas perusahaan terjaga dari 0,60 kali tahun 2022 menjadi 0,65 kali pada tahun 2023. Karakteristik bisnis PT Pos Indonesia (Persero) dengan layanan jasa keuangannya, cenderung memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi. Hal ini disebabkan sebagian besar dana yang dikelolanya adalah dana pihak ketiga, dimana secara akuntansi dianggap sebagai utang. Semakin besar modal pihak ketiga yang dikelola, maka kemungkinan untuk mendapat laba usaha juga semakin tinggi. Tahun 2023 posisi rasio utang terhadap ekuitas yang berada dibawah 1 kali, mengindikasikan permodalan yang semakin kuat. Penurunan rasio tersebut menunjukan semakin baiknya kondisi keuangan perusahaan hal ini terjadi karena ekuitas perusahaan mengalami kenaikan sebesar 18,00% pada 2023 sementara jumlah utang perusahaan mengalami kenaikan 26,95%.

Kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang dapat dilihat melalui rasio-rasio pada tabel:

Rasio	2023	2022
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (kali)	0,65	0,60
Rasio Utang Terhadap Total Aset (kali)	0,40	0,38
Rasio EBITDA Terhadap Beban Bunga (%)	366,39	405,12

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kolektibilitas piutang dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan dalam menagih piutangnya. Periode penagihan piutang meningkat dimana pada 2023 selama 23,60 hari dibandingkan lama periode penagihan piutang di 2022 yang mencapai 25,68 hari.

Manajemen pada periode 2022 telah menerapkan perhitungan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan) piutang sebagai mana metode yang terdapat dalam Standar Keuangan Akuntansi No.71 tentang Instrumen Keuangan, adapun dampak penerapan SAK ini adalah sebesar Rp. 267,38 miliar pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 271,08 miliar. Manajemen menerapkan koreksi SAK ini dengan melakukan koreksi secara restropektif komulatif dengan mencatat seluruh dampak penerapan SAK ini pada saldo laba/rugi periode sebelumnya pada awal pelaporan 1 Januari 2020. Dalam melakukan perhitungan penyisihan piutang usaha sebagaimana yang disyaratkan dalam PSAK 71 khususnya untuk piutang pendapatan luar negeri manajemen melakukan offseting antara saldo piutang dan hutang untuk pelanggan yang sama, kemudian hasil piutang net tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan cadangan penyisihan atas piutang pendapatan usaha.

Perusahaan telah membentuk provisi atas penurunan nilai piutang berdasarkan pada nilai ketertagihan dari tingkat penurunan nilai historis dan nilai individual dari kualitas kredit dan historis kredit dari para pelanggan sebesar Rp. 32,014 miliar di tahun 2022 dan Rp. (124,03) miliar di tahun 2021. Perseroan membedakan piutang usaha pihak berelasi (Pemerintah) dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Dimana Perseroan telah melakukan telaah terkait dengan kolektibilitas piutang Pemerintah tersebut.

Berdasarkan penelaahan terhadap keadaan akun piutang kerugian Perseroan dan Entitas Anak pada akhir periode pelaporan, manajemen Perseroan dan Entitas Anak berpendapat bahwa pencadangan penurunan nilai cukup untuk menutupi kerugian jika terdapat kerugian piutang Perseroan dan Entitas Anak yang tidak dapat tertagih lagi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Perseroan telah melakukan perhitungan pencadangan sebagaimana standar yang berlaku terlebih pencadangan untuk piutang usaha luar negeri perseroan dalam perhitungan pencadangannya terlebih dahulu memperhitungkan berapa utang luar negeri negara bertalian kemudian dihitung berapa cadangan dari sisa piutang dari negara tersebut. Piutang usaha Perseroan tidak digunakan sebagai jaminan utang bank.

PERMODALAN

Struktur permodalan

Pada 31 desember 2023 total ekuitas PT Pos Indonesia (Persero) tercatat Rp. 8.135,07 miliar sedangkan total liabilitas PT Pos indonesia (Persero) per 31 Desember 2023 adalah Rp. 5.523,77 miliar. Rasio Ekuitas terhadap jumlah liabilitas pada tahun 2023 tidak banyak berubah dari 0,60 kali pada 2022 menjadi 0,65 kali pada 2023, hal ini mengindikasikan struktur permodalan yang tetap kuat dan semakin baik untuk menjaga kelangsungan bisnis Perusahaan pada periode mendatang.

Pada 2023 total aset PT Pos Indonesia (Persero) tercatat sebesar Rp. 13.658,84 miliar sehingga pada akhir 2023 rasio modal sendiri terhadap total aset menjadi 0,60 kali turun jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,62 kali. Hal ini menunjukan kebijakan permodalan yang dijalankan perusahaan berjalan dengan efektif sesuai dengan arahan dari pemegang saham.

Rincian struktur modal (*capital structure*) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas:

1. Ekuitas sebesar Rp. 8.135,07 miliar terdiri dari:
   - Modal saham Rp. 455,03 miliar;
   - Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya Rp. 3.264,31 miliar;
   - Saldo laba belum ditentukan penggunaannya Rp. 755,63 miliar;
   - Komponen ekuitas lainnya Rp. 3.702,78 miliar;
   - Kepentingan non-pengendali Rp. (45,03) miliar.
2. Utang berbasis bunga/sukuk sebesar Rp. 5.523,77 miliar yang terdiri dari:
   - Pinjaman bank jangka pendek Rp. 2.285,60 miliar;
   - Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :
     1) Pinjaman Jangka Menengah Rp. 323,36 miliar;
     2) Utang sewa pembiayaan Rp. 7,73 miliar;
   - Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
     1) Imbalan Pasca Kerja Rp. 1.108,03 milliar
     2) Utang sewa pembiayaan Rp. 15,19 miliar.
     3) Obligasi Rp.495,10 miliar

Kebijakan Dan Dasar Pemilihan Permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Kebijakan Perseroan adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat dalam rangka untuk mengamankan akses untuk membiayai dengan biaya yang wajar. Tabel di bawah merupakan ringkasan jumlah modal Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023.

MODAL PERSEROAN			
Uraian	2023 (audited)	2022 (audited)	YoY (%)
Modal	455,02	455,02	
Saldo Laba ditahan	4.019,94	3.264.31	23,15
Komponen Ekuitas Lainnya	3.702,78	3.247,79	14,01
Kepentingan Non Pengendali	(45,03)	(17,56)	(156,44)
Jumlah	8.135,07	6.949,57	17,06

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Pos Indonesia tidak mempunyai ikatan yang material terkait investasi barang modal sepanjang 2023.

INVESTASI BARANG MODAL

Pencapaian CAPEX (*Capital Expenditure*) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 terserap 47,2% dari target RKAP tahun 2023. Adapun progres kinerja investasi Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut ini :

No	NAMA PROKER	DIREKTORAT	NILAI CAPEX	AUDITED	CAPAIAN (%)
1	Finserv System Improvement: Tabungan Pos, Multibank Fronting, Cash Pickup, dan	Direktorat Bisnis Jasa Keuangan	69.65	-	0.0
2	Pengadaan sarana dan prasarana TPS dan IPC		8.40	7.54	89.8
3	Pengembangan core systems		21.07	9.99	47.4
4	Improvement Digital Channel: SUPER APPS		18.50	1.65	8.9
5	Courier Systems Improvement: Pickup, Smart Routing Systems & Features		6.48	2.65	40.9
6	Peningkatan Kapasitas Operasi berupa "Pembangunan Hub Jakarta Timur"		33.00	28.78	87.2
7	Pemenuhan alat kerja operasi untuk mendukung proses operasi		8.30	2.84	30.6
8	Penggunaan teknologi RFID dan Mesin Sortir Robotic untuk meningkatkan kualitas opera	Direktorat Operasi dan Digital Services	11.00	10.41	94.6
9	CBA Online Versi 2		0.05	0.05	100.0
10	Pemenuhan alat kerja digital pickup service		2.28	-	0.0
11	Pengembangan digital workplace (digitalisasi internal bisnis proses perusahaan)		3.00	0.67	22.2
12	Pengembangan Data Analytics (datalake/FDS)		2.00	0.34	17.2
13	Peremajaan perangkat kerja IT		7.50	7.40	98.7
14	Standardisasi sarana dan modernisasi perangkat war room		1.80	1.68	93.3
15	Pemenuhan syarat compliance: INDI 4.0, CObIT 2019 (ITSM), ISO 27001 (IT Security)		3.00	1.99	66.2

16	Penyesuaian sistem pajak		0.55	0.51	93.4
17	Otomasi laporan Cost of Service		0.40	0.14	34.0
18	Peningkatan kualitas SIMKUG		2.50	1.22	48.8
19	Peningkatan pengendalian settlement		0.20	-	0.0
20	Peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban Cost Center	Direktorat Keuangan dan Manajemen Risik	0.10	0.09	88.0
21	Integrasi SIM Aset		2.00	-	0.0
22	Standardisasi Kantor dan Atributnya		60.00	59.28	98.8
23	Integrasi SAP, Core Giro System, dan Core Bank System		4.00	0.97	24.2
24	Sistem perencanaan anggaran berbasis program kerja		2.00	1.63	81.7
25	DES Posfin		93.00	-	0.0
26	DES Poslog (Due Diligence telah selesai dilaksanakan pada tahun 2022)	Direktorat Business Development dan Portfolio Managemen	69.50	69.50	100.0
27	Kajian Konsultan menjadi Perusahaan Logistik		17.00	14.77	86.9
	Jumlah Induk		448.26	224.11	50.0
1	Pengelolaan alat transportasi		2.70	-	0.0
2	Integrasi sistem fulfillment, modernisasi sistem, dan pengembangan jaringan titik layan	PT Pos Logistik Indonesia	0.60	0.52	87.3
3	Pengelolaan infrastruktur teknologi		1.20	-	0.0
4	Peningkatan kapabilitas sistem dengan integrasi internal dan eksternal		10.00	0.42	4.2
5	Investasi untuk building management, hospitality, pengembangan, dan supporting	PT Pos Properti Indonesia	90.73	36.17	39.9
	Jumlah Anak Perusahaan		105.23	37.12	35.3
	JUMLAH TOTAL		553.49	261.23	47.2

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan pembagian dividen PT Pos Indonesia (Persero) mengacu kepada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") terkait jumlah yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pengembangan Perusahaan. Pembayaran dividen untuk tahun buku 2022 ditetapkan pada pelaksanaan RUPS pada tahun 2023. Berdasarkan keputusan RUPS, PT Pos Indonesia (persero) menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian tahun 2022 seluruhnya sebagai cadangan, sehingga pada tahun 2023 Pos Indonesia tidak membayar dividen atas kinerja tahun buku 2022 kepada Pemegang Saham.

Berikut Pembayaran dividen 5 tahun buku terakhir.

Tahun	Kebijakan	Jumlah Deviden	Deviden Per Saham	Deviden Payout Ratio	Tanggal Pembayaran
2019	RUPS	Tidak ada Pembagian	Tidak ada Pembagian	Tidak Ada	Tidak Ada
2020	RUPS	Tidak ada Pembagian	Tidak ada Pembagian	Tidak Ada	Tidak Ada
2021	RUPS	Tidak ada Pembagian	Tidak ada Pembagian	Tidak Ada	Tidak Ada
2022	RUPS	Tidak ada Pembagian	Tidak ada Pembagian	Tidak Ada	Tidak Ada
2023	RUPS	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan



5

Tata Kelola Perusahaan


POS
IND
Logistik Indonesia

Good Corporate Governance (GCG)

Komitmen PT Pos Indonesia (Persero) untuk melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance* sebagai bagian dari bisnis untuk pencapaian visi dan misi Perusahaan salah satunya dengan menerbitkan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Code*) yang selalu ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

Panduan penerapan *Good Corporate Governance* PT Pos Indonesia (Persero) dituangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:210/Dekom/0621 dan Nomor:KD.052/Dirut/0621 Tentang Panduan Penerapan *Good Corporate Governance* di PT Pos Indonesia (Persero) yang merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah *Good Corporate Governance* berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, Visi, Misi dan Kredo Perusahaan serta praktik-praktik terbaik dalam *Good Corporate Governance*.

Panduan Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dalam menjabarkan Tata Nilai Dasar PT Pos Indonesia (Persero) ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika bisnis dan tata perilaku.

PT Pos Indonesia (Persero) bertekad akan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Govenance* dalam seluruh aktivitasnya. Komitmen ini ditegaskan karena diharapkan dengan penerapan *Good Corporate Governance* akan memberikan manfaat bagi Perusahaan dan seluruh stakeholdersnya antara lain berupa:

1. Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik dan transparan.
2. Meningkatkan efisiensi operasional Perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
3. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan karena kepercayaan kreditur yang lebih tinggi terhadap Perusahaan.
4. Meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.
5. Meningkatkan *Corporate Image*, kepuasan pelanggan dan *stackeholder* lainnya.

Good Corporate Governance Code merupakan acuan kerja bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan PT Pos Indonesia (Persero). Dengan demikian diharapkan seluruh proses kerja dapat memiliki standar yang tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance Code* PT Pos Indonesia (Persero) dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, visi dan misi Perusahaan serta praktik-praktik terbaik *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance Code berlaku sebagai kebijakan dasar yang harus dipatuhi oleh segenap jajaran PT Pos Indonesia (Persero), dan PT Pos Indonesia (Persero) harus pula menginformasikan *Good Corporate Governance Code* kepada semua pihak yang berkepentingan, dengan demikian diharapkan semua pihak akan menghormati peraturan *Good Corporate Governance Code* dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai acuan bagi PT Pos Indonesia (Persero) dalam mencapai tujuan. PT Pos Indonesia (Persero) akan melakukan evaluasi dan revisi yang diperlukan atas peraturan ini untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi karena lingkungan bisnis yang dinamis dan *Kredo* Perusahaan serta praktik-praktik terbaik dalam *Good Corporate Governance*.

Panduan Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dalam menjabarkan Tata Nilai Dasar PT Pos Indonesia (Persero) ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika bisnis dan tata perilaku.

PT Pos Indonesia (Persero) bertekad akan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Govenance* dalam seluruh aktivitasnya. Komitmen ini ditegaskan karena diharapkan dengan penerapan *good corporate Governance* akan memberikan manfaat bagi Perusahaan dan seluruh *stakeholders*nya antara lain berupa:

1. Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik dan transparan.
2. Meningkatkan efisiensi operasional Perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
3. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan karena kepercayaan kreditur yang lebih tinggi terhadap Perusahaan.
4. Meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.
5. Meningkatkan *Corporate Image*, kepuasan pelanggan dan *stakeholder* lainnya.

Good Corporate Governance Code merupakan acuan kerja bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan PT Pos Indonesia (Persero). Dengan demikian diharapkan seluruh proses kerja dapat memiliki standar yang tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance Code* PT Pos Indonesia (Persero) dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, visi dan misi Perusahaan serta praktik-praktik terbaik *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance Code berlaku sebagai kebijakan dasar yang harus dipatuhi oleh segenap jajaran PT Pos Indonesia (Persero), dan PT Pos Indonesia (Persero) harus pula menginformasikan

Good Corporate Governance Code kepada semua pihak yang berkepentingan, dengan demikian diharapkan semua pihak akan menghormati peraturan *Good Corporate Governance Code* dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai acuan bagi PT Pos Indonesia (Persero) dalam mencapai tujuan. PT Pos Indonesia (Persero) akan melakukan evaluasi dan revisi yang diperlukan atas peraturan ini untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi karena lingkungan bisnis yang dinamis.

Maksud dan Tujuan penerapan GCG di Perusahaan

1. Memaksimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.
3. Mendorong agar manajemen Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan terhadap perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan nilai investasi Perusahaan.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Untuk mewujudkan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang telah disusun dan dimiliki PT Pos Indonesia (Persero) mengatur antara lain:

1. Program pengenalan anggota dewan komisaris dan direksi baru.
2. Rencana jangka panjang perusahaan (RJPP).
3. Rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP).
4. Pendelegasian wewenang rups, dewan komisaris dan direksi.
5. Pengelolaan sumber daya manusia.
6. Integritas dalam aktivitas bisnis.
7. Data perusahaan, kerahasiaan dan keterbukaan informasi.
8. Penyelewengan dan benturan kepentingan.
9. Pengelolaan kegiatan pemasaran.
10. Manajemen risiko.
11. Tata kelola teknologi informasi (IT *governance*).
12. Pengelolaan keuangan.
13. Pengadaan barang dan jasa.
14. Manajemen mutu.
15. Sistem penilaian kinerja dan remunerasi.
16. Sistem audit.
17. Pengendalian gratifikasi.
18. Pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan.
19. Pelaporan harta kekayan penyelenggara negara bagi dewan komisaris, direksi, pejabat setingkat dan dua tingkat dibawah direksi.
20. Tim sosialisasi, pelaksanaan dan sosialisasi GCG.
21. Pengaturan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*) dan/atau perusahaan patungan.
22. Pelaporan.
23. Tanggung jawab sosial perusahaan
24. Keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL).
25. Pengelolaan aset.
26. Penelitian dan pengembangan.

Prinsip-prinsip GCG

- *Transparency*
- *Accountability*
- *Responsibility*
- *Independency*
- *Fairness*

PRINSIP-PRINSIP GCG

Sebagai perusahaan BUMN, PT Pos Indonesia (Persero) secara terus-menerus meningkatkan penerapan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik guna memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara menerapkan prinsip TARIF yaitu *Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness*, sehingga dapat memenuhi kewajiban yang baik kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Mitra Bisnis serta pemangku Kepentingan lainnya. Kesadaran akan pentingnya GCG dan berupaya terus menerus dalam melakukan *improvement* dan menjadikannya sebagai bagian dari budaya perusahaan didalam menerapkan GCG, hal ini merupakan langkah-langkah komitmen yang dilakukan setiap insan PT Pos Indonesia (Persero) dalam menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat dan berkesinambungan dalam pengelolaan kegiatan usahanya. Dalam setiap aktivitasnya, PT Pos Indonesia (Persero) senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

1. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi adalah keterbukaan mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan akan menjamin akurasi informasi material menyangkut kinerja, keadaan keuangan, pengelolaan serta kepemilikan saham Perusahaan dan lain-lain informasi yang penting dan relevan serta akan mengungkapkannya secara terbuka, jelas dan tepat waktu. Perusahaan akan mengungkapkan informasi tersebut di atas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktik terbaik GCG.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, hak, tanggung jawab serta pelaksanaan dan mekanisme pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan akan mendefinisikan dan mengkomunikasikan fungsi, hak, dan tanggung jawab serta kewajiban masing-masing Organ Perseroan. Oleh karenanya, setiap keputusan dalam perusahaan akan jelas aspek akuntabilitasnya. Disamping itu, Perusahaan senantiasa berupaya menjaga keseimbangan kepentingan Pemegang Saham, serta pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas (*division of authority*) antar Organ Perseroan serta mengurangi dampak dari agency problem yang timbul akibat perbedaan kepentingan antar Organ Perusahaan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

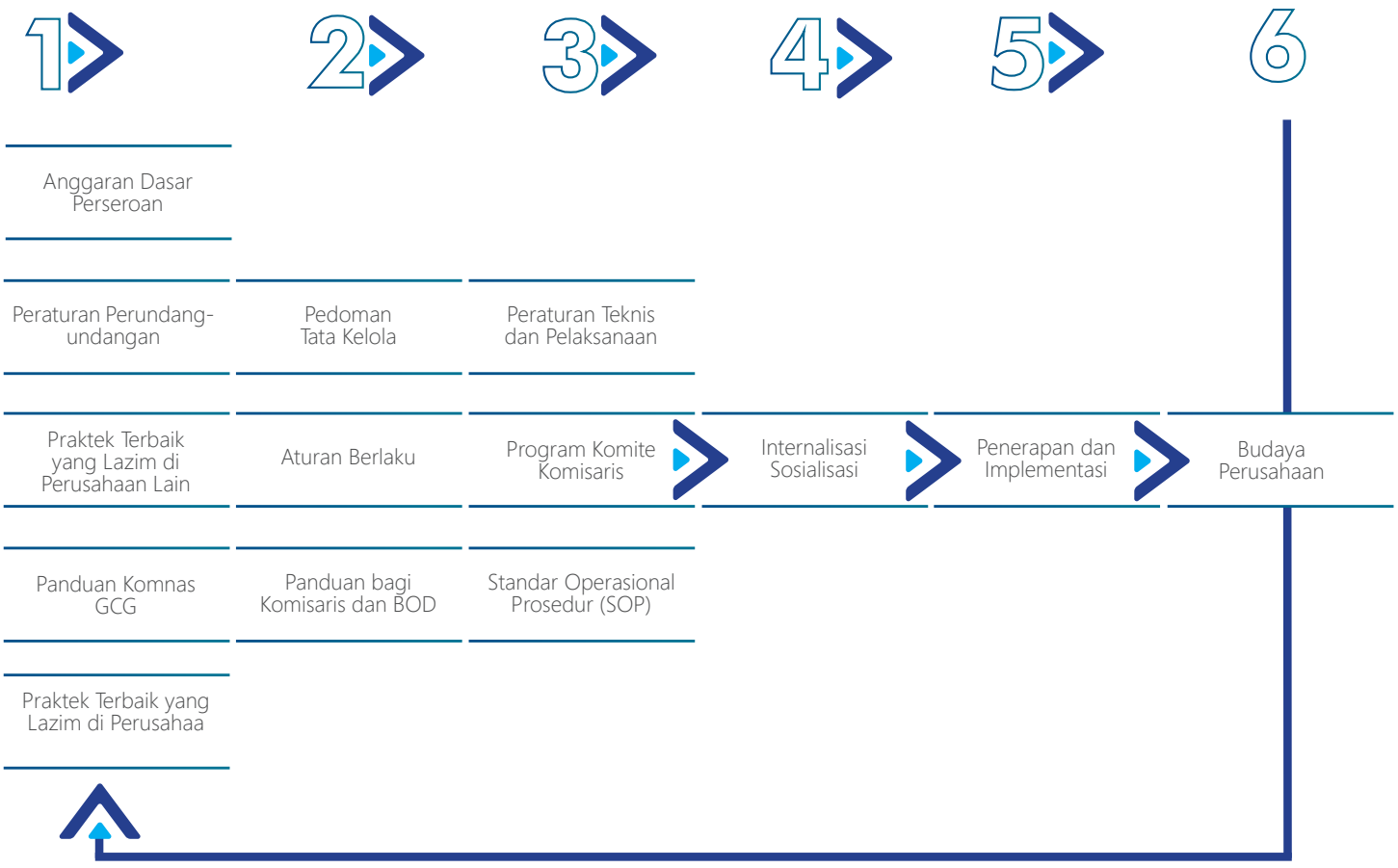
Pertanggungjawaban adalah penghormatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan komitmen untuk mengelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan akan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*). Perusahaan akan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

Kemandirian adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar Organ Perseroan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perusahaan. Setiap Organ Perseroan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain Organ Perseroan tidak boleh mencampuri pengurusan Perusahaan.

5. *Fairness* (keadilan)

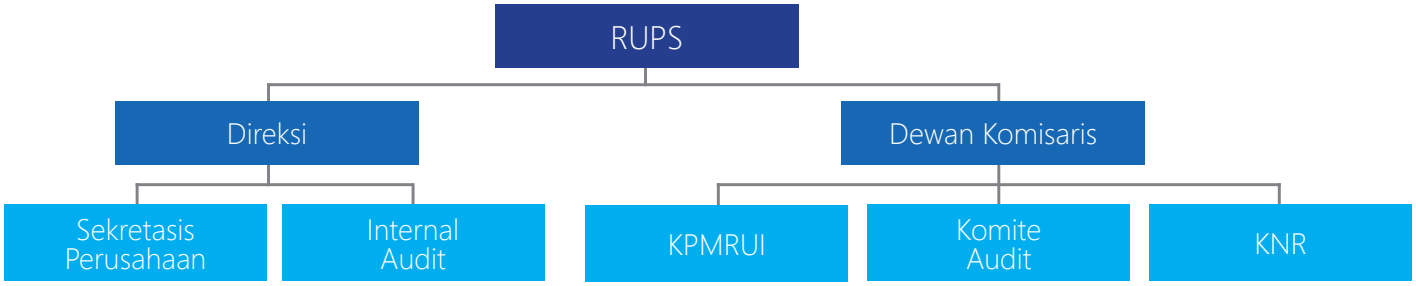
Keadilan adalah kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan akan selalu mengupayakan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan organ utama perusahaan yang terdiri dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris serta Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing yang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap organ mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Hal terpenting dalam kebijakan tata kelola perusahaan adalah adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara organ perusahaan. RUPS merupakan wadah para pemegang saham yang memiliki wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan sesuai amanah yang diberikan, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi serta melakukan penasihatan agar kinerja perusahaan lebih baik.

Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite khusus yang bertugas membantu Dewan Komisaris dan memberi saran sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Komite - komite di bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRU) dan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR). Selain itu, Direksi telah membentuk organ-organ Pendukung yaitu Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.



PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

Hak Pemegang Saham

Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak yang harus dilindungi, antara lain adalah:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan, secara tepat waktu, terukur, dan teratur sepanjang informasi tersebut tidak bersifat rahasia.
3. Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG.
4. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan dalam bentuk deviden, dan sisa hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya.
5. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Pemegang Saham:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.
3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan.
4. Menetapkan Auditor Eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan Komisaris.
5. Menetapkan remunerasi dan tantiem Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi melalu RUPS.
7. Memberikan persetujuan atas aksi korporasi Perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pemegang Saham:

1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, Perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat.
4. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perusahaan yang memiliki semua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham dalam mempengaruhi dan menetapkan kebijakan bagi Perusahaan. RUPS merupakan forum di mana Dewan Komisaris dan Direksi melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. Berbagai agenda yang dibahas dalam RUPS antara lain adalah penetapan arah dan strategi jangka panjang Perusahaan, penilaian kineria operasional dan keuangan, penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta remunerasi mereka dan agenda lain yang diusulkan oleh Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat kepada Pemegang Saham berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, RUPS terdiri atas:

1. RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) diselenggarakan selambat-lambatnya akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.
2. RUPS Tahunan untuk mengesahkan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan diselenggarakan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pemegang Saham atau atas usulan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Wewenang RUPS

1. Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. Menetapkan perhitungan alokasi laba Perusahaan untuk:
   a. Laba yang ditahan dan cadangan;
   b. Dividen kepada Pemegang Saham;
   c. Bonus Direksi, Dewan Komisaris, dan Pekerja
3. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan.
7. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang terkait dengan Dewan Komisaris.
9. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Dewan Komisaris.
10. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh Direksi pada Anak Perusahaan.
11. Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi.

Penyelenggaraan RUPS

1. Perusahaan memberikan panggilan kepada Pemegang Saham tepat waktu yaitu dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, memberikan informasi mengenai agenda RUPS, termasuk usul yang diajukan oleh Direksi.
2. Perusahaan melengkapi surat undangan pemanggilan RUPS dengan pernyataan mengenai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
3. Pemegang Saham mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal lain dalam agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
4. Perusahaan menjamin keputusan RUPS yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil.
5. Perusahaan memberikan risalah RUPS kepada Pemegang Saham jika diminta. Risalah RUPS yang dibuat akan memuat pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung terhadap keputusan yang dibuat.
6. Perusahaan mengungkapkan kepada Pemegang Saham sistem penentuan honor/gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta rincian mengenai honor/gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Perusahaan memberikan informasi mengenai rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan khusus untuk RUPS, Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
8. Perusahaan memberikan informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan yang dimuat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
9. Perusahaan memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
10. RUPS dalam acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan dengan suara bulat dapat menyetujui tambahan mata acara RUPS.
11. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS dan risalah RUPS ini wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Kewajiban untuk tanda tangan tersebut tidak di syaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang diangkat oleh RUPS yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi meliputi, namun tidak terbatas pada, rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundangan yang berlaku. Dewan Komisaris akan selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku serta dapat menggunakan saran profesional yang independen dan/atau dapat membentuk komite-komite, jika diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya.

Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris

Keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
2. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
3. Dalam hal Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
4. Sekurang-kurangnya 20% dari anggota Dewan Komisaris harus berasal dari kalangan di luar Perusahaan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan:

a. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham.

b. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya.

c. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.

Kriteria Dewan Komisaris

Kriteria Dewan Komisaris Pos Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara

1. Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris, yaitu:
   a. orang perseorangan;
   b. cakap melakukan perbuatan hukum;
   c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
   d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
   e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

2. Persyaratan materiil anggota Dewan Komisaris yaitu:
   a. integritas;
   b. dedikasi;
   c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
   d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan
   e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

3. Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris, yaitu:
   a. bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
   b. bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
   c. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
   d. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
   e. bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan; dan
   f. bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari penyelenggara negara harus melaporkan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.

Pengangkatan Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Yaitu melalui beberapa ketentuan yaitu :

1. Sumber bakal calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berasal dari :
   a. Mantan Direksi BUMN;
   b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
   c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah;
   d. Sumber Lain.
2. Penjaringan
   a. Menteri, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber.
   b. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.
3. Penilaian
   a. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, Persyaratan Materiil, dan Persyaratan Lain.
   b. Evaluasi pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain dilakukan oleh Deputi. Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi yang cukup, pembuktian dapat dilakukan dengan menandatangani pernyataan pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain oleh bakal calon yang bersangkutan.
   c. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada poin b terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Menteri memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   d. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri
   e. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan dengan cara:
      i. menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung;
      ii. khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; dan/atau
      iii. wawancara.
   f. Hasil Penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria "Disarankan" atau "Tidak Disarankan".
   g. Penilaian sebagaimana dimaksud pada poin e, tidak dilakukan apabila bakal calon merupakan pejabat *ex officio* dan pejabat Pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Presiden.

h. Bagi BUMN tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan pengangkatan anggota Dewan Komisaris memerlukan penilaian oleh regulator, Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak diwajibkan, selanjutnya pemenuhan persyaratan materiil sepenuhnya disesuaikan dengan hasil penilaian regulator.
i. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang sama, dilakukan berdasarkan penilaian Deputi atas kemampuan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya. Penyajian hasil penilaian dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.

4. Usulan Pengangkatan
   a. Bagi calon yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, dan Persyaratan Lain serta telah dilakukan Penilaian dengan kriteria "Disarankan", dapat ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris.
   b. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus Penilaian sesuai ketentuan sektoral (sesuai ketentuan yang berlaku di bidang usaha BUMN yang bersangkutan). Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum Penilaian sesuai ketentuan sektoral, maka dalam keputusan pengangkatannya dinyatakan bahwa pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian.
   c. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dilakukan melalui cara:
      i. Keputusan Menteri apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara;
      ii. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
   d. Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris.
   e. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris (jika ada). Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.

f. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka setelah Keputusan ditetapkan, Deputi memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Dewan terpilih. Dalam proses penyerahan, Deputi dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi yang membidangi manajemen sumber daya manusia, dan Asisten Deputi Sektor.
g. Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
h. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil Penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
i. Deputi mengadministrasikan semua dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan Penilaian.
j. Anggota Dewan Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS.
k. Anggota Dewan Komisaris mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

Pemberhentian (Masa Jabatan)

1. Masa jabatan Dewan Komisaris 5 (lima) tahun sejak tanggal diangkat oleh RUPS.
2. Jabatan Dewan Komisaris akan berakhir jika:
   a. Meninggal Dunia;
   b. Masa jabatan berakhir;
   c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
   d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri/RUPS.
3. RUPS dapat memberhentikan jabatan Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan pemberhentian, setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dan hadir di RUPS yang diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian tersebut. Jika RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka pemberhentian paruh waktu tersebut batal.
4. Apabila seorang Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang digantikannya, kecuali RUPS menetapkan lain.
5. Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris lainnya dan Direksi Perusahaan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dan atau berhenti sebelum maupun setelah masa jabatan berakhir, kecuali karena meninggal dunia tetap dimintakan pertanggungjawaban sejak pengangkatannya sampai tanggal penetapan pengunduran dirinya dalam RUPS.
7. Dalam hal terdapat penambahan Dewan Komisaris, maka masa jabatan Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris lainnya yang telah ada, kecuali RUPS menetapkan lain.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pembagian tugas Anggota Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendalaman terhadap hal-hal yang menjadi topik pengawasan Dewan Komisaris. Pembagian tugas dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Cakupan tugas dari seluruh tugas Direksi;
2. Latar belakang keahlian dan pengalaman Komisaris, untuk mendapatkan kualitas pengawasan yang optimal;
3. Posisi anggota Dewan Komisaris yang sedang ditugaskan/menjabat sebagai Ketua Komite Dewan Komisaris;
4. Pembagian tugas Dewan Komisaris ditetapkan dan dilakukan review terhadap pembagian tugas tersebut setiap 2 (dua) tahun.

Tanggung Jawab

1. Melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
2. Menyusun rencana kerja tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian dari RKAP dan melakukan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan rencana kerja dimaksud.
3. Memastikan kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RJPP dan melakukan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara *self assessment*.
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta memberikan arahan kepada
5. Direksi antara lain mengenai sistem pengendalian intern Perusahaan, manajemen risiko Perusahaan, sistem teknologi informasi yang digunakan Perusahaan, pengelolaan SDM, kebijakan pengelolaan keuangan dan akuntansi, pengadaan barang dan jasa, standar mutu dan pelayanan.
6. Memastikan kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku, pedoman tata kelola perusahaan dan perjanjian dengan pihak ketiga, serta memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Pengembangan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan.
7. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.

8. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
9. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan / perusahaan patungan.
10. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan RUPS.

Kewajiban

Dalam melakukan pengawasan atas pengurusan perseroan, Dewan Komisaris berkewajiban :

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
2. Melakukan fungsi dan tugas pengendalian dan pengawasan atas rencana investasi dan risiko usaha.
3. Melakukan fungsi dan tugas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa perusahaan dan pelaksanaannya.
4. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi.
5. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.
6. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
7. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
8. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan atau kejadian penting lainnya yang perlu diketahui oleh RUPS.
9. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan, memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta.
10. Menyusun program kerja tahunan dan anggaran biaya Dewan Komisaris serta dimasukkan dalam RKAP, mengusulkan akuntan publik, membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
11. Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
12. Memastikan bahwa dalam laporan tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.
13. Menetapkan kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.

14. Menetapkan kebijakan mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha dan kinerja Perusahaan yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris.
15. Menetapkan kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.
16. Menetapkan kebijakan pengusulan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan penilaian kinerja Direksi Kolegial maupun Individual.
17. Menetapkan mekanisme untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan.
18. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di perusahaan dan pelaksanaannya.
19. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board Charter / Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Untuk kejelasan sistem dan struktur hubungan antar organ perseroan, kewenangan, tugas dan hubungan kerja masing-masing organ perseroan agar sejalan dengan Prinsip GCG, maka Perseroan telah menyusun pedoman berupa Panduan Bagi Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 317/Dekom/0921 dan KD.082/Dirut/0921 tanggal 08 September 2021 tentang *Board Manual* PT Pos Indonesia (Persero) yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No.306/DEKOM/1222 tentang Piagam Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 30 Desember 2022 yang berisikan:

1. Program Pengenalan Dewan Komisaris;
2. Program Pengembangan Kompetensi;
3. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris;
4. Etika Jabatan;
5. Pembagian Tugas Dewan Komisaris;
6. Kewenangan Dewan Komisaris;
7. Kewajiban Dewan Komisaris;
8. Pengambilan Keputusan;
9. Perencanaan Kerja Dewan Komisaris;
10. Mekanisme Persetujuan RKAP dan RJPP;
11. Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris;
12. Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi;
13. Rapat Komite-Komite;
14. Organ Pendukung Dewan Komisaris

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung komisaris yaitu Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit (KA), Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) serta Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI). Komite - komite yang dibentuk mempunyai tugas yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris antara lain namun tidak terbatas pada aspek fungsi pengendalian internal, fungsi nominasi dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip GCG sesuai peraturan yang berlaku.

Penilaian atas komite dibawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai bahwa kerja sama antara Komite Audit (KA), Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) serta Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI) telah berjalan dengan sangat baik. Begitupun dukungan yang diberikan Dewan Komisaris kepada Komite Audit (KA), Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) serta Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI) telah dilaksanakan sebaik mungkin melalui pemberian arahan kepada Komite Audit dalam menjalankan tugas sebagaimana telah ditetapkan di dalam Piagam Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero), maupun Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI) dan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) sesuai fungsinya. Penilaian atas kinerja pada komite-komite dibawah Dewan Komisaris.



Gambar :
Gedung Heritage Kantor Pos Medan

1. Penilaian Kinerja Komite Audit Pada tahun 2023 Skor KPI untuk Komite audit adalah sebesar 98.40 dari target yang direncanakan sebesar 100 dengan kategori "Sangat Baik

NO	Kegiatan	Rencana	Realisasi	Bobot	Skor KPI
1	Penilaian Terhadap sistem Pengendalian Internal	6	3	6	6.00
2	Penilaian terhadap Internal Audit	13	8	16	14.40
3	Penilaian terhadap Auditor Ekstrernal (KAP 2022 dan KAP 2023)	20	13	22	22.00
4	Penilaian terhadap Prosedur Evaluasi atas Informasi yg dihasilkan oleh PT Pos Indonesia Hal-hal yang Memerlukan Perhatian Dewan	2	2	2	2.00
5	Komisaris dan Tugas-tugas Lainnya dari Dewan Komisaris	24	17	18	18.00
6	Peningkatan Kapasitas Komite Audit	2	2	2	2.00
7	Rapat	48	60	24	24.00
8	Pelaporan	9	6	10	10.00
	Jumlah	**124**	**108**	**100**	**98.40**

Kriteria penilaian
> 95 (maksimal 100) Sangat Baik
> 80 s.d 94 Baik
> 65 s.d 80 Cukup
> 50 s.d. 65 Kurang
< 50 Sangat Kurang

2. Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI)

Pencapaian Skor KPI untuk Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi sebesar 94.00 dari target yang diteteapkan sebesar 100 dengan kategori "**Baik**".

NO	Kegiatan	Rencana	Realisasi	Bobot	Skor KPI 2023				
					I	II	III	IV	Total
1	Membahas/mengevaluasi tentang Manajemen Risiko Perusahaan.	8	8	12	1	3	5	3	12
2	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKAP Tahun 2023 secara bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan.	17	17	12	2,5	4,5	2,5	2,5	12
3	Membahas/mengevaluasi/ memberi saran tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.	5	5	8	0	0	8	0	8
4	Melaksanakan pengawasan terhadap implementasi RKAP Tahun 2023 dan kebijakan perusahaan.	7	7	7	0	0	2	5	7
5	Membahas/mengevaluasi tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan	1	1	1	1	0	0	0	1
6	Memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan	7	7	8	3	1	2	2	8
7	Melakukan telaahan serta mempersiapkan tanggapan atas Rancangan RKAP Tahun 2023 yang disampaikan oleh Direksi	5	5	8	0	0	0	8	8

NO	Kegiatan	Rencana	Realisasi	Bobot	Skor KPI 2023				
					I	II	III	IV	Total
8	Melakukan kunjungan ke Unit-unit Kerja dilingkungan perusahaan	4	4	4	0	0	2	2	4
9	Evaluasi atas kebijakan Perusahaan Lainnya	5	5	5	0	3	2	0	5
10	Tugas-tugas lainnya dari Dewan Komisaris	3	3	3	0	0	0	3	3
11	Peningkatan Kapasitas KPMRUI	4	4	4	0	4	0	0	4
12	Rapat	32	28	20	2,75	5,75	5,75	3,75	18
13	Pelaporan	6	6	8	1	3	1	3	8
	TOTAL	**104**	**100**	**100**	**11,25**	**24,25**	**30,25**	**32,25**	**98**

Kriteria penilaian
- > 95 (maksimal 100) Sangat Baik
- > 80 s.d 94 Baik
- > 65 s.d 80 Cukup
- > 50 s.d. 65 Kurang
- < 50 Sangat Kurang

3. Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) Pada tahun 2023 Skor KPI untuk Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebesar 100 dari target yang direncanakan sebesar 100 dengan kategori "**Sangat Baik**".

KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Komisaris Independen

Sesuai Kriteria Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Selain itu, Komisaris Independen harus memenuhi ketentuan:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham;
2. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya;
3. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.Setiap Komisaris Independen telah menandatangani surat pernyataan independensinya pada saat pengangkatan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh POJK No. 33/POJK.04/2014. Komisaris Independen berkomitmen menjunjung independensi dalam bertugas, mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok dan tidak dapat dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan untuk perusahaan.

Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.

Setiap Komisaris Independen telah menandatangani surat pernyataan independensinya pada saat pengangkatan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh POJK No. 33/POJK.04/2014. Komisaris Independen berkomitmen menjunjung independensi dalam bertugas, mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok dan tidak dapat dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan untuk perusahaan.

DIREKSI

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang berjumlah 7 orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan 6 orang lainnya sebagai Direktur Bidang yaitu:

1. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
2. Direktur Human Capital Management;
3. Direktur Operasi dan Digital Services;
4. Direktur Bisnis Jasa Keuangan;
5. Direktur Bisnis Kurir dan Logistik;
6. Direktur Business Development dan Portfolio Management.

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa Jabatan 5 Tahun. Pengangkatan Direksi melalui mekanisme penilaian kepatutan dan kelayakan yang pada waktu pengangkatannya berpedoman kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-7/MBU/09/2022 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik dan Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Anggaran Dasar Perseroan.

Persyaratan Direksi

1. Persyaratan Materiil Persyaratan materiil yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Direksi yaitu
   a. keahlian;
   b. integritas;
   c. kepemimpinan;
   d. pengalaman;
   e. jujur;
   f. perilaku yang baik; dan
   g. dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
2. Persyaratan Formal Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
   a. Dinyatakan pailit.
   b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan dan/atau Perseroan dinyatakan pailit.
   c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perseroan, dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Persyaratan lain

   Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, selain memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formal, seseorang harus memenuhi persyaratan lain, yaitu:
   a. Bukan pengurus Partai Politik dan/ atau calon anggota dan/atau anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
   b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah.
   c. Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
   d. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
   e. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; dan.
   f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki wewenang untuk:
   a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
   b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi, untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
   c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang karyawan perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
   d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   e. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan, termasuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   f. Menyusun dan menetapkan aturan hubungan antara Induk dan Anak Perusahaan (Subsidiary Governance).
   g. Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan Internal Perusahaan.
   h. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili perusahaan didalam dan diluar Pengadilan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban untuk :
   a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan usahanya.
   b. Menyiapkan dan memberikan penjelasan RJPP, RKAP dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk disahkan dalam RUPS.
   c. Membuat, memelihara dan menyimpan daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan risalah rapat Direksi, serta membuat, menyampaikan dan memberikan penjelasan tentang laporan tahunan termasuk laporan keuangan dan Neraca serta Laporan Laba Rugi kepada RUPS untuk disahkan.
   d. Menyusun sistem kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, memberikan laporan berkala, menyiapkan susunan organisasi Perusahaan, menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan.

e. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta olah anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
f. Menetapkan tata kelola informasi yang efektif dan menyampaikan pelaksanaan tata kelola informasi tersebut secara periodik kepada Dewan Komisaris.
g. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS.

4. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan pengurusan Perusahaan demi sebesar-besarnya kepentingan Perusahaan. Direksi akan mengelola bisnis dan urusan Perusahaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perusahaan. Direksi akan bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi akan menggunakan wewenang yang dimiliki semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.
5. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan Perusahaan berbenturan atau memiliki potensi benturan dengan kepentingan pribadi. Apabila hal tersebut terjadi, maka anggota Direksi yang bersangkutan akan mengungkapkan (disclose) benturan kepentingan tersebut kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lain, dan selanjutnya anggota Direksi yang bersangkutan tidak berwenang mewakili Perusahaan (*handoff*) dalam hal tersebut. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Direksi tersebut, ditetapkan pembagian tugas berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.084/DIRUT/1022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (persero) Nomor : KD.077/Dirut/0821 Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero) sebagai berikut :

1. Direktur Utama

Tugas Direktur Utama adalah sebagai berikut:

a. Untuk dan atas nama Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas segala ketetapan RUPS.
b. Bertindak atas nama Direksi sebagai wakil Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan melakukan segala tindakan/perbuatan baik yang berkaitan dengan kepengurusan maupun kepemilikan serta mengikat kerja sama dengan pihak lain.
c. Mengendalikan pelaksanaan tugas Direktur, Kepala Satuan Pengawasan Internal, Sekretaris Perusahaan, serta mengusulkan dan memimpin Rapat Direksi.
d. Menerima pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan Kepala Satuan Pengawasan Internal, Sekretaris Perusahaan, dan *Strategic Planning and Business Transformation*.
e. Mengadakan hubungan baik dengan pihak luar terutama mengenai hal-hal yang menyangkut kebijakan pengembangan Perusahaan dan kebijakan lainnya yang bersifat umum.
f. Bertanggung jawab atas kinerja Perusahaan.

g. Menetapkan tata kelola informasi yang efektif dan melaporkan pelaksanaannya secara periodik kepada Dewan Komisaris.
h. Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dan masing-masing Direktur melaporkan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Direktur Utama.
i. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan Direksi dalam kapasitas sebagai anggota Direksi.

2. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko memiliki tanggung jawab utama yaitu

a. Sebagai wakil Direksi untuk bidang keuangan, *risk management*, *fraud management* dan aset.
b. Menetapkan kebijakan bidang keuangan, *risk management*, *fraud management* dan aset sebagai fungsi *support* bagi seluruh fungsi.
c. Menyelenggarakan kegiatan operasi bidang keuangan, *risk management*, *fraud management* dan aset sebagai fungsi *support* bagi seluruh fungsi.
d. Penanggung jawab atas kinerja operasi bidang keuangan, *risk management*, *fraud management* dan aset sebagai fungsi *support* bagi seluruh fungsi.
e. Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi bidang keuangan, *risk management*, *fraud management* dan aset.
f. Mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan bidang keuangan, *risk management*, *fraud management* dan aset.
g. Sebagai pengendali operasi keuangan, *risk management*, *fraud management* dan aset di Kantor Regional.

Untuk melaksanakan tanggung jawab Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas pokok :

a. Menetapkan kebijakan dan strategi terkait :
   i. Perencanaan dan pengembangan keuangan, *risk management*, *fraud management* dan aset sebagai fungsi *support* bagi seluruh fungsi;
   ii. Perencanaan dan pengembangan operasi serta aplikasi sistem operasi keuangan, *risk management*, *fraud management* dan aset;
   iii. Perencanaan sarana, infrastruktur dan teknologi informasi pendukung operasi keuangan, *risk management*, *fraud management* dan aset.
d. Menetapkan kebijakan pelaporan transaksi keuangan.
e. Menetapkan sistem dan metodologi pengukuran kinerja pengelolaan bidang keuangan, *risk management*, *fraud management* dan aset dalam bentuk rumusan *key performance indicator.*
f. Mengevaluasi kinerja Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi dalam bidang keuangan.

3. Direktur *Human Capital Management*

Direktur *Human Capital Management* memiliki tanggung jawab utama yaitu

a. Sebagai wakil Direksi untuk bidang sumber daya manusia dan umum.
b. Menetapkan kebijakan bidang sumber daya manusia dan umum sebagai fungsi *support* bagi seluruh fungsi.
c. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, balas jasa, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja bidang sumber daya manusia dan umum sebagai fungsi *support* bagi seluruh fungsi.

d. Penanggung jawab atas produktivitas sumber daya manusia dan umum.
e. Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi produktivitas bidang sumber daya manusia dan umum.
f. Mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan bidang sumber daya manusia dan umum.
g. Sebagai pengendali pengelolaan sumber daya manusia dan umum di Kantor Regional.

Untuk melaksanakan tanggung jawab Direktur *Human Capital Management* mempunyai tugas pokok :

a. Menetapkan kebijakan dan strategi terkait;
    i. Perencanaan dan pengembangan pengelolaan sumber daya manusia dan umum.
    ii. Pengendalian pengelolaan sumber daya manusia dan umum.
    iii. Pengendalian kinerja, *risk and compliance* dan manajemen mutu bidang pengelolaan sumber daya manusia dan umum.
    iv. Perencanaan sarana, infrastruktur dan teknologi informasi pendukung sistem sumber daya manusia dan umum.
e. Menetapkan kebijakan dan strategi sistem sumber daya manusia dan umum serta Budaya Perusahaan.
f. Menetapkan sistem dan metodologi pengukuran kinerja bidang sumber daya manusia dan umum dalam bentuk rumusan *key performance indicator.*

4. Direktur Operasi dan *Digital Services*

Tanggung jawab utama Direktur Operasi dan Digital Services adalah:

a. Sebagai Wakil Direksi untuk bidang operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
b. Menetapkan kebijakan operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
c. Menyelenggarakan kegiatan operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
d. Penanggung jawab sistem operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
e. Penanggung jawab atas kinerja operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
f. Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
g. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan bidang operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
h. Sebagai pengendali operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi di Kantor Regional.

Untuk melaksanakan tanggung jawab utama tersebut, Operasi dan Digital Services mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Menetapkan dan mengelola kebijakan dan strategi terkait:
   i. Pengelolaan operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
   ii. Perencanaan, pengembangan operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi serta aplikasi operasi bisnis dan *support*.
   iii. Pengelolaan kinerja, kepatuhan operasi, *postal security*, manajemen mutu di bidang operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
   iv. Perencanaan modernisasi dan mekanisasi sarana serta infrastruktur operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
e. Menetapkan sistem dan metodologi pengukuran kinerja pengelolaan operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi dalam bentuk rumusan *key pertormance indicator*.
f. Menetapkan kebutuhan implementasi teknologi dan pengembangan infrastruktur.
g. Memantau seluruh operasional bisnis Perusahaan khususnya terkait dengan operasional teknologi informasi

5. Direktur Bisnis Jasa Keuangan

Direktur Bisnis Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab utama yaitu :

a. Sebagai wakil Direksi untuk bidang bisnis jaringan dan layanan keuangan.
b. Menetapkan kebijakan bisnis jaringan dan layanan keuangan.
c. Menyelenggarakan kegiatan bisnis jaringan dan layanan keuangan.
d. Penanggung jawab atas kinerja bisnis jaringan dan layanan keuangan.
e. Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi bisnis jaringan dan layanan keuangan.
f. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan bidang bisnis jaringan dan layanan keuangan.
g. Sebagai pengendali bisnis jaringan dan layanan keuangan di Kantor Regional.

Untuk mendukung perannya Direktur Bisnis Jasa Keuangan mempunyai tugas pokok :

a. Menetapkan kebijakan dan strategi terkait:
   i. Perencanaan, pengembangan bisnis jaringan dan layanan keuangan.
   ii. Pengelolaan bisnis jaringan dan layanan keuangan.
   iii. Pengelolaan kinerja, risk dan compliance di bidang bisnis jaringan dan layanan keuangan.
   iv. Perencanaan sarana, infrastruktur dan teknologi informasi pendukung bisnis jaringan dan layanan keuangan.
e. Menetapkan kebijakan dan strategi penjualan, pemasaran bisnis jaringan dan layanan keuangan.

f. Menetapkan sistem dan metodologi pengukuran kinerja penjualan dan pemasaran bisnis jaringan dan layanan keuangan dalam bentuk rumusan *key performance indicator*.
g. Menetapkan program dan sistem *sales and marketing* termasuk *customer management, product management, corporate account management, market place and new business channel* bisnis jasa keuangan.

6. Direktur Bisnis Kurir dan Logistik

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik memiliki tanggung jawab utama yaitu

a. Sebagai wakil Direksi untuk bidang bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
b. Menetapkan kebijakan bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
c. Menyelenggarakan kegiatan bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
d. Penanggung jawab sistem bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
e. Penanggung jawab atas kinerja bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
f. Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
g. Mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan bidang bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
h. Sebagai pengendali bisnis kurir, logistik dan pos internasional di Kantor Regional.

Untuk melaksanakan tanggung jawab Direktur Bisnis Kurir dan Logistik mempunyai tugas pokok :

a. Menetapkan dan mengelola kebijakan dan strategi terkait:
    i. Pengelolaan Pengelolaan bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
    ii. Perencanaan dan pengembangan bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
    iii. Pengelolaan kinerja bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
d. Menetapkan kebijakan dan strategi penjualan, pemasaran bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
e. Menetapkan sistem dan metodologi pengukuran kinerja penjualan dan pemasaran bisnis kurir, logistik dan pos internasional dalam bentuk rumusan *key performance indicator*.
f. Menetapkan program dan sistem *sales and marketing* termasuk *customer management, product management, corporate account management, market place and new business channel* bisnis kurir, logistik dan pos internasional.

7. Direktur *Business Development* dan *Portfolio Management*

Direktur *Business Development* dan *Portfolio Management* memiliki tanggung jawab utama yaitu :

a. Sebagai wakil Direksi untuk bidang *strategic planning, business transformation, regulations, universal service obligation, synergy business* dan program kemitraan bina lingkungan.
b. Menetapkan kebijakan bidang *strategic planning, business transformation, regulations, universal service obligation, synergy business* dan program kemitraan bina lingkungan sebagai fungsi *support* bisnis.
c. Menyelenggarakan kegiatan operasi bidang *strategic planning, business transformation, regulations, universal service obligation, synergy business* dan program kemitraan bina lingkungan sebagai fungsi *support bisnis*.

d. Penanggung jawab atas kinerja operasi bidang *strategic planning, business transformation, regulations, universal service obligation, synergy business* dan program kemitraan bina lingkungan.
e. Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi operasi bidang *strategic planning, business transformation, regulations, universal service obligation, synergy business* dan program kemitraan bina lingkungan.
f. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan bidang *strategic planning, business transformation, regulations, universal service obligation, synergy business* dan program kemitraan bina lingkungan.
g. Sebagai pengendali operasi bidang *strategic planning, business transformation, regulations, universal service obligation, synergy business* dan program kemitraan bina lingkungan di Kantor Regional.

Untuk melaksanakan tanggung jawab Direktur *Business Development* dan *Portfolio Management* mempunyai tugas pokok :

a. Menetapkan rencana kerja anggaran Perusahaan dan rencana jangka panjang Perusahaan.
b. Menetapkan pengendalian bisnis inkubasi untuk membina embrio inisiatif bisnis.
c. Menetapkan *key performance indicator* korporasi dan open innovation.
d. Menetapkan dan mengendalikan pengelolaan *universal service obligation, synergy business* dan program kemitraan bina ingkungan.
e. Mengendalikan kegiatan diskusi terkait dengan isu yang muncul di organisasi

Board Charter / Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Untuk kejelasan sistem dan struktur hubungan antar organ perseroan, kewenangan, tugas dan hubungan kerja masing masing organ perseroan agar sejalan dengan Prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik maka Perseroan telah menyusun pedoman berupa Panduan Bagi Komisaris dan Direksi (Board Manual) sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 317/DEKOM/0921 dan KD.082/DIRUT/0921 tanggal 8 September 2021 tentang Board Manual PT Pos Indonesia (Persero) yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab masing-masing Direksi juga kode etik bagi seluruh Direksi yang berisikan :

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi;
2. Susunan dan Pembagian Kerja Direksi
3. Rapat Direksi;
4. Organ Pendukung Direksi;
5. Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi;
6. Kegiatan Antar Organ Perseroan

Kode Etik Direksi

Kode etik Direksi PT Pos Indonesia (Persero) diatur dalam Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No. KD.42/DIRUT/0714 tentang Kode Etik Direksi PT Pos Indonesia (Persero) yaitu :

1. Dalam melaksakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya Direksi wajib:
   a. Menggunakan sumber daya Perusahaan secara efisien, efektif, dan tepat.
   b. Melaksanakan ibadah dan ajaran-Nya sesuai agama dan kepercayaan yang diyakini.
   c. Tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
   d. Mematuhi ketentuan tentang gratifikasi.
   e. Tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati.
   f. Mendahulukan kepentingan dan menerima konsekuensi keputusan.
   g. Berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan.
   h. Selalu meningkatkan kompetensi diri.
   i. Bersahaja dan rendah hati.
   j. Saling mendukung dan menghilangkan sifat arogansi dalam mencapai target kinerja.
   k. Mengindentifikasi setiap benturan kepentingan yang timbul atau kemungkinan akan timbul dan memberitahu kepada direksi lain sesegera mungkin.
   l. Menempatkan pelayanan kepada pelanggan sebagai prioritas bersama.
   m. Senantiasa membangun silaturahim dan saling menghargai dengan para pemangku kepentingan.
   n. Menjaga informasi yang disepakati untuk tidak dipublikasikan demi kepentingan perusahaan.
   o. Mengembangkan transparansi informasi diantara direksi dalam rangka pencegahan terjadinya kesalahan.
2. Direksi PT Pos Indonesia (Persero) wajib menjalankan dan menjadikan Kode Etik Direksi tersebut sebagai jiwa dari tindakan dan perilaku baik secara pribadi maupun perusahaan.

PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN 2023

Pengembangan dan penerapan GCG merupakan wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja dan penciptaan citra perusahaan yang baik. Assessment terhadap penerapan GCG pada Pos Indonesia dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik penerapan GCG, sehingga dapat diidentifikasikan area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan melalui *self assesment*. *Assessment* mencakup enam aspek *governance*, yaitu komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan, pemegang saham dan RUPS, dewan komisaris, direksi, pengungkapan informasi dan transparansi, dan aspek lainnya. Guna menghindari

kerancuan dalam penggunaan laporan dan pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan, perlu dijelaskan bahwa assessment terhadap penerapan GCG ini tidak ditujukan untuk memperbadingkan capaian penerapan GCG antar organ perusahaan, yaitu antara direksi dan dewan komisaris maupun antara keduanya dengan rapat umum pemegang saham (RUPS)/ pemegang saham. Masing- masing organ perusahaan diukur dengan kriteria sendiri sesuai dengan struktur dan proses terbaik atau ideal seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Surat Keputusan Sekertaris Menteri Negara (BUMN) Nomor SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 juni 2012 tentang indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN.

Berdasarkan *assessment* penerapan praktik-praktik GCG yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG pada Pos Indonesia Tahun 2023 mendapatkan predikat kategori "Sangat Baik" dengan Skor 89,04 Capaian skor untuk masing-masing aspek *Governance* terinci sebagai berikut:

Score assesment GCG PT Pos Indonesia (Persero) Tahun Buku 2023

No	Aspek Pengujian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Skor Capaian	Tingkat Pemenuhan	Skor Ca-paian	Tingkat Pemenuhan	Skor Capaian	Tingkat Pemenuhan
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan	6,252	89,31%	6,366	90,94%	**7,000**	**100%**
2	Pemegang Saham dan RUPS	8,538	94,87%	8,243	91,59%	**8,555**	**95,05%**
3	Dewan Komisaris	33,454	95,58%	32,561	93,03%	**33,822**	**96,63%**
4	Direksi	31,495	89,99%	30,875	88,21%	**30,810**	**88,03%**
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	7,719	85,77%	7,187	79,85%	**7,850**	**87,23%**
Total Aspek 1 – 5		87,458	-	85,232	-	**88,037**	-
6	Aspek Lainnya	-	-	-	-	**1,000**	**20,00%**
	SKOR KESELURUHAN	87,458	87,46%	85,232	85,23%	**89,037**	**89,04%**
KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG		SANGAT BAIK		SANGAT BAIK		**SANGAT BAIK**	

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BUMN sebagai entitas bisnis (business entity) sebagaimana halnya dengan perusahaan swasta lainnya, harus dikelola secara profesional berlandaskan mekanisme korporasi. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai organ yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan BUMN perlu diberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan yang dapat memberikan motivasi berkinerja lebih baik. Pos Indonesia memiliki struktur remunerasi Dewan komisaris dan Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor PER-13/ MBU/09/2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

Negara Nomor Per-04/Mbu/2014 serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peraturan tersebut komponen remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris terdiri dari :

- Gaji/Honorarium
- Tunjangan
- Fasilitas
- Tantiem / Insentif Kinerja (IK)

Penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan :

- Faktor skala usaha
- Faktor kompleksitas usaha
- Tingkat inflasi
- Kondisi dan kemapuan perusahaan

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai tindak lanjut Pasal 100 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dan untuk memberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2013 tanggal 19 April 2013.

Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut di atas pada dasarnya telah mengatur tentang pemberian penghargaan yang layak bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai salah satu faktor menumbuhkan motivasi dalam rangka meningkatkan kinerja. Namun demikian dalam beberapa hal Peraturan Menteri BUMN tersebut perlu dilengkapi dan disempurnakan dengan ketentuan yang lebih jelas, khususnya terkait penyempurnaan formula penetapan gaji/honorarium, formula tantiem/insentif kinerja baik berdasarkan pendekatan laba maupun berdasarkan pendekatan non laba, serta penyederhanaan dan reklasifikasi khususnya dalam pengaturan fasilitas dan tunjangan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN untuk menggantikan Peraturan Menteri BUMN tentang hal yang sama sebelumnya.

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia di BUMN serta mewujudkan keadilan dalam penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara peraturan tersebut beberapa kali diubah diantaranya :

1. Nomor PER-02/MBU/06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/Mbu/2014;
2. Nomor PER-01/MBU/06/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/MBU/2014;
3. Nomor PER-06/MBU/06/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/Mbu/2014;
4. Nomor PER-01/MBU/05/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/Mbu/2014;

5. Nomor PER-12/MBU/11/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/MBU/2014;
6. Nomor : Per-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/MBU/2014
7. Nomor : PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
8. Nomor : SK-181/MBU/07 /2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023.

Mengatur bahwa penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada hasil RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Perusahaan.

Perseroan telah menetapkan indikator yang digunakan untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN , serta PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, adalah sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. Remunerasi diberikan dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. Remunerasi diberikan dengan mengacu pada perkembangan pasar industri konstruksi;
3. Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
4. Kinerja keuangan dan pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Perseroan;
5. Prestasi kerja individu;
6. Kewajaran dengan peer perseroan lainnya;
7. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan;
8. Besaran remunerasi yang diterima adalah:
   - Komisaris Utama 45% dari remunerasi Direktur Utama;
   - Anggota Dewan Komisaris 90% dari remunerasi Komisaris Utama;
   - Direktur Utama 100%;
   - Anggota Direksi lainnya 85% dari Direktur Utama.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Honorarium komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris tahun 2023 ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat nomor: SR-6/Wk.MBU.11/07 /2023 tanggal 24 Juli 2023 menyampaikan penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2022 serta tantiem/ insentif kinerja/ insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2022.

Komponen Honorarium

1. Gaji/Honorarium Dasar :
(Indeks dasar/100 x Rp.15 juta)

2. Indeks Dasar :
60% Index Pendapatan + 40% Total Aktiva

3. Faktor Penyesuaian Industri :
s.d. 400% Besarnya faktor Penyesuaian ditetapkan oleh RUPS / Menteri atas usul Direksi, dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.

4. Faktor Jabatan :
Jabatan Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama, Jabatan anggota Komisaris : 90% dari Komisaris Utama

5. Faktor Inflasi :
50% dari realisasi inflasi tahun sebelumnnya yang dipergunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.

Honorarium
- Komisaris Utama = 45% dari Direktur Utama
- Komisaris = 90% dari Honorarium Komisaris Utama

Berikut adalah Nominal dari Komponen remunerasi Dewan Komisaris untuk Tahun 2023

Tunjangan	Komisaris Utama	Komisaris
Pendapatan Bulanan		
Honorarium	Rp 96.300.000	Rp 86.670.000
Tunjangan Transportasi	Rp 19.260.000	Rp 17.334.000
Pendapatan Bulanan / Tahun	Rp 1.386.720.000	Rp 1.248.048.000
Pendapatan Tahunan		
Tunjangan Hari Raya	Dibayarkan 1 kali Honorarium	
Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari	
	Honorarium dalam 1 Tahun	
Tantiem	Dibayarkan sebesar 45% dari Tantiem Direktur Utama dikali masa aktif	
Fasilitas		
Kesehatan	Penggantian biaya kesehatan	
Bantuan Hukum	Perusahaan menunjuk pengacara melalui proses pengadaan badang jasa	

Struktur Remunerasi Direksi

Pos Indonesia memiliki struktur remunerasi Dewan komisaris dan Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/Mbu/2014 Dan PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peraturan tersebut komponen remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris terdiri dari :

- Gaji/Honorarium
- Tunjangan
- Fasilitas
- Tantiem / Insentif Kinerja (IK)

Gaji Direktur Utama dan anggota Direksi tahun 2023 ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat nomor: SR-6/Wk.MBU.11/07 /2023 tanggal 24 Juli 2023 menyampaikan penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2023 serta tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2022.

Tunjangan	Direktur Utama	Direktur
Pendapatan Bulanan		
Honorarium	Rp 214.000.000	Rp 181.900.000
Tunjangan Transportasi	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
Pendapatan Bulanan / Tahun	Rp 2.868.000.000	Rp 2.482.800.000
Pendapatan Tahunan		
Tunjangan Hari Raya	Dibayarkan 1 kali Honorarium	
Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 Tahun	
Tantiem	"Berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan"	
Fasilitas		
Kendaraan	Diberikan 1(satu) Unit beserta biaya pemeliharaan dan operasional	
Kesehatan	Penggantian biaya kesehatan	
Bantuan Hukum	Perusahaan menunjuk pengacara melalui proses pengadaan badang jasa	

Indikator Untuk Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Indikator yang digunakan untuk penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan melakukan penilaian kinerja Direksi secara keseluruhan dan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No : PER-01/MBU/2011 tgl 1 Agustus 2011 (yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri BUMN No : KEP-117/MMBU/2002 tgl 31 Juli 2002) hal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicator)

Key Performance Indicators (KPI) tahun 2023 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2023 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.

(KPI) PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2023 dihitung berdasarkan Kontrak Manajemen antara Kuasa Pemegang Saham dengan Direksi dan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) dengan mengacu pada surat Sekretaris Kementerian BUMN No.S-08/SMBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan Key Performance Indicator (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada BUMN. Skor key performance indicator (KPI) atas hasil penilaian kinerja manajemen PT Pos Indonesia (Persero) untuk 2023 tercapai sebesar 84,67 dengan predikat Cukup B-4.

KPI yang merupakan kontrak manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) dengan Pemegang Saham, telah dilakukan pembahasan beberapa kali dengan Pemegang Saham terkait dengan indikator-indikator yang akan dijadikan penilaian. Indikator yang telah disepakati dan ditetapkan menjadi KPI untuk tahun 2023 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

	2022	2023	
Nilai Ekonomi & Sosial untuk Indonesia	32,77	31,46	Penjelasan Penurunan Skor Financial • Realisasi ROIC >= WACC lebih rendah • Realisasi IBD to EBITDA & IBD to Invested Capital lebih tinggi
• Financial	15,01	11,86	
• Operasional	13,65	14,14	
• Sosial	4,11	5,50	
Inovasi Model Bisnis	20,00	20,21	
Kepemimpinan Teknologi	9,42	8,40	Karena terdapat perbedaan indikator KPI antara 2022 & 2023
Peningkatan Investasi	5,75	5,91	
Pengembangan Talenta	17,60	18,70	
TOTAL	**85,54**	**84,67**	

Bonus Kerja, Bonus Non Kerja, Opsi Saham

Kementerian BUMN melalui surat Nomor SR-6/Wk.MBU.11/07 /2023 tanggal 24 Juli 2023 menyampaikan penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2022 serta tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2022 ditetapkan bahwa Direksi dan Dewan komisaris Pos Indonesia (Persero) diberikan tantiem/insentif kinerja (IK) Sebesar Rp.20 Milliar atas kinerja tahun buku 2022.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Agenda rutin yang dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris meliputi evaluasi (review) kinerja bulanan dan triwulanan Perseroan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut permasalahan, dan membahas hal-hal khusus yang memerlukan persetujuan Komisaris serta permasalahan aktual yang perlu mendapat klarifikasi dari manajemen.
Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 2 bulan, dengan ketentuan rapat dilaksanakan setiap hari kamis tiap minggunya atau sesuai kesepakatan Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dianggap kuorum apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Komisaris. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kemufakatan maka keputusan rapat Komisaris diambil dengan suara terbanyak. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pimpinan rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban.

Sepanjang 2023 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat

No	Tanggal	Agenda Rapat						
1	27 Januari 2023	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris sd. 27 Januari 2023 2. Laporan Manajemen Ytd Desember 2022 3. Lain - lain : 1) Persiapan RUPS RKAP 2023 2) Persiapan Penggantian anggota KMRUI						
	Kehadiran	RK	CK	MDS	GIN	GH	CP	
		X	√	√	√	√	X	
2	16 Februari 2023	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris sd. Februari 2023 2. Laporan Manajemen Ytd Januari 2023 3. Lain - lain						
	Kehadiran	RK	CK	MDS	GIN	GH	CP	
		X	√	√	√	√	√	
3	31 Maret 2023	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris sd. Maret 2023 2. Laporan Manajemen Ytd Februari 2023 3. Lain - lain : Wawancara Calon Dirut Posfin						
	Kehadiran	RK	CK	MDS	GIN	GH	CP	
		X	√	√	√	√	√	
4	17 April 2023	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris sd. 17 April 2023 2. Laporan Manajemen Ytd Maret 2023 3. Lain - lain						
	Kehadiran	RK	CK	MDS	GIN	GH	CP	RR
		X	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
5	11 Mei 2023	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris sd. 10 Mei 2023 2. Laporan Manajemen Ytd April 2023 3. Lain - lain						
	Kehadiran	RK	CK	MDS	GIN	GH	CP	RR
		X	√	√	√	√	√	√
6	15 Juni 2023	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris sd. 15 Juni 2023 2. Laporan Manajemen Ytd Mei 2023 3. Lain - lain						
	Kehadiran	RK	CK	MDS	GIN	GH	RR	
		X	√	√	√	√	√	
7	28 Juli 2023	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris 2. Laporan Manajemen Ytd Juni 2023 3. Lain - lain						
	Kehadiran	RK	CK	MDS	GIN	GH	RR	
		X	√	√	√	√	X	
8	18 Agustus 2023	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris 2. Laporan Manajemen Ytd Juli 2023 3. Lain - lain						
	Kehadiran	RK	CK	MDS	GIN	GH	RR	
		X	√	√	√	√	√	
9	18 September 2023	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris 2. Laporan Manajemen Ytd Austus 2023 3. Lain - lain						
	Kehadiran	RK	CK	MDS	GIN	GH	RR	
		X	√	√	X	√	X	
10	18 October 2023	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris 2. Laporan Manajemen Ytd September 2023 3. Lain - lain						
	Kehadiran	RK	CK	MDS	GH	RR		
		X	√	√	√	X		
11	23 November 2023	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris 2. Laporan Manajemen Ytd Oktober 2023 3. Lain - lain						
	Kehadiran	RK	GIN	GH	RR			
		X	√	√	√			
12	22 December 2023	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris 2. Laporan Manajemen Ytd November 2023 3. Lain - lain						
	Kehadiran	RK	GIN	GH	RR			
		X	√	√	√			

RAPAT DIREKSI

Direksi mengadakan rapat dan pertemuan baik rapat internal Direksi maupun rapat bersama Dewan Komisaris. Agenda rutin yang dibahas dalam Rapat Direksi meliputi evaluasi (review) kinerja bulanan dan triwulanan Perseroan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut permasalahan, dan membahas hal-hal khusus yang memerlukan persetujuan Direksi serta permasalahan aktual yang perlu mendapat klarifikasi dari manajemen. Dalam pembahasan materi tertentu, dihadirkan pula Para Vice President dan pejabat yang terkait dengan materi pembahasan

Sepanjang 2023 Direksi mengadakan 4 kali pertemuan atau rapat direksi dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat						
Januari								
1	03 Januari 2023	1. Arahan Direksi 2. CEO Summit						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	17 Januari 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan 3. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik 4. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services 5. Pemaparan KD tentang Manajemen Pembelajaran						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
3	24 Januari 2023	1. Arahan Direksi 2. Rencana Launching 38 KCP LPU 3. Progress Review Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko 4. Management report bulan Desember 2023 dan Tabulasi Arahan Dekom kepada Direksi 5. Laporan temuan Internal Audit 6. Update Progress Satgas Digitalisasi Pasar Tradisional 7. Update Progress Squad Standar Layanan Pos Dinas 8. Update Progress Pengawalan Perizinan PJP Kategori I 9. Update Progress Proyek Pospay Transfer (Pospay PMI) 10. Update Progress Squad Fronting Multifinance						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
4	31 Januari 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Human Capital Management 3. Performance Review Direktorat Business Development dan Portfolio Management 4. Performance Review Internal Audit 5. Performance Review Corporate Secretary 6. Project Management Office (PMO) BUMN Klaster Logistic						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
Februari								
1	14 Februari 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services 3. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan 4. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik 5. Performance Review PT Pos Logistik Indonesia 6. Performance Review PT Pos Finansial Indonesia 7. Performance Review PT Pos Properti Indonesia						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	21 Februari 2023	1. Arahan Direksi 2. Presentasi Rencana Kerja Sama REGARSPORT 3. Performance Review Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia 4. Performance Review DAPENPOS Group						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
3	28 Februari 2023	1. Arahan Direksi 2. Program Pendampingan and Coaching Strategic Transformation Leadership 3. Performance Review Internal Audit 4. Performance Review Direktorat Business Development dan Portfolio Management 5. Update Progress Pengajuan BI-Fast PT Pos Indonesia (Persero) dan Ijin Persetujuan penjualan Aset Pos Finansial Indonesia 6. Update Progress Project Management Office (PMO) BUMN Klaster Logistic 7. Progress Update Squad Customer Experience 8. Progress Update Pengembangan Super Apps 9. Performance Review Corporate Secretary 10. Performance Review Direktorat Human Capital Management						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
Maret								
1	07 Maret 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Bisnis Kurir dan Logistik 3. Update Progress Satgas PEMILU 4. Update Progress Satgas Government						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	14 Maret 2023	1. Update Progress Kasus Kiriman Kosmetik Tanpa Ijin Edar BPOM di KP Sungai Nyamuk - Tarakan 2. Update Progress Asessment GCG oleh BPKP						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
3	20 Maret 2023	1. Arahan Direksi 2. Paparan Rencana Pelatihan dan Pendampingan Project Management 3. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan 4. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services 5. Performance Review PT Pos Properti Indonesia 6. Performance Review PT Pos Logistik Indonesia 7. Performance Review PT Pos Finansial Indonesia 8. Performance Review Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) 9. Performance Review DAPENPOS Group 10. Kick Off Blue Print Bisnis Logistik & Paket dan Corporate Structure - Kajian Pos Indonesia Menuju Perusahaan Logistik 11. Laporan dan Promosi Film Kartupos Wini						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
4	28 Maret 2023	1. Arahan Direktur Utama 2. Program Digitalisasi/Digitasi di Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko 3. Sentraliasi, Otomasi dan Digitalisasi Layanan HC 4. Direktorat Operasi dan Digital Services 5. Digitalisasi Bisnis Jasa Keuangan 6. Digitalisasi Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik 7. Internal Audit 8. Digitalisasi dan Digitasi di Corporate Secretary						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
April								
1	Apr 11, 23	1. Arahan Direksi 2. Management Report sampai dengan Bulan Maret 2023 3. Pembahasan DES PT Pos Logistik Indonesia bersama Asdep KBUMN 4. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services 5. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan 6. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	Apr 18, 23	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Business Development dan Portfolio Management 3. Performance Review Internal Audit 4. Performance Review Corporate Secretary						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
Mei								
1	09 Mei 2023	1. Arahan Direksi 2. Update Progress Satgas Implementasi New Normal Pasca Pandemi 3. Update Progress Satgas Distribusi Logistik dan Perlengkapan Pemilu 2024 4. Update Progress Satgas Kementerian dan Lembaga 5. Update Progress Satgas Standar Layanan Pos Dinas 6. Update Progress Satgas Pengawalan Perizinan PJP Kategori I 7. Update Progress Proyek Pospay Transfer 8. Update Progress Squad Fronting Multifinance 9. Laporan Kinerja Keuangan Bulan April 2023 10. Laporan Program Kerja Dit. Human Capital Management						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	18 Mei 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan 3. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services 4. Update Progress Kajian Percepatan Sinergi dan Integrasi Logistik Indonesia 5. Update Progress Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik 6. Kick Off Rebranding Pos Indonesia PT Milestone Dinamika Perkasa						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
3	23 Mei 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review PT Pos Logistik Indonesia 3. Performance Review PT Pos Properti Indonesia 4. Performance Review PT Pos Finansial Indonesia 5. Performance Review DAPENPOS Group 6. Performance Review Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI)						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
4	30 Mei 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Human Capital Management 3. Performance Review Direktorat Business Development dan Portfolio Management 4. Performance Review Internal Audit 5. Alur Penyaluran Dana Bansos Kementerian Sosial RI sebagai solusi pemenuhan Rekomendasi BPK 6. Persiapan RUPS 7. Pemaparan Bisnis Marketplace dan Consumer Claim						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
Juni								
1	06 Juni 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko 3. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik 4. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	13 Juni 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Pos Logistik Indonesia 3. Performance Review PT Pos Finansial Indonesia 4. Performance Review PT Pos Properti Indonesia 5. Performance Review Dana Pensiun Pos 6. Performance Review PT Dapensi Dwi Karya 7. Performance Review PT Dapensi Trio Usaha 8. Performance Review Yayasan Bhakti Pendidikan Pos Indonesia						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
3	20 Juni 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services 3. Performance Review Business Project						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
4	27 Juni 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Direktorat Human Capital Management 3. Performance Direktorat Development and Portfolio 4. Performance Internal Audit 5. Performance Corporate Secretary						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
Juli								
1	04 Juli 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko 3. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik 4. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan 5. Performance Review Pos Properti - Laporan Rencana Penyelenggaraan Investor Gathering 6. Corporate Secretary - Laporan Rencana Penyelenggaraan Persiapan Festival AKHLAK Menuju BUMN Logistik						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	11 Juli 2023	1. Pelantikan Pejabat di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) 2. Arahan Direksi 3. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan 4. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
3	18 Juli 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Anak Perusahaan dan Bafil 3. Presentasi Kegiatan Pos Internasional						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
4	25 Juli 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Direktorat Human Capital Management 3. Performance Direktorat Development and Portfolio 4. Performance Internal Audit 5. Performance Corporate Secretary						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
Agustus								
1	15 Agustus 2023	1. Arahan Direksi 2. Paparan PT Danareksa (Persero) 3. Presentasi PT Telkom Tbk 4. Performance Review Direktorat Business Development dan Portfolio Management 5. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services 6. Performance Review Squad dan Satgas						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	22 Agustus 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan 3. Performance Review Direktorat Bisnis Kurlog 4. Laporan Preventive Tool Fraud Kas Loket 5. Performance Review Anak Perusahaan dan Bafil 6. Presentasi Pelatihan BOD-2						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
3	29 Agustus 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Direktorat Human Capital Management 3. Performance Direktorat Development and Portfolio 4. Performance Internal Audit 5. Performance Cerporate Secretary						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
September								
1	Sep 5, 23	1. Pelantikan Pejabat di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) 2. Arahan Direksi 3. Performance Review Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko 4. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik 5. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan 6. Laporan Filateli Taiwan						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	12 Sepembet 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan 3. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik 4. Performance Review Anak Perusahaan dan Bafil						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
3	Sep 19	1. Arahan Direksi 2. Laporan Tentang ISO dan Sertifikasi Dapenpos 3. Performance Review Operasi dan Digital Services 4. Performance Review Business Project dan Satgas						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
4	Sep 26, 23	1. Sertijab Direktur Bisnis Kurlog dan Direktur Human Capital Management serta Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan 3. Performance Review Direktorat Bisnis Kurlog 4. Performance Review Anak Perusahaan dan Bafil						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
Oktober								
1	03 Oktober 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko 3. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik 4. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	11 Oktober 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Anak Perusahaan dan Bafil						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
3	17 Oktober 2023	1. Arahan Direksi 2. Arahan Direktur Pos dan Ditjen PPI 3. RKAP						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
4	24 Oktober 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
5	31 Oktober 2023	1. Pelantikan Pejabat 2. Arahan Direksi 3. Performance Review Direktorat Human Capital Management 4. Performance Review Direktorat Business Development dan Portfolio Management 5. Internal Audit 6. Satgas Pemilu 2024 7. Corporate Secretary 8. New Uniform						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
November								
1	Nov 7, 23	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan 3. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik 4. Performance Review Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	Nov 21, 23	1. Arahan Direksi 2. Direktorat Business Development and Portfolio 3. Performance Review Anak Perusahaan 4. Performance Review Badan Afiliasi 5. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik 6. SVP HC Policy and Strategy 7. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
3	Nov 29, 23	1. Perpisahan Pejabat 2. Arahan Direksi 3. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services 4. Performance Review Direktorat Human Capital Management						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
Desember								
1	04 Desember 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Business Development and Portfolio Management 3. Performance Review Internal Audit 4. Performance Review Corporate Secretary						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	14 Desember 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review dan Laporan CAPEX Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik 3. Performance Review dan Laporan CAPEX Direktorat Bisnis Jasa Keuangan 4. Performance Review Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko 5. Divisi Kesekretariatan (Legal)						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
3	19 Desember 2023	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Anak Perusahaan 3. Performance Review Badan Afiliasi 4. YPBPI/ULBI Presentasi ULBI (Tim Doktor ULBI) 5. Performance Review dan Laporan Keuangan Prognosa Tahun 2023 6. Materi Rakomdir Direktorat Business Development and Portfolio						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√

Ringkasan Rapat yang melibatkan Direksi

37 Radir / Weekly meeting
Rapat Direksi

- Monitoring kinerja mingguan masing-masing direktorat
- Membahas permasalahan aktual yang perlu mendapat klarifikasi dari manajemen
- Membahas hal-hal yang memerlukan persetujuan Direksi

14 Rakomdir / Monthly meeting
Rapat Komisaris dan Direksi

- Membahas Management Report
- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut permasalahan
- Membahas hal-hal yang memerlukan persetujuan Direksi dan Komisaris

4 RAPIM / Quarterly Meeting
Rapat Pimpinan

- Membahas kinerja triwulanan masing-masing regional, anak perusahaan, dan afiliasi
- Menyampaikan kebijakan masing-masing direktorat yang harus dilaksanakan regional
- Membahas permasalahan aktual yang perlu mendapat klarifikasi dari regional
- Menetapkan Kontrak Manajemen

2 RUPS / Yearly Meeting
Rapat Umum Pemegang Saham

- Membahas kinerja tahunan perusahaan
- Mendapat pengesahan Pemegang Saham atas RKAP, RKA Dewan Komisaris, dan RKATJSL
- Mendapat penetapan Pemegang Saham atas Kontrak Manajemen yang memuat KPI Direksi secara Kolegial dan KPI Dewan Komisaris

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Gabungan dengan Direksi sebanyak 12 kali dengan kehadiran anggota Komisaris dalam rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi mencapai rata-rata 95,83% dari total rapat yang diselenggarakan.Agenda dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Pada Rapat Gabungan

No	Tanggal	Agenda Rapat						
1	27 Januari 2023	1. Tindak Lanjut arahan Rakomdir 27 Desember 2022 2. Laporan Manajemen Ytd. Desember 2022 3. Lain - lain :						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	CK	MDS	GIN	GH	CP	
		√	√	√	√	√	X	
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	18 Februari 2023	1. Tindak Lanjut arahan Rakomdir bulan Januari 2023 2. Laporan Manajemen Ytd. Januari 2023 3. Lain - lain : Progres Audit Tahun Buku 2022						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	CK	MDS	GIN	GH	CP	
		√	√	√	√	√	√	
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
3	31 Maret 2023	1. Tindak Lanjut arahan Rakomdir bulan Februari 2023 2. Laporan Manajemen Ytd. Februari 2023 3. Lain - lain : Tidak ada						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	CK	MDS	GIN	GH	CP	
		√	√	√	√	√	√	
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
4	17 April 2023	1. Tindak Lanjut arahan Rakomdir bulan Maret 2023 2. Laporan Manajemen Ytd. Maret 2023 3. Lain - lain :						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	CK	MDS	GIN	GH	CP	
		√	√	√	√	√	√	
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
5	11 Mei 2023	1. Tindak Lanjut arahan Rakomdir bulan April 2023 2. Laporan Manajemen Ytd. April 2023 3. Lain - lain						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	CK	MDS	GIN	GH	CP	RR
		X	√	√	√	√	√	√
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
6	15 Juni 2023	1. Tindak Lanjut arahan Rakomdir bulan Mei 2023 2. Laporan Manajemen Ytd. Mei 2023 3. Lain - lain						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	CK	MDS	GIN	GH	RR	
		√	√	√	√	√	X	
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
7	28 Juli 2023	1. Tindak Lanjut arahan Rakomdir bulan Juni 2023 2. Laporan Manajemen Ytd. Juni 2023 3. Progres Pelaksanaan Subsidi Operasional LPU 4. Lain-lain : a. Formulasi Brand baru Pos Indonesia menuju perusahaan logistik b. Acara puncak peringatan HUT PT Pos ke 277 tanggal 26 Agustus 2023 c. Blueprint pengembangan Kurir dan Logistik di IKN						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	CK	MDS	GIN	GH	RR	
		√	√	√	√	√	√	
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
8	18 Agustus 2023	1. Tindak Lanjut arahan Rakomdir bulan Juli 2023 2. Laporan Manajemen Ytd. Juli 2023 3.Paparan Direksi mengenai PT Pos Indonesia sebagai BUMN Logistik						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	CK	MDS	GIN	GH	RR	
		√	√	√	√	√	√	
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
9	18 September 2023	1. Tindak Lanjut arahan Rakomdir bulan Agustus 2023 2. Laporan Manajemen Ytd. Agustus 2023 3.Lain-lain :						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	CK	MDS	GIN	GH	RR	
		√	√	√	X	√	X	
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	SC	PP
		√	√	√	√	√	√	√
10	18 Oktober 2023	1. Tindak Lanjut arahan Rakomdir bulan September 2023 2. Laporan Manajemen Ytd. September 2023 3.Lain-lain : Tidak ada						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	CK	GIN	GH	RR		
		√	√	√	√	X		
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
11	23 November 2023	1. . Laporan Manajemen Ytd. Oktober 2023 2. Lain-lain						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	GIN	GH	RR			
		√	√	√	X			
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
12	22 December 2023	1. Tabulasi arahan Rakomdir November 2023 2. Laporan Manajemen Ytd. November 2023 3.Lain-lain : Tidak ada						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	GIN	GH	RR			
		√	√	√	X			
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	X	√	√	√

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DIREKSI

Pos Indonesia dalam Penerapan GCG berupa transparansi dalam pengungkapan hubungan afiliasi antar para anggota Direksi, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan dengan pemegang saham, diungkapkan bahwa tidak terdapat hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

NAMA	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Faizal Rochmad Djoemadi	x	x	x	x	x	x
Tonggo Marbun	x	x	x	x	x	x
Hariadi	x	x	x	x	x	x
Endy P.R. Abdurrahman	x	x	x	x	x	x
Haris	x	x	x	x	x	x
Prasabri Pesti	x	x	x	x	x	x
Asih Kurniasari Komar	x	x	x	x	x	x

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris, sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari berbagai unsur di luar Perseroan. Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu/ipar) sehingga dapat menjamin independensi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, dan tidak terdapat kemungkinan terjadinya kolusi dan nepotisme sebagai penerapan prinsip transparansi dalam penerapan good corporate governance(GCG)

NAMA	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Rhenald Kasali	x	x	x	x	x	x
Robben Rico	x	x	x	x	x	x
Gde Made Kartikajaya	x	x	x	x	x	x
Guntur Iman Nefianto	x	x	x	x	x	x
Gunawan Hutagalung	x	x	x	x	x	x

KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen dan dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku. Komite Audit Dewan Komisaris dibentuk sejak tahun 2003 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 08/Kep-KU/2003 tanggal 27 Oktober 2003 tentang Pembentukan Komite Audit. Pembentukan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-103/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara serta di perbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN.

Tujuan Pembentukan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam pengurusan Perseroan di bidang sistem pengendalian internal Perseroan, pelaksanaan dan hasil audit oleh Internal Audit maupun Auditor eksternal, penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Anggota Komite Audit diangkat atau diberhentikan oleh Komisaris Perusahaan berdasarkan saran/usulan dari Ketua Komite Audit. Pemberhentian Anggota Komite Audit dilakukan apabila jabatannya telah berakhir, mengundurkan diri, berhalangan tetap dalam melaksanakan tugasnya, atau sebab-sebab lain sesuai ketentuan yang berlaku. Komposisi Ketua dan Anggota Komite Audit ditetapkan Dewan Komisaris dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

PT Pos Indonesia (Persero) memiliki Komite Audit yang bekerja berdasarkan Piagam Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pos Indonesia nomor 254/DEKOM/0721 dan nomor KD.064/DIRUT/0721 tanggal 28 Juli 2021 tentang Piagam Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero).

Komposisi Komite Audit

Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero)terdiri dari empat orang yang diketuai oleh Komisaris Independen, satu orang anggota dari Komisaris dan dua anggota komite audit lainnya merupakan pihak yang independen. Susunan keanggotaan Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

JABATAN	NAMA	KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS	STATUS RANGKAP
Ketua Komite Audit	Guntur Iman Nefianto	233/DEKOM/0923	Komisaris
Anggota	Venoneta Monetera	158/DEKOM/0420	Anggota Independen
	Prasojo	373/DEKOM/1020	Anggota Independen

Profil Anggota Komite Audit

Prajoso
Anggota Independen

Lahir : 21 Juni 1965
Usia : 58 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Cibinong

Periode Jabatan
01 April 2020 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
- 1994 Ekonomi jurusan Manajemen, Pendidikan Tinggi lanjutan Pos, Bandung, Indonesia
- 1998 Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Pengalaman Kerja Komite Audit
- 1988 - 2008 Berbagai Jabatan Manajerial di Pos Indonesia
- 2019 - 2020 Pjs Kepala Satuan Pengawas Internal Pos Indonesia

Venoneta Monetera
Anggota Independen

Lahir : 1 Mei 1965
Usia : 58 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Periode Jabatan
12 Oktober 2020 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
- 1991 Diploma IV Akuntasi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta, Indonesia
- 1994 Sarjana Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan komputer Gunadarma di Jakarta, Indonesia

Pengalaman Kerja Komite Audit
- 1986 - 1989 Auditor pada Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar
- 1993 - 1995 Auditor Pajak Pada Tim Gabungan BPKP dan Depkeu RI di Jakarta
- 1996 - 1997 Auditor Pajak Daerah Pada Tim Gabungan BPKP dan Pemda DKI Jakarta
- 1997 - 1999 Penyusun Modul Training dan Instruktur pada Proyek Audit Sistem Informasi Pusdiklat BPKP, Jakarta
- 1997 - 2002 Auditor pada Deputi Administrasi BPKP di Jakarta
- 2002 Penugasan Khusus untuk evaluasi internal control pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di Jakarta
- 2002 - 2009 Auditor Investigasi pada Deputi Investigasi BPKP, di Jakarta Tugas Perbantuan untuk Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Bareskrim -Mabes Polri, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- 2002 - 2020 Instruktur Audit dan Konsultan Senior pada Pusat Pengembangan Internal Audit (YPIA) dan PT Bina Audita Indonesia (BAI) di Jakarta.Independensi anggota komite audit

Independensi anggota komite audit

Pos Indonesia mewajibkan seluruh anggota Komite Audit untuk memegang teguh independensi dan integritas untuk memastikan segala keputusan yang dihasilkan oleh Komite Audit selalu independen dan terhindar dari tekanan pihak lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Disamping itu semua Anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Komite Audit, Dewan Komisaris dan Direksi. Berdasarkan Piagam Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pos Indonesia nomor 254/DEKOM/0721 dan nomor KD.064/DIRUT/0721 tanggal 28 Juli 2021 tentang Piagam Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero) mengatur persyaratan keanggotaan Komite Audit yaitu:

1. Persyaratan yang bersifat mandatori yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN. Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
    b. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
    c. Mampu berkomunikasi secara efektif;
    d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
    e. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang lainnya harus memahami industri/ bisnis Perusahaan;
    f. Bagi Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perusahaan, tidak boleh merangkap sebagai:
        1) Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN/ perusahaan lain;
        2) Sekretaris/Staf Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN/perusahaan lain;
        3) Anggota komite pada Komite Lain Dewan Komisaris di Perusahaan;
        4) Anggota komite pada BUMN/ perusahaan lain.
    g. Bagi anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perusahaan, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan.

2. Persyaratan lain yang menurut Peraturan Menteri BUMN tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN jika diperlukan dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam Piagam Komite Audit. Setiap anggota Komite Audit harus:

    a. Memahami laporan keuangan secara komprehensif, serta bisnis dan proses bisnis Perusahaan.
    b. Memahami proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan.

c. Mematuhi Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.
d. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan, pelatihan, dan berbagai cara dan sarana lainnya.
e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non assurance, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
g. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
h. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Tugas Dan Tanggung Jawab

Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, serta berdasarkan Piagam Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) nomor 254/DEKOM/0721 dan nomor KD.064/ DIRUT/0721 tanggal 28 Juli 2021 tentang Piagam Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero) menetapkan tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
   a. Tugas Yang bersifat mandatori berdasarkan peraturan Menteri BUMN Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN.
      1) Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.

2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal.
3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
5) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

b. Tugas Yang bersifat mandatori berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Kementerian BUMN tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
   1) Melakukan berbagai telaah dalam rangka memberikan masukan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan Dewan Komisaris melaksanakan tugas memberikan arahan kepada Direksi. Pelaksanaan telaah tersebut dilakukan oleh Komite Audit atau Komite Dewan Komisaris lainnya atau bersama, berdasarkan pembagian tugas dan/atau arahan untuk melakukan koordinasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Arahan-arahan Dewan Komisaris kepada Direksi yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN tersebut adalah mengenai:
      a) Penguatan sistem pengendalian intern Perusahaan;
      b) Manajemen risiko Perusahaan;
      c) Sistem teknologi informasi yang digunakan Perusahaan;
      d) Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir;
      e) Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
      f) Kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya;
      g) Kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
   2) Proses telaah harus dilakukan secara obyektif berdasarkan data yang faktual dan prinsip kehati-hatian profesional (due professional care) sehingga dapat menghasilkan masukan yang konstruktif untuk kemajuan perusahaan.

c. Tugas lain dari Dewan Komisaris dan ditegaskan dalam Piagam Komite Audit adalah
   1) Mengevaluasi kinerja KAP tahun buku sebelumnya dengan metode yang terukur sebagai laporan dan sekaligus sebagai dasar pemberian saran kepada Dewan Komisaris apabila KAP yang bersangkutan akan diusulkan untuk ditunjuk kembali sebagai auditor eksternal.
   2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal untuk melaksanakan audit atas tahun buku berjalan, termasuk menghitung Estimasi Biayanya (Engineer Estimate)

sebagai dasar penetapan Harga Perkiraan Sendiri (Owner's Estimasi). Dalam penyampaian rekomendasi tersebut harus disertai dengan uraian yang jelas dan obyektif mengenai alasan penunjukan, antara lain hasil evaluasi kinerja, independensi, ruang lingkup, dan imbal jasa penugasan (fee).

3) Memberikan pendapat independen dan obyektif dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Auditor Eksternal atas jasa yang diberikannya.
4) Memonitor pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari Internal Audit dan Auditor Eksternal (KAP, BPK, BPKP). Pelaksanaan tugas ini dilakukan berdasarkan informasi kegiatan monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh Internal Audit yang diperoleh dari laporan-laporan periodik Internal Audit dan rapat-rapat pembahasan dengan Internal Audit.
5) Melakukan berbagai telaah dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris, antara lain terhadap:
   a) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
   b) Pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan, dan pengaduan lainnya jika diminta oleh Dewan Komisaris.
   c) Adanya indikasi potensi benturan kepentingan Perusahaan.
   d) Laporan manajemen periodik (bulanan, triwulan, dan tahunan) dengan fokus terhadap pencapaian RKAP.
   e) Draft RKAP yang disampaikan oleh Manajemen.
   f) Draft RJPP yang disampaikan oleh Manajemen.
   g) Permasalahan kasus tertentu sesuai dengan permintaan dan arahan dari Dewan Komisaris.
6) Melakukan kunjungan/ peninjauan ke kantor-kantor Regional dan/atau UPT-UPT dalam rangka antara lain: mendampingi kunjungan Dewan Komisaris, penugasan tertentu dari Dewan Komisaris, mengevaluasi kegiatan auditor internal dan auditor eksternal, meningkatkan pemahaman bisnis dan proses bisnis Perusahaan.

d. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk :
   1) Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
   2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan audit eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
   3) Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya atas persetujuan Dewan komisaris.

4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berkewajiban :

1. Membuat pedoman kerja yang dituangkan dalam Piagam Komite Audit untuk diusulkan kepada Dewan Komisaris.
2. Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Komite Audit sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada Dewan Komisaris dan disahkan sebagai kontrak kinerja Komite Audit dengan Dewan Komisaris.
3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.
4. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
5. Membuat Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan komite sebagai bahan evaluasi Dewan Komisaris dan sekaligus sebagai salah satu sumber informasi untuk penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan kelengkapan pengungkapan informasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
6. Melakukan pembagian tugas, kerja sama, dan koordinasi yang baik dengan Komite Dewan Komisaris lainnya dalam ranah tugas yang beririsan dan/atau berdasarkan arahan khusus dari Dewan Komisaris.
7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit (self assessment) secara periodik dengan metode yang terukur yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Program kerja dan realisasi kegiatan Komite Audit tahun 2022 sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri BUMN dan diselaraskan dengan sasaran dan target yang akan dicapai sebagaimana direncanakan dalam Rencana kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. PENILAIAN TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PT POS INDONESIA (PERSERO)
   Tujuan utama dari kegiatan penilaian system pengendalian internal, yaitu:
   a. Menghasilkan informasi yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan bagi seluruh stakeholder perusahaan (pemegang saham, manajemen, dewan pengawas, fiskus, karyawan, bank, dll).
   a. Mengamankan seluruh asset perusahaan, baik phisik maupun non phisik, termasuk piutang, dokumen dan database.
   b. Mendorong efisiensi operasional.
   c. Mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan manajemen.

   Hasil Telaah dan rekomendasi atas Sistem pengendalian perusahaan mengenai kelemahan sistem pengendalian internal perusahaan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris dan juga telah disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.

2. PENILAIAN TERHADAP INTERNAL AUDIT PT POS INDONESIA (PERSERO)
   Kegiatan penilaian terhadap Internal Audit yang dilakukan oleh Komite Audit adalah dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris, untuk memastikan bahwa Internal Audit telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, termasuk di dalamnya menilai pelaksanaan dan hasil auditnya, dan kemudian memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Kegiatan penilaian mencakup:
   a. Evaluasi atas dukungan Manajemen dan Dewan Komisaris terhadap posisi dan peran Internal Audit.
      1) Pengangkatan Kepala Internal Audit.
      2) Pelaksanaan Internal Audit Charter (IAC).
      3) Dukungan Manajemen terhadap alokasi sumber daya manusia dan dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Internal Audit.
   b. Efektivitas pelaksanaan penugasan audit:
      1) Review terhadap Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Internal Audit dan progres pencapaiannya.
      2) Analisis terhadap lingkup kerja dan staf auditor yang tersedia (jumlah dan kapasitasnya)
      3) Peninjauan secara langsung proses audit yang sedang dilakukan oleh Internal Audit (observasi lapangan)
      4) Penelaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit, termasuk Kertas Kerja Pemeriksaannya bila diperlukan.
      5) Evaluasi terhadap integritas pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pelaporan.
      6) Quality assurance atas pelaksanaan audit dan pelaporannya.
   c. Peran Internal Audit dalam pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Auditor dan Eksternal Auditor (BPK, BPKP, KAP)
      1) Internal Audit memiliki resource (SDM, sistem, dana, dll) yang memadai untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
      2) Internal Audit mampu berperan sebagai Konsultan bagi auditee dalam menyelesaikan setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Internal Audit, BPK, BPKP dan KAP.
      3) Internal Audit mampu berperan aktif mendorong Direktur Utama untuk memberikan disposisi yang konstruktif dan segera atas semua temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan audit internal dan eksternal.
   d. Peran Internal Audit dalam mengoptimalkan Whistle Blowing System(WBS) Internal Audit melakukan evaluasi, monitoring dan review terhadap efektivitas penerapan program Whistle Blowing System (WBS).
   e. Pelaksanaan audit berbasis risiko (Risk Based Audit)
      1) Penilaian terhadap pemahaman auditor Internal Audit atas konsep-konsep RBIA.
      2) Peran Internal Audit dalam membangun risk management perusahaan.
      3) Dukungan Manajemen atas hasil pemeriksaan Internal Audit, khususnya terhadap identifikasi risiko dan saran mitigasi yang diusulkan oleh Internal Audit.

4) Keseriusan seluruh jajaran Manajemen atas pentingnya risk management, dan dibuktikan dengan langkah konkret implementasinya.
5) Keselarasan penerapan audit Intern pada anak Perusahaan dengan kebijakan Audit Intern Induk.

f. Pelaksanaan audit tujuan tertentu
Pencapaian program kerja Internal Audit terkait dengan Program Kerja Audit. Tujuan Tertentu yang dituangkan dalam PKAT Internal Audit, antara lain hasil pemeriksaan/ telaah terhadap:
1) Sistem Pengendalian Internal Perusahaan baik Induk maupun Anak Perusahaan;
2) Sistem pengendalian piutang;
3) Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
4) Kebijakan penilaian Risiko lingkungan pengendalian di PT Pos Indonesia;
5) Kebijakan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi.

g. Rapat Rutin dengan Internal Audit minimal 3 (tiga) bulan sekali.
Rapat dengan Internal Audit untuk membahas antara lain:
1) Laporan Kinerja Internal Audit Triwulanan.
2) Realisasi Program Kerja.
3) Persiapan *external assessment* dalam rangka penguatan Internal Audit.

Realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Audit Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Kinerja Internal Audit Triwulan IV-2023

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, pembahasan kinerja Internal Audit dilakukan minimal tiap triwulan sekali, antara lain rapat triwulan I/2023 dilaksanakan tanggal 16 Februari 2023 di ruang rapat Dewan Komisaris di Bandung, membahas Laporan kinerja Internal Audit Triwulan 4 tahun 2022, sistem pengendalian internal, evaluasi whistle blowing system. Rapat Triwulan II/2023 dilaksanakan tanggal 14 April 2023 di Ruang rapat Dewan Komisaris Jakarta. Beberapa hal yang dibahas adalah kinerja Internal Audit triwulan I tahun 2023, dan beberapa hal antara lain:

1. Laporan sistem pengendalian internal perusahaan.
2. Progres tindak lanjut asesmen GCG tahun 2022.
3. Pembahasan draft keputusan Bersama Anti Pencucian Uang (APU) dan PPT Rapat Triwulan III-2023 diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2023 di Ruang rapat Dewan Komisaris Bandung. Rapat ini membahas kinerja Internal Audit Triwulan II tahun 2023 serta beberapa hal antara lain:
   1) Laporan sistem pengendalian internal perusahaan.
   2) Ketersediaan SDM Internal Audit untuk pelaksanaan audit IT.
   3) Pengembangan kompetensi SDM Internal Audit.
   4) Peran Internal Audit dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi
   5) Reviu Span of Control Perwakilan Internal Audit di setiap Regional.

Rapat pembahasan kinerja SPI triwulan IV dilaksanakan pada tanggal 3 November 2023, membahas kinerja Internal Audit Triwulan III tahun 2023, serta beberapa hal antara lain:

1) Draft PKAT Internal Audit tahun 2024.
2) Revisi Audit Charter Internal Audit.
3) Progres tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal.

b. Observasi Lapangan

Kegiatan Komite Audit dalam melakukan observasi lapangan dalam Triwulan IV-2023 dilaksanakan 2 kali yaitu :

1) KCU Batam untuk melakukan peninjauan atas penanganan kirimkan di perbatasan dan penanganan Gudang untuk penyimpanan emas dalam rangka program kerja pospay gold.
2) Regional-1 dan KCU Medan untuk melakukan observasi lapangan terkait asset di KCP Belawan serta pengendalian internal layanan jasa keuangan.
3) KCU Semarang untuk melakukan observasi lapangan terkait leverage asset

3. PENILAIAN TERHADAP AUDITOR EKSTERNAL

a. KAP tahun Buku 2022

Kegiatan penilaian terhadap auditor eksternal tahun 2022 telah selesai dilaksanakan pada Triwulan I/2023. Kegiatan penilaian mencakup:

1. Rapat-rapat secara berkala atau insidentil antara Komite Audit dengan Manajemen dan KAP, untuk membahas antara lain: ada tidaknya hambatan proses audit, temuan-temuan sementara, kepastian untuk memenuhi jadwal audit yang ditetapkan dalam kontrak audit.
2. Exit meeting dengan KAP untuk penyelesaian seluruh penugasan audit tahun buku 2022.
3. Penelaahan terhadap draft laporan hasil audit serta evaluasi atas kinerja KAP tahun buku 2022.

b. KAP Tahun Buku 2023

Sesuai dengan surat Menteri BUMN nomor S-540/MBU/10/2023 tanggal 26 Oktober2023 perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Pos Indonesia (Persero), ditetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta Non PUMK untuk Tahun Buku 2023. Kegiatan penilaian KAP selama Triwulan IV tahun 2023 antara lain:

1) Menghadiri acara Kick Off meeting KAP tahun buku 2023 pada tanggal 5 November 2023.
2) Menilai perencanaan audit (audit plan) yang dipaparkan oleh KAP pada saat *kick off meeting* dengan KAP yang ditunjuk untuk melakukan penugasan audit tahun buku 2023. Penilaian dilakukan antara lain atas jadwal audit, rencana jumlah dan area sampling, jumlah dan kapasitas auditor, dan risiko audit.

3) Rapat antara Komite Audit dengan Manajemen dan KAP, untuk membahas temuan audit batch-1 dan batch-2 pada tanggal 23 November 2023 dan 28 Desember 2023 untuk mengetahui ada tidaknya hambatan proses audit, temuan-temuan sementara, kepastian untuk memenuhi jadwal audit yang ditetapkan dalam kontrak audit, dll.

4. PENILAIAN TERHADAP KELAYAKAN PROSEDUR EVALUASI ATAS SEGALA INFORMASI YANG DIKELUARKAN OLEH PT POS INDONESIA (PERSERO)
   Kegiatan penilaian mencakup:
   a. Menilai draft informasi yang disampaikan, meliputi: kesesuaian struktur pelaporan dengan peraturan yang terkait, kecukupan/kejelasan informasi yang disampaikan, konsistensi antar informasi yang disajikan, dsb.
   b. Melakukan diskusi atau konfirmasi dengan pejabat yang menangani bidang yang terkait dengan draft informasi yang disampaikan.
   c. Melakukan penelaahan terhadap kesesuaian informasi dengan data pendukungnya dan dengan informasi lainnya yang terkait.

5. TUGAS-TUGAS LAINNYA DARI DEWAN KOMISARIS
   Realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Audit selama Triwulan IV-2023 adalah sebagai berikut :

a. Hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris
   1) Monitoring atas Tindak Lanjut Temuan Internal Audit dan Eksternal Audit (BPK):Monitoring atas temuan Internal Audit dan tindak lanjut atas rekomendasinya dilakukan oleh Komite Audit berdasarkan Laporan Triwulanan Internal Audit. Pembahasan monitoring dan tindak lanjut dilakukan setiap triwulan bersamaan dengan rapat kinerja Internal Audit.
   2) Membantu Dewan Komisaris menganalisis kinerja bulanan Perseroan Analisis terhadap kinerja Perusahaan tiap bulan selama tahun 2023 sudah dilakukan oleh Komite Audit bersama Komite yang lain, dan dilaporkan dalam Rapat Dewan Komisaris dengan Komite. Khusus untuk telaah kinerja bulan September, Oktober, November dilaporkan dan dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris dan Komite pada tanggal 18 Oktober, 23 November dan 22 Desember 2023.

b. Tugas lain dari dewan Komisaris
   1) Memberikan tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan. Komite Audit melakukan telaah terhadap Laporan Triwulanan Manajemen dan berdasarkan telaah Komite Audit tersebut disusun Surat Tanggapan Dewan Komisaris untuk dilaporkan kepada Kementerian BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham.

* Laporan Manajemen Triwulan IV tahun 2022

  Komite Audit melakukan telaah dan menyusun Surat Tanggapan Dewan Komisaris kepada Kementerian BUMN No. Pos.633/DEK 200/ DEKOM/2023tanggal 22 Februari 2023 perihal: Tanggapan Dewan Komisaris atas LaporanManajemen Triwulan IV tahun 2022 PT Pos Indonesia (Persero)

* Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2023

  Komite Audit melakukan telaah dan menyusun Surat Tanggapan Dewan Komisaris kepada Kementerian BUMN No. Pos.1423/DEK100/DEKOM/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal: Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2023 PT Pos Indonesia (Persero).

* Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2023

  Komite Audit melakukan telaah dan menyusun Surat Tanggapan Dewan Komisaris kepada Kementerian BUMN No. 207/DEKOM/0823 tanggal 09 Agustus 2023 perihal: Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2023 PT Pos Indonesia (Persero).

* Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2023

  Komite Audit melakukan telaah dan menyusun Surat Tanggapan Dewan Komisaris kepada Kementerian BUMN No. Pos.3142/DEK 100/DEKOM/2023 tanggal 01 November 2023 perihal: Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2023 PT Pos Indonesia (Persero).

2) Komite Audit ditugaskan sebagai pengelola Whistle Blowing System (WBS). Sampai dengan Triwulan IV/2023 tidak ada laporan yang masuk ke pengelola WBS. Laporan Administrasi Pengelolaan WBS telah dibuat tiap triwulan dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris:
   a) Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan IV tahun 2022 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.13031/KAD100/KA/2023 tanggal 27 Januari 2023, perihal : Laporan Administrasi WBS Triwulan IV Tahun 2022.
   b) Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan I tahun 2023 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.46339/KAD100/ KA/2023 tanggal 17 April 2023, perihal Laporan Pengelolaan Administrasi Whistle Blowing System (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan I Tahun 2023.
   c) Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan II tahun 2023 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan NDE Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.71150/KAD 100/ KA/2023 tanggal 31 Juli 2023 Perihal Laporan Pengelolaan Administrasi *Whistle Blowing System* (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan II Tahun 2023.

d) Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan III tahun 2023 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.109881/KAD 100/KA/2023 tanggal 25 Oktober 2023, perihal Laporan Pengelolaan Administrasi Whistle Blowing System (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan III Tahun 2023.

3) Analisis draft RKAP 2024 dan saran terhadap Tanggapan Dewan Komisaris Draft RKAP tahun 2024 telah disampaikan oleh Manajemen kepada Dekom melalui surat Direksi nomor C.Pos.92729/KN 000/ P00/2023 tanggal 27 Oktober 2023. Komite Audit bersama sama dengan Komite Dekom yang lain melakukan analisis terhadap draft RKAP 2024 serta memberikan masukan dalam pembuatan tanggapan Dewan Komisaris atas Draft RKAP 2024.

6. PENINGKATAN KAPASITAS KOMITE AUDIT

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas agar dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, Komite Audit merencanakan untuk mengikuti workshop/seminar; baik yang dilakukan oleh pihak luar maupun internal Perseroan (in-house training), baik yang terkait dengan keilmuan sebagaimana dipersyaratkan untuk Komite Audit maupun pemahaman terhadap bisnis dan proses bisnis PT Pos Indonesia (Persero) yang sangat diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik.

Pada tahun 2023, anggota Komite Audit telah mengikuti pelatihan/workshop terkait Manajemen resiko, CACP dan CRGP.

7. RAPAT

Kegiatan rapat terdiri dari :

a. Rapat Rutin Internal Komite Audit. Rapat internal Komite Audit diselenggarakan secara Vicon atau fisik bertempat di Kantor Dewan Komisaris di Jakarta dan diselenggarakan minimal 2 kali dalam 1 bulan. Realisasi penyelenggaraan rapat rutin internal Komite Audit selama tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 20 kali dalam tahun 2023.
b. Mengikuti Rapat Rutin Dewan Komisaris.
c. Jadwal Rapat Rutin Komite Audit dengan Dewan Komisaris minimal sebulan 1 kali. Realisasi penyeleng-garaan rapat rutin Komite Audit dengan Dewan Komisaris selama tahun 2023 sebanyak 13 kali yaitu 9 kali dilaksanakan Triwulan I sam-pai dengan Triwulan III sedangkan pada Triwulan IV dilaksanakan se-banyak 4 kali.
d. Rapat Insidentil Komite Audit.
e. Selain rapat-rapat di atas, dalam tahun 2023, KA menyelenggarakan dan mengikuti rapat-rapat lain dengan pihak Manajemen sebanyak 40 kali yaitu 29 kali dilaksanakan Triwulan I sampai denganTriwulan III sedangkan dalam Triwulan IV sebanyak 11 kali.

8. PELAPORAN

Sesuai dengan RKAT Komite Audit, Komite Audit membuat laporan pelaksanaan tugas setiap triwulan dan laporan pelaksanaan Whistle Blower(WBS), terdiri dari:

a. Laporan Triwulan pelaksanaan tugas Komite Audit kepada Dewan Komisaris sebanyak 4 Laporan.
b. Laporan Triwulan Pengelolaan WBS oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris sebanyak 4 Laporan.
c. Laporan Penyusunan dan Pengesahan RKAT Komite Audit Tahun 2023 sebanyak 1 Laporan

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Bahwa dalam rangka transformasi *human capital* yang dilakukan melalui *talent and succesion* Direksi BUMN, Menteri BUMN melalui Surat Nomor S-254/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020 mengarahkan kepada seluruh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi; Bahwa pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta fungsi pengawasan Dewan Komisaris atas penyelenggaraan perusahaan yang sehat dan menguntungkan serta meningkatkan kinerja perusahaan secara efektif, efisien, dan independen sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada PT Pos Indonesia (Persero).

Anggota Komite

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia(Persero) Nomor 223/DEKOM/0822 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, susunan keanggotaan KNR adalah:

1. Komite NR sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
   a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
   b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
      1) anggota Dewan Komisaris;
      2) pihak yang berasal dari luar PT Pos Indonesia (Persero); atau
      3) pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Ketua Komite NR adalah anggota Komite yang berasal dari anggota Dewan Komisaris Perseroan yang dapat bertindak independen.
3. Pengangkatan anggota Komite NR diangkat oleh Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pos Indonesia (Persero) No. 141/DEKOM/0423 tanggal 18 April 2023 memberhentikan dengan hormat Dwi Winarno sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pos Indonesia (Persero).

Perubahan terakhir Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pos Indonesia (Persero) No. 266/DEKOM/1123 tanggal 20 November 2023 memberhentikan dengan hormat Condro Kirono dan mengangkat Robben Rico sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pos Indonesia (Persero).

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

JABATAN	NAMA	KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS	STATUS RANGKAP
Ketua KNR	Robben Rico	266/DEKOM/1123	Komisaris
Anggota KNR	Oerip Soebagyo	381/DEKOM/1121	Anggota Independen
	Boy Bayu Idisondjaja		Anggota Independen

Profil Anggota Komite Komite Nominasi Dan Remunerasi

Boy Bayu Idisondjaya
Anggota Independen

Lahir : 12 September 1974
Usia : 49 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Bogor, Jawa Barat

Periode Jabatan
31 Mei 2023 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
- 1994 Teknik Lingkungan, Fakultas Perencanaan dan Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, Indonesia
- 2000 Sekolah Bisnis & Manajemen PPM : Program Studi Bisnis & Pemasaran, Jakarta, Indonesia
- 2013 Sekolah Pascasarjana Angkatan Laut, Monterey-California: Program Eksekutif dalam Pengambilan Keputusan Pertahanan
- 2014 Universitas Pertahanan Indonesia: Program Studi-Strategi Perang Total, M.Si.
- 2024 Fakultas Ekonomi & Bisnis: Doktor Manajemen Strategis, Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja
- 2001-2005 PT L'OREAL-PARIS INDONESIA : Manajer Produk
- 2005-2007 PT CHEVRON OIL PRODUCT INDONESIA : Kategori Manajer Merek & Pemimpin Aliansi Strategis OEM
- 2007-2008 PT RISTRA INDOLAB : General Manager Pemasaran & Penjualan
- 2015-2022 Anggota Fakultas (Manajemen Strategis & Pemasaran) - Fakultas Manajemen PPM
- 2015-sekarang Senior Associate - Institut Reformasi Kebijakan /Rumah Reformasi Kebijakan
- 2010-sekarang Komisaris Independen dan Penasihat Perusahaan untuk Transformasi Organisasi dan ESG (Lingkungan, Sosial & Governance) di berbagai Perusahaan Nasional, Badan Usaha Milik Negara & Instansi Pemerintah
- 2023-sekarang Anggota Komite Nominasi & Remunerasi - Dewan Komisaris PT. Pos Indonesia

Oerip Soebagyo
Anggota Independen

Lahir : 24 Desember 1960
Usia : 62 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Bekasi, Jawa Barat

Periode Jabatan
08 November 2021 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
- 1984 Akabri Kepolisian
- 1988 Perguruan Tinggi IlmuKepolisian
- 2000 SESPIM POLRI
- 2008 SESPATI POLRI
- 2013 LEMHANAS Republik Indonesia

Pengalaman Kerja
- Kadensus 88 Antiterror Polda Jatim
- Penyidik Utama Bareskrim Polri
- Wakapolda Sulawesi Tengah
- Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri
- Wakapolda Sumatera Selatan
- Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta
- Wakil Ketua Bidang PPITK STIK Lemdikpol
- Widya Iswara Utama Sespim Polri
- Ketua Tim Assesment Center Polri
- Staff Ahli Komisi Pengawas SKK Migas

Independensi Anggota KNR

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER - 06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia(Persero) Nomor 223/DEKOM/0822 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, semua Anggota Komite tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Komite, Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan syarat sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Bersifat independen, baik dalam melaksanakan tugasnya, maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero).
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan SDM, nominasi, dan remunerasi perusahaan.
4. Bukan merupakan karyawan di PT Pos Indonesia (Persero) dalam 1 (satu) Lahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris menjadi anggota Komite NR.

5. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung di PT Pos Indonesia (Persero). Dalam hal anggota Komite NR memperoleh saham akibat peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
6. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Pos Indonesia (Persero), kecuali untuk anggota yang berasal dari manajerial PT Pos Indonesia (Persero).
7. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite NR pada emiten atau perusahaan lain pada periode yang sama.
8. Anggota Komite NR yang bukan Dewan Komisaris tidak boleh memiliki:
   a. Hubungan keluarga sedarah dengan Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan derajat kedua baik dari garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar).
   b. Kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi materiil perseroan.
9. Anggota Komite NR yang bukan anggota Dewan Komisaris wajib membuat pernyataan secara tertulis atas segala sesuatu atau semua yang berpotensi menjadi benturan kepentingan di kemudian hari atau kesediaan memenuhi semua larangan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas yang mempengaruhi kompetensi dan independensinya.
10. Anggota Komite NR dalam menjalankan tugasnya menganut Azas Good Corporate Governance:
    a. Transparansi (transparency);
    b. Akuntabilitas (accountability):
    c. Responsibilitas (responsibility);
    d. Independensi (independency);
    e. Kewajaran dan kesetaraan (fairness).

Tugas dan Tanggung Jawab

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Pasal 16C, Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (Talent Management System) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (Talent Classification) yang dilakukan oleh Direksi.
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (Selected Talent), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (Nominated Talent); Tugas ini tidak dilakukan oleh anggota komite yang berasal dari manajerial PT Pos Indonesia.

4. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/ Menteri.
5. Melakukan evaluasi atas usulan Key Performance Indicators Individu anggota Direksi.
6. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
7. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
   c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   d. Struktur Remunerasi;
   e. Kebijakan atas Remunerasi; dan
   f. Besaran atas Remunerasi.
10. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Program kerja KNR

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri BUMN tersebut di atas dan diselaraskan dengan sasaran dan target yang akan dicapai sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada RKAT Komite Nominasi dan Remunerasi Pos Indonesia (Persero) Tahun 2023.

1. Evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan karir talent pool perusahaan:
   a. Evaluasi kebijakan pengembangan karir (talent pool) Perusahaan;
   b. Penyiapan rumusan rekomendasi Dewan Komisaris terkait kebijakan pengembangan karir (talent pool) Perusahaan, KNR membahas/ mengevaluasi tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir dengan realisasi sebagai berikut :
   Sesuai dengan Surat Undangan Nomor C.Pos.92187/KNR100/ KNR/2023 pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Komite NR telah menyelenggarakan rapat dengan Direktorat HCM membahas tentang evaluasi Implementasi Kebijakan pengembangan Karir 2023.Hasil Evaluasi telah disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui surat No. C pos 101107/KNR 100/2023 tanggal 30 November 2023. Melalui Surat

Nomor C.Pos 100942/KNR 100/KNR /2023 tanggal 30 November 2023 telah disampaikan Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi terkait dengan implementasi Kebijakan Pengembangan Karir.

2. Evaluasi dan Penyiapan rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan calon talent pool yang diajukan oleh direksi.
   a. KNR telah melakukan telaah dan kajian atas usulan Direksi mengenai Validasi Selected Talent BoD-1 PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2023 sebagaimana surat KNR kepada Dewan Komisaris Nomor 07/ KNR/0223 tanggal 22 Februari 2023.
   b. KNR bersama Dewan Komisaris dan Dir. HCM melakukan pembahasan terkait usulan calon Nominated Talent BoD-1 Tahun 2023 yang diajukan oleh Direksi pada tanggal 24 Februari 2023.
   c. KNR bersama Dewan Komisaris melakukan evaluasi, penilaian dan penyiapan rekomendasi melalui rapat yang dilangsungkan secara hybrid pada tanggal 27 Februari 2023.
   d. Dewan Komisaris melalui Surat Nomor Pos.695/DEK 400/DEKOM/2023/Rhs tentang Penyampaian Nominated Talent PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 28 Februari 2023 kepada Ketua Cluster Talent Committee (CTC) Logistik Angkutan Darat.
3. Evaluasi dan perumusan rekomendasi Dewan Komisaris terkait pemilihan calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan yang diajukan oleh Direksi.
   1) Memberikan tanggapan atas usulan pergantian Komisaris Utama dan Komisaris PT Pos Logistik Indonesia berdasarkan surat Direksi Nomor C.Pos.2870/SU 200/P00/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Usulan Penggantian Komisaris Utama dan Komisaris PT Pos Logistik Indonesia dan Dewan Komisaris dapat menyetujui:
      - Sdr. Siti Choiriana, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Komisaris Utama PT Pos Logistik Indonesia menggantikan Sdr. Hariadi.
      - Sdr. Hariadi, Direktur Operasi dan Digital Services PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Komisaris PT Pos Logistik Indonesia menggantikan Sdr. Siti Choiriana untuk diusulkan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana surat Dewan Komisaris Nomor C.Pos.9287/ DEK 100/DEKOM/2023/Rhs tgl 20 Januari 2023.
   2) Memberikan persetujuan tertulis terhadap penggantian Kepala Internal Audit dengan merujuk surat Direksi Nomor C.Pos.19694/SU 200/ P00/2023/Rhs tanggal 14 Februari 2023 perihal Usulan Penggantian Kepala Internal Audit. Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 14 Februari 2023 telah melakukan wawancara terhadap semua calon yang diusulkan oleh Direksi, yaitu: Agus Trisyuwanto, Asih Kurniasih dan Iwan Gunawan. Dewan Komisaris menyetujui usulan Direksi untuk mengangkat Sdr. Agus Trisyuwanto sebagai Kepala Internal Aud PT Pos Indonesia (Persero) sebagaimana surat Dewan Komisaris kepada Dirut Nomor C.Pos.23875/ DEK 100/DEKOM/2023/Rhs tanggal 23 Februari 2023.

3) Membuat tanggapan atas usulan penggantian Direktur Utama PT Pos Finansial Indonesia dengan merujuk surat Direksi Nomor C.Pos.39362/ SU 200/P 00/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal usulan penggantian Direktur PT Pos Finansial Indonesia dan Surat nomor C.Pos.42985/SU 200/2023/Rhs Prib tanggal 10 April 2023 perihal penjelasan atas usulan Direktur Utama PT Pos Finansial Indonesia sebagaimana surat KNR kepada Dewan Komisaris Nomor 14/KNR/0423/Rhs tanggal 21 April 2023 perihal Telaah atas Usulan Penggantian Direktur Utama PT Pos Finansial Indonesia. Untuk selanjutnya diusulkan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Surat Dewan Komisaris Nomor C.Pos.48862/DEK 100/DEKOM/2023/ Rhs tanggal 25 April 2023.

4) Membuat tanggapan tertulis atas Surat Direksi Nomor C.Pos 74201/SU 200/P 00/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Usulan Penambahan Komisaris pada PT Pos Logistik Indonesia atas nama Saudara Henry Panangian Tobing melalui Surat Dewan Komisaris Nomor 17/ Dekom/Rhs/0823 tanggal 15 Agustus 2023 untuk segera diajukan kepada Pemegang Saham.

5) Merujuk Surat Direksi Nomor C.Pos 73938/SU 200/P00/2023/ Rhs tanggal 11 Agustus 2023 perihal Usulan Perubahan Komisaris PT Pos Finansial Indonesia, Dewan Komisaris memberikan tanggapan tertulis melalui Surat Nomor 16/Dekom/ Rhs/0823 tanggal 15 Agustus 2023 menyetujui Saudara Haris yang semula sebagai Komisaris Utama menjadi Komisaris.

6) Merujuk Surat Direksi Nomor C.Pos 75916/ SU 200/ P00/ 2023/Rhs tanggal 21 Agustus 2023 perihal Usulan Perubahan Komisaris PT Pos Logistik Indonesia, Dewan Komisaris Telah memberikan Tanggapan tertulis melalui Surat Dewan Komisaris Nomor 20 /Dekom/Rhs/0823 tanggal 22 Agustus 2023 dan menyetujui Saudari Siti Choiriana yang semula sebagai Komisaris Utama menjadi Komisaris.

7) Merujuk Surat Direksi Nomor C.Pos.89818/SU 200/P00/2023/Rhs tanggal 16 Oktober 2023 perihal Usulan Perubahan Komisaris PT Pos Logistik Indonesia , Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan tertulis melalui Surat Dewan Komisaris Nomor 23/Dekom/Rhs/1023 tanggal 19 Oktober 2023 dan menyetujui Sdr. Tonggo Marbun menggantikan Sdri. Siti Choiriana.

4. Validasi dan Kalibrasi talenta usulan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (*nominated talent*)

1) KNR telah melakukan telaah dan kajian atas Usulan Direksi mengenai Validasi Selected Talent Talenta BoD-1 PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2023 sebagaimana surat KNR kepada Dewan Komisaris Nomor 07/ KNR/0223 tanggal 22 Februari 2023.

2) Berdasarkan Surat Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor C.Pos.23369/SU100/P00/2023/Rhs-Prib tanggal 22 Februari 2023 perihal Pengajuan Selected Talent Talenta BoD-1 Tahun 2023 dan Surat Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor C.Pos.26208/SU 100/P04/ 2023/Rhs-Prib tanggal 27 Februari 2023 perihal Penjelasan Selected Talent Talenta

BoD-1 Tahun 2023, Dewan Komisaris melalui Surat Nomor Pos.695/DEK 400/DEKOM/2023/Rhs tentang Penyampaian Nominated Talent PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 28 Februari 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) telah melakukan validasi atas Selected Talent (BOD-1) yang diajukan oleh Direksi dengan kategori High Potential & Promotable berdasarkan aspek kapasitas (kompetensi aktual serta kemauan dan kecepatan belajar) danaspek kinerja (hasil kerja dan perilaku/implementasi AKHLAK) untuk menjadi talent pool PT Pos Indonesia (Persero).
b. Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) juga telah melakukan evaluasi atas Direksi existing PT Pos Indonesia (Persero) berdasarkan kinerja (hasil kerja dan behavior berupa kesesuaian perilaku kerja dengan AKHLAK) dan kapasitas (kompetensi aktual dan learning agility).

5. Melakukan Evaluasi atas Usulan *Key Performance Indicators* Individu Anggota Direksi

   Melalui Surat Nomor C.Pos 84610 / DEK 100/DEKOM/2023 tanggal 23 September 2023 Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas Laporan Capaian KPI Individu BOD semester I tanun 2023 yang pada intinya memberikan apresiasi atas capaian KPI yang memenuhi target dan memberikan penekanan kepada indikator yang tidak mencapai target antara lain Peningkatan Revenue , ROIG , peningkatan Market share , Percepatan penagihan piutang dan sinergi antar Direktorat Bisnis dengan Direktorat Bisnis Partner serta Pengembangan talenta .

6. Menyiapkan Usulan Sistem Evaluasi Kinerja Individu bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris

   Komite NR bersama dengan Komite Audit dan Komite PMRUI melaksanakan pembahasan atas KPI BOD semester I dan menyiapkan Draft surat tanggapan kepada Dewan Komisaris. Melalui Surat Nomor C.Pos 84610 / DEK 100/ DEKOM/2023 tanggal 23 September 2023 Dewan Komisaris. memberikan tanggapan atas Laporan Capaian KPI Individu BOD semester I tanun 2023 yang pada intinya memberikan apresiasi atas capaian KPI yang memenuhi target dan memberikan penekanan kepada indikator yang tidak mencapai target antara lain Peningkatan Revenue , ROIG , peningkatan Market share , Percepatan penagihan piutang dan sinergi antar Direktorat Bisnis dengan Direktorat Bisnis Partner serta Pengembangan talenta.

7. Evaluasi dan Penyiapan Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi atas Usulan Restrukturisasi Organisasi Perusahaan

   a. Merujuk Surat Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) kepada Dewan Komisaris Nomor Pos.3463/SU 100/ P00/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Usulan Penyesuaian Organisasi, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Sadan Usaha Milik Negara (BUMN) Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Nomor: SK-230/ MBU/10/ 2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia.

b. Telah dilakukan pembahasan awal atas surat Direksi tersebut oleh KNR bersama KA dan KPMRUI pada tanggal 12 Januari 2023.
c. Berdasarkan hasil rapat pada tanggal 12 Januari 2023, KNR bersama KA dan KPMRUI meminta penjelasan Dit. HCM pada rapat tanggal 20 Januari 2023.
d. Berdasarkan hasil rapat tanggal 20 Januari 2023 tersebut, KNR membuat Telaah Alas Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi berdasarkan surat KNR kepada Dewan Komisaris Nomor 05/KNR/0123 pada tanggal 26 Januari 2023, dengan kesimpulan:
    1) Secara umum usulan penyesuaian struktur organisasi BOD-1 telah sesuai dengan Struktur BOD berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.SK-230/MBU/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 dan sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan.
    2) Dalam penyesuaian tersebut terdapat penambahan struktur BOD-1 pada Direktorat Operasi dan Digital Services karena pengalihan fungsi Operasional dari Direktorat Bisnis Jasa Keuangan (pengurangan), penyesuaian nomenklatur BOD-1 dengan struktur BOD dan penguatan job description sesuai dengan fungsinya.
    3) Penyesuaian pada Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko belum mencerminkan perhatian serius manajemen terhadap pentingnya pengelolaan manajemen risiko sesuai dengan Permen BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN karena masih menempatkan pengelola manajemen risiko pada level divisi.
    4) Perubahan nomenklatur Internal Audit Business Partner dirasa tidak diperlukan dan sebaliknya, dikhawatirkan akan mempengaruhi profesionalisrne dan independensi auditor dalarn rnelaksanakan tugasnya. Demikian pula dengan nomenklatur Corporate Secretary.
    5) Dalam job description rnasih belum sempurna, tanggung jawab penyusunan KPI belum ada disemua struktur sebagai konsekuensi penerapan Performance Management System yang berbasis Objective Key Result (OKR). Demikian juga kewajiban pengelolaan piutang hanya terdapat pada Direktorat Bisnis Jasa Keuangan.
    6) Dari segi efektivitas dan efisiensi serta kepentingan regenerasi perlu dipertimbangkan tentang jumlah BOO-1 dan BOD yang memenuhi rasio ideal sesuai dengan Permen BUMN No. PER-03/MBU/10/2022 tentang Manajemen Talenta PNS pada BUMN.
e. Adapun saran dari KNR sebagai berikut:
    1) Manajemen diharapkan memberikan perhatian lebih serius pada pengelolaan manajemen risiko dengan menempatkan fungsi pengelola manajemen risiko pada pada level BOD-1, sehingga dapat memberikan keleluasaan untuk melakukan koordinasi pada level BOD-1 dan mempertanggung jawabkan tugasnya langsung kepada Direktur atau setingkat VP, namun berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

2) Perubahan nomenklatur Internal Auditor Business Partner tidak diperlukan, sebaiknya dikembalikan saja pada regulasi yang ada yaitu pada KD.77/ Dirut/2022 dan apabila ada penambahan peran sebagai konsultan dan partner strategis dapat ditambahkan pada job description. Demikian pula dengan nomenklatur Corporate Secretary.
3) Pada job description di setiap struktur disarankan ada peran untuk penyusunan KPI sebagai konsekuensi penerapan New Performance Management System.
4) Kewajiban pengelolaan piutang perlu dimasukan dalam job description pada struktur organisasi Direktorat Bisnis Jasa Keuangan dan Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik.
5) Pada Direktorat Operasional dan Digital Services khususnya Sub Direktorat Pos Internasional agar dikaji kemungkinan dapat dipimpin oleh seorang VP, namun berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
6) Di bawah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, perlu drtambahkan Sub Direktorat Manajemen Risiko level VP, terpisah dari Sub Direktorat Risk Financial dan Risk Management. Tujuannya adalah optimalisasi pengelolaan manajemen risiko.
7) Manajemen diharapkan mengkaji efektivitas dan efisiensi serta dampak beban SOM terkait dengan penyesuaian struktur organisasi ini.

f. Berdasarkan Telaah KNR tersebut. Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan kepada Direksi atas Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi BOO-1 sebagaimana Surat Nomor C.Pos.12686/DEK 400/DEKOM/2023 tanggal 26 Januari 2023.
g. Telah dilakukan rapat pembahasan lanjutan oleh KNR bersama KA & KPMRUI dengan Dit. HCM terkait penjelasan atas Surat Dewan Komisaris Nomor C.Pos.12686/DEK 400/DEKOM/2023 tanggal 26 Januari 2023 pada tanggal 15 Februari 2023.
h. Merujuk Surat Direksi Nomor C.Pos 77500/ND 000/ P00/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Permohonan persetujuan Merek dan Logo Baru PT Pos Indonesia (Persero) dan setelah dilakukan pembahasan Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas Usulan tersebut melalui Surat Nomor C.Pos 77790/DEK 100 / DEKOM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dengan beberapa poin arahan antara lain bahwa :
    1) Suatu Logo perusahaan yang baik perlu memuat filosofi nilai panting perusahaan dan mencerminkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh perusahaan, untuk kemudian dituangkan dalan visualisasi warna, bentuk dan tagline.
    2) Dapat dibawa dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
    3) Setelah mendapatkan persetujuan, Direksi agar menindaklanjuti dengan pendaftaran Merek dan logo tersebut.
    4) Menyiapkan perumusan strategi dan pengelolaan Merek dan Logo secara komprehensif, terintegrasi dan konsisten termasuk didalamnya pengelolaan transisi/ perubahan Merek dan Logo tersebut.

8. Evaluasi dan Penyiapan Rekomendasi Dewan Komisaris Terkait Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Disampaikan Kepada Pemegang Saham
   a. Dengan merujuk pada Surat Direksi Nomor C.Pos 42947/SU 100/P 00 /2023/Rhs-Prb tanggal April 2023 perihal usulan penyesuaian Gaji tahun buku 2023 dan pemberian Tantiem tahun buku 2022 telah mengundang rapat Direktur HCM dan Konsultan Deloitte pada tanggal 2 Mei 2023 untuk membahas dan mengevaluasi usulan Direksi tersebut. Selanjutnya Komite KNR telah menyusun telaah atas usulan tersebut Clan ctiajukan Kepada Dewan Komisaris.
   b. Pada tanggal 5 Mei 2023 Dewan Komisaris telah mengirim Surat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang saham melalui Surat Nomor 12 / Dekom /Rhs/2023 tanggal 5 mei 2023 perihal usulan Remunerasi Direksi dan Komisaris tahun buku 2023 dan pemberian Tantiem tahun buku 2022 PT Pos Indonesia (Persero).
   c. Merujuk Surat Kementerian BUMN Nomor SR-6/Wk.MBU.11/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2023 dan Surat Undangan Nomor UND-36/DSI. MBU.NOS/2023 tanggal 20 Agustus 2023 mengikuti Sharing Mekanisme Tantiem yang ditangguhkan.
   d. Pada Hari Senin tanggal 4 September 2023 Komite Nominasi dan Remunerasi mengundang rapat Direktur HCM untuk membahas Kesiapan Direksi terkait dengan Implementasi kebijakan Mekanisme pengelolaan Tantiem/ Insentif Kinerja Yang ditangguhkan. Dalam rapat tersebut Komite menyarankan agar disusun Kebijakan Direksi terkait mekanisme tersebut untuk menjamin GCG.
9. Tugas - tugas Lainya dari Dewan Komisaris
   a. Pada 2023 Komite KNR telah melakukan Rapat laporan manajemen :
      1) KNR bersama KA, dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Desember 2022 pada tanggal 24 Januari 2023.
      2) KNR bersama KA, dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Januari 2023 pada tanggal 16 Februari 2023.
      3) KNR bersama KA, dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Februari pada tanggal 28 Maret 2023.
      4) KNR bersama KA dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajernen YTD Maret tahun 2023 pada tanggal 17 April 2023.
      5) KNR bersama dengan KA dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD April 2023 tanggal 1O Mei 2023.
      6) KNR bersarna dengan KA dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Mei 2023 pada tanggal 13 Juni 2023.

7) KNR bersama dengan KA dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Juni 2023 pada tanggal 17 Juni 2023 .
8) KNR bersama dengan KA dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Juni 2023 pada tanggal 27 Juli 2023
9) KNR bersama dengan KA dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Juli 2023 pada tanggal 16 Agustus 2023.
10) KNR bersama dengan KA dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Agustus 2023 pada tanggal 18 September 2023
11) KNR bersama dengan KA dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD September 2023 pada tanggal 18 Oktober 2023
12) KNR bersama dengan KA dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Oktober 2023 pada tanggal 21 November 2023 Komisaris dan Komite membahas Management Report YTD Februari 2023 tanggal 31 Maret 2023.
13) KNR bersama dengan KA dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD November 2023 pada tanggal 20 Desember 2023

b. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite terkait Laporan Year to date :
1) Rapat Dewan Komisaris dan Komite membanas Management Report YTD Desember 2022 tanggal 27 Januari 2023.
2) Dewan Komisaris dan Komite membahas Management Report YTD Januari 2023 tanggal 16 Februari 2023.
3) Rapat Dewan Komisaris dan Komtte membahas Management Report YTD Februari 2023 tanggal 31 Maret 2023.
4) Rapat Dewan Komisaris dan Komite membahas Management Report YTD Maret 2023 tanggal 17 April 2023.
5) Rapat Dewan Komisaris dan Komtte membahas Management Report YTD April 2023 tanggal 11 Mei 2023.
6) Rapat Dewan Komisaris dan Komite membahas Management Report YTD Mei 2023 pada tanggal 15 Juni 2023.
7) Rapat Dewan Komisaris dan Komite membahas Management Report YTD Juni 2023 pada tanggal 28 Juli 2023.
8) Rapat Dewan Komisaris dan Komite Membahas Management Report YTD Juli 2023 pada tanggal 18 Agustus 2023.
9) Rapat Dewan Komisaris dan Komite membahas Management Report YTD Agustus 2023 pada tanggal 18 September 2023.

10) Rapat Dewan Komisaris dan Komite membahas Management Report YTD September 2023 pada tanggal 18 Oktober 2023
11) Rapat Dewan Komisaris dan Komite membahas Management Report YTD Oktober 2023 pada tanggal 23 November 2023.
12) Rapat Dewan Komisaris dan Komite membahas tentang Management Report November 2023 pada tanggal 22 Desember 2023 .

c. Rapat Monitoring :
1) Rapat monitoring Dit. Operasi dan Digital Services Ytd Desember 2022 tanggal 19 Januari 2023.
2) Rapat monitoring Dit. Operasi dan Digital Services Ytd Januari 2023 tanggal 13 Februari 2023.
3) Rapat monitoring Dit. Human Capital Management Ytd Januari 2023 tanggal 15 Februari 2023.
4) Rapat monitoring Dit. Human Capital Management Ytd Februari 2023 tanggal 17 Maret 2023.
5) Rapat monitoring Dit. Operasi dan Digital Services Ytd Februari 2023 tanggal 27 Maret 2023.
6) Rapat monitoring RKAP Dit. Human Capital Management YTD Maret 2023 tanggal 13 April 2023.
7) Rapat Monitoring RKAP Dit. Operasi dan Digital Services YTD Maret 2023 tanggal 13 April 2023.
8) Rapat Monitoring RKAP Dit. Human Capital Management YTD April 2023 tanggal 8 Mei 2023.
9) Rapat Monitoring RKAP Dit. Operasi dan Digital Service YTD April 2023 tanggal 8 Mei 2023.
10) Rapat Monitoring RKAP Dit. Human Capital Management YTD Mei 2023 tanggal 8 Juni 2023.
11) Rapat Monitoring RKAP Dit. Operasi dan Digital Service YTD Mei 2023 tanggal 14 Juni 2023.
12) Rapat Monitoring RKAP Dit Human Captal Management YTD juni 2023 tanggal 17 Juli 2023.
13) Rapat Monitoring RKAP Dit Operasi dan Digital Service YTD Juni 2023 pada tanggal 13 Juli 2023.
14) Rapat Monitoring RKAP Dit Human Capital Management YTD Juli 2023 tanggal 11 Agustus 2023.
15) Rapat Monitoring RKAP Dit Operasi dan Digital Service YTD Juli 2023 tanggal 10 Agustus 2023.
16) Rapat Monitoring RKAP Dit Human Capital Management YTD Agustus 2023 tanggal 14 September 2023.
17) Rapat Monitoring RKAP Dit Operasi dan Digital Service YTD Agustus 2023 tanggal 9 September 2023.
18) Rapat Monitoring RKAP Dit HCM YTD September 2023 tanggal 17 Oktober 2023.
19) Rapat Monitoring RKAP Dit Operasi dan Digital Service YTD September 2023 tanggal 12 Oktober 2023.
20) Rapat Monitoring RKAP Dit HCM YTD Oktober 2023 tanggal 16 November 2023.

21) Rapat Monitoring RKAP Dit Busdev YTD Oktober 2023 tanggal 16 November 2023.
22) Rapat Monitoring RKAP Dit HCM YTD November 2023 tanggal 13 Desember 2023.
23) Rapat Monitoring RKAP Dit Bus Dev YTD November 2023 tanggal 14 Desember 2023.

d. Rapat KNR dengan Komiter Lainnya dan Kegiatan Lainnya :
1) Bersama KA dan KPMRUI melakukan pembahasan usulan penyesuaian organisasi BOD-1 tanggal 12 Januari 2023.
2) Bersama KA dan KPMRUI melakukan pembahasan usulan restrukturisasi bersama Direktorat HCM tanggal 20 Januari 2023.
3) Bersama KA dan KPMRUI melakukan rapat dengan KAP, SPI dan Manajemen pembahasan progress meeting 2 KAP Audit Tahun Buku 2022 pada tanggal 20 Januari 2023.
4) Bersama KA dan KPMRUI melakukan rapat dengan KAP, SPI dan Manajemen pembahasan progress meeting 3 KAP Audit Tahun Buku 2022 pada tanggal 9 Februari 2023.
5) Bersama KA dan KPMRUI melakukan rapat dengan Direktorat HCM terkait Usulan Struktur BoD-1 tanggal 15 Februari 2023. Bersama KA dan KPMRUI melakukan rapat terkait KAP tanggal 16 Februari 2023.
6) Bersama KA dan KPMRUI melakukan rapat dengan GRC tanggal 20 Februari 2023.
7) Menghadiri kegiatan Sosialisasi Updating Talent Pool Direksi BUMN Tahun 2023 yang diadakan secara daring oleh Kementerian BUMN tanggal 24 Februari 2023.
8) Rapat KNR, Dekom, dan Dir. HCM terkait Validasi Selected Talent BoD-1 Tahun 2023 pada tanggal 24 Februari 2023.
9) Tanggal 6 April 2023 mengikuti sosialisasi Permen BUMN nomor 1, 2 dan 3 tahun 2023 .
10) Tanggal 19 April 2023 mengadakan rapat dengan KA dan KPMRUI mengundang SVP Busdev dan HCM membahas usulan KPI Individu Direksi 2023 .
11) Tanggal 2 Mei 2023 mengikuti rapat dengan Dewan Komisaris membahas Pengesahan KPI Individu Direksi.
12) Tanggal 2 Mei 2023 mengundang Rapat Dir HCM dan Konsultan Deloitte membahas usulan penyesuaian gaji Direksi tahun 2023 dan pemberian Tantiem tahun 2022.
13) Tanggal 14 sd 17 Juni 2023 Bpk Condro Kirono melaksanakan kunjungan ke Regional 4 Semarang khususnya di KCU Semarang, KC Ungaran dan KC Kendal terkait transformasi bidang SOM.
14) Tanggal 23 sd 25 Juni Bapak Robben Rico melaksanakan kunjungan ke Regional 6 KGU Makasar terkait penyaluran bantuan sosial.

15) Menghadiri undangan rapat KPMRUI pada tanggal 3 Juli 2023 membahas tentang Laporan Manajemen triwulan II tahun 2023 .
16) Bersama KA dan KPMRUI melakukan rapat pada tanggal 7 Juli 2023 membahas tentang draft SKB penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahab Pendanaan Terorisme.
17) Pada Tanggal 14 Juli 2023 menghadiri Undangan Direksi membahas Road Map PT Pos sebagai BUMN Logistik.
18) Pada Tanggal 21 Juli 2023 menghadiri rapat bersama KA dan KPMRUI membahas Progress Program kerja Komite Dewan Komisaris .
19) Bersama KA dan KPMRUI menghadiri rapat Manajemen tanggal 24 Juli 2023 membahas tentang Top GRC Award dan GRC Award 2023.
20) Menghadiri Rapat dengan Manajemen membahas tentang pengelolaan keuangan dan Aset pada tanggal 4 Agustus 2023 .
21) Tanggal 22 Agustus 2023 menghadiri undangan rapat dengan KBUMN membahas mengenai Sharing Mekanisme Tantiem/Insentif Kinerja yang ditangguhkan.
22) Pada tanggal 30 Agustus 2023 mengundang Direktur HCM membahas mengenai kesiapan implementasi kebijakan mekanisme pengelolaan Tantiem/ IK yang ditangguhkan.
23) Rapat Dewan Komisaris membahas hasil rapat dengan Direktur HCM mengenai Mekanisme Pengelolaan Tantiem / IK Yang ditangguhkan.
24) Tanggal 19 September mengadakan rapat bersama KA dan KPMRUI membahas tentang KPI Individu Direksi Semester 1 2023.
25) Tanggal 18 dan 30 Okrober serta tanggal 8 November 2023 mengikuti rapat bersama KA dan KPMRUI membahas tentang rancangan RKAP tahun 2024.
26) Tanggal 5 November 2023 mengikuti rapat Kick Off Audit KAP tahun 2023 di Bandung.

10. Peningkatan Kapasitas Komite Nominasi dan Remunerasi

a. Oerip Soebagyo.
Webinar Hukum online 2023: "Strategi dan Mekanisme Anti Fraud dalam Pengelolaan Organisasi dan Badan Usaha pada tanggal 30 Maret 2023 yang diselenggarakan oleh Hukumonline.com.

b. Condro Kirono.
Workshop Accounting for non Accountant pada tanggal 13 Mei 2023 yang diselenggarakan YPIA.

c. Robben Rico.
Workshop Accounting for non Accountant pada tanggal 13 Mei 2023 yang diselenggarakan YPIA.

d. Oerip Soebagyo.
Workshop Accounting for non Accountant pada tanggal 13 Mei 2023 yang diselenggarakan YPIA .

e. Condro Kirono.
Training Sertifikasi Nasional Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi/CRGP tanggal 20-21 September 2023. Yang diselenggarakan oleh RAP Asia Consulting.

f. Robben Rico.
Training Sertifikasi Nasional Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi/CRGP tanggal 20-21 September 2023 Yang diselenggarakan oleh RAP Asia Consulting.

g. Oerip Soebagyo.
Training Sertifikasi Risk Governance Master Class
tanggal 6 -7 Desember 2023 yang diselenggarakan oleh ERMA Indonesia

h. Boy Bayu Idisondjaja.
Training Sertifikasi Risk Governance Master Class tanggal 6-7 Desember 2023 yang diselenggarakan oleh ERMA Indonesia

i. Boy Bayu Idisondjaja
Training ESG Agustus s.d.Desember 2023 yang diselenggarakan oleh CFA Institute.

Pedoman KNR

PT Pos Indonesia (Persero) menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness*/ keadilan untuk mewujudkan visi perusahaan. Pedoman bagi KNR dalam menajalankan tugasnya diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Nomor 223/DEKOM/0822 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.Dengan ditetapkannya Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menunjang tugas Dewan Komisaris dalam pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasehat guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Pedoman ditetapkan pada 26 Agustus 2022 yang berisi tentang:

1. Latar Belakang
2. Tujuan, Visi dan Misi
3. Keanggotaan KNR
4. Kedudukan, Wewenang dan Batasan Tugas
5. Tugas
6. Mekanisme dan Ketentuan Kerja
7. Pengendalian Mutu

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO USAHA DAN INVESTASI (KPMRUI)

Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero) (KPMRUI) adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko usaha dan rencana investasi yang diusulkan Direksi, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi, serta mengidentifikasi risiko atas rencana investasi yang diajukan manajemen kepada Dewan Komisaris, serta melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha dan rencana investasi perseroan tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan perseroan.

Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi adalah salah satu organ pendukung Komisaris yang dibentuk berdasarkan pada:

1. Pasal 121 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran BUMN;
3. Pasal 18 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Pasal 17 s/d 23 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara

Anggota KPMRUI

1. Pengangkatan dan Pemberhentian
   a. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Komisaris Utama, dan penetapan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi harus disampaikan kepada Pemegang Saham.
   b. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi mempunyai kewenangan untuk mengusulkan penggantian dan/ atau penambahan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi.
   c. Pengangkatan, pergantian dan pemberhentian Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi harus disetujui oleh Dewan Komisaris.

2. Persyaratan Anggota
   a. Mempunyai integritas yang tinggi dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang manajemen dan/atau industri pos dan bidang-bidang yang relevan lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
   b. Mandiri terhadap manajemen PT Pos Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan tugasnya dan mandiri terhadap Dewan Komisaris dalam pelaporan hasil kerjanya.
   c. Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi bekerja secara kolegial profesional, efektif, dan efisien dengan mengutamakan musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan.
   d. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan efektif dalam melaksanakan fungsinya.
   e. Mempunyai komitmen yang tinggi dan menyediakan waktu yang memadai dalam menjalankan fungsinya secara optimal.
   f. Tidak mempunyai conflict of interest dalam menjalankan fungsinya.

Susunan Anggota KPMRUI sebagai berikut:

JABATAN	NAMA	KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS	STATUS RANGKAP
Ketua KPMRUI	Gunawan Hutagalung	183/DEKOM/0623	Komisaris
Anggota KPMRUI	Syaiful Siliganda		Anggota Independen

Profil Anggota KPMRUI diluar Anggota Dewan Komisaris

Syaiful Siliganda
Anggota Independen

Lahir : 08 April 1983
Usia : 40 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Periode Jabatan
10 April 2023 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
- 2006 Tekhnik Elektro, ITS Surabaya, Indonesia
- 2020 Magister of Management (majoring in Risk Management), PPM School of Management Jakarta, Indonesia

Riwayat Jabatan
- Juli 2006 - Augustus 2007 Management Development Programme (MDP) BCA Finance
- Agustus 2007 - Juli 2008 GMAP (Graduate Management Associate Programme) PermataBank
- November 2009 - Juli 2012 Senior Manager - Operational Risk PermataBank
- Juli 2012 - November 2013 Sales Management PermataBank
- November 2013 - Oktober 2014 Operational Risk Management - Bank UOB Buana Indonesia
- Februari 2015 - Agustus 2016 Operational Risk Division Head, Bank Sinarmas
- Agustus 2016 - Mei 2017 Special Assignment for Acquiring Business (Merchant) & Credit Card , Bank Sinarmas
- Juni 2017 - Mei 2018 Head Of Operational & Risk Fintech - P2P Lending, PT Cicil Solusi Mitra Teknologi
- Mei 2018 - Februari 2020 Head Of Legal & Compliance - Fintech ,PT Bluepay Digital International
- Februari 2020 - sekarang Director P2P Lending Company - Kredinesia

Independensi KPMRUI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Dewan Komisaris, KPM-RUI dituntut untuk selalu independen dan bebas dari tekanan pihak lain maupun kepentingan pribadi. Untuk menjaga Inde-pendensi, Anggota KPMRUI dibekali kode etik yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 212/DEKOM/0621 tentang Piagam Komite Pemantau Mana-jemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero). Kode etik anggota KP-MRUI yaitu:

1. Jujur, obyektif, independen serta tidak tercela dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Dapat dipercaya, setia kepada perusahaan dan tidak terlibat dalam kegiatan yang melawan hukum.
3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi dan atau yang dapat mempengaruhi obyektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Tidak menerima imbalan atau hadiah dari Direksi, Karyawan, Klien, Pelanggan, Rekanan atau pihak lainnya yang dapat mempengaruhi pendapat profesional di luar ketentuan yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugasnya.
5. Tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun pihak lainnya.
6. Dalam memberi nasehat atau pendapat harus menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut.
7. Bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengedepankan kepentingan perusahaan.
8. Secara berkelanjutan mengembangkan kemampuan profesionalisme dan efektivitas kerja.

Tugas Dan Tanggung Jawab

Tugas pokok KPMRUI adalah membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelak-sanaan manajemen risiko usaha dan ren-cana investasi yang diusulkan Direksi, ter-masuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi, serta mengidentifikasi risiko atas rencana investasi yang diajukan ma-najemen kepada Dewan Komisaris. Berikut rincian tugas KPMRUI:

1. Memantau kebijakan risiko yang ditetapkan perusahaan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
3. Melakukan evaluasi kepatuhan perseroan terhadap Anggaran Dasar, Peraturan Menteri BUMN, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
4. Mengevaluasi rencana investasi yang diajukan perusahaan dengan mengacu kepada rencana strategis Perusahaan dengan mempertimbangkan risiko-risiko hasil identifikasi manajemen dan kaidah-kaidah biaya manfaat serta peraturan yang berlaku.
5. Mengidentifikasi risiko-risiko usaha dan investasi dan hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
6. Menyampaikan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil analisis cost & benefit dan identifikasi risiko (yang telah disiapkan oleh Manajemen) serta melihat berbagai potensi risiko lain yang mungkin belum teridentifikasi oleh manajemen.
7. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite (charter) dan melakukan review sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

8. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu:
   a. Menentukan rencana kerja tahunan.
   b. Menentukan jadwal rapat tahunan.
   c. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan KPMRUI serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
   d. Membuat self assesment mengenai efektivitas dari kegiatan KPMRUI.
   e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang

Komite memiliki wewenang yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 212/DEKOM/0621 tentang Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero) yaitu:

1. Berhak memperoleh akses data dan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu dalam melakukan review dan evaluasi risiko usaha dan rencana investasi Perusahaan.
2. Berhak mengundang, menghadirkan dan melakukan koordinasi dengan Unit/ Divisi Risk Management/ Manajemen Risiko yang dibentuk oleh Direksi untuk memperoleh data dan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam melakukan review dan evaluasi rencana investasi dan risiko usaha Perusahaan.
3. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk menggunakan tenaga ahli atau advisor dalam memperoleh masukan untuk melengkapi saran dan pendapat KPMRUI atas beban biaya perusahaan.
4. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana butir diatas, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi perlu mendapat dukungan sepenuhnya dari Unit/Divisi Risk Management/ Manajemen Risiko usaha dan Investasi yang dibentuk oleh Direksi.

Kewajiban

Dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya, Anggota KPMRUI wajib untuk:

1. Menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan baik pada saat menjabat sebagai anggota komite maupun setelah tidak menjabat sebagai anggota komite.
2. Memanfaatkan dan menggunakan data dan informasi yang diperoleh untuk semata-mata kepentingan Perusahaan.
3. Tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan.
4. Menjaga independensi, profesionalitas, dan obyektivitas dalam menjalankan tugasnya.
5. Membuat laporan pertanggungjawaban KPMRUI yang menjelaskan realisasi pelaksanaan tugas KPMRUI dengan mengacu pada Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi sebagai pembanding.
6. Melaksanakan tugas tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPMRUI

1. Membahas / mengevaluasi tentang Manajemen Risiko Perusahaan:
   a. Monitoring dan membahas kebijakan manajemen risiko perusahaan.
      Monitoring dan membahas kebijakan Managemen Risiko Perusahaan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023 dan 7 November 2023. Poin penting yang disampaikan adalah agar menindaklanjuti revisi kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko sesuai Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-2/MBU/03/2023.
   b. Monitoring implementasi Aplikasi Penunjang Sistem Manajemen Risiko (SIMARIS)
      KPMRUI melakukan meeting dengan Divisi Manajemen Risiko Perusahaan melalui Live Video Zoom Meeting pada tanggal 14 Juni 2023. Poin penting yang disampaikan adalah bahwa aplikasi SIMARIS ini harus bisa membantu monitoring risiko-risiko dan meningkatkan budaya eskalasi risiko di PT. Pos Indonesia.
   c. Monitoring pelaksanaan *self-assessment* penerapan Manajemen Risiko.
      Monitoring dan membahas pelaksanaan self-assesment penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023. Poin penting yang disampaikan adalah agar manajemen segera mengajukan usulan Klasifikasi Risiko dan Organ Pengelola Risiko sesuai Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-2/MBU/03/2023.
   d. Rapat KPMRUI dengan Unit kerja Manajemen Risiko Perusahaan setiap Triwulan.
      KPMRUI telah mengadakan Rapat KPMRUI Triwulan dengan Divisi GRC pada tanggal 24 Oktober 2023 mengenai pelaksanaan Manajemen Risiko/GCG Triwulan III 2023. Dalam rapat tersebut, KPMRUI memberikan arahan antara lain:
      1) Maklumat terkait risiko itu sangat menantang sekali, harus ada perhitungan yang akurat baik residual risk dan inherent risk sehingga angka-angka yang muncul tidak hanya bisa dipertanggung jawabkan tetapi juga harus cukup memadai. Problemnya secara faktual kalau diperhatikan hampir semua *risk owner* dalam mengisi formulir masih kurang memadai (misalkan dalam hal mengukur penyebabnya, targetnya tidak achievable, pemahaman terhadap bisnis logistic belum optimal dll).
      2) Dalam Permen BUMN Nomor 2 Tahun 2023 dijelaskan secara eksplisit tentang tanggung jawab unit kerja manajemen risiko terkait Internal control testing dan stress testing.
      3) Maklumat Manajemen Risiko dari KBUMN diharapkan dapat dipelajari dan didiskusikan menyangkut template. Dengan maklumat risiko tersebut, tidak bisa lagi berasumsi hal ini akan sangat tergantung dari identifikasi resiko, analisis risiko dan evaluasi risikonya. Secara logis harus ada koreksi maka harus konsisten dengan manajemen risiko.

4) GRC meminta agar menyampaikannya ke Risk owner bahwa ini adalah satu langkah respon yang harus benar-benar terukur dan *outcome* langkah ini terhadap penurunan risiko harus terukur.

2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKAP Tahun 2023 secara bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan.
   a. Telaah Atas Laporan Manajemen Bulanan.
   b. Telaah Atas Laporan Manajemen Triwulanan.
   c. Telaah Atas Laporan Manajemen Tahunan.

   KPMRUI bersama dengan Komite Audit (KA) dan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) melakukan telaah terhadap:
   a. Laporan Manajemen bulan Desember 2022 sampai dengan November 2023.
   b. Laporan Manajemen Triwulan IV tahun 2022, Triwulan I - III tahun 2023.
3. Membahas / mengevaluasi / memberi saran tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.
   a. Melakukan pembahasan atau rapat dengan pihak terkait hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.
   b. Merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian kepada Direksi.
   c. Membahas/mengevaluasi tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.
   d. Membahas/mengevaluasi tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.
   e. Membahas/mengevaluasi tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.

   KPMRUI telah mengadakan Rapat dengan SVP Kurir & Logistik pada tanggal 26 September 2023 terkait mutu layanan POS. Dalam rapat tersebut, KPMRUI memberikan arahan antara lain:
   - Apresiasi untuk manajemen dalam melakukan modernisasi processing yang semakin baik, untuk itu cakupan dari proccessing ini agar segera ditingkatkan
   - Paling utama yang perlu mendapat perhatian yaitu bagaimana dari sisi operasi ini dapat menurunkan biaya mengingat saat ini masih terbebani dengan biaya SDM yang cukup tinggi. Seberapa besar penurunan biaya dengan modernisasi ini dapat berpengaruh terhadap harga pokok sehingga penurunan biaya ini bisa *meleverage* kompetisi PT Pos di market.

- Perlu dipikirkan inovasi inovasi yang memberdayakan KCP (terutama yang di kota) mengingat prinsip-prInsip *proccessing* terpusat itu juga akan menambah *cost* (analogi seperti switch di area telekomunikasi). Kalau semua barang itu harus masuk ke KCU terlebih dahulu maka ini juga akan costly, mungkin perlu melakukan *reengineering* terhadap *positioning* dari semua KCP supaya ada simplifikasi dari route. Untuk itu sebagai tantangan ke depan perlu dicari upaya bagaimana bisa mendorong biaya ini akan semakin murah dari sisi operasional
- Agar dibuat *internally comparison* terhadap *positioning* PT Pos Indonesia apabila PT Pos Indonesia mempunyai demand size seperti yang dimiliki kompetitor. Bila ini bisa dilakukan dan hasilnya bagus maka nanti bisa digunakan untuk mendorong Divisi penjualan sehingga ada tanggung jawab dari Divisi Sales untuk mengutilisasi achievement yang ada di operasi. Diiminta untuk melakukan komunikasi dengan pihak *sales*, seharusnya hal ini dibicarakan di internal manajemen. Jadi tidak boleh silo dan harusnya *achieve* secara *corporate*.
- Dari instagramnya Pos Indonesia itu masih sering ditemukan keluhan tentang banyak hal misalkan keterlambatan paket, ada paket yang dibuka dll. Perlu mendapat perhatian terkait berita di medsos tersebut mengingat efeknya itu multiplier impact, dalam hal ini artinya pelanggan itu tidak puas secara CCH sehingga ybs masuk ke sosial media. Untuk itu diminta melihat hal tersebut mengingat risiko itu bisa meluas (menyangkut risiko reputasi dll). Agar diberikan perhatian terhadap penyelesaian keluhan yang melalui sosial media ini.
- Diharapkan di Direktorat Operasi dapat lebih berinovasi sehingga bisa menekan biaya semaksimal mungkin tanpa mengurangi kualitas dan tentunya agar bisa lebih kompetitif.
- Terkait permintaan Poslog untuk menambah *space* di KTSH diminta untuk menyampaikan permasalahan yang ada kepada Direktur Kurir dan Logistik. Disampaikan juga bahwa yang menjadi perhatian dari Komisaris Utama yaitu menyangkut *Double Presence*.
- Sekarang ini Poslog harus dikedepankan karena PT Pos Indonesia ini akan menjadi Logistic Company. Performansi Poslog ini harus menjadi tanggung jawab kita semua tapi tidak juga harus memberikan *previllage* yang berlebihan.

- Agar dipersiapkan seluruh Kcp untuk menerima wholesale delivery dan wholesale collecting dari penyelenggara lain.
- Dewan Komisaris itu selalu melihat PT Pos secara keseluruhan korporasi, dimana Pemegang Saham memberikan target target kepada PT Pos Indonesia dan target ini merupakan target bersama. Jadi jangan satu Divisi bisa achieve dan Divisi lainnya tidak achieve. Achievement di satu aspek seharusnya bisa dimanfaatkan oleh aspek lain untuk bergerak.
- Kalau suatu project sudah dimenangkan oleh PT Pos maka diharapkan project tersebut bisa diserahkan ke operasi untuk eksekusinya sehingga teman teman di bisnis bsa mencari opportunity lain.
- Terkait dengan CCH yang paling utama yang didorong itu adalah setiap klaim yang ada agar segera di closingkan. Untuk itu antara admin IG dengan tim operasi diharapkan dapat segera menyelesaikan hal tersebut.
- Kalau sampai saluran pengaduan di medsos itu ditutup maka ini dinilai kurang pas karena ini merupakan bagian dari fasilitas informasi ke publik terkait PT Pos Indonesia. Disamping itu malah bisa bahaya karena akan menjadi viral dimana PT Pos menutup fasilitas komennya.
- Bahasa di CCH itu sering kurang pas, misalkan diinfokan bahwa pengantarnya sedang sakit dan sering juga jawabannya itu malah membuat PT Pos dibully. Untuk itu agar dibicarakan dengan Corsec agar adminnya itu dilatih guna dapat memberikan jawaban jawaban yang baik.
- Perlu diperhatikan bahwa teman teman di CCH ini sangat terkait dengan kemampuan retensi. Banyak indikator dari operasional ini yang tidak tercermin dari sisi bisnis, kalau CCH ini bagus harusnya juga berbanding lurus dengan kemampuan retensi. Hal ini tentunya juga akan berdampak pada kenaikan akuisisi mengingat akan ada satu customer membawa customer lain.

4. Melaksanakan Evaluasi terhadap implementasi RKAP tahun 2022 dan kebijakan perusahaan
   a. Melakukan pembahasan dengan Unit kerja Manajemen Risiko Perusahaan atau Unit terkait tentang kepatuhan Direksi dalam menjalankan Peraturan Perundangan yang berlaku.
   b. Melakukan pembahasan dengan Unit kerja Manajemen Risiko Perusahaan atau Unit terkait, terkait kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.

c. Telaah dan surat rekomendasi/ persetujuan atas penghapusbukuan aset perusahaan, sesuai permohonan Direksi.
d. Melakukan pembahasan atau rapat dengan pihak terkait terkait isu penting yang memerlukan perhatian pemegang saham.
e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja berdasar Laporan Bulanan yang disampaikan serta rapat-rapat dengan manajemen serta melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala penurunan kinerja perusahaan.

5. Membahas/mengevaluasi tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan Pembahasan dengan pihak terkait tentang Implementasi pengelolaan anak perusahaan telah dilakukan pada Triwulan I 2023.
6. Memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan
   a. Membahas/monitoring mengenai self assessment GCG perusahaan.
      KPMRUI telah menghadiri undangan Corporate Secretary pada tanggal 29 Maret 2023 melalui melalui Live Video Conferrence Zoom Meet dengan agenda rapat: Exit Meeting Asesmen GCG Tahun Buku 2022. Meeting Internal Komite juga telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023.
   b. Membahas mengenai Area of Improvement hasil self assessment GCG perusahaan.
      Telah dilakukan meeting di GPI pada tanggal 6 September 2023 dengan pembahasan hal-hal sebagai berikut :
      - Pembahasan bersama/diskusi dilakukan antar anggota komite (non Komisaris)
      - Dilakukan pengisian secara langsung terhadap tabel monitoring.
      - Dari hasil pembahasan di atas didapatkan hasil seperti pada lembar/tabel monitoring

      Telah dilakukan meeting melalui media zoom pada tanggal 26 Desember 2023 dengan pembahasan bersama/diskusi dilakukan antar anggota komite dengan GRC :
      a. Dilakukan pembahasan atas hal-hal yang belum ditindaklanjuti.
      b. Dilakukan pengisian atas hal-hal yang sudah selesai.
      c. Sepakat untuk menindaklanjuti hal-hal yang belum tercapai.

7. Melakukan telaah serta mempersiapkan tanggapan atas rancangan RKAP Tahun 2024 yang telah disampaikan oleh Direksi:
   a. Rancangan Awal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024 dikirimkan Direksi kepada Dewan Komisaris pada tanggal 27 Oktober 2023
   b. Dilakukan meeting untuk membahas draft RKAP 2024 ini secara online antara Dewan Komisaris dengan Direksi pada tanggal 30 Oktober 2023. Pada meeting ini Dewan Komisaris memberikan catatan atas draft RKAP sebanyak 44 poin.

c. Dilakukan pertemuan tatap muka untuk membahas draft RKAP 2024 bertempat di Gedung Pos Cilaki (Bandung) pada tanggal 8 November 2023 untuk membahas tindak lanjut atas catatan Dewan Komisaris. Pada meeting secara fisik ini juga terdapat beberapa masukan tambahan atas revisi draft RKAP 2024.
d. Direksi melakukan beberapa tindak lanjut atas beberapa usulan tambahan Dewan Komisaris pada pertemuan terakhir dan mengirimkan kembali revisi RKAP 2024 pada tanggal 22 November 2023.
e. Direksi melaksanakan rapat teknis dengan Kementerian BUMN pada tanggal 28 November 2023.
f. Direksi mengirimkan Rancangan RKAP 2024 versi setelah Rapat Teknis pada tanggal 17 Desember 2023.
g. KPMRUI mempersiapkan draft tanggapan Komisaris terhadap RRKAP 2024 untuk disampaikan kepada pemegang saham.

8. Melakukan Kunjungan ke unit -unit kerja di lingkungan perusahaan.
KPMRUI telah melakukan empat kali kunjungan pada 2023 ini yaitu :
a. 11 Juli 2023 kunjungan ke Kantor Tukar Soekarno-Hatta Cengkareng.
b. 1 Oktober 2023 kunjungan ke Kantor Pos cabang Tulehu Ambon.
c. 31 Oktober 2023 kunjungan ke SPP Jakarta Timur.
d. 15 November 2023 kunjungan ke SPP Juanda Surabaya.

9. Evaluasi atas kebijakan perusahaan lainnya:
a. Melakukan pertemuan atau permintaan keterangan dengan atau kepada pihak terkait berkaitan dengan kebijakan pengelolaan aset.
b. Melakukan pertemuan atau meminta keterangan pihak terkait sehubungan kerjasama pihak ketiga atau sinergi BUMN.
c. Melakukan pertemuan atau meminta keterangan pihak terkait sehubungan kebijakan pengelolaan pinjaman.
d. Melakukan pertemuan atau meminta keterangan pihak terkait pelaksanaan penagihan piutang usaha.
e. Melakukan pertemuan atau meminta keterangan pihak terkait sehubungan kebijakan penting lainnya yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan.

10. Tugas - tugas lainnya dari Dewan Komisaris:
a. Menghadiri rapat progress audit dengan KAP;
KPMRUI menghadiri rapat progress Audit dengan KAP untuk tahun buku 2023 yang akan dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut :
- Opening pada tanggal 3 November 2023
- Progress 1 pada tanggal 23 November 2023
- Progress 2 pada tanggal 28 Desember 2023

b. Rapat Komite (Gabungan) Dewan Komisaris

11. Peningkatan kapasitas KPMRUI

KPMRUI telah mengikuti Training Anti Fraud bersertifikasi (Certified Anti Fraud Officer) pada tanggal 2-4 Mei 2023. Tiga anggota KPMRUI lainnya telah mengikuti Training In-House "Finance for Non Financial Manager "di Solo pada tanggal 13 Mei 2023.

12. Rapat

Sepanjang tahun 2023, KPMRUI telah mengadakan dan/atau mengikuti rapat sebanyak 88 kali. Setiap risalah rapat yang dibuat dalam Rapat KPMRUI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dilaporkan kepada Dewan Komisaris disertai dengan pendapat dan usulan, jika ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.

a. Rapat Internal sebanyak 8 kali.
b. Rapat rutin dengan Dekom sebanyak 12 kali.
c. Rapat dengan unit manajemen risiko dan manajemen sebanyak 6 kali.
d. Rapat insidentil KPMRUI sebanyak 2 kali.

13. Pelaporan

Selama tahun 2023 KPMRUI telah menyampaikan sebanyak 5 Laporan, yakni:

- Laporan Realisasi Pelaksanaan Tugas Tahunan KPMRUI Tahun 2022 telah disampaikan pada tanggal tanggal 10 May 2023 melalui surat No. 05/ KPMRUI/0523.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan Tugas KPMRUI TW I tahun 2023 telah disampaikan pada tanggal tanggal 10 May 2023 melalui surat No. 06/ KPMRUI/0523.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan Tugas KPMRUI TW II tahun 2023 telah disampaikan pada tanggal 1 Agustus 2023 melalui surat No. C.Pos.71240/ KPM100/DEKOM/2023
- Laporan Realisasi Pelaksanaan Tugas KPMRUI TW III tahun 2023 telah disampaikan pada tanggal 17 Oktober 2023 melalui surat No. C.Pos. 90344/ KPM100/DEKOM/2023
- Penyusunan dan pelaporan RKAT KPMRUI tahun 2024 telah disampaikan pada tanggal 29 Desember 2023 melalui surat No. C.Pos. 108019/ KPM100/DEKOM/2023

Skor GCG **89,04** dengan kriteria

"Sangat Baik"

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tata Sugiarta

Lahir : Bandung, 20 Januari 1970
Usia : 54 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Bandung

Riwayat Pendidikan

1991 Desain Grafis, FSRD Institut Teknologi Bandung

Riwayat Jabatan

- 2000-2009 FP Produksi - Bagian Filateli Kantor Pusat
- 2009-2012 FP Promosi - Bagian Marketing Communication Kantor Pusat
- 2012-2016 Manajer Filateli Kantor Pusat
- 2016-2017 Deputi Jasa Keuangan Ritel dan Properti Reg 2 Padang
- 2017-2018 Manajer MarketingCommunication Kantor Pusat
- 2018-2020 VP Marketing Kantor Pusat
- 2020 VP Product Management dan Marketing Kantor Pusat
- 2020-sekarang Corporate Secretary

Tugas dan Tanggung Jawab

Mengacu pada Keputusan Direksi Nomor: KD115/DIRUT/1121 tanggal 26 November 2021 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi Nomor : KD.77/DIRUT/0821 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero), Corporate Secretary mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memelihara hubungan baik dengan pemegang saham, regulator dan pemangku kepentingan lainnya serta melaksanakan peran sebagai penghubung (liaison officer) dengan fungsi terkait dalam Perusahaan.
2. Mengendalikan kesekretariatan Direksi, Protokoler Direksi dan sistem \ administrasi dokumen Perusahaan.
3. Mengendalikan pengelolaan kepentingan Hukum Perusahaan, Direksi dan karyawan dalam menjalankan kebijakan/peraturan yang telah ditetapkan Perusahaan.
4. Mengendalikan kepatuhan Perusahaan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip--prinsip good corporate governance.
5. Mengendalikan penyelenggaraan program quality, safety, health andenvironment.
6. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu apabila diminta.
7. Mengendalikan penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
8. Merencanakan dan mengendalikan Program Pengenalan Korporasi terhadap Direksi dan Dewan Komisaris baru.

9. Menetapkan kebijakan program pengembangan informasi internal maupun eksternal Perusahaan dan mengendalikan implementasinya.
10. Mengelola informasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal agar tercipta respon positif dari public atau pelanggan.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut diatas Corporate Secretary memiliki 2 divisi yang berada di bawahnya yakni :

1. Divisi Kesekretariatan
   Divisi Kesekretariatan dipimpin oleh Vice President (VP) Kesekretariatan yang bertanggung jawab kepada Corporate Secretary. Tanggung jawab utama VP Kesekretariatan adalah mengorganisasikan, mengendalikan pengelolaan sekretariatan dan protokoler Direksi, administrasi dokumen Perusahaan, Museum, Perpustakaan, serta mengendalikan program komunikasi baik pihak internal maupun pihak eksternal Perusahaan agar tercipta respon positif dari publik atau pelanggan.
2. Divisi Legal, Governance, and Compliance
   Divisi Kesekretariatan dipimpin oleh Vice President (VP) Legal, Governance, and Compliance yang bertanggung jawab kepada Corporate Secretary. Tanggung jawab utama VP Legal, Governance, and Compliance adalah:
   a. Bertanggung jawab atas perlindungan kepentingan hukum Perusahaan, Direksi, dan Karyawan dalam menjalankan kebijakan/peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Mengelola implementasi kebijakan GCG, kebijakan kepatuhan agar tercapai pengelolaan penyelenggaraan Perusahaan yang bersih, transparan, accountable dan patuh pada ketentuan pemerintah.
   c. Mengelola indeks kepatuhan.

Pelaksanaan Tugas Sekertaris Perusahaan

Dalam kaitan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa kegiatan terkait dengan *stakeholders* dan keterbukaan informasi yang telah dilakukan di tahun 2023 adalah:

1. RUPS : 3 kali
2. Rapat Direksi :51 kali
3. Rapat Komisaris dan Direksi : 14 kali
4. RAPIM : 3 kali

Selain kegiatan tersebut, Sekretaris Perusahaan juga telah memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan acara baik yang diadakan untuk internal perusahaan maupun yang melibatkan masyarakat umum antara lain :

- Sepanjang tahun 2023 telah terlaksana lebih dari 12 Upacara dan Apel di lingkungan Pos Indonesia. Mulai dari Upacara Peringatan Hari Besar Nasional hingga Apel Rutin yang dipimpin oleh Direktur dan Senior Leader Salah satu fokus di tahun 2023 adalah pengembangan portal wahana sebagai sarana penyampaian informasi terpusat agar dapat diimplementasikan oleh insan Pos di seluruh Indonesia.
- Pos Indonesia memiliki tim Paskibra yang bertugas dalam Upacara Peringatan Hari Besar Nasional di Kantor Pusat. Proses pembentukan tim ini didampingi langsung oleh tim Pussenif Kodiklat AD.
- Penghujung tahun 2023 Pos Indonesia membentuk tim Paduan Suara yang beranggotakan pegawai di wilayah sekitar kota Bandung.

Hal-hal lain telah dilakukan di bagian Sekretariat Perusahaan sebagai salah satu bentuk perbaikan guna meningkatkan kualitas, kecepatan dan efektivitas kegiatan, supaya menghasilkan kegiatan yang produktif dan selektif, yaitu :

- Selama 2023 telah 98% arsip peraturan perusahaan seperti Keputusan Direksi (KD), Surat Edaran (SE), Perjanjian Kerjasama (PKS), dan Surat Keputusan (SK) telah dialihmediakan.
- Surat menyurat internal dan ekternal telah menggunakan Nota Dinas Elektronik (NDE) untuk memudahkan akses dan administrasi kearsipan.
- Modernisasi Museum Pos
- Museum Pos tidak hanya sebagai sarana Edukasi akan tetapi juga mengarah ke Rekreasi yang nyaman dan aman. Koleksi museum yang usang dan tidak relevan diganti dengan sarana yang lebih simple dan modern. Sasaran pengunjung semakin diperluas dengan publikasi melalui media sosial yang masif untuk meningkatkan keingintahuan tentang perkembangan perposan di Indonesia.
- Proyek pembangunan website Museum Pos Indonesia telah mencapai tahap finising, menunjukkan komitmen untuk memberikan akses informasi yang lebih baik kepada pengunjung dan masyarakat umum.
- Sistem reservasi museum secara digital perlahan dikembangkan untuk memudahkan pengunjung merencanakan kunjungan dengan lebih efisien dan meminimalkan antrian.
- Pengembangan sistem reservasi ruang rapat secara digital diharapkan memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai untuk mengatur dan menggunakan fasilitas ruang rapat dengan lebih terorganisir, progres saat ini adalah perbaikan *connecting admin to user*.
- Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2023 meningkat signifikan. Pada tahun 2022 perusahan masih masuk kategori "Tidak Informatif" dengan skor 25,76 dan di tahun 2023 PosIND mendapat predikat "Menuju Informatif" dengan skor 80,83.
- Penambahan Followers terbanyak di tahun 2023 ada pada channel Instagram yaitu sebesar 17% atau 26.517 followers. Namun pertumbuhan followers terbesar terjadi pada channel Linkedin yaitu sebesar 30%. Hal ini disebabkan oleh pembukaan Job Posting melalui channel Linkedin sehingga aktivitas Linkedin Perusahaan tahun ini lebih besar.
- Frekuensi posting di beberapa akun Media Sosial seperti Tikotk dan YouTube sudah lebih teratur. Di tahun 2023 terdapat 172 posting pada YouTube.
- Penyusunan rencana pemberitaan selama satu bulan ke depan untuk menentukan citra apa yang ingin dibangun dan ditampilkan bagi masyarakat. Pengamatan pemberitaan yang beredar di media massa terkait Perusahaan, terutama pemberitaan yang non organik (dibuat oleh pihak eksternal Perusahaan).

INTERNAL AUDIT

PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dapat mempertanggungjawabkan segala dan hasil usahanya kepada pemegang saham, seluruh pegawai, pelanggan dan stakeholders lainnya. Manajemen dituntut mengelola perusahaan dengan baik (Good Coporate Governance) dengan menjalankan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran atas seluruh aktivitas perusahaan, serta menyajikan laporan keuangan/kegiatan yang informatif, handal dan dapat dipercaya.

Di lain pihak, Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab untuk memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (governance) telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, serta mengawasi dan memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern dan arahan tentang manajemen risiko perusahaan. Akuntabilitas dan responsibilitas manajemen kepada stakeholder tentu harus dinilai dan dievaluasi, baik dari aspek ketaatan pada peraturan, efisiensi dan efektivitas. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Internal Audit PT Pos Indonesia (Persero) selaku unit fungsional yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dituntut berperan optimal membantu Direktur Utama menjalankan fungsi pengawasan.

The Institute of Internal Auditors (IIA) mendefinisikan audit internal sebagai kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultansi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola. Internal Audit harus mampu memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kelemahan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan operasional dan keuangan, baik menyangkut ketaatan peraturan, penilaian efisiensi dan efektivitas kegiatan dari seluruh lini organisasi di lingkungan perusahaan. Dalam mengemban tugas dan fungsi tersebut, Internal Audit dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, objektif, independen dan menjunjung tinggi kode etik serta standar audit.

Internal Audit Charter

Agar Internal audit berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembentukannya, maka Internal Audit Charter (Piagam Audit Internal) yang dimiliki Pos Indonesia selalu diperbarui. Internal Audit Charter(Piagam Audit Internal) merupakan dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal, sesuai dengan misi audit internal dan unsur-unsur wajib yang ditetapkan *Internasional Professional Practices Framework* (persyaratan dasar praktik profesional internal audit, Kode Etik, Standar dan definisi Audit Internal).

Piagam Audit Internal dituangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 244/DEKOM/0922 dan Nomor:KD077/DIRUT/0922 Tentang Piagam Audit Internal di dalamnya ditetapkan antara lain posisi aktivitas audit internal di dalam perusahaan, termasuk alur pelaporannya; kewenangan akses terhadap catatan, personel, dan fisik aset yang relevan dengan penugasannya. Selain itu, di dalamnya juga didefinisikan mengenai lingkup aktivitas audit internal sebagai bentuk kesepakatan terhadap peran aktivitas audit internal yang sesuai dengan standard profesi audit internal yang berlaku. Agar Internal Audit berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembentukannya, maka diperlukan Internal Audit Charter dengan maksud dan tujuan:

1. *Internal Audit Charter* (Piagam Internal Audit) dimaksudkan agar terdapat pemahaman bersama terhadap tujuan, wewenang, dan tanggung jawab Internal Audit, oleh Direksi, Komisaris, dan seluruh jajaran manajemen Perusahaan.
2. *Internal Audit Charter* (Piagam Internal Audit) yang tertulis bermakna sebagai suatu pernyataan pengakuan untuk direviu dan diterima oleh Manajemen dan Dewan Komisaris serta untuk disetujui bersama.
3. *Internal Audit Charter* (Piagam Internal Audit) merupakan suatu perjanjian formal Internal Audit dengan Manajemen dan Dewan Komisaris tentang kegiatan audit internal Perusahaan. Sebagai dokumen formal dan tertulis, *Internal Audit Charter* (Piagam Internal Audit) menjadi sarana untuk melakukan penilaian secara periodik mengenai kecukupan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab aktivitas audit internal, dan sekaligus menjadi alat untuk melakukan revisi secara prudent jika diperlukan penyesuaian.

Tujuan penyusunan *Internal Audit Charter* (Piagam Internal Audit) adalah sebagai pedoman bagi para Auditor Internal agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah:

1. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Pengendalian Intern, Manajemen Risiko, dan Proses Tata Kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan;
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Internal Audit melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Audit Tahunan (RKAT).
2. Menyampaikan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) kepada Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran dan selanjutnya menyampaikan kepada Direktur Utama untuk mendapat persetujuan.
3. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala (triwulan) kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit.
4. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
5. Memberikan rekomendasi dan informasi yang objektif tentang kegiatan Auditee pada semua tingkat manajemen untuk peningkatan kinerja perusahaan.
6. Memberikan konsultasi kepada pihak internal perusahaan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian internal, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan.
7. Melakukan audit pendalaman (khusus) apabila diperlukan dan atau atas permintaan Manajemen dalam bentuk audit penugasan tertentu dan atau audit investigatif.
8. Menyusun dan melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama dan atau pimpinan unit kerja terkait (auditee), dengan tembusan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit. Dalam hal audit investigatif, laporan hasil audit dapat disampaikan kepada Direktur terkait atas ijin Direktur Utama.
9. Melaporkan segera atas setiap temuan audit (Management Letter) yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan.
10. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit internal dan eksternal serta melaporkan setiap triwulan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris c.q. Komite Audit.
11. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar dan kode etik.
12. Melaksanakan pendidikan profesional berkelanjutan dan sesuai dengan kompetensi Auditor.
13. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kehandalan, efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal perusahaan di unit kerja termasuk pelaksanaan tugas khusus dari Direktur Utama (sistem operasional pengawasan).
14. Memberikan kontribusi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola (governance, manajemen risiko, dan pengendalian internal).
15. Memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis perusahaan.
16. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Internal Audit bekerja sama dengan Komite Audit.

Kewenangan dan Tanggung Jawab Internal Audit

1. Mengakses penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap sumber daya data yang meliputi dokumen, pencatatan, personel dan fisik harta kekayaan perusahaan termasuk sumber daya data transaksi berbasis teknologi informasi di seluruh unit kerja Perusahaan dan anak perusahaan.
2. Menyusun dan mengusulkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).
3. Menggunakan jasa pihak eksternal untuk membantu melakukan pelaksanaan audit sekaligus bertujuan transfer of knowledge.
4. Melakukan komunikasi dan koordinasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
5. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (Regulator, Auditor Eksternal) dan keikutsertaan dalam kegiatan Asosiasi dan Forum Komunikasi Internal Audit.
6. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, scope, cara, teknik, dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
7. Melakukan audit investigatif atas inisiatif sendiri (untuk pendalaman kasus tertentu) atau berdasarkan permintaan manajemen ataupun pihak lain yang berwenang dengan cara melakukan pemeriksaan yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk BAPK (Berita Acara Permintaan Keterangan) terhadap audite.
8. Meminta klarifikasi terhadap rekomendasi hasil audit yang tidak ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati dan selanjutnya pejabat yang bertalian wajib memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Melaporkan kepada Direktur Utama terkait pejabat yang tidak melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil audit, sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
10. Memberikan penilaian dan rekomendasi hasil audit dan memonitor tindaklanjutnya untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut telah dilaksanakan dengan tepat.
11. Memberikan penilaian, konsultasi, informasi dan rekomendasi mengenai proses bisnis perusahaan sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD07/DIRUT/0923 Tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.013/DIRUT/0323 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero), Internal Audit merupakan aparat pengawas intern Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Internal Audit dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Kepala Internal Audit

Agus Tristuwanto,Ak, CA, CGAP, CCSA

Lahir : 27 Agustus 1964
Usia : 59 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Bandung

Dasar Penunjukan
Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.538/DIRUT/0323 tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Propesional Perusahaan (TKPP) Di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero)

Periode Jabatan
15 Maret 2023 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
- DIII Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lulus tahun 1986
- DIV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lulus tahun 1993

Pengalaman Kerja
- Auditor Anggota Tim pada Deputi Bidang Pengawasan Khusus BPKP (1986-1990),
- Auditor Ketua Tim pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (1994-1999)
- Kepala Seksi Pengawasan Jasa Perhubungan Darat pada Deputi Pengawasan BUMN/D BPKP
- (1999-2002)
- Kepala Sub Bagian Keuangan pada BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (2002-2004)
- Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis Substantif pada Pusdiklatwas BPKP (2004-2007)
- Kepala Bagian Tata Usaha pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara (2007-2009)
- Kepala Bidang Program dan Sertifikasi pada Pusat Pembinaan Auditor BPKP (2009-2012)
- Kepala Sub Direktorat Pengawasan IP Bidang Polsoskam Lainnya II (2012- 2015)
- Direktur Keuangan PPK GBK (Jan 2016-Mei 2022)
- Auditor Madya BPKP (Juni 2022-sekarang)

Auditor Internal

Anggota Internal Audit wajib memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pos, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
6. mematuhi kode etik Audit Internal.
7. menjaga kerahasiaan informasi dan/ atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
8. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
9. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Persyaratan Profesionalisme Internal Audit

1. Standar Independensi
   Unit dan Auditor Internal harus independent terhadap aktivitas yang diauditnya.
   a. Unit internal audit Internal audit dapat dikatakan independen apabila pelaksanaan tugas audit dilakukan secara bebas dan objektif. internal audit harus independen secara organisasi dan pribadi serta independen dalam bersikap dan penampilan, dengan demikian auditor dapat memberikan pendapat penting yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan auditnya.
   b. Status organisasi Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Semua jajaran dalam Perusahaan berkewajiban mendukung dan bekerja sama dengan Internal Audit untuk memungkinkan tercapainya tanggung jawab auditor yang memadai.
   c. Objektivitas Adalah sikap mental independen yang harus dimiliki dan dipelihara oleh Internal Audit dalam melakukan audit. Auditor Internal tidak boleh mengesampingkan pertimbangan objektivitas dalam melaksanakan tugas audit karena adanya pertimbangan lain. Objektivitas menghendaki auditor Internal harus jujur terhadap diri sendiri, yakin atas kehandalan hasil kerjanya, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak luar. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas audit,

Auditor Internal harus mengambil keputusan secara profesional, bebas dan objektif. Untuk menjaga objektivitas auditor Internal harus menghindari audit di unit kerja sebelumnya dalam lingkup kerja yang menjadi tanggung jawabnya minimal dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun.

d. Menjaga Integritas yaitu tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal-hal lain yang patut diduga dapat disalahgunakan baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya yang tidak berhak.

2. Standar Kemampuan dan Keahlian

Audit Internal harus dilakukan dengan kecakapan profesional yang memadai dan kecermatan yang seksama.

a. Kecakapan profesional merupakan tanggung jawab unit Internal Audit dan individu Auditor Internal. Ka Internal Audit hanya menugaskan kegiatan audit kepada staf yang secara kolektif telah memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas audit tersebut.
b. Tanggung jawab unit Internal Audit mengenai kecakapan profesional meliputi hal-hal sebagai berikut :
   1) Pemenuhan kebutuhan tenaga auditor Internal Audit untuk memiliki individu yang mempunyai pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas auditnya.
   2) Penugasan tenaga auditor internal harus memenuhi syarat kemampuan teknis tertentu secara kolektif berdasarkan jenis, luas, serta kompleksitas objek audit.
   3) Keharusan untuk memelihara kemampuan teknis audit melalui jenjang pendidikan dan pelatihan berkelanjutan berupa training, seminar dan sebagainya, sehingga tetap mengikuti dan paham tentang perkembangan terakhir standar, prosedur dan teknik audit serta dunia usaha perusahaan.
   4) Supervisi atas pelaksanaan audit internal secara berkelanjutan mulai dari perencanaan, audit program, pelaksanaan audit, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut. Supervisi harus dilakukan secara seksama, terdokumentasikan.

c. Tanggung jawab Auditor Internal mengenai kecakapan dan kecermatan profesional meliputi:
   1) Kepatuhan terhadap standar audit dan kode etik audit internal.
   2) Penguasaan atas pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu tertentu yang berkaitan dengan tugas audit, termasuk kemampuan menerapkan standar, prosedur dan teknik audit serta praktek-praktek bisnis yang sehat.
   3) Kemampuan berkomunikasi baik lisan dan tulisan secara efektif dan baik dengan pihak auditee maupun dengan manajemen perusahaan.
   4) Keharusan menjaga tingkat kecermatan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan penyimpangan, ketidakcermatan, ketidakefektifan, kelemahan pengendalian internal dengan melakukan pengujian dan verifikasi yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan.

5) Keharusan menggunakan kemahiran dan kecermatan profesional dengan memperhatikan:
   - Cakupan kerja audit yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit yang ditetapkan.
   - Tingkat materialitas atau signifikansi masalah.
   - Tingkat keandalan dan efektivitas pengendalian internal.
   - Biaya audit diperbandingkan dengan manfaat yang diperoleh.
   - Standar operasi yang ada apakah dapat diterima dan dipatuhi.
   - Prinsip empat mata yaitu melaksanakan audit terhadap objek yang berisiko tinggi harus dilakukan minimal 2 (dua) orang auditor.

3. Persyaratan Pengetahuan Auditor

   Audit Internal harus dilakukan secara profesional sehingga diperlukan standar pengetahuan dan kompetensi teknis yang harus dimiliki auditor supaya pelaksanaan audit dapat dilakukan secara memadai dan seksama. Pimpinan Internal Audit dan Auditor internal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang :

   a. Pengelolaan keuangan/akuntansi perusahaan dan aspek-aspek hukum dalam proses pelaksanaan audit.
   b. Proses bisnis internal, peraturan, mekanisme dan prosedur yang ada di objek audit yang diperlukan untuk melakukan audit.
   c. Data yang diperlukan, cara memperoleh data, baik menggunakan akses teknologi informasi maupun secara manual, dan mampu melakukan pengolahan data yang memadai agar dapat memperoleh bukti audit untuk membuat kesimpulan.
   d. Pengoperasian komputer sebagai salah satu teknologi informasi dan pengolah data.
   e. Teknik-teknik pengendalian dan audit berbasis risiko guna menunjang pelaksanaan kegiatan audit yang diwujudkan dengan penyusunan program audit berbasis pada penafsiran risiko dan eksposur yang berdampak pada perusahaan.
   f. Pelaksanaan evaluasi dan berkontribusi pada proses manajemen risiko, pengendalian atas pengelolaan (*governance*) dengan menggunakan pendekatan sistematis dan terstruktur.
   g. Cara mengkomunikasikan temuan kepada pimpinan auditee dalam bentuk presentasi yang fokus serta runtut dan dalam menyusun laporan hasil audit harus sesuai dengan standar laporan audit yang ditetapkan.
   h. Pimpinan Internal Audit dan Auditor internal harus memiliki sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) atau yang setara.

Jumlah Pegawai (Auditor Internal) Pada Internal Audit

Pegawai Internal Audit PT Pos Indonesia (Persero) pada akhir tahun 2023 berjumlah sebanyak 96 orang. Bila dibandingkan dengan formasi yang ditetapkan dalam KD nomor KD.057/DIRUT/0722 tanggal 22 Juli 2022 tentang Formasi Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) formasi SDM Internal Audit seharusnya sebanyak 108 orang, namun di KD nomor KD.084/DIRUT/1022 tanggal 17-10-2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja ada penambahan Manajer di Internal Audit Pusat dari 2 menjadi 4 orang sehingga formasi secara total 110 orang. Dialokasikan untuk RO Jayapura sebanyak 5 orang, sehingga atas hal tersebut terdapat kekurangan 8 orang. Dengan komposisi tersebut secara umum bahwa sebagian besar auditor telah memiliki kemampuan yang baik dan handal di bidangnya, khususnya mengenai bidang-bidang yang berhubungan dengan Internal Audit dan objek Audit. Program sertifikasi auditor internal akan terus dilakukan pada program kerja Internal Audit tahunan. Proses pengembangan dan pembinaan auditor internal akan dilakukan melalui keikutsertaan pada berbagai seminar, workshop dan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan audit internal

Sertifikasi Auditor Internal

Sertifikasi yang dimiliki oleh personil SDM Internal Audit PT Pos Indonesia (Persero) Antara lain :

1. Profesional Internal Audit (PIA);
2. *Qualified Internal Audit* (QIA);
3. Dasar-dasar pemeriksaan;
4. Penyusunan PKAT Berbasis Risiko;
5. Penulisan Hasil Audit yang efektif;
6. Komunikasi dan Psikologi pemeriksaan;
7. Audit forensik;
8. Audit investigasi;
9. Brevet Pajak.

Struktur dan Kedudukan Internal Audit

Berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 244/DEKOM/0922 dan Nomor:KD077/DIRUT/0922 Tentang Piagam Audit Internal. Struktur dan kedudukan Internal Audit adalah:

1. Posisi Internal Audit dalam struktur organisasi berada langsung di bawah Direktur Utama.
2. Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
3. Kepala Internal Audit dibantu oleh beberapa orang Deputi Internal Audit yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Internal Audit.
4. Internal Auditor Pusat bertanggungjawab secara langsung kepada Deputi yang ditunjuk dan Internal Auditor *Representative Office* bertanggungjawab kepada Kepala *Representative Office*.

5. Internal Audit dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan dari pelaksanaan internal audit dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan maupun anak Perusahaan dan afiliasinya. Kedudukan Internal dalam struktur perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Keputusan Direksi Nomor KD07/DIRUT/0923 Tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.013/ DIRUT/0323 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero).

Pelaksanaan Tugas Internal Audit

Program Kerja Internal Audit tahun 2023 meliputi antara lain :

1. Audit Rutin Dengan Framework Risk Based Internal Audit (RBIA)
   - Regional 3 Bandung.
   - Audit LPU periode November s.d. Desember 2022.
   - Cash Opname (Kas dan Setara Kas) serta Stock opname.
   - Regional 4 Semarang.
   - Audit LPU Triwulan I Tahun 2023
   - Regional 1 Medan
   - Regional 5 Surabaya
   - Regional 6 Makasar
   - Audit LPU Triwulan II Tahun 2023.
   - Audit LPU Bulan Juli Tahun 2023
   - Audit LPU Bulan Agustus Tahun 2023
   - Audit Pos Internasional
   - Regional 2 Jakarta
   - Audit Operasi kurir
   - Audit Agenpos di Kantor Pusat
   - LPU Bulan September 2023
   - LPU Bulan Oktober 2023

Audit pada Kantor Cabang Utama/ Kantor Cabang (KCU/KC) dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 59 KC/KCU dan 331 KCP. Hasil audit rutin dengan framework RBIA di tahun 2023 adalah berhasil mengidentifikasi sebanyak 57 laporan dan 2.726 risiko.

2. Melaksanakan Audit Penugasan Tertentu
   - Cash Opname (Kas dan Setara Kas) dan Stock opname Triwulan I tahun 2023.
   - Audit Tujuan Tertentu Social Engineering Pospay (APK) Tahun 2023.
   - Audit Operasional Jasa Keuangan
   - Audit Pengadaan Barang dan Jasa
   - Cash Opname (Kas dan Setara Kas) dan Stock opname Triwulan II tahun 2023.
   - Audit Tujuan Tertentu Evaluasi Pengelolaan Kas
   - Audit Bansos Tahun 2022
   - Audit Bansos Tahun 2023
   - Cash Opname (Kas dan Setara Kas) dan Stock opname Triwulan III tahun 2023.
   - Audit Progres Pembangunan SPP Jakarta
   - Audit Review CBP tahap 1 tahun 2023
   - Audit Review Beras PNS Papua dan Papua Barat
   - SMAP Pengadaan
   - Kajian Kebijakan anak Perusahaan
   - Piutang KCU Jayapura
3. Melaksanakan Audit Investigatif audit investigasi di KC Sintang
   - Internal Audit Pusat : PT Poslog dan MPospay
   - RO 6 Makassar : KC Sintang dan KC Mamuju
   - RO 1 Medan : Investigasi Tembilahan
   - RO 2 Jakarta : Investigasi KC Pandeglang dan KCP Airsugihan
   - RO 3 Bandung : Investigasi KC Sukabumi
   - RO 1 Medan : Investigasi Teunom Meulaboh
   - Kantor Pusat : Investigasi Bansos BNPT 2022
   - Kantor Pusat : Investigasi CBP Tahap 1 Tahun 2023

4. Monitoring dan Evaluasi

   Monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit internal berbasis risiko (RBIA) di Kantor Regional dilakukan oleh Internal Audit Pusat, sedangkan tindak lanjut hasil audit internal berbasis Risiko (RBIA) di KCU/KC dilakukan oleh Representative Office (RO). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan google drive secara periodik mingguan.

5. Capacity building untuk pengembangan knowledge dan cakrawala auditor dalam rangka meningkatkan kualitas dan performa

   a. Workshop online penguatan entry OKR 2022 tanggal 03-01-2023.
   b. Rapat dengan BPK, kunjungan kerja spesifik masa persidangan III tahun sidang 2022-2023 dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terkait kinerja operasional PT. Pos Indonesia (Persero). Agenda Pembahasan Kinerja Operasional PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 02 s.d. 04-02-2023.
   c. Corporate Inspiring Forum (CIF) Tema: culture growth and entreprenership mindset in the organization. Nara sumber: Dra.Yuli Purwanti,MM (corporate culture specialist certified tanggal 23-02-2023.
   d. Pelatihan aplikasi pra NPP tanggal 31-03-2023 di lantai 8 Graha Pos Indonesia Bandung.
   e. Sosialisasi Transformasi dan Inovasi Perusahaan melalui LMS dan GCR
   f. Implementasi modul pelatihan dan pendidikan mandiri pada aplikasi SIM SDM.
   g. Sosialisasi Peraturan BUMN via zoom tanggal 06-04-2023.
   h. Pelatihan online Entrepreneurship bagi karyawan dan karyawan pra Purnabakti untuk meningkatkan literasi usaha karyawan PT Pos Indonesia (Persero), tanggal 13 Mei 2023.
   i. Sosialisasi KD tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan, tanggal 19-05-2023.
   j. Zoom meeting Risk management Forum Series III topic : anti corruption programs that enable business agility tanggal 29-05-2023.
   k. Pelatihan GRC Masterclass Program 2023 tanggal 27 Juni 2023.
   l. Penguatan Implementasi Perjanjian Kerja Sama Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juli 2023 di Bandung.
   m. Rapat Koordinasi Fungsi Hukum BUMN Group tanggal 22 September 2023 di Jakarta
   n. Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi CRGP tanggal 20-21 September 2023 online
   o. Kegiatan Forum Penguatan Governansi dan Integritas Pelaporan Keuangan tanggal 13 September 2023 di Yogyakarta.
   p. Undangan Forum Penguatan Governansi dan Sosialisasi ketentuan OJK bulan Oktober 2023
   q. Sertifikasi GRCP di bulan Oktober 2023
   r. Mengikuti sosialisasi Anti Bribery Awareness (SMAP) oleh Kantor Pusat pada tanggal 29 November 2023
   s. Mengikuti Corporate Inspiring Forum, Building Your personal Brand melalui Zoom Meeting pada tanggal 13 Desember 2023
   t. Seminar "Peningkatan Kapabilitas SPI Korporasi dengan Internal Audit Capability Model (IACM) tgl 14 Desember 2023
   u. Sosialisasi Peraturan Menteri BUMN di Jakarta tanggal 18 Desember 2023

AKUNTAN PERSEROAN

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) yang tertuang dalam Akta Penyimpanan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 nomor 04 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH. MKn., Notaris di Jakarta Selatan, memutuskan untuk menunjuk kembali KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun Buku 2023. Tahun 2023 merupakan tahun ke 4 yang bersangkutan melakukan audit terhadap PT Pos Indonesia (Persero).

Dewan Komisaris mengusulkan kepada Menteri BUMN, Selaku Pemegang Saham PT Pos Indonesia (Persero), agar KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) dapat ditunjuk kembali sebagai auditor tahun buku 2022, dengan beberapa pertimbangan lain sebagai berikut:

1. Dari hasil evaluasi didapat hasil yang baik dan penyerahan pekerjaan dilakukan tepat waktu;
2. Penugasan audit kepada KAP tersebut merupakan tahun pertama;
3. Repeat audit lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan initial audit;
4. KAP tersebut memiliki reputasi baik dan merupakan anggota PKF Internasional.

Berikut daftar Akuntan Publik dan KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan peseroan selama 5 Tahun terakhir:

- 2019 : Raden Ginandjar
- 2020 : Drs. Sikanto, Ak, CA, CPA., MM.
- 2021 : Drs. Sikanto, Ak, CA, CPA., MM.
- 2022 : Drs. Sikanto, Ak, CA, CPA., MM.
- 2023 : Leknor Joni, CPA

Nama dan tahun KAP yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan 5 tahun terakhir

- 2019 : KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
- 2020 : KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
- 2021 : KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
- 2022 : KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
- 2023 : KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo

Selama pelaksanaan audit tidak memperoleh hambatan dalam mengakses dokumen yang dibutuhkan. Hasil audit telah disampaikan dalam laporan audit dan permasalahan yang ada telah disampaikan melalui management letter kepada Direksi. Jasa yg diberikan adalah General Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan TJSL Tahun 2023 termasuk Audit atas Bantuan Operasional LPU sesuai Prosedur Yang Disepakati. Fee untuk jasa yang diberikan akuntan publik adalah Rp 1.665.000.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah).

Akuntan publik juga memberikan jasa :

1. Audit Laporan Keuangan Tahunan;
2. Evaluasi Kinerja Perusahaan;
3. Evaluasi Key Performance Indicators;
4. Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan;
5. Audit Kepatuhan Perusahaan Terhadap Sistem Pengendalian Internal;
6. Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
7. Audit Kepatuhan Pelaksanaan TJSL Terhadap Peraturan Perundang-undangan;
8. Audit Kepatuhan Pelaksanaan TJSL Perusahaan Terhadap Sistem Pengendalian Internal;
9. Audit atas penerapan Prosedur yang Disepakati - mengenai Aktivitas Layanan Pos Universal;
10. Audit atas penerapan Prosedur yang Disepakati - pengisian SOE Anaplan BUMN

MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko merupakan bagian dari Tata Kelola Perusahaan, oleh karena itu Pemerintah selaku pemegang saham telah menunjukkan komitmennya terhadap pentingnya manajemen risiko. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-1/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-5/MBU/09/2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

PT Pos Indonesia (Persero) telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko yang terbaru dan telah disesuaikan yaitu dalam bentuk Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD 105/DIRUT/1222 tanggal 27 Desember 2022 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko.

Tujuan penyusunan Pedoman Manajemen Risiko tersebut adalah untuk mengatur pelaksanaan implementasi Manajemen Risiko di lingkungan perusahaan dan memastikan agar pengelolaan risiko bisnis perusahaan dapat berlangsung secara terstruktur dan sistematis.

Sistem Manajemen Risiko

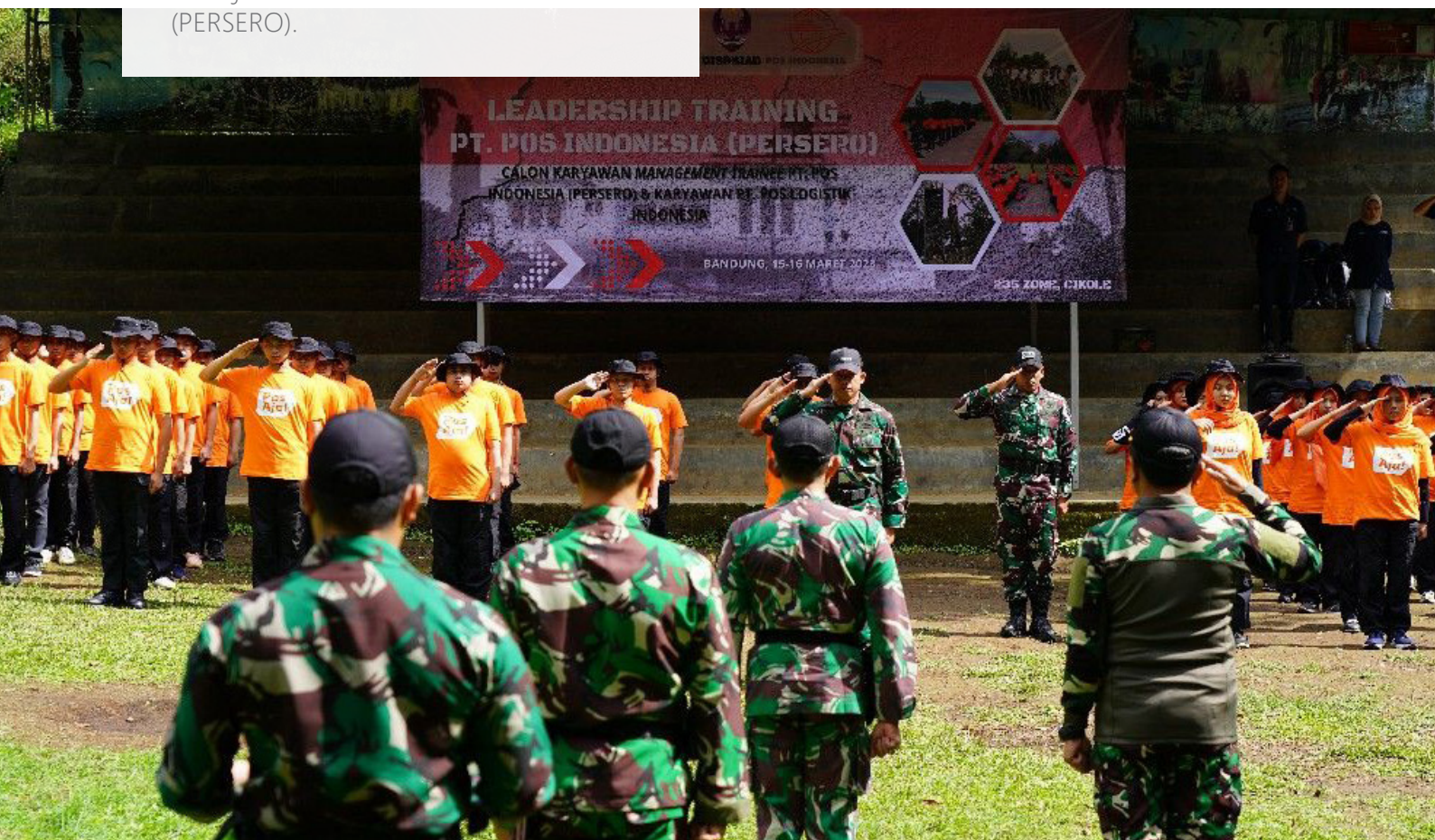
Penerapan manajemen risiko Perusahaan, PT Pos Indonesia (persero) didukung dengan teknologi informasi sebagai bagian dari proses asesmen dan mitigasi risiko, sebelumnya telah diatur tentang Daftar Risiko kantor Regional dan Unit Pelaksana Teknis dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.140/DIRUT/1218 tanggal 26 Desember 2018, dan selanjutnya proses asesmen dan mitigasi risiko yang dilakukan di seluruh level Perusahaan baik di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Unit Pelaksana Teknis telah terstandarisasi dalam website dengan alamat:https://simaris.posindonesia.co.id

Dalam pemanfaatan website Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIS) dan agar terdapat panduan atau petunjuk pengisian dan pelaksanaan kegiatan Asesmen Risiko Mandiri oleh *Risk Owner* dengan Daftar Risiko (Risk Register) sebagai output atas pelaksanaannya, maka telah ditetapkan Pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yaitu: Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (persero) Nomor : KD. 080/DIRUT/ 0922 tentang Sistem Informasi Manajemen Risiko PT POS Indonesia (PERSERO).

Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko

Manajemen risiko bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dan melindungi Perusahaan. Dengan menerapkan manajemen risiko, Perusahaan dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi agar tujuan Perusahaan dapat tercapai. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang digunakan adalah :

1. Terintegrasi (integrated);
2. Terstruktur dan komprehensif (structuredand comprehensive);
3. Disesuaikan (costumized);
4. Inklusif (inklusive);
5. Bersifat dinamis (dynamic);
6. Informasi terbaik yang tersedia (best available information);
7. Mempertimbangkan faktor manusia dan budaya (*human and cultural factor*);
8. Perbaikan secara berkelanjutan (continual improvement).



Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Kerangka kerja Manajemen Risiko merupakan pilar-pilar bagi penerapan proses Manajemen Risiko dan bertujuan membantu Perusahaan mengintegrasikan manajemen Risiko dalam seluruh aktivitas dan fungsi. Perusahaan mengevaluasi praktik dan proses Manajemen Risiko yang ada, mengevaluasi segala kesenjangan, dan menangani kesenjangan tersebut dalam kerangka kerja Manajemen Risiko. Kerangka kerja Manajemen Risiko terdiri atas:

1. Kepemimpinan dan Komitmen
   a. Direksi dan seluruh pejabat struktural (baik di Kantor Pusat, Regional dan UPT) dan Anak Perusahaan serta badan afiliasi bersama-sama dengan Badan Pengawas memastikan penerapan Manajemen Risiko pada semua aktivitas Perusahaan.
   b. Direksi dan seluruh pejabat struktural (baik di Kantor Pusat, Regional dan UPT) dan Anak Perusahaan serta badan afiliasi memiliki akuntabilitas untuk mengelola Risiko sesuai kewenangannya.
   c. Badan Pengawas memiliki akuntabilitas untuk mengawasi Manajemen Risiko.
   d. Direksi dan seluruh pejabat struktural (baik di Kantor Pusat, Regional dan UPT) dan Anak Perusahaan serta badan afiliasi bersama-sama dengan Badan Pengawas menunjukkan komitmen penerapan Manajemen Risiko dengan cara menjalankan peran, kewenangan, dan akuntabilitas masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Prosedur dan Pedoman Umum ini.

2. Integrasi
   a. Manajemen Risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran, serta operasi Perusahaan.
   b. Integrasi Manajemen Risiko ke dalam Perusahaan adalah proses yang dinamis dan berulang, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya Perusahaan.
   c. Strategi integrasi menjadi bagian dari Kerangka kerja Manajemen Risiko

3. Desain

Desain Manajemen Risiko meliputi:

   a. Pemahaman Perusahaan dan konteksnya.
   b. Penegasan komitmen Manajemen Risiko.
   c. Penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas Perusahaan.
   d. Alokasi sumber daya.
   e. Penyiapan komunikasi dan konsultasi.

4. Implementasi
   a. Perusahaan menyusun rencana kerja implementasi Manajemen Risiko melalui strategi jangka panjang (road map) dan jangka pendek (workplan).
   b. Implementasi kerangka kerja Manajemen Risiko dilaksanakan oleh seluruh pihak sebagaimana yang telah ditetapkan agar Risiko yang ada dapat termonitor dan terkelola dengan baik, sekaligus untuk membangun ketangguhan perusahaan terhadap Risiko yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

5. Evaluasi

Perusahaan secara berkala mengevaluasi efektivitas kerangka kerja Manajemen Risiko dengan cara:

a. Mengukur tingkat kematangan implementasi Manajemen Risiko atau risk management maturity.
b. Mengidentifikasi gap perbaikan pada kerangka kerja, proses, dan strategi Manajemen Risiko sehingga selalu relevan dalam mendukung pencapaian sasaran perusahaan.
c. Evaluasi menggunakan metodologi lain sesuai kebutuhan.

6. Perbaikan

a. Perusahaan melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kerangka kerja, proses, dan strategi manajemen Risiko sesuai hasil evaluasi dan rekomendasi untuk mengatasi perubahan eksternal dan internal.
b. Dalam mewujudkan perbaikan ini, dapat dengan mengembangkan strategi (rencana kerja) baru atau memodifikasi strategi Manajemen Risiko yang sudah ada.

Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko melibatkan penerapan secara sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik ke aktivitas komunikasi dan konsultasi yang dibangun secara terintegrasi melalui suatu struktur, operasi, dan proses organisasi, diterapkan pada level strategis, operasional, program dan proyek sebagai berikut:

1. Komunikasi dan konsultasi antara lain:
   a. Rapat berkala;
   b. Rapat insidental;
   c. *Focused group discussion;*
   d. Forum pengelola risiko.
2. Lingkup, konteks dan kriteria
   a. Menentukan konteks
   b. Kriteria Risiko
3. Asesmen risiko
   a. Identifikasi risiko;
   b. Analisis risiko;
   c. Evaluasi risiko.
4. Penanganan risiko
   a. Penentuan strategi;
   b. Perencanaan penanganan risiko.
5. Pemantauan dan kaji ulang.
   a. Seluruh risiko Perusahaan secara berkelanjutan.
   b. Pelaksanaan rencana penanganan risiko, baik realisasi biaya dan waktu.
   c. Memastikan tingkat eksposur risiko masih berada di koridor risiko yang di toleransi Perusahaan.
   d. Hasil kegiatan pamantauan dikomunikasikan kepada pihak berwenang dalam proses pengambilan keputusan dalam Perusahaan.
6. Dokumentasi dan pelaporan
   Seluruh hasil proses manajemen risiko yang dilakukan harus didokumentasikan dan dilaporkan sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja yang telah ditentukan dengan menggunakan formulir yang masih berlaku di lingkungan Perusahaan.

Organisasi dalam Penerapan Manajemen Risiko PT Pos Indonesia (Persero)

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Komite Audit
4. Komite Pemantau Manajemen Risiko, Usaha dan Investasi (KPMRUI)
5. Komite Risiko dan Ketaatan
6. Direktur yang membidangi pengelolaan Keuangan dan Manajemen Risiko
7. Internal Audit

Reviu Sistem Manajemen Risiko Tahun 2023

Penilaian Kematangan Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2023

Dalam menjalankan kegiatan usaha, PT Pos Indonesia (Persero) menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perusahaan. Perusahaan berhadapan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang kompleks dan dinamis yang berimplikasi timbulnya berbagai ketidakpastian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan.

Manajemen risiko membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategis Perusahaan. Menyadari akan risiko-risiko yang dihadapi, PT Pos Indonesia (Persero) secara proaktif berusaha untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas penerapan manajemen risiko di Perusahaan. Pada tahun 2023 ini telah dilakukannya Risk Maturity Index (RMI)/ Asesmen Terhadap tingkat Kematangan Manajemen Risiko di Perusahaan. Pengukuran maturitas manajemen risiko merupakan salah satu metode yang bertujuan untuk mengukur kualitas, kapasitas dan kapabilitas perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko yang dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi secara komprehensif apakah manajemen risiko

Secara komprehensif model kerangka Risk Maturity PT Pos Indonesia (Persero) didasarkan kepada ISO 31000:2018 yang merupakan standar manajemen risiko. Selanjutnya komponen serta atribut dielaborasi berdasarkan karateristik PT Pos Indonesia (Persero).

Disamping itu, juga dilakukan survei manajemen risiko yang bertujuan untuk mengetahui penetrasi intensitas penerapan manajemen risiko di perusahaan. Adapun responden dalam survei ini terdiri dari pegawai struktural dari tingkat manajer, VP/ Deputi dan EVP di seluruh unit kerja baik yang berada di kantor pusat, regional, cabang dan lainnya dan seluruh direksi. Survei ini terdiri dari lima variabel utama, yakni: risk awareness, risk competency, risk information and communication, risk practice dan risk culture.

Secara kumulatif pengukuran tingkat maturitas penerapan manajemen risiko perusahaan adalah 3,61. Skor indeks ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan penerapan manajemen risiko perusahaan di PT Pos Indonesia (Persero) berada pada peringkat GOOD PRACTICE. Top Management memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

Prinsip-prinsip manajemen risiko standar didefinisikan dan didokumentasikan, pelatihan dasar dilakukan. Proses manajemen risiko yang konsisten dengan komunikasi dan akuntabilitas ada di seluruh bisnis tetapi tidak semua proses telah diterapkan sepenuhnya.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa kualitas penerapan manajemen risiko perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) masih banyak membutuhkan tindakan perbaikan dan peningkatan. Manajemen PT Pos Indonesia (Persero) masih harus meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Diharapkan berbagai masukan dari hasil Risk Maturity Index ini dapat ditindaklanjuti dan menjadi input yang strategis dan konstruktif bagi PT Pos Indonesia (Persero) untuk menerapkan manajemen risiko perusahaan/ Enterprise Risk Management (ERM) secara terpadu dan holistik sehingga tercipta kultur manajemen risiko di perusahaan.

Melalui implementasi manajemen risiko perusahaan/Enterprise Risk Management (ERM), PT Pos Indonesia memiliki daya tahan terhadap berbagai risiko yang dihadapi sebagai konsekuensi dari kondisi dinamika perubahan lingkungan bisnis yang mengarah ketidakpastian dan cenderung disruptif. Dengan demikian diharapkan perusahaan dapat berkembang dan memiliki kinerja unggul.

Selain itu Divisi Risk & Fraud Management melakukan evaluasi hasil penanganan Risiko tahun 2023 sesuai tugas dan tanggung jawab dalam mengelola implementasi Kebijakan Manajemen Risiko. Secara umum kondisi penerapan Manajemen Risiko di PT Pos Indonesia (Persero) dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Perusahaan telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko yakni dengan telah diberlakukannya Keputusan Direksi Nomor : KD.071/ DIRUT/ 1020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan KD.065/ DIRUT/ 0721 tentang Kajian Risiko dan Ketaatan.
2. Perusahaan telah membentuk Komite Risiko dan Ketaatan PT Pos Indonesia (Persero) yang beranggotakan personil unit dedicated dan unit lintas fungsi terkait dengan Surat Keputusan Nomor : SK.634/ DIRUT/ 0422 tentang Pembentukan Komite Risiko dan Ketaatan PT Pos Indonesia (Persero).
3. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi sebagai Organ pendukung Dewan Komisaris dalam memantau penerapan manajemen risiko di Perusahaan.
4. Penerapan Manajemen Risiko telah berjalan dengan berpedoman pada Kebijakan yang telah diterbitkan, namun masih berproses untuk dapat terintegrasi dengan infrastruktur dan sistem operasi Perusahaan. Sebagai langkah untuk menuju ERM telah dibangun suatu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko yang disebut SIMARIS.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIS) ini diluncurkan pada tanggal 30 Juni 2022 oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko , Bapak Endy P Abdurrahman. Peluncuran ini dilanjutkan dengan proses induksi atau sosialisasi kepada para user dan Risk Owner termasuk para Risk Champion (Liaison Officer) . Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari komitmen Manajemen untuk penerapan dan penguatan Manajemen Risiko di Perusahaan bahwa setiap pengambilan keputusan dan tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha.
6. Peran, tanggung jawab dan wewenang terkait manajemen risiko sudah terbangun pada pemilik risiko, namun saat ini masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan lagi akuntabilitasnya.
7. Peran pemilik risiko dalam melakukan monitoring terhadap penanganan risiko atau mitigasi risiko masih harus dikembangkan dan ditingkatkan baik teknik pengukurannya maupun perekaman data & dokumentasinya.
8. Pedoman mengenai evaluasi terhadap hasil penanganan risiko masih harus dibangun dan dikembangkan. Sehingga evaluasi kinerja unit secara keseluruhan dapat dilakukan lebih komprehensif, termasuk hasil evaluasi mitigasi risiko yang dilakukan.
9. Dokumentasi terkait dengan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga data terkait risiko yang sudah ada dapat dengan mudah diperoleh. Demikian semoga evaluasi hasil penanganan risiko untuk tahun 2023 dapat menjadi salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada pihak yang berkepentingan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan bisa tercapai sebagaimana diharapkan.

Kategori Risiko Yang Dihadapi

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KD.071/DIRUT/1020 pada tanggal 5 oktober 2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, risiko-risiko yang dapat mempengaruhi strategi dan tujuan perusahaan dikategorikan menjadi 5 (lima) jenis risiko, yang terdiri dari:

1. Risiko Strategis, yaitu risiko yang disebabkan oleh penetapan strategi dan pengambilan keputusan bisnis perusahaan yang tidak tepat serta kurang responsive terhadap perubahan lingkungan usaha, meliputi: perencanaan (planning), proyek strategis (project strategy), tanggung jawab perusahaan (corporate responsibility), kemampuan bertahan (suistainability), factor eksternal (external factors) dan seterusnya.
2. Risiko Operasi, yaitu risiko yang berhubungan dengan proses bisnis, karyawan serta teknologi yang mempengaruhi operasional perusahaan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan, meliputi : aset perusahaan, sumber daya manusia, teknologi informasi, kualitas layanan dan mutu, kejadian dari eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi dan seterusnya.
3. Risiko Keuangan, yaitu segala macam risiko yang berkaitan dan berdampak pada keuangan perusahaan, meliputi :akuntansi dan administrasi, kredit atau piutang, likuiditas, perpajakan, penganggaran (budgeting) dan seterusnya.

4. Risiko Hukum dan Kepatuhan, yaitu risiko perusahaan karena adanya kelemahan aspek yuridis yang berdampak pada konsekuensi hukum, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal serta risiko yang berhubungan dengan peraturan/kebijakan dari regulator.
5. Risiko Reputasi, yaitu risiko yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap perusahaan atau munculnya publikasi negatif terkait perusahaan yang dapat mengakibatkan kepercayaan stakeholder menurun.

Pengelolaan Risiko

Tahapan penanganan risiko berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KD.071/DIRUT/1020 pada tanggal 5 oktober 2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, meliputi:

1. Memilih opsi penanganan risiko yang akan dijalankan. Opsi penangan risiko dapat berupa:

   a. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab risiko agar peluang terjadinya risiko semakin kecil.
   b. Menurunkan dampak terjadinya risiko, yaitu penanganan terhadap dampak risiko apabila risiko terjadi agar dampaknya semakin kecil.
   c. Mengalihkan risiko, yaitu penanganan risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh risiko, baik penyebab dan/atau dampaknya, ke-instansi/entitas lainnya. Opsi ini diambil dalam hal:
      - Pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami level risiko atas kegiatan tersebut
      - Proses mengalihkan risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
      - Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan risk owner.

   d. Menghindari risiko, yaitu penanganan risiko dengan mengubah/menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk menghilangkan risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
      - Upaya penurunan level risiko di luar kemampuan organisasi;
      - Sasaran atau kegiatan yang terkait risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
      - Penggunaan opsi ini disetujui oleh atas risk owner
   e. Menerima risiko, yaitu penanganan risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
      - Upaya penurunan level risiko di luar kemampuan organisasi;
      - Sasaran atau kegiatan yang terkait risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
      - Penggunaan opsi ini disetujui oleh atas risk owner.
      - Opsi penanganan risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko.

2. Menyusun rencana tindak penanganan risiko
   a. Berdasarkan opsi penanganan risiko yang telah dipilih, disusun rencana aksi penanganan risiko.
      Rencana aksi penanganan risiko terdiri atas rencana aksi penanangan risiko yang berupa rencana tindak penanganan yang di turunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan yang diterapkan pada unit organisasi tersebut.
   b. Rencana tindak penanganan risiko bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan. Dalam hal penanganan risiko yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan level risiko, maka diperlukan penetapan rencana tindak penanganan risiko yang baru. Pemilihan rencana tindak penanganan risiko tersebut mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi.
   c. Rencana tindak penanganan risiko tersebut harus memuat informasi berikut :
      - Kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih;
      - Target output yang diharapkan atas kegiatan tersebut;
      - Jadwal implementasi kegiatan penanganan risiko; dan
      - Penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan risiko.

      Penanganan risiko yang berhasil menurunkan level probabilitas dan/ atau level dampak risiko dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya, kecuali rencana penanganan risiko yang sifatnya proyek.
3. Menetapkan level risiko residual harapan Level risiko residual harapan merupakan target level risiko apabila penanganan risiko telah dijalankan. Penetapan level risiko residual mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level dampak.
4. Menjalankan rencana tindak penanganan risiko Pelaksanaan rencana tindak penanganan risiko dituangkan dalam formulir asesmen risiko mandiri (ARM) serta capaian target output kegiatan tersebut.
5. Memantau risiko residual Setelah kegiatan penanganan risiko dilaksanakan secara optimal, masih terdapat risiko yang tersisa risiko ini harus diketahui dan dipantau perkembangannya.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan (*fraud*) dan melindungi sumber daya atau aset Pos Indonesia. Pengendalian secara menyeluruh baik itu pengendalian keuangan dan operasional dengan meningkatkan akuntabilitas setiap keputusan, meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan transaksi bisnis menjadi komitmen Pos Indonesia untuk mewujudkan GCG secara komprehensif.

Untuk mendukung terciptanya pengendalian internal yang sesuai dengan kerangka yang diakui secara internasional, Pos Indonesia mengupayakan pengembangan Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan pendekatan *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) dan Risk Based Internal Audit (RBIA). Sistem pengendalian internal tersebut mencakup:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan terstruktur;
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha;
3. Aktivitas pengendalian;
4. Sistem Informasi dan Komunikasi;
5. Monitoring/pemantauan.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal sesuai COSO *framework*

1. Lingkungan Pengendalian
   a. Pos Indonesia membangun budaya Perusahaan sebagai panduan bagi para pemegang peran utama dalam membangun pola kepemimpinan dan memperkuat sinergi organisasi, serta mempertinggi *sustainability competitive growth* berdasarkan nilai nilai yang telah dirumuskan dalam budaya AKHLAK. Untuk mendorong dan memastikan serta menjaga penerapan nilai-nilai budaya Perusahaan AKHLAK oleh seluruh karyawan dilakukan sosialisasi, internal, dan implementasi oleh penggerak budaya perusahaaan yang terdiri dari *Culture Change Leader, Culture Champion, Culutre manajement Squad,* dan *culture squad.*
   b. Pos Indonesia memastikan efektivitas penyelenggaraan aktivitas Internal Audit yang dilaksanakan dengan mengimplementasikan pendekatan risk based audit. Pos Indonesia juga memastikan terselenggaranya koordinasi dan kerja sama yang efektif dengan pihak internal maupun pihak eksternal, serta risiko bisnis pada seluruh aktivitas bisnis telah dikelola secara memadai dengan sistem internal *control.*

c. Pos Indonesia memiliki Direktorat Sumber Daya Manusia yang menetapkan kebutuhan kompetensi Perusahaan. Salah satunya yaitu *Stream Finance* yang meliputi kompetensi *Corporate Finance* dengan *sub area* kompetensi *Capital Structure* dan *Working Capital Management (Treasury Management)* serta *Corporate Tax*. Kemudian, *Accounting* dengan sub area kompetensi *Financial Accounting*, *Management Accounting* dan *Financial Information System*. Kebijakan pengembangan kompetensi ditujukan untuk menciptakan karyawan yang unggul, berkualitas global, dan berdaya saing tinggi.

2. Penilaian Risiko
   a. Pos Indonesia telah menerapkan *Risk-Based* Internal Audit (RBIA) dalam pelaksanaan audit internal, dimana perhitungan dan pemetaan risiko ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor *like lihood* (peluang terjadinya) dan *consequence* (dampak).
   b. Pos Indonesia memiliki beberapa pertimbangan dalam menyusun kebijakan akuntansi seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), *International Financial Reporting Standards* (IFRS), Undang-undang yang terkait, dan perubahan lingkungan internal yang berdampak.
   c. Pos Indonesia memiliki prinsip asersi keuangan dalam perencanaan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) yang diperhatikan dengan baik oleh semua karyawan yang terkait.
   d. Pos Indonesia mengelola risiko Perusahaan yang muncul baik internal maupun eksternal dengan mekanisme yang telah ditentukan.
   e. Pos Indonesia juga menerapkan sistem pengendalian kebijakan *anti fraud* dan memiliki pencegahan potensi *fraud*.

3. Aktivitas Pengendalian
   a. Pos Indonesia menetapkan BPO (*Business Process Owner*) dan AO (*Application Owner*) yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait ICOFR.
   b. Kaidah penentuan risiko dan pengendalian internal mengacu pada kebijakan ICOFR yang terdiri dari segregation of duties, otorisasi dan persetujuan, penentuan risiko, dan penentuan pengendalian internal.
   c. Pos Indonesia memiliki pedoman penerapan sekuriti sistem informasi yang selaras dengan kebutuhan Perusahaan dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

4. Informasi dan Komunikasi
   a. Pos Indonesia memiliki kebijakan akuntansi yang diterapkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan IFRS, yang diuraikan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dan penerapan, termasuk informasi atau data yang terkait dalam proses dan pengungkapan pelaporan keuangan, serta mengatur tentang komponen laporan keuangan konsolidasi.
   b. Pos Indonesia memiliki kebijakan teknologi informasi yang memberikan kerangka acuan bagi setiap proses maupun unit yang terkait dengan penyelenggaraan TI Perusahaan dalam penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan prosedur. Ruang lingkup peraturan TI di Perusahaan Pos Indonesia mencakup aspek tata kelola TI *Strategy and Development* dan TI *Infrastructure operations*.
5. Aktivitas Pemantauan
   a. Pos Indonesia memiliki Internal Audit Charter yang mencakup persyaratan auditor di unit Internal Audit, yaitu memiliki integritas dan perilaku yang profesional, pengetahuan tentang risiko dan pengendalian yang penting di bidang pos.
   b. CEO Pos Indonesia senantiasa meningkatkan awareness dari manajemen terkait audit maupun change management dalam bentuk CEO Notes dan menetapkan Integrated Audit, serta membentuk Probis IFRS.

Reviu Atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, PT Pos Indonesia (Persero) membentuk Unit Audit Internal sebagai pelaksana yang disebut Internal Audit. Disamping itu Pos Indonesia membentuk Tim Audit Internal khusus untuk menilai keefektifan penerapan Sistem PT Pos Indonesia (Persero) Terintegrasi. Hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal menjadi salah satu dasar evaluasi Manajemen terhadap efektivitas sistem pengendalian internal untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan yang memungkinkan Manajemen menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dengan cara yang lebih efektif.

Berikut tahapan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern Perusahaan:

1. Internal Audit melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern Perusahaan;
2. Direksi menindaklanjuti laporan hasil audit yang dilaksanakan Internal Audit maupun Auditor Eksternal dan melaporkan perkembangan tindak lanjut tersebut kepada Komisaris.
3. Komisaris memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit Internal Audit maupun Auditor Eksternal.
4. Komisaris memberikan penilaian dan masukan terhadap laporan hasil audit Internal Audit dan Auditor Eksternal yang mencakup materi laporan, sasaran audit dan ruang lingkup audit.
5. Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dan tim manajemen dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan evaluasi adalah:

1. Memberikan keyakinan kepada Direksi dalam pemberian asersi mengenai efektivitas pengendalian intern untuk selanjutnya memberikan keyakinan kepada stakeholder lain bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan telah cukup memadai dalam mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu, dan efisien/efektivitas dari kegiatan usaha perusahaan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi menyangkut perbaikan penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan di masa yang akan datang (areas of improvement).

Kegiatan penilaian terhadap sistem pengendalian internal, Internal Audit bersama Komite Audit (KA) telah melakukan lagi beberapa kali rapat pembahasan baik secara tatap muka langsung maupun melalui video conference. Dalam beberapa kali rapat tersebut dibahas oleh KA dengan SPI berbagai hal, termasuk juga sistem pengendalian internal.

PERKARA PENTING

Sepanjang tahun 2023 terdapat perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2023 diantaranya:

No	Nomor Perkara	Jenis Kasus	Para Pihak	Kasus	Tindak Lanjut	Keterangan
1	28/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst	Niaga	PT Pos Indonesia (Persero)	Permohonan Kepailitan oleh PT Nusantara	Putusan Kasasi, dilakukan	Pelaksanaan pembayaran
			dengan PT Nusantara	Compnet Integrator kepada PT Pos Finansial Indonesia	restrukturisasi utang	sesuai dengan jadwal pada
			Compnet Integrator	terkait dengan pengadaan jasa	PT Pos Finansial Indonesia	Putusan Homologasi
				penyediaan perangkat teknologi informasi dan	kepada para Kreditor	
				security system untuk layanan visa center arab saudi		
			PT Pos Finansial Indonesia	Terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Perangkat		
2	937/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Sel	Perdata Umum	dengan PT Biometrik	Teknologi Informasi dan Security	Proses litigasi di Pengadilan	Melakukan upaya gugatan
			Kharisma Utama	System Untuk Layanan Visa Center Arab Saudi	Negeri Jakarta Selatan	rekonvensi
3	293/Pdt.G/2023/ PN Jap	Perdata Umum	PT Pos Indonesia (Persero)	Gugatan Suku Mebri atas tanah PT Pos	Proses litigasi di Pengadilan	Proses persidangan
			dengan Tropina Mebri dkk	Indonesia (Persero)	Negeri Jayapura	penyerahan jawaban gugatan

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Penyebarluasan informasi secara transparan baik kepada stakeholders dan shareholder maupun kepada masyarakat umum dipandang sangat perlu. Hal ini sebagai upaya Pos Indonesia untuk memenuhi salah satu prinsip dalam GCG yaitu asas transparansi dan untuk mendukung diberlakukannya Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Media yang selama ini digunakan Pos Indonesia untuk penyebarluasan informasi adalah melalui internet/web,media massa, paparan publik maupun media sosial. Perusahaan memiliki beberapa sumber informasi yang dapat diakses oleh publik melalui:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
   Melalui RUPS, Pos Indonesia menyampaikan informasi mengenai rencana dan/atau kinerja kepada Pemegang Saham sehingga Pemegang Saham mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi Pos Indonesia dan dapat mengambil keputusan strategis dengan tepat

2. Website resmi Perusahaan: www.posindonesia.co.id
   Fungsi website tersebut adalah untuk penyebarluasan informasi secara transparan baik kepada stakeholders dan shareholder maupun kepada masyarakat umum, membangun citra Perusahaan dan sebagai media promosi. Data yang dapat didapatkan melalui website perusahaan antara lain:
   - Profil perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris
   - Produk dan Jasa yang diberikan
   - Solusi bisnis
   - Media dan Informasi baik news release, e-paper, dan galeri kegiatan
   - Informasi karir di Perusahaan
   - Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan.
   - Informasi kontak dan media sosial perusahaan
   - Lacak Kiriman
   - Hitung Tarif Pengiriman
   - Pencarian Kantorpos Terdekat
   - Program Pos Indonesia

3. Media
   Penyebaran informasi melalui media diantaranya adalah secara rutin menerbitkan company profile, mencetak brosur, publikasi melalui surat kabar, majalah dan mengirimkan press release kepada media massa untuk disebarkan kepada konsumen dan pemangku kepentingan.

4. Kontak & Media Sosial
   - Telepon 1500161;
   - Website http://www.posindonesia.co.id
   - Livechat VIDAPOS;
   - Line Messenger @posindonesia;
   - Telegram Messenger @posindonesia_officialbot;
   - E-mail halopos@posindonesia.co.id;
   - Facebook http://www.facebook.com/Pos Indonesia;
   - Twitter @posindonesia;
   - Instagram @posindonesia.ig;
   - Channel Youtube Pos Indonesia https://www.youtube.com/PosIndonesiajuara.

5. Media Internal melalui Wahana Pos
6. Pertemuan / Pameran / expo

KODE ETIK POS INDONESIA

Komitmen untuk melaksanakan praktik-praktik GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah salah satunya dengan menginterpretasikan perilaku yang terkait dengan Etika Bisnis dan Tata Perilaku. Dalam penerapannya, Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku berlaku bagi seluruh insan Pos Indonesia dan diperbarui pada setiap awal tahun selain itu setiap pimpinan unit kerja diwajibkan untuk melakukan sosialisasi untuk mempertahankan kejujuran, integritas, dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di unit kerjanya. Pos Indonesia memiliki kode etik yang berlaku bagi seluruh level organisasi melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pos Indonesia Nomor 439/DEKOM/1014 dan Nomor KD.85/DIRUT/1014 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Insan Pos Indonesia.

Dalam pengembangan GCG, perusahaan telah menyusun Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct). Perusahaan mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi dan budaya perusahaan yang berisikan nilai-nilai etika bisnis dan tata perilaku bagi setiap insan Pos Indonesia, yang menjadi acuan dalam kegiatan operasional pekerjaan sehari-hari. Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku. Substansi Aturan Perilaku dimaksudkan agar dapat mewujudkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh insan Pos menjadi tindakan nyata dalam operasional sehari-hari dalam berinteraksi dengan sesama Insan Pos maupun dengan stakeholders lainnya. Agar Aturan Perilaku ini dapat dijadikan bahan referensi pencegahan timbulnya permasalahan maupun ketika menghadapi situasi dilematis yang sulit diantisipasi.

ETIKA BISNIS DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Pos Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan semua stakeholders merupakan syarat utama bagi sustainability Perusahaan. Hubungan baik dibangun oleh komitmen untuk melaksanakan praktik-praktik GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik, salah satunya adalah dengan mengimplementasikan sikap dan/atau sifat yang tertuang dalam Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Insan Pos Indonesia.

Pos Indonesia memiliki kode etik yang berlaku bagi seluruh level organisasi yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 446/Dekom/1221 dan Nomor: KD.125/DIRUT/1221 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Insan Pos Indonesia.

Etika Bisnis dan Tata Perilaku ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan sebagai Insan Pos Indonesia dalam mengelola Perusahaan guna mencapai purpose, visi, misi, dan tujuan Perusahaan. Pos Indonesia mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya yang menjadi acuan dalam kegiatan operasional pekerjaan sehari-hari. Code of Conduct (CoC) juga dapat dipedomani sebagai referensi pencegahan timbulnya permasalahan maupun ketika menghadapi situasi dilematis yang sulit diantisipasi.

Penerapan Etika Bisnis dan Tata Perilaku ini secara terperinci dimaksudkan untuk:

1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika selaras dengan visi dan misi Perusahaan;
2. Menjabarkan tata nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Insan Pos Indonesia dalam menjalankan tugas;
3. Menjadi acuan perilaku Insan Pos Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan *stakeholders* Perusahaan;
4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar Insan Pos Indonesia dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

Muatan Aturan Perilaku

Code of Conduct Perusahaan merupakan sekumpulan norma, nilai, serta tindak perbuatan yang diyakini oleh jajaran perusahaan sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi Perusahaan. Perilaku yang ideal tersebut wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menjadi budaya Perusahaan. Dari nilai-nilai luhur yang telah ada pada Perusahaan, ditetapkan aturan perilaku yang secara garis besar berisi sebagai berikut:

1. Standar Etika Bisnis
   Perusahaan mengembangkan Pedoman Etika Bisnis yang merupakan standar perilaku dalam berbisnis dan menjadi panduan bagi Perusahaan sebagai suatu entitas dalam berinteraksi dan berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Penerapa etika bisnis diharapkan dapat membantu Perusahaan untuk meningkatkan kinerja dengan tetap memperhatikan kepentingan dari shareholder dan stakeholders secara beretika dan berlandaskan peraturan dan hukum yang berlaku. Standar etika bisnis misalnya mengatur bagaimana setiap insan pos mempunyai integritas dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis dan pekerjaannya. Selain itu pada Standar Etika Bisnis diatur etika perusahaan dengan pemegang saham, karyawan (hubungan industrial), konsumen, pesaing, penyedia barang dan jasa, mitra kerja, investor, pemerintah, masyarakat, media massa, pengelolaan lingkungan, serta organisasi profesi. Sistem pengadaan konntrak pekerjaan juga diatur dalam Standar Etika Bisnis ini.
2. Standar Tata Perilaku
   Standar tata perilaku harus dimiliki setiap insan Pos Indonesia dan menjadi panduan dalam berinteraksi dan berhubungan, dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis dan pekerjaan sehari-hari. Penerapan tata perilaku diharapkan dapat menjadikan insan Pos Indonesia mempunyai integritas, sikap jujur, adil, dan mendahulukan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi. Pada Standar Tata Perilaku diatur tentang etika kerja sesama insan Pos Indonesia, antara atasan dengan bawahan. Etika menghindarkan diri dari penyuapan, benturan kepentingan, gratifikasi, entertainment, narkoba dan miras, serta penyalahgunaan jabatan diatur juga pada Standar Tata Perilaku. Seluruh karyawan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan, harta perusahaan, serta keamanan, kesehatan dan keselamatan (K3) saat bekerja. Pada Standar Tata Perilaku juga memuat terkait aturan keterlibatan dalam politik, pernyataan palsu, klaim palsu dan konspirasi serta diatur juga tentang penghormatan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual.

Penyebarluasan Kode Etik

Sosialisasi CoC kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan telah dilakukan menggunakan beberapa media, di antaranya adalah melalui Learning Management System (LMS) dan Google Classroom (GCR). LMS digunakan bagi karyawan organik sedangkan GCR digunakan untuk karyawan non organik. Tahapan sosialisasi pada kedua media tersebut adalah pembelajaran mandiri menggunakan media power point dilanjutkan dengan posttest. Karyawan yang berhasil mendapatkan nilai minimal 80% dalam posttest tersebut dianggap lulus dan akan mendapatkan sertifikat digital. Sertifikat digital digunakan sebagai Surat Pernyataan Pos Indonesia di mana pada surat tersebut dinyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan telah paham dan akan mengimplementasikan CoC dalam pekerjaan sehari-hari.

Pelaporan Pelanggaran

Berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaporan pelanggan, yaitu:

1. Identitas yang dilaporkan harus jelas
2. Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya oleh Perusahaan, kecuali apabila diperlukan dalam tindak lanjut laporan sesuai kebijakan Perusahaan
3. Atasan langsung menindaklanjuti laporan
4. Pelaporan dilakukan secara jujur, dilandasi niat baik disertai data/bukti akurat
5. Insan Pos dilarang melakukan tindakan pemusuhan, pembalasan, dan tindakan merugikan lainnya Penanganan Pelanggaran

Berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan proses penanganan pelanggan, yaitu:

1. Laporan ditindaklanjuti melalui pengkajian atau pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian tindakan disiplin, sanksi, atau tindakan perbaikan lainnya
2. Hasil kajian dan usulan perbaikan disampaikan kepada Direktur SDM dan Umum untuk dikaji lebih lanjut, lalu disampaikan ke Direktur Utama untuk persetujuan
3. Jika diperlukan, Direktur Utama dapat memerintahkan SPI untuk pengkajian laporan lebih lanjut
4. Insan Pos yang diduga melanggar etika bisnis (CoC) diberi hak untuk didengar penjelasannya sebelum diputuskan pemberian hukdis/sanksi.

Sanksi

Berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan sanksi dari pelanggaran kode etik yang diterapkan di Perusahaan, yaitu:

1. Perusahaan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten kepada Insan Pos yang melanggar etika bisnis (CoC).
2. Pengenaan sanksi atas bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Komisaris dan Direksi, berpedoman pada anggaran dasar Perusahaan dan keputusan RUPS
3. Pengenaan sanksi terhadap karyawan perusahaan dilakukan sesuai ketentuan Perusahaan

Pelanggaran dan Sanksi di Tahun 2023

Tidak terdapat pelanggaran kode etik yang terjadi di Pos Indonesia sepanjang 2023.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System adalah sistem yang mengelola pengaduan/pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya, secara rahasia, anonim, dan mandiri (independent) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Pos dan mitra kerja dalam mengungkap Pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Whistleblowing System (WBS) berperan penting dalam sistem pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran, kecurangan maupun pelanggaran etika di Pos Indonesia. Pemanfaatan WBS diperuntukan bagi siapa saja yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pos Indonesia. WBS di lingkungan Pos Indonesia berfokus kepada materi yang dilaporkan sehingga pelapor tidak perlu khawatir identitasnya terungkap karena Pos Indonesia akan merahasiakan identitas diri pelapor/ *whistleblower*.

Wistleblowing system Pos Indonesia diatur dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.026/DIRUT/0322 dan Nomor 072/DEKOM/0322 tanggal 31 Maret 2022 tentang *Whistleblowing system* di PT Pos Indonesia (Persero).

Pengadministrasi WBS adalah Komite Audit Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) yang ditugaskan mengadministrasikan Pelaporan Pelanggaran mulai dari penerimaan laporan Pelanggaran sampai dengan pembuatan laporan akhir penanganan pelaporan dan penyimpanan dokumen.

Agar pelaksanaan WBS berjalan efisien dan efektif dibentuk Komite WBS/*Whistleblowing System Committee* (WBS) dengan komposisi sebagai berikut:

1. Komite Pengarah dengan susunan sebagai berikut:
   a. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum sebagai ketua;
   b. Direktur Bisnis Kurir dan Logistik sebagai anggota;
   c. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sebagai anggota;
2. Komite Pelaksana dengan susunan sebagai berikut:
   a. Kepala Internal Audit sebagai ketua merangkap anggota;
   b. Corporate Secretary sebagai wakil ketua merangkap anggota;
   c. VP Risk and Fraud Management sebagai sekretaris merangkap anggota;
   d. SVP *Human Capital Management* sebagai anggota;
   e. SVP Finance;
   f. VP Legal, *Governance and Compliance* sebagai anggota;
   g. Deputi Internal Audit Bidang Pemeriksaan Investigatif dan Tindak Lanjut sebagai anggota;

Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

1. Pelapor dapat menyalurkan pengaduan melalui Pengadministrasi WBS, dengan fasilitas sebagai berikut :

   a. Surat ditujukan kepada : Komite Audit Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero)
   Gedung Pos Ibukota Jalan Gedung Kesenian Nomor 2 Lantai 2 Jakarta 10710 atau Graha Pos Indonesia Jalan Banda nomor 30 Lantai 7 Bandung 40115
   (dengan format surat yang telah disediakan)

   b. Telepon : 021-3521205
   c. Faksimile : 021-3452533
   d. Email : wbs@posindonesia.co.id
   e. Website : wbs.posindonesia.co.id
   f. WA : 08119155664
   g. Telegram : 08119155664

2. Pelaporan bersifat rahasia;

3. Pelaporan pelanggaran harus ditindaklanjuti oleh Pengelola WBS paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima.

Perlindungan Bagi Pelapor/ *Whistleblower*

1. Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS
2. Perlindungan Pelapor diharapkan untuk mendorong terjadinya Pelaporan pelanggaran serta menjamin keamanan Pelapor maupun keluarganya;
3. Perusahaan memberikan jaminan Perlindungan kepada Pelapor (Whistleblower Protection) dalam bentuk sebagai berikut :
   a. Perlindungan pengamanan atas tindakan balasan baik berupa fisik maupun tekanan dari Terlapor atau Korporasi;
   b. Perlindungan atas perlakuan yang merugikan yaitu:
      - Pemecatan yang tidak adil;
      - Penurunan atau pembebasan jabatan/grade, pangkat atau gaji;
      - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
      - Catatan yang merugikan dalam file data pribadi (personal file record).
      - Penghambatan karir
   c. Perlindungan atas gugatan/tuntutan hukum :
      - Apabila Pelapor mendapat gugatan balik dari Terlapor, Perusahaan wajib memberikan bantuan hukum sampai dengan selesainya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
      - Apabila Terlapor juga termasuk sebagai saksi, Perusahaan cq. VP Legal, *Governance and Compliance* dapat mengajukan perlindungan saksi dan korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
   d. Perlindungan atas identitas pribadi (apabila Pelapor menginginkan dirinya tetap dirahasiakan);
   e. Pelapor yang terlibat dalam perbuatan yang dilaporkan (*justice collaborator*) mendapatkan perlindungan dan keringanan hukuman disiplin, apabila Pelapor karyawan Perusahaan.

f. VP Legal, *Governace and Compliance* dapat mengusahakan agar pemberian keterangan oleh pelapor tanpa bertatap muka dengan Terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan

1. Penerimaan pelaporan

   Pelaporan pelanggaran harus segara ditindaklanjuti oleh Pengadministrasi WBS dan Paling lama dalam, waktu 30 hari sejak laporan pelanggaran diterima, sudah diputuskan untuk diteruskan atau tidak ke *Whistleblowing System Committee* (WBSC). Perbuatan Yang dapat Dilaporkan:

   a. Tidak Pidana Korupsi;
      - Korupsi Suap Menyuap
      - Korupsi Penggelapan Jabatan
      - Korupsi Tindak Pemerasan
      - Korupsi Gratifikasi
      - Korupsi Benturan Kepentingan
      - Korupsi Perbuatan Curang
      - Korupsi Keuangan Negara

   b. Kecurangan/*Fraud*;
   c. Perbuatan melanggar hukum antara lain:
      - Penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan;
      - Penggunaan narkoba;
      - Pelecehan dan/atau kesusilaan;
      - Perbuatan kriminal lainnya;
      - Mark-up.

   d. Pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) atau Pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya. Pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) atau Pelanggaran norma-norma kesopanan ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Etik dengan Keputusan Direksi dan/ atau Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi;
   e. Perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap Perusahaan atau merugikan kepentingan Perusahaan, misalnya penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Klarifikasi

   a. Klarifikasi dilakukan oleh Komite WBS yang apabila diperlukan melibatkan tim dari lintas fungsi;
   b. Klarifikasi Pengadministrasi WBS dengan Pelapor sebelum diteruskan ke WBSC, dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya (telaah awal apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak);
   c. Bila Pelapor adalah karyawan, maka Pengadministrasi WBS wajib memberikan informasi perkembangan penanganan hasil Pelaporan Pelanggaran tersebut kepada Pelapor. Pemberian informasi ini dilakukan dengan mengingat asas kerahasiaan antara Pelapor dengan Pengadministrasi WBS, termasuk di dalamnya kerahasiaan terhadap apa yang terjadi pada Terlapor. Pembocoran sifat kerahasiaan ini oleh Pelapor akan menghapuskan kewajiban Perusahaan atas jaminan kerahasiaan yang diberikan kepadanya dan dalam kasus tertentu dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan kepada Pelapor;

d. Dalam hal Pelapor adalah orang luar (masyarakat) dan bukan karyawan Perusahaan, Kebijakan komunikasi dengan Pelapor ini dapat diberikan. Hal ini berlaku bila ia bersedia menandatangani kesepakatan tertulis tentang kerahasiaan informasi baik yang ia terima dari Perusahaan, maupun yang disampaikan kepada Perusahaan.

3. Investigasi

Semua laporan mengenai pelanggaran akan dilakukan investigasi lebih lanjut, dengan tujuan untuk sedapat mungkin mengumpulkan semua bukti yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar atau bahkan sebaliknya, atau bahkan ditemukan tidak cukup bukti untuk mendukung tindak lanjut. Investigasi dilakukan dalam hal:

a. Terlapor adalah karyawan atau organ pendukung Dewan Komisaris, investigasi dilakukan oleh WBSC yaitu Internal Audit c.q. Deputi Pemeriksaan Investigasi dan Tindak Lanjut atau Investigasi eksternal yang ditunjuk oleh Direksi;
b. Terlapor adalah Direksi, Investigasi dilakukan oleh Dewan Komisaris c.q. Komite audit atau investigasi eksternal yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;
c. Terlapor adalah Komisaris, Investigasi merupakan kewenangan Pemegang Saham berdasarkan laporan dari dewan komisaris yang menerima masukan dari pengadministrasi WBS.

Independensi petugas investigasi sangat penting karena objektivitas dan kewajaran serta keadilan dalam memberikan penilaian hasil temuan akan menentukan kredibilitas pengelola WBS. Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan atau siapapun terlapor. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan.

Pelaksana investigasi terdiri dari Komite WBS, dalam melaksanakan tugasnya dilarang melakukan intimidasi. Dalam hal kasus yang serius dan sensitif, patut dipertimbangkan untuk menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen dalam melakukan investigasi laporan pelanggaran tersebut.

Pelaksana Investigasi terdiri dari Komite WBS; Pelaksana investigasi harus memiliki kriteria sebagai berikut :

a. Mempunyai integritas yang tinggi;
b. Mempunyai kemampuan untuk melakukan investigasi;
c. Mempunyai kemampuan analisis yang tinggi;
d. Kemampuan melakukan penilaian dengan baik (*sound judgement*);
e. Objektif;
f. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
g. Memiliki kemampuan diplomasi yang baik.

Pelaksana Investigasi dalam melakukan Investigasi:

a. tidak diperkenankan melakukan intimidasi;
b. berhak meminta informasi tentang tugas dan materi Investigasi dari Pengadministrasi WBS dan WBSC;
c. tidak berhak menerima informasi identitas Pelapor;
d. berkewajiban merahasiakan atas segala informasi yang diperoleh dari Investigasi;

Pelaksana Investigasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan Investigasi harus melaporkan secara rahasia dan segera kepada WBSC dengan tembusan kepada Pengadministrasi WBS. Untuk menerima informasi tambahan, WBSC dapat meminta Pelaksana Investigasi untuk mempresentasikan hasil laporan Investigasi di dalam rapat WBSC.

4. Penindakan
   a. Apabila berdasarkan investigasi terlapor terbukti melakukan pelanggaran, dilakukan penindakan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Apabila berdasarkan investigasi terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran, makan nama baik dan seluruh haknya dipulihkan;
   c. Apabila berdasarkan investigasi tidak ditemukan bukti-bukti dan berindikasi laporan palsu atau fitnah, khusus pelapor internal perusahaan dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. Penindakan dapat juga berupa pelaporan pidana kepada yang berwajib atau gugatan perdata.

5. Laporan Akhir
   a. Laporan akhir atas pelaporan pelanggaran dibuat oleh WBSC dikirimkan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada pengadministrasi WBS dalam hal ini komite audit dan oleh tim investigasi hasil tersebut dipresentasikan/ dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan diinformasikan kepada Pelapor;
   b. Pelanggaran yang berulang dan sistemik dilaporkan kepada direksi yang bertanggung jawab atas permasalahan yang dilaporkan dan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan;
   c. Hasil laporan akhir diarsipkan dengan tertib sebagai dokumen dan disimpan dalam waktu sesuai dengan peraturan pengarsipan di Perusahaan. Apabila pelanggaran tersebut diteruskan ke proses pengadilan, dokumen tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

WBS di Pos Indonesia saat ini dikelola oleh:

1. Komite Audit Dewan Komisaris sebagai Pengadministrasi WBS yaitu sebagai pengelola pelaporan pelanggaran mulai dari penerimaan laporan pelanggaran sampai dengan pembuatan laporan akhir penanganan pengaduan dan penyimpanan dokumen;
2. Komite *Whistleblowing System* (WBSC) Komite WBS sebagai pelaksana WBS yang terdiri dari Komite Pengarah yang diketuai oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum dan Komite Pelaksana yang diketuai oleh Kepala Internal Audit. WBSC mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

   a. Hak WBSC adalah :
      - Berhak meminta konfirmasi atas pelaporan Pelanggaran dari Pengadministrasi WBS;
      - Berhak atas akses langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
      - Meminta VP Hukum untuk melakukan perlindungan kepada Pelapor dan keluarganya dan bantuan hukum apabila diperlukan;
      - Menghadiri rapat pleno yang diselenggarakan oleh Pengadministrasi WBS.

   b. Kewajiban WBSC adalah :
      - Menerima Pelaporan Pelanggaran dari Pengadministrasi WBS;
      - Menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan atas laporan yang diterima dari pengadministrasi WBS;
      - Meminta kepada VP Hukum untuk melakukan perlindungan dan bantuan hukum kepada pelapor dan keluarganya apabila diperlukan;
      - Mempresentasikan hasil tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit apabila Pelanggaran dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris, apabila Pelanggaran dilakukan oleh Direktur maka presentasi hasil tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran kepada Direktur Utama;
      - Merekomendasikan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan kepada Terlapor yang oleh tim investigasi yang terdiri dari fungsi dinyatakan cukup bukti telah melakukan Pelanggaran agar diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan;
      - Setiap triwulan atau sesuai kebutuhan membuat laporan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris c.q. Komite Audit sebagai Pengadministrasi WBS atas setiap laporan yang diterima dari Pengadministrasi WBS;
      - Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris atau Pengadministrasi WBS sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal anggota WBSC dalam posisi Terlapor maka:

a. Anggota yang bertalian harus dinonaktifkan dari keanggotaan WBSC selama tindak lanjut atas proses pelaporan berlangsung.
b. Apabila laporan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari auditor eksternal/internal dinyatakan terbukti, anggota tersebut diberhentikan sebagai anggota WBSC;
c. Apabila laporan tersebut tidak terbukti kebenarannya, maka anggota yang bertalian dipulihkan kembali keanggotaannya dalam WBSC.

Dalam hal Komisaris atau Direksi berada pada posisi Terlapor, WBSC harus membuat laporan kepada Komisaris c.q. Komite Audit.

Pengaduan

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengaduan yang masuk melalui WBS.

Laporan Administrasi Pengelolaan WBS telah dibuat tiap triwulan dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris:

1. Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan IV tahun 2022 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.13031/KAD 100/KA/2023 tanggal 27 Januari 2023, perihal : Laporan Administrasi WBS Triwulan IV Tahun 2022
2. Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan I tahun 2023 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.46339/ KAD 100/KA/2023 tanggal 17 April 2023, perihal Laporan Pengelolaan Administrasi *Whistle Blowing System* (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan I Tahun 2023.
3. Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan II tahun 2023 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan NDE Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.71150/KAD 100/KA/2023 tanggal 31 Juli 2023 Perihal Laporan Pengelolaan Administrasi *Whistle Blowing System* (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan II Tahun 2023.
4. Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan III tahun 2023 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.109881/ KAD 100/KA/2023 tanggal 25 Oktober 2023, perihal Laporan Pengelolaan Administrasi *Whistle Blowing System* (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan III Tahun 2023.

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Definisi Gratifikasi

Menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna sebagai pemberian yang bersifat netral. Berikut ini perbedaan hadiah, gratifikasi, gratifikasi illegal, dan suap:

Hadiah	Pemberian yang wajar, dilakukan karena hubungan baik dan sama sekali tidak terikat dengan jabatan
Gratifikasi	Pemberian dalam arti luas kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara
Gratifikasi Ilegal	Pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban/tugas pihak pertama
Suap	Sifatnya transaksional atau adanya kesepakatan pihak pemberi dan penerima

Disarikan dari pendapat Prof. Dr. Topo Santoso. S.H., H.H (Guru Besar Hukum Pidana FH Universitas Indonseia)

Regulasi Gratifikasi

Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut pasal yang mengatur tentang gratifikasi:

a. Pasal 12B
   (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
      a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
      b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
   (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 12C
   (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitng sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
   (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
   (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat

Jenis-jenis Gratifikasi

a. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan
   (1) Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
   (2) Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
   (3) Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoringdan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
   (4) Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari instansi;
   (5) Dalam proses penerimaan/promosi/ mutasi pegawai;

(6) Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
(7) Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
(8) Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
(9) Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
(10) Merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/ pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
(11) Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan /perlakuan pemangku kewenangan;
(12) Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugas pejabat/pegawai;

b. Gratifikasi yang Tidak Wajib DilaporkanTidak semua gratifikasi tidak boleh diterima/wajib dilaporkan kepada KPK. Mengingat begitu luasnya ruang lingkup gratifikasi, perlu juga diuraikan bentuk-bentuk gratifikasi di luar yang wajib dilaporkan. Karena secara prinsip terdapat begitu banyak bentuk pemberian yang sesungguhnya tidak terkait sama sekali dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sehingga gratifikasi tersebut tidak wajib dilaporkan.

Terdapat 4 (empat) karakteristik gratifikasi yang boleh diterima yaitu:

(1) Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
(2) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3) Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan *social* antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; atau,
(4) Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, terdapat 17 (tujuh belas) jenis gratifikasi yang dikecualikan/tidak wajib dilaporkan, yaitu:

(1) Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
(2) Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
(3) Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;

(4) Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
(5) Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
(6) Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
(7) Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(8) Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau *suvenir* yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
(9) Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
(10) Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
(11) Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
(12) Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
(13) Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
(14) Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
(15) Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
(16) Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
(17) Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Pelaporan Gratifikasi

Gratifikasi yang dianggap suap yaitu gratifikasi yang diberikan dari pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku, merupakan jenis gratifikasi yang harus ditolak oleh setiap pegawai negeri/penyelenggara negara. Jika penerima gratifikasi menerima gratifikasi dan melaporkan kepada KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima, maka Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi.

Setidaknya terdapat 2 (dua) sikap yang dapat dilakukan apabila seorang Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara berhadapan dengan peristiwa pemberian gratifikasi, yaitu:

a. Tolak pada kesempatan pertama, lalu laporkan kepada KPK
b. Terima lalu laporkan kepada KPK Kondisi pengecualian dimana gratifikasi tidak bisa ditolak di kesempatan pertama, sebagai berikut:
    1) Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
    2) Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
    3) Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima.
    4) Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain.

Dalam hal gratifikasi yang memenuhi empat kondisi pengecualian di atas, Penerimaan gratifikasi lainnya agar dilaporkan langsung kepada KPK melalui Aplikasi "Gratifikasi *Online* (GOL)" yang dapat diunduh pada *smartphone* baik Android maupun iOS. Pada saat pelaporan, ditembuskan ke email upg@posindonesia.co.id

Lapor gratifikasi membawa manfaat, di antaranya adalah:

- Melepaskan ancaman hukuman terhadap penerima
- Memutus konflik kepentingan
- Sebagai cerminan integritas individu

Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi. Komitmen Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu tahapan penerapan pengendalian gratifikasi. Salah satu bukti komitmen Pos Indonesia terhadap adanya pengendalian gratifikasi yaitu dengan dibuatnya Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 448/DEKOM/1221 dan Nomor KD.127/DIRUT/1221 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT Pos Indonesia (Persero). Pedoman ini disampaikan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai, rekanan serta para pemangku kepentingan lainnya.

Komitmen Pengendalian Gratifikasi yang harus dimiliki semua stakeholders Pos Indonesia antara lain:

a. Tidak menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga negara/pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestic atau asing;
b. Tidak menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

c. Menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi, termasuk melalui pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);
d. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
e. Menjaga kerahasiaan data pelapor dan memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor gratifikasi;
f. Mengupayakan pencegahan korupsi dan/atau gratifikasi yang dianggap suap.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pemegang saham utama Pos Indonesia yaitu Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bahwa proses pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan bebas dari praktek diskriminatif, terbuka, dan menjaga keberagaman komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan PT Pos Indonesia (Persero). Dewan Komisaris yang dipilih adalah yang memenuhi syarat baik itu berdasarkan integritas, kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan oleh PT Pos Indonesia (Persero). Berikut Keberagaman komposisi Direksi Berdasarkan pendidikan, usia, jenis kelamin , dan keahliannya :

No	Nama	Jabatan	Gender	Usia	Tingkat Pendidikan	Latar Belakang Kecakapan & Keahlian
1	Rhenald Kasali	Komisaris Utama	Pria	63 Tahun	Doktor	Eknomi dan Bisnis
2	I Gde Made Kartikajaya	Komisaris	Pria	57 Tahun	Doktor	Ekonomi dan Bisnis
3	Ruben Rico	Komisaris	Pria	43 Tahun	Magister	Hukum, Administrasi
4	Guntur Imam Nefianto	Komisaris	Pria	60 Tahun	Magister	Akuntansi, Keuangan, Hukum Bisnis
5	Gunawan Hutagalung	Komisaris	Pria	48 Tahun	Magister	Teknik Informatika

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Sebagai perwujudan dari prinsip GCG dan penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam pemilihan dan pengangkatan Direksi, Pemegang Saham Pos Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk selalu terbuka dan tidak diskriminatif. Direksi yang diangkat telah melalui proses seleksi sesuai dengan jabatan dan keahliannya, sehingga dipastikan memiliki integritas, kemampuan dan kompetensi yang baik dalam memimpin PT Pos Indonesia (Persero) menjadi pemenang di industrinya. Berikut Keberagaman komposisi Direksi Berdasarkan pendidikan, usia, jenis kelamin, dan keahliannya :

No	Nama	Jabatan	Gender	Usia	Tingkat Pendidikan	Latar Belakang Kecakapan & Keahlian
1	Faizal Rochmad Djoemadi	Direktur Utama	Pria	56 Tahun	Doktor	Telekomunikasi
2	Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman	Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko	Pria	60 Tahun	Magister	Keuangan
3	Tonggo Marbun	Direktur Bisnis Kurir dan Logistik	Pria	52 Tahun	Magister	Kepemimpinan dan *Human Capital*
4	Hariadi	Direktur Operasi dan *Digital Services*	Pria	44 Tahun	Magister	Logistik
5	Haris	Direktur Bisnis Jasa Keuangan	Pria	56 Tahun	Magister	Administrasi dan Manajemen
6	Prasabri Pesti	Direktur *Business Development* dan *Portfolio Management*	Pria	52 Tahun	Doktor	Manajemen
7	Asih Kurniasari Komar	Direktur *Human Capital Management*	Wanita	54 Tahun	Magister	Akuntansi, Keuangan, Hukum Bisnis



6

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan


POS
IND
Logistik Indonesia

TTANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Keberadaan PT Pos Indonesia (Persero) dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan perintis dalam sektor usaha yang saat ini banyak diminati oleh pihak swasta selain juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang siginfikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, *deviden*.

Sebagai institusi bisnis PT Pos Indonesia (Persero) dituntut untuk dapat menghasilkan laba sebagaimana layaknya perusahanan-perusahaan bisnis lainnya. Namun di sisi lain, pada saat yang bersamaan PT Pos Indonesia (Persero) dituntut untuk berfungsi sebagai alat pembangunan nasional dan berperan sebagai institusi sosial (*public*). Peran sosial ini mengisyaratkan bukan saja pemilikan dan pengawasannya oleh publik tetapi juga menggambarkan konsep mengenai *public purpose* (sasarannya adalah masyarakat) dan *public interest* (orientasinya pada kepentingan masyarakat). Dengan demikian disadari bahwa posisi PT Pos Indonesia (Persero) ini ibarat memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi berperan sebagai institusi binis dan sisi lainnya berperan sebagai institusi sosial karena merupakan alat negara.

Dalam melakukan kegiatan usaha perusahaan tidak semata-mata hanya berorientasi pada aspek ekonomi berupa peraihan pendapatan dan peraihan laba namun juga harus tetap memperhatikan hal-hal lain yang akan dan berdampak pada sosial dan lingkungan yang di timbulkan dimana usaha perusahaan berada. Hal lain bahwa dalam kegiatan usaha perusahaan harus memperhatikan juga faktor pembangunan usaha perusahaan yang berkelanjutan di mana perusahaan harus mampu menjamin kegiatan usaha perusahaan yang sehat dan dinamis serta peduli dengan lingkungan serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan dan pembangunan ekonomi nasional yang bisa dibuktikan dengan semakin baiknya tingkat kualitas hidup dari karyawan termasuk keluarganya serta masyakat luas secara umum.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) merupakan salah satu kebijakan strategis perusahaan, sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak kegiatan operasional perusahaan dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, Operasi yang adil serta kewajiban untuk menyediakan tempat yang nyaman dan hubungan kerja yang baik dengan karyawan, mengutamakan terjaganya kesehatan dan keselamatan kerja serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.

PT Pos Indonesia (Persero) menjalankan program-program TJSL sebagai wujud komitmen Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola bagi seluruh pemangku kepentingan serta dilaksanakan dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Pos Indonesia.

Pelaksanaan program TJSL didasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. UU No.40 Tahun 2007 tentang Perrseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Adapun tujuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pos Indonesia (Persero) adalah:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan;
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Dalam pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pos Indonesia (Persero) didasarkan pada prinsip:

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan;
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan;
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pelaksanaan program TJSL Pos Indonesia berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada ISO 26000 yang meliputi pada 7 *core Subject*, antara lain:

1. Tata kelola perusahaan
2. Hak asasi manusia
3. Praktek ketenagakerjaan
4. Lingkungan hidup
5. Praktek operasi yang adil
6. Isu-isu konsumen
7. Keterlibatan dan pengembangan komunitas

Dalam pelaksanaan TJSL Pos Indonesia mengacu pada 4 (empat) pilar yang meliputi Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan dan Pilar Hukum dan Tata Kelola. Terdapat 5 (lima) TPB yang akan dijalankan yaitu :

1. TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)
2. TPB 4 (Pendidikan Berkualitas)
3. TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)
4. TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim)
5. TPB 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)

PT Pos Indonesia (Persero) membentuk 26 Unit kerja untuk melaksanakan program-program TJSL dan diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan *stakeholder* lainnya di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tepat sasaran sehingga tercipta hubungan yang sehat dan adil dengan seluruh pihak, maka PT Pos Indonesia (Persero) senantiasa melakukan berbagai langkah untuk mewujudkan komitmen dalam menerapkan kebijakan dan tata kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalu beberapa langkah diantaranya :

1. Identifikasi dan kajian (*due diligence*) atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas perusahaan dilakukan melalui metode survei, diskusi atau wawancara, dan riset.
2. Identfikasi tentang *stakeholder* penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan. Sampai dengan saat ini, tidak terdapat stakeholder yang terdampak buruk dari kegiatan PT Pos Indonesia (Persero) baik dalam kegiatan operasi Perusahaan maupun kegiatan program sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan Perusahaan bahkan dampak positif dari operasi PT Pos Indonesia (Persero) yang telah menjangkau seluruh pelosok Indonesia dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam menjembatani keterbatasan akses yang ada.
3. Identifikasi dan solusi terkait isu-isu penting sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum dan tata kelola administrasi terkait dampak kegiatan perusahaan. PT Pos Indonesia (Persero) dalam menjalankan program TJSL selalu memperhatikan kondisi perekonomian dan keadaan lingkungan sekitar karena kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang beragam membutuhkan strategi dan penanganan yang berbeda pada setiap kondisi, hal ini terlihat dari mitra binaan PT Pos Indonesia (Persero) yang terdiri dari berbagai sektor industri dan skala ekonomi yang beragam.
4. Analisis lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban untuk memastikan bahwa Program TJSL yang dibuat sesuai dengan lingkup yang telah ditetapkan dan bermanfaat bagi sosial ekonomi maupun lingkungan yang menjadi target kegiatan.

Strategi dan Program kerja

Program TJSL PT Pos Indonesia (Persero) secara prinsipnya berpedoman pada *Suistenable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan dilakukan dalam berbagai inisiatif yang berfokus pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pengembangan sosial dan budaya masyarakat, peningkatan kualitas pengelolaan kesehatan, dan pendidikan. Strategi dan program yang dilaksanakan juga memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi kekinian dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam upaya *stakeholders engagement* dan meningkatkan *value* untuk *stakeholder* dan *shareholder*.

Dalam pelaksanaan TJSL PT Pos Indonesia (Persero) harus dilakukan secara sistematis terpadu untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian keberhasilan Program TJSL sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan Program TJSL yang berpedoman pada rencana kerja. Maka dalam penyusunan program kerja TJSL harus dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Pengawasan; dan
4. Monitoring dan evaluasi.

Untuk menyusun program TJSL maka Perusahaan membentuk Komite TJSL dengan tujuan merumuskan pelaksanaan dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bagi lingkungan di sekitar Perusahaan, dimana komite TJSL ini berfungsi:

1. Melakukan koordinasi antar unit/ direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL Perusahaan;
2. Melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL Perusahaan;
3. Membantu Direksi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL Perusahaan.

Pelaksanaan program TJSL yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia (Persero) terdiri dari:

1. Pemberian dalam bentuk bantuan modal kerja dan pembinaan bagi usaha mikro dan usaha kecil.
2. Pemberian bentuk bantuan atau kegiatan lainnya bagi masyarakat disekitar Perusahaan yang sifatnya sosial kemasyarakatan.

Sasaran kegiatan TJSL PT Pos Indonesia (Persero) adalah masyarakat sekitar, karyawan, dan pelanggan. Di samping itu, PT Pos Indonesia (Persero) juga berupaya merealisasikan program tanggung jawab sosial dalam penerapan hak asasi manusia dan pengelolaan operasi yang adil dalam kegiatan perusahaan. Berbagai strategi dan program kerja yang dilakukan antara lain:

1. Strategi yang dilakukan untuk kegiatan TJSL pilar sosial, lingkungan adalah bertumpu pada anggota/ kelompok masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan untuk pemberdayaan yang diperoleh melalui kajian baik proposal maupun peninjauan lapangan.
2. Strategi untuk kegiatan TJSL pilar ekonomi adalah dengan melakukan selektivitas dalam menentapkan bidang usaha, wilayah dan pemilihan Mitra Binaan serta penyelarasan bidang usaha yang dapat mendukung langkah-langkah kegiatan usaha Perusahaan

Anggaran Biaya

Pelaksanaan program TJSL tahun 2023 berdasarkan Risalah RUPS Nomor : RIS-53/ DSI.MBU.B/1/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2023 antara lain :

1. Hasil pemetaan risiko atas aktivitas perusahaan ditetapkan 5 TPB RKA Tahun 2023 berdasarkan program TJSL Prioritas dan Creating Shared Value (CSV).

2. Pelaksanaan Program TJSL tahun 2023, dikelompokan dalam 4 pilar sebagai berikut :

NO	JENIS PILAR	RKA 2023 (RP)
1	Pilar Sosial	5.800.000.000
2	Pilar Ekonomi	27.750.000.000
3	Pilar Lingkungan	2.222.392.905
4	Pilar Hukum dan Tata Kelola	1.124.431.700
	JUMLAH	**36.896.824.605**

Program TJSL

Program TJSL non PUMK yang dijalankan unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (CID) yang diperhitungkan sebagai biaya pada laporan RKAP perusahaan tahun 2023 sebesar Rp 10.500.000.000,-.

Program TJSL yang merupakan pelaksanaan Program Pendanaan UMK (Non CID) tahun 2023 sebesar Rp 25.000.000.000,- yang bersumber dari dana bergulir (revolving) sampai dengan akhir tahun 2023 akan dilakukan kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Program TJSL Non CID sebesar Rp 1.396.824.605,- yang dilakukan kolaborasi dengan Divisi Jasa Keuangan dan Divisi SDM.

Pengelompokan program TJSL tahun 2023 dengan prioritas TPB sebagai berikut :

Program prioritas di bidang pendidikan

No	Program Prioritas	Rp
1	Kolaborasi Bantuan Pendidikan	1.050.000.000
2	Beasiswa Anak Berpestasi	300.000.000
3	Beasiswa Anak Pensiunan Pegawai Pos	100.000.000
4	Bantuan Sarana Pendidikan	300.000.000
5	Pengadaan Buku Anak Sekolah	300.000.000
6	Bantuan Alat Penunjang Pendidikan	200.000.000
	Jumlah	2.250.000.000

Program prioritas di bidang lingkungan

No	Program Prioritas	Rp
1	Bantuan sumbangan Pengadaan motor dan mobil listrik untuk oranger	500.000.000
2	Penanaman Pohon Non Mangrove	300.000.000
3	Bantuan penyediaan solar cell untuk operasional KCP	250.000.000
4	Bantuan pembuatan Bank Sampah	200.000.000
5	Bantuan Penyediaan Sarana Air Bersih	200.000.000
6	Bantuan Pembuatan MCK	100.000.000
	Jumlah	1.550.000.000

Program prioritas di bidang pengembangan UMK

No	Program Prioritas	Rp
1	Bantuan Pameran UMK	430.000.000
2	Bantuan Pelatihan UMK	890.000.000
3	Monitoring UMK Binaan	790.000.000
4	Bantuan sarana produksi UMK	250.000.000
5	Bantuan Pengurusan Sertifikasi	390.000.000
	Jumlah	2.750.000.000

Program TJSL yang berkomitmen mendukung bisnis inti dan menciptakan *Creating Shared Value* (CSV) bagi perusahaan

No	Program CSV	Rp
1	Bantuana Pelatihan dan Pembinaan UMK (Pameran) atau pasar rakyat (Pos Bloc Jakarta dan Medan serta TJSLD)	300.000.000
2	Mitigasi Risiko Pinjaman Dana UMK melalui Pemulihan Piutang Macet	250.000.000
3	Beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi	250.000.000
4	Beasiswa kepada Anak Pensiunan Pos	100.000.000
	Jumlah	900.000.000



Gambar :
Kegiatan Mudik Gratis 2023

KINERJA PROGRAM TJSL SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023

Kinerja pelaksanaan TJSL sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan realisasi kegiatan TJSL berdasarkan TPB sampai dengan Triwulan IV jika dibandingkan dengan RKA tahun 2023 tercapai 74,30 %. Data seperti pada tabel dibawah ini.

No	TPB	RKA TAHUN 2023	RKA s.d TW IV Th 2023	Realisasi s.d TW IV Th 2023	Persentase Capaian		Divisi Pemilik Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	(6) = (5/3)	(7) = (5/4)	8
A	PILAR SOSIAL	5.800.000.000	5.800.000.000	6.780.821.725	116,91	116,91	
1	TPB 3	3.550.000.000	3.550.000.000	4.712.472.775	132,75	132,75	TJSL
	• Bantuan pemberian vitamin bagi masyarakat	150.000.000	150.000.000	500.000.000			
	• Bantuan pemberian alat kesehatan	250.000.000	250.000.000	6.226.430			
	• Bantuan pemberian perbaikan rumah veteran dan pensiunan	450.000.000	450.000.000	406.350.701			
	• Bantuan sarana ibadah dan umum	400.000.000	400.000.000	680.516.830			
	• Bantuan bencana alam	500.000.000	500.000.000	20.000.000			
	• Mitigasi Risiko Pinjaman Dana UMK melalui Pemulihan Plutang Macet	250.000.000	250.000.000	0			
	• Bantuan sembako murah	500.000.000	500.000.000	1.113.690.150			
	• Bencana pengentasan stunting melalui posyandu	450.000.000	450.000.000	100.000.000			
	• Bantuan sarana umum dan elektrifikasi rumah warga	400.000.000	400.000.000	1.677.708.673			
	• Bantuan pemberian Kursi Roda untuk Pensiunan Pos yang membutuhkan	100.000.000	100.000.000	107.979.991			
	• Bantuan penyerahan bantuan Jawa Tengah relokasi Jaskug	100.000.000	100.000.000	100.000.000			

No	TPB	RKA TAHUN 2023	RKA s.d TW IV Th 2023	Realisasi s.d TW IV Th 2023	Persentase Capaian		Divisi Pemilik Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	(6) = (5/3)	(7) = (5/4)	8
2	TPB 4	2.250.000.000	2.250.000.000	2.068.348.950	91,93	91,93	TJSL
	• Bantuan pendidikan Yayasan BUMN	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000			
	• Beasiswa Anak Berprestasi	300.000.000	300.000.000	375.000.000			
	• Beasiswa anak pensiunan pegawai pos	100.000.000	100.000.000	100.000.000			
	• Bantuan sarana pendidikan Perpustakaan	300.000.000	300.000.000	309.031.000			
	• Pengadaan Buku Anak Sekolah	300.000.000	300.000.000	-			
	• Bantuan Alat Penunjang Pendidikan	200.000.000	200.000.000	234.317.950			
B	PILAR EKONOMI	27.750.000.000	27.750.000.000	18.787.675.954	67,70	67,70	
1	TPB 8	27.750.000.000	27.750.000.000	18.787.675.954	67,70	67,70	TJSL
	Program TJSL Pendanaan UMK	2.750.000.000	2.750.000.000	1.787.675.954			
	• Bantuan Pameran UMK	430.000.000	430.000.000	231.827.125			
	• Bantuan Pelatihan UMK	890.000.000	890.000.000	813.930.851			
	• Monitoring UMK Binaan	790.000.000	790.000.000	591.832.687			
	• Bantuan Sarana Produksi	250.000.000	250.000.000	94.385.291			
	• Bantuan Pengurusan Sertifikasi	390.000.000	390.000.000	55.700.000			
	Kolaborasi dengan BRI	25.000.000.000	5.000.000.000	17.000.000.000	68,00	68,00	
C	PILAR LINGKUNGAN	2.222.392.900	2.222.392.900	724.818.741	32,61	32,61	
1	TPB 13	2.222.392.900	2.222.392.900	724.818.741			TJSL
	• Bantuan sumbangan Pengadaan motor dan mobil listrik untuk oranger	500.000.000	500.000.000	41.778.000			
	• Penanaman Pohon Non Mangrove	300.000.000	300.000.000	2.350.000			
	• Bantuan penyediaan solar cell untuk operasional KCP	250.000.000	250.000.000	76.402.760			

No	TPB	RKA TAHUN 2023	RKA s.d TW IV Th 2023	Realisasi s.d TW IV Th 2023	Persentase Capaian		Divisi Pemilik Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	(6) = (5/3)	(7) = (5/4)	8
	• Bantuan pembuatan bank sampah	200.000.000	200.000.000	-			
	• Bantuan penyediaan sarana air bersih	200.000.000	200.000.000	180.622.905			
	• Bantuan pembuatan mck	100.000.000	100.000.000	51.272.176			
	• Penghijauan di lingkungan kantor pos IKN	300.000.000	300.000.000	-			
	• Bantuan penyediaan solar cell untuk pompa air di Sentani Papua	372.392.900	372.392.900	372.392.900			
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	1.124.431.700	1.124.431.700	1.120.561.367	99,66	99,66	
1	TPB 16	1.124.431.700	1.124.431.700	1.120.561.367			TJSL
	• Bantuan penerapan budaya AKHLAK	25.000.000	25.000.000				
	• Bantuan penerapan ISO	25.000.000	25.000.000				
	• Bantuan Tata Kelola Administrasi	50.000.000	50.000.000	254.016.000			
	• Bantuan perpanjangan SIM untuk driver dan oranger	200.000.000	200.000.000	42.113.667	21,06	21,06	
	• Bantuan Biaya BPHTB Korban Banjir Sentani Papua	824.431.700	824.431.700	824.431.700			
	Jumlah	36.896.824.600	36.896.824.600	27.413.877.787	74.30	74.30	
	Rekapitulasi						
1	Program CID	10.500.000.000	10.500.000.000	9.009.073.196	85,80	85,80	
2	Program Non CID	1.396.824.600	1.396.824.600	1.404.804.591	100,57	100,57	
3	Penyaluran Kolaborasi dengan BRI	25.000.000.000	25.000.000.000	17.000.000.000	68,00	68,00	
	Jumlah	36.896.824.600	36.896.824.600	27.413.877.787	74,30	74,30	

Rekapitulasi Penggunaan dana TJSL 2023

No	Rekapitulasi Penggunaan dana TJSL	RKA Tahun 2023	RKA s.d Triw IV Tahun 2023	Realisasi s.d Triw IV Tahun 2023	Persentasi Capaian RKA Tahun 2023
1	Program CID	10.500.000.000	10.500.000.000	9.009.073.196	85,80
2	Program Non CID	1.396.824.605	1.396.824.605	1.404.804.591	100,57
3	Penyaluran Kolaborasi dengan BRI	25.000.000.000	25.000.000.000	17.000.000.000	68,00
	Jumlah	**36.896.824.605**	**36.896.824.605**	**27.413.877.787**	

Kegiatan-kegiatan TJSL berdasarkan masing-masing pilar sebagai berikut :

- Pilar Sosial terserap sebesar Rp 6.780.821.725,- atau 116,91 % dari total RKA 2023.
- Pilar Ekonomi terserap sebesar Rp 18.787.675.954,- atau 67,70 % dari total RKA 2023.
- Pilar Lingkungan terserap sebesar Rp 724.818.741,- atau 32,61 % dari total RKA 2023.
- Pilar Hukum dan Tata Kelola terserap sebesar Rp 1.120.561.367,- atau 99,66 % dari total RKA 2023.



Gambar :
Perogram TJSL
Penyaluran Bantuan Kursi Roda

Gambar :
Perogram TJSL
Bantuan Bedah Rumah



b. Pelaksanaan kegiatan program Create Share Value yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV tahun 2023. Data seperti pada tabel di bawah ini .

Program Create Share Value

No	Program	RKA Tahun 2023	RKA s.d Triw IV Tahun 2023	Realisasi s.d Triw IV Tahun 2023	Nilai Manfaat CSV bagi Perusahaan
1	Bantuan Pelatihan dan Pembinaan UMK (Pameran) atau pasar rakyat (Pos Bloc Jakarta dan Medan serta TJSLD)	300.000.000	300.000.000	231.827.125	Dari peserta dan pengunjung pameran sebanyak 25 orang melakukan download aplikasi pospay. Masing-masing pelanggan minimal akan bertransaki 2 transaksi/bulan. Dengan perolehan fee Rp 2.000/ Transaksi. Maka 25 x 2 x 2000 x 12 = Rp 1.200.000,-
2	Mitigasi Risiko Pinjaman Dana UMK melalui Pemulihan Piutang Macet	250.000.000	250.000.000		
3	Beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi	250.000.000	250.000.000	375.000.000	Beasiswa ulbi, diharapkan mendapatkan 100 NoA POSPAY baru yang melakukan transaksi pembayaran minimal 3 (listrik, air dan pulsa/paket data) dalam sebulan dengan fee masing-masing Rp 2.500,-. sehingga jika di setahunkan akan mendapatkan potensi keuntungan sebesar : 100 orang X 3 transaksi X 12 bulan X Rp 2.500,- = Rp 9.000.000,-
4	Beasiswa kepada Anak Pensiunan Pos	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Beasiswa anak pensiunan, diharapkan mendapatkan 321 NoA POSPAY baru yang melakukan transaksi pembayaran minimal 3 (listrik, air dan pulsa/paket data) dalam sebulan dengan fee masing-masing Rp 2.500,-. sehingga jika di setahunkan akan mendapatkan potensi keuntungan sebesar : 321 orang X 3 transaksi X 12 bulan X Rp 2.500,- = Rp 28.890.000,-
	JUMLAH	**900.000.000**	**900.000.000**	**706.827.125**	

Pada Triwulan IV tahun 2023 program CSV terealisasi sebesar Rp. 706.827.125,- atau sebesar 79 % dari RKA tahun 2023.

c. Pelaksanaan Program Prioritas TJSL yang sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV tahun 2023. Data seperti pada tabel di bawah ini :

Program Prioritas di Bidang Pendidikan

No	Program Prioritas	TPB	RKA Tahun 2023	RKA s.d Triw IV Tahun 2023	Realisasi s.d Triw IV Tahun 2023
1	Kolaborasi Bantuan Pendidikan	4	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
2	Beasiswa Anak Berpestasi	4	300.000.000	300.000.000	375.000.000
3	Beasiswa Anak Pensiunan Pegawai Pos	4	100.000.000	100.000.000	100.000.000
4	Bantuan Sarana Pendidikan	4	300.000.000	300.000.000	309.031.000
5	Pengadaan Buku Anak Sekolah	4	300.000.000	300.000.000	-
6	Bantuan Alat Penunjang Pendidikan	4	200.000.000	200.000.000	234.427.950
	Jumlah		**2.250.000.000**	**2.250.000.000**	**2.068.458.950**

Pada Program Prioritas di bidang Pendidikan sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 2.068.458.950,- atau sebesar 91,92 % dari RKA tahun 2023.

Program Prioritas di Bidang Lingkungan

No	Program Prioritas	TPB	RKA Tahun 2023	RKA s.d Triw IV Tahun 2023	Realisasi s.d Triw IV Tahun 2023
1	Bantuan sumbangan Pengadaan motor dan mobil listrik untuk oranger	13	500.000.000	500.000.000	41.778.000
2	Penanaman Pohon Non Mangrove	13	300.000.000	300.000.000	2.350.000
3	Bantuan penyediaan solar cell untuk operasional KCP	13	250.000.000	250.000.000	76.402.760
4	Bantuan pembuatan Bank Sampah	13	200.000.000	200.000.000	-
5	Bantuan Penyediaan Sarana Air Bersih	13	200.000.000	200.000.000	180.622.905
6	Bantuan Pembuatan MCK	13	100.000.000	100.000.000	51.272.173
	Jumlah		**1.550.000.000**	**1.550.000.000**	**352.425.838**

Pada Program Prioritas di bidang Lingkungan sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 352.425.838,- atau sebesar 22,73 % dari RKA tahun 2023.

Program Prioritas di Bidang Pengembangan UMK

No	Program Prioritas	TPB	RKA Tahun 2023	RKA s.d Triw IV Tahun 2023	Realisasi s.d Triw IV Tahun 2023
1	Bantuan Pameran UMK	8	430.000.000	430.000.000	231.827.125
2	Bantuan Pelatihan UMK	8	890.000.000	890.000.000	813.930.851
3	Monitoring UMK Binaan	8	790.000.000	790.000.000	591.832.687
4	Bantuan sarana produksi UMK	8	250.000.000	250.000.000	94.385.291
5	Bantuan Pengurusan Sertifikasi	8	390.000.000	390.000.000	55.700.000
	Jumlah		**2.750.000.000**	**2.750.000.000**	**1.787.675.954**

Pada Program Prioritas di bidang Pengembangan UMK sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 1.787.675.954,- atau sebesar 65 % dari RKA tahun 2023.

KINERJA PROGRAM PUMK SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023

Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana

Pendanaan UMK dalam rangka pemberian bantuan pendanaan modal kerja bagi para UMK dilakukan kolaborasi dengan BRI yang bersumber dari dana bergulir dan jasa administrasi yang diterima dari Mitra Binaan.

Realisasi Sumber Dana dan Penggunaan Dana

No	Uraian	Program UMK		
		Anggaran 2023	Realisasi s.d Tw IV Tahun 2023	%
A	Dana Tersedia:			
1	Saldo Awal (SETARA KAS)	-	2.376.931.553	0,00
2	Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	22.500.000.000	14.801.547.317	65,78
3	Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	2.500.000.000	1.209.898.528	48,40
4	Pendapatan jasa giro bank	-	5.587.990	0,00
5	Pendapatan lainnya		6.447.284	0,00
6	Titipan Lainnya		1.150.466.013	
	Dana Tersedia (jumlah 1 s.d. 4)	25.000.000.000	19.550.878.685	78,20
B	Penggunaan Dana			
1	Penyaluran Pinjaman kepada Mitra			
2	Penyaluran Kolaborasi BRI	25.000.000.000	17.000.000.000	0,00
3	Piutang Lain-lain			
	Jumlah Penggunaan Dana (jumlah 1 s.d. 3)	25.000.000.000	17.000.000.000	68,00
	Sisa Saldo Akhir (A-B)	-	2.550.878.685	

Dana tersedia sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 19.550.878.685,- yang bersumber dari saldo awal tahun 2023 sebesar Rp 2.376.931.553,- pengembalian pinjaman mitra binaan sebesar Rp 14.801.547.317,- atau 65,78%, jasa administrasi sebesar Rp 1.209.898.528,- atau 48,40 % dan pendapatan jasa giro bank sebesar Rp 5.587.990,-.

Dana penyaluran kolaborasi ke BRI sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 yaitu sebesar Rp **17.000.000.000,-**

Sisa saldo kas dan setara kas s.d Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp **2.550.878.685,-.**

Laporan Keuangan PUMK
Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan Komparatif sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 seperti tabel berikut :

Laporan Posisi Keuangan Komparatif

URAIAN	RKA 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2023	Presentase Capaian	
	1	2	3	`3 : 1	`3 : 2
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	-	2,376.931.554	2.550.878.685	-	107,32%
Piutang Pinjaman Umum MB - Bersih	5.721.035.172	29.143.952.524	12.553.209.723	219%	43%
Piutang Pinjaman Khusus - Bersih	-			0%	0%
Piutang Lain-lain bersih	602.440.481	1.725.576.351	497.047.669	82,51%	28,80%
JUMLAH ASSET LANCAR	6.323.475.653	33.246.460.429	15.601.136.077	247%	47%
ASET TIDAK LANCAR				-	-
Aset Tetap Bersih	1	1	1	100%	100,00%
Aset Lain-lain				0,00%	0,00%
Asset tidak berwujud (SIM PKBL)	1	1	1	100,00%	100,00%
Piutang Bermasalah	81.355.195.788	83.721.080.406	83.619.365.739	102,78%	99,88%
Akum Penyusutan Piutang Bermasalah	(81.355.195.788)	(83.721.080.406)	(83.619.365.739)	102,78%	99,88%
Piutang Jangka Panjang	32.000.000.000	7.000.000.000	24.094.016.266	75,29%	344,20%
Jumlah Asset Lain-lain	32.000.000.001	7.000.000.001	24.094.016.267	75%	344%
JUMLAH ASSET TIDAK LANCAR	32.000.000.002	7.000.000.002	24.094.016.268	75,29%	344,20%
JUMLAH ASET	38.323.475.655	40.246.460.431	39.695.152.345	103,58%	98,63%
LIABILITAS DAN ASET NETO					
LIABILITAS					
Utang Lain-lain	100.450.899	169.042.390	90.979.720	90,57%	54%
Kelebihan Pembayaran Angsuran	298.829.824	404.365.111	431.032.945	144,24%	106,59%
JUMLAH LIABILITAS	399.280.723	573.407.501	522.012.665	130,74%	91,04%
ASET NETO					
Aset Neto Tidak Terikat	37.924.194.932	39.673.052.930	39.173.139.677	103,29%	98,74%
Aset Neto Terikat	-	-	-	-	-
JUMLAH ASET NETO	37.924.194.932	39.673.052.930	39.173.139.677	103,29%	98,74%
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	38.323.475.655	40.246.460.431	39.695.152.342	103,58%	98,63%

Berdasarkan data tabel di atas perbandingan realisasi kas dan setara kas sampai dengan Triwulan IV antara tahun 2022 dengan tahun 2023 sebesar 107,32 % yaitu realisasi tahun 2023 sebesar Rp 2.550.878.685,- dan tahun 2022 sebesar Rp 2.376.931.554,-.

Laporan Aktivitas

Laporan Aktivitas sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 seperti tabel dibawah ini :

Laporan Aktivitas

URAIAN	RKA 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2023	Presentase Capaian	
	1	2	3	`3 : 1	`3 : 2
PENDAPATAN					
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	2.500.000.000	1.554.873.778	1.303.914.794	52,16%	83,86%
Pemulihan cadangan penurunan nilai piu-tang pinjaman khusus					
Pendapatan Bunga		13.295.638	5.587.990	-	42,03%
Pendapatan Lain-lain		3.695.216	6.447.284	-	174,48%
JUMLAH PENDAPATAN	2.500.000.000	1.571.864.632	1.315.950.068	52,64%	83,72%
BEBAN					
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	980.290.001	431.339.450	1.815.863.320	185,24%	420,98%
Beban amortisasi aset tdk berwujud				0,00%	0,00%
Beban Hibah BRI				0,00%	0,00%
JUMLAH BEBAN	980.290.001	431.339.450	1.815.863.320	185,24%	420,98%
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT	1.519.709.999	1.140.525.182	(499.913.252)	(32,90%)	(43,83%)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	1.519.709.999	1.140.525.182	(499.913.252)	(32.90%)	(43,83%)
ASET NETO AWAL TAHUN	36.404.484.933	38.532.527.748	39.673.052.929	108,98%	102,96%
ASET NETO AKHIR TAHUN	37.924.194.932	39.673.052.930	39.173.139.677	103,29%	98,74%

Secara umum aset neto akhir tahun sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar Rp 39.173.139.677,- yang jika dibandingkan dengan RKA tahun 2023 sebesar Rp 37.924.194.932,- maka pencapaiannya sebesar 98,74 %. Pencapaian pendapatan Jasa Administrasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 52,16 % dari RKA Tahun 2023.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, seperti tabel di bawah ini:

Laporan Arus Kas

URAIAN	RKA 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2023	Presentase Capaian	
	1	2	3	3 : 1	3 : 2
AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan pengembalian piutang umum MB	22.275.000.000	18.058.442.198	14.673.164.818	65,87%	81,25%
Penerimaan pengembalian piutang khusus MB					
Penerimaan pengembalian piutang Bermasalah	225.000.000	89.436.668	101.714.665	45.21%	113,73%
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	2.500.000.000	1.559.208.955	1.209.898.528	0.48	77,60%
Pendapatan bunga jasa giro		3.695.216	5.587.990	0,00%	151,22%
Pendapatan lain-lain		13.295.638	6.447.284	-	48,49%
(Pembayaran) penerimaan kelebihan angsuran		(7.492.820)	26.667.834		(355,91%)
(Pembayaran) penerimaan premi asuransi penyaluran					0,00%
(Pembayaran) penerimaan utang lain-lain		130.825.758	(72.760.670)		(55,62%)
(Pembayaran) Piutang Lain-Lain		(62.362.666)	1.223.226.682		(1.961,47%)
Penyaluran Pinjaman Kemitraan secara Mandiri		(14.355.000.000)		0,00%	0,00%
Penyaluran Kerjasama BRI	(25.000.000.000)	(7.000.000.000)	(17.000.000.000)	68,00%	242,86%
Penyaluran dana pembinaan UMK					
				-	0,00%
KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS OPERASI (1)	-	(1.569.951.053)	173.947.131	-	(11,08%)
AKTIVITAS INVESTASI					
KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS INVESTASI (2)	-	-	-	-	0,00%
AKTIVITAS PENDANAAN					
Beban Hibah BRI *)				-	0,00%
KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS (3)	-			-	0,00%
				-	0,00%
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS (4=1+2+3)	-	(1.569.951.053)	173.947.131	-	(11,08%)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN (5)	-	3.946.882.607	2.376.931.554	-	60.22%
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN (6=4+5)	-	2.376.931.554	2.550.878.685	-	107.32%

Berdasarkan tabel di atas arus kas dari pendanaan UMK sangat besar dipengaruhi oleh adanya kolektabilitas piutang yang diterima atas angsuran dari UMK mitra binaan.

Kolektibilitas Piutang

Kolektabilitas piutang atas pendanaan UMK sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 seperti tabel di bawah ini:

Kolektabilitas Piutang dan Piutang Bermasalah

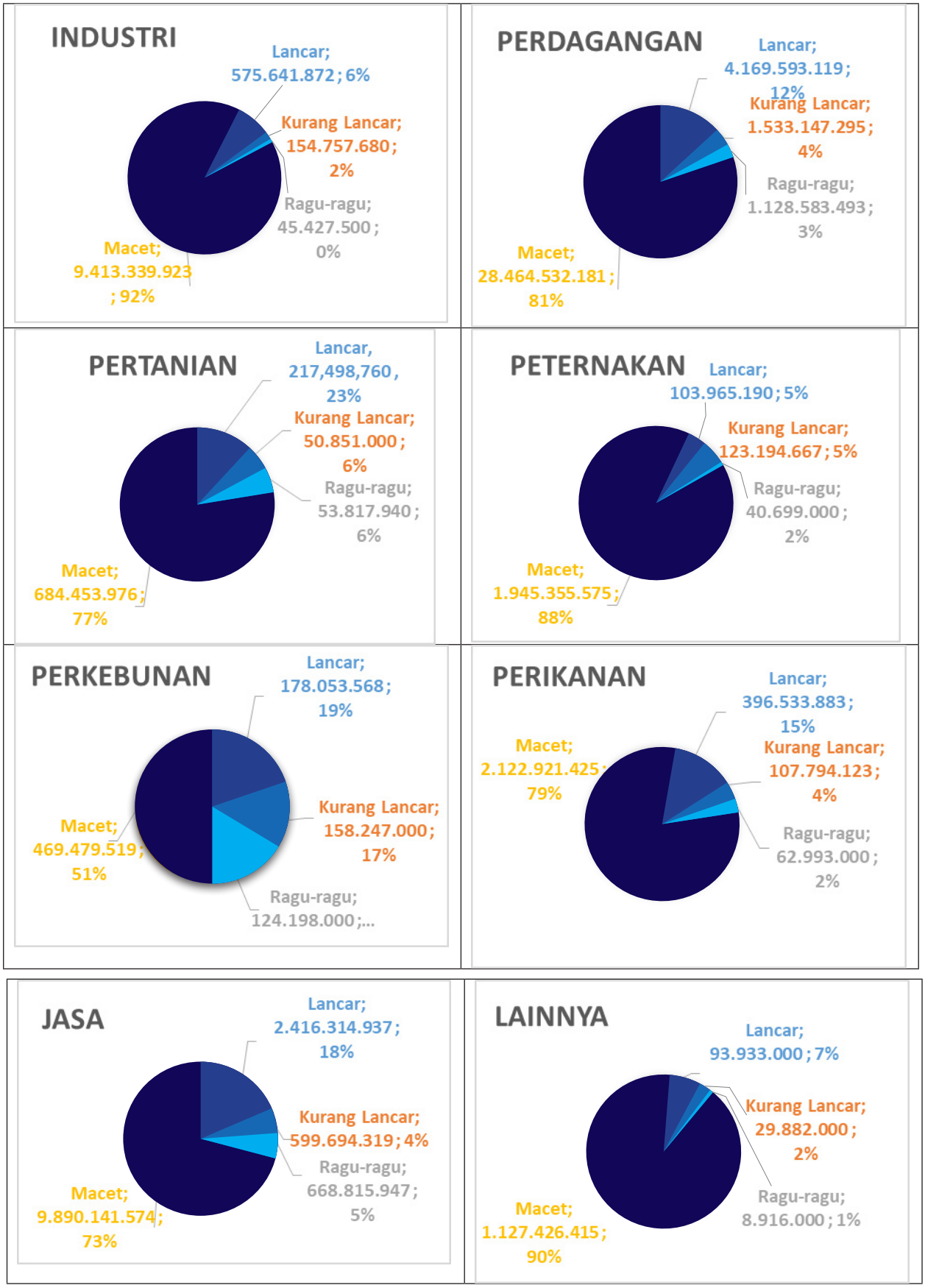
URAIAN	RKA 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2023	Presentase Capaian	
	1	2	3	`3 : 1	`3 : 2
1. Kolektibilitas Piutang					
Lancar	3.760.300.422	22.181.754.221	8.030.985.381	213,57%	36,21%
Kurang Lancar	1.568.963.254	5.505.350.529	2.757.568.084	175,76%	50,09%
Ragu-ragu	564.789.325	1.867.582.851	2.133.450.880	377,74%	114,24%
Macet	40.202.880.092	52.158.132.150	54.117.650.588	134,61%	103,76%
Jumlah 1	46.096.933.093	81.712.819.751	67.039.654.933	145,43%	82,04%
2. Piutang Bermasalah	81.355.195.788	83.721.080.405	83.619.365.740	102,78%	99,88%
Jumlah (1+2)	127.452.128.881	165.433.900.156	150.659.020.673	118,21%	91,07%

Pencapaian kolektabilitas piutang umum dan piutang bermasalah sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 sebesar 118,21 % dari RKA tahun 2023 dan 91,07 % dari realisasi untuk periode yang sama tahun 2022.

Kolektibilitas Piutang Umum berdasarkan Sektor Usaha

No	Sektor	Lancar		Kurang lancar		Ragu-Ragu		Macet		Jumlah	
		Jumlah MB	Rp	Jumlah MB	Rp	Jumlah MB	Rp	Jumlah MB	Rp	Jumlah MB	Rp
1	Industri	38	575.641.872	7	154.757.680	2	45.427.500	893	9.413.339.923	940	10.189.166.975
2	Perdagangan	259	4.169.593.119	80	1.533.147.295	39	1.128.583.493	2.824	28.464.532.181	3.202	35.295.856.088
3	Pertanian	7	96.949.812	2	50.851.000	2	53.817.940	79	684.453.976	90	886.072.728
4	Peternakan	16	103.965.190	4	123.194.667	3	40.699.000	171	1.945.355.575	194	2.213.214.432
5	Perkebunan	15	178.053.568	10	158.247.000	7	124.198.000	41	469.479.519	73	929.978.087
6	Perikanan	17	396.533.883	4	107.794.123	2	62.993.000	153	2.122.921.425	176	2.690.242.431
7	Jasa	108	2.416.314.937	37	599.694.319	16	668.815.947	965	9.890.141.574	1.126	13.574.966.777
8	Lainnya	4	93.933.000	2	29.882.000	1	8.916.000	105	1.127.426.415	112	1.260.157.415
Jumlah		464	8.030.985.381	146	2.757.568.084	72	2.133.450.880	5.231	54.117.650.588	5.913	67.039.654.933

Diagram Kolektibilitas Piutang Umum s.d Triwulan IV tahun 2023 berdasarkan sektor usaha



KPI Program TJSL sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Bobot	Skor	Nilai
1.	Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSL dengan metode *Social Return on Investment* (SROI)	a. Motor Listrik Pengantar	6%	100	6
		b. Solar Cell dan LED Kantor Pos	10%	100	10
		c. Tanam Pohon (*diganti Program Ketahanan Pangan kerjasama PT Pos Indonesia-UNPAD)	4%	100	4
2.	Menetapkan kebijakan *levelling* unit kerja TJSL menjadi setingkat BOD-1 atau disesuaikan dengan hasil kajian terkait hal tersebut	BOD-1 (dalam kajian) Dmk Surat Kementrian BUMN no S-683/MBU/10/2022 tgl 24-10-2022	20%	100	20
3.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam program TJSL, termasuk untuk pemenuhan pengisian sistem informasi berbasis teknologi informasi Kementerian BUMN	1. Nota Dinas Elektronik	5%	100	5
		2. Sistem Informasi Manajemen (SIM) TJSL	5%	100	5
		3. PORTAL BUMN	5%	100	5
		4. Prognosa dan Laporan Keuangan Audited	5%	0	0
4.	Meningkatkan kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan program TJSL, dengan tujuan untuk meningkatkan dampak positif program	1. Kolaborasi BUMN Program Vaksin Booster Sinopharm	4%	100	4
		2. Kolaborasi BUMN Program Kewirausahaan Yayasan BUMN	4%	100	4
		3. Kolaborasi BUMN Doorprize Acara Safety Riding Jasa Marga Bandung	4%	100	4
		4. Kolaborasi BUMN Program Mudik Gratis	4%	100	4
		5. Kolaborasi BUMN Pembuatan Sumur Bor Air Bersih, Ds Aikprapa Lombok Timur	4%	100	4
5.	Melibatkan peran serta karyawan secara aktif dalam program TJSL	Program Ramadhan Sembako Murah dan Takjil Gratis, Program Pelatihan UMK	20%	100	20
		JUMLAH			95

Pembinaan UMK yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 sebagai berikut:

- Kegiatan monitoring dilakukan kepada 1.265 Mitra Binaan di 26 Unit TJSLD selama Triwulan IV tahun 2023.
- Anggaran atas pelaksanaan kegiatan monitoring, pelatihan dan pameran sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp 1.787.675.954,- dan realisasi program bantuan lain (pelibatan di masyarakat) sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp 8.626.201.833,- yang diambil dari anggaran perusahaan.
- Mitra binaan naik kelas sebanyak 50 Mitra binaan.

PENERAPAN HAK AZAZI MANUSIA

Komitmen Dan Kebijakan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Komitmen perusahaan terhadap hak asasi manusia menjadi bagian dalam penerapan nilai-nilai dan budaya perusahaan serta termaktub dalam Pedoman Perilaku Perusahaan. Kebijakan perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap hak asasi manusia termaktub dalam beberapa peraturan perusahaan terkait dengan pengelolaan SDM sebagai berikut:

1. Pedoman Etika Perusahaan;
2. Budaya Perusahaan;

Rumusan Dan Rencana Kegiatan

Dalam perusahaan, kewajiban terkait hak asasi manusia yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), mempromosikan (*to promote*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi para karyawan. Tanggung jawab sosial terhadap Hak Asasi Manusia yang diterapkan antara lain melalui tindakan:

1. Tidak mempekerjakan pekerja anak;
2. Tidak terdapat kerja paksa;
3. Menerapkan perlakuan adil dan setara;
4. Melayani dengan kepedulian dan empati;
5. Membangun lingkungan kerja yang transparan dan terbuka;
6. Menerima masukan dan melakukan introspeksi;
7. Menghindari tindak pelecehan;
8. Menjaga hak privasi dan kerahasiaan;
9. Memelihara kesehatan, keselamatan dan keamanan tempat kerja.

OPERASI YANG ADIL

Praktik operasi yang adil merupakan perilaku beretika dalam transaksi organisasi dengan organisasi lain. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sebagaimana ditetapkan dalam UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) serta menjunjung prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel.

Rumusan Dan Rencana Kegiatan

Sebagai landasan penerapan praktik operasi yang adil Pos Indonesia menjalankan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan bagi karyawan diwujudkan dalam pencapaian karir, pengembangan diri, serta *reward* dan punishment tanpa memandang unsur SARA dan jenis kelamin dengan memperhatikan kinerja dan kompetensi masing-masing karyawan.

Kegiatan Yang Dilaksanakan Dan Capaiannya

Dalam pelaksanaannya, landasan penerapan praktik operasi yang adil diantaranya adalah kebijakan perusahaan terkait pengadaan barang dan jasa, etika usaha dan etika individu yang tertuang dalam naskah *code of conduct*, budaya perusahaan. Dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, Pos Indonesia melakukan secara terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat dan wajar diantara penyedia barang dan jasa dan memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Perusahaan juga tunduk dan taat terhadap pelaksanaan peraturan Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat laporan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang diterima Perseroan, khususnya dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Sumber daya manusia merupakan aset penting yang dimiliki perusahaan dalam mengimplementasikan kebijakan manajemen untuk mencapai visi dan misi perusahaan. kesehatan dan keselamatan kerja (K3) karyawan harus selalu terjamin dan terlindungi sehingga peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan hidup karyawan akan terjaga. Oleh sebab itu, komitmen untuk mematuhi persyaratan peraturan Perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait kesehatan dan keselamatan kerja menjadi fokus perusahaan dalam setiap kegiatannya.

Komitmen dan Kebijakan

Sebagai salah satu komitmen perusahaan dalam pengelolaan K3 adalah untuk menjamin terciptanya kondisi kerja yang sehat, aman, nyaman dan produktif. Oleh karena itu, Perusahaan terus berupaya melakukan langkah dan strategi yang tepat dalam menciptakan iklim kerja yang diharapkan serta menurunkan risiko di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut kebijakan yang diterapkan:

1. Manajemen Pos Indonesia menghormati dan mengakui hak-hak pribadi karyawan, tidak melakukan diskriminasi atas dasar apapun dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk berkembang dan memberikan yang terbaik bagi perusahaan.
2. Hak dan kewajiban karyawan dijamin oleh Perusahaan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

3. Manajemen Pos Indonesia memberikan kebebasan berorganisasi PT Pos Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perusahaan selalu berupaya menjaga dan menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi karyawan.
5. Pos Indonesia berkewajiban melaksanakan praktek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh unit kerjanya dan menjamin hak karyawan untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat, moral dan ketentuan yang berlaku.
6. Pos Indonesia berkomitmen membangun *System* Manajemen K3 dengan menetapkan Keputusan Direksi Nomor: KD.64/DIRUT/0822 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Direksi PT Indonesia (Persero) Nomor: KD. 77/DIRUT/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang menetapkan Bagian Remunerasi mengelola Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
7. Pos Indonesia juga berupaya mendapatkan pengakuan secara internasional melalui sertifikasi ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018 yang diawali dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 2826/DIR-2/1222 tentang Satuan Tugas Sertifikasi ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Pusat.

Kegiatan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Lingkungan Dalam setiap aktivitas kerja operasionalnya, Pos Indonesia senantiasa memperhatikan dan melaksanakan aspek yang berkaitan dengan K3 dan Lingkungan. Sepanjang tahun 2023, kegiatan K3 dan Lingkungan yang dilaksanakan meliputi:

1. Penyediaan alat perlindungan diri dan alat pemadam kebakaran.
2. Melakukan tera ulang secara berkala terhadap alat pemadam kebakaran yang ada, sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Membuat dan memasang rambu-rambu berupa anjuran dan peringatan di setiap tempat di Kantor Regional Pos dan Kantor Pos serta di tempat-tempat yang rawan kecelakaan guna mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
4. Menyediakan biaya khusus untuk K3 dan biaya kesehatan karyawan.
5. Menyediakan pelayanan kesehatan di setiap Kantor Regional Pos/Kantorpos atau pun dengan cara bekerjsa sama dengan rumah sakit atau klinik setempat.
6. Mengikutsertakan semua karyawan dalam program Jaminan Asuransi Tenaga Kerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pelayanan Kesehatan. Pos Indonesia lebih mengedepankan tindakan preventif dalam melaksanakan K3, melalui pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan membekali tenaga kerja dengan pengetahuan/ konsep K3 sebelum memulai pekerjaan.

7. Meningkatkan pemahaman karyawan dan keluarga akan kesehatan dan pola hidup sehat, perusahaan memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai pencegahan penyakit demam berdarah, kesehatan gigi & mulut serta pemberian edukasi kesehatan sesuai penyakit yang diderita oleh pasien.
8. Pos Indonesia juga memberikan perhatian khusus pada pembinaan rohani yang diyakini dapat mendorong sikap positif pada diri karyawan.
9. Memberikan dukungan dan arahan di berbagai kegiatan Klub olahraga dan Hobi, diantaranya: Ikatan sepeda Pos Indonesia, Ikatan Motor Pos Indonesia, Klub tennis lapangan, Klub sepak bola, klub futsal,klub bulutangkis dan lain-lain.

Dampak Terkait Praktik K3

Implementasi yang baik dalam praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja menjadi salah satu penentu kinerja sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Praktik yang baik dalam kegiatan kerja seperti :

1. Kesetaraan gender dan kesempatan kerja, Karyawan Pos Indonesia didominasi oleh karyawan laki-laki, yang mencapai 83%. Hal ini tidak terkait dengan adanya diskriminasi gender, namun lebih banyak karena karakteristik kegiatan operasional dan lokasi kantor pos yang sebagian besar berada di remote area. Dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penjenjangan karir karyawan, dan sistem remunerasi, Perusahaan tidak melakukan kebijakan yang diskriminatif. Sepanjang tahun 2023, tidak ada laporan terjadinya tindak diskriminasi yang terkait dengan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, afiliasi politik, kebangsaan maupun status sosial di semua unit kerja Perusahaan. Dengan demikian, tidak terdapat dampak negatif terhadap operasional Perusahaan terkait dengan kesetaraan gender dan kesempatan kerja sehingga membuat lingkungan kerja menjadi sehat.
2. Sarana dan keselamatan kerja, Pos Indonesia berkewajiban untuk melindungi keselamatan tenaga kerjanya, terutama yang lokasi pekerjaannya atau sifat pekerjaannya memiliki risiko tinggi. Perusahaan telah menyediakan alat pelindung diri, meliputi helm, jaket dan tas pengantar, sarung tangan, serta masker bagi Karyawan yang bertugas di bagian Antaran pos dan Pos Keliling Desa (PKD). Perusahaan juga memasang rambu-rambu K3 sebagai rambu peringatan, serta bendera dan spanduk K3. Standar yang ditetapkan perusahaan terbukti telah membuat lingkungan kerja menjadi sehat dan produktifitas karyawan menjadi lebih baik sehingga secara umum akan membuat perusahaan menjadi lebih produktif dan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Dampak dari semakin baiknya standar atas sarana dan keselamatan kerja, pada tahun 2023 penanganan atas kecelakaan kerja menjadi semakin baik.

3. Remunerasi
Sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang jasa dengan Kantor Cabang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, Pos Indonesia memiliki tanggungjawab pada masyarakat sesuai dengan visi dan misi. Dengan sebaran kantor yang meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, Pos Indonesia tunduk dan patuh pada ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagai patokan gaji terendah. Dengan demikian, Pos Indonesia menjamin bahwa setiap karyawan baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan hak yang sama dan remunerasi yang layak.

4. Mekanisme pengaduan masalah kerja.
Permasalahan ketenagakerjaan adalah salah satu dampak dari operasi perusahaan, Pos Indonesia terus berupaya meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi, untuk itu Pos Indonesia dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan selalu mengutamakan pendekatan humanis dan kekeluargaan. Namun demikian tetap disediakan sarana bagi karyawan yang ingin melaporkan pengaduan masalah ketenagakerjaan melalui *Employee Service Centre* (ESC) dengan Nomor Telepon yang bisa dihubungi : 0813 2300 0802.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN

Sesuai dengan karakteristik industrinya, pelanggan Pos Indonesia terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Pelanggan Ritel adalah masyarakat perorangan yang menggunakan layanan jasa Pos Indonesia. Karakteristik pelanggan ini biasanya memanfaatkan jasa pos tidak secara rutin dan transaksi dilakukan di loket-loket Kantor Pos/ Agen Pos.
2. Pelanggan Korporat adalah pelanggan yang menggunakan Jasa Pos yang bertindak untuk dan atas nama perusahaannya, dengan frekuensi penggunaan Jasa Pos cenderung rutin dalam setiap bulan, yang dikuatkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan memiliki *Account* di Kantor Pos (Giro Pos), misalnya antara lain : PT Taspen, Asabri, Pertamina, Pegadaian, Telkom, PLN, PDAM dll.
3. Pelanggan Pemerintah dan PerBankan, antara lain: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Bank Mandiri, BRI, BTN, dll.

Kebijakan terhadap Pelanggan

1. Perusahaan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Perusahaan memenuhi komitmen nya dari segi tarif, kualitas, waktu tempuh kiriman, jaminan produk maupun layanan purna jual sesuai ketentuan perusahaan, peraturan dan perundangan yang berlaku;
3. Perusahaan memberikan layanan yang sama kepada semua pelanggan;
4. Manajemen perusahaan tidak diperkenankan memberi atau menerima segala bentuk imbalan, baik langsung maupun tidak langsung;

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap konsumen, Pos Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk menunaikan tanggung jawab kepada konsumen/pelanggan. Bagi Pos Indonesia kepuasan pelanggan adalah bentuk pelayanan yang fundamental dan penting. Pos Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan program-program kepuasan pelanggan dengan mengkampanyekan pentingnya pelayanan prima (*Service Excellence*) dalam budaya Perusahaan

Kebijakan terhadap Pihak Ketiga

1. Perusahaan memperlakukan pihak ketiga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perkembangan bisnis Perusahaan;
2. Perusahaan memandang pihak ketiga sebagai mitra sejajar, dengan asas kebersamaan, keterbukaan dan kejujuran;

Program Kerja

Sebagai pelaksanaan dari tanggungjawab Pos Indonesia kepada konsumen, Pos Indonesia telah melaksanakan kegiatan berikut:

1. Pos Indonesia telah mengembangkan Pusat Informasi dan Pengaduan Pelanggan di bagian *Customer Service* dan via telpos ke Halo Pos 161 di setiap Kantor Pos, di samping melalui aplikasi e-Post pada *website* (www.posindonesia.co.id).
2. Melakukan Pengukuran Kepuasan Pelanggan untuk mengetahui "*Voice of Customer*", setiap tahun menyelenggarakan Survei Kepuasan Pelanggan secara rutin. Hasil dari survei tersebut dievaluasi dan dijadikan sebagai feedback oleh pihak manajemen untuk meningkatkan kinerjanya. Indeks kepuasan pelanggan menggunakan skala 10-100, diwakili beberapa produk yang intensitas penggunaannya tinggi.
3. Upaya Meningkatkan Pelayanan Perusahaan senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dan berusaha meningkatkannya melalui berbagai program kegiatan, di antaranya:

    a. Mengadakan temu pelanggan (*Customer gathering*) pada saat *event-event* tertentu.
    b. Memberikan izin kepada pelanggan untuk audit mutu produk.
    c. Berkoordinasi dengan lembaga lain secara formal melalui seminar atau forum terbuka maupun koordinasi non-formal.
    d. Bekerjasama dengan berbagai media komunikasi, baik skala nasional maupun lokal, untuk menginformasikan berbagai produk dan layanan Pos Indonesia.

Dampak Terkait Kegiatan Perlindungan Konsumen

1. Kesehatan dan Keselamatan Konsumen
   Pos Indonesia telah memiliki Bagian *Quality Assurance* dan Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu untuk menangani pengendalian mutu layanan, dengan selalu mengikuti *Standard Operational Procedure* sehingga tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen dan pekerja. Pos Indonesia berupaya untuk menaati aturan kelayakan produk yang dijual, sehingga tidak pernah menghadapi adanya tuntutan pelanggaran peraturan atau kode etik penjualan produk. Selama 2022, tidak terdapat adanya pelanggaran peraturan perundangan-undangan maupun ketentuan lain yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen atas penggunaan layanan pos. Dengan demikian, prosedur kerja yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan konsumen yang dijalankan telah membuat konsumen merasa aman dan nyaman menggunakan jasa yang disediakan oleh perusahaan.

2. Informasi Produk
   Jenis layanan yang diberikan Pos Indonesia merupakan produk jasa, sebagai solusi bagi kebutuhan konsumen, yang disajikan dalam beberapa level layanan, yaitu standar, prioritas, dan perlakuan khusus. Layanan dengan level standar dan prioritas dikirim dalam bentuk *mass product*, sedangkan layanan dengan perlakuan khusus dikirim sesuai dengan permintaan pelanggan (*negotiable*) yang tertuang dalam perjanjian dengan pelanggan. Informasi produk yang berkaitan dengan jaringan layanan, bentuk dan ukuran, jadwal keberangkatan dan waktu sampainya kiriman, serta tarif dituangkan pada brosur produk, papan pengumuman di ruang umum (vestibule) di setiap Kantorpos, dan website (www.posindonesia.co.id), serta dapat dilakukan jejak lacak (track and trace) oleh pelanggan melalui aplikasi PosAja! Yang dapat di unduh pada smartphone pelanggan juga pada www.posindonesia.co.id membuat konsumen dengan mudah memahami jenis layanan yang diberikan perusahaan sehingga dapat menjadi solusi bagi pelanggan dalam memilih layanan yang diberikan, dalam jangka panjang akan menjadi nilai tambah perusahaan di mata konsumen.

3. Pelayanan Pengaduan dan Klaim Pelanggan
   Pos Indonesia telah mengembangkan Pusat Informasi dan Pengaduan Pelanggan melalui petugas *Customer Service*, Kotak saran dan Halo Pos 161 di setiap Kantorpos, Pos Indonesia selalu mengutamakan prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam melakukan setiap transaksi dengan pelanggan. Perusahaan berupaya memberikan tanggapan yang cepat apabila ada pengaduan dan ketidakpuasan dari pelanggan. Layanan pengaduan kepada Perusahaan dapat disampaikan melalui telepon, surat, email atau tatap muka langsung ke bagian terkait di Kantorpos, Kantor Regional Pos, dan Kantor Pusat. Berdasarkan hasil evaluasi internal, pengaduan pelanggan sebagian besar dalam bentuk klaim keterlambatan dalam penyampaian kiriman. Pos Indonesia berupaya menyelesaikan klaim mutu, sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga permasalahan dengan pelanggan yang dimaksud dapat segera diselesaikan. Di samping itu Pos Indonesia selalu berusaha untuk mewujudkan "*zero-defect*" dalam pelayanan.

PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

1. Komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi. Dalam upaya pencegahan *fraud* sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pos Indonesia Nomor 387/ Dekom/1121 dan Nomor KD.108/Dirut/1121 tentang Kebijakan *Anti-Fraud* di lingkungan PT Pos Indonesia (persero) dilakukan melalui Sosialisasi dan pelatihan *Anti-Fraud*, yaitu Perusahaan secara proaktif melakukan sosialisasi melalui berbagai sarana baik tatap muka, *e-learning* maupun pelatihan berbasis aplikasi telepon genggam dan menyelenggarakan pelatihan *Anti-Fraud* secara berkala untuk wajib diikuti oleh seluruh insan Pos termasuk pihak eksternal yang memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan.

2. Pelatihan mengenai anti korupsi

Pelatihan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Anti *Fraud* dan *Whistleblowing System*(WBS)



Gambar :
Gedung Heritage Kantor Pusat Cilaki

7

Lampiran

- Laporan Keuangan Konsolidasi
- Laporan Audit TJSL



Laporan Keuangan Konsolidasi



PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut

Serta Laporan Auditor Independen

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES

Consolidated Financial Statements
As of December 31, 2023 and 2022
and For The Years
Then Ended

And Independent Auditor's Report

PT POS INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA

PT POS INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES

Daftar Isi

Halaman/
Pages

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut		***Consolidated Financial Statements As of December 31, 2023 and 2022 and For the Years Then Ended***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-2	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6-219	*Notes to Consolidated Financial Statements*

POS IND
Logistik Indonesia

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA/
DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: *We, the undersigned:*

Nama	:	Faizal Rochmad Djoemadi	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Jl. Banda No. 73 Bandung	:	*Office Address*
Alamat Rumah	:	Jl. Terusan Sutami I No. 6 RT/RW 005/003, Sukagalih, Sukajadi, Bandung, Jawa Barat	:	*Domicile Address*
Nomor Telepon	:	022-4206195	:	*Telephone Number*
Jabatan	:	Direktur Utama/ *President Director*	:	*Position*
Nama	:	Endy P.R. Abdurrahman	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Jl. Banda No. 73 Bandung	:	*Office Address*
Alamat Rumah	:	Jl. Durian Barat III No. 3 RT/RW 006/004, Jagakarsa, Jakarta Selatan	:	*Domicile Address*
Nomor Telepon	:	022-4206195	:	*Telephone Number*
Jabatan	:	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/ *Finance and Risk Management Director*	:	*Position*

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya.

State that:

1. *We are responsible in the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries;*
2. *The consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *The consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact; and*
4. *We are responsible for PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *This statement letter is made truthfully.*

Bandung, 26 Maret 2024 / *26 March 2024*



Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur Utama/ *President Director*

Endy P.R. Abdurrahman
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Finance and Risk Management Director

PT Pos Indonesia (Persero)
Graha Pos Indonesia
Jalan Banda Nomor 30 Bandung 40115
Telp. 022-4213640, 4213641, 4213646
Faks. 022-4267725, 022-4267744
http://www.posindonesia.co.id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

No. : 00077/2.1127/AU.1/05/0797-1/1/III/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT POS INDONESIA (PERSERO)

To the Shareholders, Boards of Commisioners, and Directors
PT POS INDONESIA (PERSERO)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian nya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statement in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

The original report included herein is in the Indonesian language

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these

Penyisihan untuk Kerugian Kredit Ekspektasian atas Piutang

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup mencatat piutang usaha bersih sebesar Rp607.499.753.460, yang mencakup 4,45% dari total aset Grup, dengan total cadangan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp222.097.356.333.

Sesuai dengan PSAK 71 Instrumen Keuangan, Grup menentukan kerugian kredit ekspektasian dengan menerapkan pendekatan yang disederhanakan, yang menggunakan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur dengan basis masa depan. Tingkat kerugian kredit ekspektasian adalah berdasarkan pengalaman gagal bayar dari kelompok segmen pelanggan yang memiliki resiko kredit yang sama, disesuaikan dengan informasi masa depan. Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 3 di laporan keuangan konsolidasian, penilaian ini melibatkan pertimbangan manajemen dan estimasi yang signifikan.

Pengungkapan Grup mengenai piutang usaha dijelaskan dalam Catatan 6 atas laporan keuangan konsolidasian.

Alowance For Expected Credit Losses (ECL) For Receivables

As of December 31, 2023, the Group has net trade receivables amounted to Rp607,499,753,460, which accounted for approximately 4.45% of the Group total assets, with total corresponding allowance for expected credit losses of Rp222,097,356,333

In accordance with SFAS 71 Financial Instruments, the Group determines ECL by applying the simplified approach, which uses a lifetime ECL on a forward looking basis. The expected credit loss rates are based on historical defaults rates for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics, adjusted with forward looking information. As disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements, these assessments involve significant management judgment and estimates.

The Group disclosures on the trade receivables are set out in Note 6 to the consolidated financial statements.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama	***How our audit addressed the Key Audit Matters***
• Kami telah melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Grup yang relevan sehubungan dengan penyisihan kredit ekspektasian atas piutang.	• *We performed procedures to understand and evaluate the design and implementation of the Group relevant controls in respect of the allowance for expected credit losses of the receivables.*
• Kami mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam model kerugian kredit ekspektasian dan memeriksa keakuratan matematis dari perhitungan tersebut.	• *We evaluated accuracy and completeness of data used in the expected credit loss model and checked mathematical accuracy of the calculation.*
• Kami mengevaluasi kewajaran dari model kerugian kredit ekspektasian yang diadopsi manajemen dan asumsi utama (yaitu definisi gagal bayar, pengelompokan pelanggan, karakteristik resiko kredit, dan informasi masa depan) yang digunakan manajemen untuk mengestimasi cadangan kerugian kredit ekspektasian.	• *We evaluated the reasonableness of key assumptions (i.e. definition of default, grouping of various customer segments, credit risk characteristics, and forward looking information) used by management to estimate the allowance for expected credit losses.*
Penilaian Properti Investasi Pada Nilai Wajar	***Valuation Of Investment Properties At Fair Value***
Grup mencatat properti investasinya dengan model nilai wajar. Properti investasi yang terdiri dari Tanah dan Bangunan, dilaporkan sebesar Rp6.586.760.726.000 yang mencakup 48,22% dari total aset Grup. Penilaian aset ini memerlukan bantuan penilai eksternal yang perhitungannya dilakukan dengan pendekatan biaya. Hal ini penting bagi audit kami karena melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan.	*The Group accounts for its investment properties using fair value model. Investment properties consist of Land and Building are reported at Rp6,586,760,726,000 which represents 48.22% of the Group's total assets. The valuation of these assets requires assistance of external appraisers whose assessment is carried out using cost approach. This matter is significant to our audit because it involves significant judgment and estimates.*
Pengungkapan yang berkaitan dengan jumlah nilai wajar disajikan dalam Catatan 11 atas laporan keuangan konsolidasian.	*The disclosures relating to fair value amounts are included in Note 11 to the consolidated financial statements.*

The original report included herein is in the Indonesian language

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama

Kami menelaah ruang lingkup, dasar, metodologi, dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penilai eksternal yang kualifikasi profesional dan objektivitasnya juga dipertimbangkan. Kami membandingkan informasi relevan yang mendukung harga pasar properti serupa dan penyesuaian yang dilakukan terhadap harga pasar. Kami juga meninjau pengungkapan sehubungan dengan nilai wajar aset tersebut.

How Our Audit Addressed The Key Audit Matters

We reviewed the scope, bases, methodology, and results of the work done by external appraisers whose professional qualifications and objectivity were also taken into consideration. We compared the relevant information supporting to the market price of similar properties and the adjustments made to the market price. We also reviewed disclosures with respect to the fair value of these assets.

Hal Lain

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan tersebut pada tanggal 22 Februari 2023.

Other Matters

The consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2022 and for the year then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on those statements on February 22, 2022.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statement and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain dan kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidak konsitensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materiality inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materiality misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

The original report included herein is in the Indonesian language

Tanggung Jawab Manajemen Dan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Responsibilities Of Management And Those Charged With Governance For The Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Auditor's Responsibilities For The Audit Of The Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's Responsibilities For The Audit Of The Consolidated Financial Statements

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

The original report included herein is in the Indonesian language.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan suatu opini audit atas laporan keuangan konsolidasian . Kami bertanggung jawab atas arah, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an audit opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse concequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO

00077

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO Registered Public Accountants

Leknor Joni, CPA
No. Ijin AP. 0797 / *License No. AP. 0797*

26 Maret 2024 / *March 26, 2024*

PT POS INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT POS INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
ASET				***ASSETS***
Aset Lancar				***Current Assets***
Kas dan Setara Kas	5, 26, 28, 29	2.653.918.421.743	2.301.803.310.923	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha - Bersih	6, 28, 29	385.402.397.127	323.084.646.578	*Trade Receivable - Net*
Persediaan	7	43.640.166.880	49.902.354.344	*Inventories*
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	8, 29, 28	930.909.600.985	253.959.319.110	*Accrued Revenues*
Pajak Dibayar di Muka	15.a	592.283.336	1.467.275.200	*Prepaid Taxes*
Aset Lancar Lainnya:				*Other Current Assets:*
Piutang Layanan Jasa Keuangan	9.a, 28, 29	880.739.688.637	407.714.729.112	*Receivable from Financial Services*
Lainnya	9.b, 28	477.506.326.678	285.355.865.077	*Others*
Jumlah Aset Lancar		**5.372.708.885.386**	**3.623.287.500.344**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar				***Non-Current Assets***
Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan	15.f	52.552.484.634	42.190.455.674	*Estimated Claim for Tax Refund*
Aset Tetap - Bersih	10	1.035.327.898.488	910.175.874.031	*Fixed Assets - Net*
Properti Investasi	11	6.586.760.726.000	6.033.841.106.700	*Investment Properties*
Aset Takberwujud - Bersih	12	111.965.551.053	60.519.724.998	*Intangible Assets - Net*
Aset Pajak Tangguhan	15.d	388.117.276.057	373.064.909.800	*Deferred Tax Assets*
Aset Tidak Lancar Lainnya	13, 28, 29	111.406.425.490	95.235.284.322	*Other Non-Current Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**8.286.130.361.722**	**7.515.027.355.525**	***Total Non-Current Assets***
JUMLAH ASET		**13.658.839.247.108**	**11.138.314.855.869**	***TOTAL ASSETS***

PT POS INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT POS INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas Jangka Pendek				***Current Liabilities***
Utang Usaha	14, 28, 29	474.354.916.682	480.980.837.205	*Trade Payables*
Utang Pajak	15.b	60.569.447.017	35.841.316.974	*Taxes Payable*
Utang Lain-lain	16, 28, 29	753.828.360.808	745.827.850.067	*Other Payables*
Pinjaman Bank Jangka Pendek	17, 28, 29	2.285.604.000.000	770.000.000.000	*Short-Term Bank Loans*
Pinjaman Jangka Panjang Jatuh Tempo				*Current Maturities of*
Dalam Waktu Satu Tahun:				*Long-Term Loans:*
Pinjaman Jangka Menengah	18.c, 28, 29	323.361.458.333	--	*Medium Term Notes*
Pinjaman Bank	17.a, 28, 29	--	34.000.000.000	*Bank Loans*
Liabilitas Sewa	18.b, 28, 29	7.734.098.789	38.048.921.961	*Lease Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**3.905.452.281.629**	**2.104.698.926.207**	***Total Current Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang				***Non-Current Liabilities***
Pinjaman Jangka Panjang-Setelah Dikurangi				*Long-Term Loans-Net of*
Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:				*Current Maturities:*
Pinjaman Jangka Menengah	18.c, 28, 29	--	321.573.958.333	*Medium Term Notes*
Obligasi	18.c, 28, 29	495.100.000.000	492.650.000.000	*Bonds*
Pinjaman Bank	18.a, 28, 29	--	53.500.000.000	*Bank Loans*
Liabilitas Sewa	18.b, 28, 29	15.194.867.976	6.431.123.909	*Lease Liabilities*
Liabilitas Imbalan Kerja	19	1.108.026.778.901	1.209.887.794.624	*Employee Benefits Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**1.618.321.646.877**	**2.084.042.876.866**	***Total Non-Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**5.523.773.928.506**	**4.188.741.803.073**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal Saham -				*Share Capital -*
Nilai Nominal Rp1.000.000				*Par Value Rp1,000,000*
per Lembar Saham				*per Share*
Modal Dasar 1.500.000 Lembar Saham				*Authorized Capital 1,500,000 Shares*
Modal Ditempatkan dan				*Capital Issued and*
Disetor Penuh Sebesar				*Fully Paid*
455.023 Lembar Saham	20.a	455.023.000.000	455.023.000.000	*455,023 Shares*
Tambahan Modal Disetor	20.b	2.344.427.566	2.344.427.566	*Additional Paid-In Capital*
Saldo Laba:				*Retained Earnings:*
Telah Ditentukan Penggunaannya		3.264.314.544.470	2.613.945.107.772	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaannya		755.630.126.731	650.369.436.698	*Unappropriated*
Komponen Ekuitas Lainnya	20.c	3.702.780.917.128	3.245.449.288.786	*Other Equity Component*
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		**8.180.093.015.895**	**6.967.131.260.822**	***Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity***
Kepentingan Non-Pengendali	20.d	(45.027.697.293)	(17.558.208.026)	*Non-Controlling Interest*
JUMLAH EKUITAS		**8.135.065.318.602**	**6.949.573.052.796**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**13.658.839.247.108**	**11.138.314.855.869**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
PENDAPATAN	21	5.479.121.136.675	4.618.390.887.600	***REVENUES***
BEBAN POKOK LAYANAN	22	(3.879.740.711.952)	(3.254.253.831.929)	***COST OF SERVICES***
LABA KOTOR		**1.599.380.424.723**	**1.364.137.055.671**	***GROSS PROFIT***
Beban Pemasaran	23	(70.260.445.072)	(67.963.433.466)	*Marketing Expenses*
Beban Umum dan Administrasi	23	(911.643.322.302)	(906.981.911.771)	*General and Administrative Expenses*
Pendapatan Lainnya	24	628.728.086.809	726.576.499.457	*Other Income*
Beban Lainnya	24	(326.225.776.820)	(342.372.413.111)	*Other Expenses*
LABA USAHA		**919.978.967.338**	**773.395.796.780**	***PROFIT FROM OPERATIONS***
Pendapatan Keuangan	25	43.561.402.355	58.838.224.728	*Finance Income*
Beban Keuangan	25	(261.648.866.909)	(213.515.632.458)	*Finance Costs*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**701.891.502.784**	**618.718.389.050**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES)***
Pajak Kini	15.c	(1.395.271.987)	(190.035.340)	*Current Tax*
Pajak Tangguhan	15.d	27.718.412.803	18.517.958.999	*Deferred tax*
LABA TAHUN BERJALAN		**728.214.643.600**	**637.046.312.709**	***PROFIT FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi				***Item that Will Not be Reclassified***
ke Laba Rugi:				***to Profit or Loss:***
Pengukuran Kembali atas Liabilitas				*Remeasurement of Employee Benefits*
Imbalan Kerja	19, 20.c	57.572.938.850	(347.507.445.240)	*Obligation*
Revaluasi Aset	20.c	412.370.729.903	990.107.642.097	*Asset Revaluation*
Pajak Penghasilan Terkait	15.d, 20.c	(12.666.046.547)	76.451.637.953	*Related Income Tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
TAHUN BERJALAN		**1.185.492.265.806**	**1.356.098.147.519**	***FOR THE YEAR***
LABA TAHUN BERJALAN				***PROFIT FOR THE YEAR***
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk		748.699.105.099	650.369.436.698	*Owners of the Parent Entity*
Kepentingan Non-Pengendali		(20.484.461.499)	(13.323.123.989)	*Non-Controlling Interest*
		728.214.643.600	**637.046.312.709**	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
TAHUN BERJALAN YANG DAPAT				***FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk		1.205.988.688.940	1.369.421.271.508	*Owners of the Parent Entity*
Kepentingan Non-Pengendali		(20.496.423.134)	(13.323.123.989)	*Non-Controlling Interest*
		1.185.492.265.806	**1.356.098.147.519**	
LABA PER SAHAM DASAR		**1.645.409,36**	**1.429.311,13**	***BASIC EARNINGS PER SHARE***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT POS INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*											
			Saldo Laba/*Retained Earning*									
	Modal Saham/ *Share Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Sudah Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*	Jumlah/*Total*	Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja *Remeasurement of Benefit Obligation*	Revaluasi Aset Tetap/ *Revaluation of Fixed Assets*	Jumlah Komponen Ekuitas Lainnya/ *Total Other Equity Component*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan Non-Pengendali/ *Non-Controlling Interest*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
SALDO PER 31 DESEMBER 2021	**455.023.000.000**	**2.344.427.566**	**2.024.400.252.322**	**589.544.855.450**	**2.613.945.107.772**	**151.029.186.186**	**2.375.368.267.788**	**2.526.397.453.974**	**5.597.709.989.312**	**(4.235.084.037)**	**5.593.474.905.275**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2021***
Saldo Laba Sudah Ditentukan Penggunaannya	--	--	589.544.855.450	(576.221.731.461)	13.323.123.989	--	--	--	13.323.123.989	(13.323.123.989)	--	*Appropriated Retained Earnings*
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	637.046.312.709	637.046.312.709	--	--	--	637.046.312.709	--	637.046.312.709	*Profit for the Year*
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	--	--	--	--	(271.055.807.285)	990.107.642.097	719.051.834.812	719.051.834.812	--	719.051.834.812	*Other Comprehensive Income for the Year*
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	**455.023.000.000**	**2.344.427.566**	**2.613.945.107.772**	**650.369.436.698**	**3.264.314.544.470**	**(120.026.621.099)**	**3.365.475.909.885**	**3.245.449.288.786**	**6.967.131.260.822**	**(17.558.208.026)**	**6.949.573.052.796**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2022***
Saldo Laba Sudah Ditentukan Penggunaannya	--	--	650.369.436.698	(650.369.436.698)	--	--	--	--	--	--	--	*Appropriated Retained Earnings*
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	748.699.105.099	748.699.105.099	--	--	--	748.699.105.099	(20.484.461.499)	728.214.643.600	*Profit for the Year*
Penyesuaian	--	--	--	6.931.021.632	6.931.021.632	65.967.771	--	65.967.771	6.996.989.403	(6.996.989.403)	--	*Adjustment*
Penghasilan Komprehensif Lain Year Berjalan	--	--	--	--	--	44.894.930.668	412.370.729.903	457.265.660.571	457.265.660.571	11.961.635	457.277.622.206	*Other Comprehensive Income for the Year*
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	**455.023.000.000**	**2.344.427.566**	**3.264.314.544.470**	**755.630.126.731**	**4.019.944.671.201**	**(75.065.722.660)**	**3.777.846.639.788**	**3.702.780.917.128**	**8.180.093.015.895**	**(45.027.697.293)**	**8.135.065.318.602**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2023***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financal statements taken as a whole.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT POS INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH LOWS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Kas dari Pelanggan		5.098.572.466.567	5.229.515.488.021	*Cash Received from Customers*
Pembayaran Kas kepada Karyawan		(2.443.222.218.208)	(2.522.907.649.365)	*Cash Paid to Employees*
Pembayaran Kas kepada Pemasok		(2.525.387.089.876)	(2.369.549.544.542)	*Cash Paid to Suppliers*
Pembayaran Biaya Pemasaran		(67.290.010.927)	(1.628.049.163)	*Payment of Marketing Cost*
Pembayaran Pajak		(11.655.877.865)	(7.574.063.092)	*Payment of Tax*
Penerimaan Restitusi Pajak		15.773.122.481	--	*Receipt from Tax Restitution*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**66.790.392.172**	**327.856.181.859**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan Aset Tetap dan Aset Takberwujud		(239.519.595.872)	(82.992.361.373)	*Acquisition of Fixed Assets & Intangible Assets*
Pelepasan Aset Tetap		10.890.179.193	865.666.666	*Disposal of Fixed Assets*
Penempatan Bank Garansi		(95.719.129.156)	--	*Placement Bank Guarantee*
Pencairan Bank Garansi		100.460.056.756	--	*Withdrawal Bank Guarantee*
Aktivitas dan Investasi Lainnya		--	22.953.200	*Other Activities and Investments*
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(223.888.489.079)**	**(82.103.741.507)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pencairan Pinjaman Bank Jangka Pendek		10.024.000.000.000	5.878.300.000.000	*Drawdown of Short-Term Bank Loans*
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek		(8.529.000.000.000)	(5.844.900.000.000)	*Payment of Short-Term Bank Loans*
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang		(87.500.000.000)	--	*Payment of Long-Term Bank Loans*
Pembayaran Bunga Pinjaman		(251.090.088.514)	(185.966.010.202)	*Payment of Interest*
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan		(26.249.201.993)	(112.768.672.412)	*Payment of Consumer Financing Liabilities*
Layanan Jasa Keuangan		(621.824.422.566)	410.830.735.089	*Financial Services*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		**508.336.286.927**	**145.496.052.475**	***Net Cash Provided by Financing Activities***
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**351.238.190.020**	**391.248.492.827**	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Dampak dari Perubahan Kurs *Exchange Rates Fluctuation Effects* Terhadap Kas dan Setara Kas		876.920.800	544.753.401	*Exchange Rates Fluctuation Effects on Cash and Cash Equivalents*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		**2.301.803.310.923**	**1.910.010.064.695**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	5	**2.653.918.421.743**	**2.301.803.310.923**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financal statements taken as a whole.

1. UMUM

1. a. Pendirian dan Informasi Umum

Kantor pos pertama di Indonesia didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal GW Baron, pada tanggal 26 Agustus 1746 yang pada waktu itu bernama Jawatan PTT. Terjadi pengambilalihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari pemerintah militer Jepang. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961, status Jawatan PTT berubah menjadi Perseroan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Pada tahun 1965, PN Pos dan Telekomunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965, dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978 mengubah status PN Pos dan Giro menjadi Perseroan Umum (Perum) Pos dan Giro. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tanggal 27 Februari 1995, Perum Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1984 dialihkan bentuknya menjadi Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. Anggaran Dasar disusun sesuai dengan materi yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995, bahwa Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan:

1) Usaha jasa pos dan giro;
2) Usaha-usaha lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. GENERAL

1. a. Establishment and General Information

The first post office in Indonesia was established in Batavia by Governor General GW Baron on August 26, 1746. Which was then was called Bureau PTT. PTT Headquarter in Bandung was taken over by the Young Generation PTT from the Japanese military government. This date is celebrated as Postel Service Day (Hari Bakti Postel). Based on Government Regulation No. 240 of 1961, the status of PTT Bureau was changed into a State Enterprise (PN) Post and Telecommunications. In 1965, PN Post and Telecommunications was divided into to part, namely PN Post and Giro based on Government Regulation No. 29 of 1965, and PN Telecommunications based on Government Regulation No. 30 of 1995. Government Regulation No. 9 of 1978 changed the status of PN Post and Giro into Perum (Public Company) Post and Giro. Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 5 dated February 27, 1995, Perum Post and Giro which was established through Government Regulation No. 24 of 1984 was changed its form to Limited Company as defined in Law No. 9 of 1969 regarding Stipulation of Government Regulation in lieu of Law No. 1 of 1969 on State Business Forms. The Articles of Association were prepared in accordance with the material outlined in the Government Regulation No. 5 of 1995, wherein the Company was established with the sole purpose of conducting:

1) .Post and giro services;
2) Other businesses that support the implementation of postal and giro services in accordance with laws and regulations.

1. UMUM (Lanjutan)

1. a. Pendirian dan Informasi Umum (Lanjutan)

Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) ("Perusahaan") ditetapkan dengan Akta Notaris Achmad Abid, S.H., sebagai pengganti Notaris Sutjipto, S.H., No. 117 tanggal 20 Juni 1995 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8182 HT.01.01 tahun 1995 tanggal 29 Juni 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 Tambahan No. 7039 tanggal 22 Agustus 1995.

Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terhadap UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dilakukan sesuai dengan Akta No. 164 tanggal 15 Agustus 2008 di hadapan Notaris Sutjipto, S.H. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-78035.AH.01.02.TH.2008 tanggal 24 Desember 2008.

Perubahan terakhir pada tahun 2023 dengan Akta Notaris No. 1 tanggal 27 September 2023 oleh Notaris Raisha Kinanti, S.H., M.Kn., di Bogor mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham terkait Perubahan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero). Perubahan tersebut mencakup, antara lain, penyesuaian Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pos Indonesia (Persero). Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU 0201976.AH.01.11. TAHUN 2023 tanggal 11 Oktober 2023.

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. a. Establishment and General Information** (Continued)*

The Articles of Association of PT Pos Indonesia (Persero) ("the Company") were established based on Notarial Deed No. 117 of Achmad Abid, S.H., in lieu of Notary Sutjipto, S.H., dated June 20, 1995, which was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia on in his Decree No. C2-8182 HT.01.01 of 1995 dated June 29, 1995 and was published in the State Gazette No. 67 of the Republic of Indonesia Supplement No. 7039 dated August 22, 1995.

The Company Articles's of Association have been amended several times. Amendments to the Company's articles of associations in accordance with law No. 40 of 2007 concern name limited liability Companies have been made in accordance with deed No. 164 dated August, 2008 before notary Sutjipto, S.H., and was approved by Ministry of Justice Human Rights through his degree No. AHU-78035.AH.01.02.TH.2008 dated December 24, 2008.

The latest amendment was in year 2023 by Notarial Deed No. 1 of Notary Raisha Kinanti, S.H., M.Kn., a notary in Bogor, dated September 27, 2023, regarding the Statement of Shareholders Decision related to the Amendment of the Article of Association of PT Pos Indonesia (Persero). The amendments include among others, the amendment Nomenclature of Position, Transfer of Tasks, and Appointment of Members of the Board of Directors of a Limited Liability Company PT Pos Indonesia (Persero). The deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision No. AHU-0201976.AH.01.11. Year 2023 dated October 11, 2023.

1. UMUM (Lanjutan)

1. a. Pendirian dan Informasi Umum (Lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Bandung dengan kantor pusat di Jalan Banda No. 30, Citarum, Bandung Wetan.

1. b. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan antara lain meliputi bidang usaha jasa pos dan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (*account*) bidang usaha jasa komunikasi, jasa logistik, jasa retail, jasa keagenan dan jasa-jasa lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bidang usaha pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang kegiatan usaha Perusahaan.

1. c. Merek dan Logo

Perusahaan telah melakukan perubahan merek dan logo baru yang telah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan Nomor Surat: S-532/MBU/10/2023 perihal Persetujuan Perubahan Merek dan Logo PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 23 Oktober 2023

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. a. Establishment and General Information** (Continued)*

The Company is domicilied in Bandung with its headquarter at Jalan Banda No. 30, Citarum, Bandung Wetan.

1. b. Purposes and Objectives of the Company

According to Article 3 of the Articles of Association, the Company's scope of business activities includes postal and giro services which include financial services of cash-based or giro-based accounts, business communications services, logistics services, retail services, agency services and other services that support the execution of postal and giro services in accordance with the existing legislation and utilization and development of its resources to support the Company's business activities.

1. c. Brand and Logo

The Company has made changes to its brand and new company logo which have been approved by the Minister of State-Owned Enterprises with Letter No.: S-532/MBU/10/2023 regarding Approval of Changes to the Brand and Logo of PT Pos Indonesia (Persero) dated October 23, 2023.

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

1) Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Perusahaan memiliki wilayah kerja dan lokasi regional sebagai berikut:

i. Regional 1 Medan 20004 meliputi wilayah kerja Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung.

ii. Regional 2 Jakarta 10004 meliputi wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta dan Banten, kota Bogor, Bekasi dan Depok.

iii. Regional 3 Bandung 40004 meliputi wilayah kerja Provinsi Jawa Barat.

iv. Regional 4 Semarang 50004 meliputi wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

***1. GENERAL** (Continued)*

1. d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees

1) Organization Structure

In conducting its activities, the Company has regional working teritories as follows:

i. Regional 1 in Medan 20004 consists of working area Province of Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatera, West Sumatera, Riau, Riau Islands, South Sumatera, Jambi, Lampung, Bengkulu and Bangka Belitung Islands.

ii. Regional 2 in Jakarta 10004 consists of working area Province of DKI Jakarta and Banten, City of Serang, Bogor, Bekasi and Depok.

iii. Regional 3 in Bandung 40004 consists of working area Province of West Java.

iv. Regional 4 in Semarang 50004 consists of working area Province of Central Java and Special Province of Yogyakarta.

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

1) Struktur Organisasi (Lanjutan)

v. Regional 5 Surabaya 60004 meliputi wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

vi. Regional 6 Makassar 90004 meliputi wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Perubahan struktur organisasi ini didasari oleh kebutuhan strategi perusahaan (*Structure Follows Strategy*) guna memenuhi tuntutan strategis.

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees** (Continued)*

1) Organization Structure (Continued)

v. Regional 5 in Surabaya 60004 consists of working area Province of East Java, Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara.

vi. Regional 6 in Makassar 90004 consists of working area Province of West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Sulawesi, North Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo, Maluku, North Maluku, Papua dan West Papua.

The change in organizational structure is based on the company's strategic needs (Structure Follows Strategy) to meet strategic demands.

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

2) Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-230/MBU/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 dan yang terakhir SK-261/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL *(Continued)*

1. d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees *(Continued)*

2) Board of Commissioners and Director

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.: SK-230/MBU/10/2022 dated October 19, 2022 and most recently SK-261/MBU/09/2023 dated September 21, 2023, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Rhenald Kasali	Rhenald Kasali	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Condro Kirono	Condro Kirono	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	-	M. Dayan Situmorang	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	-	Addin Jauharudin	*Independent Commissioner*
Komisaris	Robben Rico	Chalimah Pujihastuti	*Commissioner*
Komisaris	Guntur Iman Nefianto	Guntur Iman Nefianto	*Commissioner*
Komisaris	Gunawan Hutagalung	Gunawan Hutagalung	*Commissioner*

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-154/MBU/07/2022 dan yang terakhir SK-260/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023, susunan Dewan Direksi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.: SK-154/MBU/07/2022 and most recently SK-260/MBU/09/2023 dated September 21, 2023, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	21 September - 31 Desember/ *21 September - 31 December*/ 2023	1 Januari - 21 September/ *1 January - 21 September* 2023	2022	
Dewan Direksi				***Board of Directors***
Direktur Utama	Faizal Rochmad Djoemadi	Faizal Rochmad Djoemadi	Faizal Rochmad Djoemadi	*President Director*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Endy P.R. Abdurrahman	Endy P.R. Abdurrahman	Endy P.R. Abdurrahman	*Director of Finance Risk Management*
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik	Tonggo Marbun	Siti Choiriana	Siti Choiriana	*Director of Courier and Logistic Business*
Direktur Bisnis Jasa Keuangan	Haris	Haris	Haris	*Director of Business Finance Services Business*
Direktur *Human Capital Management*	Asih Kurniasari Komar	Tonggo Marbun	Tonggo Marbun	*Director of Human Capital Management*
Direktur *Business Development* dan *Portfolio Management*	Prasabri Pesti	Prasabri Pesti	Prasabri Pesti	*Director of Business Development and Portofolio Management*
Direktur Operasi dan Teknologi Informasi	Hariadi	Hariadi	Hariadi	*Director of Operations and Information Technology*

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

3) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 84/DEKOM/0420 tanggal 20 Maret 2023 tentang pengangkatan kembali anggota komite audit PT Pos Indonesia (Persero), dan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero) No. 233/DEKOM/0923 tanggal 27 September 2023, memberhentikan dengan hormat Maniaga Dayan Situmorang dan mengangkat Guntur Iman Negianto sebagai ketua merangkap anggota Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero).

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees** (Continued)*

3) *Audit Committee, Business and Investment Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee*

Audit Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners Number 84/DEKOM/0420 dated 20 March 2023 concerning the re-appointment of PT Pos Indonesia (Persero) audit committee members and most recently based on Board of Commissioners Decree PT Pos Indonesia (Persero) regarding Dismissal and Appointment of PT Pos Indonesia (Persero) Audit Committee Chairnan No. 233/DEKOM/0923 dated September 27, 2023, honorably dismissed Maniaga Dayan Situmorang and appointed Guntur Iman Negianto as chairman and member of PT Pos Indonesia (Persero) audit committee.

The composition of the Audit Committee as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Guntur Iman Nefianto	M. Dayan Situmorang	*Chairman*
Anggota	Prasojo	Prasojo	*Member*
Anggota	Venoneta Monetera	Venoneta Monetera	*Member*
Anggota	-	Guntur Iman Nefianto	*Member*

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

3) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Komite Nominasi dan Remunerasi (Lanjutan)

Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero) No. 267/DEKOM/1022 tanggal 25 Oktober 2022 memberhentikan dengan hormat Ikhsan Baidirus dan mengangkat Gunawan Hutagalung sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero).

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero) No. 183/DEKOM/0623 tanggal 30 Juni 2023 memberhentikan dengan hormat Chalimah Pujihastuti dan mengangkat Gunawan Hutagalung sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero).

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees** (Continued)*

3) *Audit Committee, Business and Investment Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee (Continued)*

Business and Investment Risk Management Monitoring Committee

Based on Board of Commissioners Decree PT Pos Indonesia (Persero) regarding Dismissal and Appointment of Members of the Business and Investment Risk Management Monitoring Committee of PT Pos Indonesia (Persero) No. 267/DEKOM/1022 dated October 25, 2022 honorably dismissed Ikhsan Baidirus and appointed Gunawan Hutagalung as a member of PT Pos Indonesia (Persero) Business and Investment Risk Management Monitoring Committee.

Based on Board of Commissioners Decree PT Pos Indonesia (Persero) regarding Dismissal and Appointment of Chairman of the Business and Investment Risk Management Monitoring Committee of PT Pos Indonesia (Persero) No. 183/DEKOM/0623 dated June 30, 2023 honorably dismissed Chalimah Pujihastuti and appointed Gunawan Hutagalung as chairman and member of PT Pos Indonesia (Persero) Business and Investment Risk Management Monitoring Committee.

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

3) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Komite Nominasi dan Remunerasi (Lanjutan)

Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi

Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees** (Continued)*

3) *Audit Committee, Business and Investment Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee (Continued)*

Business and Investment Risk Management Monitoring Committee

The composition of the Business and Investment Risk Management Monitoring Committee (KPMRUI) as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Komite KPMRUI			***KPMRUI Committee***
Ketua	Gunawan Hutagalung	Chalimah Pujihastuti	*Chairman*
Anggota	Syaiful Siliganda	Ikhsan Baidirus	*Member*
Anggota	-	Gunawan Hutagalung	*Member*
Anggota	-	Dedit Satriyo Utomo	*Member*
Anggota	-	Ahmad Syarif Munawi	*Member*

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pos Indonesia (Persero) No. 141/DEKOM/0423 tanggal 18 April 2023 memberhentikan dengan hormat Dwi Winarno sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pos Indonesia (Persero).

Nomination and Remuneration Committee

Based on Board of Commissioners Decree PT Pos Indonesia (Persero) regarding Dismissal of Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pos Indonesia (Persero) No. 141/DEKOM/0423 dated April 18, 2023 honorably dismissed Dwi Winarno as a member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pos Indonesia (Persero).

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

3) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Komite Nominasi dan Remunerasi (Lanjutan)

Komite Nominasi dan Remunerasi (Lanjutan)

Perubahan terakhir Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pos Indonesia (Persero) No. 266/DEKOM/1123 tanggal 20 November 2023 memberhentikan dengan hormat Condro Kirono dan mengangkat Robben Rico sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pos Indonesia (Persero).

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

1. GENERAL *(Continued)*

1. d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees *(Continued)*

3) *Audit Committee, Business and Investment Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee (Continued)*

Nomination and Remuneration Committee *(Continued)*

The last amendment most recently based on Board of Commissioners Decree PT Pos Indonesia (Persero) regarding Dismissal and Appointment of Chairman of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pos Indonesia (Persero) No. 266/DEKOM/1123 dated November 20, 2023, Condro Kirono was honorably dismissed and Robben Rico was appointed as Chairman and Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pos Indonesia (Persero).

The composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Komite Nominasi dan Remunerasi			***Nomination and Muneration Committee***
Ketua	Robben Rico	Condro Kirono	*Chairman*
Anggota	Boy Bayu Idisondjaya	Addin Jauharudin	*Member*
Anggota	Oerip Soebagyo	Oerip Soebagyo	*Member*
Anggota	-	Dwi Winarno	*Member*

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

4) Karyawan & Manajemen Kunci

Karyawan

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup mempunyai karyawan masing-masing 15.783 dan 17.067 dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022	
PT Pos Indonesia (Persero)	15.648	17.000	*PT Pos Indonesia (Persero)*
PT Pos Logistik Indonesia	58	15	*PT Pos Logistik Indonesia*
PT Pos Finansial Indonesia	22	12	*PT Pos Finansial Indonesia*
PT Pos Properti Indonesia	55	40	*PT Pos Properti Indonesia*
Jumlah	**15.783**	**17.067**	***Total***

Manajemen Kunci

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No SK-214Pada Tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan mempunyai *key personel* dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022	
Manajemen Kunci			***Key Personel***
Risk Management and Financial Policy	Endang Wahyudin	Endang Wahyudin	*Risk Management and Financial Policy*
Retail Business	Wilhelmina Lily Selanno	Wilhelmina Lily Selanno	*Retail Business*
Enterprise Business	Arifin Muchlis	Arifin Muchlis	*Enterprise Business*
Strategic Planning and Business Development	Ir. Wikandaru Mudjadi	Ir. Wikandaru Mudjadi	*Strategic Planning and Business Development*
International Post Service	Yanto Parulian Hutajulu	Yanto Parulian Hutajulu	*International Post Service*
Human Capital Policy and Strategy	Ika Wijayanti	Ika Wijayanti	*Human Capital Policy and Strategy*
Portfolio Management	Riharsono Prastyantoro	Riharsono Prastyantoro	*Portfolio Management*
Human Capital Services and Business Partner	Chandra Dewi	Chandra Dewi	*Human Capital Services and Business Partner*
Government and Corporate Business	Hendra Sari	Hendra Sari	*Government and Corporate Business*
Courier and Logistic Operation	Imam Pujono	Imam Pujono	*Courier and Logistic Operation*
Financial Operations and Business Partner	Vivi Sofiati	Asih Kurniasari Komar	*Financial Operations and Business Partner*
Information Technology	A. Winahyo Pratomo	A. Winahyo Pratomo	*Information Technology*
Fronting Management and Financial Transaction Service	Felix Heru Wibowo	Felix Heru Wibowo	*Fronting Management and Financial Transaction Service*
Consumer Business	Zuhed Nur	Zuhed Nur	*Consumer Business*
Wholesale and International Business	Arlia Irishtiana	Arlia Irishtiana	*Wholesale and International Business*
Internal Audit	Agus Trisyuwanto	Agus Trisyuwanto	*Internal Audit*

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees** (Continued)*

4) *Employees & Key Personel*

Employees

As of December 31, 2023, the Group have 15,783 and 17,067 employees, respectively with the following details:

Key Personel

Based on the Decree of the Board of Directors No SK-214 as of December 31, 2023, the Company has key personnel with the following details:

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi serta Susunan Direksi dan Dewan Komisaris (Lanjutan)

4) Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Pada bulan Desember 2022, Perusahaan menawarkan obligasi pada masyarakat (Catatan 18) yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 20 Desember 2022 dengan Nomor S-271/D.04/2022 atas Penawaran umum penerbitan Obligasi I PT Pos Indonesia (Persero) dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah utang obligasi yang belum jatuh tempo adalah sebesar Rp500.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. d. Organization Structure and Board of Directors and Commissioners** (Continued)*

5) *The Company's Bonds Public Offering*

On December 2022, the Company offered its bonds to the public (Note 18), which became effective by financial Services Authority (OJK) on December 20, 2022 based on Letter from OJK Number S-271/D.04/2022 for the public offering of the issuance of Bond I of PT Pos Indonesia (Persero) with a principal amount of Rp500,000,000,000 and has been listed on the Indonesia Stock Exchange on December 28, 2022.

On December 31, 2023, the amount of outstanding bond was Rp500,000,000,000 with the following details:

Obligasi/ *Bonds*	Jumlah/ *Amount*	Bunga per Tahun/ *Interest per Annum*	Tahun/ *Years*	Tanggal Penerbitan/ *Date of Issuance*	Jatuh Tempo/ *Due Date*
Obligasi I PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2023					
Seri/Serie A (POST01A)	100.000.000.000	10,90%	3	28 Desember/ *December* 2022	28 Desember/ *December* 2025
Seri/Serie B (POST01B)	400.000.000.000	11,75%	5	28 Desember/ *December* 2022	28 Desember/ *December* 2027

1. UMUM (Lanjutan)

1. e. Informasi tentang Entitas Anak Perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 persentase kepemilikan Perusahaan dan jumlah aset Entitas Anak adalah sebagai berikut:

1. GENERAL *(Continued)*

1. e. Subsidiaries Information

As of December 31, 2023 and 2022 the percentage of ownership of the Company and total asset of the Subsidiaries are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis Usaha/ *Nature of Business*	Persentase Pemilikan/ *Percentage of Ownership*	Tahun Operasi Komersial/ *Start of Commercial Operations*	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination* 2023	2022
Dimiliki langsung oleh Perseroan/*Held directly by the Company*						
PT Pos Finansial Indonesia ("PFI")	Indonesia	Bisnis jaringan, bisnis akses chaNnel dan *switching* dan bisnis *IT solution/ Network business, access channel and system switching business and IT solution business.*	54,76%	2019 D/h PT Bakti Wahana Net	123.766.890.726	95.590.279.061
PT Pos Logistik Indonesia ("PLI")	Indonesia	Jasa transportasi, jasa pergudangan. Jasa pengiriman kargo dan *regulated agent* atau agen inspeksi/ *Transportation services, warehousing services, cargo delivery, regulated agent or inspection agent.*	99,80%	2012	459.483.236.297	351.063.544.570
PT Pos Properti Indonesia ("PPI")	Indonesia	Bidang properti / *Property business*	99,00%	2013	259.254.093.301	195.683.951.764
Dimiliki oleh PT Pos Logistik Indonesia ("PLI") / *Held through PT Pos Logistik Indonesia ("PLI")*						
PT Pos Properti Indonesia ("PPI")	Indonesia	Bidang properti / *Property business*	1,00%	2013	259.254.093.301	195.683.951.764

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred as "the Group".

PT Pos Finansial Indonesia (D/h PT Bhakti Wasantara Net) (PFI)

PT Pos Finansial Indonesia (D/h PT Bhakti Wasantara Net) ("PFI") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 dari notaris Ivonne Barnetha Sinyal, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 2 April 2001. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-02567.HT.01.01.Th. 2001 tanggal 28 Juni 2001 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11 dan No. 1320 tanggal 5 Februari 2002 dan 24 April 2019.

PT Pos Finansial Indonesia (Formerly PT Bhakti Wasantara Net) (PFI)

PT Pos Finansial Indonesia (D/h PT Bhakti Wasantara Net) ("PFIy") was established based on Notarial Deed No. 7 of notary Ivonne Barnetha Sinyal, SH, Notary in Jakarta dated April 2, 2001. Deed of estabilishment was approved by Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C-02567.HT.01.01.Th.2001 dated June 28, 2001 and published in Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 11 and No. 1320 dated February 5, 2002. and April 24, 2019, respectively.

1. UMUM (Lanjutan)

1. e. Informasi tentang Entitas Anak Perusahaan (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 69 dari Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. Perusahaan mengubah nama PT Bhakti Wasantara Net menjadi PT Pos Finansial Indonesia. Perusahaan mendirikan dan memiliki penyertaan saham pada PFI sebesar 54,76% dari modal ditempatkan dan disetor PFI dengan jumlah investasi sebesar Rp38.578.000.000 atau 38.578 lembar saham. Perubahan tersebut telah mendapat persetujan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0022339.AH.01.02 TAHUN 2019 tanggal 24 April 2019.

PT Pos Logistik Indonesia (PLI)

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 12 Januari 2012 dari Notaris Etic Srimartini, S.H., M.Kn, Notaris di Bandung. Perusahaan mendirikan dan memiliki penyertaan saham pada PLI sebesar 99,80% dari modal ditempatkan dan disetor PLI, dengan jumlah investasi sebesar Rp174.000.000.000 atau 174.000 lembar saham. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-08351.AH.0101 TAHUN 2012, tanggal 17 Februari 2012 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 17 Februari 2012, tambahan No. 15392.

1. GENERAL *(Continued)*

1. e. Subsidiaries Information *(Continued)*

Based on Notarial Deed No. 69 of Notary Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. the Company changed the name of PT Bhakti Wasantara Net to PT Pos Finansial Indonesia. The Company established and has an investment in PFI for 54.76% of the issued and paid-up capital of PFI, with a total investment of Rp38,578,000,000 or 38,578 shares. The Articles of Association was approved by Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter Number AHU-0022339.AH.01.02 TAHUN 2019 dated April 24, 2019.

PT Pos Logistik Indonesia (PLI)

Based on Notarial Deed No. 9 dated January 12, 2012 from Notary Etic Srimartini, S.H., M.Kn, Notary in Bandung. The Company established and has an investment in PLI for 99.80% of the issued and paid-up capital of PLI, with a total investment of Rp174,000,000,000 or 174.000 shares. The deed of establishment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in his Decision Letter No. AHU-08351.AH.0101 TAHUN 2012, dated February 17, 2012 and has been published in the State Gazette of Republic of Indonesia supplementary No. 34 dated February 17, 2012, addition No. 15392.

1. UMUM (Lanjutan)

1. e. Informasi tentang Entitas Anak Perusahaan (Lanjutan)

Anggaran dasar PLI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris No. 05 tanggal 30 November 2023 dari Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Notaris di Bandung mengenai perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PLI sesuai kesepakatan bersama, PLI melakukan *Debt to Equity Swap* atau konversi hutang pokok (*shareholder loan*) untuk menambah saham milik Perusahaan sebanyak 69.500 lembar saham atau setara dengan Rp69.500.000.000. Dengan adanya penambahan saham tersebut, maka yang semula saham milik Perusahaan sebanyak 174.000 lembar saham naik menjadi sebanyak 243.500 lembar saham atau setara dengan Rp243.500.000.000. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0153289 tanggal 10 Desember 2023.

PT Pos Properti Indonesia (PPI)

Berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 31 Desember 2013 dari Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Notaris di Bandung. Perusahaan mendirikan dan memiliki penyertaan saham pada PPI sebesar 99,00% dari modal ditempatkan dan disetor PPI dengan jumlah investasi sebesar Rp99.000.000000 atau 99.000 lembar saham. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-14137.AH.01.01 TAHUN 2014 tanggal 25 April 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 13 Juni 2014, tambahan No. 22310.

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. e. Subsidiaries Information** (Continued)*

PLI's article of association has been amended several times, most recently by Notarial deed No. 05 dated November 30, 2023 by Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Notary in Bandung, concerning in change of Article 4 in accordance with mutual agreement, PLI carried out a Debt to Equity Swap or conversion of principal debt (shareholder loan) to increase the shares owned by the Company by 69,500 shares or equivalent to Rp69,500,000,000. With the addition of these shares, the original shares are owned by the Company increased from 174,000 shares to 243,500 shares or equivalent of Rp243,500,000,000. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Law Administration in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0153289 dated December 10, 2023.

PT Pos Properti Indonesia (PPI)

Based on Notarial Deed No. 35 dated December 31, 2013 by Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Notary in Bandung. The Company established and has an investment in PPI for 99.00% of the issued and paid-up capital of PPI with a total investment of Rp99,000,000,000 or 99,000 shares. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-14137.AH.01.01 TAHUN 2014 dated April 25, 2014 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 47 dated June 13, 2014, addition No. 22310.

1. UMUM (Lanjutan)

1. e. Informasi tentang Entitas Anak Perusahaan (Lanjutan)

Anggaran dasar PPI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris No. 01 tanggal 13 Desember 2021 dari Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Bandung, mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PPI. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0485410 TAHUN 2021 tanggal 14 Desember 2021.

1. GENERAL *(Continued)*

1. e. Subsidiaries Information *(Continued)*

PPI's article of association has been amended several times, most recently by Notarial deed No. 01 dated December 13, 2021 by Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Bandung, regarding changes in the composition of Commissioner and Directors of the PPI. This change was received and recorded in the legal entity administration system of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Law Administration in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0485410 TAHUN 2021 dated December 14, 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

2. a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK–IAI"), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Publik.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

2. a. Compliance with the Financial Accounting Standards ("FAS")

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("IFAS") issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant ("FASB-IIA"), and regulations in the Capital Market No. VIII G.7 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of the Issuer or Public Company.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost basis, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies and in conformity with Financial Accounting Standard established by the Indonesian Institute of Accountants. The consolidated financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows.

The consolidated statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified.

The accounting policies applied are consistent with those of the annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2023 which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan Manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2023, Group menerapkan PSAK baru yang berlaku efektif pada tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan akuntansi Group telah dibuat sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements *(Continued)*

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and asumptions. It also requires Management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards

Effective January 1, 2023, the Group adopted new SFAS that are effective for application from that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Penerapan standar baru dan Amendemen yang relevan dengan operasi Grup adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 – Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Penyesuaian PSAK 16 - Aset tetap: tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 25 - Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: tentang Definisi Estimasi Akuntansi; dan
- Amendemen PSAK 46 - Pajak penghasilan tentang Pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal.

Dampak dari penerapan standar akuntansi baru ini adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

  DSAK-IAI mengubah PSAK 1, 'Penyajian Laporan Keuangan', untuk mengharuskan Grup mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi yang material daripada kebijakan akuntansi yang signifikan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***2. b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements** (Continued)*

The adoption of the following new standards and amendment which are relevant to the Group's operations are as follows:

- *Amendment to SFAS 1 - Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;*
- *Annual Improvement to SFAS 16- Fixed assets regarding proceeds before intended use;*
- *Amendment to SFAS 25 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: regarding Definition of Accounting Estimates; and*
- *Amendment to SFAS 46 - Income tax regarding Deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction.*

Impact of adoption to these new accounting standards are follows:

- *Amendment to SFAS 1: Presentation of Financial Statements*

  The FASB-IAI amended SFAS 1, 'Presentation of Financial Statements', to require Group to disclose their material accounting policy information rather than their significant accounting policies.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Dampak dari penerapan standar akuntansi baru ini adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan (Lanjutan)

  "Informasi kebijakan akuntansi adalah material, jika dipertimbangkan bersama dengan informasi lain yang termuat dalam laporan keuangan entitas, dapat diperkirakan secara wajar dapat mempengaruhi keputusan pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum yang diambil atas dasar laporan keuangan tersebut."

  Amendemen ini juga mengklarifikasi bahwa informasi kebijakan akuntansi dianggap material jika, tanpa informasi tersebut, pengguna laporan keuangan tidak dapat memahami informasi material lainnya dalam laporan keuangan.

  ` Lebih lanjut, amandemen PSAK 1 mengklarifikasi bahwa informasi kebijakan akuntansi yang tidak material tidak perlu diungkapkan. Namun, jika diungkapkan, informasi tersebut tidak boleh mengaburkan informasi kebijakan akuntansi yang material.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements *(Continued)*

Impact of adoption to these new accounting standards are follows: (Continued)

- *Amendment to SFAS 1: Presentation of Financial Statements (Continued)*

  "Accounting policy information is material if, when considered together with other information included in an entity's financial statements, it can reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general-purpose financial statements make on the basis of those financial statements."

  The amendment also clarifies that accounting policy information is expected to be material if, without it, the users of the financial statements would be unable to understand other material information in the financial statements.

  Further, the amendment to SFAS 1 clarifies that immaterial accounting policy information need not be disclosed. However, if it is disclosed, it should not obscure material accounting policy information.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

  Amendemen PSAK 25, 'Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan', mengklarifikasi bagaimana Grup harus membedakan perubahan kebijakan akuntansi dari perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi didefinisikan sebagai jumlah moneter dalam laporan keuangan yang tunduk pada ketidakpastian pengukuran. Pembedaan ini penting, karena perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif untuk transaksi masa depan dan peristiwa masa depan lainnya, sedangkan perubahan kebijakan akuntansi umumnya diterapkan secara retrospektif untuk transaksi masa lalu dan peristiwa masa lalu lainnya serta periode berjalan.

- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Dimaksudkan

  PSAK 16, 'Aset Tetap', mensyaratkan bahwa hasil yang diterima dari penjualan hasil produksi yang dihasilkan sebelum aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya, diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi. Biaya produksi yang terkait diukur dengan menggunakan panduan dalam PSAK 14, 'Persediaan', dan diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat penjualan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements *(Continued)*

- *Amendment of PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates*

  The amendment to SFAS 25, 'Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors', clarifies how Group should distinguish changes in accounting policies from changes in accounting estimates. Accounting estimates are defined as monetary amounts in financial statements that are subject to measurement uncertainty. The distinction is important, because changes in accounting estimates are applied prospectively to future transactions and other future events but changes in accounting policies are generally applied retrospectively to past transactions and other past events as well as the current period.

- *Amendment to SFAS 16: Fixed Assets – Regarding Proceeds before Intended Use*

  SFAS 16, 'Fixed Assets', requires the proceeds received from selling output produced before the asset is ready for its intended use to be recognized as income in profit or loss. The related cost of producing the output is measured using the guidance in SFAS 14, 'Inventories', and it is recognised as an expense in profit or loss when sold.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Dimaksudkan (Lanjutan)

  Jika barang yang dijual merupakan hasil dari aktivitas normal entitas, maka pendapatan dan biaya diungkapkan sesuai dengan persyaratan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", dan PSAK 14. Jika barang yang dijual bukan merupakan bagian dari aktivitas normal entitas, maka amendemen PSAK 16 mensyaratkan pengungkapan jumlah dan pos dalam laporan laba rugi komprehensif dimana pendapatan dan biaya tersebut dimasukkan.

  Amendemen PSAK 16 juga mengklarifikasi bahwa entitas 'menguji apakah aset berfungsi dengan baik' ketika entitas menilai kinerja teknis dan fisik aset. Kinerja keuangan aset tidak relevan dengan penilaian ini. Oleh karena itu, suatu aset mungkin dapat beroperasi sesuai dengan tujuan Manajemen dan dikenakan penyusutan sebelum mencapai tingkat kinerja operasi yang diharapkan oleh Manajemen.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements *(Continued)*

- *Amendment to SFAS 16: Fixed Assets – Regarding Proceeds before Intended Use (Continued)*

  If the items sold are the output of an entity's ordinary activities, the income and cost are disclosed in accordance with the requirements of SFAS 72, 'Revenue from Contracts with Customers', and SFAS 14. If the items sold are not part of an entity's ordinary activities, the amendment to SFAS 16 requires the disclosure of the amount and line item(s) in the statement of comprehensive income in which such proceeds and cost have been included.

  The amendment to SFAS 16 also clarifies that an entity is 'testing whether the asset is functioning properly' when it assesses the technical and physical performance of the asset. The financial performance of the asset is not relevant to this assessment. Therefore an asset might be capable of operating as intended by Management and subject to depreciation before it has achieved the level of operating performance expected by Management.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Atas Transaksi Tunggal

  DSAK-IAI telah mengamendemen PSAK 46, 'Pajak Penghasilan', untuk mengharuskan Grup mengakui pajak tangguhan atas transaksi tertentu yang pada saat pengakuan awal menimbulkan jumlah yang sama antara perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Amendemen ini biasanya akan diterapkan pada transaksi seperti sewa untuk penyewa dan kewajiban penghentian operasi.

  Paragraf 15 dan 24 dari PSAK 46 telah diamendemen untuk memasukkan kondisi tambahan di mana pengecualian pengakuan awal tidak diterapkan. Menurut pedoman yang diamandemen, perbedaan temporer yang timbul pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas tidak tunduk pada pengecualian pengakuan awal jika transaksi tersebut menimbulkan jumlah yang sama antara jumlah kena pajak dan jumlah yang dapat dikurangkan dari perbedaan temporer.

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup, didiskusikan di Catatan 37.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements *(Continued)*

- *Amendment of PSAK 46: Income Taxes regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*

  The FASB-IAI has amended SFAS 46, 'Income Taxes', to require Group to recognize deferred tax on particular transactions that, on initial recognition, give rise to equal amounts of taxable and deductible temporary differences. The amendments will typically apply to transactions such as leases for the lessee and decommissioning obligations.

  Paragraphs 15 and 24 of SFAS 46 were amended to include an additional condition where the initial recognition exemption is not applied. According to the amended guidance, a temporary difference that arises on initial recognition of an asset or liability is not subject to the initial recognition exemption if that transaction gave rise to equal amounts of taxable and deductible temporary differences.

Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended December 31, 2023 and have not been early adopted by the Group, are discussed in Note 37.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. c. Prinsip atas Akuntansi Konsolidasi dan Ekuitas

a. Entitas Anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakusisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. c. Principles of Consolidation and Equity Accounting

a. Subsidiaries

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. c. Prinsip atas Akuntansi Konsolidasi dan Ekuitas (Lanjutan)

a. Entitas Anak (Lanjutan)

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi atas bisnis yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laporan laba rugi.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dalam laporan laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. c. Principles of Consolidation and Equity Accounting *(Continued)*

a. Subsidiaries (Continued)

The Group recognizes any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the net identifiable assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the business acquired, in the case of a bargain purchase, the difference is recognized directly in the income statement.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or liability are recognized in accordance with SFAS 55 (revised 2014) "Financial Instrument: Recognition and Measurement" in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. c. Prinsip atas Akuntansi Konsolidasi dan Ekuitas (Lanjutan)

a. Entitas Anak (Lanjutan)

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laporan laba rugi. Pihak pengakusisi mungkin telah mengakui perubahan nilai wajar atas kepentingan ekuitasnya dalam penghasilan komprehensif lain. Jika demikian, jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika pihak pengakusisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. c. Principles of Consolidation and Equity Accounting *(Continued)*

a. Subsidiaries (Continued)

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss. The acquirer may have recognized changes in the value of its equity interest in other comprehensive income. If so, the amount that was recognized in other comprehensive income shall be recognized on the same basis as would be required if the acquirer has disposed directly of the previously held equity interest.

Intercompany transactions, balances and unrealized gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealized losses are also eliminated. If necessary, amounts reported by subsidiaries have been adjusted to conform to the Group's accounting policies.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. c. Prinsip atas Akuntansi Konsolidasi dan Ekuitas (Lanjutan)

b. Perubahan Kepemilikan

Grup memperlakukan transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya kontrol sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Perubahan dalam kepemilikan menghasilkan penyesuaian antara nilai tercatat dari kepentingan pengendali dan non-pengendali untuk mencerminkan kepentingan relatifnya di anak perusahaan. Selisih antara jumlah penyesuaian untuk kepentingan non-pengendali dan pertimbangan yang dibayarkan atau diterima diakui dalam cadangan terpisah dalam ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Grup.

Ketika Grup tidak lagi mengkonsolidasikan atau mencatat menggunakan metode ekuitas untuk investasi karena hilangnya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, maka kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. c. Principles of Consolidation and Equity Accounting *(Continued)*

b. Changes in Ownership Interests

The Group treats transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control as transactions with equity owners of the Group. A change in ownership interest results in an adjustment between the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests to reflect their relative interests in the subsidiary. Any difference between the amount of the adjustment to non-controlling interests and any consideration paid or received is recognized in a separate reserve within equity attributable to owners of the Group.

When the Group ceases to consolidate or equity account for an investment because of a loss of control, joint control or significant influence, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognized in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. c. Prinsip atas Akuntansi Konsolidasi dan Ekuitas (Lanjutan)

b. Perubahan Kepemilikan (Lanjutan)

Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi.

Jika kepemilikan saham pada ventura bersama atau perusahaan asosiasi berkurang namun pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dipertahankan, hanya sebagian proporsional dari jumlah yang telah diakui sebelumnya dalam pendapatan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba atau rugi jika diperlukan.

2. d. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. c. Principles of Consolidation and Equity Accounting *(Continued)*

b. Changes in Ownership Interests (Continued)

In addition, any amounts previously recognized in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

If the ownership interest in a joint venture or an associate is reduced but joint control or significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where appropriate.

2. d. Business Combinations

Business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the periods in which the costs are incurred and the services are received.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. d. Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Komponen kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila pada periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. d. Business Combinations *(Continued)*

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Component of non-controlling interests are measured either at fair value or at the present ownership instruments' proportionate share in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

When a business combination is achieve in stages, the Group's previously held equity interest in the acquire is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. When in prior periods, a changes in the value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income date, the amount shall be recognized on the same basis as would be required if the Group had desposed directly of the previously held equity interest.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. d. Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan non-pengendali, atas (b) jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi entitas anak setelah sebelumnya Manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. d. Business Combinations *(Continued)*

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. In its financial statements, during the measurement period the acquirer adjust, recognized additional assets or liabilities, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

At acquisition date, goodwill is measured at its cost being the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred and the amount of any non-controlling interest, over (b) the net of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the Management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. d. Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugiaan dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

2. e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan konsolidasian diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. d. Business Combinations *(Continued)*

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, be allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

If goodwill has been allocated to Cash Generating Units and certain operations on the Cash Generating Units is disposed, the goodwill associated with the operation disposed is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the operation disposed of and the portion of the Cash Generating Units retained.

2. e. Foreign Currency Transaction and Balances

The consolidated financial statements is measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Group and the presentation currency for the consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir setiap periode pelaporan:

- Pos moneter valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut;
- Pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali; dan
- Pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. e. Foreign Currency Transaction and Balances *(Continued)*

In preparing the consolidated financial statements, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each the reports:

- *Monetary items in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date;*
- *Non-monetary items measured at historical cost in foreign currencies are not retranslated; and*
- *Non-monetary item in foreign currencies measured at fair value are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined.*

At the consolidated statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current year profit or loss. The exchange rates used were as follows:

	2023	2022	
Mata Uang Asing			***Foreign Currency***
1 Poundsterling Inggris (GBP)	19.760,25	18.925,98	*GB Poundsterling 1 (GBP)*
1 Euro (EUR)	17.139,52	16.712,63	*Euro 1 (EUR)*
1 Franc Swiss (CHF)	18.374,28	16.967,98	*Swiss Franc 1 (CHF)*
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	15.416,00	15.731,00	*US Dollar 1 (USD)*
1 Dolar Singapura (SGD)	11.711,64	11.659,08	*Singapore Dollar 1 (SGD)*
1 Yen Jepang (JPY)	109,55	117,57	*Japan Yen1 (JPY)*

Selanjutnya, untuk pungutan dan penyetoran pajak-pajak (PPN dan PPh) berkenaan dengan tagihan dan kewajiban dalam mata uang asing dibayarkan dengan Rupiah, dan dicatat sesuai dengan "kurs pajak mingguan" yang berlaku pada tanggal diterbitkannya faktur pajak yang bersangkutan.

Furthermore, for the collection and remittance of taxes (VAT and income tax) denominated in foreign currency will be paid in Rupiah and are recorded using "weekly tax rate" prevailing at the date of issuance of respected tax invoice.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan dan Entitas Anak yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Grup yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. f. Transaction with Related Parties

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

1) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
   a) Has control or joint control over the reporting entity;
   b) Has significant influence over the reporting entity; or
   c) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applied:
   a) The entity and the reporting entity are members of the Company and Subsidiaries (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiary is related to the others).
   b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of the Group of which the other entity is a member).
   c) Both entities are joint ventures of the same third party.
   d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (Lanjutan)
   e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1).
   g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
   h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. f. Transaction with Related Parties *(Continued)*

2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applied: (Continued)
   e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
   f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1).
   g) A person identified in (1)(a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity)
   h) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham Entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan (Catatan 26).

2. g. Aset Keuangan

a) Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:
- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. f. Transaction with Related Parties *(Continued)*

Government related entity can be an entity which controlled or significanty influenced by the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE'e Ministry as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the financial statements (Note 26).

2. g. Financial Assets

a) Classification

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:
- *those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and*
- *those to be measured at amortised cost.*

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. g. Aset Keuangan (Lanjutan)

a) Klasifikasi (Lanjutan)

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah melakukan pemilihan takterbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

b) Pengukuran

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. g. Financial Assets *(Continued)*

a) Classification *(Continued)*

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

b) Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. g. Aset Keuangan (Lanjutan)

b) Pengukuran (Lanjutan)

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran dimana grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***2. g. Financial Assets** (Continued)*

***b) Measurement** (Continued)*

Debt instrument

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri dari kas ditangan, kas di bank (rekening giro) dan deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya, dan mana yang memiliki risiko tidak signifikan dari perubahan nilai.

2. i. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

2. h. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the consolidated statements of financial position consists of cash on hand, cash in banks and short-term deposits with a maturity of three months or less at the time of placements and not restricted to use, and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

2. i. Trade and Other Receivables

Trade receivables are amounts due from customers for merchandise sold or services performed in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. j. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

2. k. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis *forward-looking* untuk seluruh saldo piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Selain untuk piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan, Grup menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. j. Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankcrupty of the Group or the counterparty.

2. k. Impairment of Financial Assets

The Group applies the "simplified approach" to measure the Expected Credit Loss ("ECL") which uses a lifetime expected loss allowance on a forward-looking basis for all trade receivables and contract assets without significant financing component. Other than trade receivables and contract assets without significant financing component, the Group applies general model to ensure ECL.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. k. Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Definisi Gagal Bayar

Grup menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- Ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- Informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Grup, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Grup).

Terlepas dari analisis di atas, Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Grup menilai dengan basis *forward-looking* kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. k. Impairment of Financial Assets *(Continued)*

Definition of Default

The Group considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- *When there is a breach of financial covenants by the debtor; or*
- *Information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Group, in full (without taking into account any collateral held by the Group).*

Irrespective of the above analysis, the Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

The Group assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortised cost and FVOCI. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. k. Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan Penghapusan

Grup menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau untuk hal piutang usaha, ketika jumlahnya sudah lebih dari 120 hari tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas penagihan dalam prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

2. l. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. k. Impairment of Financial Assets *(Continued)*

Write-off Policy

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, or in the case of trade accounts receivable, when the amounts are over 120 days past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Group's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

2. l. Derecognition of Financial Assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. l. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (Lanjutan)

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai *FVTOCI*, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, direklasifikasi ke laba rugi.

Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih Grup pada pengakuan awal untuk diukur di *FVTOCI*, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

2. m. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih.

Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*). Penyisihan untuk persediaan usang dan/atau penurunan nilai persediaan ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. l. Derecognition of Financial Assets *(Continued)*

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is reclassified to profit or loss.

In contrast, on derecognition of an investment in an equity instrument which the Group has elected on initial recognition to measure at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

2. m. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value.

Acquisition cost is determined by the first-in first-out method. Allowance for obsolescence and/or impairment of inventory is determined to reduce the carrying value of inventories to net realizable value.

Net realizable value is the estimated sales price in the normal course of business less estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. n. Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada beban usaha sesuai masa manfaat biaya yang bersangkutan.

Uang muka adalah bagian dari kontrak yang dibayarkan atau diterima di muka untuk barang atau jasa. Uang muka dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan.

2. o. Aset Tetap

Grup menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi jika kriteria pengakuan. Sebaliknya pada saat inspeksi utama dilakukan, biaya itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. n. Prepaid Expenses and Advances

Prepaid expenses are amortized and charged to operating expenses over the periods benefited.

Advances is the portion of a contract paid or received in advance for goods or services. Advances are recorded as asset on the consolidated statements of financial position.

2. o. Fixed Assets

The Group use the cost model for fixed assets measurement.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment value, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred if the recognition criteria are met. On the other hand when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as replacement if the recognition criteria are satisfied.

Expenditures incurred after the fixed assets have been put into operation, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the fixed assets beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. o. Aset Tetap (Lanjutan)

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) untuk bangunan dan metode saldo menurun ganda (*double declining method*) untuk inventaris dan kendaraan bermotor selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. o. Fixed Assets *(Continued)*

Depreciation is calculated based on the straight-line method for buildings and the double declining method for inventory and vehicles during the useful life of fixed assets as follows:

Jenis aset tetap	Tahun/*Years*	*Type of fixed assets*
Gedung	20 Tahun/*Years*	*Buildings*
Inventaris Kelompok 1	4 Tahun/*Years*	*Office Equipment Group 1*
Inventaris Kelompok 2	8 Tahun/*Years*	*Office Equipment Group 2*
Inventaris Kelompok 3	16 Tahun/*Years*	*Office Equipment Group 3*
Kendaraan Bermotor Kelompok 1	4 Tahun/*Years*	*Vehicles Group 1*
Kendaraan Bermotor Kelompok 2	8 Tahun/*Years*	*Vehicles Group 2*

Di dalam pencatatan Grup, tidak terdapat masa manfaat ekonomis di inventaris yang lebih dari 16 tahun.

In the Group's records, there is no economic useful life of office equipment that is more than 16 years.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan sebagai bagian dari akun "Aset takberwujud" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hak dan umur ekonomis tanah.

Land is stated at cost and is not depreciated. The legal cost of land rights when the land was acquired initially is recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and is not amortized. Meanwhile the extension or the legal renewal costs of land rights are recognized as deferred charges as part of "Intangible Assets" account in the consolidated statement of financial position and are amortized over the shorter of the right's life and land's economic life.

Gedung dinyatakan berdasarkan biaya perolehan awal aset tersebut ditambahkan dengan biaya perbaikan selama aset tersebut dipergunakan. Grup tidak mengkapitalisasikan biaya pengecatan atas gedung ke dalam nilai perolehan aset. Umur ekonomis gedung adalah 20 tahun, terhitung pada saat gedung tersebut dan perbaikannya mulai digunakan.

Buildings are stated based on the initial cost of the asset plus the cost of repairs if the asset is in use. The Group does not capitalize the cost of painting the buildings into the acquisition value of assets. The economic life of the building is 20 years, from the time the building and its repairs to the building are used.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. o. Aset Tetap (Lanjutan)

Inventaris dikelompokkan menjadi 3 jenis kelompok dengan batas minimal kapitalisasi aset minimal sebesar Rp1.000.000. Masa manfaat ekonomis untuk kategori inventaris kelompok 1 adalah 4 tahun, inventaris kelompok 2 adalah 8 tahun dan inventaris kelompok 3 adalah 16 tahun. Grup tidak memiliki barang inventaris yang memiliki umur manfaat ekonomis lebih dari 16 tahun.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan. Jika ada dengan jumlah tercatat dari aset tetap dan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Pada setiap akhir periode buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu secara prospektif, jika sesuai.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***2. o. Fixed Assets** (Continued)*

Office equipment is grouped into 3 types of group with a minimum asset capitalization limit of at least Rp1,000,000. The economic useful life for office equipment category group 1 is 4 years, office equipment group 2 is 8 years and office equipment group 3 is 16 years. The Group does not have any office equipment that has an economic useful life of more than 16 years.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of property and equipment (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item) is included in the consolidated statement of comprehensive income in the year the item is derecognized.

At the end of each financial period, the assets' residual values, useful life and method of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate.

Assets in progress are stated at cost and disclosed as part of the property and equipment. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property and equipment account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. p. Sewa

Suatu sewa di mana porsi yang signifikan atas risiko dan manfaat kepemilikan aset masih tetap berada di tangan *lessor*, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari *lessor*) dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Sewa aset tetap di mana entitas memiliki secara substansi seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewa atau sebesar nilai kini pembayaran sewa minimum, jika nilai kini jumlahnya lebih dari nilai wajar.

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset tertentu dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Apabila perjanjian mengandung sewa, entitas akan menilai apakah perjanjian sewa tersebut adalah sewa pembiayaan atau sewa operasi. Jika suatu perjanjian mengandung sewa, sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset akan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, sebaliknya akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

2. p. Lease

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to the consolidated statement of comprehensive income on a straight-line basis over the period of the lease.

Leases of fixed assets where the entity substantially has all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments.

The determination whether an agreement is, or contains, a lease is based on the substance of the agreement at the lease commencement date and whether the fulfilment of the agreement is dependent on the use of a specific asset and the agreement conveys a right to use the asset. If an agreement contains a lease, the entity will assess whether such a lease is finance or operating lease. If an agreement contains a lease, a lease that transfers substantially to the lessee all the risks and rewards incidental to ownership of the leased item is classified as a finance lease, otherwise it is classified as an operating lease.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. p. Sewa (Lanjutan)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara bagian yang merupakan pelunasan liabilitas dan bagian yang merupakan beban keuangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo pembiayaan. Unsur bunga dalam beban keuangan dibebankan di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas setiap periode.

Laba (rugi) penjualan akibat transaksi *sales and leaseback* atas aset sewa guna usaha dengan metode *capital lease* ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional sepanjang umur manfaat aset sewa guna usaha yang bersangkutan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset sewa diakui pada dalam laporan dari sewa pembiayaan dimana sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset.

Kebijakan penyusutan aset sewa guna menggunakan metode garis lurus selama masa kontrak aset tersebut.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***2. p. Lease** (Continued)*

Each lease payment is allocated between the liability and finance costs to achieve a constant rate of interest on the outstanding finance balance. The interest element of the finance cost is charged to the consolidated statements of comprehensive income over the lease period to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Gain (loss) on sales and leaseback transaction of leased asset by capital lease method is deferred and amortized proportionally during the useful life of leased assets and is calculated using straight-line method.

Leased assets are recognized in a report from a finance lease where the lease transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset.

Depreciation policy for leased assets uses the straight-line method during the contract period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. p. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal insepsi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Perusahaan menyewa aset tetap tertentu. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk jangka waktu tetap 3 hingga 5 tahun tetapi mungkin memiliki perpanjangan.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***2. p. Lease** (Continued)*

The Company as a Lessee

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The Company leases certain fixed asset. Rental contracts are typically made for fixed periods of 3 to 5 years but may have extension.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. p. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa (Lanjutan)

Bunga pinjaman inkremental bergantung pada jangka waktu, mata uang dan tanggal mulai sewa, dan ditentukan berdasarkan serangkaian input, termasuk: tingkat bebas risiko berdasarkan suku bunga obligasi pemerintah; penyesuaian risiko khusus negara; penyesuaian risiko kredit berdasarkan imbal hasil obligasi; dan penyesuaian khusus entitas ketika profil risiko entitas yang melakukan perjanjian sewa berbeda dengan Perusahaan dan sewa tersebut tidak memperoleh manfaat atas jaminan dari Perusahaan.

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan pembelian opsi, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak pakai juga mengalami penurunan nilai. Lihat kebijakan akuntansi di bagian Penurunan Nilai aset non-keuangan.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi insentif sewa
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif, awalnya diukur menggunakan indeks atau tarif pada tanggal dimulainya;
- jumlah yang diharapkan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai sisa;

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***2. p. Lease** (Continued)*

The Company as a Lessee (Continued)

The incremental borrowing rate depends on the term, currency and start date of the lease and is determined based on a series of inputs including: the risk-free rate based on government bond rates; a country-specific risk adjustment; a credit risk adjustment based on bond yields; and an entity-specific adjustment when the risk profile of the entity that enters into the lease is different to that of the Company and the lease does not benefit from a guarantee from the Company.

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also subject to impairment. Refer to the accounting policies in Impairment of non-financial assets section.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- *fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;*
- *variable lease payment that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. p. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa (Lanjutan)

- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk melaksanakannya opsi, dan
- pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk mereflesikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***2. p. Lease** (Continued)*

The Company as a Lessee (Continued)

- *the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option, and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.*

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under SFAS 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. p. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa (Lanjutan)

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Perusahaan menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "Beban umum dan administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. p. Lease *(Continued)*

The Company as a Lessee (Continued)

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The Company applies SFAS 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "General and administrative expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. p. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa (Lanjutan)

Opsi Perpanjangan dan Penghentian

Opsi perpanjangan dan penghentian termasuk dalam sejumlah properti dan peralatan sewa Perusahaan. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan penghentian yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan dan bukan oleh *lessor* yang bersangkutan.

2. q. Properti Investasi

Properti investasi diukur dengan model biaya (*cost model*) dan selanjutnya model revaluasi (*revaluation model*). Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan yang dikuasai Grup untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrasi atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Grup merevaluasi atas aset properti investasi. Revaluasi aset properti investasi bukan untuk tujuan perpajakan tetapi hanya untuk pelaporan komersial.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. p. Lease *(Continued)*

The Company as a Lessee (Continued)

Extension and Termination Options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases of the Company. These terms are used to maximize operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Company and not by the respective lessor.

2. q. Investment Properties

Investment properties are measured on cost model and then fair value model. Such cost includes the cost of replacing part of the investment properties if the recognition criteria are met and excludes the daily costs on their usage.

Investment properties consist of land and building controlled by the Group which are held to earn rentals or for capital appreciation or both, and not to be used in the production or supply of goods or services for administrative purposes or sale in the daily business activities.

The Group have revalued its investment property. Revaluation of investment property is not for tax purposes but only for commercial reporting.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. q. Properti Investasi (Lanjutan)

Properti investasi awalnya diukur berdasarkan biayanya, termasuk biaya transaksi yang terkait dan biaya pinjaman yang berlaku.

Setelah pengakuan awal, properti investasi dicatat sebesar nilai wajarnya. Properti investasi yang sedang dalam pengembangan ulang untuk penggunaan lebih lanjut sebagai properti investasi atau ketika pasar menjadi kurang aktif tetap dicatat sebesar nilai wajarnya. Properti investasi dalam konstruksi diukur menggunakan nilai wajar jika nilai wajar dianggap dapat diukur secara andal. Properti investasi dalam konstruksi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, tetapi Grup mengharapkan nilai wajarnya dapat diukur secara andal ketika konstruksi selesai, diukur senilai biaya dikurangi penurunan nilai sampai nilai wajarnya dapat diukur secara andal atau konstruksi diselesaikan – yang mana yang lebih awal.

Terkadang sulit untuk mengukur secara andal nilai wajar dari properti investasi dalam konstruksi. Untuk mengevaluasi apakah nilai wajar dari properti investasi dalam konstruksi dapat diukur secara andal, Manajemen mempertimbangkan faktor-faktor berikut, antara lain, provisi dari kontrak konstruksi, tahap penyelesaian, apabila properti standar (umum di pasaran) atau tidak standar, tingkat keandalan arus kas masuk setelah penyelesaian, risiko pengembangan spesifik atas properti, pengalaman terdahulu dengan konstruksi serupa dan status izin konstruksi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. q. Investment Properties *(Continued)*

Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable borrowing costs.

After initial recognition, investment property is carried at fair value. Investment properties that is being redeveloped for continuing use as investment property or for which the market has become less active continues to be measured at fair value. Investment properties under construction is measured at fair value if the fair value is considered to be reliably determinable. Investment properties under construction for which the fair value cannot be determined reliably, but for which the Group expects that the fair value of the property will be reliably determinable when construction is completed, are measured at cost less impairment until the fair value becomes reliably determinable or construction is completed - whichever is earlier.

Reliably measuring the fair value of investment properties under construction can be challenging at times. To evaluate the feasibility of accurately assessing the fair value of these properties, the Management considers several factors. These factors include provisions outlined in construction contracts, the stage of completion, whether the property is considered standard (commonly found in the market) or non-standard, the reliability of incoming cash flows after completion, specific development risks associated with the property, experience with similar construction projects and the status of construction permits.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. q. Properti Investasi (Lanjutan)

Nilai wajar ditetapkan berdasarkan harga pasar aktif, dan dapat disesuaikan jika terdapat perbedaan dalam karakteristik, lokasi, atau kondisi aset. Jika informasi tersebut tidak tersedia, Grup menggunakan metode penilaian alternatif, seperti harga terbaru di pasar yang kurang aktif atau proyeksi arus kas yang didiskontokan. Penilaian dilakukan pada tanggal neraca oleh penilai ahli dengan kualifikasi yang diakui dan relevan dan memiliki pengalaman terbaru atas lokasi dan kategori dari properti investasi dinilai. Penilaian ini membentuk dasar untuk nilai tercatat pada laporan keuangan konsolidasian.

Penambahan selanjutnya dikapitalisasi ke nilai tercatat aset hanya ketika ada keuntungan ekonomi di masa yang akan datang dapat dinikmati oleh Grup dari penambahan tersebut dan hal tersebut dapat diukur secara andal. Biaya perbaikan dan perawatan lainnya akan menjadi biaya saat terjadi. Ketika bagian dari properti investasi digantikan, nilai tercatat dari bagian yang digantikan tersebut akan dihapus.

Perubahan nilai wajar diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Properti investasi berhenti diakui ketika dilepas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. q. Investment Properties *(Continued)*

The fair value is determined based on active market prices, and being adjusted with differences in the characteristics, location, or condition of the asset, if any. If this information is not available, the Group uses alternative valuation methods, such as recent prices on less active markets or discounted cash flow projections. Valuations are performed as of the financial position date by professional appraiser who hold recognized and relevant professional qualifications and have recent experience in the location and category of the investment property being valued. These valuations form the basis for the carrying amounts in the consolidated financial statements.

Subsequent expenditure is capitalized to the asset's carrying amount only when it is probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred. When part of an investment property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognized.

Changes in fair values are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Investment properties are derecognized when they have been disposed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. q. Properti Investasi (Lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Perpindahan ke properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Perpindahan dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Jika properti yang digunakan pemilik berubah menjadi properti investasi yang akan dicatat dengan menggunakan nilai wajar, maka entitas menerapkan PSAK 16: Aset Tetap untuk properti yang dimiliki dan PSAK 73: Sewa untuk properti yang dikuasai oleh penyewa sebagai aset hak guna sampai dengan tanggal perubahan penggunaannya. Entitas memperlakukan selisih pada tanggal tersebut antara jumlah tercatat properti berdasarkan PSAK 16 atau PSAK 73 dan nilai wajarnya dengan cara yang sama sebagaimana revaluasi sesuai dengan PSAK 16.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. q. Investment Properties *(Continued)*

An investment property should be derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal of an investment property is credited or charged to operations in the year the asset is derecognized.

Transfer to investment properties is carried out if and only if there is a change of use as indicated by the end of use by the owner, the commencement of operating leases to other parties or the completion of construction or development. Transfer from investment properties are carried out if and only if there is a change of use as indicated by the commencement of owner-use or commencement of development for sale.

If an owner-occupied from investment property becomes an investment property that will carried at fair value an entity shall apply SFAS 16 for owned property and SFAS 73 for property held by a lease as a right-of-use asset up to the date of change in use. The entity shall treat any difference at that date between the carrying amount of the property in accordance with SFAS 16 or SFAS 73 and its fair value in the same way as a revaluation in accoordance with SFAS 16.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. r. Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada saat pengakuan awal sebesar biaya perolehan. Biaya aset takberwujud yang diperoleh dalam penggabungan usaha adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai jika ada. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi tidak dikapitalisasi dan pengeluarannya tercermin dalam laporan laba rugi pada tahun di mana pengeluaran tersebut terjadi.

Masa manfaat dari aset takberwujud dapat dianggap memiliki masa manfaat terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset takberwujud. Aset takberwujud Grup memiliki taksiran masa umur manfaat ekonomis selama 5 tahun.

Perubahan masa manfaat yang diharapkan atau pola yang diharapkan dari konsumsi manfaat ekonomi masa depan aset takberwujud tersebut dicatat dengan mengubah periode amortisasi atau metode yang sesuai dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam kategori biaya sesuai dengan fungsi dari aset takberwujud.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. r. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is its fair value as at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Internally generated intangible assets including capitalized development cost are not capitalized and expenditure is reflected in profit or loss in the year in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed either restricted or unrestricted. Intangible assets with restricted lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that intangible assets may be impaired. The Group intangible assets have estimated useful live of 5 years.

Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are recorded by changing the amortization period or method as appropriate and are treated as changes in accounting estimates. The amortization of intangible assets with definite lives is recognized in consolidated profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. r. Aset Takberwujud (Lanjutan)

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tetapi diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya baik secara individual maupun pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian masa manfaat tidak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa manfaat tidak terbatas terus mendukung. Jika tidak ada perubahan, masa manfaat dari tak terbatas menjadi terbatas dilakukan secara prospektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. s. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada akhir setiap periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset. Ketika dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi, aset perusahaan juga dialokasikan ke masing masing kelompok unit penghasil kas, atau sebaliknya mereka dialokasikan ke kelompok terkecil dari kelompok unit penghasil kas di mana dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. r. Intangible Assets *(Continued)*

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized but are tested for impairment annually either individually or at the cash generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to definite is made on a prospective basis. Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

2. s. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where the asset does not generate cash flows that are independent from other assets, the Group estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs. When a reasonable and consistent basis of allocation can be identified, corporate assets are also allocated to individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to the smallest group of cash-generating units for which a reasonable and consistent allocation basis can be identified.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. s. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (Lanjutan)

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas dan aset tak berwujud yang belum tersedia untuk digunakan diuji penurunan nilainya setiap tahun dan ketika terdapat indikasi penurunan nilai.

Jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dengan estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset tersebut disajikan pada jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan disajikan pada jumlah revaluasian, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. s. Impairment of Non-Financial Assets *(Continued)*

Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for impairment annually, and whenever there is an indication that the asset maybe impaired.

Recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. t. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai *FVTPL* atau pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontinjen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai *FVTPL*, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

2. t. Financial Liabilities

Financial liabilities are classified as either financial liabilities "at FVTPL" or "at amortized cost" using the effective interest method.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. u. Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

2. v. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

2. u. Trade Payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payable are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

2. v. Borrowings

Borrowings are recognized initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalized as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. v. Pinjaman (Lanjutan)

Biaya pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non-kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Ketika liabilitas keuangan dinegosiasikan kembali dan entitas mengeluarkan instrumen ekuitas kepada kreditor untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian liabilitas (*debt for equity swap*), keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi yang dicatat sebagai selisih antara jumlah tercatat dari liabilitas keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. v. Borrowings *(Continued)*

Borrowing cost are removed from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognized in profit or loss as other income or finance costs.

Where the terms of a financial liability are renegotiated and the entity issues equity instruments to a creditor to extinguish all or part of the liability (debt for equity swap), a gain or loss is recognized in profit or loss, which is measured as the difference between the carrying amount of the financial liability and the fair value of the equity instruments issued.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. w. Biaya Pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

2. x. Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. w. Borrowing Cost

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying assets, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying assets.

2. x. Derecognition of Financial Liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. x. Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Ketika Grup bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Grup memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

2. y. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***2. x. Derecognition of Financial Liabilities** (Continued)*

When the Group exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Group accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10% different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

2. y. Provision

Provisions are recognized when the Group have a present obligation (legal or constructive) as a result if because of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits can be made to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. y. Provisi (Lanjutan)

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas (ketika pengaruh nilai waktu uang bersifat material).

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

2. z. Imbalan Kerja

Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (“UU 13/2003”) sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU 11/2020”), Grup disyaratkan untuk memberikan imbalan pensiun sekurang-kurangnya seperti imbalan pensiun yang diatur dalam UU 11/2020, yang pada dasarnya adalah program imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai UU lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. y. Provision *(Continued)*

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of time value of money is material).

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

2. z. Employee Benefits

In accordance with the Manpower Act No. 13/2003 ("Law 13/2003") as amended through Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation ("Law 11/2020"), the Group is required to provide pension benefits at least as regulated in Law 11 /2020, which is basically a defined benefit plan. If the pension benefit under the Law is greater than the existing pension plan, the difference is recognized as part of the pension benefit liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. z. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") menerbitkan siaran pers mengenai "Pengatribusian imbalan pada periode jasa" dan oleh karena itu Grup mengubah kebijakan terkait dengan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 24 "Imbalan Kerja" mengikuti pola fakta umum program pensiun berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021.

Program Iuran Pasti

Iuran pasti untuk program pensiun dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun dimana iuran tersebut terkait.

Program Imbalan Pasti

Surplus dan defisit program imbalan pasti diukur pada:

- Nilai wajar dari aset yang direncanakan pada tanggal pelaporan; dikurangi

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. z. Employee Benefits *(Continued)*

In April 2022, Financial Accounting Standard Boards – Indonesian Institute of Accountant ("FASB-IIA") published a press release regarding "Attributing benefit to periods of service" and accordingly the Group changed the policy related to attributing benefit to periods of service in accordance with the provisions in SFAS No. 24 "Employee Benefit" following the general fact pattern of pension programs based on the Labor Law No. 11/2020 and Government Regulation No. 35/2021.

Defined Contribution Program

Defined contributions for pension plans are charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year in which the contributions are related.

Defined Benefit Plan

Defined benefit plan surpluses and deficits are measured at:

- *The fair value of plan assets at the reporting date; less*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. z. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Program Imbalan Pasti (Lanjutan)

Surplus dan defisit program imbalan pasti diukur pada: (Lanjutan)

- Liabilitas program yang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* yang didiskonto ke nilai kini dengan menggunakan imbal hasil obligasi Pemerintah yang berkualitas tinggi yang tersedia yang memiliki tanggal jatuh tempo yang mendekati persyaratan liabilitas; ditambah
- Biaya servis masa lalu yang tidak diakui; dikurangi
- Dampak persyaratan pendanaan minimum yang disetujui dengan skema wali amanat.

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti neto diakui langsung dalam ekuitas. Pengukuran kembali tersebut termasuk:

- Keuntungan dan kerugian aktuaris;
- Imbalan atas aset program (tidak termasuk bunga); dan
- Aset dengan efek batas tertinggi (tidak termasuk bunga).

Biaya jasa diakui dalam laporan laba rugi dan termasuk biaya jasa kini dan masa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. z. Employee Benefits *(Continued)*

Defined Benefit Plan *(Continued)*

Defined benefit plan surpluses and deficits are measured at: (Continued)

- *Plan liabilities calculated using the projected unit credit method discounted to its present value using yields available on high quality Government bonds that have maturity dates approximating to the terms of the liabilities; plus*
- *Unrecognized past service costs; less*
- *The effect of minimum funding requirements agreed with scheme trustees.*

Remeasurements of the net defined benefit obligation are recognized directly within equity. The remeasurements include:

- *Actuarial gains and losses;*
- *Return on plan assets (interest excluded); and*
- *Any asset ceiling effects (interest excluded).*

Service costs are recognized in profit or loss and include current and past service costs as well as gains and losses on curtailments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. z. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Program Imbalan Pasti (Lanjutan)

Beban bunga neto (pendapatan) diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban imbalan pasti (aset) pada awal periode tahunan hingga pembayaran manfaat selama periode.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan manfaat program atau kurtailmen diakui secara langsung dalam laba rugi.

Penyelesaian program manfaat pasti diakui dalam periode dimana penyelesaian tersebut terjadi.

Manfaat Jasa Jangka Panjang Lain

Imbalan kerja lain yang diharapkan untuk diselesaikan secara keseluruhan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Imbalan kerja lain yang tidak diharapkan untuk diselesaikan secara keseluruhan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang dan dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan kemudian didiskonto dengan menggunakan imbal hasil obligasi Pemerintah berkualitas tinggi yang tersedia dengan tanggal jatuh tempo mendekati sisa periode yang diharapkan untuk diselesaikan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. z. Employee Benefits *(Continued)*

Defined Benefit Plan *(Continued)*

Net interest expense (income) is recognized in the income statement and is calculated by applying a discount rate to measure the defined liability (asset) at the beginning of the annual period to the payment of benefits during the period.

Gains or losses arising from changes to scheme benefits or scheme curtailment are recognized immediately in profit or loss.

Settlements of defined benefit schemes are recognized in the period in which the settlement occurs.

Other Long-term Service Benefits

Other employee benefits that are expected to be settled within 12 (twelve) months after the end of the reporting period are presented as current liabilities.

Other employee benefits that are not expected to be settled within 12 (twelve) months after the end of the reporting period are presented as non-current liabilities and calculated using the projected unit credit method and then discounted using yields available on high quality Government bonds that have maturity dates approximating to the expected remaining period to settlement.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. aa. Distribusi Laba

Sesuai dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan No. 117 tanggal 20 Juni 1995, pembagian laba bersih setelah pajak dipergunakan untuk cadangan dan dividen, (persentasenya ditetapkan tiap tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)).

2. ab. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan Pendapatan

Sejak 1 Januari 2020, Grup telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3) Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

2. aa. Profit Distribution

According to the Articles of Association through Deed No. 117 dated June 20, 1995, share of net profit after tax is used for reserves and dividends (the percentage is set each year in the General Meeting of Shareholders (GMS)).

2. ab. Revenue and Expenses Recognition

Revenue Recognition

From January 1, 2020, the Group has applied SFAS 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1) Identify contract(s) with a customer.
2) Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3) Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ab. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pengakuan Pendapatan (Lanjutan)

4) Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah marjin.
5) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:
a) Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan); atau
b) Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. ab. Revenue and Expenses Recognition *(Continued)*

Revenue Recognition *(Continued)*

4) Allocate the transaction price to each performance obligation based on the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost-plus margin.

5) Recognize revenue when the performance obligation is satisfied by transferring the promised goods or services to the customer (which is when the customer obtains control of the goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:
a) A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or

b) Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ab. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pengakuan Pendapatan (Lanjutan)

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"). Grup menelaah pengaturan pendapatannya melalui kriteria tertentu untuk menentukan apakah bertindak sebagai prinsipal atau agen. Grup berkesimpulan bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatan.

Pendapatan Surat Pos dan Paket Pos

Pendapatan dari surat pos dan paket pos yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari jasa layanan surat pos dan paket pos yang merupakan aktivitas normal Grup.

Pendapatan diakui pada suatu waktu pada saat surat atau paket diserahkan di *front end* untuk dilakukan pemrosesan dan pengiriman.

Pendapatan Ritel dan Properti

Pendapatan ritel dan properti yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari jasa penjualan ritel dan jasa sewa properti yang merupakan aktivitas normal Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. ab. Revenue and Expenses Recognition *(Continued)*

Revenue Recognition *(Continued)*

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Taxes ("VAT"). The Group assesses its revenue arrangements against specific criteria to determine if it is acting as principal or agent. The Group has concluded that it is acting as a principal in all of its revenue arrangements.

Revenue from Post Mail and Parcel

Revenue from post mail and parcel is gross inflow from economic benefits which arise from post mail and parcel services which are the Group normal operation activity.

Revenue is recognized at point in time when mail and parcel is handed over to the front end for processing and delivery.

Revenue from Retail & Property

Revenue from retail and property is gross inflow from economic benefit which arise from retail sales and property lease which is the Group's, normal operation activity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ab. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pendapatan Logistik

Pendapatan logistik yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari jasa layanan kiriman jumbo dan pergudangan.

Pendapatan logistik diakui ketika Grup telah memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan menyerahkan barang yang dijanjikan kepada pelanggan.

Pendapatan Jasa Keuangan

Pendapatan jasa keuangan yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari jasa layanan pospay dan jasa keuangan lainnya yang merupakan aktivitas normal Perseroan.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

2. ac. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui di dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak tersebut terkait dengan unsur-unsur yang terkait di dalam penghasilan komprehensif lain atau terkait langsung di dalam ekuitas. Dalam hal ini, pajak juga diakui masing-masing di dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui di dalam ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. ab. Revenue and Expenses Recognition *(Continued)*

Revenue from Logistic

Revenue from logistic is gross inflow from economic benefit which arises from jumbo shipping services and warehousing.

Revenue from logistic recognized when the Group has fulfilled its performance obligations by transferring goods promised to customers.

Revenue from Financial Services

Revenue from financial services is gross inflow from economic benefit which arise from pospay and other financial services which is the Company's normal operation activity.

Expenses Recognition

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

2. ac. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognise in other comprehensive income or directly in equity. In this case the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ab. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pajak Kini

Beban pajak penghasilan kini dihitung dengan dasar peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Aset dan/atau liabilitas pajak penghasilan kini terdiri dari kewajiban kepada maupun tagihan dari fiskus terkait dengan periode pelaporan kini atau sebelumnya yang belum dibayar pada akhir setiap periode pelaporan. Aset dan/atau liabilitas pajak penghasilan kini tersebut dihitung berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku pada periode fiskal terkait berdasarkan laba kena pajak periode tersebut. Seluruh beban aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai unsur beban pajak penghasilan di dalam laba rugi.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Penghasilan Badan diakui sebagai bagian dari Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - periode berjalan, sedangkan untuk SKP selain PPh Badan diakui dalam beban lainnya dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. ab. Revenue and Expenses Recognition *(Continued)*

Current Tax

The current income tax charge is calculated based on the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Current income tax assets and/or liabilities comprise those obligations to or claims from tax authorities relating to the current or prior reporting period that are unpaid at the end of each reporting period date. Assets and/or liabilities are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal periods to which they relate based on the taxable profit for the period. All changes to current tax assets or liabilities are recognized as a component of income tax expense in profit or loss.

The amounts of additional tax principal and penalty imposed through a Tax Assessment Letter (SKP) of Corporate Income Tax are recognized as part of Income Tax Benefit (Expense) – current, while other SKP is recognized as part of other expenses of the current period in the consolidated statement of comprehensive income unless further settlement is submitted. The amounts of tax principal and penalty imposed through an SKP are deferred as long as they meet the asset recognition criteria.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ac. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode laporan posisi keuangan pada perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya didalam laporan keuangan konsolidasian. Aset pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang terdapat kemungkinan laba kena pajak di masa depan akan timbul dimana perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan. Liabilitas kena pajak diakui bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak. Manfaat pajak di masa depan seperti akumulasi kerugian pajak yang belum dikompensasi juga diakui selama realisasi manfaat tersebut kemungkinan terjadi.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali bagi liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari:

1. Pengakuan awal *goodwill*; atau
2. Pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang: (1) bukan transaksi kombinasi bisnis; dan (2) pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba/rugi pajak.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***2. ac. Taxation** (Continued)*

Deferred Tax

Deferred income tax assets and liabilities are recognized using the balance sheet method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Future tax benefits such as the carry-forward of unused tax losses are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except for the deferred tax liability arising from:

1. *The initial recognition of goodwill; or*
2. *The initial recognitiob of an asset or liability in a transaction that is: (1) not a business combination; and (2) at the time of the transaction affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ac. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Nilai tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang setiap periode pelaporan dan dikurangkan selama tidak terdapat kemungkinan laba kena pajak yang cukup akan timbul untuk memanfaatkan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui dinilai ulang setiap periode pelaporan dan diakui sepanjang terdapat kemungkinan penghasilan kena pajak di masa depan akan memulihkan aset pajak tangguhan.

Jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset/liabilitas pajak tangguhan diselesaikan/dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset dan liabilitas pajak penghasilan ditangguhkan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan maupun entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda dimana terdapat intensi untuk menyelesaikan saldo pada basis yang sama.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. ac. Taxation *(Continued)*

Deferred Tax *(Continued)*

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed each reporting period and reduced to the extent that it is not probable that sufficient taxable profit will arise to utilize part or all of the deferred tax assets. Unrecognized deferred tax assets are reassessed each reporting period and recognized to the extent that it is probable that future taxable income will recover the deferred tax assets.

The amount of the deferred tax asset or liability is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the reporting date and are expected to apply when the deferred tax assets/liabilities are settled/recovered.

Deferred tax assets and liabilities are offset when the Group have a legally enforceable right to offset current tax assets against liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes charged by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ac. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

1. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari unsur beban-beban yang diterapkan; dan
2. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

2. ad. Persediaan Aset Real Estat

Aset real estat terdiri dari ruko yang siap dijual dan tanah yang sedang dikembangkan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Biaya perolehan bangunan yang sedang dalam proses konstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada aktivitas, pengembangan real estat dan biaya pinjaman serta dipindahkan ke bangunan yang siap dijual pada saat selesai dibangun dan siap dijual.

Biaya aktivitas pengembangan real estat yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat adalah:

- Biaya pra-perolehan tanah;
- Biaya perolehan tanah;
- Biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek;

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***2. ac. Taxation** (Continued)*

Value Added Tax

Revenue, expenses, and assets are recognized net of the amount of VAT except:

1. *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
2. *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

2. ad. Real Estate Assets Inventories

Real estate assets consisting of shophouse available for sale and land under development are stated at cost or net realizable values, whichever is lower.

The cost of buildings under construction includes the cost of land that has been completed plus construction costs, other costs attributable to activities, real estate development and borrowing costs as well as being transferred to buildings ready for sale when they are completed and ready for sale.

The real estate development costs which are capitalized to the real estate development project are:

- *Land pre-acquisition costs;*
- *Land acquisition cost;*
- *Costs directly related to the project;*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ad. Persediaan Aset Real Estat (Lanjutan)

Biaya aktivitas pengembangan real estat yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat adalah: (Lanjutan)

- Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat;
- Biaya pra-perolehan tanah atas tanah yang tidak berhasil diperoleh; dan
- Kelebihan biaya dari hasil yang diperoleh atas pembangunan sarana umum yang dikomersialkan yang dijual atau dialihkan sehubungan dengan penjualan unit.

Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat dialokasikan ke setiap unit real estat dengan metode identifikasi khusus.

Beban yang diakui pada saat terjadinya adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proyek real estat.

2. ae. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi sebagai komite pengarah yang mengambil keputusan strategis.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

***2. ad. Real Estate Assets Inventories** (Continued)*

The real estate development costs which are capitalized to the real estate development project are: (Continued)

- *Cost that are attributable to real estate development activities;*
- *Pre-acquisition costs of land which is not successfully acquired; and*
- *Excess of costs over anticipated proceeds on the sale or transfer of commercialized public utilities in connecteon with the sale of units.*

Costs capitalized to real estate project development are allocated to each real estate unit using the specific identification method.

Expenses which are not related to the development of real estate are charged to expense when incurred.

2. ae. Operating Segment

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the key operating decision-maker. The key operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as the steering committee that makes strategic decisions.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ae. Segmen Operasi (Lanjutan)

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja terfokus pada kategori pada setiap produk, yang menyerupai informasi segmen yang dilaporkan di periode sebelumnya. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. ae. Operating Segment *(Continued)*

An operating segment is a component of entity which:

- *that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);*
- *whose operating results are reviewed regularly by key operating decision-maker to make decisions regarding the resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*
- *for which discrete financial information is available.*

The information used by the key operating decision-maker for the purpose of resource allocation and performance assessment is more specifically focused on the category of each product, which is similar to the business segment reported in the prior period. All transactions between segments have been eliminated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. af. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Namun pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika adanya kemungkinan arus masuk dari manfaat ekonomi.

2. ag. Modal Saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

Ketika Grup membeli modal saham ekuitas entitas (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

2. af. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements. However, disclosure is not required if an outflow of resources embodying economic benefits is unlikely. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when there is possibility for inflow of economic benefits.

2. ag. Share Capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

Where the Group purchases the Company's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the Company's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary share are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Company's equity holders.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ah. Laba per Lembar Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba selama tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode berjalan.

2. ai. Biaya Emisi Obligasi

Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

2. aj. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Grup setelah tanggal neraca yang menyediakan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan jika material. Peristiwa setelah tanggal neraca yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (Continued)*

2. ah. Earning per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing net income for the year attributable to the owners of the parent company with the weighted average number of the outstanding issued and fully paid shares during the period.

2. ai. Bonds Issuance Costs

Bonds issuance costs are transaction costs to be deducted from the proceeds to determine the net proceeds of bonds. The difference between the net proceeds and the nominal value is a discount or premium and will be amortized over the term of the bonds.

2. aj. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Group at the reporting date (adjusting events) are reflected in the financial statements when material. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini.

a. Penggunaan Asumsi Kelangsungan Usaha

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi Grup, selain yang melibatkan estimasi, manajemen telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan asumsi bahwa Grup akan dapat mempertahankan kelangsungan usaha dalam operasinya di tahun mendatang, yang merupakan pertimbangan penting yang berdampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Penilaian asumsi kelangsungan usaha melibatkan pengambilan keputusan oleh manajemen, pada titik waktu tertentu, tentang hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi yang secara inheren tidak pasti. Manajemen Grup mempertimbangkan bahwa Grup memiliki kemampuan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan peristiwa atau kondisi utama, yang dapat menimbulkan risiko bisnis, yang secara individual atau kolektif dapat menimbulkan keraguan signifikan atas asumsi kelangsungan usaha.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

Critical Accounting Estimates and Assumptions

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below.

a. The Use of Going Concern Assumption

In the process of applying the Group's accounting policies, apart from those involving estimations, management has prepared the consolidated financial statements on the assumption that the Group will be able to operate as a going concern in the coming years, which is a critical judgement that has the most significant effect on the amounts recognised in the consolidated financial statements. The assessment of the going concern assumption involves making a judgement by the management, at a particular point of time, about the future outcome of events or conditions which are inherently uncertain. The Group's management considers that the Group has the capability to continue as a going concern and the major events or conditions, which may give rise to business risks, that individually or collectively may cast significant doubt upon the going concern.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

b. Ketidakpastian Eksposur Perpajakan

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat pada akun tagihan pajak dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak. Lebih lanjut, manajemen mempertimbangkan liabilitas yang mungkin timbul dari hasil pemeriksaan pajak yang masih diajukan keberatannya.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Grup membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak yang belum diakui harus diakui.

c. Imbalan Kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa mendatang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (Continued)*

***Critical Accounting Estimates and Assumptions** (Continued)*

b. Uncertain Tax Exposures

Based on the tax regulations currently enacted, management assessed whether the amounts recorded underestimated claims for tax refund are recoverable and refundable by the Tax Office. Further, the management also assessed the possible liabilities that may arise from the tax assessments under objection.

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. The Group makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized taxes should be recognized.

c. Employee Benefits

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

c. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 19.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Accounting Estimates and Assumptions *(Continued)*

c. Employee Benefits (Continued)

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 19.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

d. Estimasi Masa Manfaat Aset Non-Keuangan

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset non-keuangan berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset non-keuangan adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset non-keuangan antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Accounting Estimates and Assumptions *(Continued)*

d. Estimating Useful Lives of Non-Financial Assets

The Group estimates the useful lives of its non-financial assets based on expected asset utilisation as supported by business plans and strategies that also consider expected market behavior. The estimation of the useful lives of non-financial assets are based on the Group's assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial period-end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates caused by changes in the factors mentioned above.

The Group estimates the useful lives of its non-financial assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

e. Sewa

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengevaluasi apakah Grup memiliki hak untuk mengendalikan aset sewaan berdasarkan PSAK 73: Sewa, yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari hak untuk mengendalikan aset sewaan.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, Manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu saat sewa terjadi, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Accounting Estimates and Assumptions *(Continued)*

e. Leases

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group evaluates whether the Group has the right to control the use of leased asset based on SFAS 73: Lease, which requires the Group to make judgements and estimates of right to control the leased asset.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, Management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are some number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

e. Sewa (Lanjutan)

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, opsi pembelian atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Penilaian tersebut ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang memengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Grup.

g. Pengakuan Pendapatan Penjualan Properti

Penerapan PSAK 72 menyebabkan perubahan terhadap metode pengakuan pendapatan Grup atas penjualan properti. Sejak 1 Januari 2021, Grup mengakui pendapatan atas penjualan properti seperti rumah, ruko, kondominium, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan dan bangunan sejenisnya diakui pada waktu tertentu saat pengendalian atas unit tersebut telah dialihkan kepada pelanggan. Pengalihan pengendalian dari Grup kepada pelanggan ditunjukkan melalui PPJB dan BAST unit properti kepada pelanggan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Accounting Estimates and Assumptions *(Continued)*

e. Leases (Continued)

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, purchase option or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Group.

g. Revenue Recognition on Sales of Properties

The adoption of SFAS 72 resulted in changes in the Group's revenue recognition method from sales of property such as houses, shop houses, condominiums, apartments, offices, shopping centers and other similar properties. Since January 1, 2021, the Group recognized revenue from sales of property at a point in time when customers obtained control of the property unit. The transfer of control is substantiated through PPJB and BAST which have been approved and signed by both parties.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

Grup mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya seperti mata uang yang mempengaruhi pendapatan, biaya dan aktivitas pendanaan serta mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya dipertahankan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Grup, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah Indonesia (IDR), karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Grup dipengaruhi oleh penetapan harga dengan lingkungan ekonomis lokal.

b. Estimasi Penyisihan atas Penurunan Nilai dari Piutang

Saat mengukur KKE, Grup menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Judgements In Applying The Entity's Accounting Policies

a. Functional Currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which each entity operates.

The Group considers some factors in determining its functional currency, among others, the currency that mainly influences the revenue, cost and financing activities, and the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be Indonesian Rupiah (IDR), as this reflected the fact that majority of the Group operational businesses are influenced by pricing in local economic environment.

b. Estimating Allowance for Impairment Losses on Receivables

When measuring ECL, the Group uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas (Lanjutan)

b. Estimasi Penyisihan atas Penurunan Nilai dari Piutang (Lanjutan)

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur KKE. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, penyisihan penurunan nilai piutang usaha Grup adalah masing-masing sebesar Rp222.097.356.333 dan Rp154.742.738.246 (Catatan 6).

c. Penurunan Nilai Persediaan

Grup membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Grup.

Tidak terdapat penurunan nilai tercatat cadangan nilai persediaan Grup pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar (Catatan 7).

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Judgements In Applying The Entity's Accounting Policies *(Continued)*

b. Estimating Allowance for Impairment Losses on Receivables (Continued)

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

As of December 31, 2023 and 2022, allowance for impairment on the Group's receivables and is amounting to Rp222,097,356,333 dan Rp154,742,738,246 (Note 6).

c. Allowance for Decline in Value of Inventories

The Group provides allowance for decline in value of inventories based on future estimated inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which ultimately will impact the result of the Group's operations.

There were no allowance for impairment inventory as of December 31, 2023 (Note 7).

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas (Lanjutan)

d. Penurunan Nilai atas Aset Tetap dan Properti Investasi

Masa manfaat setiap aset tetap, dan properti investasi Grup ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan dan amortisasi yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2023, tidak ada penurunan nilai yang diakui dalam aset tetap dan properti investasi Grup (Catatan 10 dan 11)

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Judgements in Applying The Entity's Accounting Policies *(Continued)*

d. Impairment of Property, Plant and Equipment and Investment Properties

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment, and investment properties are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, fixed assets would affect the recorded depreciation and amortization expense, respectively, and decrease in the carrying values of these assets.

As of December 31, 2023, there was no allowance for impairment losses recognized on the Group fixed assets and investment properties (Notes 10 and 11).

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas (Lanjutan)

e. Penentuan Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Manajemen menggunakan teknik penilaian, termasuk model diskonto arus kas dalam mengukur nilai wajar dari instrumen keuangan dimana penawaran pasar aktif tidak tersedia.

Dalam menerapkan teknik penilaian, manajemen memanfaatkan input pasar semaksimal mungkin, dan menggunakan estimasi dan asumsi, yang sejauh mungkin, sesuai dengan data yang dapat diobservasi oleh pelaku pasar akan digunakan di dalam penentuan harga instrumen. Dalam hal data yang berlaku tidak dapat dicermati, maka manajemen akan menggunakan estimasi terbaik dimana asumsi akan digunakan oleh pelaku pasar. Perkiraan ini mungkin berbeda dengan harga sebenarnya yang akan dicapai dalam transaksi wajar pada tanggal pelaporan.

f. Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (Continued)*

***Critical Judgements In Applying The Entity's Accounting Policies** (Continued)*

e. Determining Fair Value of Financial Instruments

Management uses valuation techniques, including the discounted cash flow model in measuring the fair value of financial instruments where active market quotes are not available.

In applying the valuation techniques, management makes maximum use of market inputs, and uses estimates and assumptions that are, as far as possible, consistent with observable data that market participants would use in pricing the instrument. Where applicable data is not observable, management uses its best estimate about the assumptions that market participants would make. These estimates may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

f. Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Penentuan provisi untuk pajak penghasilan badan memerlukan pertimbangan yang signifikan dari manajemen. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Grup mengakui liabilitas atas masalah pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak penghasilan badan akan terutang. Jika hasil pajak final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dibuat.

g. Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan

Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai aset tersebut sebesar mungkin yang tidak dapat direalisasikan, dimana ketersediaan penghasilan kena pajak memungkinkan untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan berdasarkan tingkat dan waktu dari taksiran penghasilan kena pajak untuk periode pelaporan berikutnya.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Judgements in Applying The Entity's Accounting Policies *(Continued)*

f. Income Tax (Continued)

Determining provision for corporate income tax requires significant judgment by management. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of these matters are different from the amount that are initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

g. Realization of Deferred Tax Assets

The Group conducted a review of the carrying amount of deferred tax assets at each end of reporting period and reduce the value of such assets by as much as possible which cannot be realized, where the availability of taxable income allow to use all or part of the deferred tax assets. The Group's review on the recognition of deferred tax assets for deductible temporary difference can be deductible based on the level and timing from the estimated taxable income for the next reporting period.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas (Lanjutan)

g. Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Estimasi tersebut didasarkan pada pencapaian Grup di masa lalu dan ekspektasi masa depan terhadap pendapatan dan beban, serta dengan strategi perencanaan pajak di masa depan. Namun tidak ada kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

h. Provisi dan Kontinjensi

Grup, dalam kegiatan usaha normal, menjalankan sesuai ketentuan untuk kewajiban hukum maupun konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan pada ketentuan dan kontinjensi. Dalam pengakuan dan pengukuran ketentuan, manajemen mengambil pertimbangan risiko dan ketidakpastian.

Grup tidak mengakui provisi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (Continued)*

***Critical Judgements In Applying The Entity's Accounting Policies** (Continued)*

g. Realization of Deferred Tax Assets (Continued)

The estimation is based on the achievement of the Group in the past and future expectation toward income and expenses, as well as with the tax planning strategies in the future. But there is no certainty that the Group can generate sufficient taxable income to allow to use part or all of these deferred tax assets.

h. Provisions and Contingencies

The Group, in the ordinary course of business, sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties into account.

The Group has not recognized any provision as of December 31, 2023 and 2022.

4. DANA PENGGANTIAN PENUGASAN BANTUAN OPERASIONAL (BO) – LAYANAN POS UNIVERSAL (LPU)

Sehubungan dengan penyelenggaraan layanan pos atas penugasan dari pemerintah yang disebut Bantuan Operasional LPU (Layanan Pos Universal) yang sebelumnya pada tahun 2016 disebut kompensasi (subsidi) atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) Pos. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), besarnya dana LPU Pos untuk tahun anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

4. OPERATIONAL AID FOR UNIVERSAL POST SERVICE (UPS) ASSIGNMENT

In connection with the implementation of postal services on assignments from the government called UPS Operational Assistance (Universal Postal Service) which previously in 2016 was called compensation (subsidies) for the Implementation of Postal General Service Obligations (KPU). Based on the Letter of Ratification of the Budget Implementation List (DIPA), the amount of Postal UPS funds for the 2023 and 2022 fiscal years is as follows:

Tahun/*Year*	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/*The Handover of Budget Execution Document*	Tanggal/*Date*	Jumlah/*Total*
2023	SP DIPA-999.08.1.984526/2023	30 Desember / *December* 30, 2022	378.269.521.000
2022	SP DIPA-999.08.1.984526/2022	27 Desember / December 27, 2021	384.739.880.000

Merujuk Perjanjian kerja antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor 1401/DJPPI.2/HK.04.02/05/2023 dan PKS103/DIRUT/0523 besaran Subsidi Operasional Penyelenggaraan LPU Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp378.269.521.000 yang akan dibayarkan berdasarkan hasil verifikasi sesuai dengan batas maksimal ketersediaan Pagu Subsidi Operasional Penyelenggaraan LPU tersebut.

Based on the work agreement between the Directorate General of Post and Informatics Implementation and PT Pos Indonesia (Persero) Number: 1401/DJPPI.2/HK.04.02/05/2023 and PKS103/DIRUT/0523 the amount of Operational Subsidy for the Implementation of UPS for fiscal year 2023 of Rp378,269,521,000 which will be paid based on the results of verification in accordance with the maximum limit of availability of the UPS Operational Subsidy Ceiling.

4. DANA PENGGANTIAN PENUGASAN BANTUAN OPERASIONAL (BO) – LAYANAN POS UNIVERSAL (LPU)

Pembayaran atas penggantian Bantuan Operasional (BO) LPU dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi secara bertahap per triwulan pada awal tahun 2023. Namun berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, diubah menjadi per bulan sejak periode April 2023. Rincian penerimaan dana LPU periode 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:

4. OPERATIONAL AID FOR UNIVERSAL POST SERVICE (UPS) ASSIGNMENT

Payment for the replacement of UPS Operational Assistance (OA) was made by the Ministry of Communication and Information in quarterly installments at the beginning of 2023. However, based on an agreement with the Ministry of Communication and Information, it was changed to monthly from the period of April 2023. Details of UPS fund receipts on December 31, 2023 and 2022, are as follows:

2023

Uraian	**Tanggal Penerimaan/** ***Date of Receipt***	**Jumlah/** ***Total***	***Description***
Triwulan I/2023	31 Mei/*May 2023*	73.764.318.244	*Quarter I/2023*
Periode April 2023	27 Juni/*June 2023*	31.072.527.610	*Period April 2023*
Periode Mei 2023	27 Juni/*June 2023*	20.382.793.802	*Period May 2023*
Periode Juni 2023	11 Agustus/*August 2023*	38.588.625.318	*Period June 2023*
Periode Juli 2023	29 Agustus/August 2023	20.883.437.302	*Period July 2023*
Periode Agustus 2023	11 September/September 2023	24.711.633.474	*Period August 2023*
Periode September 2023	16 November/*November 2023*	47.396.169.464	*Period September 2023*
Periode Oktober 2023	8 Desember/*December* 2023	27.155.485.722	*Period October 2023*
Periode November dan Desember 2023	19 Desember/*December* 2023	82.165.593.988	*Period November and December 2023*
Jumlah		**366.120.584.924**	***Total***

2022

Uraian	**Tanggal Penerimaan/** ***Date of Receipt***	**Jumlah/** ***Total***	***Description***
Triwulan I/2022	13 Juni/*June 2022*	65.091.802.710	*Quarter I/2022*
Triwulan II/2022	16 Agustus/*August 2022*	95.909.406.850	*Quarter II/2022*
Triwulan III/2022	9 November/*November 2022*	81.057.084.223	*Quarter III/2022*
Triwulan IV/2022	8 Desember/*December 2022*	87.872.680.624	*Quarter IV/2022*
Jumlah		**329.930.974.407**	***Total***

4. DANA PENGGANTIAN PENUGASAN BANTUAN OPERASIONAL (BO) – LAYANAN POS UNIVERSAL (LPU) (Lanjutan)

Dasar perhitungan untuk pengajuan atas penerimaan dana LPU tersebut adalah dengan menghitung dan menghimpun seluruh kerugian dari kantor-kantor pos terpencil/kantor pos cabang luar kota (KPCLK).

Dalam pelaksanaan Layanan Pos Universal belum semua beban terakomodir dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 tahun 2013 yang disesuaikan dengan Kepmen Nomor 216 tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan dan Pengawasan Serta Pembayaran Subsidi Operasional Layanan Pos Universal tanggal 15 Mei 2023.

Dalam perhitungan penggantian penugasan BO–LPU tahun 2023 formula perhitungan yaitu dengan menyelisihkan biaya operasional dengan pendapatan. Adapun komponen biaya operasional meliputi biaya sumber daya manusia, biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penyusutan sedangkan pendapatan meliputi pendapatan Layanan Pos Universal, pos komersial dan layanan transaksi keuangan.

4. OPERATIONAL AID FOR UNIVERSAL POST SERVICE (UPS) ASSIGNMENT *(Continued)*

The basis calculation for the proposal of the UPS funds receipt is by calculating and accumulating all the losses from the out-of-town branch post offices (KPCLK).

In the implementation of the Universal Postal Service, not all expenses have been accommodated in the Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology No. 22 of 2013 which is adjusted to Decree Number 216 of 2023 concerning Guidelines for Calculation and Supervision and Payment of Operational Subsidies for Universal Postal Services dated May 15, 2023.

In the calculation of the replacement of OA–UPS assignments in 2023, the calculation formula is by sorting operational cost with revenue. The components of operating costs include human resource cost, operating cost, maintenance cost, administrative and general cost, and depreciation cost while revenue includes Universal Postal Service revenue, commercial post and financial transaction services.

4. DANA PENGGANTIAN PENUGASAN BANTUAN OPERASIONAL (BO) – LAYANAN POS UNIVERSAL (LPU) (Lanjutan)

Terkait dengan penggatian biaya pegawai untuk pegawai di kantor LPU hanya dihitung maksimal 2 orang, sedangkan untuk biaya operasional atas beban *switching*, beban sewa atas *software* dikeluarkan dalam perhitungan penggantian biaya operasional. Selanjutnya untuk biaya pengadaan prangko dan biaya alat tulis kantor yang sebelumnya diperhitungkan dengan biaya *joint cost* diubah menjadi biaya *at cost* berdasarkan penggunaan pemakaian di Kantor Pos LPU.

Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika pada tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor 3490/DJPPI.2/HK.04.02/12/2023 dan PKS352/DIRUT/1223, atas Penyelenggaraan LPU untuk tahun 2024. Nilai DIPA yang dianggarkan untuk penyelenggaraan LPU tahun 2024 sebesar Rp369.802.535.000.

4. OPERATIONAL AID FOR UNIVERSAL POST SERVICE (UPS) ASSIGNMENT *(Continued)*

Regarding the replacement of employee costs for employees at the UPS office, only a maximum of 2 persons is considered, while the operational expenses related to switching and software rental costs are included in the calculation of operational cost replacement. Furthermore, the expenses for stamp procurement and office stationery previously calculated as joint costs are now changed to cost-at based on their usage at the UPS Post Office.

The Company entered into a cooperation agreement with the Directorate General of Post and Informatics Implementation on December 29, 2023 with Number: 3490/DJPPI.2/HK.04.02/12/2023 and PKS352/DIRUT/1223, on the implementation of the UPS for 2024. The DIPA value budgeted for the implementation of the UPS in 2024 is Rp369,802,535,000.

5. KAS DAN SETARA KAS / *5. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2023	2022	
Kas - Rupiah	**1.713.766.049.361**	**977.836.534.142**	***Cash - Rupiah***
Bank - Rupiah			***Bank - Rupiah***
Pihak Berelasi (Catatan 26)			***Related Parties (Note 26)***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	525.044.625.494	690.421.666.492	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	45.028.912.392	149.312.884.267	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36.259.405.362	85.326.074.144	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia	23.196.151.363	19.689.808.610	*PT Bank Syariah Indonesia*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	8.437.571.702	92.884.451.081	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen Pos	1.296.789.387	1.303.342.143	*PT Bank Mandiri Taspen Pos*
Sub Jumlah	**639.263.455.700**	**1.038.938.226.737**	***Sub Total***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT Bank Pembangunan Daerah	29.610.135.092	90.758.079.596	*PT Bank Pembangunan Daerah*
PT Bank Bukopin Tbk	3.124.817.010	8.893.698	*PT Bank Bukopin Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	4.949.670.531	20.624.442.542	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Panin Dubai Syariah	4.050.820.081	849.652.667	*PT Bank Panin Dubai Syariah*
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	3.036.983.840	--	*PT Bank Maspion Indonesia Tbk*
PT Bank Woori Saudara Tbk	2.228.278.072	426.352.281	*PT Bank Woori Saudara Tbk*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	2.018.026.489	--	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank DKI	412.110.165	--	*PT Bank DKI*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	382.313.143	439.839.914	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	236.383.625	302.139.653	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk*
PT CIMB Niaga Syariah	209.427.688	201.460.815	*PT CIMB Niaga Syariah*
PT Bank Permata Tbk	183.875.100	204.978.300	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	120.811.389	--	*PT Bank Artha Graha Internasional Tbk*
Bank Lainnya	128.285.525	285.183.393	*Others Banks*
Sub Jumlah	**50.691.937.750**	**114.101.022.859**	***Sub Total***
Jumlah Kas dan Bank Rupiah	**2.403.721.442.811**	**2.130.875.783.738**	***Total Cash and Banks Rupiah***
Bank - Valuta Asing			***Bank - Foreign Currencies***
Pihak Berelasi (Catatan 26)			***Related Parties (Note 26)***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - JPY (2023: JPY1.107.563.000,00	121.333.526.650	--	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - JPY (2023: JPY1,107,563,000.00*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - EUR (2023: EUR205.190,03 dan 2022: EUR3.343.034,69)	3.516.858.623	55.870.901.851	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - EUR (2023: EUR205,190.03 and 2022: EUR3,343,034.69)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - USD (2023: USD550.605,07dan 2022: USD1.698.316,89)	8.488.127.760	29.875.174.949	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - USD (2023: USD550,605.07 and 2022: USD1,698,316.89)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - CHF Swiss (2023: CHF61.740,06 dan 2022: CHF57.913,88)	1.134.429.150	982.681.559	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - CHF Swiss (2023: CHF61,740.06 and 2022: CHF57,913.88)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SGD (2023: SGD56.351,73 dan 2022: SGD56.299,07)	659.971.175	656.395.361	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SGD (2023: SGD56,351.73 and 2022: SGD56,299.07)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - GBP (2023: GBP28.531,33 dan 2022: GBP28.568,48)	563.785.928	540.686.481	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - GBP (2023: GBP28,531.33 and 2022: GBP28,568.48)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - USD (2023: USD18,14 dan 2022: USD107,00)	279.646	1.686.984	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - USD (2023: USD18.14 and 2022: USD107.00)*
Sub Jumlah	**135.696.978.932**	**87.927.527.185**	***Sub Total***
Sub Jumlah Bank	**825.652.372.382**	**1.240.966.776.781**	***Sub Total Banks***

5. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan) / 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)

	2023	2022	
Sub Jumlah Kas - Rupiah	**1.713.766.049.361**	**977.836.534.142**	***Sub Total Cash - Rupiah***
Sub Jumlah Bank	**825.652.372.382**	**1.240.966.776.781**	***Sub Total Banks***
Deposito			***Time Deposits***
Pihak Berelasi (Catatan 26)			***Related Parties (Note 26)***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	49.500.000.000	48.500.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	35.000.000.000	22.000.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	18.000.000.000	12.500.000.000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5.500.000.000	--	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Sub Jumlah	**108.000.000.000**	**83.000.000.000**	***Sub Total Time Deposit***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT Bank BJB Syariah	6.500.000.000	--	*PT Bank BJB Syariah*
Sub Jumlah	**6.500.000.000**	**--**	***Sub Total Time Deposit***
Sub Jumlah Deposito	**114.500.000.000**	**83.000.000.000**	***Sub Total Time Deposit***
Jumlah Kas dan Setara Kas	**2.653.918.421.743**	**2.301.803.310.923**	***Total Cash and Cash Equivalents***

Tingkat suku bunga efektif deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The effective interest rate for time deposits are as follows:

	2023	2022	
Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka per Tahun			*Interest Rates per Annum of Time Deposits*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4%	3% - 3,5%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4% - 4,60%	2,5% - 3%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,5% - 5,75%	2,75% - 3,5%	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank BJB Syariah	5,25% - 6%	-	*PT Bank BJB Syariah*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5,25% - 5,45%	-	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*

Deposito yang diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas memiliki jatuh tempo kurang dari 3 bulan.

Time deposits classified as cash and cash equivalents have maturities of less than 3 months.

Kas dan setara kas Grup terdiri dari:

The Group's cash and cash equivalent funds consist of:

	2023	2022	
Dana Internal Grup	**1.619.652.583.480**	**1.421.025.697.881**	***The Group's Internal Fund***
Dana Pihak Ketiga			***Third Parties Funds***
Giropos	927.364.642.260	787.131.044.619	*Giropos Services*
Deposit	36.042.228.624	30.998.758.755	*Deposits*
Jasa Pospay	52.084.422.720	47.937.555.294	*Pospay Services*
Wesel Pos	12.550.456.902	12.952.254.580	*Wesel Pos*
Jaminan Proyek	6.224.087.757	1.757.999.794	*Project Guarantee*
Sub Jumlah	**1.034.265.838.263**	**880.777.613.042**	***Sub Total***
Jumlah Kas dan Setara Kas	**2.653.918.421.743**	**2.301.803.310.923**	***Total Cash and Cash Equivalents***

5. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian kerjasama nomor: PKS.238/SVP Finance Operation/1222 dan WHS/052/01122022 tanggal 1 Desember 2022 Grup bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam pengelolaan kas Grup yang meliputi layanan pengantaran dan penjemputan uang tunai terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

Grup menggunakan rekening bank dalam mata uang asing untuk memenuhi kebutuhan atas likuiditas untuk transaksi penerimaan dan *settlement* utang atas layanan pos internasional dengan negara-negara anggota UPU. Kebutuhan likuiditas Grup berasal dari pemenuhan kas masuk atas penerimaan pelunasan piutang yang dapat meng-*cover* besarnya *settlement* utang dalam bentuk mata uang asing.

Grup menandatangani perjanjian kerja sama tentang jasa asuransi gedung dan barang inventaris serta asuransi kas (*Cash in Transit*, *Cash in Safe* dan *Cash in Cashier Box*) tahun 2023 dengan PT Asuransi Tri Pakarta nomor perjanjian kerjasama: PKS292/DIR-1/1222 dan 082/PKS/DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023. Dalam perjanjian tersebut terdapat *Fidelity Guarantee* pada jaminan CIT, CIS, dan CICB yaitu perluasan jaminan atas kerugian atau kehilangan keuangan yang merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari kelalaian, penipuan, ketidakjujuran, kesalahan, kecurangan dan penggelapan yang dilakukan oleh pihak Grup atau orang yang bekerja dibawah kekuasaan Grup dengan limit jaminan Rp60.000.000.

***5. CASH AND CASH EQUIVALENTS** (Continued)*

Based on the cooperation agreement number: PKS.238/SVP Finance Operation/1222 and WHS/052/01122022 dated December 1, 2022, the Group collaborates with PT Bank Negara Indonesia (Persero) in managing the Group's cash which includes cash delivery services and pick-up services from January 1, 2023 to December 31, 2024.

The use of bank accounts in foreign currencies by the Group to meet the needs for liquidity for receipt transactions and debt settlement for international postal services with UPU member countries. The fulfillment of the Group's liquidity needs comes from cash inflows from the receipt of receivables repayment which can cover the amount of debt settlement in the form of foreign currencies.

The Group signed a cooperation agreement on building and inventories insurance services and cash insurance (Cash in Transit, Cash in Safe and Cash in Cashier Box) in 2023 with PT Asuransi Tri Pakarta cooperation agreement number: PKS292/DIR-1/1222 and 082/PKS/DIR/2022 dated December 30, 2022 which is valid from December 31, 2022 to December 31, 2023. In the agreement, there is a Fidelity Guarantee on CIT, CIS, and CICB guarantees, namely the expansion of guarantees for financial losses or losses that are a direct or indirect result of negligence, fraud, dishonesty, error, fraud and embezzlement committed by the Group or persons working under the Group's authority with a guarantee limit of Rp60,000,000.

5. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan kendaraan bermotor (minimum beroda empat) maksimal sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) maksimal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan kapal motor maksimal sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan pesawat terbang regular maksimal sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan pesawat terbang sewa/*charter* maksimal sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) per pengiriman kepada PT Asuransi Tri Pakarta.

Jika nilai uang yang dikirim melebihi limit diatas maka Grup wajib memberitahukan kepada PT Asuransi Tri Pakarta melalui sarana tercepat.

Nilai premi yang dibayarkan Grup untuk asuransi gedung dan kas ini adalah sebesar Rp3.550.000.000 dengan pembayaran dibagi menjadi 2 kali termin pembayaran/per semester.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan pada Catatan 28.

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS *(Continued)*

Total sum insured Cash in Transit Insurance using a motorized vehicle (four-wheeled minimum) up to Rp30,000,000,000 (thirty billion rupiah) per shipment. Total sum insured Cash in Transit Insurance using two-wheeled vehicles (motorcycle) up to Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) per shipment. Total sum insured Cash in Transit Insurance using a motorboat up to Rp3,000,000,000 (three billion rupiah) per shipment. Total sum insured Cash in Transit Insurance using a regular flight up to of Rp5,000,000,000 (five billion rupiah) per shipment. Total sum insured Cash in Transit Insurance using a charter flight is up to Rp15,000,000,000 (fifteen billion rupiah) per shipment to PT Asuransi Tri Pakarta.

If the value of money sent exceeds the above limit, then the Group must notify PT Asuransi Tri Pakarta through the fastest means.

The premium value paid by the Group for building insurance and cash is Rp3,550,000,000 with the payment divided into 2 times the payment term/per semester.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents is disclosed in Note 28.

6. PIUTANG USAHA – BERSIH / *6. TRADE RECEIVABLES – NET*

	2023	2022	
Piutang Dalam Negeri	484.170.183.340	314.483.542.686	*Domestic Trade Reveceivables*
Piutang Luar Negeri	123.329.570.120	163.343.842.138	*Foreign Trade Receivables*
Sub Jumlah	**607.499.753.460**	**477.827.384.824**	***Sub Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(222.097.356.333)	(154.742.738.246)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	**385.402.397.127**	**323.084.646.578**	***Total Trade Receivables - Net***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movement of allowance for impairment losses are as follows:

	2023	2022	
Saldo Awal	(154.742.738.246)	(124.028.492.474)	*Beginning Balance*
Pemulihan Kerugian Penurunan Nilai Tahun Berjalan	11.594.071.777	61.469.630.078	*Recovery of Impairment Losses for the Year*
Pencadangan Piutang Usaha	(78.948.689.864)	(92.183.875.850)	*Allowance for Trade Receivables*
Saldo Akhir	**(222.097.356.333)**	**(154.742.738.246)**	***Ending Balance***

Umur piutang usaha dalam negeri per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:

Aging of domestic trade receivables as of December 31, 2023 and 2022, are as follows

	2023	2022	
Piutang Surat Paket, Ritel Properti dan Jasa Keuangan			***Trade Receivables from Mail & Parcel Retail, Property and Financial Service***
Sampai dengan 30 hari	69.227.704.379	83.662.627.031	*Up to 30 days*
31-60 hari	25.499.906.922	23.412.301.685	*31-60 days*
61-180 hari	12.737.608.014	10.393.092.037	*61-180 days*
181-270 hari	13.938.373.851	12.075.834.053	*181-270 days*
271-360 hari	4.305.826.125	5.394.671.423	*271-360 days*
Diatas 1 tahun	79.462.758.089	70.272.179.837	*More than 1 year*
Sub Jumlah	**205.172.177.380**	**205.210.706.066**	***Sub Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(112.404.300.528)	(49.018.049.108)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah	**92.767.876.852**	**156.192.656.958**	***Total***
Piutang Logistik			***Trade Receivable from Logistics***
Sampai dengan 90 hari	100.680.647.802	58.599.590.225	*Up to 90 days*
91-120 hari	83.119.254.453	16.363.034.989	*91-120 days*
121-150 hari	27.795.146.443	5.937.361.813	*121-150 days*
151-180 hari	7.302.675.091	8.054.857.642	*151-180 days*
181-220 hari	13.872.812.204	10.053.033.221	*181-220 days*
Diatas 220 hari	46.227.469.967	10.264.958.730	*More than 220 days*
Sub Jumlah	**278.998.005.960**	**109.272.836.620**	***Sub Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(50.641.553.722)	(10.514.673.475)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah	**228.356.452.238**	**98.758.163.145**	***Total***

Grup membedakan umur piutang usaha logistik dan non-logistik (ritel) dikarenakan jatuh tempo pelunasan yang berbeda. Jatuh tempo piutang logistik adalah 3 bulan, dan untuk piutang usaha non-logistik jatuh tempo tagihan adalah 1 bulan.

The Group differentiates the age of logistics and non-logistics (retail) trade receivables due to different repayment maturities. The maturity of logistics trade receivables is 3 months, and for non-logistics trade receivable the maturity is 1 month.

6. PIUTANG USAHA – BERSIH

Kenaikan piutang logistik pada tahun 2023 dikarenakan adanya penagihan atas proyek logistik dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia yang belum diterima pelunasannya sampai tanggal 31 Desember 2023.

Umur piutang usaha luar negeri per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

6. TRADE RECEIVABLES – NET

The increase in trade receivables from logistics in 2023 is due to the collection of logistics projects with PT Rajawali Nusantara Indonesia which has not been received until December 31, 2023.

The aging of international trade receivables as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Telah Jatuh Tempo:			*Over due:*
Sampai dengan 2 tahun	43.417.781.956	85.055.846.368	*Up to 2 years*
2-3 tahun	8.174.071.928	31.644.086.325	*2-3 years*
3-4 tahun	14.690.230.136	24.574.071.533	*3-4 years*
Diatas 4 tahun	57.047.486.100	22.069.837.912	*More than 4 years*
Sub Jumlah	**123.329.570.120**	**163.343.842.138**	***Sub Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(59.051.502.083)	(25.179.554.089)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah	**64.278.068.037**	**138.164.288.049**	***Total***

Umur piutang usaha luar negeri per 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan mata uang Dollar Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

Aging of overseas trade receivable as of December 31, 2023 and 2022 is based on USD currency are as follows:

	2023	2022	
Sampai dengan 2 tahun	2.816.410,35	5.406.893,80	*Up to 2 years*
2-3 tahun	530.233,00	2.011.575,00	*2-3 years*
3-4 tahun	952.921,00	1.562.143,00	*3-4 years*
Diatas 4 tahun	3.700.537,50	1.402.952,00	*More than 4 years*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(3.830.533,35)	(1.600.632,77)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	**4.169.568,50**	**8.782.931,03**	***Total Trade Receivable - Net***

Piutang usaha luar negeri merupakan piutang yang timbul dari tambahan biaya penerusan kiriman barang antar negara, dimana atas kiriman barang tersebut diatur dibawah regulasi UPU.

Lamanya umur piutang usaha luar negeri dikarena proses persetujuan (*accepted*) atas piutang yang diklaim memerlukan waktu maksimal 12 bulan.

Receivables from foreign trade represent receivables arising from additional fees for forwarding goods between countries, where the delivery of goods is regulated under UPU regulations.

The longevity of foreign trade receivables is due to the approval process (accepted) of the claimed receivables to take a maximum of 12 months.

6. PIUTANG USAHA – BERSIH

Saldo bersih transaksi pos internasional per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

6. TRADE RECEIVABLES – NET

Net balance of international transaction postal as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Piutang Luar Negeri	123.329.570.120	163.343.842.138	*Domestic Trade Reveceivables*
Utang Luar Negeri	(137.458.761.366)	(192.006.152.021)	*Foreign Trade Receivables*
Jumlah	**(14.129.191.246)**	**(28.662.309.883)**	***Total***

Pada 31 Desember 2023 dan 2022 Grup telah membentuk provisi penurunan nilai piutang usaha berdasarkan tingkat penurunan historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi (Pemerintah) dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Dimana Grup telah melakukan telaah terkait dengan kolektibilitas piutang Pemerintah tersebut.

On December 31, 2023 and 2022 the Group has established a provision for impairment of trade receivables based on the level of historical decline collectively and the credit history of individual customers. The Group does not distinguish trade receivables from related parties (Government) and trade receivables from third parties in assessing the amounts due. Where the Group has examined the collection of Government receivables.

Dalam melakukan perhitungan penyisihan piutang usaha khususnya untuk piutang luar negeri, Grup melakukan *offsetting* antara saldo piutang dan utang untuk negara yang sama, kemudian hasil piutang bersih tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan cadangan penyisihan atas piutang usaha. Sedangkan untuk perhitungan penyisihan piutang usaha dalam negeri, Grup menggunakan data histori (*roll rate*) dengan menambahkan beberapa indikator makro ekonomi yaitu tingkat inflasi, REPO, *Credit Growth* dan GDP pada periode berjalan dengan mempertimbangkan industri sejenis.

In calculating the allowance of business receivables, especially for foreign trade receivables, Group offsets between the balance of trade receivables and trade payables for the same country, then the net trade receivables are used as a basis for calculation of allowance for impairment losses of trade receivables. Meanwhile, the calculation of the allowance for the Group's domestic trade receivables uses historical data (roll rate) by adding several macroeconomic indicators, namely inflation rate, REPO, Credit Growth and GDP in the current period by considering similar industries.

Berdasarkan penelaahan terhadap kolektabilitas akun piutang usaha pada akhir periode pelaporan, manajemen Grup berpendapat bahwa pencadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutupi kerugian jika terdapat piutang yang tidak dapat tertagih pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Based on a review of the collectability of trade receivable at the end of the reporting period, the Group's management believes that the allowance for impairment for receivable of Groups is adequate to cover possible losses from non-collection of receivables as of December 31, 2023 and 2022.

Piutang usaha Grup tidak digunakan sebagai jaminan utang bank.

Trade receivables of the Group was not used as collateral bank loan.

6. PIUTANG USAHA – BERSIH (Lanjutan)

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang usaha sebagaimana yang disajikan pada Catatan 28.

6. TRADE RECEIVABLES – NET (Continued)

The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying value of each class of trade receivable is disclosed in Note 28.

7. PERSEDIAAN / *7. INVENTORIES*

	2023	2022	
Persediaan Barang Dagangan			***Merchandise Inventories***
Barang Dagangan	22.376.665.011	22.509.689.754	*Merchandise for Sale*
Tanah	8.205.056.500	9.839.129.494	*Land*
Pengembangan Tanah	7.901.082.329	8.298.307.866	*Land Development*
Persediaan Bahan Produksi	2.035.752.822	2.774.639.031	*Materials Inventory*
Rumah	--	2.751.541.428	*House*
Sub Jumlah	**40.518.556.662**	**46.173.307.573**	***Sub Total***
Perlengkapan			***Supplies***
Formulir Serbaguna	2.570.460.031	3.155.073.516	*Multi Usage Forms*
Prangko	551.150.187	573.973.255	*Stamps*
Sub Jumlah	**3.121.610.218**	**3.729.046.771**	***Sub Total***
Jumlah	**43.640.166.880**	**49.902.354.344**	***Total***

Barang dagangan merupakan persediaan atas prangko definitif/tera yang dicetak sebagai pengganti biaya kiriman surat. Jumlah tercatat berdasarkan nilai intrinsik atas keping prangko yang dicetak.

Merchandise is a stock of definitive stamps/marks that are printed as a substitute for the cost of sending letters. The carrying amount is based on the intrinsic value of the stamps printed.

Tanah merupakan tanah milik PT Pos Properti Indonesia untuk keperluan proyek pengembangan kawasan hunian di daerah Muktiwari sebesar Rp8.205.056.500 dan Karang Bahagia sebesar Rp7.901.082.329. Dalam persediaan tanah terdapat material tanah yang dipergunakan untuk pengembangan hunian Karang Bahagia.

The land is owned by PT Pos Properti Indonesia for the purposes of residential area development projects in the Muktiwari area amounting to Rp8,205,056,500 and Karang Bahagia amounting to Rp7,901,082,329. In the land inventory, there is material which is used for the development of the Karang Bahagia residence.

7. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Pada tahun 2023, terdapat penanganan perkara perdata dengan nomor 80/PDT.G/2023/PN.CKR sehubungan dengan pembayaran ganti rugi kerugian materiil dalam pengembalian uang atas sisa lahan seluas ±5.232m^2 yang belum diserahkan oleh pihak tergugat yakni PT Berkah Aslin Mandiri dan Marta Jaya. Pada tanggal laporan keuangan ini, penanganan perkara masih dalam proses persidangan, dengan agenda persidangan adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak secara *E-litigasi*.

Pengembangan tanah merupakan barang produksi dalam proses untuk proyek perumahaan karang bahagia yang terdiri dari Sertifikat, perijinan dan advis, raw material, biaya pengurusan perijinan.

Tanah Hunian Karang Bahagia yang masih dalam tahap pengembangan terletak di Kp. Pulo Pisang, Desa Karanganyar, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.

Persediaan bahan produksi merupakan persedian atas perlengkapan pos seperti kantung pos, *straping band*, helm dan jas pengantar.

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, persediaan rumah siap jual di Point Residence Karang Bahagia masing-masing sebesar Nihil dan Rp2.751.541.428. Selama tahun 2023 terdapat penjualan rumah sebanyak 65 unit dengan nilai jual sebesar Rp11.425.000.000.

Prangko filateli merupakan stok persediaan atas prangko filateli, benda filateli dan prangko prisma. Sedangkan perlengkapan prangko definitif merupakan stok persediaan atas prangko tera yang disetarakan sebagai penggantian biaya kirim.

Manajemen berkeyakinan bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat indikasi penurunan nilai persediaan.

***7. INVENTORIES** (Continued)*

In 2023, there was a civil case with number 80/PDT.G/2023/PN.CKR in connection with the payment of compensation for material losses in return for the remaining land area of ± 5,232m^2 that had not been submitted by the defendants, namely PT Berkah Aslin Mandiri and Marta Jaya. As of the reporting period, the case is still in the process of trial, with the agenda of the trial is submission of conclusions from the parties in E-litigation.

Land development is a production item in the process for the Karang Selamat housing project which consists of certificates, permits and advice, raw materials, licensing processing costs.

The Karang Bahagia Residential Land which is still under development is located at Kp. Pulo Pisang, Karanganyar Village, Karang Bahagia District, Bekasi Regency.

Materials inventory is a supply of postal equipment such as post bags, straping bands, helmets and introductory suits.

As of December 31, 2023 and 2022, available-for-sell house supply at Point Residence Karang Bahagia amounting to Nil and Rp2,751,541,428, respectively. During the year 2023, there are 65 house sales amounted to Rp11,245,000,000.

Definitive stamp is a stock of philatelic stamps, philatelic objects and prism stamps. While definitive stamp equipment is a stock of stamps equivalent to tera stamps as reimbursement of shipping costs.

Management believes that as of December 31, 2023 and 2022 there were no indications of impairment of inventories.

8. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA / *8. ACCRUED REVENUES*

	2023	2022	
Pendistribusian Bantuan Logistik	493.626.448.174	--	*Distribution of Logistics Assistance*
Penyaluran Bantuan Sosial	175.623.282.020	--	*Distribution of Social Assistance*
Paket dan Surat Pos Domestik	172.975.502.098	106.242.837.211	*Domestic Mail and Parcels*
Paket dan Surat Pos Internasional	33.975.728.086	97.510.744.777	*International Mail and Parcels*
Materai	24.601.648.074	24.653.438.418	*Stamps*
Layanan Pos Persepsi	15.199.822.410	6.563.189.213	*Postal Service Perception*
Properti	14.325.109.120	6.680.869.616	*Properties*
Bunga Deposito Berjangka	582.061.003	366.679.452	*Time Deposit Interest*
Managed Service Sarana IT	--	8.499.997.279	*Manage Service of IT Facilities*
Pendapatan Bantuan QSF	--	3.441.563.144	*QSF Aid Revenue*
Jumlah	**930.909.600.985**	**253.959.319.110**	***Total***

Pada tahun 2023, Perusahaan bekerjasama dengan Perum Bulog untuk pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah yang terbagi dalam 3 tahapan pendistribusian dengan nilai kontrak untuk tahap 1-3 masing-masing sebesar Rp618.369.547.980, Rp280.310.209.950, dan Rp93.421.418.190. Total realisasi pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 73.072.355 Penerima Bantuan Pangan (100%).

In 2023, the Company collaborated with Perum Bulog for the distribution of Government Rice Reserve Food Assistance which was divided into 3 stages of distribution with contract values for stages 1-3 amounting to Rp618,369,547,980, Rp280,310,209,950, and Rp93,421,418,190, respectively. Total work realization up to December 31, 2023 is 73,072,355 Food Aid Recipients (100%).

Sampai tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah melakukan penagihan termin 1 – 2 atau 95% dari nilai kontrak untuk tahap 1 dan termin 1 atau 40% dari nilai kontrak untuk tahap 2 dengan total tagihan sebesar Rp692.586.149.477.

As of December 31, 2023, the Company has invoiced termin 1 - 2 or 95% of the contract value for phase 1 and termin 1 or 40% of the contract value for phase 2 with a total invoice of Rp692,586,149,477.

Pada tahun 2023, Perusahaan bekerjasama dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia untuk Pendistribusian bantuan pangan program stunting pemerintah yang terbagi menjadi 2 tahap pendistribusian dengan nilai kontrak untuk tahap 1 dan 2 masing-masing sebesar Rp99.780.141.000. Total realisasi pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 8.678.443 atau 100%.

In 2023, the Company collaborated with PT Rajawali Nusantara Indonesia for the distribution of food aid for the government's stunting program which was divided into 2 stages of distribution with a contract value for stages 1 and 2 of Rp99,780,141,000 each. Total work realization up to December 31, 2023 is 8,678,443 or 100%.

Sampai tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah melakukan penagihan termin 1 – 2 atau 95% dari nilai kontrak untuk tahap 1 dengan total tagihan sebesar Rp94.791.133.950.

As of December 31, 2023, the Company has invoiced termin 1 - 2 or 95% of the contract value for phase 1 with a total invoice of Rp94,791,133,950.

8. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA (Lanjutan)

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah melakukan penagihan ke PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Arkan Global Utama, dan PT Yasa Artha Trimanunggal pada bulan Februari 2023.

Pada tahun 2023 Perusahaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Jaminan Sosial untuk penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk masyarakat penerima bantuan. Selama tahun 2023 seluruh pekerjaan sudah terselesaikan 100% dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp281.238.850.371.

Akrual atas penyaluran bantuan sosial merupakan akrual atas fee penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk masyarakat penerima. Bantuan sosial ini berbentuk uang tunai dengan nilai dana berkisar antara Rp300.000 sampai dengan Rp1.500.000 per penerima manfaat.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak tentang pekerjaan distribusi dan penjualan materai tempel Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor PKS: PRIN-86/2023/PJ.0134/PPK/MTR/2022. Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar Rp299.777.700.000 (termasuk pajak). Akrual atas pendapatan materai merupakan akrual untuk transaksi penjualan materai selama bulan Desember 2023.

Penurunan akrual atas pendapatan kiriman luar negeri dikarenakan adanya penurunan produktifitas kiriman luar negeri.

***8. ACCRUED REVENUES** (Continued)*

As of the reporting period, the Company has made a collection to PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Arkan Global Utama, and PT Yasa Artha Trimanunggal in February 2023.

In 2023 the Company cooperated with the Directorate General of Social Security for the distribution of social assistance from the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia for beneficiaries. During 2023 all work has been completed 100% with the total value of work amounting to Rp281,238,850,371.

The accrual for the distribution of social assistance is an accrual of the fee for the distribution of social assistance from the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia to the recipient community. This social assistance is in the form of cash with a fund value ranging from Rp300,000 to Rp1,500,000 per beneficiary.

On December 30, 2022, the Company collaborated with the Directorate General of Taxes regarding the work of distributing and selling sticky stamps for the Directorate General of Taxes for the 2023 Fiscal Year with PKS Number: PRIN 86/2023/PJ.0134/PPK/MTR/2022. The agreed contract value is Rp299,777,700,000 (including tax). Accrued revenue of stamp represents accrued revenue of stamp for sales transactions during December 2023.

The decrease in accruals for foreign shipment income due to decrease in overseas remittance productivity.

8. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA (Lanjutan)

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas pendapatan yang masih harus diterima sebagaimana yang dijabarkan pada Catatan 28.

8. ACCRUED REVENUES *(Continued)*

The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying value of each class of accrued revenues is disclosed in Note 28.

9. ASET LANCAR LAINNYA

9. OTHER CURRENT ASSETS

a. Piutang Layanan Jasa Keuangan

a. Receivables from Financial Services

	2023	2022	
Prefund	467.708.900.284	--	*Prefund*
Layanan Western Union	407.308.757.028	328.177.892.962	*Western Union Services*
Pembayaran PPOB	4.474.667.805	36.823.647.522	*PPOB Services*
Deposit Agen Pos	667.401.089	--	*Postal Agent Deposit*
Settlement Layanan Transaksi QRIS	274.456.009	38.879.462.137	*Settlement of QRIS Services*
Program Pembinaan Pelanggan *Point Reward*	305.506.422	--	*Customer Program Point Reward*
Layanan Jasa Pengiriman Uang Luar Negeri	--	3.816.320.127	*Foreign Remittance Services*
Layanan Tabungan	--	17.406.364	*Savings Services*
Jumlah	**880.739.688.637**	**407.714.729.112**	***Total***

Piutang layanan jasa keuangan merupakan tagihan Grup terkait dengan layanan pembayaran jasa pihak ketiga yang belum ditagihkan pada akhir periode pelaporan. Piutang layanan jasa keuangan ini akan selesai dalam waktu 2-3 hari kerja setelah proses rekonsiliasi harian.

Receivables from financial services represent the Group bills related to third party payment services that have not been billed at the end of the reporting period. Receivables from financial services will be settled within 2-3 working days after the daily reconciliation process.

9. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

a. Piutang Layanan Jasa Keuangan (Lanjutan)

Layanan western union merupakan layanan pembayaran wesel kemitraan luar negeri dimana Perusahaan memberikan layanan pembayaran kiriman uang dari luar negeri ke penerima di Indonesia. Kenaikan jumlah piutang layanan jasa keuangan atas western union disebabkan karena tingginya produksi transaksi pembayaran wesel western union.

Perusahaan telah menerima penggantian pembayaran layanan western union ini pada awal Januari 2024.

Deposit agenpos merupakan penerimaan dari agenpos yang belum diterima dan disetorkan pada akhir periode ke loket-loket kantor pos atas transaksi pada akhir bulan. Setoran agenpos diterima Grup pada H+1.

Settlement QRIS merupakan transaksi pembayaran non-kas atas transaksi loket yang dilakukan pelanggan melalui kode QR perbankan yang bekerjasama dengan Grup, diantaranya Bank Mandiri dan Bank BNI. Penggantian atas transaksi QRIS adalah H+1 sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing *provider* QRIS.

9. OTHER CURRENT ASSETS *(Continued)*

a. Receivables from Financial Services *(Continued)*

The western union service is an overseas partnership remittance payment service where the Company provides remittance payment services from overseas to recipients in Indonesia. The increase in financial services receivable from western union was due to the high production of western union money order payment transactions.

The company has received reimbursement for this western union service in early January 2024.

Agenpos deposit is a receipt from the postal agent that has not been received and deposited at the end of the period to the post office counters for transactions at the end of the month. The postal agent deposit was received by the Group at D+1.

Settlement QRIS is a non-cash payment transaction for counter transactions by customers through banking QR codes in collaboration with the Group, including between Bank Mandiri and Bank BNI. Reimbursement of QRIS transactions is D+1 in accordance with the agreement of each QRIS provider.

9. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan) / *9. OTHER CURRENT ASSETS (Continued)*

b. Lainnya / *b. Others*

	2023	2022	
Piutang Karyawan			***Employee Receivables***
Kelalaian	5.492.158.226	20.917.534.113	*Negligence*
Kecurangan	11.244.728.213	12.319.845.920	*Fraud*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(9.682.028.882)	(26.485.417.800)	*Allowance for Impairment Losses*
Sub Jumlah	**7.054.857.557**	**6.751.962.233**	***Sub Total***
Biaya Dibayar di Muka			***Prepaid Expenses***
Kompensasi Cuti Besar	234.806.998.514	53.047.975.929	*Pension Payment*
Uang Muka Operasi	124.849.151.990	121.939.153.332	*Operating Advances*
Sewa Rumah Pegawai	17.345.085.509	20.166.907.499	*Employee Houses Rental*
Sewa Gedung	9.973.735.415	13.438.230.766	*Building Rental*
Premi Asuransi	2.583.384.449	1.057.158.627	*Insurance Premium*
Beasiswa Pendidikan	2.447.700.002	--	*Education Scholarship*
Sewa Sarana Produksi Operasi Layanan Keuangan	286.581.938	220.000.000	*Lease of Production Facilities of the Financial Services Operation*
Pemasaran	166.370.500	2.401.559.145	*Marketing*
Biaya Retensi karyawan	916.190.475	--	*Employee Retention Cost*
Lainnya	66.600.000	13.632.300	*Others*
Sub Jumlah	**393.441.798.792**	**212.284.617.598**	***Sub Total***
Bank Garansi	77.002.299.152	66.237.302.353	*Bank Guarantee*
Persediaan Rusak	6.668.000	78.850.000	*Damaged Inventory*
Tanah Siap Dijual	703.177	3.132.893	*Land Available for Sale*
Sub Jumlah	**77.009.670.329**	**66.319.285.246**	***Sub Total***
Jumlah	**477.506.326.678**	**285.355.865.077**	***Total***

Piutang karyawan merupakan hak tagih kepada karyawan dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab yang terjadi akibat berkurangnya aset atau kekayaan Grup yang menjadi tanggung jawab karyawan, terdiri dari:

- Piutang kecurangan/kelalaian karyawan merupakan piutang akibat kecurangan/kelalaian karyawan berdasarkan pemeriksaan internal.
- Piutang karyawan lainnya yang berasal dari kas kecil operasional yang tidak terselesaikan oleh penanggung jawab kas kecil sampai dengan akhir periode pelaporan.

Employee receivable are amounts rightfully collectible from employees based on the statement of employee responsibility which consists of:

- *Fraud/negligence receivables which are determined based on internal examination.*
- *Other employee receivables from operating petty cash which are not resolved by the petty cash accountant staff until the end of the reporting period.*

9. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

b. Lainnya (Lanjutan)

Piutang karyawan tidak digunakan sebagai jaminan utang Bank, tetapi Grup telah melakukan pencadangan penurunan nilai piutang pegawai atas dampak penerapan PSAK 71.

Perusahaan bekerjasama dengan PT BRI Life dengan nomor PKS: Addendum 1 PKS.273/DIR JARTEL DAN SDM/1117-B.4197/DIR/OBAK/KPS/XI/2017 tanggal 24 November 2017 untuk penyediaan asuransi jiwa beserta nilai investasi. Asuransi tersebut ditujukan untuk karyawan dan akan diterima manfaat setelah karyawan memasuki usia pensiun (maksimal di usia 54 tahun). Kompensasi cuti besar merupakan premi asuransi yang telah dibayarkan Grup kepada PT BRI Life yang belum jatuh tempo karena karyawan Grup belum memasuki usia pensiun.

Kenaikan biaya dibayar di muka kompensasi cuti besar karena adanya kenaikan komponen gaji dan perubahan mekanisme pola angsuran.

9. OTHER CURRENT ASSETS *(Continued)*

b. Others *(Continued)*

The employee receivables are not used as collateral for the Bank loan, but the Group has reserved a allowance for impairment for employee receivables on the impact of the implementation of SFAS 71.

The Company collaborates with PT BRI Life with PKS number: Addendum I PKS.273/DIR JARTEL DAN SDM/1117-B.4197/DIR/OBAK/KPS/XI/2017 dated November 24, 2017 for the provision of life insurance along with investment value. The insurance is intended for employees and benefits will be received after employees enter retirement age (maximum at the age of 54 years). Large leave compensation is an insurance premium that has been paid by the Group to PT BRI Life which has not yet matured because the Group's employees have not entered retirement age.

The increase in prepaid expenses for major leave compensation was due to an increase in salary components and changes in the installment pattern mechanism.

9. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

b. Lainnya (Lanjutan)

Uang muka operasi terdiri dari uang muka untuk talangan pembiayaan atas proyek dan talangan atas *settlement* layanan untuk transaksi *payment point*. Talangan pembiayaan atas proyek merupakan panjar kerja untuk mendanai proyek-proyek Grup seperti proyek penyaluran bantuan sosial dan proyek logistik. Sedangkan talangan atas *settlement* merupakan talangan diberikan kepada PT Arthajasa untuk melakukan *settlement* atas layanan jasa keuangan (*Payment Point*) kepada mitra *biller*. Nilai uang muka operasi tercatat merupakan nilai net setelah dikurangi dengan estimasi cadangan penurunan nilai.

Selain itu pada tahun 2023 Grup menempatkan dana deposit atas kerjasama pengiriman dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Citilink Indonesia untuk keperluan pengiriman kiriman barang melalui moda transportasi udara.

Sewa rumah karyawan merupakan pembayaran atas tunjangan bantuan perumahan karyawan yang diamortisasi selama masa manfaat yang diberikan.

Sewa gedung merupakan biaya sewa kantor operasional (kantor pos) di lokasi-lokasi yang tidak terdapat bangunan milik Grup dengan nilai sewa dibawah Rp100.000.000. Atas biaya tersebut dilakukan amortisasi sesuai dengan masa sewa.

Premi asuransi merupakan premi asuransi untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

9. OTHER CURRENT ASSETS *(Continued)*

b. Others *(Continued)*

Operating advance consists of an advance for the bailout of financing for the project and a bailout for the settlement of services for payment point transactions. The bailout of financing for the project is a working force to fund the Group's projects such as social assistance distribution project and logistics project. Meanwhile, the bailout for settlement is a bailout given to PT Arthajasa to settlement financial services (Payment Point) to biller partners. The amount of operating advances is the net value after deduction with impairment reserves.

In addition, in the year 2023 the Group raised funds deposit for the cooperation with PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia for the purpose of shipment of goods delivery through air transport mode.

Employee housing rent is a payment for employee housing assistance benefits that are amortized over the life of the benefit provided.

Building rent represents rental cost of operational offices (post offices) in locations where there are no buildings owned by the Group with rental value below Rp100,000,000. These costs are amortized in accordance with the lease period.

Insurance premium is an insurance premium for the Board of Directors and Board of Commissioners.

9. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

b. Lainnya (Lanjutan)

Bank garansi merupakan kas dan atau bank yang dijaminkan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu satu tahun untuk keperluan proyek seperti proyek pengiriman surat kedinasan dengan PT Bukit Asam Tbk, pengiriman tagihan dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan atas proyek pendistribusian bantuan pangan dengan Perum Bulog.

Aset lancar siap dijual merupakan aset untuk dihapusbukukan dalam periode pelaporan akuntansi melalui proses lelang dan ruislag dengan Pemerintah. Jumlah aset lancar siap jual yang tidak laku terjual pada akhir periode pelaporan direklasifikasi ke dalam aset tidak lancar lainnya.

Persediaan rusak merupakan persediaan atas formulir dan barang cetak yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk kegiatan produksi Grup. Nilai tersebut merupakan nilai intrinsik dari persediaan. Berdasarkam berita Nomor 181/Supplies dan Peralatan/GS/2023 telah dilakukan pemusnahan persediaan atas formulir dan barang cetak tersebut. Adapun pemusnahan tersebut dikarenakan persediaan yang ada tidak dapat dipergunakan lagi karena *idle*, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, dan disebabkan karena adanya perubahan sistem dan prosedur bisnis, juga perubahan teknologi data *processing*.

9. OTHER CURRENT ASSETS *(Continued)*

b. Others *(Continued)*

Bank guarantee is cash and/or bank guaranteed to third parties within one year for project purposes such as the official letter delivery project with PT Bukit Asam Tbk, sending bills with the BPJS Ketenagakerjaan, and guarantees on food aid distribution projects with Perum Bulog.

Current assets available for sale are assets for write-off in the financial reporting period through auction process and swap with the Government. The amount of assets available for sale that remained unsold at the end of period is reclassified to other non-current asset.

Damaged inventories are inventories of forms and printed goods that are no longer used for the Group's production activities. The value is the intrinsic value of the inventory. Where through news Number 181/Supplies and Equipment/GS/2023 has been destroyed the inventory of form and printed goods. The destruction is because the existing inventory can no longer be used because it is idle, no longer in accordance with needs, and is caused by changes in business systems and procedures, as well as changes in data processing technology.

10. ASET TETAP – BERSIH / *10. FIXED ASSETS – NET*

	2023					
	Saldo Awal/ ***Beginning Balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deduction***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***	
Harga Perolehan Kepemilikan Langsung:						***Acquisition Cost Direct Ownership:***
Tanah	170.940.562.403	--	(412.290)	(2.923.296.796)	168.016.853.317	*Land*
Gedung	1.168.648.396.492	725.835.939	--	77.697.849.687	1.247.072.082.118	*Buildings*
Kendaraan	13.604.870.808	--	(462.667.136)	--	13.142.203.672	*Vehicles*
Inventaris	1.193.873.511.338	24.976.412.730	(34.207.181)	24.098.466.790	1.242.914.183.677	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**2.547.067.341.041**	**25.702.248.669**	**(497.286.607)**	**98.873.019.681**	**2.671.145.322.784**	***Sub Total***
Aset Hak Guna						***Right of Use Assets:***
Bangunan	9.311.386.898	16.916.501.366	--	--	26.227.888.264	*Buildings*
Kendaraan	206.644.824.014	4.698.122.888	(150.000.000)	--	211.192.946.902	*Vehicles*
Inventaris	81.804.618.773	--	--	--	81.804.618.773	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**297.760.829.685**	**21.614.624.254**	**(150.000.000)**	**--**	**319.225.453.939**	***Sub Total***
Aset dalam Penyelesaian:						***Construction in Progress:***
Gedung	20.656.672.058	123.811.792.405	(511.236.200)	(37.526.579.163)	106.430.649.100	*Buildings*
Inventaris	16.234.446.599	34.285.932.553	(406.269.199)	(24.835.413.834)	25.278.696.119	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**36.891.118.657**	**158.097.724.958**	**(917.505.399)**	**(62.361.992.997)**	**131.709.345.219**	***Sub Total***
Jumlah	**2.881.719.289.383**	**205.414.597.881**	**(1.564.792.006)**	**36.511.026.684**	**3.122.080.121.942**	***Total***
Akumulasi Penyusutan Kepemilikan Langsung:						***Accumulated Depreciation Direct Ownership:***
Gedung	(591.097.631.395)	(45.256.092.593)	--	3.105.918.043	(633.247.805.945)	*Buildings*
Kendaraan	(12.936.590.845)	(519.639.895)	462.667.135	--	(12.993.563.605)	*Vehicles*
Inventaris	(1.113.951.704.728)	(49.617.307.428)	30.107.776	--	(1.163.538.904.380)	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**(1.717.985.926.968)**	**(95.393.039.916)**	**492.774.911**	**3.105.918.043**	**(1.809.780.273.930)**	***Sub Total***
Aset Hak Guna:						***Right of Use Asset***
Bangunan	(9.311.386.898)	(2.734.696.262)	--	--	(12.046.083.160)	*Buildings*
Kendaraan	(162.441.482.713)	(20.764.764.878)	85.000.000	--	(183.121.247.591)	*Vehicles*
Inventaris	(81.804.618.773)	--	--	--	(81.804.618.773)	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**(253.557.488.384)**	**(23.499.461.140)**	**85.000.000**	**--**	**(276.971.949.524)**	***Sub Total***
Jumlah	**(1.971.543.415.352)**	**(118.892.501.056)**	**577.774.911**	**3.105.918.043**	**(2.086.752.223.454)**	***Total***
Nilai Buku Bersih	**910.175.874.031**				**1.035.327.898.488**	***Net Book Value***

10. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan) / *10. FIXED ASSETS – NET (Continued)*

	2022					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga Perolehan Kepemilikan Langsung:						***Acquisition Cost Direct Ownership:***
Tanah	171.849.473.116	--	(3.132.893)	(905.777.820)	170.940.562.403	*Land*
Gedung	1.159.166.666.481	20.841.821.835	--	(11.360.091.824)	1.168.648.396.492	*Buildings*
Kendaraan	13.873.145.962	--	(553.987.700)	285.712.546	13.604.870.808	*Vehicles*
Inventaris	1.161.877.635.695	23.368.168.546	(6.522.292.903)	15.150.000.000	1.193.873.511.338	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**2.506.766.921.254**	**44.209.990.381**	**(7.079.413.496)**	**3.169.842.902**	**2.547.067.341.041**	***Sub Total***
Aset Hak Guna						***Right of Use Assets:***
Bangunan	9.311.386.898	--	--	--	9.311.386.898	*Buildings*
Kendaraan	207.969.540.654	349.995.141	(1.388.999.235)	(285.712.546)	206.644.824.014	*Vehicles*
Inventaris	81.804.618.773	--	--	--	81.804.618.773	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**299.085.546.325**	**349.995.141**	**(1.388.999.235)**	**(285.712.546)**	**297.760.829.685**	***Sub Total***
Aset dalam Penyelesaian:						***Construction in Progress:***
Gedung	10.200.606.323	36.612.114.863	(3.795.165.411)	(22.360.883.717)	20.656.672.058	*Buildings*
Inventaris	29.029.909.974	4.184.638.913	(1.830.102.288)	(15.150.000.000)	16.234.446.599	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**39.230.516.297**	**40.796.753.776**	**(5.625.267.699)**	**(37.510.883.717)**	**36.891.118.657**	***Sub Total***
Jumlah	**2.845.082.983.876**	**85.356.739.298**	**(14.093.680.430)**	**(34.626.753.361)**	**2.881.719.289.383**	***Total***
Akumulasi Penyusutan Kepemilikan Langsung:						***Accumulated Depreciation Direct Ownership:***
Gedung	(546.689.986.799)	(52.039.090.125)	--	7.631.445.529	(591.097.631.395)	*Buildings*
Kendaraan	(12.727.125.614)	(333.550.774)	409.798.089	(285.712.546)	(12.936.590.845)	*Vehicles*
Inventaris	(1.080.044.653.465)	(40.332.240.944)	6.425.189.681	--	(1.113.951.704.728)	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**(1.639.461.765.878)**	**(92.704.881.843)**	**6.834.987.770**	**7.345.732.983**	**(1.717.985.926.968)**	***Sub Total***
Aset Hak Guna						***Right of Use Assets:***
Bangunan	(9.311.386.898)	--	--	--	(9.311.386.898)	*Buildings*
Kendaraan	(119.911.845.652)	(43.743.682.148)	(928.332.541)	2.142.377.628	(162.441.482.713)	*Vehicles*
Inventaris	(78.396.092.991)	(3.408.525.782)	--	--	(81.804.618.773)	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**(207.619.325.541)**	**(47.152.207.930)**	**(928.332.541)**	**2.142.377.628**	**(253.557.488.384)**	***Sub Total***
Jumlah	**(1.847.081.091.419)**	**(139.857.089.773)**	**5.906.655.229**	**9.488.110.611**	**(1.971.543.415.352)**	***Total***
Nilai Buku Bersih	**998.001.892.457**				**910.175.874.031**	***Net Book Value***

10. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan) / *10. FIXED ASSETS – NET (Continued)*

Alokasi pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated as follows:

	2023	2022	
Pemilikan Langsung:			***Direct Acquisitions:***
Beban Pokok Layanan (Catatan 22)	69.699.661.603	59.300.186.067	*Cost of Services (Note 22)*
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 23)	29.292.801.959	36.501.403.572	*General and Administrative Expense (Note 23)*
Aset Hak Guna:			***Right of Use Assets:***
Beban Pokok Layanan (Catatan 22)	14.851.117.769	31.632.201.277	*Cost of Services (Note 22)*
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 23)	5.048.919.725	12.423.298.857	*General and Administrative Expense (Note 23)*
Jumlah	**118.892.501.056**	**139.857.089.773**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 aset tetap bangunan, inventaris dan kendaraan Grup telah diasuransikan kepada PT Asuransi Tri Pakarta berupa asuransi *property all risk* yang memberikan perlindungan atas risiko kerusakan/kerugian gedung dan barang inventaris milik Grup akibat kebakaran, banjir, huru hara, tanah longsor dan risiko lainnya. Nilai pertanggungan asuransi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.528.570.619.626 dan Rp1.526.570.619.625. Nilai premi yang dibayarkan untuk asuransi aset tetap adalah sebesar Rp3.550.000.000 dengan metode pembayaran secara termin setiap semesternya.

As of December 31, 2023, the Group's buildings, office equipments and vehicles were insured to PT Asuransi Tri Pakarta in the form of property all risk insurance which provides protection against risks of damage/loss to buildings and office equipments belonging to the Group due to fire, flood, civil commotion, land landslides and other risks. As of December 31, 2023 and 2022, the insurance coverage amounted to Rp1,528,570,619,626 and Rp1,526,570,619,625, respectively. The value of the premium paid for fixed asset insurance is Rp3,550,000,000 with the payment method on a semi-annual basis.

Perusahaan Asuransi yang digunakan Grup dalam mengasuransikan asetnya merupakan pihak ketiga dan tidak terafiliasi dengan Grup.

The insurance used by the Group are third parties and are not affiliated with the Group.

Jenis pemilikan hak atas tanah milik Perusahaan seluruhnya berupa “Hak Guna Bangunan (HGB)”. Hak atas tanah tersebut akan berakhir dalam berbagai tanggal dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2030. Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo.

The Company owned its land through land rights known as “Right to Build” (HGB). The land rights will expire on various dates from 2028 until 2030. The Management believes that the land rights can be renewed or extended when they expire.

Berdasarkan hasil penelaahan Manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap.

Based on Management review, there are no indications of impairment of fixed assets.

10. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan) / *10. FIXED ASSETS – NET (Continued)*

Pengurangan aset tetap dikarenakan adanya penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

The deduction in fixed assets is due to the sale of fixed assets with the following details:

	2023	2022	
Hasil Penjualan Aset	10.890.179.193	865.666.666	*Proceeds from Sales Fixed Assets*
Jumlah Tercatat Aset Tetap yang Dilepas	(65.412.290)	(144.189.611)	*Net Book Value of Fixed Asset Disposed*
Keuntungan Pelepasan Aset Tetap	**10.824.766.903**	**721.477.055**	***Gain on Disposal of Fixed Asset***

Selain yang diungkapkan diatas, terdapat pelepasan aset tetap yang disebabkan karena disposal dan penyesuaian pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp921.604.805 dan Rp8.042.835.590.

In addition to those disclosed above, there were disposals of fixed assets due to disposal and adjustments in 2023 and 2022 amounting to Rp921,604,805 and Rp8,042,835,590, respectively.

Aset Tetap Grup tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank ataupun utang lainnya.

The Group's Fixed assets are not used as collateral for bank or other debts.

11. PROPERTI INVESTASI / *11. INVESTMENT PROPERTIES*

Properti investasi merupakan aset tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa (*lessee*) melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak digunakan untuk kegiatan operasional.

Investment properties consist of lands or buildings or parts of a building or both which are controlled by the owner or tenant (lessee) through financial lease used to generate rental income or increasing its value or both and not used for operational activities.

Rincian saldo dan mutasi properti investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Balances and movements of investment properties for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Revaluasi/ *Fair Value*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset							***Assets***
Tanah	5.496.220.390.000	--	--	2.904.593.619	601.865.326.381	6.100.990.310.000	*Land*
Bangunan	537.620.716.700	--	--	(43.271.491.522)	(8.578.809.178)	485.770.416.000	*Buildings*
Jumlah	**6.033.841.106.700**	**--**	**--**	**(40.366.897.903)**	**593.286.517.203**	**6.586.760.726.000**	***Total***

	2022						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Revaluasi/ *Fair Value*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset							***Assets***
Tanah	4.308.650.600.000	--	--	908.376.271	1.186.661.413.729	5.496.220.390.000	*Land*
Bangunan	434.035.621.493	--	(34.000.000)	11.360.091.824	92.259.003.383	537.620.716.700	*Buildings*
Jumlah	**4.742.686.221.493**	**--**	**(34.000.000)**	**12.268.468.095**	**1.278.920.417.112**	**6.033.841.106.700**	***Total***

11. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

Aset properti investasi dicatat menggunakan metode revaluasi atau berdasarkan nilai pasar dimana pada saat penetapan awal terdapat perubahan metode pencatatan dari metode biaya menjadi metode revaluasi, kenaikan/penurunan nilai dicatat sebagai bagian dari laba/rugi komprehensif lainnya.

Skema kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan dalam mengelola aset properti terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan *cluster* luasan aset yaitu sewa murni (*tenant* sekolah/kampus dan perkantoran), kerja sama (*Creatice Hub* dan *Shopping Center*), swakelola (*Co-living, Co-working* dan *Hotel/Guest House*).

Pada 31 Desember 2023 aset properti Grup telah dinilai oleh KJPP Asmawi dan Rekan, laporan hasil KJPP yang telah diterbitkan Nomor 00027/2.0119-00/PI/11/0222/1/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.

Tujuan penilaian aset properti investasi Grup adalah untuk penyusunan laporan keuangan bukan untuk tujuan perpajakan. Metode yang digunakan dalam penilaian aset properti menggunakan pendekatan biaya dan sesuai dengan tujuan aset tersebut untuk didayagunakan dan komersialisasi aset dalam pelaporan keuangan.

11. INVESTMENT PROPERTIES *(Continued)*

Investment property assets are recorded using the revaluation method or based on market value where at the time of initial determination there is a change in the recording method from the cost method to the revaluation method, the increase/decrease in value is recorded as part of other comprehensive profit/loss.

The cooperation scheme carried out by the Company in managing property assets is divided into 3 types based on asset area clusters, namely pure rent (school/campus tenants and offices), cooperation (Creatice Hub and Shopping Center), self-management (Co-living, Co-working and Hotel/Guest House).

As of December 31, 2023, the Group's property assets has been assessed by KJPP Asmawi and Partners, the KJPP results report that has been issued Number 00027/2.0119-00/PI/11/0222/1/I/2024 dated January 5, 2024.

The purpose of valuation of the Groups investment property assets is for the preparation of financial statements, not for taxation purposes. The methods used in the appraisal of property assets that have been carried out using a cost approach and in accordance with the objectives of those assets to be utilized and commercialized assets in financial reporting.

11. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD.103/DIR-1/1223 tanggal 10 Desember 2023, Perusahaan menetapkan kembali 16 titik aset baru sebagai aset properti investasi mengingat pemanfaatan aset tersebut telah dapat dikategorikan sebagai properti investasi.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD.03/DIR-1/0122 tanggal 3 Januari 2022, Perusahaan menetapkan kembali 23 titik aset baru sebagai aset properti investasi mengingat pemanfaatan aset tersebut telah dapat dikategorikan sebagai properti investasi. Adapun bentuk pemanfaatan atas 23 titik aset tersebut didayagunakan sebagai komersialisasi aset dalam bentuk *building management* (Pos Bloc), bekerjasama dengan PT Indomarco Prismatama, PT Antam Tbk dan kerjasama lainnya dalam bentuk persewaan.

Per 31 Desember 2023 terdapat kenaikan properti investasi sebesar Rp593.286.517.203 yang dicatat dalam pendapatan lainnya setelah eliminasi sebesar Rp168.004.840.966 (Catatan 24) dan pendapatan komprehensif lain sebesar Rp412.370.729.903 (Catatan 20.c). Jumlah aset properti investasi Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 99 titik aset dan 84 titik aset, sampai dengan saat ini belum ada penambahan lokasi properti investasi yang ditetapkan oleh Grup.

Pengukuran Nilai Wajar

Sehubungan dengan penerapan PSAK 13 (Revisi 2011) “Properti Investasi”, Grup telah memilih model nilai wajar untuk pengukuran setelah pengakuan awal. Nilai wajar properti investasi pada 31 Desember 2023 dan 2022 ditentukan dengan menggunakan taksiran atas nilai wajar yang telah dihitung oleh KJPP Asmawi dan Rekan.

Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan yaitu pendekatan pendapatan yang mendiskontokan penerimaan kas di masa depan dan pendekatan biaya yang menggunakan biaya penggantian pada saat ini.

11. INVESTMENT PROPERTIES *(Continued)*

Based on the Decree of the Board of Directors Number KD.103/DIR-1/1223 dated December 10, 2023, the Company re-designated 16 new asset points as investment property assets considering that the utilization of these assets can be categorized as investment property.

Based on the Decree of the Board of Directors Number KD.03/DIR-1/0122 dated January 3, 2022, the Company re-designated 23 new asset points as investment property assets considering that the utilization of these assets can be categorized as investment property. The form of utilization of the 23 asset points is utilized as asset commercialization in the form of builiding management (Pos Bloc), collaboration with PT Indomarco Prismatama, PT Antam Tbk and other cooperation in the form of rentals.

As of December 31, 2023, there was an increase in investment property of Rp593,286,517,203 which after elimination was recorded in other income of Rp168,004,840,966 (Note 24) and other comprehensive income of Rp412,370,729,903 (Note 20.c). The total number of investment property of the Group as of December 31, 2023 and 2022 are 99 asset points and 84 asset points, until now there has been no additional investment property locations determined by the Group.

Fair Value Measurement

Regarding implementation of SFAS 13 (Revised 2011) "Investment Property", the Group have chosen a fair value model for measurement after initial recognition. The fair value of the investment property on December 31, 2023 and 2022 is determined using an estimate of the fair value calculated by KJPP Asmawi and Rekan.

To determine the fair value, the Independent Appraiser utilizes a combination of two approaches as the appraisal method which are the income approach which discounts future cash flows and the cost approach which is based on current replacement cost.

11. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

Input utama yang tidak dapat diobservasi adalah tingkat diskonto yang digunakan dan sewa properti investasi diharapkan per tahun.

Kebijakan pengakuan aset properti investasi yang diterapkan Grup bukan untuk tujuan perpajakan tetapi hanya untuk tujuan komersial. Tujuan penilaian kembali tanah dan bangunan milik Grup adalah untuk mendapatkan nilai komersial atas aset tetap sebelum dipinjam-pakaikan dan didayagunakan oleh Entitas Anak.

Implementasi revaluasi aset bukan tujuan perpajakan, sebagai berikut :
- Keuntungan revaluasi terutama untuk memperbaiki neraca;
- Representasi nilai wajar aset dan ekuitas;
- Representasi nilai wajar aset untuk *service* liabilitas;
- Revaluasi mencegah terjadinya *moral hazard* saat bekerjasama operasi dengan pihak lain; dan
- Menaikkan *leverage capacity* yang dilakukan oleh anak perusahaan.

11. INVESTMENT PROPERTIES *(Continued)*

The key unobservable inputs are the discount rate used and the expected rental income of investment properties per annum.

The policy of recognition of investment property assets applied by the Group is not for taxation purposes but only for commercial purposes. The purpose of revaluation of the Group's land and buildings is to obtain commercial value for the fixed assets before being injected and used by the Subsidiaries.

Implementation of asset revaluation for tax purposes is:
- *Benefit revaluations for improving the balance sheet;*
- *Representation of fair value of asset and equity;*
- *Representation of fair value for servicing liabilities;*
- *Revaluation for preventing the occurrence of mora hazard when conducting joint operation with other parties; and*
- *Increase leverage capacity performed by the subsidiaries.*

12. ASET TAKBERWUJUD

Aset takberwujud Grup sepenuhnya dipergunakan untuk menunjang proses operasional Grup, adapun batasan kapitalisasi aset takberwujud Grup adalah pembiayaan minimal Rp1.000.000 untuk aset takberwujud dan Rp10.000.000 untuk biaya yang ditangguhkan. Aset tak berwujud yang dimiliki Grup berupa aplikasi *software*, jasa konsultan bisnis, dan jasa riset.

12. INTANGIBLE ASSETS

The Group's intangible assets are fully used to support the Group's operational process, while the limitation of the Group's intangible asset capitalization is a minimum financing of Rp1,000,000 of intangible assets and Rp10,000,000 of deferred costs. Intangible assets owned by the Group in the form of software applications, business consulting services, and research services.

12. ASET TAKBERWUJUD (Lanjutan) / 12. *INTANGIBLE ASSETS (Continued)*

	2023					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga Perolehan						***Acquisition Cost***
Perangkat Lunak Transformasi Bisnis dalam Penyelesaian	14.668.796.428	46.046.024.955	--	(17.971.763.443)	42.743.057.940	*Business Transformation Software in Process*
Perangkat Lunak Transformasi Bisnis	201.802.389.287	16.481.921.388	--	18.721.013.443	237.005.324.118	*Business Transformation Software*
Biaya yang Ditangguhkan	27.318.103.458	10.464.143.741	--	--	37.782.247.199	*Deferred Charge*
Sub Jumlah	**243.789.289.173**	**72.992.090.084**	**--**	**749.250.000**	**317.530.629.257**	***Sub Total***
Akumulasi Amortisasi						***Accumulated Amortization***
Perangkat Lunak Transformasi Bisnis	(156.252.603.921)	(20.443.760.474)	--	--	(176.696.364.395)	*Business Transformation Software in Process*
Biaya yang Ditangguhkan	(27.016.960.254)	(1.851.753.555)	--	--	(28.868.713.809)	*Deferred Charge*
Sub Jumlah	**(183.269.564.175)**	**(22.295.514.029)**	**--**	**--**	**(205.565.078.204)**	***Sub Total***
Jumlah	**60.519.724.998**				**111.965.551.053**	***Total***

	2022					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga Perolehan						***Acquisition Cost***
Perangkat Lunak Transformasi Bisnis dalam Penyelesaian	12.638.980.946	7.365.163.757	--	(5.335.348.275)	14.668.796.428	*Business Transformation Software in Process*
Perangkat Lunak Transformasi Bisnis	173.149.973.129	23.317.067.883	--	5.335.348.275	201.802.389.287	*Business Transformation Software*
Biaya yang Ditangguhkan	27.318.103.458	--	--	--	27.318.103.458	*Deferred Charge*
Sub Jumlah	**213.107.057.533**	**30.682.231.640**	**--**	**--**	**243.789.289.173**	***Sub Total***
Akumulasi Amortisasi						***Accumulated Amortization***
Perangkat Lunak Transformasi bisnis	(138.822.799.715)	(17.429.804.206)	--	--	(156.252.603.921)	*Business Transformation Software in Process*
Biaya yang Ditangguhkan	(24.145.690.304)	(2.871.269.950)	--	--	(27.016.960.254)	*Deferred Charge*
Sub Jumlah	**(162.968.490.019)**	**(20.301.074.156)**	**--**	**--**	**(183.269.564.175)**	***Sub Total***
Jumlah	**50.138.567.514**				**60.519.724.998**	***Total***

Aset takberwujud berupa perangkat lunak termasuk pelatihan dan implementasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha Grup, seperti sistem operasi, layanan jasa keuangan, dan pengolahan data akuntansi dalam pelaporan keuangan.

Intangible assets represent software including training and implementation that are used to support business activities the Group such as operating systems, financial services, and accounting system used in financial reporting.

Biaya yang ditangguhkan merupakan pengurusan sertifikat bukan hak milik (Hak Guna Bangunan/Hak Guna Usaha) yang diamortisasi selama 4 tahun dengan metode garis lurus.

Deferred costs represent deferred maintenance of the certificates which are not property rights (Building Use Rights/Operating Use Rights) which are amortized over 4 years using the straight-line method.

12. ASET TAKBERWUJUD (Lanjutan) / *12. INTANGIBLE ASSETS (Continued)*

Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated as follows:

	2023	2022	
Pemilikan Langsung:			*Direct Acquisitions:*
Beban Pokok Layanan (Catatan 22)	15.386.201.985	13.494.381.364	*Cost of Services (Note 22)*
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 23)	6.909.312.044	6.806.692.792	*General and Administrative Expense (Note 23)*
Jumlah	**22.295.514.029**	**20.301.074.156**	***Total***

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *13. OTHER NON – CURRENT ASSETS*

	2023	2022	
Piutang Kerugian Perusahaan	285.768.747.682	290.193.377.047	*Receivable from the Company's Losses*
Cadangan Kerugian Penurunan atas Kerugian Perusahaan	(271.956.938.915)	(271.087.858.903)	*Allowance for Impairment on Receivable from The Company's Losses*
Piutang Kerugiaan Perusahaan - Neto	**13.811.808.767**	**19.105.518.144**	***Receivable Losses from The Company - Net***
Taksiran Klaim Lebih Bayar Pajak	41.848.358.590	41.848.358.590	*Estimated Claim for Tax Refund*
Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang	35.895.066.132	20.269.481.800	*Long-term Prepaid Expenses*
Aset Sitaan	14.507.000.000	13.000.000.000	*Confiscated Assets*
Bank Garansi	5.098.075.601	35.117.000	*Guarantee Bank*
Aset Jaminan	246.116.022	976.808.411	*Guarantee Assets*
Aset Lainnya	378	377	*Other Assets*
Sub Jumlah	**97.594.616.723**	**76.129.766.178**	***Sub Total***
Jumlah	**111.406.425.490**	**95.235.284.322**	***Total***

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang atas kerugian Grup adalah sebagai berikut :

Movement of allowance for impairment losses on receivable from the Group's losses are as follows:

	2023	2022	
Saldo Awal	271.087.858.903	267.380.429.824	*Beginning Balance*
Pemulihan Akumulasi Penyisihan Piutang Kerugian Perusahaan	(5.680.816.729)	(841.505.770)	*Recovery of Accumulated Allowance Receivable from Company's Losses*
Reklasifikasi dari Akumulasi Penyisihan Piutang Kerugian Perusahaan	6.549.896.741	4.548.934.849	*Reclassification from Accumulated Allowance Receivable from Company's Losses*
Jumlah	**271.956.938.915**	**271.087.858.903**	***Total***

Piutang kerugian Grup merupakan piutang yang tidak tertagih sesuai tingkat kolektibilitas untuk piutang usaha dan piutang lainnya. Nilai buku tercatat merupakan aset yang dapat dijaminkan kepada Grup.

Receivable from the Group's losses represent the uncollectible of trade receivables and other receivables according to the collectibility level. Net book value is an asset that can be guaranteed to the Group.

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi akun piutang kerugian Grup pada akhir periode pelaporan, Manajemen berpendapat bahwa pencadangan kerugian atas penurunan nilai piutang sudah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul apabila terdapat piutang yang tidak tertagih pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Taksiran klaim lebih bayar pajak penghasilan merupakan jumlah keberatan yang diajukan oleh Perusahaan atas SKPLB untuk tahun 2015 (Catatan 15.g), sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan Perusahaan masih dalam proses pengadilan pajak.

Aset lainnya merupakan aset kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tidak laku terjual selama lelang tahun 2010 dan tahun 2015. Kendaraan tersebut merupakan bekas kendaraan operasional yang telah habis masa manfaatnya dan tidak dioperasionalkan kembali sebanyak 377 unit dan 1 unit aset yang belum dilelang pada tahun 2023. Mutasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

13. OTHER NON – CURRENT ASSETS *(Continued)*

According to examination of the receivables from the Group's losses at the end of the period, the Management believes that the allowance for impairment of receivables has been adequate to cover the losses arising from uncollectible receivables on December 31, 2023 and 2022.

The estimated claim for overpayment of income tax represents the number of objections filed by the Company against SKPLB for 2015 (Note 15.g), until the date of this report, the case is still in the tax court process.

Other assets represent assets of 2-wheeler vehicle and 4-wheeler vehicle which are not sold during auction in 2010 and 2015. The vehicle is a secondhand operational vehicle that has expired its benefits and is not operationalized again as many as 377 units and 1 unit of assets that have not been auctioned in 2023.

	2023	2022	
Saldo Awal	377	377	*Beginning Balance*
Penambahan			*Addition*
Nilai Perolehan Kendaraan	200.000.000	--	*Acquisition Cost of Vehicle*
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	(199.999.999)		*Accumulated Depreciation Vehicle*
Pengurangan	--	--	*Deduction*
Jumlah	**378**	**377**	***Total***

14. UTANG USAHA / *14. TRADE PAYABLES*

Utang usaha merupakan kewajiban Grup kepada vendor atas transaksi operasional serta kepada mitra *biller* atas transaksi *settlement biller*.

Trade payables is the Group's obligation to vendors for operational transactions and to biller partners for settlement biller transactions.

	2023	2022	
Utang Layanan Keuangan Weselpos			***Weselpos Financial Services Payables***
Weselpos *Remittance*	3.912.021.550	6.233.887.656	*Weselpos Remittance*
Weselpos Kemitraan Dalam Negeri	8.638.435.352	6.718.366.924	*Weselpos Domestic Subscription*
Sub Jumlah	**12.550.456.902**	**12.952.254.580**	***Sub Total***
Utang Layanan Keuangan Giropos			***Giropos Financial Services Payable***
Giropos	52.346.984.948	141.908.967.360	*Giropos*
Sub Jumlah	**52.346.984.948**	**141.908.967.360**	***Sub Total***
Utang Pospay			***Pospay Services Payables***
Kemitraan Perbankan			*Banking Partner*
Angsuran Asuransi dan Mitra Lainnya	1.088.401.930	362.364.687	*Installment Insurance and Other Partners*
Angsuran Kredit CIMB Niaga	543.533.243	134.854.064	*Installment Loan from CIMB Niaga*
Tabungan E-Batara dan Setoran BTN	--	18.329.356.177	*E-Batara Saving and BTN Deposits*
Angsuran Kredit Citibank	--	27.715.000	*Installment Loan from Citibank*
Sub Jumlah	**1.631.935.173**	**18.854.289.928**	***Sub Total***
Kemitraan Pembiayaan			*Leasing Partner*
Angsuran Kredit Adira Finance	10.516.738.045	4.413.746.002	*Installment Loan from Adira Finance*
Angsuran Kredit Bussan Auto Finance	5.796.242.799	2.011.981.000	*Installment Loan from Bussan Auto Finance*
Angsuran Kredit FIF Finance	4.236.224.548	1.432.747.984	*Installment Loan from FIF Finance*
Angsuran Kredit Mandiri Utama Finance	3.815.719.485	--	*Installment Loan from Mandiri Utama Finance*
Angsuran Kredit Mandiri Tunas Finance	3.762.753.783	3.947.827.286	*Installment Loan from Mandiri Tunas Finance*
Angsuran OTO Kredit Mobil	1.539.574.240	--	*Installment Loan from OTO Kredit Mobil*
Angsuran Kredit Clipan Finance	1.241.638.942	439.231.379	*Installment Loan from Clipan Finance*
Angsuran Kredit Suzuki Finance	1.234.810.635	559.911.470	*Installment Loan from Suzuki Finance*
Angsuran Kredit Mega Auto Finance	1.062.753.632	407.808.050	*Installment Loan from Mega Auto Finance*
Angsuran Kredit Jaccs MPM Finance	883.625.500	286.816.500	*Installment Loan from Jaccs MPM Finance*
Angsuran Kredit Summit Oto Finance	593.416.010	881.019.500	*Installment Loan from Summit Oto Finance*
Nusa Surya Ciptadana (NSC)	585.835.023	--	*Nusa Surya Ciptadana (NSC)*
Angsuran Kredit Indomobil Finance Indonesia	536.467.858	--	*Installment Loan from Indomobil Finance Indonesia*
Angsuran Kredit Artha Asia Finance	245.779.715	88.332.706	*Installment Loan from Artha Asia Finance*
Angsuran Kredit Pembiayaan Lainnya	6.887.146.851	6.122.921.972	*Installment Loan from Others*
Sub Jumlah	**42.938.727.066**	**20.592.343.849**	***Sub Total***

14. UTANG USAHA (Lanjutan) / *14. TRADE PAYABLES (Continued)*

	2023	2022	
Kemitraan *Biller*			*Biller Partnership*
E-Wallet	4.285.841.424	--	*E-Wallet*
Kemitraan *Billers* Lainnya	1.155.633.652	3.912.801.948	*Other Billers Partnership*
BPJS Kesehatan	576.999.996	839.277.734	*BPJS Health*
Setoran PAM/PDAM	547.231.472	39.369.427	*Payment of Water - PAM/PDAM*
E-Commerce	533.457.580	3.373.611.199	*E-Commerce*
Setoran Telekomunikasi dan Seluler	291.731.715	172.262.527	*Payment of Cellular Telecommunication*
Setoran TV Kabel	60.155.072	107.145.346	*Cable TV Deposits*
Penjualan Tiket	27.969.500	46.453.336	*Sales of Ticket*
Sub Jumlah	**7.479.020.411**	**8.490.921.517**	***Sub Total***
Utang Ritel dan Properti			***Trade Retail and Property***
Jasa Properti	663.654.836	813.448.016	*Property Service*
Konsinyasi Lainnya			*Other Consignment*
(Sampul, Percetakan)	597.312.833	300.830.818	*(Cover, Printing)*
Benda Materai	--	267.730.000	*Stamps*
Sub Jumlah	**1.260.967.669**	**1.382.008.834**	***Sub Total***
Utang Layanan dan Pos Internasional			***International Post Service Payables***
Terminal Dues	98.596.095.784	101.305.705.087	*Terminal Dues*
Embalance EMS	20.850.540.816	38.811.004.077	*Embalance EMS*
Inward Land Rate	16.768.276.104	50.035.764.741	*Inward Land Rate*
IACD/Service Interior	1.108.240.824	1.853.678.116	*IACD/Service Interior*
Layanan Pos Domestik	135.607.838	124.495.000	*Domestic Post Service*
Sub Jumlah	**137.458.761.366**	**192.130.647.021**	***Sub Total***
Utang Usaha Biaya	218.653.323.077	84.669.404.116	*Cost Payables*
Utang Angsuran Kredit	34.740.070	--	*Bank Credit Installment Payables*
Sub Jumlah	**218.688.063.147**	**84.669.404.116**	***Sub Total***
Jumlah	**474.354.916.682**	**480.980.837.205**	***Total***

Utang usaha biaya merupakan saldo utang usaha atas transaksi beban operasional yang belum dibayarkan ke vendor Grup, proses pembayaran dilakukan secara terjadwal mengikuti aturan Grup yaitu setiap Jumat untuk vendor internal dan setiap tanggal 15 dan 30 untuk vendor eksternal.

Cost payables is the balance of account payables for operational expense transactions that have not been paid to the Group's vendors, the payment process is carried out on a scheduled basis following the Group's rules, which are every Friday for internal vendors and every 15th and 30th for external vendors.

Utang layanan jasa keuangan weselpos merupakan saldo utang kiriman uang yang belum diambil oleh penerima. Saldo utang weselpos dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu saldo wesel kemitraan yang bekerja sama dengan beberapa vendor pengiriman uang, dan weselpos yang merupakan produk wesel yang dikelola oleh Grup.

Weselpos financial service payables is a balance of remittance debt that has not been taken by the recipient of the remittance. The balance of weselpos financial service payables is grouped into 2, which are the balance of partnership money orders in collaboration with several remittance vendors and weselpos which are products managed by the Group.

14. UTANG USAHA (Lanjutan)

Utang layanan jasa keuangan pospay harus diselesaikan oleh Grup dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan masing-masing Perjanjian Kerja Sama dengan para mitra yaitu antara 2 hari setelah tanggal transaksi sampai dengan tanggal 20 setiap bulan. Jika melebihi jangka waktu tertentu tersebut Grup akan dikenakan denda antara 1 permil sampai dengan 5% untuk setiap hari keterlambatan.

Utang layanan jasa keuangan giropos merupakan saldo mengendap dari *outstanding* dana virtual *account* pelanggan. *Account* pelanggan tersebut dipotong dengan biaya pemeliharaan rekening untuk rekening yang bersifat umum, tetapi untuk rekening yang bersifat khusus seperti rekening yang digunakan untuk penyaluran dana pemerintah ataupun swasta tidak dipotong dengan biaya pemeliharaan seperti penyaluran dana bantuan sosial tunai dan pembayaran gaji pensiun.

Eksposur maksimum terhadap risiko likuiditas pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat utang usaha sebagaimana yang diungkapkan di Catatan 28.

14. TRADE PAYABLES *(Continued)*

Pospay financial services payables should be completed by the Company within a specified period in accordance with their respective cooperation agreement with the partners which is between two days after the date of transaction until the 20th day of every month. If it exceeds a certain period, the Group will be fined of 1 permil until 5% for each day of delay.

Giropos financial service payables is a deposited balance of outstanding customer virtual account funds. The customer account is deducted from the account maintenance fee for general purposed accounts, but for speciallized bank accounts such as accounts used for the distribution of government or private funds are not deducted with maintenance costs such as disbursement of cash social assistance funds and payment of pension salaries.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of trade payable as disclosed in Note 28.

15. PERPAJAKAN / *15. TAXATION*

a. Pajak Dibayar di Muka / *a. Prepaid Taxes*

	2023	2022	
Perusahaan	--	--	*The Company*
Entitas Anak			*Subsidiaries*
Pajak Pertambahan Nilai	592.283.336	--	*Value Added Tax*
Pajak Penghasilan:			*Income Taxes:*
Pasal 28.a	--	1.467.275.200	*Article 28.a*
Jumlah	**592.283.336**	**1.467.275.200**	***Total***

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

	2023	2022	
Perusahaan:			***The Company:***
Pajak Pertambahan Nilai	23.051.466.343	8.331.574.311	*Value Added Tax*
PPN WAPU	6.258.669.052	8.228.145.796	*Value Added Tax WAPU*
Pajak Penghasilan:			*Income Taxes:*
Pasal 21	19.211.180.130	9.833.154.536	*Article 21*
Pasal 22	230.010.636	307.064.839	*Article 22*
Pasal 23	3.972.225.599	2.193.122.437	*Article 23*
Pasal 4(2)	934.763.744	425.055.636	*Article 4(2)*
Pajak Lainnya	174.451.076	155.330.147	*Other Taxes*
Entitas Anak:			***Subsidiaries***
Pajak Pertambahan Nilai	1.607.811.131	1.697.731.867	*Value Added Tax*
Pajak Penghasilan:			*Income Taxes:*
Pasal 21	419.310.192	894.778.916	*Article 21*
Pasal 23	1.981.743.441	742.490.749	*Article 23*
Pasal 25	15.836.278	--	*Article 25*
Pasal 29	2.315.426.644	2.767.392.680	*Article 29*
Pasal 4(2)	357.791.944	233.835.206	*Article 4(2)*
Pajak Lainnya	38.760.807	31.639.854	*Other Taxes*
Jumlah	**60.569.447.017**	**35.841.316.974**	***Total***

15. PERPAJAKAN / *15. TAXATION*

c. Taksiran Pajak Penghasilan Tahun Berjalan / *c. Estimated Current Income Tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat dan penghasilan (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated income before income tax benefit (expense), as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Sesuai Laporan Laba Rugi Konsolidasian	701.891.502.784	618.718.389.050	*Profit Before Income Tax Benefit (Expense) - as Presented in Consolidated Statements of Profit or Loss*
Dikurangi:			*Less:*
Laba Entitas Anak yang Dikonsolidasi Sebelum Pajak Penghasilan dan Eliminasi	31.211.824.422	44.742.529.717	*Profit of Consolidated Subsidiaries Before Income Tax and Elimination*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan - Perusahaan	**733.103.327.206**	**660.066.571.147**	***Profit Before Income Tax - Company***
Beda Tetap:			***Permanent Differences***
Bantuan Pelayanan Publik LPU	(366.120.584.914)	(343.586.407.407)	*Public Service of UPS*
Selisih Nilai Wajar Properti Investasi	(180.908.787.300)	288.906.200.881	*Difference in Fair Value of Investment Properties*
SKPKB Denda Pajak dan Pajak Final	22.416.023.429	14.778.654.883	*Tax Penalty and Final Tax*
Tunjangan Pangan dan Duka Pensiun	55.024.775.831	54.540.748.200	*Allowance For Meals And Pension*
Pembinaan Jasmani dan Rohani	1.445.705.800	611.084.987	*Physical and Spiritual Guidance*
Pemasaran Properti	107.734.832.157	7.313.507.341	*Property Marketing*
Sumbangan dan Bencana Alam	49.540.000	175.377.746	*Donation and Disaster*
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final	(58.821.064.097)	(631.526.774.417)	*Income Already Subjected to Final Income Tax*
Penyusutan	(298.948.783)	(14.408.631.459)	*Depreciation*
Lainnya	(71.514.399.975)	57.296.613.147	*Others*
Jumlah Beda Tetap	**(490.992.907.852)**	**(565.899.626.098)**	***Total Permanent Differences***
Beda Waktu:			***Timing Differences:***
Liabilitas Imbalan Kerja	(43.629.000.714)	111.581.078.244	*Employee Benefit Liabilities*
Provisi (Pemulihan) Penurunan Nilai Piutang	70.896.373.708	(79.566.919.640)	*Provision (Recovery) for Impairment of Receivables*
Penyisihan Uang Muka	16.951.213.083	--	*Provision for Advance*
Jumlah Beda Waktu	**44.218.586.077**	**32.014.158.604**	
Taksiran Laba Fiskal Perusahaan Tahun Berjalan	**286.329.005.431**	**126.181.103.653**	***Estimated Taxable Income of the Company Current Year***

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

c. Taksiran Pajak Penghasilan Tahun Berjalan (Lanjutan)

c. Estimated Current Income Tax *(Continued)*

	2023	2022	
Rugi Fiskal Tahun Sebelumnya			***Tax Loss Carry Forward***
Tahun 2022	(40.603.061.985)	--	*Year 2022*
Tahun 2021	(154.490.936.592)	(154.490.936.592)	*Year 2021*
Tahun 2020	(152.511.331.472)	(152.511.331.472)	*Year 2020*
Tahun 2019	(733.536.207.230)	(733.536.207.230)	*Year 2019*
Tahun 2018	(453.970.147.338)	(453.970.147.338)	*Year 2018*
Jumlah Rugi Fiskal Tahun Sebelumnya	**(1.535.111.684.617)**	**(1.494.508.622.632)**	***Total Tax Loss Carry Forward***
Taksiran Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Setelah Kompensasi Rugi Fiskal	**(1.248.782.679.186)**	**(1.368.327.518.979)**	***Estimated Taxable Loss After Compensation of Tax Loss Carry Forward***
Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak			***Estimated Taxable Income (Loss)***
Perusahaan	**(1.248.782.679.186)**	**(1.368.327.518.979)**	*The Company*
Entitas Anak			*Subsidiaries*
PT Pos Logistik Indonesia	(2.377.907.000)	(34.396.127.000)	*PT Pos Logistic Indonesia*
PT Pos Finansial Indonesia	(6.826.800.000)	(9.344.730.000)	*PT Pos Finansial Indonesia*
PT Pos Properti Indonesia	576.138.000	863.797.000	*PT Pos Properti Indonesia*
Jumlah	**(1.257.411.248.186)**	**(1.411.204.578.979)**	***Total***
Beban Pajak Kini Konsolidasian			***Consolidated Current Tax Expense***
Perusahaan - Penyesuaian Hasil Pemeriksaan Fiskus Tahun Sebelumnya	193.336.281	--	*The Company - Adjustment of Previous Year's Audit Result*
Entitas Anak			*Subsidiaries*
PT Pos Logistik Indonesia	1.075.185.346	--	*PT Pos Logistic Indonesia*
PT Pos Finansial Indonesia	--	--	*PT Pos Finansial Indonesia*
PT Pos Properti Indonesia	126.750.360	190.035.340	*PT Pos Properti Indonesia*
Jumlah Beban Pajak Kini Konsolidasian	**1.395.271.987**	**190.035.340**	***Total Consolidated Current Tax Expense***

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION (Continued)

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The deferred tax benefits (expense) computation on significant temporary differences between commercial and fiscal statements using tax rates as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2022	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Profit or Loss*	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Charged to Other Comprehensive Income*	Penyesuaian/ *Adjustment*	2023	
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Perusahaan:						***Deferred Tax Assets (Liabilities) of the Company:***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang & Uang Muka	91.587.414.155	19.326.469.094	--	--	110.913.883.249	*Allowance for Impairment of Trade Receivables & Advance*
Imbalan Pasca Kerja	265.403.584.218	(9.598.380.157)	(12.707.192.559)	--	243.098.011.502	*Employee Benefits*
Pembayaran Sewa Pembiayaan	(18.506.986.958)	(1.679.891.928)	--	--	(20.186.878.886)	*Payment of Finance Leases*
Penyusutan Aset Hak Guna	15.691.084.965	1.679.891.928	--	--	17.370.976.893	*Depreciation Right-of-use Assets*
Sub Jumlah	**354.175.096.380**	**9.728.088.937**	**(12.707.192.559)**	**--**	**351.195.992.758**	***Sub Total***
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Entitas Anak:						***Deferred Tax Assets (Liabilities) Subsidiaries:***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	10.752.504.283	897.513.358	--	--	11.650.017.641	*Allowance for Impairment of Trade Receivables*
Imbalan Pasca Kerja	477.540.412	35.536.692	41.146.012	--	554.223.116	*Employee Benefits*
Penyusutan Aset Tetap	370.155.791	47.747.943	--	(242.555.617)	175.348.117	*Depreciation of Fixed Assets*
Penyusutan Aset Sewa Guna Usaha	(7.088.535.580)	905.242.143	--	--	(6.183.293.437)	*Depreciation of Leased Assets*
Penyisihan Piutang Usaha	5.811.221.351	4.681.920.448	--	2.210.999.740	12.704.141.539	*Allowance for Trade Receivable*
Penyisihan Piutang Lain-lain	46.547.926	3.740.000.000	--	--	3.786.547.926	*Allowance for Other Receivable*
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.419.124.667	2.471.149.277	--	2.354.000.000	6.244.273.944	*Accrued Revenue*
Provisi Jangka Panjang	(294.190.100)	--	--	294.190.100	--	*Long-term Provision*
Aset Hak Guna	(171.703.404)	71.440.236	--	--	(100.263.168)	*Right-of-use Assets*
Rugi Fiskal	7.567.148.075	523.139.546	--	--	8.090.287.621	*Fiscal Loss*
Sub Jumlah	**18.889.813.421**	**13.373.689.643**	**41.146.012**	**4.616.634.223**	**36.921.283.299**	***Sub Total***
Jumlah	**373.064.909.801**	**23.101.778.580**	**(12.666.046.547)**	**4.616.634.223**	**388.117.276.057**	***Total***

15. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *15. TAXATION (Continued)*

d. Pajak Tangguhan (Lanjutan) / *d. Deferred Tax (Continued)*

	2021	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi / *Credited (Charged) to Profit or Loss*	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Charged to Other Comprehensive Income*	2022	
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Perseroan:					***Deferred Tax Assets (Liabilities) of the Company:***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	77.948.272.359	13.639.141.795	--	91.587.414.154	*Allowance for Impairment of Trade Receivables*
Imbalan Pasca Kerja	189.604.525.460	(633.972.904)	76.433.031.662	265.403.584.218	*Employee Benefits*
Pembayaran Sewa Pembiayaan	(17.757.111.286)	(749.875.672)	--	(18.506.986.958)	*Payment of Finance Leases*
Penyusutan Aset Sewa Guna Usaha	14.941.209.293	749.875.672	--	15.691.084.965	*Depreciation of Leased Assets*
Sub Jumlah	**264.736.895.826**	**13.005.168.891**	**76.433.031.662**	**354.175.096.379**	***Sub Total***
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Entitas Anak:					***Deferred Tax Assets (Liabilities) Subsidiaries:***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	10.752.504.283	--	--	10.752.504.283	*Allowance for Impairment of Trade Receivables*
Imbalan Pasca Kerja	517.712.367	(79.570.830)	39.398.875	477.540.412	*Employee Benefits*
Penyusutan Aset Tetap	191.470.121	178.685.670	--	370.155.791	*Depreciation of Fixed Assets*
Amortisasi Aset Takberwujud	1.246.667	(1.246.667)	--	--	*Amortization of Intangible Assets*
Penyusutan Aset Sewa Guna Usaha	(6.370.124.977)	(718.410.603)	--	(7.088.535.580)	*Depreciation of Leased Assets*
Penyisihan Piutang Usaha	6.851.553.804	(1.040.332.453)	--	5.811.221.351	*Allowance for Trade Receivable*
Penyisihan Piutang Lain-lain	46.547.926	--	--	46.547.926	*Allowance for Other Receivable*
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.419.124.667	--	--	1.419.124.667	*Accrued Revenue*
Provisi Jangka Panjang	--	(294.190.100)	--	(294.190.100)	*Long-term Provision*
Aset Hak Guna	(165.526.694)	(6.176.710)	--	(171.703.404)	*Right-of-use Assets*
Rugi Fiskal	93.116.274	7.474.031.801	--	7.567.148.075	*Fiscal Loss*
Sub Jumlah	**13.337.624.438**	**5.512.790.108**	**39.398.875**	**18.889.813.421**	***Sub Total***
Jumlah	**278.074.520.264**	**18.517.958.999**	**76.472.430.537**	**373.064.909.800**	***Total***

e. Manfaat Pajak / *e. Income Tax Benefit*

	2023	2022	
Perusahaan			***The Company***
Pajak Kini	--	--	*Current IncomeTax*
Pajak Kini - Penyesuaian dari Tahun Sebelumnya	(193.336.281)	--	*Current Tax - Prior Year Adjustment*
Pajak Tangguhan	9.728.088.937	13.005.168.891	*Deferred Tax*
Sub Jumlah	**9.534.752.656**	**13.005.168.891**	***Sub Total***
Entitas Anak			***Subsidiaries***
Pajak Kini	(126.750.360)	(190.035.340)	*Current IncomeTax*
Pajak Kini - Penyesuaian dari Tahun Sebelumnya	(1.075.185.346)	--	*Current Tax - Prior Year Adjustment*
Pajak Tangguhan	17.990.323.866	5.512.790.108	*Deferred Tax*
Sub Jumlah	**16.788.388.160**	**5.322.754.768**	***Sub Total***
Jumlah	**26.323.140.816**	**18.327.923.659**	***Total***

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

f. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan

Akun ini merupakan taksiran kelebihan pembayaran pajak penghasilan Grup yang menurut Manajemen dapat diperoleh kembali, dengan rincian sebagai berikut:

***15. TAXATION** (Continued)*

f. Estimated Claim for Tax Refund

Estimated claims for tax refund represent the Group's over payment of income tax which in the Management's opinion can be refunded, with details as follows:

	2023	2022	
Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan			***Estimated Claim for Tax Refund***
Perusahaan			***The Company***
2023	16.270.091.198	--	*2023*
2022	12.255.864.517	13.964.205.234	*2022*
2021	--	10.890.607.934	*2021*
Sub Jumlah Perusahaan	**28.525.955.715**	**24.854.813.168**	***Sub Total the Company***
Entitas Anak			***Subsidiaries***
2023	15.150.581.961	--	*2022*
2022	8.875.946.958	9.783.991.188	*2022*
2021	--	7.551.651.318	*2021*
Sub Jumlah Entitas Anak	**24.026.528.919**	**17.335.642.506**	***Sub Total Subsidiaries***
Jumlah	**52.552.484.634**	**42.190.455.674**	***Total***

Pada tanggal 26 April 2023, Perusahaan menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Pajak Penghasilan Badan No.00196A, atas kelebihan pembayaran PPh Badan untuk tahun pajak 2021 sebesar Rp10.697.271.653, dengan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sebesar Rp282.353.588, sehingga jumlah dibayarkan sebesar Rp10.414.918.065. Perusahaan telah menerima kelebihan pajak ini pada tanggal 4 Mei 2023.

On May 8, 2023, the Company received an Tax Overpayment Refund Order of Corporate Income Tax No.00549A, regarding the overpayment of Corporate Income Tax for the 2021 fiscal year amounting to Rp10,697,271,653, with tax payable compensation through SPMKP deductions amounting to Rp282,353,588, so that it was paid amounting to Rp10,414,918,065. The Company has received this excess tax on May 4, 2023.

Perusahaan menghapus selisih estimasi tagihan pajak penghasilan badan tersebut sebesar Rp193.336.281 dan dicatat sebagai Pajak Kini – Penyesuaian dari Tahun Sebelumnya.

The Company wrote off the difference in the estimated claim for corporate income tax amounting to Rp193,336,281 and recorded it as Current Tax - Prior Year Adjustment.

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

f. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Pada tanggal 8 Mei 2023, Entitas anak PLI menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Pajak Penghasilan Badan No.00549A, atas kelebihan pembayaran PPh Badan untuk tahun pajak 2021 sebesar Rp6.476.465.972, dengan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sebesar Rp1.118.261.556, sehingga jumlah dibayarkan sebesar Rp5.358.204.416. PLI telah menerima kelebihan pajak ini pada tanggal 31 Mei 2023.

PLI menghapus selisih estimasi tagihan pajak penghasilan badan tersebut sebesar Rp1.075.185.346 dan dicatat sebagai Pajak Kini – Penyesuaian dari Tahun Sebelumnya.

Perusahaan mengajukan restitusi atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2022 sebesar Rp12.255.864.517. Sampai pada saat pelaporan Perusahaan masih dalam proses pemeriksaan pajak.

PLI mengajukan restitusi atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2022 sebesar Rp8.501.558.107. Sampai pada saat pelaporan Perusahaan masih dalam proses pemeriksaan pajak.

***15. TAXATION** (Continued)*

***f. Estimated Claim for Tax Refund** (Continued)*

On May 8, 2023, subsidiaries PLI received an Tax Overpayment Refund Order of Corporate Income Tax No.00549A, regarding the overpayment of Corporate Income Tax for the 2021 fiscal year amounting to Rp6,476,465,972, with tax payable compensation through SPMKP deductions amounting to Rp1,118,261,556, so that it was paid amounting to Rp5,358,204,416. PLI has received this excess tax on May 31, 2023.

PLI wrote off the difference in the estimated claim for corporate income tax amounting to Rp1,075,185,346 and recorded it as Current Tax - Prior Year Adjustment.

The Company filed for the restitution of Corporate Income Tax for the 2022 fiscal year amounting to Rp12,255,864,517. Up to the date of this report, the Company is still undergoing tax audit.

PLI filed for the restitution of Corporate Income Tax for the 2022 fiscal year amounting to Rp8,501,558,107. Up to the date of this report, the Company is still undergoing tax audit.

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak

Pada tanggal 6 Desember 2019, Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat Nomor S-3885/WPJ 19/2019 tentang Surat Uraian Banding atas Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP01018/ KEB/WPJ19/2019, dalam surat tersebut Direktur Jendral Pajak sebagai Terbanding memberi tanggapan atas permohonan banding Perusahaan (pemohon banding) atas keberatan dilakukannya koreksi terhadap penyesuaian fiskal negatif berupa Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (BO-LPU) sebesar Rp341.598.000.000 dalam SPT Badan tahun 2016. Berdasarkan tanggapan Terbanding, dasar hukum koreksi atas penyesuaian fiskal negatif terhadap BO-LPU yang dilakukan Terbanding adalah berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun pertimbangan hukumnya adalah bahwa BO-LPU yang diterima pemohon banding dari pemerintah RI (selaku pemegang saham) tersebut dianggap:

a. Termasuk sebagai “Penghasilan” karena memenuhi unsur sebagai tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, oleh karenanya “dianggap” sebagai objek pajak (*Vide*, Pasal 4 ayat 1 UU PPh).

***15. TAXATION** (Continued)*

g. Tax Assesments

On December 6, 2019, the Director General of Taxes issued a letter Number S-3885/WPJ 19/2019 concerning Letter of Appeals on the Decree of the Director General of Taxes No. KEP-01018/ KEB/WPJ19/2019, in that letter the Director General of Taxes as Apellee responding to the Company's appeal petition (appealant) against the objection to the correction of negative fiscal adjustments in the form of Universal Post Service Operational Assistance (OA-UPS) amounting to Rp341,598,000,000 in the Annual Income Tax Return fiscal year 2016. Based on Apellee’s responses, the legal basis for correction of negative fiscal adjustments to the OA-UPS conducted by the Apellee is based on tax legislation. The legal consideration is that the OA-UPS received by the appealant from the Government of Republic of Indonesia (as a shareholder) is considered:

a. Included as "Income" because it fulfills the element as an additional economic ability by name and in any form that can be used for consumption or to add to the wealth of Taxpayer, therefore "considered" as a tax object (Vide, Article 4 paragraph 1 of the Income Tax Law).

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

b. Tidak termasuk dikecualikan sebagai objek pajak, karena BO-LPU *in litis*, kedudukannya oleh Terbanding dipersamakan dengan “bantuan dan sumbangan” yang diterima oleh WP/Pemohon Banding (Pihak/Pihak BO-LPU) dari pemerintah RI selaku pemegang sahamnya (Pihak/WP Pemberi BO-LPU) karena antara para pihak tersebut terdapat hubungan kerja usaha dan hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan satu sama lain. Sehingga terhadap BO-LPU *in litis* dilakukan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Negatif dalam SPT Badan tahun 2016.

Pada tanggal 2 Desember 2019, Perusahaan mendapatkan putusan salinan pajak atas gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Nomor 00024/406/17/093/19 tahun pajak 2017 tanggal 7 Mei 2019 yang membatalkan seluruh koreksi yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak sebesar Rp588.551.106.

***15. TAXATION** (Continued)*

***g. Tax Assesments** (Continued)*

b. Not excluded as a tax object, because OA-UPS in litis, its position by Apellee is equivalent to "assistance and donations" received by Taxpayer/Appellant (Parties/Parties of OA-UPS) from the Indonesian Government as its shareholders (Parties/Taxpayer Giving OA-UPS) because between the parties there is a business employment relationship and ownership or control relationship with each other. So that the OA-UPS in litis was corrected for the Negative Fiscal Adjustment in the Annual Tax Return fiscal year 2016.

On December 2, 2019, the Company obtained a copy of tax decision on the lawsuit against the Income Tax Assessment Letter (SKPLB) of Income Tax Number 00024/406/17/093/19 fiscal year 2017 dated May 7, 2019 which canceled all corrections made by the Director General of Taxes amounting to Rp588,551,106.

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

Pada tanggal 16 Januari 2020, Perusahaan mengeluarkan Surat Bantahan Nomor 58/Dir-1/0120 terhadap Surat Direktur Jendral Pajak Nomor S-3885/WPJ 19/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Surat Uraian Banding atas Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-01018/KEB/WPJ19/2019, dalam suratnya Perusahaan dalam hal ini sebagai Pemohon Banding dengan berdasarkan argumentasi hukum tidak sependapat dengan seluruh dasar dan pertimbangan hukum serta alasan koreksi yang didalilkan dan ditetapkan oleh Terbanding, karena dasar yang dikonstatir, pertimbangan dan alasan hukum koreksi yang dikonstitusinya tidak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku dan tidak mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya (tidak sesuai dengan sifat usaha WP). Sehingga hasil koreksi atas penyesuaian fiskal negatif berupa Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (BO-LPU) sebesar Rp341.598.000.000 harus dibatalkan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diterima oleh Perusahaan pada tahun 2020 sebesar Rp42.903.902.988. Perusahaan mengajukan kembali kelebihan pembayaran pajak atas BO-LPU tahun 2015 sebesar Rp41.848.358.688 sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan Perusahaan masih dalam proses pengadilan pajak.

***15. TAXATION** (Continued)*

***g. Tax Assesments** (Continued)*

On January 16, 2020, the Company issued an Objection Letter Number 58/Dir-1/0120 to the Director General of Taxes Letter Number S-3885/WPJ19/2019 dated December 6, 2019 concerning Letter of Appeal to the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-01018/KEB/WPJ19/2019, in his letter the Company in this case as an Appallant based on legal arguments does not agree with all legal basis and law considerations and the reasons for correction which are postulated and determined by the Appellee, because the basis is constrained, the legal considerations and reasons for correction whose constitution is not in accordance with the applicable tax law and does not reflect actual business activities (not in accordance with the nature of Taxpayer business). So that the correction results of the negative fiscal adjustment in the form of Universal Postal Service Operational Assistance (OA-UPS) amounting to Rp341,598,000,000 must be canceled.

The refund for the overpayment of tax has been received by the Company in 2020 amounting to Rp42,903,902,988. The company resubmitted the overpayment of tax on OA-UPS in 2015 amounting to Rp41,848,358,688 until the date of this report, the case is still in the tax court process.

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

Pada tanggal 4 Januari 2023, Perusahaan menerima memori peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak Nomor PUT-014103.99/2021/PP/M.VIIIB tahun 2022 tanggal 28 September 2022 tentang pengembalian keterlanjuran kelebihan pembayaran pajak atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2015 tentang pajak Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (BO LPU) bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

Pada tahun 2023 dan 2022 Grup menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 4 ayat 2 dan PPN dengan rincian sebagai berikut:

***15. TAXATION** (Continued)*

***g. Tax Assesments** (Continued)*

On January 4, 2023, the Company proposed a files for judicial review of tax court decisions Number PUT-014103.99/2021/PP/M.VIIIB of 2022 dated September 28, 2022 regarding the refund of tax overpayment on the Tax Assessment Letter (SKP) of 2015 concerning the Universal Postal Service Operational Assistance (OA-UPS) tax not an Income Tax Object.

In 2023 and 2022, the Grup received Tax Collection Letter on Income Tax Articles 21, 23, 4 (2) and VAT with the following details:

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Total/ *Amounts*
2023		
Surat Tagihan Pajak		
00002/101/22/822/23	PPh Pasal 21	100.000
00002/101/23/954/23	PPh Pasal 21	12.041
00004/101/19/832/23	PPh Pasal 21	100.353
00008/101/20/832/23	PPh Pasal 21	100.000
00009/101/20/302/23	PPh Pasal 21	100.000
00009/101/23/804/23	PPh Pasal 21	167.337
00011/101/23/804/23	PPh Pasal 21	97.597
00012/101/21/127/23	PPh Pasal 21	462.499
00012/101/21/647/23	PPh Pasal 21	316.600
00012/101/22/513/23	PPh Pasal 21	21.126
00015/201/19/655/23	PPh Pasal 21	309.785
00016/101/21/303/23	PPh Pasal 21	471.570
00016/201/19/655/23	PPh Pasal 21	401.410
00017/201/19/655/23	PPh Pasal 21	5.072.602
00020/101/20/303/23	PPh Pasal 21	100.000
00020/101/23/093/23	PPh Pasal 21	100.000
00022/101/21/629/23	PPh Pasal 21	2.092

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assesments *(Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Total/ *Amounts*
2023		
Surat Tagihan Pajak		
00022/101/21/804/23	PPh Pasal 21	100.000
00023/101/21/629/23	PPh Pasal 21	412.747
00023/101/21/813/23	PPh Pasal 21	100.000
00027/101/21/116/23	PPh Pasal 21	541.728
000281/101/19/952/23	PPh Pasal 21	1.772
00029/101/20/313/23	PPh Pasal 21	200.000
00030/101/22/541/23	PPh Pasal 21	56.148
00031/101/21/127/23	PPh Pasal 21	23.055
00031/101/23/942/23	PPh Pasal 21	30.983
00038/101/21/803/23	PPh Pasal 21	100.000
00046/101/20/813/23	PPh Pasal 21	100.000
00047/101/19/813/23	PPh Pasal 21	100.000
00050/101/22/101/23	PPh Pasal 21	4.789
00057/101/22/221/23	PPh Pasal 21	11.133
00059/101/22/629/23	PPh Pasal 21	222
00063/101/20/822/23	PPh Pasal 21	100.000
00066/101/21/822/23	PPh Pasal 21	100.000
00067/101/20/822/23	PPh Pasal 21	487.398
00068/101/20/952/23	PPh Pasal 21	100.000
00072/101/22/093/23	PPh Pasal 21	161.330
00077/103/20/629/23	PPh Pasal 21	100.000
00078/103/20/629/23	PPh Pasal 21	100.000
00079/101/22/517/23	PPh Pasal 21	143.345
00082/101/22/956/23	PPh Pasal 21	4.459
00089/101/22/526/23	PPh Pasal 21	52.136
00096/101/21/605/23	PPh Pasal 21	205.431
00100/101/19/804/23	PPh Pasal 21	100.000
00103/101/20/332/23	PPh Pasal 21	100.000
00105/101/20/309/23	PPh Pasal 21	100.000
00109/101/20/803/23	PPh Pasal 21	100.000
00116/101/11/127/22	PPh Pasal 21	17.880
00117/101/11/127/22	PPh Pasal 21	343.911
00118/101/11/127/22	PPh Pasal 21	27.362
00123/101/21/419/23	PPh Pasal 21	322.660
00125/101/21/419/23	PPh Pasal 21	720.067
00126/101/19/804/23	PPh Pasal 21	17.857
00129/101/21/307/23	PPh Pasal 21	181.400
00138/101/18/952/23	PPh Pasal 21	43.922
00149/101/22/542/23	PPh Pasal 21	14.951
00158/101/22/729/23	PPh Pasal 21	26.957
00162/101/22/824/22	PPh Pasal 21	100.000
00168/101/22/642/23	PPh Pasal 21	17.363
00182/101/20/419/23	PPh Pasal 21	100.000

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assesments *(Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Total/ *Amounts*
2023		
Surat Tagihan Pajak		
00182/101/20/954/23	PPh Pasal 21	100.000
00182/101/22/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00187/101/22/419/23	PPh Pasal 21	913.894
00188/101/19/626/23	PPh Pasal 21	53.934
00193/101/22/423/23	PPh Pasal 21	38.893.356
00204/101/20/423/23	PPh Pasal 21	100.000
00241/101/19/438/23	PPh Pasal 21	12.801
00247/101/20/304/23	PPh Pasal 21	100.000
00304/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00305/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00306/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00307/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00308/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00326/101/22/543/22	PPh Pasal 21	30.104
00350/101/22/407/23	PPh Pasal 21	559.654
00373/101/20/307/23	PPh Pasal 21	100.000
00385/101/19/402/23	PPh Pasal 21	154.905
00387/101/19/429/23	PPh Pasal 21	535.549
00457/101/19/905/23	PPh Pasal 21	108.671
00514/101/22/732/23	PPh Pasal 21	100.000
00003/103/19/608/23	PPh Pasal 23	100.000
00003/103/19/733/23	PPh Pasal 23	19.206
00004/103/19/733/23	PPh Pasal 23	100.000
00007/103/20/442/23	PPh Pasal 23	100.000
00008/103/19/509/23	PPh Pasal 23	918.412
00011/103/19/832/23	PPh Pasal 23	2.534
00014/103/19/203/23	PPh Pasal 23	106.652
00018/103/19/626/23	PPh Pasal 23	100.000
00022/103/19/406/23	PPh Pasal 23	100.000
00022/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00023/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00024/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00025/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00028/103/19/735/23	PPh Pasal 23	100.000
00032/103/19/804/23	PPh Pasal 23	137.474
00044/103/19/712/23	PPh Pasal 23	100.000
00045/103/19/649/23	PPh Pasal 23	100.000
00046/103/19/647/23	PPh Pasal 23	200.000
00047/103/19/647/23	PPh Pasal 23	100.000
00047/103/19/741/23	PPh Pasal 23	100.000
00049/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00050/103/19/645/23	PPh Pasal 23	82.328
00054/103/21/438/23	PPh Pasal 23	17.955

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assesments *(Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Total/ *Amounts*
2023		
Surat Tagihan Pajak		
00182/101/20/954/23	PPh Pasal 21	100.000
00182/101/22/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00187/101/22/419/23	PPh Pasal 21	913.894
00188/101/19/626/23	PPh Pasal 21	53.934
00193/101/22/423/23	PPh Pasal 21	38.893.356
00204/101/20/423/23	PPh Pasal 21	100.000
00241/101/19/438/23	PPh Pasal 21	12.801
00247/101/20/304/23	PPh Pasal 21	100.000
00304/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00305/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00306/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00307/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00308/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00326/101/22/543/22	PPh Pasal 21	30.104
00350/101/22/407/23	PPh Pasal 21	559.654
00373/101/20/307/23	PPh Pasal 21	100.000
00385/101/19/402/23	PPh Pasal 21	154.905
00387/101/19/429/23	PPh Pasal 21	535.549
00457/101/19/905/23	PPh Pasal 21	108.671
00514/101/22/732/23	PPh Pasal 21	100.000
00003/103/19/608/23	PPh Pasal 23	100.000
00003/103/19/733/23	PPh Pasal 23	19.206
00004/103/19/733/23	PPh Pasal 23	100.000
00007/103/20/442/23	PPh Pasal 23	100.000
00008/103/19/509/23	PPh Pasal 23	918.412
00011/103/19/832/23	PPh Pasal 23	2.534
00014/103/19/203/23	PPh Pasal 23	106.652
00018/103/19/626/23	PPh Pasal 23	100.000
00022/103/19/406/23	PPh Pasal 23	100.000
00022/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00023/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00024/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00025/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00028/103/19/735/23	PPh Pasal 23	100.000
00032/103/19/804/23	PPh Pasal 23	137.474
00044/103/19/712/23	PPh Pasal 23	100.000
00045/103/19/649/23	PPh Pasal 23	100.000
00046/103/19/647/23	PPh Pasal 23	200.000
00047/103/19/647/23	PPh Pasal 23	100.000
00047/103/19/741/23	PPh Pasal 23	100.000
00049/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00050/103/19/645/23	PPh Pasal 23	82.328
00054/103/21/438/23	PPh Pasal 23	17.955

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assesments *(Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Total/ *Amounts*
2023		
Surat Tagihan Pajak		
00071/103/19/727/23	PPh Pasal 23	100.000
00074/103/20/646/23	PPh Pasal 23	100.000
00092/103/19/093/23	PPh Pasal 23	100.000
00099/103/19/217/23	PPh Pasal 23	116.732
00105/103/20/438/23	PPh Pasal 23	100.000
00107/103/19/646/23	PPh Pasal 23	100.000
00192/103/20/655/23	PPh Pasal 23	100.000
00193/103/20/655/23	PPh Pasal 23	100.000
00282/101/22/727/23	PPh Pasal 23	2.706
00409/103/19/416/23	PPh Pasal 23	166.689
00410/103/19/416/23	PPh Pasal 23	133.650
00004/106/18/093/23	PPh Pasal 29	1.000.000
00019/140/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00020/140/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00021/140/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00022/140/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00030/140/20/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00031/140/20/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00032/140/20/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00033/140/20/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00035/140/19/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00030/187/21/093/23	PPN	673.169
00031/187/21/093/23	PPN	74.022
00032/187/21/093/23	PPN	107.683
00033/187/21/093/23	PPN	3.633.174
00034/187/21/093/23	PPN	370.065
00035/187/21/093/23	PPN	2.141.765
00036/187/21/093/23	PPN	6.869.269
00037/187/21/093/23	PPN	14.518.608
00038/187/21/093/23	PPN	6.688.365
00039/187/21/093/23	PPN	30.767.236
00053/207/21/093/23	PPN	109.627.742
00066/107/21/093/23	PPN	101.659.611
00256/107/22/955/23	PPN	500.000
01000/107/22/955/23	PPN	500.000
04071/107/22/955/23	PPN	500.000

15. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *15. TAXATION (Continued)*

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan) / *g. Tax Assesments (Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Total/ *Amounts*
Surat Ketetapan Pajak		
00002/243/21/093/23	PPh Pasal 21	16.090.789
00005/202/21/093/23	PPh Pasal 22	2.686.544
00007/201/21/093/23	PPh Pasal 21	2.259.871.386
00009/240/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	1.101.826.599
00010/240/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	246.930.346
00012/203/21/093/23	PPh Pasal 23	564.744.823
00015/201/19/093/21	PPh Pasal 21	226.759.840
00015/202/19/093/21	PPh Pasal 22	48.909.284
00017/240/19/093/21	PPh Pasal 4 ayat (2)	240.501.360
00035/203/19/093/21	PPh Pasal 23	406.884.280
00054/207/21/093/23	PPN	2.033.192.221
00093/207/19/093/2	PPN	884.118.952
Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan		
S-1030/IMB/KPP.2706/06/2023	PPh Pasal 21	1.454.404
S-1717/P2DK/KPP.2506/2022	PPh Pasal 21	3.345.000
S-3019/KPP.2808/2022	PPh Pasal 21	346.644
S-577/KPP.2507/2022	PPh Pasal 21	384.000
S-620/KPP.2808/2022	PPh Pasal 21	1.524.001
S-765/KPP.2502/2022	PPh Pasal 21	14.793.725
S-871/KPP.0301/2022	PPh Pasal 21	2.454.271
S-99/P2DK/KPP.2505/2023	PPh Pasal 21	9.123.385
SP2DK-3/WPJ.09/KP.05/2022	PPh Pasal 21	3.989.296
SP2DK-379/WPJ.08/KP.05/2022	PPh Pasal 21	1.584.000
SP2DK-602/WPJ.29/KP.09/2022	PPh Pasal 21	546.449
SP2DK-663/WPJ.29/KP.09/2022	PPh Pasal 21	471.562
Laporan Hasil Penelitian		
LAP-140/LHPT/KPP.260607/2023	PPh Pasal 21	5.026.603
Total		**8.418.163.697**

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

g. Tax Assesments *(Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	**Jenis Pajak/** *Type of Tax*	**Total/** *Amounts*
2022		
Surat Tagihan Pajak		
00165/507/20/093/22	PPN	274.175.918
01.001.620.2.093.000	PPN	15.510.523
00017/587/19/093/22	PPN	5.371.768
00026/201/20/093/22	PPh 21	752.071.609
00021/203/20/093/22	PPh 23	514.710.771
00044/101/17/127/21	PPh Pasal 21	100.000
00072/103/21/403/21	PPh Pasal 23	100.000
00767/101/21/402/21	PPh Pasal 21	100.000
00004/101/18/956/22	PPh Pasal 21	137.746
00003/101/18/956/22	PPh Pasal 21	100.000
00006/103/20/951/22	PPh Pasal 23	45.607
00189/101/17/953/22	PPh Pasal 21	100.000
00039/101/20/953/22	PPh Pasal 21	100.000
00014/103/21/412/22	PPh Pasal 23	34.153
00019/101/21/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00112/101/21/732/22	PPh Pasal 21	72.607
00014/103/21/419/22	PPh Pasal 23	20.947
00023/101/19/407/22	PPh Pasal 21	100.000
00038/103/21/332/22	PPh Pasal 23	100.000
00019/103/21/429/22	PPh Pasal 23	16.773
00043/101/21/952/22	PPh Pasal 21	45.815
00009/101/22/952/22	PPh Pasal 21	8.305
00213/101/21/402/22	PPh Pasal 21	100.000
00018/103/21/406/22	PPh Pasal 23	29.053
00021/103/21/407/22	PPh Pasal 23	24.451
00037/101/20/307/22	PPh Pasal 21	100.000
00115/101/21/942/22	PPh Pasal 21	100.000
00047/101/21/813/22	PPh Pasal 21	100.000
00074/101/21/824/22	PPh Pasal 21	100.000
00022/103/19/702/22	PPh Pasal 23	100.000
00018/101/18/307/22	PPh Pasal 21	43.330
00018/103/19/307/22	PPh Pasal 23	14.335
00028/103/21/419/22	PPh Pasal 23	100.000
00129/101/21/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00366/101/21/423/22	PPh Pasal 21	97.433
00013/101/18/106/22	PPh Pasal 21	25.512
00015/101/01/951/02	PPh Pasal 21	50.000
00020/101/01/951/02	PPh Pasal 21	50.000
00049/101/01/951/02	PPh Pasal 21	50.000
00115/101/01/951/01	PPh Pasal 21	50.000
00176/101/01/951/01	PPh Pasal 21	50.000
00325/101/01/951/02	PPh Pasal 21	50.000
00375/101/01/951/02	PPh Pasal 21	50.000

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assesments *(Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Total/ *Amounts*
2022		
Surat Tagihan Pajak		
00390/101/01/951/02	PPh Pasal 21	50.000
00042/201/02/952/03	PPh Pasal 21	11.963.271
00270/101/01/952/03	PPh Pasal 21	100.000
00001/101/08/952/08	PPh Pasal 21	100.000
00002/201/04/712/05	PPh Pasal 21	145.975
00019/201/91/311/93	PPh Pasal 21	4.454.085
00013/201/97/101/98	PPh Pasal 21	13.015.743
00212/101/02/101/03	PPh Pasal 21	100.000
00047/101/93/625/93	PPh Pasal 21	60.000
00328/101/20/093/21	PPh Pasal 21	100.000
00326/101/20/093/21	PPh Pasal 21	100.000
00257/103/21/093/21	PPh Pasal 23	98.684
00267/101/21/093/21	PPh Pasal 21	100.000
00254/103/21/093/21	PPh Pasal 23	2.034.029
00159/101/21/093/21	PPh Pasal 21	100.000
00229/103/21/093/21	PPh Pasal 23	2.165.257
00258/103/21/093/21	PPh Pasal 23	62.434
00327/101/20/093/21	PPh Pasal 21	100.000
00117/101/21/423/22	PPh Pasal 21	1.999.870
00037/103/21/423/22	PPh Pasal 23	100.000
00184/101/21/113/22	PPh Pasal 21	12.194
00021/103/20/201/22	PPh Pasal 23	13.829
00111/103/21/423/22	PPh Pasal 23	47.222
00366/101/21/423/22	PPh Pasal 21	97.433
00186/101/21/111/22	PPh Pasal 21	24.997
00063/103/22/093/22	PPh Pasal 23	19.974
00149/103/21/093/22	PPh Pasal 23	28.767
00055/103/22/416/22	PPh Pasal 23	392.502
00163/103/22/416/22	PPh Pasal 23	473.578
00164/103/21/453/22	PPh Pasal 23	16.810
00150/103/21/093/22	PPh Pasal 23	56.208
00152/103/21/093/22	PPh Pasal 23	1.046.921
00060/103/21/405/22	PPh Pasal 23	4.160
00025/103/21/426/22	PPh Pasal 23	46.690
00033/103/21/438/22	PPh Pasal 23	11.344
00001/103/21/442/22	PPh Pasal 23	12.723
00002/241/20/093/22	PPh Pasal 15	4.342.830.671
00001/201/21/655/22	PPh Pasal 21	5.471.709
00081/103/19/21/22	PPh Pasal 23	137.698
00066/103/19/217/22	PPh Pasal 23	257.955
00160/101/19/217/22	PPh Pasal 21	7.806
00197/101/21/118/22	PPh Pasal 21	85.641
00198/101/21/118/22	PPh Pasal 21	765.906

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assesments *(Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Total/ *Amounts*
2022		
Surat Tagihan Pajak		
00199/101/21/118/22	PPh Pasal 21	51.726
00098/101/22/732/22	PPh Pasal 21	100.000
00088/103/21/404/22	PPh Pasal 23	30.341
00002/103/19/942/22	PPh Pasal 23	16.952
00013/101/20/942/22	PPh Pasal 21	100.000
00015/101/20/942/22	PPh Pasal 21	100.000
00016/103/22/942/22	PPh Pasal 23	7.838
00019/101/19/942/22	PPh Pasal 21	8.513
00287/101/22/942/22	PPh Pasal 21	59.647
00326/101/22/543/22	PPh Pasal 21	30.104
00338/101/21/941/22	PPh Pasal 21	100.000
00252/103/21/414/22	PPh Pasal 23	15.463
00208/101/17/514/22	PPh Pasal 21	1.102
01806/101/22/416/22	PPh Pasal 21	100.000
00075/101/22/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00077/101/22/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00101/101/22/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00182/101/22/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00130/103/21/403/22	PPh Pasal 23	26.827
00016/103/21/443/22	PPh Pasal 23	26.712
00013/103/19/622/22	PPh Pasal 23	100.000
00104/101/19/622/22	PPh Pasal 21	38.488
00019/103/21/437/22	PPh Pasal 23	16.861
00128/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00151/103/21/093/22	PPh Pasal 23	274.965
00118/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00126/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00010/207/11/511/12	PPN Dalam Negeri	64.049
00011/207/11/511/12	PPN Dalam Negeri	59.258
00032/103/21/425/22	PPh Pasal 23	25.897
00138/101/20/955/22	PPh Pasal 21	100.000
03000/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
06184/107/21/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
06232/107/21/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
06824/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
09308/107/21/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
09416/107/21/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
09477/107/21/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
10962/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
11236/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
11769/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
11810/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
13967/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000

15. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *15. TAXATION (Continued)*

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan) / *g. Tax Assesments (Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Total/ *Amounts*
2022		
Surat Tagihan Pajak		
14640/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
16543/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
00059/103/21/401/22	PPh Pasal 23	13.281
00250/101/22/401/22	PPh Pasal 21	100.000
00329/101/22/401/22	PPh Pasal 21	100.000
00200/101/22/412/22	PPh Pasal 21	100.000
00303/101/22/713/22	PPh Pasal 21	1.648
00036/103/21/446/22	PPh Pasal 23	20.734
00025/103/99/302/02	PPh Pasal 23	75.000
00032/103/20/305/22	PPh Pasal 23	100.000
00067/101/21/808/22	PPh Pasal 21	1.598
00626/101/21/821/22	PPh Pasal 21	100.000
00781/101/22/821/22	PPh Pasal 21	100.000
00094/101/22/732/22	PPh Pasal 21	7.219
00099/101/22/732/22	PPh Pasal 21	26.259
00071/101/22/804/22	PPh Pasal 21	100.000
00061/101/22/734/22	PPh Pasal 21	10.949
00008/103/22/816/22	PPh Pasal 23	1.372
00042/101/22/816/22	PPh Pasal 21	46.324
00047/101/19/816/22	PPh Pasal 21	100.076
00081/101/22/816/22	PPh Pasal 21	8.682
00005/101/07/922/07	PPh Pasal 21	82.237
01412/101/98/922/99	PPh Pasal 21	50.000
02673/101/00/922/02	PPh Pasal 21	50.000
01272/101/22/402/22	PPh Pasal 21	100.000
00115/101/22/954/22	PPh Pasal 21	3.409
00026/103/99/302/02	PPh Pasal 23	150.000
	Total	**5.963.922.273**

Surat Pajak/ *Tax Assessment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Nominal/ *Amounts*
PLI		
Surat Tagihan Pajak		
00008/140/21/078/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	651.000
00007/140/21/078/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00102/107/21/078/23	PPN	100.000

15. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *15. TAXATION (Continued)*

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan) / *g. Tax Assesments (Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assessment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Nominal/ *Amounts*
Surat Ketetapan Pajak		
00014/240/21/078/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	145.371.860
00051/406/21/078/23	PPh Pasal 29	6.867.768.972
00041/201/21/078/23	PPh Pasal 21	34.623.379
00116/207/21/078/23	PPN	48.430.537
00110/207/21/078/23	PPN	41.533.938
00112/207/21/078/23	PPN	60.721.449
00107/207/21/078/23	PPN	51.235.315
00115/207/21/078/23	PPN	72.384.431
00113/207/21/078/23	PPN	66.567.342
00111/207/21/078/23	PPN	55.203.104
00105/207/21/078/23	PPN	55.945.930
00106/207/21/078/23	PPN	72.644.059
00108/207/21/078/23	PPN	54.016.639
00109/207/21/078/23	PPN	105.912.273
00114/207/21/078/23	PPN	65.351.060
PFI		
Surat Tagihan Pajak		
00003/406/22/093/23	PPh 29	308.914.096
00024/407/22/093/23	PPN	(1.899.626.222)
00038/140/22/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00168/107/22/093/23	PPN	87.273
00169/107/22/093/23	PPN	43.243
00170/107/22/093/23	PPN	1.800
00171/107/22/093/23	PPN	2.990.505
Surat Ketetapan Pajak		
00003/240/22/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	602.082
00004/240/22/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	2.053.030
00003/201/22/093/23	PPh Pasal 21	21.096.558
00003/203/22/093/23	PPh Pasal 23	126.519.137
00084/207/22/093/23	PPN	1.527.273
00085/207/22/093/23	PPN	832.432
00086/207/22/093/23	PPN	546.154
00087/207/22/093/23	PPN	41.200.899
00088/207/22/093/23	PPN	34.650
00089/207/22/093/23	PPN	169.236
00090/207/22/093/23	PPN	404.250

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

g. Tax Assesments *(Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assessment Letters*	**Jenis Pajak/** *Type of Tax*	**Nominal/** *Amounts*
PPI		
Surat Ketetapan Pajak		
00223/103/19/441/23	PPh Pasal 23	100.000
00230/103/19/441/23	PPh Pasal 23	100.000
00550/103/20/441/23	PPh Pasal 23	100.000
00551/103/20/441/23	PPh Pasal 23	100.011
00557/103/20/441/23	PPh Pasal 23	100.000
00556/103/20/441/23	PPh Pasal 23	129.700
00554/103/20/441/23	PPh Pasal 23	100.000
00555/103/20/441/23	PPh Pasal 23	100.000
00552/103/20/441/23	PPh Pasal 23	129.700
00640/107/19/441/23	PPN	500.000
00639/107/19/441/23	PPN	500.000
00492/107/20/441/23	PPN	500.000
00661/107/20/441/23	PPN	500.000
00659/107/20/441/23	PPN	500.000
00700/101/20/441/23	PPh Pasal 21	164.792
00623/101/19/441/23	PPh Pasal 21	2.309.119
00694/101/20/441/23	PPh Pasal 21	100.000
00142/107/21/441/23	PPN	60.912
00196/106/23/441/23	PPh 25	114.861
00198/106/23/441/23	PPh 25	400.889
00519/106/19/441/23	PPh 29	1.000.000
00880/107/20/441/23	PPN	500.000
00198/106/23/441/23	PPN	500.000
00539/106/23/441/23	PPh 25	258.362
	Total	**6.414.926.030**

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

h. Administrasi Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, dan pengurangan tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari sebelumnya 10% menjadi 11% efektif mulai dari 1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

***15. TAXATION** (Continued)*

h. Tax Administration

On October 29, 2021, the Government issue Law of the Republic of Indonesia No. 7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the fiscal year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements and increase of the value added tax rate from previously 10% to become 11% effective from April 1, 2022 and become 12% no later than January 1, 2025.

16. UTANG LAIN-LAIN / *16. OTHER PAYABLES*

	2023	2022	
Utang Lain-lain			***Other Payables***
Utang Kepegawaian	56.652.393.250	47.007.060.153	*Employee Payables*
Pendapatan Diterima di Muka Pemanfaatan Aset	58.618.995.767	48.211.637.531	*Prepaid Income on Asset Utilization*
Utang atas Penyelesaian Investasi	45.324.750.466	15.141.336.294	*Payable of Working Investment*
Utang Uang Jaminan	6.224.087.757	5.761.694.609	*Fund Guarantee Payables*
Deposit Layanan P*ayment Point*	4.299.165.685	21.712.486.141	*Deposit Payment of Point Service*
Deposit atas Penyelenggaraan Layanan Surat dan Paket:			***Deposits on the Operation of Foreign Letter and Package Services:***
Deposit Agen	17.770.194.400	6.069.622.790	*Agent Deposits*
Luar Negeri	7.097.813.277	24.565.770.965	*International*
Deposit atas Jaminan Sewa Properti	158.000.000	163.365.000	*Deposit for Property Rental Guarantee*
Jaminan Penyelenggaraan Layanan Wesel Langganan	200.000.000	200.000.000	*Guaranteed Service Delivery Subscription*
Sub Jumlah	**196.345.400.602**	**168.832.973.483**	***Sub Total***
Utang Lancar Lainnya	**75.071.385.880**	**217.461.752.146**	***Other Current Payables***
Provisi Jangka Pendek			***Short-term Provision***
Jasa Produksi	120.880.593.816	122.117.990.766	*Production Service*
Tantiem	28.672.438.082	19.501.676.424	*Tantiem*
Sub Jumlah	**149.553.031.898**	**141.619.667.190**	***Sub Total***
Biaya yang Masih Harus Dibayar			***Accrued Expenses***
Angkutan Pos	166.960.257.755	82.068.266.459	*Postal Delivery*
Sewa	61.188.027.651	43.868.527.912	*Building Rent*
Administrasi	38.067.491.347	52.696.911.585	*Administration*
Honorarium Petugas Agen Pos	11.089.227.095	18.692.287.642	*Honorarium of Post Agents*
Beban Bunga Pinjaman	10.665.097.222	2.057.782.444	*Loan Interest Expense*
Konstruksi	5.704.935.518	--	*Construction*
Pengerjaan Kiriman Pos Luar Negeri	5.517.220.438	9.443.826.603	*International Mailing Delivery*
Fee Konsultan	1.454.428.500	--	*Consultant Fee*
Biaya Lembur Tenaga Kontrak Karya	1.381.629.112	2.020.621.606	*Overtime Allowance for Non-permanent Employees*
Pajak Final	1.212.650.386	--	*Final Tax*
Keamanan	443.643.200	1.285.133.592	*Security*
Pemeliharaan	264.747.056	--	*Maintenance*
Pengembangan Properti	150.105.381	--	*Property Development*
Tunjangan Karyawan Lainnya	57.616.155	2.287.402.405	*Other Employee Allowance*
Manfaat Tambahan Karyawan	--	1.004.497.000	*Additional Employee Benefits*
Sub Jumlah	**304.157.076.816**	**215.425.257.248**	***Sub Total***
Utang Pemegang Saham Minoritas	28.701.465.612	2.488.200.000	*Debt of Minority Shareholders*
Jumlah	**753.828.360.808**	**745.827.850.067**	***Total***

Manajemen telah mencadangkan provisi untuk pembayaran jasa produksi untuk karyawan dan tenaga kerja kontrak pembayaran tantiem untuk direksi dan komisaris.

The Management has made a provision for payment of production services for employees and payment of bonuses for directors and commissioners.

16. UTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Utang kepegawaian merupakan utang gaji dan manfaat karyawan yang sampai dengan akhir periode pelaporan laporan keuangan belum dibayarkan kepada pegawai. Utang kepegawaian terdiri dari uang kontrak rumah pegawai, uang cuti tahunan dan uang cuti tahap akhir.

Utang uang jaminan adalah penerimaan kas atau bank yang diterima dari pihak ketiga (mitra) sebagai utang uang jaminan di awal kerjasama dengan Grup. Tujuan uang jaminan ini adalah untuk menghindari kerugian yang mungkin dialami oleh Grup dalam pelaksanaan pekerjaan.

Biaya yang masih harus dibayar merupakan beban akrual Grup dimana manfaat atas penggunaan beban tersebut telah diterima Grup pada masa periode pelaporan. Beban akrual angkutan pos merupakan beban akrual atas angkutan pengiriman barang kiriman pos baik itu menggunakan moda angkutan darat dan udara yang mana proses penagihan *invoice* dilakukan kurang lebih 2–3 bulan dari tanggal transaksi.

Kenaikan akrual atas angkutan pos dan sewa kendaraan merupakan biaya akrual dari proyek pengiriman bantuan cadangan beras pemerintah yang merupakan kerjasama Grup dengan Perum Bulog. Angka tersebut merupakan cadangan atas 3 tahap pekerjaan proyek pengiriman.

Penurunan akrual atas honorarium petugas agen pos karena penurunan jumlah proyek jasa keuangan.

16. OTHER PAYABLES *(Continued)*

Employee payables is a payable of salaries and employee benefits that until the end of the reporting period has not been paid to employees. The employee payables consist of employee's housing contract money, annual leave money and final stage leave money.

Fund guarantee payable is bank or cash received from third parties (partners) as security deposits that were paid at the beginning of cooperation agreement with the Company. The purpose of deposits is to avoid losses that might experienced by the Group in the implementation of the work.

Accrued expenses are the accrual of the Group's expenses where the benefits of using expenses have been received by the Group during the reporting period. Accrued postal delivery expense is an accrued expenses on postal delivery freight transport whether by land and air transportation mode where the invoice billing process is approximately 2-3 months from the date of transaction.

The increase in accrual of postal delivery and rental of vehicles is an accrual expenses for the delivery project of government rice reserve assistance which is a collaboration between the Group and Perum Bulog. This amount is a reserve for 3 stages of delivery project work.

Decrease in accrual for postal agent honorarium due to decrease in the number of financial services projects.

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK / *17. SHORT-TERM BANK LOAN*

Akun ini merupakan pinjaman bank jangka pendek Grup dengan rincian sebagai berikut:

This account pertains to short-term bank loan of the Group with details are as follows:

	2023	2022	
Pihak Berelasi (Catatan 26)			***Related Parties (Note 26)***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	370.604.000.000	--	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	300.000.000.000	150.000.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Sub Jumlah	**670.604.000.000**	**150.000.000.000**	***Sub Total***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT Bank Central Asia Tbk	665.000.000.000	320.000.000.000	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	500.000.000.000	--	*PT Bank Maspion Indonesia Tbk*
PT Bank Dubai Panin Syariah Tbk	400.000.000.000	50.000.000.000	*PT Bank Dubai Panin Syariah Tbk*
PT Bank Sinarmas Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	*PT Bank Sinarmas*
PT Bank KB Bukopin Tbk	--	200.000.000.000	*PT Bank KB Bukopin Tbk*
Sub Jumlah	**1.615.000.000.000**	**620.000.000.000**	***Sub Total***
Total	**2.285.604.000.000**	**770.000.000.000**	***Total***

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perjanijan Kredit	:	Perjanjian Kredit Modal Kerja I: No.CRO.KP/206/KMK/12 Akta Nomor 100. Adendum XI (kesebelas) tanggal 22 September 2023.
Plafond	:	Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah).
Jangka Waktu	:	26 September 2023 sampai dengan 25 September 2024
Tujuan	:	Modal kerja untuk memenuhi kebutuhan dana transaksi harian
Tingkat Bunga	:	8,5% per tahun
Provisi	:	0,25% per tahun dari total limit
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Loan Agreement	*:*	*Working Capital Loan Agreement I No.CRO.KP/206/KMK/12. Deed No. 100 Addendum XI (eleventh) dated September 22, 2023.*
Limit	*:*	*Rp350,000,000,000 (three hundred and fifty billion rupiah).*
Period	*:*	*September 26, 2023 until September 25, 2024*
Purposes	*:*	*Working capital to meet the needs of daily transaction funds*
Interest Rate	*:*	*8.5% per annum*
Provision	*:*	*0.25% per annum of the limit*
Collateral	*:*	*Clean basis*

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perjanijan Kredit	:	Perjanjian Kredit Modal Kerja II No.CRO.KP/444/KMK/21 Akta Nomor 101. Adendum II (kedua) tanggal 22 September 2023.
Plafond	:	Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	25 September 2023 sampai dengan 25 September 2024
Tujuan	:	Modal kerja untuk memenuhi kebutuhan dana transaksi harian
Tingkat Bunga	:	8,5% per tahun
Provisi	:	0,25% per tahun dari total limit
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perjanijan Kredit	:	Perjanjian Kredit Fasilitas *Non Cash Loan* No. WCO.KP/1535/NCL/2023, Akta No. 102 tanggal 22 September 2023
Plafond	:	Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	25 September 2023 sampai dengan 25 September 2024
Tujuan	:	Bank Garansi untuk keperluan tender dan retensi atau pemeliharaan proyek kerja sama dengan Pemerintah dann pengiriman surat atau paket atau logistik Perusahaan.
Provisi	:	0,25% per tahun dari total limit
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

17. SHORT-TERM BANK LOAN *(Continued)*

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Loan Agreement	:	*Working Capital Loan Agreement II No.CRO.KP/444/KMK/21. Deed No.101 Addendum II (second) September 22, 2023.*
Limit	:	*Rp150,000,000,000 (one hundred fifty billion rupiah)*
Period	:	*September 25, 2023 until September 25, 2024*
Purposes	:	*Working capital to meet the needs of daily transaction funds*
Interest Rate	:	*8.5% per annum*
Provision	:	*0.25% per annum of the limit*
Collateral	:	*Clean basis*

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Loan Agreement	:	*Credit Agreement of Non Cash Loan Facility No. WCO.KP/1535/NCL/2023 Deed No. 102 dated September 22, 2023.*
Limit	:	*Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah)*
Period	:	*September 25, 2023 until September 25, 2024*
Purposes	:	*Bank Guarantee for tender purposes and retention or maintenance of cooperation projects with the Government and delivery of letters or packages or Company logistics.*
Provision	:	*0.25% per annum of the limit*
Collateral	:	*Clean basis*

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit	:	Persetujuan Kredit No. 62 tanggal 15 Maret 2023 Adendum XII (Kedua Belas)
Plafon	:	Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	17 Maret 2023 sampai dengan 16 Maret 2024
Tujuan	:	Tambahan Modal Kerja usaha jasa logistik, pengiriman dan jasa keuangan
Jenis Kredit	:	*Term Loan*
Tingkat Bunga	:	9,75%
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit	:	Persetujuan Kredit No. 09 tanggal 15 Maret 2023 Adendum XIII (Ketiga Belas).
Plafon	:	Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
Jangka Waktu	:	17 Maret 2023 sampai dengan 16 Maret 2024.
Tujuan	:	Pembiayaan Belanja Modal Perusahaan
Tingkat Bunga	:	9,50%, sejak Oktober 2023 menjadi 9,75%
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

17. SHORT-TERM BANK LOAN *(Continued)*

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Loan Agreement	*:*	*Loan Approval No. 62, dated March 15, 2023 Addendum XII (The twelfth)*
Plafond	*:*	*Rp150,000,000,000 (one hundred fifty billion rupiah)*
Period	*:*	*March 17, 2023 until March 16, 2024*
Purposes	*:*	*Additional Working Capital for logistics, shipping, and financial services businesses*
Type of Credit	*:*	*Term Loan*
Interest Rate	*:*	*9.75%*
Collateral	*:*	*Clean Basis*

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Loan Agreement	*:*	*Loan Approval No. 09, dated March 15, 2023 Addendum XII (Thirteenth).*
Plafond	*:*	*Rp250,000,000,000 (two hundred fifty billion rupiah).*
Period	*:*	*March 17, 2023 until March 16, 2024.*
Purposes	*:*	*To Finance the Company's Capital Expenditure*
Interest Rate	*:*	*9.50%, since October 2023 to 9,75%*
Collateral	*:*	*Clean Basis*

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk

Perjanjian Kredit	:	Persetujuan Kredit No. 1 tanggal 2 Oktober 2023
Fasilitas Kredit	:	*Time loan revolving* dengan limit Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar rupiah)
	:	Fasilitas kredit lokal dengan limit Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	29 Oktober 2023 sampai dengan 29 Oktober 2024
Tujuan	:	Modal Kerja Operasional Perusahaan, khususnya pembayaran kepada Pihak Ketiga
Jenis Kredit	:	*Time Loan Revolving*
Tingkat Bunga	:	8,60% per tahun
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Perjanjian Kredit	:	Persetujuan Kredit No. 03 tanggal 10 Maret 2023
Fasilitas Kredit	:	*Demand loan* dengan limit Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	10 Maret 2023 sampai dengan 10 Maret 2024
Tujuan	:	Modal Kerja Operasional perusahaan, khususnya pembayaran kepada pihak ketiga
Tingkat Bunga	:	8,50% per tahun
Provisi	:	0,25% per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

***17. SHORT-TERM BANK LOAN** (Continued)*

PT Bank Central Asia Tbk

Loan Agreement	*:*	*Loan Approval No. 1 dated October 2, 2023*
Credit Facilities	*:*	*Time loan revolving with limit facilities Rp1,400,000,000,000 (one trillion four hundred billion rupiah)*
		Local credit facility with limit facilities Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah)
Period	*:*	*October 29, 2023 until October 29, 2024*
Purposes	*:*	*Operational Working Capital firms, especially the payment to Third Parties*
Type of Credit	*:*	*Time Loan Revolving*
Interest Rate	*:*	*8.60% per annum*
Collateral	*:*	*Clean Basis*

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Loan Agreement	*:*	*Loan Approval No. 03 dated March 10, 2023*
Credit Facilities	*:*	*Demand Loan with limit facilities Rp300,000,000,000 (Three hundred billion rupiah)*
Period	*:*	*March 10, 2023 until March 10, 2024*
Purposes	*:*	*Operational Working Capital firms, especially the payment to third parties*
Interest Rate	*:*	*8.50% per annum*
Provision	*:*	*0.25% per annum of the limit provided*
Collateral	*:*	*Clean Basis*

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Perjanjian Kredit	:	Persetujuan Kredit No. 07 tanggal 23 Juni 2023
Fasilitas Kredit	:	*Demand loan* dengan limit Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	23 Juni 2023 sampai dengan 23 Juni 2024
Tujuan	:	Modal Kerja Operasional perusahaan, khususnya pembayaran kepada pihak ketiga
Tingkat Bunga	:	8,25% per tahun
Provisi	:	0,1% per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Perjanijan Kredit	:	Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 05. tanggal 04 Mei 2023. Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 32. tanggal 29 September 2023 tentang perubahan fasilitas.
Fasilitas Kredit	:	Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) dengan limit Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	29 Juni 2023 sampai dengan 29 Juni 2024
Tujuan	:	Modal Kerja usaha penyaluran bantuan pemerintah
Tingkat Bunga	:	8,35% per tahun
Provisi	:	0,25% per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

17. SHORT-TERM BANK LOAN *(Continued)*

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Loan Agreement	*:*	*Loan Approval No. 07 dated June 23, 2023*
Credit Facilities	*:*	*Demand loan with limit facilities Rp200,000,000,000 (two hundred billion rupiah)*
Period	*:*	*June 23, 2023 until June 23, 2024*
Purposes	*:*	*Operational Working Capital firms, especially the payment to third parties*
Interest Rate	*:*	*8.25% per annum*
Provision	*:*	*0.1% per annum of the limit provided*
Collateral	*:*	*Clean Basis*

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Loan Agreement	*:*	*Addendum of Musyarakah Financing Agreement No. 05. dated May 04, 2023. Addendum of Musyarakah Financing Agreement No. 32. dated September 29, 2023 about facility changes.*
Credit Facilities	*:*	*Sharia Current Account Financing (PRKS) with limit facilities Rp400,000,000,000 (four hundred billion rupiah)*
Period	:	*June 29, 2023 until June 29, 2024*
Purposes	:	*Working Capital for government aid distribution*
Interest Rate	:	*8.35% per annum*
Provision	:	*0.25% per annum of the limit provided*
Collateral	:	*Clean Basis*

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Sinarmas Tbk

Perjanjian Kredit	:	Persetujuan Kredit No. 19 tanggal 30 Agustus 2021 Adendum 2 (Kedua) tanggal 29 Agustus 2023
Fasilitas Kredit	:	*Demand Load (Revolving – Uncommited)* dengan limit Rp350.000.000.000
Jangka Waktu	:	30 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2024
Tujuan	:	Modal Kerja Operasional Perusahaan khususnya pembayaran kepada pihak ketiga
Tingkat Bunga	:	9,50%
Provisi	:	0,25% per tahun dari besarnya plafon
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

PT Bank KB Bukopin Tbk

Perjanjian Kredit	:	Persetujuan Kredit No. LIII/125/KB BUKI/ADD-PK-REG/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023
Plafond	:	Rp200.000.000.000 (Dua ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	7 Desember 2023 sampai dengan 7 Desember 2024
Tujuan	:	Modal Kerja Operasional perusahaan, khususnya pembayaran kepada pihak ketiga
Tingkat Bunga	:	8,95% per tahun
Provisi	:	0,10% per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 27 Desember 2023 sebagai syarat perpanjangan fasilitas.

17. SHORT-TERM BANK LOAN *(Continued)*

PT Bank Sinarmas Tbk

Loan Agreement	*:*	*Loan Approval No. 19 dated 30 August 2021 Addendum 2 (Second) dated 29 August 2023*
Credit Facilities	*:*	*Demand Load (Revolving – Uncommited) with limit facilities Rp350,000,000,000*
Period	*:*	*August 30, 2023 until August 30, 2024*
Purposes	*:*	*Operational Working Capital Firms especially the payment to third parties*
Interest Rate	*:*	*9.50%*
Provision	*:*	*0.25% per annum of the limit provided*
Collateral	*:*	*Clean Basis*

PT Bank KB Bukopin Tbk

Loan Agreement	:	*Persetujuan Kredit No. LIII/125/KB BUKI/ADD-PK-REG/XII/2023 dated December 20, 2023*
Limit	:	*Rp200,000,000,000 (Two hundred billion Rupiah)*
Period	:	*December 7, 2023 until December 7, 2024*
Purposes	:	*Operational Working Capital firms, especially the payment to third parties*
Interest Rate	:	*8.95% per annum*
Provision	:	*0.10% per annum of the limit provided*
Collateral	:	*Clean Basis*

This loan has been repaid on December 27, 2023 as a condition of facility extension.

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan) / *17. SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)*

Berikut uraian pembatasan masing-masing fasilitas pinjaman bank: / *The following is a description of the restrictions on each bank loan facilities:*

Nama Bank/ *Bank Name*	Rasio/ *Ratio*	Batasan/ *Convenants*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rasio lancar/*Current ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
	Rasio utang terhadap ekuitas/*Debt equity ratio*	Maksimal 2,2x/*Maximum 2.2x*
	Rasio cakupan layanan utang/*Debt service coverage ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rasio cakupan layanan utang/*Debt service coverage ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
	Rasio lancar/*Current ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
PT Bank Sinarmas Tbk	Rasio lancar/*Current ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
	Rasio cakupan layanan utang/*Debt service coverage ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
PT Bank Central Asia Tbk	Rasio lancar/*Current ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
	Rasio kewajiban terhadap ekuitas/*Liabilities to equity ratio*	Maksimal 2,5x/Maximum 2.5x
PT Bank KB Bukopin Tbk	Rasio cakupan layanan utang/*Debt service coverage ratio*	Minimal 1,25x/*Minimum 1.25x*
	Rasio lancar/*Current ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
PT Bank Maspion Tbk	Rasio cakupan layanan utang/*Debt service coverage ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
	Rasio lancar/*Current ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
	Rasio kewajiban terhadap ekuitas/*Liabilities to equity ratio*	Maksimal 2,5x/*Maximum 2.5x*

Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan covenant yang ditentukan dalam perjanjian. / *The Company has fulfilled all covenant requirements specified in the agreement.*

18. PINJAMAN JANGKA PANJANG / *18. LONG-TERM LOANS*

a. Pinjaman Bank / *a. Bank Loans*

	2023	2022	
Pihak Berelasi			***Related Parties***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	127.500.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Pelunasan Pinjaman Bank	--	(40.000.000.000)	*Repayment of Bank Loans*
Jumlah Pinjaman	**--**	**87.500.000.000**	***Total Loan***
Dikurangi Bagian Utang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	--	(34.000.000.000)	*Less Current Maturities*
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang	**--**	**53.500.000.000**	***Total Long-term Bank Loans***

18. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan) / *18. LONG-TERM BANK LOANS (Continued)*

a. Pinjaman Bank (Lanjutan) / *a. Bank Loans (Continued)*

Berdasarkan akta perjanjian kredit Nomor 09 tahun tanggal 12 Agustus 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit investasi dengan jumlah fasilitas sebesar Rp250.000.000.000. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan Adendum XIII Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 09 tanggal 15 Maret 2023 tentang jangka waktu perpanjangan kredit diperpanjang selama 12 bulan sejak tanggal jatuh tempo kredit atau terhitung sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 17 Maret 2024. Sehingga atas pinjaman ini per 31 Desember 2023 berubah menjadi pinjaman jangka pendek (Catatan 17).

Based on the deed of credit agreement Number 09 dated August 12, 2012, the Company obtained an investment credit loan facility with a total facility of Rp250,000,000,000. This agreement has been amended several times, most recently amended by Addendum XIII Approval of Amendment to Credit Agreement Number 09 dated March 15, 2023 regarding the credit extension period extended for 12 months from the due date of the loan of the credit or from March 17, 2023 to March 17, 2024. Therefore, this loan as of December 31, 2023 has been converted into a short-term loan (Note 17).

b. Liabilitas Sewa / *b. Lease Liabilities*

	2023	2022	
Utang Pembiayaan Konsumen			***Customer Financing Liabilites***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
PT Mandiri Tunas Finance	--	859.987.418	*PT Mandiri Tunas Finance*
Dikurangi bagian utang yang jatuh tempo dalam satu tahun	--	(859.987.418)	*Less Current Maturities*
Pihak Berelasi Jangka Panjang - Bersih	**--**	**--**	***Non-Current Related Parties - Net***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT Indomobil Finance	--	6.750.000.000	*PT Indomobil Finance*
PT Gemilang 85	--	40.960.000	*PT Gemilang 85*
Dikurangi Bagian Utang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			*Less Current Maturities*
PT Indomobil Finance	--	(6.750.000.000)	*PT Indomobil Finance*
PT Gemilang 85	--	(40.960.000)	*PT Gemilang 85*
Pihak Ketiga Jangka Panjang - Bersih	**--**	**--**	***Non-Current Third Parties - Net***
Liabilitas Sewa			***Lease Liabilities***
Liabilitas Sewa	22.928.966.765	36.829.098.452	*Lease Liabilities*
Dikurangi Bagian Utang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(7.734.098.789)	(30.397.974.543)	*Less Current Maturities*
Jumlah	**15.194.867.976**	**6.431.123.909**	***Total***

18. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan) / *18. LONG-TERM BANK LOANS (Continued)*

c. Utang Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi / *c. Medium Term Notes and Bonds*

	2023	2022	
Nilai Nominal			***Related Parties***
Obligasi I Seri A	100.000.000.000	100.000.000.000	*Obligasi I Seri A*
Obligasi I Seri B	400.000.000.000	400.000.000.000	*Obligasi I Seri B*
MTN Posindo 03 tahap 1	325.000.000.000	325.000.000.000	*MTN Posindo 03 stage 1*
Sub Jumlah	**825.000.000.000**	**825.000.000.000**	***Sub Total***
Dikurangi Biaya Penerbitan yang Belum Diamortisasi	(6.538.541.667)	(10.776.041.667)	*Less unamortized Issuance Cost*
Jumlah MTN & Obligasi - Bersih	**818.461.458.333**	**814.223.958.333**	***Total MTN & Bonds - Net***
Dikurangi Bagian Utang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(323.361.458.333)	--	*Less Current Portion*
Jumlah Jangka Panjang	**495.100.000.000**	**814.223.958.333**	***Total Long-term Portion***

Pinjaman Jangka Mengengah

Utang MTN merupakan surat hutang berjangka menengah *(Medium Term Notes)* yang diterbitkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) guna mendukung penyediaan dana untuk penggantian kewajiban yang ada (kredit perbankan/KMK) dengan kewajiban hutang lain *(refinancing)*. Dalam melakukan penerbitan ini Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan surat No.356/Dekom/1218 tanggal 18 Desember 2018 dan No.278/Dekom/0821 tanggal 16 Agustus 2021.

Medium Term Notes diterbitkan secara bertahap terdiri dari beberapa seri dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 yang diterbitkan secara berseri.

MTN Posindo-03 Tahap I Tahun 2021 telah disahkan oleh Notaris Fathiah Helmi SH No. 39 tanggal 29 Desember 2021 dengan cara penempatan dana terbatas (*private placement*) dengan jumlah sebesar Rp325.000.000.000 dengan tenor 3 tahun sejak tanggal penerbitan yaitu 29 Desember 2021 dengan bunga 10,50%.

Medium Term Notes

MTN debt is a medium-term note issued by PT Pos Indonesia (Persero) to support the provision of funds for the obligation replacement (bank credit/KMK) with other debt obligations (refinancing). In conducting this issuance, the Company has received approval from the Board of Commissioners based on letter No.356/Dekom/1218 dated December 18, 2018 and No.278/Dekom/0821 dated August 16, 2021.

Medium Term Notes are issued in stages consisting of several series with maximum principal value amounting to Rp1,000,000,000,000.

MTN Posindo-03 Phase I of 2021 has been ratified by Notary Fathiah Helmi SH No. 39 dated December 29, 2021 by means of a private placement of funds in the amount of Rp325,000,000,000 with a tenor of 3 years from the issuance date namely December 29, 2021 with an interest of 10.50%.

18. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

c. Utang Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi (Lanjutan)

Pinjaman Jangka Mengengah (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian MTN, Perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan dan menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
1. *Debt to Equity Ratio* (DER) Maksimal 5
2. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* Minimal 100%

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memenuhi semua persyaratan covenant yang ditentukan dalam perjanjian.

Perusahaan telah menunjuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk bertindak sebagai Agen Pembayaran.

Perusahaan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) Tbk. untuk mewakili hak-hak dan kepentingan pemegang MTN selaku Agen Pemantau dan Agen Jaminan.

Obligasi

Perusahaan telah menerbitkan Obligasi pada tahun 2022 untuk mendukung ketersediaan dana dan operasional Perusahaan. Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dalam surat No. S-596/MBU/09/2022 perihal persetujuan Rencana Penerbitan Obligasi dan/atau Surat Berharga Lainnya PT Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 21 September 2022.

18. LONG-TERM BANK LOANS *(Continued)*

c. Medium Term Notes and Bonds *(Continued)*

Medium Term Notes *(Continued)*

Based on the MTN agreement, the Company has an obligation to ensure and maintain financial ratios as follows:
1. *Debt to Equity Ratio (DER) Maximum 5*
2. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Minimum 100%*

As of December 31, 2023, the Company has fulfilled all covenant requirements within the agreement.

The Company has appointed PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) to act as a Payment Agent.

The company has appointed PT Tabungan Negara Tbk (Persero) Tbk. to represent the rights and interests of MTN holders as Monitoring Agents and Guarantee Agents.

Bonds

The Company has issued Bond in 2022 to support the availability of funds and the Company's operations. The Company has obtained approval from the Board of Commissioners in letter No. S-596/MBU/09/2022 regarding the approval of the Planned Issuance of Bond and/or Other Securities of PT Pos Indonesia (Persero) on September 21, 2022.

18. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

c. Utang Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi (Lanjutan)

Obligasi (Lanjutan)

Obligasi I Pos Indonesia telah disahkan oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 87 tanggal 13 Desember 2022 tentang Addendum III dan pernyataan kembali perjanjian emisi obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 bahwa PT Pos Indonesia (Persero) menerbitkan Obligasi sebesar Rp500.000.000.000 dengan ketentuan Obligasi Seri A sebesar Rp100.000.000.000 dengan tenor 3 tahun sejak tanggal penerbitan yaitu 28 Desember 2022 dengan bunga 10,90%. Obligasi Seri B sebesar Rp400.000.000.000 dengan tenor selama 5 tahun sejak tanggal penerbitan yaitu 28 Desember 2022 dengan bunga 11,75%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat Obligasi Perusahaan telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat irA- dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI) tanggal 7 Agustus 2023.

Perusahaan sudah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat.

Perusahaan menunjuk PT Bahana Sekuritas dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi Perusahaan.

18. LONG-TERM BANK LOANS *(Continued)*

c. Medium Term Notes and Bonds *(Continued)*

Bonds *(Continued)*

Pos Indonesia's Bond I have been certified by Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 87 dated December 13, 2022 concerning Addendum III and restatement of the I Pos Indonesia's bond issuance agreement for 2022 that PT Pos Indonesia (Persero) issues bonds of Rp500,000,000,000 with the provisions for Series A Bonds of Rp100,000,000,000 with a tenor of 3 years from the issuance date, which is December 28, 2022 with an interest of 10.90%. Series B bonds of Rp400,000,000,000 with a tenor of 5 years from the issuance date, December 28, 2022 with an interest of 11.75%.

As of December 31, 2023, the Company's bond rating has been rated irA- by PT Kredit Rating Indonesia (KRI) dated August 7, 2023.

The Company has appointed PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as trustee.

As underwriters for the issuance of Bond, the Company has appointed PT Bahana Sekuritas and PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

18. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

c. Utang Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi (Lanjutan)

Obligasi (Lanjutan)

Biaya penawaran umum adalah sebesar Rp9.690.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian/*Description*	Jumlah Biaya/ *Total Cost*
1	**Biaya Jasa Untuk Penjaminan Emisi Efek/*Underwriting Fee***	
	Biaya Jasa Manajemen/*Management Fee*	4.000.000.000
	Biaya Jasa Penjaminan/*Underwriting Fee*	1.400.000.000
	Biaya Jasa Penjualan/*Selling Fee*	1.400.000.000
	Sub Jumlah/*Sub Total*	**6.800.000.000**
2	**Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal/*Capital Market Support Professional Fees***	
	Biaya Jasa Akuntan Publik/*Audit Fee*	1.245.000.000
	Biaya Jasa Konsultan Hukum/*Legal Fee*	600.000.000
	Biaya Notaris/*Notary Fee*	100.000.000
	Sub Jumlah/*Sub Total*	**1.945.000.000**
3	**Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal/*Capital Market Supporting Institution Fees***	**450.000.000**
Jumlah/*Total*		**9.195.000.000**

Yang termasuk biaya lain-lain adalah biaya pernyataan pendaftaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), biaya pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI), biaya-biaya untuk Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan prospektus awal dan prospektus, formulir, biaya iklan koran dan audit penjatahan.

Utang obligasi ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan pada laporan keuangan akhir tahun (Desember) audited sebagai berikut:

1. *Debt to Equity Ratio (DER)* Maksimal 5
2. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* Minimal 100%

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup memenuhi semua persyaratan covenant yang ditentukan dalam perjanjian.

18. LONG-TERM BANK LOANS *(Continued)*

c. Medium Term Notes and Bonds *(Continued)*

Bonds *(Continued)*

The cost of the public offering is Rp9,690,000,000 and with details as follows:

Other costs include OJK registration statement fee, IDX listing fee, fees for KSEI, initial bidding costs, printing costs for initial prospectus and prospectus, forms, newspaper advertising fees and allotment audits.

Bonds payable requires the Company to maintain financial ratios on year end audited financial statement (December) as follows:

1. *Debt to Equity Ratio (DER) Maximum 5*
2. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Minimum 100%*

As of December 31, 2023, the Group has fulfilled all covenant requirements within the agreement.

18. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

c. Utang Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi (Lanjutan)

Obligasi (Lanjutan)

Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi I tahun 2022 melalui surat Nomor 26/DIR-1/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. realisasi penggunaan dana bersih Obligasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp490.310.000.000 sehingga sisa dana hasil penawaran umum adalah nihil.

Sebesar Rp294.186.000.000 atau 60,00% (enam puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka kegiatan usaha Grup sehari–hari antara lain untuk beban operasional, beban pemasaran, beban pengembangan usaha atas bisnis jasa keuangan, bisnis surat pos dan paket pos, bisnis ritel, bisnis logistik, bisnis filateli, bisnis properti dan/atau beban lainnya sehubungan kegiatan usaha Grup.

Sebesar Rp83.580.000.000 atau 40,00% (empat puluh persen) akan digunakan untuk belanja modal berupa digitalisasi proses bisnis Grup, pengembangan sistem *Customer Relationship Management (CRM)*, inovasi bisnis digital dan *middle mile* infrastruktur.

Eksposur maksimum terhadap risiko likuiditas pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat utang obligasi sebagaimana yang diungkapkan di Catatan 28.

***18. LONG-TERM BANK LOANS** (Continued)*

***c. Medium Term Notes and Bonds** (Continued)*

***Bonds** (Continued)*

Based on the Realization Report on the Use of Bonds I Year 2022 through letter Number: 26/DIR-1/01/2024 dated January 9, 2024 has been submitted to the Financial Services Authority ("OJK") and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, realization of the use of bond until December 31, 2023 amounting to Rp490,310,000,000, so that the remaining proceeds from the public offering are nil.

A total of Rp294,186,000,000 or 60.00% (sixty percent) will be used for working capital in the framework of the Group's daily business activities, including operational expenses, marketing expenses, business development expenses for the financial services business, postal mail and postal package business, retail business, logistics business, philatelic business, property business and/or other expenses in connection with the Group's business activities.

A total of Rp83,580,000,000 or 40.00% (forty percent) will be used for capital expenditure in the form of digitalizing the Group's business processes, developing Customer Relationship Management (CRM) systems, digital business innovation and middle mile infrastructure.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of bonds payable as disclosed in Note 28.

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

Imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan merupakan imbalan pasti sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020.

Employee benefits granted to employees is a defined benefit in accordance with Omnibus Law No. 11/2020.

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020. Penyisihan ini didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, sebagaimana tercantum dalam laporan No. 0039/PSAK/KKA.AB/II/2024 tanggal 6 Februari 2024.

The Company recognizes the provision for employee benefits in accordance with SFAS 24 (Revised 2013) and the Omnibus Law No. 11 of 2020. This provision is based on calculations done by Arya Bagiastra Actuarial Consulting Firm, as stated in report No. 0039/PSAK/KKA.AB/II/2024 dated February 6, 2024.

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Details of employee benefit obligations are recognized in the consolidated statement of financial position is as follows:

	2023	2022	
Pesangon			***Severance***
Perusahaan	1.104.990.961.370	1.206.379.928.262	*The Company*
Entitas anak	3.035.817.531	3.507.866.362	*Subsidiaries*
Jumlah	**1.108.026.778.901**	**1.209.887.794.624**	***Total***

Beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi sebagai beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

Employee benefits expenses recognized in the income statement as general and administrative expenses are as follows:

	2023	2022	
Biaya Bunga	99.041.729.730	81.514.121.957	*Interest Expense*
Biaya Jasa Kini	80.367.230.162	87.570.128.257	*Current Service Cost*
Biaya Jasa Lalu	(98.756.178.563)	(32.215.873.576)	*Past Service Cost*
Harapan Hasil Investasi	(15.078.071.402)	(25.251.501.321)	*Return on Plan Assets at BoP - Expected*
Provisi untuk Imbalan Terminasi	44.128.000	--	*Provision for Excess Benefit Payment*
Jumlah	**65.618.837.927**	**111.616.875.317**	***Total***

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

19. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)*

Beban imbalan kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah:

Employee benefits expenses recognized in the statement of other comprehensive income are as follows:

	2023	2022	
(Keuntungan)/Kerugian Aktuarial pada Kewajiban			*Actuarial (Gain) or Loss on Obligation:*
Perubahan Asumsi Keuangan	9.534.106.273	(53.190.727.165)	*Change in Financial Assumption*
Penyesuaian Pengalaman	(20.110.076.057)	204.251.923.650	*Experience Adjustment*
(Keuntungan)/Kerugian Aktuarial pada Nilai Wajar Aktiva Program	(46.996.969.066)	196.446.248.755	*Actuarial (Gain)/Loss on Plan Assets*
Jumlah	**(57.572.938.850)**	**347.507.445.240**	***Total***

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas imbalan kerja serta rekonsiliasi nilai kini liabilitas imbalan pasti dan liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of the present value of defined benefit liabilities, and the reconciliation of the present value of defined benefit obligations and liabilities recognized in the consolidated statements of financial position were as follows:

	2023	2022	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Awal Periode	1.209.887.794.624	865.323.544.840	*Present Value of Defined Benefit Obligations*
Beban Tahun Berjalan	65.618.837.927	111.616.875.317	*Current Year Expense*
Pembayaran Manfaat	(109.611.722.659)	(114.641.660.975)	*Benefit Payments*
Keuntungan)/Kerugian Aktuaria	(57.572.938.850)	347.507.445.240	*Actuarial (Gain)/Loss*
Iuran Perusahaan Selama Periode Berjalan	(239.154.319)	(151.386.500)	*Company Contribution Paid in Year*
Penyesuaian	(56.037.822)	232.976.702	*Adjustment*
Jumlah	**1.108.026.778.901**	**1.209.887.794.624**	***Total***

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Penyisihan imbalan kerja di atas dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* modifikasi IFRIC berdasarkan perhitungan aktuaria pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2023 yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, aktuaris independen, dengan asumsi aktuarial utama sebagai berikut:

19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)

The estimated liabilities on employee benefits are computed using the Projected Unit Credit method IFRIC modification based on the actuarial reports as of December 31, 2023 and 2022 conducted by Arya Bagiastra Actuarial Consulting Firm, independent actuaries, with the following principal assumptions:

	2023	2022	
Tingkat Kenaikan Gaji	5,50%	5,50%	*Salary Increase Rate*
Tingkat Bunga Diskonto	6,67%	6,95%	*Interest Discount Rate*
Usia Pensiun Normal	56 tahun/*years old*	55 tahun/*years old*	*Normal Retirement Age*
Tingkat Pengunduran Diri	10%	10%	*Resignation Rate*
Tingkat Cacat	1%	1%	*Disability Rate*
Tingkat Mortalitas	Tabel Mortalita Indonesia 2019/ *Indonesian Mortality Table 2019*		*Mortality Rate*

Dasar penetapan tingkat diskonto dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kelangsungan Usaha Perusahaan.
2. Pengembangan terhadap aset program pada Dana Pensiun Pos Indonesia diharapkan berada di atas 10% sebagaimana tingkat bunga aktuaria yang dipergunakan pada Dana Pensiun Pos Indonesia saat ini adalah 10%.
3. Informasi yang diperoleh dari PT Pos Indonesia (Persero) tentang imbal hasil investasi yang telah dilakukan selama ini.

The factors considered in determining the charge in discount rate are as follows:

1. *The Going Concern of the Company*
2. *Development of the assets in the Pension Fund program of Pos Indonesia was expected to be over 10% as an actuarial interest rate on Pension Fund program of Pos Indonesia is 10%.*
3. *Information obtained from PT Pos Indonesia (Persero) about the yield of investments that have been made so far.*

Berikut adalah analisa ekspektasi jatuh tempo dari manfaat pasca kerja tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit are as follow:

	2023	2022	
Dalam 0 dan 2 tahun	515.708.561.999	574.346.037.445	*Within 0 and 2 years*
Antara 2 dan 5 tahun	577.180.093.856	710.830.725.192	*Between 2 and 5 years*
Antara 5 dan 10 tahun	483.451.322.322	594.190.035.955	*Between 5 and 10 years*
Diatas 10 tahun	3.481.285.556.464	4.014.805.627.286	*Above 10 years*

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Liabilitas Imbalan Kerja PT Pos Finansial Indonesia (PFI)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo Liabilitas Imbalan Kerja PFI adalah sebesar Rp944.069.123 dan Rp794.185.226.

Liabilitas Imbalan Kerja PT Pos Properti Indonesia (PPI)

PPI membuat cadangan jangka panjang untuk direksi dan karyawan pengkaryaan yang telah bekerja minimal 6 bulan di PT Pos Properti Indonesia. Tidak terdapat pendanaan sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja. Total liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp849.734.811.

Liabilitas Imbalan Kerja PT Pos Logistik Indonesia (PLI)

Imbalan kerja untuk tahun berjalan dicerminkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta laporan posisi keuangan. Saldo liabilitas imbalan kerja kepada karyawan sesuai PSAK 24 (Revisi 2013) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.242.013.597 dan sebesar Rp1.376.453.406.

Analisis Sensitivitas

Sensitivitas dari nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2023 terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES *(Continued)*

Employee benefits liability of PT Pos Finansial Indonesia (PFI)

On December 31, 2023 and 2022, the balance of PFI'S Post-Employment Benefit Liabilities is Rp944,069,123 and Rp794,185,226.

Employee Benefits Liability of PT Pos Properti Indonesia (PPI)

PPI makes long-term reserves for directors and employees who have worked for at least 6 months at PT Pos Properti Indonesia. There is no funding in relation to employee benefit liabilities. The total employee benefit liabilities as of December 31, 2023 are Rp849,734,811.

Employee Benefits Liability of PT Pos Logistik Indonesia (PLI)

Employee benefits for the current year are reflected in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the statement of financial position. The balance of the employee benefits obligation in accordance with PSAK 24 (Revised 2013) as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp1,242,013,597 and Rp1,376,453,406 respectively.

Sensitivity Analysis

The sensitivity of post-employment benefit as of December 31, 2023 to changes in the actuarial assumptions is as follows:

	2023	2022	
Analisa Sensitivitas Tingkat Diskonto			
Jika Tingkat +1%	1.344.517.768.767	1.368.575.713.914	*If Rate +1%*
Jika Tingkat -1%	1.427.165.035.669	1.481.528.343.955	*If Rate -1%*
Analisa Sensitivitas Kenaikan Gaji			
Jika Tingkat +1%	1.428.772.681.255	1.481.389.542.704	*If Rate +1%*
Jika Tingkat -1%	1.342.291.463.602	1.367.732.755.982	*If Rate -1%*

20. EKUITAS

a. Modal Saham

Berdasarkan Akta Notaris Sutjipto. SH.M.Kn.. No.164 tanggal 15 Agustus 2008, susunan pemilikan saham Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia sebanyak 425.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp425.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari. SH. M.Kn. No. 3 tanggal 3 Januari 2013 para pemegang saham mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 30.023 saham, masing-masing saham dengan nilai Rp1.000.000, sehingga seluruhnya seharga Rp30.023.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.
2. Penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam saham Perusahaan sebesar Rp30.023.000.000 dengan cara sebagai berikut:
   - Sebesar Rp 30.022.899.470 yang berasal dari pengalihan barang milik negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2012.
   - Sebesar Rp100.530 yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perusahaan sampai dengan tahun buku 2011.

20. EQUITY

a. Share Capital

Based on Notarial Deed No.164 of Sutjipto. SH. M.Kn. dated August 15, 2008, the shareholding of the Company is fully owned by the Republic of Indonesia with 425,000 shares or Rp425,000,000,000.

Based on Notarial Deed of Aryanti Artisari. SH. M.Kn. No. 3 dated January 3, 2013, shareholders decided as follows:

1. *Approving expenses/shares placement that is still in deposits consisting of 30,023 shares, with par value of Rp1,000,000, thereby the total amount will be Rp30,023,000,000 which all part taken by the Government of Republic of Indonesia.*
2. *Increase in the Government of Republic of Indonesia capital to the Company, amounted to Rp30,023,000,000 as follows:*
   - *Amounted to Rp30,022,899,470 that originated from the transfer of goods owned by the state as stated in Government Regulation No. 67 year 2012.*
   - *Amounted to Rp100,530 that originated from part of the capitalization of the Company's allowance until book year 2011.*

20. EKUITAS (Lanjutan)

a. Modal Saham (Lanjutan)

3. Peningkatan modal ditempatkan/ disetor Perusahaan yang semula Rp425.000.000.000 menjadi sebesar Rp455.023.000.000.

20. EQUITY *(Continued)*

a. Share Capital *(Continued)*

3. Increase in the Company's paid-up capital from Rp425,000,000,000 to Rp455,023,000,000.

	2023 dan/*and 2022*				
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Share Issued and Fully Paid*	Persentase Pemilikan/ *Percentage of Ownership*	Nominal per Lembar saham *Nominal Share*	Jumlah Modal Disetor/ *Total Paid-up Capital*	
Pemegang Saham					***Shareholders***
Negara Republik Indonesia	455.023	100%	1.000.000	455.023.000.000	*Negara Republik Indonesia*
Jumlah	**455.023**	**100,00%**	**1.000.000**	**455.023.000.000**	***Total***

b. Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor berasal dari program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diikuti oleh entitas anak pada tahun 2016 mengacu pada surat keterangan pengampunan pajak Nomor: KET-22467/PP/WPJ.06/2016 tanggal 2 November 2016 atas setoran pajak tahun 2015 senilai Rp2.344.427.566.

b. Additional Paid-in Capital

Additional paid in capital arise from tax amnesty program that the Subsidiary participated in 2016 referring to the tax amnesty certificate Number: KET-22467/PP/WPJ.06/2016 dated November 2, 2016 for tax payments in 2015 amounting to Rp2,344,427,566.

20. EKUITAS (Lanjutan) / *20. EQUITY (Continued)*

c. Komponen Ekuitas Lainnya / *c. Other Equity Components*

	2023				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Keuntungan/ Herugian Tahun Berjalan *Profit (loss) for The Year*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	(120.026.621.099)	44.894.930.668	65.967.771	(75.065.722.660)	*Remeasurement of Defined Benefit*
Selisih Lebih Revaluasi Aset Properti	3.365.475.909.885	412.370.729.903	--	3.777.846.639.788	*Surplus of Revaluation of Fixed Assets*
Jumlah	**3.245.449.288.786**	**457.265.660.571**	**65.967.771**	**3.702.780.917.128**	***Total***

	2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Keuntungan/ Kerugian Tahun Berjalan *Profit (loss) for The Year*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	151.029.186.186	(271.055.807.285)	--	(120.026.621.099)	*Remeasurement of Defined Benefit*
Selisih Lebih Revaluasi Aset Properti	2.375.368.267.788	990.107.642.097	--	3.365.475.909.885	*Surplus of Revaluation of Fixed Assets*
Jumlah	**2.526.397.453.974**	**719.051.834.812**	**--**	**3.245.449.288.786**	***Total***

d. Kepentingan Non-Pengendali / *d. Non-Controlling Interest*

	2023				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Bagian atas Laba (Rugi) Neto/ *Share in Net Profit (Loss)*	Penghasilan Komprehensif Lain/ *Other Comprehensive Income*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo akhir/ *Ending balance*
PT Pos Finansial Indonesia	(17.938.001.455)	(20.491.252.597)	11.781.505	(7.042.738.893)	(45.460.211.440)
PT Pos Logistik Indonesia	379.793.429	6.791.098	180.130	45.749.490	432.514.147
Jumlah/*Total*	**(17.558.208.026)**	**(20.484.461.499)**	**11.961.635**	**(6.996.989.403)**	**(45.027.697.293)**

	2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Bagian atas laba (rugi) neto/ *Share in net profit (loss)*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo akhir/ *Ending balance*
PT Pos Finansial Indonesia	(4.637.719.753)	(13.304.182.215)	3.900.513	--	(17.938.001.455)
PT Pos Logistik Indonesia	402.635.716	(22.414.850)	(427.437)	--	379.793.429
Jumlah/*Total*	**(4.235.084.037)**	**(13.326.597.065)**	**3.473.076**	**--**	**(17.558.208.026)**

20. EKUITAS (Lanjutan) / *20. EQUITY (Continued)*

e. Laba per Saham Dasar / *e. Earnings Per Share*

Perhitungan laba per saham dasar berdasarkan pada informasi berikut:

The basic earnings per share is based on the following:

	2023	2022	
Laba yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	748.699.105.099	650.369.436.698	*Profit Attributtable to Owners of the Company*
Rata-rata Tertimbang Saham Biasa untuk Perhitungan Laba Per Saham Dasar	455.023	455.023	*Weighted Average Number of Ordinary Shares for Computation of Basic Earning Per Share*
Laba Per Saham	**1.645.409,36**	**1.429.311,13**	***Earnings Per Share***

21. PENDAPATAN / *21. REVENUES*

Rincian pendapatan sebagai berikut:

The details of revenues are as follows:

	2023	2022	
Logistik	2.176.037.721.479	491.798.145.319	*Logistics*
Paket Pos	1.456.773.750.070	1.333.750.006.520	*Parcels*
Jasa Keuangan	1.256.664.342.262	2.145.339.877.301	*Financial Services*
Surat Pos	437.098.907.316	468.612.104.846	*Postal Main*
Properti	152.546.415.548	178.890.753.614	*Properties*
Jumlah	**5.479.121.136.675**	**4.618.390.887.600**	***Total***

Kenaikan pendapatan logistik dikarenakan adanya penyaluran bantuan logistik pemerintah yang bekerjasama dengan Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia.

The increase in logistics revenue was due to the distribution of government logistics assistance in collaboration with Perum Bulog and PT Rajawali Nusantara Indonesia.

Penurunan pendapatan jasa keuangan dikarenakan jumlah program penyaluran bantuan sosial pada tahun 2023 lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2022.

The decrease in financial services revenue is due to the number of social assistance distribution programs in 2023 is less when compared to 2022.

22. BEBAN POKOK PELAYANAN / *22. COST OF SERVICES*

Rincian beban pokok layanan berdasarkan jenis layanan sebagai berikut:

The details of cost of services based on type of services are as follows:

	2023	2022	
Logistik	1.335.772.630.029	437.539.587.422	*Logistics*
Jasa Keuangan	1.050.441.914.990	1.056.306.409.374	*Financial Services*
Paket Pos	1.035.197.356.677	1.179.497.101.684	*Parcels*
Surat Pos	425.907.312.173	507.325.508.047	*Postal Main*
Properti	32.421.498.083	73.585.225.402	*Properties*
Jumlah	**3.879.740.711.952**	**3.254.253.831.929**	***Total***

Rincian beban pokok layanan berdasarkan jenis biaya sebagai berikut:

The details of cost of services based on type of expenses are as follows:

	2023	2022	
Pegawai	1.785.135.699.779	1.710.091.422.139	*Employees*
Operasi	1.781.439.099.526	1.258.570.642.069	*Operations*
Administrasi	181.494.029.551	155.790.157.913	*Administration*
Penyusutan (Catatan 10)	84.550.779.372	90.932.387.344	*Depreciations (Note 10)*
Umum	31.734.901.739	25.374.841.100	*General*
Amortisasi (Catatan 12)	15.386.201.985	13.494.381.364	*Amortizations (Note 12)*
Jumlah	**3.879.740.711.952**	**3.254.253.831.929**	***Total***

23. BEBAN USAHA / *23. OPERATING EXPENSES*

	2023	2022	
Beban Pemasaran			***Marketing Expenses***
Surat Pos dan Paket Pos	32.948.917.992	22.330.358.903	*Postal Mails and Parcels*
Jasa Keuangan	20.852.622.808	39.618.346.059	*Financial Services*
Logistik	11.588.025.107	1.401.365.425	*Logistics*
Properti	3.061.803.960	2.831.078.404	*Properties*
Ritel	1.567.100.992	1.527.318.307	*Retails*
Filateli	241.974.213	254.966.368	*Philately*
Sub jumlah	**70.260.445.072**	**67.963.433.466**	***Subtotal***
Beban Umum dan Administrasi			***General and Administration Expenses***
Pegawai	598.953.600.639	620.298.137.121	*Employees*
Operasi	132.339.444.242	112.613.282.304	*Operations*
Umum	125.676.697.998	102.738.599.044	*General*
Penyusutan (Catatan 10)	34.341.721.684	48.924.702.429	*Depreciations (Note 10)*
Administrasi	13.422.545.695	15.600.498.081	*Administration*
Amortisasi (Catatan 12)	6.909.312.044	6.806.692.792	*Amortizations (Note 12)*
Sub Jumlah	**911.643.322.302**	**906.981.911.771**	***Sub Total***
Jumlah	**981.903.767.374**	**974.945.345.237**	***Total***

24. PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA / *24. OTHER INCOME (EXPENSES)*

	2023	2022	
Pendapatan Lainnya			***Other Income***
Pendapatan Donasi LPU	366.120.584.914	329.930.974.408	*UPS Donation Income*
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi (Catatan 11)	168.004.840.966	262.736.356.147	*Increase in Fair Value of Investment Property (Note 11)*
Pendapatan Pemulihan Kerugian Perusahaan	59.177.796.699	111.582.128.615	*Income from Recovery Losses*
Pendapatan Pelepasan Aset Tetap	12.283.680.595	1.538.036.353	*Gain on Fixed Asset Disposal*
Pendapatan QSF–Penyelenggaraan Pos	923.349.130	13.655.433.088	*QSF Revenue – Postal Maintenance*
Lainnya	22.217.834.505	7.133.570.846	*Others*
Sub Jumlah	**628.728.086.809**	**726.576.499.457**	***Sub Total***
Beban Lainnya			***Other Expenses***
Purna Bakti	(175.697.661.278)	(245.169.916.960)	*Pension Cost*
Beban yang Tidak Didistribusikan	(122.190.027.210)	(69.394.924.478)	*Undistributed Cost*
Denda Pajak	(27.935.892.177)	(26.815.634.627)	*Penalty Tax*
Kerugian Aset Tetap	(352.656.105)	(816.559.298)	*Loss of Fixed Assets*
Sumbangan Bencana Alam	(49.540.050)	(175.377.748)	*Natural Disaster Donations*
Sub Jumlah	**(326.225.776.820)**	**(342.372.413.111)**	***Sub Total***
Jumlah	**302.502.309.989**	**384.204.086.346**	***Total***

Beban lainnya dengan kategori purna bakti adalah beban - beban yang dikeluarkan Grup untuk pembayaran pensiunan eks karyawan Grup seperti bantuan kesehatan, bantuan pangan dan perbaikan gizi.

Other expenses in the after-service category are the burdens issued by the Group for the payment of retired ex-employees of the Group such as health assistance, food assistance and nutritional improvements.

Beban yang tidak distribusikan merupakan kelompok beban lainnya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi seperti beban kesekretariatan, kegiatan hukum, lainnya.

Undistributed expenses represent other costs that are not directly related to production activities such as the secretarial cost, legal activity, and others.

25. PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN / *25. FINANCE INCOME (COST)*

	2023	2022	
Pendapatan Keuangan			***Finance Income***
Pendapatan Selisih Kurs	30.322.878.977	51.482.514.677	*Foreign Exchange Difference Income*
Pendapatan Jasa Giro	10.004.759.893	5.732.912.308	*Current Account Service Income*
Pendapatan Penempatan Dana di Bank	3.233.763.485	1.622.797.743	*Fund Placement Income in Bank*
Sub Jumlah	**43.561.402.355**	**58.838.224.728**	***Sub Total***
Beban Lain-lain			***Finance Expenses***
Bunga Pinjaman	(170.439.111.903)	(131.011.105.150)	*Loan Interest*
Beban Kupon MTN	(92.025.000.000)	(61.039.865.872)	*MTN Coupon Interest*
Beban Pendanaan	(14.254.784.262)	(6.156.720.473)	*Funds Expense*
Pengelolaan *Treasury*	(6.429.191.554)	(10.542.896.233)	*Treasury Management*
Selisih Kurs atas Transaksi Valas	26.687.614.147	(1.976.112.078)	*Exchange Difference on Forex*
Beban Administrasi Bank	(5.188.393.337)	(2.788.932.652)	*Bank Administration*
Sub Jumlah	**(261.648.866.909)**	**(213.515.632.458)**	***Sub Total***
Jumlah	**(218.087.464.554)**	**(154.677.407.730)**	***Total***

26. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI / *26. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Grup, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

The following table is a summary of related parties who have transactions with the Group, and includes the nature of the relationship and transaction:

No	Pihak Berelasi/*Related Parties*	Sifat Hubungan/*Nature of Relationship*	Transaksi/*Transaction*
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Penempatan dana di rekening bank fasilitas pinjaman dari bank, dan piutang usaha/ *Account bank, loans bank facility, and trade receivables*
2.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Penempatan dana di rekening bank, piutang usaha dan utang usaha/ *Account bank, trade receivables and trade payables*
3.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Penempatan dana di rekening bank dan piutang usaha/ *Account bank and trade receivables*

26. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan)

26. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(Continued)*

No	Pihak Berelasi/*Related Parties*	Sifat Hubungan/*Nature of Relationship*	Transaksi/*Transaction*
4.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Penempatan dana di rekening bank fasilitas pinjaman dari bank, dan piutang usaha/ *Account bank, loans bank facility, and trade receivables*
5.	PT Bank Mandiri Taspen	Sepengendalian / *Under Common Control*	Penempatan dana di rekening bank dan piutang usaha/ *Account bank and trade receivables*
6.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Penempatan dana di rekening bank *Account bank*
7.	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha/ *Trade receivables*
8.	Perum Bulog	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha/ *Trade receivables*
9.	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha dan utang usaha/ *Trade receivables and trade payables*
10.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha dan utang usaha/ *Trade receivables and trade payables*
11.	PT Pertamina (Persero)	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha/ *Trade receivables*
12.	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha/ *Trade receivables*
13.	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha dan utang usaha/ *Trade receivables and trade payables*
14.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha/ *Trade receivables*
15.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha/ *Trade receivables*
16.	PT Asabri (Persero)	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha dan utang usaha/ *Trade receivables and trade payables*
17.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha/ *Trade receivables*

26. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan)

26. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

Rincian akun dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of transactions with related parties are as follows:

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	2022	2023	2022	
Bank (Catatan 5)					***Bank (Note 5)***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	525.044.625.494	690.421.666.492	3,84%	29,99%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	45.028.912.392	149.312.884.267	0,33%	6,49%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36.259.405.362	85.326.074.144	0,27%	3,71%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	23.196.151.363	19.689.808.610	0,17%	0,86%	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	8.437.571.702	92.884.451.081	0,06%	2,72%	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen	1.296.789.387	1.303.342.143	0,01%	0,06%	*PT Bank Mandiri Taspen*
Jumlah	**639.263.455.700**	**1.038.938.226.737**	**4,68%**	**43,83%**	***Total***

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	2022	2023	2022	
Bank (Catatan 5)					***Bank (Note 5)***
Dolar AS					*US Dollar*
Jepang Yen					*Japan Yen*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	121.333.526.650	--	0,89%	1,44%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.488.127.760	29.875.174.949	0,06%	1,12%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	279.646	1.686.984	0,00%	0,00%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Euro Eropa					*Europe Euro*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.516.858.623	55.870.901.851	0,03%	1,44%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
GBP Inggris					*England GBP*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	563.785.928	540.686.481	0,00%	0,03%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Dolar Singapura					*Singapore Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	659.971.175	656.395.361	0,00%	0,03%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
CHF Swiss					*Swiss CHF*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.134.429.150	982.681.559	0,01%	0,00%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah	**135.696.978.932**	**87.927.527.185**	**0,11%**	**2,62%**	***Total***

26. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan) / *26. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)*

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	2022	2023	2022	
Deposito Berjangka (Catatan 5)					***Time Deposits (Note 5)***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	49.500.000.000	48.500.000.000	0,36%	2,11%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	35.000.000.000	22.000.000.000	0,26%	0,96%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	18.000.000.000	12.500.000.000	0,13%	0,41%	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5.500.000.000	--	0,04%	0,13%	*PT Bank Tabungan Negara*
Jumlah	**108.000.000.000**	**83.000.000.000**	**0,79%**	**3,61%**	***Total***

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	2022	2023	2022	
Piutang Usaha					***Account Receivables***
Rupiah					*Rupiah*
PT Rajawali Nusantara					*PT Rajawali Nusantara*
Indonesia (Persero)	80.600.509.544	--	0,59%	0,00%	*Indonesia (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero)	28.508.588.771	6.314.473.836	0,21%	0,06%	*PT Semen Indonesia (Persero)*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	22.950.013.958	--	0,17%	0,00%	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Pertamina (Persero)	17.988.761.623	12.768.984.755	0,13%	0,11%	*PT Pertamina (Persero)*
PT Telekomunikasi					*PT Telekomunikasi*
Indonesia (Persero) Tbk	8.574.023.685	13.507.717.178	0,06%	0,12%	*Indonesia (Persero) Tbk*
PT Waskita (Persero), Tbk	3.881.429.110	3.953.370.000	0,03%	0,04%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.761.925.603	1.050.240.801	0,01%	0,01%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Pupuk Indonesia (Persero)	1.018.374.506	73.267.000	0,01%	0,00%	*PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)*
Jumlah	**165.283.626.800**	**37.668.053.570**	**1,21%**	**0,34%**	***Total***

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	2022	2023	2022	
Pendapatan Diterima di Muka					***Accrued Revenues***
Rupiah					*Rupiah*
Perum Bulog	286.236.015.716	--	2,10%	0,00%	*Perum Bulog*
PT Rajawali Nusantara Indonesia	103.629.226.557	--	0,76%	0,00%	*PT Rajawali Nusantara Indonesia*
Jumlah	**389.865.242.273**	**--**	**2,85%**	**0,00%**	***Total***

26. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan) / *26. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)*

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	**2022**	**2023**	**2022**	
Aset Lancar Lainnya					***Other Current Assets***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk	234.806.998.514	53.047.975.929	1,72%	0,48%	*PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	76.383.325.096	2.344.445.494	0,56%	0,02%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	9.349.738.942	9.349.738.942	0,07%	0,08%	*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.700.582.143	--	0,01%	0,00%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Tabungan Indonesia (Persero) Tbk	15.257.262	15.257.262	0,00%	0,00%	*PT Bank Negara Tabungan Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah	**322.255.901.957**	**64.757.417.627**	**2,36%**	**0,58%**	***Total***

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	**2022**	**2023**	**2022**	
Utang Usaha					***Trade Payables***
Rupiah					*Rupiah*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3.853.866.404	5.204.192.609	0,07%	0,12%	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah	**3.853.866.404**	**5.204.192.609**	**0,07%**	**0,12%**	***Total***

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	**2022**	**2023**	**2022**	
Utang Lainnya					***Other Payables***
Rupiah					*Rupiah*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7.062.205.000	2.421.149.552	0,13%	0,06%	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk	4.591.394.607	--	0,08%	0,00%	*PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk*
Jumlah	**11.653.599.607**	**2.421.149.552**	**0,21%**	**0,06%**	***Total***

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	**2022**	**2023**	**2022**	
Pinjaman Bank (Catatan 17)					***Bank Loans (Note 17)***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	370.604.000.000	--	6,71%	0,00%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk	300.000.000.000	150.000.000.000	5,43%	3,58%	*PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah	**670.604.000.000**	**150.000.000.000**	**12,14%**	**3,58%**	***Total***

26. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan)

Jumlah imbalan (penghasilan) berupa gaji, honorarium dan tunjangan dibayarkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp26.947.964.975 dan Rp16.713.310.728 sampai dengan 31 Desember 2023 dan Rp14.501.959.996 dan Rp8.098.293.290 periode yang sama tahun 2022.

26. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

The amount of compensation (income) in the form of salary, honorarium and allowances paid to the Board of Directors and Board of Commissioners is Rp26,947,964,975 and Rp16,713,310,728 until December 31, 2023 and Rp14,501,959,996 and Rp8,098,293,290 for the same period in 2022.

27. PERJANJIAN PENTING

Grup mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Group has the following significant agreements are as follows:

Mitra/ *Partners*	Nomor Perjanjian/ *Agreements Number*	Perjanjian/ *Agreements*	Jangka Waktu/*Terms* Awal/*Start*	Jangka Waktu/*Terms* Akhir/*End*
PT Lion Express	PKS.296/DIR-3/1222 06/LE-PKS/SLS/I/2022	Pendistribusian Kirimanpos Udara Dalam Negeri/ *Domestic Air Mail Distribution*	30 Desember/ *December* 2022	29 Desember/ *December* 2024
PT Stefany Jaya Sentosa (Agen dari Asiana Air)	PKS 117/DIR-3/0523	Perjanjian Kerja Sama Layanan Pengangkutan Kirimanpos Internasional/ *Cooperation Agreement on the Transportation Service of International Mail*	26 Mei/ May 2023	25 Mei/ *May* 2025
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial	1/3.4/HK.01/2/2023 PKS037/DIR-4/0223	Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2023/ *Distribution of Social Assistance for the Family Hope Program for the Year 2023*	22 Februari/ *February* 2023	31 Desember/ *December* 2023
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial	01/5.4/PKS/HK.01/02/2023 PKS036/DIR-4/0223	Penyaluran Program Sembako Tahun 2023/ *Distribution of Basic Food Program for the Year 2023*	22 Februari/ *February* 2023	31 Desember/ *December* 2023
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	1015/SVP-Financial Service/0423 481/IV/2023	Pekerjaan Pengadaan Jasa Percetakan Prangko dan Benda Filateli Tahun 2023/ *Procurement of Stamp and Philatelic Items Printing Services for the Year 2023*	1 Januari/ *January* 2023	31 Desember/ *December* 2023
Perusahaam Umum (Perum) Bulog	PJ-196/DP303/PG.04/03/2023 PKS073/DIRUT/0323	Perjanjian Jasa Angkutan Pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2023/*Transportation Services Agreement for the Distribution of Government Rice Reserve Food Assistance in 2023*	31 Mei/ *May* 2023	30 Juni/ *June* 2023
Perusahaam Umum (Perum) Bulog	PJ-540/DP303/PG.04/09/2023 PKS224/DIRUT/092023	Perjanjian Jasa Angkutan Pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2023/ *Agreement for Transportation Services in the Distribution of Government Rice Reserve Food Aid for the Year 2023*	6 September/ *September* 2023	30 November/ *November* 2023

27. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) / *SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)*

Grup mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut: (Lanjutan)

The Group has the following significant agreements are as follows:

Mitra/ *Partners*	Nomor Perjanjian/ *Agreements Number*	Perjanjian/ *Agreements*	Jangka Waktu/*Terms*	
			Awal/*Start*	Akhir/*End*
Perusahaam Umum (Perum) Bulog	PJ-730/DP303/PG.04/11/2023 PKS310/DIRUT/1123	Perjanjian Jasa Angkutan Pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2023/ *Agreement for Transportation Services in the Distribution of Government Rice Reserve Food Aid for the Year 2023*	22 November/ *November* 2023	31 Desember/ *Desember* 2023
PT Taspen (Persero)	JAN-37/DIR/2022 PKS.027/DIRUT/0222	Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening/ *Payment of Pension Time Savings, Pension, Work Accident Benefit and Death Benefit through an account*	22 Februari/ *February 2022*	21 Februari/ *February 2024*
PT Asabri (Persero)	SPKS/HK.02/58-AS/IV/2021 PKS.078/DIRUT/0421	Pembayaran Manfaat Asuransi Sosial dan Penerima Fasilitas Kredit Kepada Peserta Asabri/ *Payment of Social Insurance Benefits and Credit Facility Recipients to Asabri Participants*	9 April/ *April* 2022	8 April/ *April 2023*
Direktorat Jendral Pajak (DJP)	PRIN-86/2023/PJ.0134/PPK/MTR/2022	Pekerjaan Distribusi dan Penjualan Meterai Tempel Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2023/ *Duties of Distribution and Sales of Stamp Stamps of the Directorate General of Taxes 2023 Fiscal Year*	30 Desember/ *December* 2022	Sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban/ *Until the completion of work and the fulfillment of rights and obligations*
Direktorat Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika	Dalam proses penandatangan	Subsidi Operasional Penyelenggaraan Layanan Pos Universal/ *Operational Subsidies for the Implementation of Universal Postal Services*	1 Januari/ *January 2023*	31 Desember/ *December 2023*

27. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Grup mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut: (Lanjutan)

27. *SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)*

The Group has the following significant agreements are as follows:

Mitra/ *Partners*	Nomor Perjanjian/ *Agreements Number*	Perjanjian/ *Agreements*	Jangka Waktu/*Terms* Awal/*Start*	Jangka Waktu/*Terms* Akhir/*End*
PT Global Loyal Sejahtera	SPK Nomor : /MPM & AM/0822 & PKS : 429/GLS/TS/IX /2022	Penyedia Jasa Brand Ambassador PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2022/ *Provide Brand Ambassador Service PT Pos Indonesia (Persero) In 2022*	31 Agustus/ *August* 2022	1 Agustus/ August 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	PKS 238/SVP Finance Operation/1222 dan WHS/052/01122022	Layanan *Cash Management* / Cash Management Services	1 Januari/ *January* 2023	31 Desember/ *December 2024*
Emudhra Pte Limited	45/DIR-POSFIN/PKS/2019	Pemasangan Fasilitas *Certifying Authority* dan Kegiatan Lain yang Terkait/ *Installation of Certifying Authority Facilities and Other Related Activities*	03 Desember/ *December 2019*	02 Desember/ *December 2024*
PT Nusantara Comnet	001/BKU-BWN/PKS/XI/2018 034/DIR-BWN/PKS/2018	Pekerjaan Pengadaan Perangkat Lunak untuk Layanan *Visa Center* / *Procurement of Software for Visa Center Services.*	06 November/ *November 2018*	05 November/ *November 2023*
PT Asuransi Tri Pakarta	PKS 292/DIR-1/1222 dan 082/PKS/DIR/2022	Jasa Asuransi Gedung dan Barang Inventaris Serta Asuransi Kas Tahun 2023/ *Building And Inventory Insurance Services And Cash Insurance For 2023*	31 Desember/ *December 2022*	31 Desember/ *December 2023*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	01/S.Pj-UP/RNI.01/IV/2023	Pengadaan Jasa Transporter untuk Distribusi Bantuan Pangan Program Stunting Pemerintah 2023/ *Procurement of Transporter Services for the Distribution of Government Stunting Food Aid Program 2023*	17 April/ *April* 2023	16 Juli/ *July* 2023
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	09/S.Pj-UP/RNI.01/X/2023 PKS251/DIRUT/1023	Pengadaan Jasa Transporter untuk Distribusi Bantuan Pangan Program Stunting Pemerintah 2023/ *Procurement of Transporter Services for the Distribution of Government Stunting Food Aid Program 2023*	9 Oktober/ *October* 2023	31 Desember/ *December* 2023
PT Eka Jaya Agung	54	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemanfaatan Tanah Milik PT. Pos Indonesia (Persero) di Jalan Teuku Umar Denpasar/ *Cooperation Agreement Regarding the Utilization of Land Owned by PT. Pos Indonesia (Persero) on Teuku Umar Street, Denpasar*	23 Agustus/ *August* 2004	Sampai dengan berakhirnya masa laku/ *Until the expiration of the validity period*

27. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Grup mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut: (Lanjutan)

27. *SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)*

The Group has the following significant agreements are as follows:

Mitra/ *Partners*	Nomor Perjanjian/ *Agreements Number*	Perjanjian/ *Agreements*	Jangka Waktu/*Terms*	
			Awal/*Start*	Akhir/*End*
Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Papua	01/SP-OAB/II/2023	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Kegiatan Ongkos Beras Pegawai Negeri Sipil (PNS) Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat Tahun 2023/ Work Package for Procurement of Other Services for Rice Cost Activities for Civil Servants (PNS) in the Inland Districts of West Papua Province in 2023	24 Februari/ *February* 2023	Sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban/ *Until the completion of work and the fulfillment of rights and obligations*
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua	KONTR-01/OAB/WPB.34/2023	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Distribusi (Pemindahan dan Pengiriman) Beras Pegawai Negeri Sipil (PNS) Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun 2023/ *Package of Procurement of Other Service Works for Civil Servants (PNS) Rice Allowance Activities in the Remote Districts of West Papua Province in 2023*	4 April/ *April* 2023	Sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban/ *Until the completion of work and the fulfillment of rights and obligations*
PT Arkan Global Utama	211/Penj/Korp/1023 001/ARKAN-POS/PKSCBP-BAPANG/IX/2023	Perjanjian Kerjasama Tentang Proses Mid Miles Penyediaan Jasa Angkutan Pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Perum Bulog Tahap II Jawa Timur Tahun 2023/ *Cooperation Agreement on Mid-Miles Process for Providing Transportation Services for the Distribution of Government Rice Reserve Food Aid by Perum Bulog Phase II East Java 2023*	11 September/ *September 2023*	31 Desember/ *December* 2023
PT Yasa Artha Trimanunggal	212/Penj/Korp/1023 002/PKS/YASA-POS/CBP-BAPANG/IX/2023	Perjanjian Kerjasama Tentang Proses Last Miles Penyaluran Bantuan Bapang CBP (Cadangan Beras Pemerintah) Perum Bulog Tahap II Jawa Timur Tahun 2023/ *Cooperation Agreement on the Last-Mile Process for the Distribution of Government Rice Reserve Aid (CBP) by Perum Bulog Phase II East Java 2023*	8 September/ *September 2023*	30 November/ *November 2023*

27. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Grup mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut: (Lanjutan)

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

The Group has the following significant agreements are as follows: (Continued)

Mitra/ *Partners*	Nomor Perjanjian/ *Agreements Number*	Perjanjian/ *Agreements*	Jangka Waktu/*Terms* Awal/*Start*	Jangka Waktu/*Terms* Akhir/*End*
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial	1119/4.4/BS.01.00/7/2023 PKS161/DIR-4/0723	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyaluran Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2023/ *Cooperation Agreement on the Distribution of Food Assistance for Persons with Disabilities for the Year 2023*	5 Juli/ *July 2023*	31 Desember/ *December 2023*
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial	94/4/HK.01/7/2023 PKS160/DIR-4/0723	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyaluran Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Tahun 2023/ *Cooperation Agreement on the Distribution of Food Assistance for Elderly Single-Family Household for the Year 2023*	5 Juli/ *July 2023*	31 Desember/ *December 2023*
Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Kementerian Sosial	01/5.2/PKS/HK.01/8/2023 PKS216/DIR-4/0823	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Program Pahlawan Ekonomi Nusantara Tahun 2023/ *Cooperation Agreement on the Distribution of Social Assistance for the National Economic Heroes Program for the Year 2023*	29 Agustus/ *August 2023*	31 Desember/ *December* 2023
PT Bank Central Asia Tbk	PKS251/DIR-4/1021	Perjanjian Kerjasama Tentang Pemanfaatan Layanan Weselpos Instan/ *Cooperation Agreement on the Utilization of Instant Postal Money Order Services*	26 Oktober/ *October* 2021	25 Oktober/ *October* 2023

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajemen risiko keuangan Grup bersifat dinamis dengan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, dan mengembangkan alternatif penanganan risiko atas portofolio instrumen keuangan. Dalam pelaksanaan manajemen risiko keuangan, Grup mengidentifikasikan risiko-risiko yang dihadapi terkait dengan instrumen keuangan, yaitu risiko pasar (tingkat suku bunga dan nilai tukar), risiko likuiditas, dan risiko kredit. Masing-masing risiko tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group's financial risk management is dynamic with the purpose to identify, measure, map, and developed alternatives for portfolio risk management of financial instruments. In the implementation of financial risk management, the Group identify the risks faced relating to financial instruments, namely market risk (interest rate and exchange rate), liquidity risk, and credit risk, each of these risks can be explained as follows:

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) / *28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)*

a. Risiko Kredit / *a. Credit Risk*

Risiko kredit dalam piutang adalah ketidakpastian pelanggan pos untuk dapat membayar utangnya sesuai dengan PKS yang ditetapkan. Risiko ini teridentifikasi dari status debitur (pelanggan) dalam posisi bangkrut. Kesulitan likuiditas (permintaan penjadwalan ulang pembayaran) dan tidak dikenal alamat terakhir.

Credit risk in receivables is due to the uncertainty of postal customers to pay their amounts due in accordance with the agreement. These risks are identified from the status of the customer in a position of bankruptcy. Difficulty in liquidity (request for rescheduling of payment), and no last known address.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit mendekati nilai tercatat bersih dari aset keuangan dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, the maximum Group exposure of the credit risk approximates the net carrying amounts of the outstanding financial assets with details as follows:

	2023	2022	
Kas dan Setara kas	2.653.918.421.743	2.301.803.310.923	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	385.402.397.127	323.084.646.578	*Trade Receivables*
Piutang Layanan Jasa Keuangan	880.739.688.637	407.714.729.112	*Receivable from Financial Services*
Aset Lancar Lainnya	477.506.326.678	285.355.865.077	*Other Current Assets*
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	930.909.600.985	253.959.319.110	*Accrued Revenues*
Piutang Kerugian termasuk dalam Aset Tidak Lancar Lainnya	13.811.808.767	19.105.518.144	*Receivable Losses include in Other Non-Current Assets*
Jumlah	**5.342.288.243.937**	**3.591.023.388.944**	***Total***

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan sesuai dengan peringkat kredit debitur yang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The following table provides the credit quality and age analysis of financial assets according to credit ratings of debtors as of December 31, 2023 and 2022:

	2023				
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Ada Penurunan Nilai/ *Neither Past Due Nor Impaired*	Jatuh Tempo Tetapi Tidak Ada Penurunan/ *Past Due But Not Impaired* <1 Tahun/*Year*	Telah Jatuh Tempo Dan Ada Penurunan/ *Past Due And Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan Setara kas	2.653.918.421.743	--	--	2.653.918.421.743	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	--	--	385.402.397.127	385.402.397.127	*Trade Receivables*
Piutang Layanan Jasa Keuangan	880.739.688.637	--	--	880.739.688.637	*Receivable from Financial Services*
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	930.909.600.985	--	--	930.909.600.985	*Accrued Revenues*
Aset Lancar Lainnya	--	--	477.506.326.678	477.506.326.678	*Other Current Assets*
Piutang Kerugian termasuk dalam Aset Tidak Lancar Lainnya	--	--	13.811.808.767	13.811.808.767	*Receivable Losses include in Other Non-current Assets*
Jumlah	**4.465.567.711.365**	**--**	**876.720.532.572**	**5.342.288.243.937**	***Total***

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) / *28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)*

a. Risiko Kredit (Lanjutan) / *a. Credit Risk (Continued)*

	2022				
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Ada Penurunan Nilai/ *Neither Past Due Nor Impaired*	Jatuh Tempo Tetapi Tidak Ada Penurunan/ *Past Due But Not Impaired* <1 Tahun/*Year*	Telah Jatuh Tempo Dan Ada Penurunan/ *Past Due And Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan Setara kas	2.301.803.310.923	--	--	2.301.803.310.923	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	233.946.404.119	89.138.242.459	--	323.084.646.578	*Trade Receivables*
Aset Lancar Lainnya	407.714.729.112	--	--	407.714.729.112	*Other Current Assets*
Jumlah	**2.943.464.444.154**	**89.138.242.459**	**--**	**3.032.602.686.613**	***Total***

Kualitas kredit instrumen keuangan dikelola oleh Grup menggunakan peringkat kredit internal. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai "tidak jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai" termasuk instrumen dengan kualitas kredit yang tinggi karena hanya terdapat sedikit atau tidak terdapat riwayat gagal bayar atas persyaratan yang dijaminkan berdasarkan surat kuasa, surat jaminan atau *promissory note*.

"Past due but not impaired" adalah barang-barang dengan sejarah default sering namun jumlahnya karena masih tertagih. Terakhir, *"past due and impaired"* adalah mereka yang lama beredar dan telah dilengkapi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang.

Manajemen yakin akan kemampuan Perusahaan dan Entitas Anak untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimum dengan membentuk penyisihan penurunan nilai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang berdasarkan data historis kerugian yang ada (Catatan 6).

The credit quality of financial instruments is managed by the Group using internal credit ratings. Financial instruments classified as "neither past due nor impaired" includes high grade credit quality instruments because there was few or no history of default on the agreed terms based on the letter of authorization, letter of guarantee or promissory note.

"Past due but not impaired" are items with history of frequent default nevertheless the amount due are still collectible. Lastly, "past due and impaired" are those that are long outstanding and has been provided with allowance for impairment loss on receivables.

Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure of credit risk to the Company and Subsidiaries with set sufficient allowance for impairment losses to cover incurred losses arising from uncollectible receivables based on historical loss (Note 6).

b. Risiko Pasar / *b. Market Risk*

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market price. The Group are exposed to market risks, particularly interest rate risk and foreign currency exchange risk.

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (Lanjutan)

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Grup menghadapi risiko pasar, risiko pertukaran mata uang asing tertentu.

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar Rupiah sebagai mata uang pelaporan terhadap mata uang asing, terutama USD, EUR, GBP, SGD dan CHF.

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar berasal dari selisih nilai tukar antara Rupiah dan US Dolar.

Bagian signifikan dari risiko nilai tukar mata uang asing merupakan kontribusi secara tunai dalam mata uang USD, EUR, GBP, SGD dan CHF pada kas di bank.

Grup memantau fluktuasi nilai tukar asing dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan paling diuntungkan kepada Grup pada waktunya. Manajemen saat ini tidak mempertimbangkan kebutuhan untuk masuk ke dalam setiap mata uang *forward/swaps.*

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(Continued)*

b. Market Risk *(Continued)*

Foreign Exchange Risk

The Group are exposed to market risks, in particular foreign currency exchange risk.

Foreign currency exchange risk is the risk that arises from the changes of exchange rate of Rupiah as the reporting currency against foreign currencies, especially USD, EUR, GBP, SGD and CHF currencies.

Foreign currency exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group exposure to exchange rate fluctuation comes from the exchange rate difference between Rupiah and US Dollar.

The significant portion of the foreign currency exchange risk is contributed by USD, EUR, GBP, SGD and CHF denominated cash in banks.

The Group monitors the foreign exchange rate fluctuation and market expectation so it can take necessary actions benefited most to the Group in due time. The Management currently does not consider the necessity to enter into any currency forward/swaps.

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (Lanjutan)

Risiko nilai tukar adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena fluktuasi nilai tukar. Risiko nilai tukar berdampak langsung pada penerimaan atau kewajiban karena Grup melakukan transaksi dengan menggunakan valuta asing. Risiko ini sangat jelas tergambar atas transaksi pos internasional baik untuk jasa pos internasional ataupun dalam bidang administrasi pos (UPU). Berbagai kurs valuta asing digunakan terkait dengan *counterpart* negara masing-masing.

Namun pada umumnya risiko nilai tukar dimulai pada saat mengakui transaksi pos internasional yang dimulai dengan kurs SDR. Penempatan dana pada portofolio valas, diyakini mampu untuk memitigasi risiko nilai tukar tersebut.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dengan pendapatan sebelum pajak yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(Continued)*

b. Market Risk *(Continued)*

Exchange rate risk is the potential deviation from expected results due to exchange rate fluctuations. Exchange rate risk has a direct impact on revenues or liabilities because the Group use transactions using foreign currency. This risk is clearly illustrated by the transaction to postal international either for the international postal services or in the field of postal administrations (UPU). A variety of foreign exchange rates are used in connection with their respective state counterparts.

But in general, exchange rate risk begins at recognition of international postal transactions that began with the SDR exchange rate. Placement of funds in foreign currency portfolio that is believed to be able to mitigate the exchange rate risks.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the Rupiah exchange rate against foreign currency, with all other variables held constant, to the Company and Subsidiaries income before tax for the period ended December 31, 2023 and 2022:

		Kenaikan (Penurunan) Mata Uang Asing/ *Increase (Decrease) Foreign Currencies*	Pengaruh pada Laba *Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax*	
31 Desember 2023	USD	0,0119%	83.311.205	*December 31, 2023*
		-0,0119%	(83.311.205)	
	EUR	0,0552%	387.136.609	
		-0,0552%	(387.136.609)	
	SGD	0,2102%	1.475.179.950	
		-0,2102%	(1.475.179.950)	
	GBP	0,8622%	6.051.744.102	
		-0,8622%	(6.051.744.102)	
	CHF Swiss	0,1312%	921.095.908	
		-0,1312%	(921.095.908)	
	JPY	0,0471%	330.930.151	
		-0,0471%	(330.930.151)	

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) / *28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)*

b. Risiko Pasar (Lanjutan) / *b. Market Risk (Continued)*

		Kenaikan (Penurunan) Mata Uang Asing/ *Increase (Decrease) Foreign Currencies*	Pengaruh pada Laba *Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax*	
31 Desember 2022	USD	3,5090%	4.753.223.550	*December 31, 2022*
		-3,5090%	(4.753.223.550)	
	EUR	3,0913%	1.727.112.011	
		-3,0913%	(1.727.112.011)	
	SGD	2,7303%	17.921.682	
		-2,7303%	(17.921.682)	
	GBP	3,6533%	19.753.104	
		-3,6533%	(19.753.104)	
	CHF	3,3109%	32.535.149	
		-3,3109%	(32.535.149)	

c. Risiko Likuiditas / *c. Liquidity Risk*

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Tabel dibawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Liquidity risk is the risk that the Group are unable to meet its obligations when they fall due. The management evaluates and monitors cash-in flows and cash-out flows to ensure the availability of funds to settle the due obligation. The tables below summarize the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments at December 31, 2023 and 2022:

	2023			
	Dibawah 1 tahun/ *Below 1 year*	*Past due but* Lebih dari 1 tahun *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas Keuangan				***Financial Liabilities***
Utang Usaha	474.354.916.682	--	474.354.916.682	*Trade Payable*
Utang Lainnya	753.828.360.808	--	753.828.360.808	*Other Payables*
MTN dan Obligasi	323.361.458.333	495.100.000.000	818.461.458.333	*MTN & Bond*
Pinjaman Bank	2.285.604.000.000	--	2.285.604.000.000	*Bank Loans*
Utang Pembiayaan Konsumen	7.734.098.789	15.194.867.976	22.928.966.765	*Consumer Financing Liabilities*
Jumlah	**3.844.882.834.612**	**510.294.867.976**	**4.355.177.702.588**	***Total***

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) / ***28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT*** *(Continued)*

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan) / ***c. Liquidity Risk*** *(Continued)*

	2022			
	Dibawah 1 tahun/ *Below 1 year*	*Past due but* Lebih dari 1 tahun *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas Keuangan				***Financial Liabilities***
Utang Usaha	480.980.837.206	--	480.980.837.206	*Trade Payable*
Utang Pajak	35.841.316.974	--	35.841.316.974	*Taxes Payable*
Utang Lainnya	745.827.850.066	--	745.827.850.066	*Other Payables*
MTN dan Obligasi	--	825.000.000.000	825.000.000.000	*MTN and Bond*
Pinjaman Bank	804.000.000.000	53.500.000.000	857.500.000.000	*Bank Loans*
Utang Pembiayaan Konsumen	38.048.921.961	6.431.123.909	44.480.045.870	*Consumer Financing Liabilities*
Total Liabilitas Keuangan	**2.104.698.926.207**	**884.931.123.909**	**2.989.630.050.116**	***Total***

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

The following is an anlysis of the maturity of the Group's financial liabilities based on contractual payments that are not discounted:

(dalam jutaan rupiah)

	Nilai Buku Tercatat/ *Book Value*	Arus Kas Wajib/ *Cash Flow*	Kewajiban yang Harus Dilunasi 2024/ *Obligation to be Paid 2024*	Kewajiban yang Harus Dilunasi 2025/ *Obligation to be Paid 2025*	Kewajiban yang Harus Dilunasi 2026/ *Obligation to be Paid 2026*	Kewajiban yang Harus Dilunasi 2027/ *Obligation to be Paid 2027*
Pinjaman Bank/ *Bank Loan*	2.285.604	2.285.604	2.285.604	--	--	--
Pinjaman Jangka Menengah & Obligasi/ *Medium Term Note & Bonds*	825.000	825.000	335.000	100.000	--	400.000
Jumlah/*Total*	**3.110.604**	**3.110.604**	**2.620.604**	**100.000**	**--**	**400.000**

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Kebijakan Grup adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat dalam rangka untuk mengamankan akses untuk membiayai dengan biaya yang wajar.

Capital Management

The main objective of the Group's capital management is to ensure the maintenance of a healthy capital ratio to support the business and maximize rewards for shareholders.

The Group policy is to maintain a healthy capital structure to secure access to finance at a reasonable cost.

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Pengelolaan Modal (Lanjutan)

Tabel dibawah merupakan ringkasan jumlah modal Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

***28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (Continued)*

***c. Liquidity Risk** (Continued)*

***Capital Management** (Continued)*

The table below summarizes the total capital of the Group as of December 31, 2023 and 2022:

	2023	2022	
Modal	455.023.000.000	455.023.000.000	*Share Capital*
Saldo Laba	4.019.944.671.201	3.264.314.544.470	*Retained Earnings*
Komponen Ekuitas Lainnya	3.702.780.917.128	3.245.449.288.786	*Other Equity Component*
Jumlah	**8.177.748.588.329**	**6.964.786.833.256**	***Total***

Bank Covenant

Bank Covenant

Kreditur/*Creditors*	**Syarat Kredit/*Covenant***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Rasio Lancar (kali)	*Current Asset/Current Liabilities*
Rasio Hutang ke Ekuitas (kali)	* Total Hutang : Total Ekuitas (Total hutang = Total hutang dikurangi dengan Kas)
Rasio Debt Service Coverage (kali)	EBITDA : (Angsuran pokok jatuh tempo + Bunga)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Rasio Lancar (kali)	(EBITDA + Pendapatan Donasi LPU) : (Total Utang jatuh tempo + Biaya Bunga)
Rasio Debt Service Coverage (kali)	*Current Asset : Current Liabilities*
PT Bank Sinarmas Tbk	
Rasio Lancar (kali)	*Current Asset : Current Liabilities*
Rasio Debt Service Coverage (kali)	EBITDA : (Angsuran pokok + Bunga jatuh tempo)
PT Bank Central Asia Tbk	
Rasio Lancar (kali)	Total Aktiva Lancar : Total Kewajiban Lancar
Rasio Hutang ke Ekuitas (kali)	Total Kewajiban/ Utang : Total Ekuitas
PT Bank KB Bukopin Tbk	
Current Ratio	*Cash + Account Receivable + Inventory* : Hutang Usaha + Utang Pajak
Debt Service Coverage Ratio	EBITDA : (Pokok + Bunga)
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	
Current Ratio	*Current Asset : Current Liabilities*
Liabilities to Equity Ratio	* Total Kewajiban/ Utang : Total Ekuitas *Hutang Bank + Hutang Usaha + MTN + Obligasi
Debt Service Coverage Ratio	EBITDA disetahunkan /Hutang Berbunga + Beban Bunga
Obligasi	
Debt Equity Ratio	Total Aktiva Lancar : Total Kewajiban Lancar
Debt Service Coverage	EBITDA : (Angsuran pokok jatuh tempo + Bunga)
MTN POSINDO-03 TAHAP 1	
Debt Equity Ratio	Total Aktiva Lancar : Total Kewajiban Lancar
Debt Service Coverage	EBITDA : (Angsuran pokok jatuh tempo + Bunga)

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) / *28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)*

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan) / *c. Liquidity Risk (Continued)*

Perjanjian Bank (Lanjutan) / ***Bank Covenant** (Continued)*

Kreditur / *Creditors*	Syarat Kredit/*Covenant*	Hasil/*Result*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk / ***PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk***		
Rasio Lancar (kali) / *Current Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	1,38
Rasio Hutang ke Ekuitas (kali) / *Debt to Equity Ratio (times)*	Maksimal 2,2x/*Maximum 2.2x*	0,68
Rasio *Debt Service Coverage* (kali) / *Debt Service Coverage Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	1,87
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk / ***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk***		
Rasio Lancar (kali) / *Current Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	1,38
Rasio *Debt Service Coverage* (kali) / *Debt Service Coverage Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	2,48
PT Bank Sinarmas Tbk / ***PT Bank Sinarmas Tbk***		
Rasio Lancar (kali) / *Current Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	1,38
Rasio *Debt Service Coverage* (kali) / *Debt Service Coverage Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	1,87
PT Bank Central Asia Tbk / ***PT Bank Central Asia Tbk***		
Rasio Lancar (kali) / *Current Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	1,38
Rasio Hutang ke Ekuitas (kali) / *Debt to Equity Ratio (times)*	Minimal 2,5x/*Minimum 2,5x*	0,68
PT Bank KB Bukopin Tbk / ***PT Bank KB Bukopin Tbk***		
Rasio Lancar (kali) / *Current Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	5,76
Rasio *Debt Service Coverage* (kali) / *Debt to Equity Ratio (times)*	Minimal 2,5x/*Minimum 2,5x*	1,87
PT Bank Maspion Indonesia Tbk / ***PT Bank Maspion Indonesia Tbk***		
Rasio Lancar (kali) / *Current Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	1,38
Liabilities to Equity Ratio (kali) / *Liabilities to Equity Ratio (times)*	Minimal 2,5x/*Minimum 2,5x*	0,44
Rasio *Debt Service Coverage* (kali) / *Debt Service Coverage Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	0,87
Medium Term Note (MTN) dan Obligasi / ***Medium Term Note (MTN) and Bond***		
Obligasi / ***Bond***		
Rasio Hutang ke Ekuitas (kali) / *Debt to Equity Ratio (times)*	Maksimal 5/*Maximum 5*	0,68
Rasio *Debt Service Coverage* (%) / *Debt Service Coverage Ratio (%)*	Minimal 100%/*Minimum 100%*	0,44
MTN POSINDO-03 TAHAP 1 / ***MTN POSINDO-03 TAHAP 1***		
Rasio Lancar (kali) / *Current Ratio (times)*	Maksimal 5/*Maximum 5*	0,68
Rasio Hutang ke Ekuitas (kali) / *Debt to Equity Ratio (times)*	Minimal 100%/*Minimum 100%*	0,44

29. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar.

Nilai wajar dari kas dan setara kas, piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima, piutang layanan usaha, piutang pegawai, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang lainnya dan pinjaman bank jangka pendek mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar dari pinjaman bank, utang pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha mendekati nilai tercatat karena tingkat suku bunganya diasumsikan mendekati tingkat diskonto pasar.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrument keuangan Grup yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian.

29. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value.

The fair value of cash and cash equivalents, trade receivables, accrued income, trade receivable from business services, employee receivables, trade payable, accrued expenses, other payable and short-term bank loan approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these financial instruments.

Fair value of bank loans, consumer financing, and lease payable approximately at their carrying values largely due to their interest rates assuming close to the market discount rate.

The table below presents comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Group financial instrument that are carried in the consolidated financial statements.

	2023		2022		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Kas dan Setara Kas	2.653.918.421.743	2.653.918.421.743	2.301.803.310.923	2.301.803.310.923	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha - Bersih	385.402.397.127	385.402.397.127	323.084.646.578	323.084.646.578	*Trade Receivables - Net*
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	930.909.600.985	930.909.600.985	253.959.319.110	253.959.319.110	*Accrued Income*
Piutang Layanan Jasa Keuangan	880.739.688.637	880.739.688.637	407.714.729.112	407.714.729.112	*Financial Services Receivable*
Piutang Karyawan	7.054.857.557	7.054.857.557	6.751.962.233	6.751.962.233	*Receivable to Employee*
Piutang Kerugian Perusahaan	13.811.808.767	13.811.808.767	290.193.377.047	290.193.377.047	*Company Loss Receivables*
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Liabilitas Keuangan Dicatat Berdasarkan Biaya Perolehan Diamortisasi					***Financial Liabilities Measured at Amortized Cost***
Utang Usaha	474.354.916.682	474.354.916.682	480.980.837.205	480.980.837.205	*Trade Payables*
Pinjaman Bank Jangka Pendek	2.285.604.000.000	2.285.604.000.000	804.000.000.000	804.000.000.000	*Short-term Bank Loan*
Utang Lain-lain	753.828.360.808	753.828.360.808	745.827.850.066	745.827.850.066	*Other Payables*
Pinjaman Bank Jangka Panjang	--	--	53.500.000.000	53.500.000.000	*Long-term Bank Loans*
Utang Pembiayaan Konsumen	22.928.966.765	22.928.966.765	44.480.045.870	44.480.045.870	*Consumer Financing Liabilities*
Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi	818.461.458.333	818.461.458.333	814.223.958.333	814.223.958.333	*Medium Term Note and Bond*

30. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

Saldo aset dan liabilitas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

30. MENETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Balances of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

	2023		2022		
	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah/*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah/*	
Aset					***Assets***
Kas dan Setara Kas					***Cash and Cash Equivalents***
EUR	205.190,03	3.516.858.623	3.343.034,69	55.870.901.851	*EUR*
USD	550.605,07	8.488.127.759	1.698.316,89	26.716.222.997	*USD*
CHF	61.740,06	1.134.429.150	57.913,88	982.681.558	*CHF*
SGD	56.351,73	659.970.893	56.299,07	656.395.361	*SGD*
GBP	28.531,33	563.786.071	28.568,48	540.686.481	*GBP*
JPY	1.107.563.000,00	121.333.526.650	--	--	*JPY*
Piutang Usaha					***Account Receivables***
USD	8.000.101,85	123.329.570.120	8.782.931,03	138.164.288.033	*USD*
Jumlah Aset		**259.026.269.266**		**222.931.176.281**	***Total Assets***
Liabilitas					***Liabilities***
Utang Usaha					***Trade Payables***
USD	8.907.833,00	137.323.153.528	12.205.591,00	161.733.992.026	*USD*
Utang Lainnya					***Other Payables***
USD	588.389,00	9.070.604.824	1.545.265,00	209.351.629.364	*USD*
Jumlah Liabilitas		**146.393.758.352**		**371.085.621.390**	***Total Liabilities***
Aset Bersih		**112.632.510.914**		**(148.154.445.109)**	***Net Assets***

Pada tanggal 26 Maret 2024 nilai kurs tengah yang dipakai adalah Rp. 17.077,57 untuk 1 EUR, Rp. 15.795,00 untuk 1 USD, Rp. 11.727,37 untuk 1 SGD, Rp, 19.898,56 untuk 1 GBP, Rp. 17.586,16 untuk 1 CHF, serta Rp. 104,38 untuk 1 JPY, sehingga nilai bersih aset keuangan turun sebesar (Rp.5.715.705.686,23).

On March 26, 2024, the middle exchange rates used were Rp17,077.57 for 1 EUR, Rp15,795.00 for 1 USD, Rp11,727.37 for 1 SGD, Rp19,898.56 for 1 GBP, Rp17,586.16 for 1 CHF, and Rp104.38 for 1 JPY, resulting in a decrease in the net value of financial assets by (Rp5,715,705,686.23).

31. KONTINJENSI / *31. CONTINGENCIES*

Perseroan memiliki potensi kerugian yang cukup signifikan disebabkan oleh praktik kecurangan pegawai. Sampai saat ini beberapa kasus masih dalam tahap pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh pihak penyidik yang telah memberikan estimasi kerugian sekurang - kurangnya sebesar Rp17.523.102.627 dan Rp25.963.224.885 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

The Company has significant potential losses caused by fraudulent practices of its employees. Currently some cases are still under inspection, investigation, inquiry, and prosecution on courts, being performed by prosecutors, who has given the estimated losses of at least Rp17,523,102,627 and Rp25,963,224,885 as of December 31, 2023 and 2022 with details as follows:

	2023	2022	
Perseroan			***Company***
Regional 1 Medan	2.485.900.378	2.313.956.307	*Regional 1 Medan*
Regional 2 Jakarta	281.722.094	321.338.316	*Regional 2 Jakarta*
Regional 3 Bandung	4.518.103.349	86.450.500	*Regional 3 Bandung*
Regional 4 Semarang	267.617.210	329.985.077	*Regional 4 Semarang*
Regional 5 Surabaya	757.714.865	1.787.189.267	*Regional 5 Surabaya*
Regional 6 Makassar	7.233.352.766	7.480.926.453	*Regional 6 Makassar*
Regional HO	618.378.965	643.378.965	*Regional HO*
Entitas Anak			***Subsidiary***
PT Pos Properti Indonesia	1.360.313.000	--	*PT Pos Properti Indonesia*
PT Pos Finansial Indonesia	--	13.000.000.000	*PT Pos Finansial Indonesia*
Jumlah	**17.523.102.627**	**25.963.224.885**	***Total***

Terkait dengan kerugian atas praktek kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, Perusahaan telah mendapatkan jaminan atas aset sitaan dari karyawan yang melakukan kecurangan berupa aset bergerak dan aset tak bergerak. Adapun daftar aset sitaan tersebut sebagai berikut:

Related to losses on fraudulent practices committed by employees, the Company has secured confiscated assets from employees who commit fraud in the form of movable assets and immovable assets. The list of confiscated assets is as follows:

Aset Jaminan	**2023/2022**	***Collateral assets***
Tanah luas 144 m² dan bangunan	**1.152.066.290**	*Land area 144 m² and building*
Tanah luas 234 m² dan pagar 50 m	467.810.410	*Area 234 m² and fence 50 m*
Tanah luas 1 HA	687.714.776	*Land area 1 HA*
2 Sertifikat rumah	212.623.310	*2 house certificate*
Tanah luas 2.945,5 m²	3.799.323.691	*Land area 2.945,5 m²*
Rumah tinggal	247.231.691	*Resedential house*
Tanah dan Rumah tinggal	81.806.205	*Land and Resedential house*
BPKB mobil Suzuki APV	219.250.520	*BPKB of Suzuki APV car*
Tanah	**514.326.532**	*Land*
Sertifikat tanah dan BPKB Motor	650.701.619	*Land certificate and BPKB Motorcycle*
Sertifikat tanah	705.280.974	*Land certificate*
Tanah luas 189 m²	81.806.205	*Land area 189 m²*
Jumlah	**8.819.942.223**	***Total***

32. PERENCANAAN MANAJEMEN

Pada tanggal 31 Januari 2023 telah disetujui Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 dalam RUPS oleh Kementerian BUMN, program kerja direncanakan sebanyak 27 program kerja utama terdiri dari 14 Program Transformasi dan 13 Program Inovasi. Adapun program kerja yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Ritel Domestik

Akuisisi 3 juta UMKM baik di *e-commerce, socio-commerce* maupun yang belum terdigitalisasi dengan meningkatkan performa *physical & digital channels*.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Program *Marketing Retail:* "Peningkatan Produktivitas & Pendapatan Channel"

- Mengakuisisi/PKS dengan 3 Juta UMKM melalui seluruh *channel* ritel.
- Mendorong program *Win Back* Agen Pos & Oranger dari kompetitor.
- Kolaborasi strategis dengan pihak lain (*Wholesale* bisnis).
- Menetapkan standar pelayanan lebih bagus dari kompetitor dan perbaikan tampilan *Point of Present*.
- Program *Channel one stop shopping channel* dengan memunculkan *showcase* produk UMKM (UMKM *Corner*) & *packaging corner*.

***Drive e-Commerce* dan *Socio-Commerce*: "POSAja!"**

- Akusisi & aktifasi 3 juta *new user E-UMKM* dari *seller Marketplace* dan *Socio-commers*.
- Meningkatkan *customer experience* yang bertransaksi lewat *digital channel* dengan *chatbot* yang lebih baik.

32. MANAGEMENT PLAN

On January 31, 2023, the Corporate Budget Work Plan (RKAP) was approved at the GMS by the Ministry of SOEs, 27 main work programs were planned consisting of 14 Transformation Programs and 13 Innovation Programs. The work program to be carried out are as follows:

1. Domestic Retail

Acquisition of 3 million MSMEs in ecommerce, socio-commerce and those that are not yet digitized by improving the performance of physical & digital channels.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Retail Marketing Program: "Increased Channel Productivity & Revenue"

- *Acquire/MCC with 3 Million MSMEs through all retail channels.*
- *Encourage the Win Back Postal Agent & Oranger program from competitors.*
- *Strategic collaboration with other parties (Wholesale business).*
- *Setting a better service standard than competitors and Improvement of Point of Present Display.*
- *Channel one stop shopping channel program by creating a UMKM product showcase (UMKM Corner) & packaging corner.*

***Drive e-Commerce and Socio-Commerce*: "POSAja!"**

- *Acquisition & activation of 3 million new E-UMKM users from Marketplace sellers and Socio-commers.*
- *Improve customer experience through digital channels with better chatbot.*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

2. Korporat Domestik

Penguatan bisnis kurir korporat melalui rekrutmen 1.000 AM *(Included Global AM)*, peningkatan kapabilitas, dan layanan yang memenuhi ekspektasi pelanggan korporasi.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Retensi Pelanggan
- Membangun keakraban dengan pelanggan: Penjualan konsultatif, memahami rantai nilai pelanggan, memahami industri pelanggan & berkantor di lokasi pelanggan.
- Membangun Program Retensi & Loyalitas.
- Memastikan tidak ada pelanggan pasif.

Akuisisi Pelanggan
- *Aggressive Bidding: new customer & win back.*
- *Aggressive Bidding: LPSE_LKPP, E-Proc, INAPROC, Official Website, Official Bidding.*
- *Enlareg number of AM recruitment 1.000 new AM (include Global AM + AMEX).*
- Membangun kemampuan terkait pemahaman *value chain customer* dan pengetahuan industri dalam melakukan akselerasi akuisisi *customer (Valueable Proposal*).
- Membangun Jaringan dan Kemampuan Internasional.
- *Customer Penetration.*
- Agresif menggarap pasar yang berorientasi *solution end-to-end logistic*.
- Membuat peluang bisnis baru.
- Melakukan penawaran spesial kepada Grup konglomerasi (Strategi *Bundling*).
- Implementasi Pos Dinas Lainnya.

***32. MANAGEMENT PLAN** (Continued)*

2. Domestic Corporate

Strengthening the corporate courier business through recruitment of 1,000 AMs (Included Global AM), capability enhancement, and services that meet corporate customer expectations.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Customer Retention
- *Building familiarity with customers: Consultative selling, Understanding the Customer's value chain, understanding the customer's industry & being based at the customer's location.*
- *Build Retention & Loyalty Programs.*
- *Ensure no customer churn.*

Customer Acquisition
- *Aggressive Bidding: new customers & winning back.*
- *Aggressive Bidding: LPSE_LKPP, E-Proc, INAPROC, Official Website, Official Bidding.*
- *Increase number of AMs: recruitment of 1.000 new AMs (including Global AM + AMEX).*
- *Build capabilities in customer value chain understanding and industry knowledge to accelerate customer acquisition (Valueable Proposal).*
- *Create International Network and Capabilities.*
- *Customer Penetration.*
- *Aggressively pursued markets oriented towards end-to-end logistics solutions.*
- *Create new business opportunities.*
- *Provide special offers to conglomerate Groups (Bundling Strategy).*
- *Implementation of Other Postal Services.*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

2. Korporat Domestik (Lanjutan)

Project, Bidding and Collection Management
- Implementasi *Management Account Receivable System*.
- Membangun *Bidding Management Capability.*
- Membangun *Project Management Capability.*

3. *Outgoing International*

Ekspansi bisnis kurir internasional melalui kolaborasi dengan mitra strategis serta simplifikasi dan digitalisasi proses bisnis.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Program Akuisisi
- Akuisisi kiriman langsung ke Perusahaan *import* dan w*holesale*.
- Membangun Jaringan dan Kemampuan Internasional.

Program Retensi
- Building Customer intimacy Consultative selling, memahami value chain customer, & memahami industry customer
- Building Retention & Loyalty Program.
- Memastikan tidak ada Churn Customer

Simplifikasi dan Digitalisasi Proses Bisnis
- Pengadaan sarana dan prasarana di TPS dan IPC (*Capex* Rp8,4 Miliar).
- Penanganan digitalisasi dan *dashboard* operasi untuk kiriman internasional.
- Perbaikan sistem *custom* dan integrasi dengan proses di *Office of Exchange (OE).*
- Sosialisasi perubahan regulasi ekspor dan impor.

***32. MANAGEMENT PLAN** (Continued)*

***2. Domestic Corporate** (Continued)*

Project, Bidding and Collection Management
- *Implementation of Accounts Receivable Management System.*
- *Raising Bidding Management Capability.*
- *Raising Project Management Capability.*

3. Outgoing International

Expansion of international courier business through collaboration with strategic partners and simplification and digitalization of business process.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Acquisition Program
- *Direct Entry shipment acquisition to import and wholesale companies.*
- *Create International Network and Capability.*

Retention Program
- *Building familiarity with customers: Consultative selling, Understanding customer value chain, & understanding industry customers*
- *Building Retention & Loyalty Programs.*
- *Ensure no customer churn*

Simplification and Digitalization of Business Process
- *Procurement of facilities and infrastructure at TPS and IPC (Capex Rp8.4 Billion).*
- *Handling digitalization and operation dashboard for international shipments.*
- *Improvement of custom system and integration with Office of Exchange (OE) process.*
- *Socialization of changes in export and import regulations.*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

3. *Outgoing International* (Lanjutan)

***Strategic Alliances* dengan Mitra Strategis Kurir Internasional**

- Kerja sama agensi dengan Perusahaan kurir-logistik di luar negeri.
- Kolaborasi/kemitraan strategis dengan Perusahaan *forwarding* internasional.

4. *Profitable* eks-KCP LPU

Akuisisi >2.000 UMKM di >1.000 eks-KCP LPU dan redistribusi KCP LPU ke wilayah 3T.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Sosialiasi

- Melakukan perubahan *mindset* KCP LPU sebagai pendorong ekonomi di wilayah kerja.
- Sosialisasi dan internalisasi KD Pedoman Pengelolaan LPU.
- Pembentukan kepala KCP LPU sebagai seorang “mantri LPU”.

Kerja Sama Strategis

- Bekerjasama dengan Pemerintah setempat membentuk agen/mitra LPU.
- Melakukan analisa daerah operasi tekait potensi ekonomi terutama UMKM di wilayah kerja KCP LPU.
- Mengunjungi kegiatan masyarakat (terutama UMKM) dengan memanfaatkan oranger *mobile* & mitra LPU.
- Perpanjangan jam loket.

32. MANAGEMENT PLAN *(Continued)*

3. Outgoing International *(Continued)*

Strategic Alliances with International Courier Strategic Partners

- *Agency cooperation with overseas courier-logistics Companies.*
- *Strategic collaborations/partnerships with international forwarding Companies.*

4. Profitable ex-KCP LPU

Acquisition of >2,000 MSMEs in >1,000 ex-KCP LPU and redistribution of KCP LPU to 3T areas.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Socialization

- *Change the mindset of KCP LPU as an economic driver in the working area.*
- *Socialization and internalization of KD LPU Management Guidelines.*
- *Establishment of KCP LPU head as an "LPU mantri".*

Strategic Cooperation

- *Cooperate with local Government to form LPU agents/partners.*
- *Analyze the area of operation regarding economic potential, especially MSMEs in the KCP LPU working area.*
- *Attending the community activities (especially MSMEs) by utilizing oranger mobile & LPU partners.*
- *Extension of counter hours.*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

5. *Digital* SCM

Optimalisasi pengelolaan jaringan transportasi dan pergudangan pos secara digital demi kepuasan pelanggan.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Program Digitalisasi & Otomasi Proses Bisnis dan Infrastruktur

- Integrasi sistem *fulfillment*, modernisasi sistem, dan pengembangan jaringan titik layanan (*Capex* Rp0,6 Miliar).
- Pengelolaan infrastruktur teknologi (*Capex* Rp1,2 Miliar).
- Peningkatan kapabilitas sistem dengan integrasi internal dan eksternal (*Capex* Rp10 Miliar).
- Evaluasi *performance* operasional sesuai ekspektasi pelanggan.
- Pengelolaan alat transportasi (*Capex* Rp2,7 Miliar).
- Mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan terkait operasional proyek.

Program Peningkatan Kapabilitas Bisnis dengan Sinergi

- Perluasan kerjasama SCM dan *warehousing* dengan *e-commerce*.
- Pengembangan kapasitas penjualan 120 AM dengan skema insentif yang menarik.
- Membangun tim *Bidding Management*.
- Menjalin kerjasama dengan penyedia jasa kargo dan pergudangan (*air lines*, *shipping lines*, CTO, PCS, ACS) untuk optimalisasi *load factor*.
- *Product Knowledge Re-freshment Training.*

***32. MANAGEMENT'S PLAN** (Continued)*

5. Digital SCM

Optimizing the management of the postal transportation and warehousing network digitally for customer satisfaction.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Business Process & Infrastructure Digitalization and Automation Programs

- *Integration of fulfillment system, system modernization, and service point network development (Capex Rp0.6 Billion).*
- *Technology infrastructure management (Capex Rp1.2 Billion).*
- *System capability improvement with internal and external integration (Capex Rp10 Billion).*
- *Evaluation of operational performance in line with customer expectations.*
- *Transportation equipment management (Capex Rp2.7 Billion).*
- *Develop a system that suits the needs related to project operations.*

Business Capability Improvement Program with Synergy

- *Expansion of SCM and warehousing cooperation with e-commerce.*
- *Development of 120 AM sales capacity with attractive incentive schemes.*
- *Build Bidding Management team.*
- *Establish cooperation with cargo and warehousing service providers (air lines, shipping lines, CTO, PCS, ACS) for load factor optimization.*
- *Product Knowledge Re-freshment Training.*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

5. Digital SCM (Lanjutan)

Program Pemenuhan Ekspektasi Pelanggan
- Manajemen pelanggan korporat berdasarkan besar, industri dan segmen.
- Evaluasi kepuasan pelanggan secara berkala.
- Pengelolaan pelanggan dan portofolio.
- Program pemasaran untuk mempertahankan pelanggan.

6. Logistik Energi

Penguatan 5 *Key Account Management* (KAM) untuk Sektor Energi dengan produktivitas melebihi Rp3 Miliar per bulan.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Program Manajemen Pelanggan
- Perbaikan proses akuisisi *Key Account* pada *cluster* yang *mature*, analisis CBA dan pembiayaan proyek.
- Mengembangkan kapasitas penjualan 5 KAM.
- Membangun tim *Bidding* Manajemen.

Program Project, Bidding* dan *Collection Management
- Optimalisasi pola operasi.
- Pengelolaan pelaporan manajemen operasional dengan *dashboard*.
- Manajemen pengelolaan piutang.

***32. MANAGEMENT'S PLAN** (Continued)*

***5. Digital SCM** (Continued)*

Customer Expectation Fulfillment Program
- *Corporate customer management by size, industry and segment.*
- *Periodic evaluation of customer satisfaction.*
- *Customer and portfolio management.*
- *Marketing program to retain customers.*

6. Energy Logistics

Strengthening of 5 Key Account Management (KAM) for Energy Sector with productivity exceeding Rp3 Billion per month.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Customer Management Program
- *Improved Key Account acquisition process in mature clusters, CBA analysis and project financing.*
- *Developed sales capacity of 5 KAMs.*
- *Raising Bidding Management team.*

Project, Bidding and Collection Management Program
- *Optimization of operation pattern.*
- *Management of operational management reporting with dashboards.*
- *Accounts receivable management.*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

7. Logistik Pemerintah/BUMN/BUMD

Ekspansi bisnis logistik melalui kolaborasi dengan Pemerintah/BUMN/BUMD.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Logistik Pemerintah
- Persiapan dukungan logistik untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
- Proyek Logistik pada Pembangunan IKN 2023.
- Evaluasi kepuasan pelanggan secara berkala.

Logistik BUMN/BUMD
- Perluasan kerjasama strategis dengan BUMN/BUMD.
- Evaluasi kepuasan pelanggan secara berkala.

8. Penyaluran Dana dan Lainnya

Peningkatan pendapatan bisnis jasa keuangan melalui MAU >4% dari NoA Pospay.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Program Perluasan Kerja Sama
- Melakukan kerja sama strategis dengan pemerintah pusat, daerah, perbankan, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain.
- Sosialisasi proyek kerja sama.
- Meningkatkan kemampuan komunikasi para *Account Manager.*

***32. MANAGEMENT'S PLAN** (Continued)*

7. Government/ State/ Local Owned Enterprises Logistics

Expansion of the logistics business through collaboration with the Government/State/Local owned enterprises.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Government Logistics
- *Preparation of logistical support for the implementation of the 2024 Simultaneous Elections.*
- *Logistics project for the construction of IKN 2023.*
- *Periodic evaluation of customer satisfaction.*

State/Local Owned Enterprises Logistics
- *Expansion of strategic cooperation with State/Local owned enterprises.*
- *Periodic evaluation of customer satisfaction.*

8. Fund Disbursement and Others

Increase in financial services business revenue through MAU >4% of NoA Pospay.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Cooperation Expansion Program
- *Conduct strategic cooperation with central and local governments, banks, social organizations, community institutions, etc.*
- *Socialization of cooperation projects.*
- *Improve communication skills of Account Managers.*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

8. Penyaluran Dana dan Lainnya (Lanjutan)

Program Peningkatan Pendapatan dari Produk Materai dan *Legacy*
- Mempertahankan kinerja produk materai dan *legacy* dengan peningkatan kualitas layanan.
- Menyediakan pelaporan yang transparan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mitra.

9. Bisnis Agregator

Akuisisi dan kolaborasi mitra agregator untuk pengembangan bisnis *digital payment* Posfin.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Program Perluasan Kemitraan dan *Biller*
- Menambah Pospay Agen dan *channel* penjualan *multibiller* H2H ke mitra strategis.
- Program promosi e-materai untuk peningkatan transaksi sesuai target pelanggan.

Program Peningkatan Kualitas Operasional dan Interaksi Pelanggan
- Memastikan aplikasi dapat diakses dan beroperasi setiap saat.
- Mempercepat proses integrasi ke sisi *supplier* dan *customer*.
- Menjaga performansi *rate complaint handling*.
- Melakukan *project management* yang terstruktur dan terencana.
- Menyelesaikan proyek dengan hasil sesuai dengan *Scope of Work* yang telah ditentukan sebelumnya.

***32. MANAGEMENT'S PLAN** (Continued)*

***8. Fund Disbursement and Others** (Continued)*

Program to Increase Revenue from Stamp and Legacy Products
- *Maintain the performance of stamp and legacy products with improved service quality.*
- *Provide transparent reporting in a way that suits partner needs.*

9. Aggregator Business

Acquisition and collaboration of aggregator partners for the development of Posfin's digital payment business.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Partnership and Biller Expansion Program
- *Adding Pospay Agent and H2H multibiller sales channel to strategic partners.*
- *E-stamp promotion program to increase transactions according to target customers.*

Program to Improve Operational Quality and Customer Interaction
- *Ensure apps are always accessible and operational.*
- *Accelerate the integration process to the supplier and customer side.*
- *Maintain complaint handling rate performance.*
- *Perform structured and planned project management.*
- *Complete projects with results in accordance with the predetermined Scope of Work.*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

10. *Fronting Business*

Pengembangan model layanan *fronting* untuk *Payment, Investment, Credit, Insurance*, dan *Saving* (PICIS) dari mitra perbankan dan non-perbankan (syariah/konvensional).

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Program Pembangunan *Platform*
- Pengembangan sistem jasa keuangan untuk layanan Tabungan Pos, *Multibank Fronting, Cash Pickup*, dan *Fronting* Investasi (*CAPEX Dept.* Operasi dan *Digital Services* Rp69,63 Miliar).
- Melakukan tolak ukur layanan simpanan dan pembiayaan pada lembaga pos dunia.

Program Pengembangan Bisnis dan Kolaborasi dengan Mitra Strategis
- Aliansi strategis dengan lembaga syariah, asuransi, simpanan dan pembiayaan yang kredibel.
- Ekosistem gabungan untuk perluasan bisnis, baik *e-commerce*, transaksi keuangan dan lainnya.
- Percepatan proses kerja sama.

11. *Leverage Property*

Optimalisasi aset properti investasi dan/atau properti strategis untuk kebutuhan masyarakat, khususnya sektor kreatif.

***32. MANAGEMENT'S PLAN** (Continued)*

10. Fronting Business

Development of fronting service model for Payment, Investment, Credit, Insurance, and Saving (PICIS) from banking and non-banking partners (sharia/conventional).

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Platform Development Program
- *Financial services system development for Postal Savings, Multibank Fronting, Cash Pickup, and Investment Fronting services. (CAPEX Dept. Operations and Digital Services Rp69.63 Bllion).*
- *Benchmarking of savings and financing services at world postal institutions.*

Business Development Programs and Collaboration with Strategic Partners
- *Strategic alliance with credible Islamic institutions, insurance, savings and financing.*
- *Join ecosystem for business expansion, both e-commerce, financial transactions and others.*
- *Acceleration of cooperation process.*

11. Leverage Property

Optimization of investment property assets and/or strategic properties for community needs, especially the creative sector.

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

12. *Construction Business Partnership*

Pengembangan kemitraan konstruksi yang menguntungkan bagi Grup.

13. *HC Practices*

Implementasi PMS berbasis OKR untuk mendorong *succession planning* dan akselerasi karir serta remunerasi berbasis performa.

14. Re-engineering HC Service

Implementasi *single HC platform* dan *re-engineering HC services process*.

15. *Talent Management*

Penerapan pengembangan talenta yang relevan untuk mendukung pencapaian target bisnis.

16. *Lean Organization & Productivity Enhancement*

Pengembangan struktur organisasi yang ramping dan peningkatan produktivitas karyawan berlandaskan budaya AKHLAK.

17. Inkubasi dan Transformasi

Akselerasi inkubasi inovasi dan transformasi untuk mendorong pencapaian target Perusahaan.

18. *Customer Experience*

Peningkatan pengalaman pelanggan menjadi lebih baik pada setiap layanan pos.

***32. MANAGEMENT'S PLAN** (Continued)*

12. Construction Business Partnership

Development of profitable construction partnerships for the Group.

13. HC Practices

Implementation of OKR-based PMS to encourage succession planning and career acceleration as well as remuneration based on performance.

14. HR Service Reengineering

Implementation of a single HC platform and re-engineering of HC service processes.

15. Talent Management

Implementation of relevant talent development to support the achievement of business targets.

16. Lean Organization & Productivity Enhancement

Development of lean organization structure and employee productivity enhancement based on AKHLAK culture.

17. Incubation and Transformation

Acceleration of innovation incubation and transformation to drive the achievement of Company's targets.

18. Customer Experience

Improved customer experience for the better in every postal service.

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

19. Aksi Korporasi

Peningkatan pertumbuhan *non-organic* melalui akuisisi/*merger/strategic alliances*.

20. Revitalisasi *Brand*

Rekode, membangun kembali dan meningkatkan daya tarik *brand* Pos Indonesia di mata masyarakat, khususnya mitra-mitra strategis.

21. Sistem Inti Berbasis Layanan

Pengembangan *Core System* dan *Superapps*.

22. Otomatisasi dan Modernisasi

Modernisasi proses bisnis dengan teknologi otomatisasi dan modernisasi infrastruktur operasional bisnis.

23. Integrasi Mitra Bisnis

Integrasi sistem *supporting* dan modernisasi infrastruktur untuk *Big Data Analytics*.

24. Manajemen Keuangan dan Aset

Pengembangan sistem keuangan dan aset yang memenuhi kebutuhan induk dan anak Perusahaan serta berbasis risiko.

25. Perencanaan Anggaran

Pengembangan sistem perencanaan anggaran Perusahaan berbasis program kerja bagi induk, anak, dan afiliasi Perusahaan.

26. Audit dan Kontrol

Pemanfaatan sistem audit yang tepat untuk menyelenggarakan audit preventif yang profesional, efisiensi dan efektif.

***32. MANAGEMENT'S PLAN** (Continued)*

19. Corporate Action

Increased non-organic growth through acquisitions/mergers/strategic alliances.

20. Brand Revitalization

Recode, rebuild and regain brand attractiveness of Pos Indonesia's image, especially strategic partners.

21. Service Based Core Systems

Core System and Superapps Development.

22. Automatization and Modernization

Business process modernization with automatization technology and business operational infrastructure modernization.

23. Business Partner Integration

Integration of supporting systems and infrastructure modernization for Big Data Analytics.

24. Financial & Asset Management

Development of financial and asset systems that meet the needs of the parent and subsidiaries and are risk-based.

25. Budget Planning

Development of a work program-based Corporate budget planning system for parent, subsidiaries and affiliated Entities.

26. Audit and Control

Utilization of an appropriate audit system to conduct professional, efficient and effective preventive audits.

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

Skenario bisnis yang akan dilakukan dalam memenuhi target RKAP 2023 adalah sebagai berikut:

1. Skenario Bisnis Kurir

a. Pendapatan Bisnis Kurir tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.298 Miliar.
b. Total *Capex* yang menunjang Bisnis Kurir senilai Rp70,51 Miliar dengan rencana *cash out*:
   - Rp69,50 Miliar pada Triwulan I
   - Rp17,00 Miliar pada Triwulan II
   - Rp14,50 Miliar pada Triwulan III

2. Skenario Bisnis Logistik

a. Pendapatan Bisnis Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp674 Miliar
b. Total *Capex* yang menunjang Bisnis Logistik senilai Rp101 Miliar dengan rencana *cash out*:
   - Rp69,5 Miliar pada Triwulan I
   - Rp17 Miliar pada Triwulan II
   - Rp14,5 Miliar pada Triwulan III

3. Skenario Bisnis Jasa Keuangan

a. Pendapatan Bisnis Jasa Keuangan tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.192 Miliar.
b. Total *Capex* yang menunjang Bisnis Jasa Keuangan senilai Rp206,4 Miliar dengan rencana *cash out*:
   - Rp181,33 Miliar pada Triwulan II
   - Rp21,07 Miliar pada Triwulan III
   - Rp4 Miliar pada Triwulan IV

***32. MANAGEMENT'S PLAN** (Continued)*

The business scenario that will be carried out to meet the RKAP's target on 2023, are as follows:

1. Courier Business Scenario

a. Business revenue in 2023 is targeted at Rp2.298 Billion.
b. Total Capex to support Courier Business is Rp70.51 Billion with cash out plan:
   - *Rp69.50 Billion in the first quarter*
   - *Rp17.00 Billion in the second quarter*
   - *Rp14.50 Billion in the third quarter*

2. Logistics Business Scenario

a. Logistics Business revenue in 2023 is targeted at Rp674 Billion

b. Total Capex to support Logistics Business is Rp101 Billion with cash out plan:
   - *Rp69.5 Billion in the first quarter*
   - *Rp17 Billion in the second quarter*
   - *Rp14.5 Billion in the third quarter*

3. Financial Services Business Scenario

a. Financial Services Business Revenue in 2023 is targeted at Rp2,192 Billion.

b. Total CapEx supporting the Financial Services Business is Rp206.4 Billion with a cash out plan:
   - *Rp181.33 Billion in the second quarter*
   - *Rp21.07 Billion in the third quarter*
   - *Rp4 Billion in the fourth quarter*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

4. Skenario Bisnis Properti

a. Pendapatan Bisnis Properti tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp192 Milliar

b. Belanja modal yang menunjang Bisnis Jasa Keuangan senilai Rp152,73 Miliar dengan rencana kas keluar:
- Rp2 Miliar pada Triwulan II
- Rp90,73 Miliar pada Triwulan III
- Rp60 Miliar pada Triwulan IV

32. MANAGEMENT'S PLAN (Continued)

4. Property Business Scenario

a. Property Business revenue in 2023 is targeted at Rp192 Billion

b. Total Capital Expenditure supporting the Property Business is Rp152.73 Billion with a cash out plan:
- *Rp2 Billion in the second quarter*
- *Rp90.73 Billion in the third quarter*
- *Rp60 Billion in fourth quarter*

33. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

Informasi transaksi non kas yang signifikan yang tidak mempengaruhi aktivitas arus kas sebagai berikut:

33. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS

Significant non-cash transactions that do not affect the cash flows activities are as follows:

	2023	2022	
Penambahan Aset Hak Guna melalui Liabilitas Sewa	(21.614.624.254)	349.995.141	*Addition of Right-of-Use Assets from Lease Liabilities*
Pembayaran Bunga melalui Akru Bunga	(10.665.097.222)	(7.598.050.800)	*Interest Expenses from Interest Accrued*
Penambahan Aset Tetap dengan Mendebitkan (Mengkreditkan) Utang Usaha	30.183.414.172	(12.300.193.014)	*Additions of Property & Equipment Debited (Credited) Account Payables*
Pelepasan Aset Tetap melalui Penggantian (Ruislag)	1.458.913.692	--	*Disposal of Fixed Assets through Replacement (Ruislag)*
Penempatan Bank Garansi melalui *Non Cash Loan*	(20.604.000.000)	--	*Placement Bank Guarantee trought Non Cash Loan*

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan:

Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities:

	2022	Arus Kas Pendanaan/ *Financing Cash Flows*		Perubahan Non Kas/ *Non-Cash Changes*		2023
		Penambahan/ *Addition*	Pembayaran/ *Payment*	Pergerakan Valuta Asing/ *Foreign Exchange Movement*	Lain-lain/ *Others*	
Utang Pembiayaan Konsumen/ *Customer Financing Payable*	44.480.045.870	--	(26.249.201.993)	--	4.698.122.888	22.928.966.765
Utang Bank Jangka Pendek/ *Short-Term Bank Loan*	770.000.000.000	10.024.000.000.000	(8.529.000.000.000)	--	20.604.000.000	2.285.604.000.000
Utang Bank Jangka Panjang/ *Long-Term Bank Loan*	87.500.000.000	--	(87.500.000.000)	--	--	--
Utang Obligasi/*Bonds Payable*	321.573.958.333	--	--	--	1.787.500.000	323.361.458.333
Pinjaman Jangka Menengah/ *Medium Term Notes*	492.650.000.000	--	--	--	--	492.650.000.000
Utang Bunga/*Interest Payable*	2.057.782.444	--	(251.090.088.514)	--	259.697.403.292	10.665.097.222

33. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

33. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS (Continued)

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan: (Lanjutan)

Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities: *(Continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2021	Arus Kas Pendanaan/ *Financing Cash Flows*		Perubahan Non Kas/ *Non-Cash Changes*		31 Desember/ *December 31,* 2022
		Penambahan/ *Addition*	Pembayaran/ *Payment*	Penambahan Aset Tetap/ *Additional in Fixed Assets*	Pergerakan Valuta Asing/ *Foreign Exchange Movement*	
Utang Pembiayaan Konsumen/ *Customer Financing Payable*	90.761.906.542	--	(46.281.860.672)	--	--	44.480.045.870
Utang Bank Jangka Pendek/ *Short-Term Bank Loan*	936.600.000.000	5.378.300.000.000	(5.544.900.000.000)	--	--	770.000.000.000
Utang Bank Jangka Panjang/ *Long-Term Bank Loan*	127.500.000.000	--	(40.000.000.000)	--	--	87.500.000.000
Utang Obligasi/*Bonds Payable*	--	492.650.000.000	--	--	--	492.650.000.000
Pinjaman Jangka Menengah/ *Medium Term Notes*	625.000.000.000	--	(300.000.000.000)	--	(3.426.041.667)	321.573.958.333

34. REKLASIFIKASI AKUN

34. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2022 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

Certain accounts in the consolidated financial statements for 2022 have been reclassified to conform with the consolidated financial statements presentation as of December 31, 2023 as follows:

	2022			
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	Direklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah Reklasifikasi/ *After Reclassification*	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Aset Lancar Lainnya:				*Other Current Assets:*
Lainnya	337.980.265.334	(52.624.400.257)	285.355.865.077	*Others*
Aset Tidak Lancar Lainnya	53.386.925.732	41.848.358.590	95.235.284.322	*Other Non-current Assets*
Obligasi	(500.000.000.000)	7.350.000.000	(492.650.000.000)	*Bonds*
Pinjaman Jangka Menengah	(325.000.000.000)	3.426.041.667	(321.573.958.333)	*Medium Term Notes*
Tambahan Modal Disetor	--	2.344.427.566	2.344.427.566	*Additional Paid-In Capital*
Komponen Ekuitas Lainnya	3.247.793.716.352	(2.344.427.566)	3.245.449.288.786	*Other Equity Component*

34. REKLASIFIKASI AKUN (Lanjutan) / *34. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS (Continued)*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF	2022 Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah Reklasifikasi/ *After Reclassification*	*STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
PENDAPATAN BERSIH	**4.618.390.887.600**	**--**	**4.618.390.887.600**	***NET REVENUE***
BEBAN POKOK LAYANAN	**(3.279.756.648.955)**	**25.502.817.026**	**(3.254.253.831.929)**	***COST OF SERVICES***
LABA KOTOR	**1.338.634.238.645**		**1.364.137.055.671**	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Pemasaran	(64.221.961.408)	(3.741.472.058)	(67.963.433.466)	*Marketing*
Umum dan Administrasi	(946.287.669.217)	39.305.757.446	(906.981.911.771)	*General and Administrative*
Pendapatan Lain-lain	726.574.741.351	1.758.106	726.576.499.457	*Other income*
Beban Lain-lain	(281.309.892.891)	(61.062.520.220)	(342.372.413.111)	*Other expenses*
LABA USAHA	**773.389.456.480**		**773.395.796.780**	***OPERATIONS PROFIT***
Pendapatan Keuangan	58.838.224.728		58.838.224.728	*Finance Income*
Beban Keuangan	(213.509.292.158)	(6.340.300)	(213.515.632.458)	*Finance Costs*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**618.718.389.050**	**--**	**618.718.389.050**	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	18.327.923.659		18.327.923.659	*INCOME TAX (EXPENSE) BENEFITS*
LABA TAHUN BERJALAN	**637.046.312.709**		**637.046.312.709**	***PROFIT FOR THE YEAR***

	2022 Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	Direklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah Reklasifikasi/ *After Reclassification*	
LAPORAN ARUS KAS				***STATEMENT OF CASH FLOW***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Kas dari Pelanggan	5.229.515.488.021	--	5.229.515.488.021	*Cash Received from Customers*
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(2.522.907.649.365)	--	(2.522.907.649.365)	*Cash Paid to Employees*
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(2.180.073.362.272)	(189.476.182.270)	(2.369.549.544.542)	*Cash Paid to Supplier*
Pembayaran Biaya Pemasaran	(1.628.049.163)	--	(1.628.049.163)	*Payment of Marketing Cost*
Pembayaran Bunga Pinjaman	(185.966.010.202)	185.966.010.202	--	*Payment of Interest*
Pembayaran Pajak	(7.574.063.092)	--	(7.574.063.092)	*Payment of Tax*
Operasi Lainnya	(56.081.428.869)	56.081.428.869	--	*Other Operation*
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	**275.284.925.058**	**52.571.256.801**	**327.856.181.859**	***Net Cash Used in Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pencairan Pinjaman Bank Jangka Pendek	5.745.450.000.000	132.850.000.000	5.878.300.000.000	*Drawdown of Short-term Bank Loans*
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek	(5.844.900.000.000)	--	(5.844.900.000.000)	*Payment of Short-Term Bank Loans*
Pembayaran Bunga Pinjaman	--	(185.966.010.202)	(185.966.010.202)	*Payment of Interest*
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan	(112.768.672.412)	--	(112.768.672.412)	*Payment of Consumer Financing Liability*
Layanan Jasa Keuangan	410.830.735.089	--	410.830.735.089	*Financial Services*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**198.612.062.677**	**(53.116.010.202)**	**145.496.052.475**	***Net Cash Provided by Financing Activities***
Dampak dari Perubahan Kurs *Exchange Rates Fluctuation Effects* Terhadap Kas dan Setara Kas	--	544.753.401	544.753.401	*Exchange Rates Fluctuation Effects on Cash and Cash Equivalents*

35. INFORMASI SEGMEN / *35. SEGMENT INFORMATION*

Rincian informasi segmen adalah sebagai berikut: / *The detailed segment information is presented below:*

(dalam jutaan rupiah)

	2023													
	Regional 1 Medan	Regional 2 Jakarta	Regional 3 Bandung	Regional 4 Semarang	Regional 5 Surabaya	Regional 6 Makassar	Kantor Pusat/ Head Office	Jumlah Induk/ *Total Parent*	Pos Financial Indonesia	Pos Logistik Indonesia	Pos Properti Indonesia	Induk & Anak/ *Parent & Subsidiaries*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidated*
Pendapatan/ *Revenues*														
Pendapatan Surat dan Paket Pos/ *Revenue from Post Mail and Parcel*	205.118	541.391	158.321	301.876	438.343	248.824	--	1.893.873	--	--	--	1.893.873	--	1.893.873
Pendapatan Jasa Keuangan dan Ritel/ *Revenue from Financial Service and Retail*	265.108	170.771	153.869	165.372	232.210	250.922	--	1.238.252	23.325	--	--	1.261.577	(5.042)	1.256.535
Pendapatan Properti/ *Revenue from Property*	2.339	3.085	934	1.863	4.786	2.572	39.842	55.421	--	--	136.297	191.718	(40.174)	151.544
Pendapatan Logistik/ *Revenue from Logistic*	266.521	191.230	351.338	73.411	479.000	397.698	--	1.759.198	--	926.624	--	2.685.822	(509.785)	2.176.037
Pendapatan Teknologi Informasi/ *Revenue from Information Technology*	--	--	--	--	--	--	--	--	44.602	--	--	44.602	(44.474)	129
Jumlah Pendapatan/ *Total Revenue*	**739.086**	**906.477**	**664.462**	**542.522**	**1.154.339**	**900.017**	**39.842**	**4.946.745**	**67.927**	**926.624**	**136.297**	**6.077.592**	**(599.474)**	**5.478.118**
Pendapatan Lainnya/ *Other Revenue*	116.496	20.062	49.004	78.830	109.305	86.203	168.092	627.992	2.240	8.329	4	638.565	(9.749)	628.815
Jumlah Pendapatan Keuangan/ *Total Financial Revenue*	7.986	9.873	4.798	8.065	13.291	7.792	--	51.805	16	325	3.280	55.425	(11.865)	43.561
Jumlah/ *Total*	**863.568**	**936.412**	**718.264**	**629.417**	**1.276.935**	**994.012**	**207.934**	**5.626.542**	**70.183**	**935.277**	**139.580**	**6.771.582**	**(621.088)**	**6.150.494**
Beban Pegawai/ *Employee Expense*	(469.960)	(494.101)	(283.710)	(317.642)	(492.962)	(387.751)	--	(2.446.126)	(8.284)	(71.325)	(33.094)	(2.558.829)	--	(2.558.829)
Beban Operasi/ *Operating Expense*	(263.420)	(290.800)	(197.168)	(203.689)	(379.123)	(313.581)	--	(1.647.781)	(59.482)	(816.614)	(40.294)	(2.564.171)	591.526	(1.972.645)
Beban Administrasi/ Administration Expense	(16.633)	(3.896)	(5.991)	(4.134)	(9.729)	(7.942)	--	(48.325)	(30)	(639)	(912)	(49.906)	--	(49.906)
Beban Umum/ *General Expense*	(61.699)	(66.393)	(50.733)	(30.644)	(80.824)	(58.583)	--	(348.876)	(50.708)	(20.590)	(8.680)	(428.854)	258	(428.596)
Beban Penyusutan dan Amortisasi/ *Depreciation and Amortization Expenses*	(22.894)	(16.022)	(12.592)	(13.971)	(25.821)	(22.836)	--	(114.136)	(6.352)	(17.364)	(10.016)	(147.868)	7.481	(140.388)
Beban Lainnya/ Other expenses	(3.006)	(5.558)	(2.729)	(2.384)	(4.997)	(3.943)	--	(22.617)	(5.278)	(848)	(1.407)	(30.150)	--	(30.150)
Beban Keuangan/ *Finance Cost*	(43.687)	(50.915)	(45.216)	(10.577)	(65.878)	(37.441)	--	(253.714)	(844)	(5.923)	(11.428)	(271.909)	3.819	(268.089)
Jumlah Beban/ *Total Expense*	**(881.299)**	**(927.685)**	**(598.139)**	**(583.041)**	**(1.059.334)**	**(832.078)**	**--**	**(4.881.576)**	**(130.978)**	**(933.304)**	**(105.830)**	**(6.051.687)**	**603.083**	**(5.448.604)**
Laba Sebelum Pajak/ *Profit Before Tax*	**(17.731)**	**8.727**	**120.125**	**46.376**	**217.601**	**161.935**	**207.934**	**744.967**	**(60.795)**	**1.974**	**33.750**	**719.895**	**(18.005)**	**701.890**

35. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan)

35. SEGMENT INFORMATION (Continued)

(dalam jutaan rupiah)

	2022													
	Regional 1 Medan	Regional 2 Jakarta	Regional 3 Bandung	Regional 4 Semarang	Regional 5 Surabaya	Regional 6 Makassar	Kantor Pusat/ Head Office	Jumlah Induk/ *Total Parent*	Pos Financial Indonesia	Pos Logistik Indonesia	Pos Properti Indonesia	Induk & Anak/ *Parent & Subsidiaries*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidated*
Pendapatan/ *Revenues*														
Pendapatan Surat dan Paket Pos/ *Revenue from Post Mail and Parcel*	192.224	546.413	147.969	279.356	409.687	226.714	--	1.802.362	--	--	--	1.802.362	--	1.802.362
Pendapatan Jasa Keuangan dan Ritel/ *Revenue from Financial Service and Retail*	425.270	251.750	314.397	362.955	431.189	325.183	--	2.110.744	28.082	--	--	2.138.826	(3.719)	2.135.107
Pendapatan Properti/ *Revenue from Property*	2.212	4.106	1.167	2.363	4.630	2.154	--	16.631	--	--	117.345	133.976	(12.337)	121.639
Pendapatan Logistik/ *Revenue from Logistic*	16.532	26.770	14.445	13.000	16.632	11.234	0,0004	98.614	--	468.476	--	567.089	(75.291)	491.798
Pendapatan Teknologi Informasi/ *Revenue from Information Technology*	--	--	--	--	--	--	--	--	10.390	--	--	10.390		10.390
Jumlah Pendapatan/ *Total Revenue*	**636.238**	**829.039**	**477.978**	**657.674**	**862.138**	**565.285**	**0,0004**	**4.028.351**	**38.472**	**468.476**	**117.345**	**4.652.644**	**(91.348)**	**4.561.296**
Pendapatan Lainnya/ *Other Revenue*	191.534	44.659	77.884	121.475	171.529	164.065	0,0004	-- 771.146	2.047	10.403	83	783.679	(3.328)	780.351
Jumlah Pendapatan Keuangan/ *Total Financial Revenue*	9.453	14.039	5.408	11.318	11.782	7.940	--	59.941	16	281	1.921	62.159	--	62.159
Jumlah/ *Total*	**837.225**	**887.736**	**561.270**	**790.467**	**1.045.449**	**737.290**	**0,0009**	**4.859.438**	**40.535**	**479.160**	**119.348**	**5.498.481**	**(94.675)**	**5.403.806**
Beban Pegawai/ *Employee Expense*	(474.925)	(547.164)	(278.501)	(313.271)	(471.828)	(386.293)	--	(2.471.982)	(12.587)	(64.004)	(25.472)	(2.574.045)	--	(2.574.045)
Beban Operasi/ *Operating Expense*	(141.177)	(235.109)	(95.744)	(162.814)	(224.897)	(184.730)	--	(1.044.471)	(32.591)	(389.305)	(43.987)	(1.510.355)	65.192	(1.445.163)
Beban Administrasi/ *Administration Expense*	(13.530)	(3.353)	(4.210)	(4.842)	(8.853)	(7.150)	--	(41.938)	(40)	(797)	(481)	(43.255)	--	(43.255)
Beban Umum/ *General Expense*	(45.620)	(62.971)	(33.172)	(37.824)	(57.667)	(50.707)	--	(287.961)	(24.195)	(9.480)	(6.287)	(327.924)	--	(327.924)
Beban Penyusutan dan Amortisasi/ *Depreciation and Amortization Expenses*	(24.086)	(33.227)	(11.127)	(14.194)	(26.116)	(23.784)	--	(132.533)	(788)	(14.809)	(6.013)	(154.143)	--	(154.143)
Beban Lainnya/ Other expenses	(2.010)	(5.219)	(1.226)	(2.211)	(2.966)	(2.139)	--	(15.771)	(9)	(4.788)	(8.755)	(29.322)	--	(29.322)
Beban Keuangan/ *Finance Cost*	(21.770)	(77.088)	(10.464)	(6.652)	(52.734)	(32.686)	--	(201.393)	(303)	(9.496)	(43)	(211.236)	--	(211.236)
Jumlah Beban/ *Total Expense*	**(723.117)**	**(964.130)**	**(434.444)**	**(541.809)**	**(845.063)**	**(687.488)**	**--**	**(4.196.051)**	**(70.512)**	**(492.680)**	**(91.037)**	**(4.850.279)**	**65.192**	**(4.785.087)**
Laba Sebelum Pajak/ *Profit Before Tax*	**114.108**	**(76.394)**	**126.825**	**248.658**	**200.386**	**49.803**	**0,0009**	**663.387**	**(29.977)**	**(13.520)**	**28.312**	**648.202**	**(29.483)**	**618.718**

36. KEJADIAN SETELAH NERACA

Pada tanggal 2 Januari 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Perum Bulog untuk pendistribusian bantuan pangan beras pemerintah tahun 2024 dengan No: PJ-02/DP303/PG.04/01/2024 dan PKS001/DIRUT/0124.

Perusahaan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Sosial terkait dengan program penyaluran bantuan sosial dengan rincian program kerja sebagai berikut:

1. Program penyaluran sembako tahun 2024 dengan perjanjian No 01/5.4/PKS/HK.01/01/2024 dan PKS012/DIR-4/0124 tanggal 19 Januari 2024.
2. Program Keluarga Harapan tahun 2024 dengan perjanjian PKS021/DIR-4/0124 dan 6/3.4/HK.01/1/2024 tanggal 26 Januari 2024.
3. Program Penyaluran Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2024 dengan perjanjian PKS015/DIR-4/0124 dan 82/4.4/PR.07.00/1/2024 tanggal 19 Januari 2024.
4. Program Penyaluran Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Tahun 2024 dengan perjanjian PKS016/DIR-4/0124 dan 124/4.3/HK.01/1/2024 tanggal 22 Januari 2024.
5. Program Penyaluran Bantuan Sosial Program Pahlawan Ekonomi Nusantara yang Bersumber dari Hibah Langsung dalam Negeri dalam Bentuk Uang Tahun 2024 dengan perjanjian PKS023/DIR-4/0124 dan 01/5.2/PKS-HIBAH/HK.01/1/2024 tanggal 29 Januari 2024.

36. SUBSEQUENT EVENTS

On January 2, 2024, the Company signed a cooperation agreement with Perum Bulog for the distribution of government rice food assistance in 2024 with No. PJ-02/DP303/PG.04/01/2024 and PKS001/DIRUT/0124.

The Company has signed a cooperation agreement with the Ministry of Social Affairs related to the social assistance distribution program with details of the work program as follows:

1. *Basic food distribution program in 2024 with agreement No. 01/5.4/PKS/HK.01/01/2024 and PKS012/DIR-4/0124 dated January 19, 2024.*
2. *Family Hope Program in 2024 with agreement PKS021/DIR-4/0124 and 6/3.4/HK.01/1/2024 dated January 26, 2024.*
3. *Food Assistance Program for Persons with Disabilities in 2024 with agreement PKS015/DIR-4/0124 and 82/4.4/PR.07.00/1/2024 dated January 19, 2024. January 19, 2024.*
4. *Food Assistance Distribution Program for Elderly Single Family in 2024 with agreement PKS016/DIR-4/0124 and 124/4.3/HK.01/1/2024 dated January 22, 2024.*
5. *Social Assistance Distribution Program for the Archipelago Economic Heroes Program sourced from Domestic Direct Grants in the Form of Money in 2024 with agreement PKS023/DIR-4/0124 and 01/5.2/PKS-HIBAH/HK.01/1/2024 dated January 29, 2024.*

36. KEJADIAN SETELAH NERACA

6. Program Penyaluran Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu Tahun 2024 dengan perjanjian No PKS040/DIR-4/0224 dan 259/4.2/BS.00.01/2/2024 tanggal 12 Februari 2024.

36. SUBSEQUENT EVENTS

6. Program for the Distribution of Assistance for Social Rehabilitation of Orphans in 2024 with agreement No. PKS040/DIR-4/0224 and 259/4.2/BS.00.01/2/2024 dated February 12, 2024.

37. STANDAR AKUNTANSI DAN INTERPRETASI STANDAR YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru. Standar akuntansi tersebut akan berlaku efektif atau diterapkan pada laporan keuangan konsolidasian Grup yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK 73 “Sewa” tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik;
- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan.

37. NEW ACCOUNTING STANDARDS AND INTERPRETATION OF STANDARD WHICH HAVE BEEN ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The Indonesian Financial Accounting Standards Board – Indonesian Institute of Accountants (FASB-IIA) has issued new or amendment to the following Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and Its Interpretation to Financial Accounting Standards (IFAS). The accounting standards will be effective or applicable on the Group’s consolidated financial statements for the period beginning on or after January 1, 2024:

- *The amendments to SFAS 73 “Leases” about lease liability in a sale and leaseback;*
- *The amendments to SFAS 1 “Presentation of Financial Statements” about non-current liabilities with covenants.*

37. STANDAR AKUNTANSI DAN INTERPRETASI STANDAR YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru. Standar akuntansi tersebut akan berlaku efektif atau diterapkan pada laporan keuangan konsolidasian Grup yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025:

- PSAK 74 “Kontak Asuransi”;
- Amendemen PSAK 74 "Kontrak Asuransi" tentang penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 - informasi komparatif.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen Grup masih mengevaluasi dampak potensial terhadap standar dan interpretasi akuntansi yang baru dan direvisi ini terhadap laporan keuangan konsolidasiannya.

37. NEW ACCOUNTING STANDARDS AND INTERPRETATION OF STANDARD WHICH HAVE BEEN ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The Indonesian Financial Accounting Standards Board – Indonesian Institute of Accountants (FASB-IIA) has issued new or amendment to the following Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and Its Interpretation to Financial Accounting Standards (IFAS). The accounting standards will be effective or applicable on the Group’s consolidated financial statements for the period beginning on or after January 1, 2025:

- *SFAS 74 “Insurance Contracts”;*
- *The amendments to SFAS 74 “Insurance Contracts” about initial application of SFAS 74 and SFAS 71 - comparative information.*

As of authorization date of these consolidated financial statements, the Group’s management is still evaluating the potential impact on these new and revised accounting standards and interpretations on its consolidated financial statements.

38. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dewan Direksi bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan disetujui pada tanggal 26 Maret 2024.

38. MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements that have been completed and approved on March 26, 2024.

Laporan Audit TJSL



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Beserta Laporan Auditor Independen

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)

Daftar Isi **Halaman**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Laporan Posisi Keuangan 1

Laporan Aktivitas 3

Laporan Arus Kas 4

Catatan Atas Laporan Keuangan 5

PT POS INDONESIA (PERSERO)
SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL TAHUN 2023
PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

a.
Nama	: Tata Sugiarta
Alamat Kantor	: Jl. Banda No. 30 Bandung, 40115
Alamat Rumah Sesuai KTP	: Jl. Adi Gardenia No. 16, Bandung
Nomor Telepon	: 08122037041
Jabatan	: Corporate Secretary

b.
Nama	: Salman
Alamat Kantor	: Jl. Banda No. 30 Bandung, 40115
Alamat Rumah Sesuai KTP	: Jl. Manjahlega No. 44 B, Bandung
Nomor Telepon	: 081998094039
Jabatan	: Vice President TJSL

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil PT Pos Indonesia (Persero);
2. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil PT Pos Indonesia (Persero) disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK-ETAP") di Indonesial;
3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil PT Pos Indonesia (Persero) dibuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil PT Pos Indonesia (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
5. Kami bertanggung jawab atas desain sistem pengendalian internal dan aplikasinya di dalam Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil PT Pos Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Bandung, 27 Februari 2024



Tata Sugiarta
Corporate Secretary

Salman
Vice President TJSL

Laporan Auditor Independen

No. : 00043/2.1127/AU.2/05/0797-1/0/II/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, serta
Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT POS INDONESIA (PERSERO)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Pos Indonesia (Persero) ("Program") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2023, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Program berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Informasi Lain

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material. Jika berdasarkan pekerjaan yang telah kami laksanakan, kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam informasi lain tersebut, kami diharuskan untuk melaporkan fakta tersebut. Kami tidak melaporkan apapun terkait hal tersebut.

Tanggung Jawab Pengelola dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengelola Program untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, pengelola bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Program Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Program atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Program.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Program.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Program untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Program tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audlt.

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO
Registered Public Accountants

00043

Leknor Joni, CPA
Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 0797

27 Februari 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3	2.550.878.685	2.376.931.554
Piutang Pinjaman Mitra Binaan - Neto (Dikurangi penyisihan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp54.486.445.211 dan Rp52.568.867.227)	4	12.553.209.722	29.143.952.524
Piutang Lain-lain	5	497.047.669	1.725.576.351
Jumlah Aset Lancar		**15.601.136.076**	**33.246.460.429**
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Jangka Panjang	6	24.094.016.266	7.000.000.000
Aset Lain-lain			
Piutang Bermasalah - Neto (Dikurangi penyisihan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp83.619.365.739 dan Rp83.721.080.406)	7	--	--
Aset Tetap (Dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 1.862.847.578)	8	1	1
Aset Takberwujud (Dikurangi akumulasi amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 394.999.999)	9	1	1
Jumlah Aset Tidak Lancar		**24.094.016.268**	**7.000.000.002**
JUMLAH ASET		**39.695.152.344**	**40.246.460.431**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
LIABILITAS DAN ASET NETO			
Liabilitas Jangka Pendek			
Kelebihan Pembayaran Angsuran	10	431.032.945	404.365.111
Utang Lain-lain	11	90.979.721	169.042.390
Jumlah Liabilitas		**522.012.666**	**573.407.501**
ASET NETO			
Aset Neto Tidak Terikat	12	39.173.139.678	39.673.052.930
Jumlah Aset Neto		**39.173.139.678**	**39.673.052.930**
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		**39.695.152.344**	**40.246.460.431**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
LAPORAN AKTIVITAS
31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	13	1.303.914.794	1.554.873.778
Pendapatan Lain-lain	13	6.447.284	13.295.638
Pendapatan Bunga	13	5.587.990	3.695.216
JUMLAH PENDAPATAN		**1.315.950.068**	**1.571.864.632**
BEBAN			
Beban Penyisihan Piutang	14	1.815.863.320	431.339.450
JUMLAH BEBAN		**1.815.863.320**	**431.339.450**
KENAIKAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		**(499.913.252)**	**1.140.525.182**
ASET NETO AWAL TAHUN		**39.673.052.930**	**38.532.527.748**
ASET NETO AKHIR TAHUN		**39.173.139.678**	**39.673.052.930**

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
LAPORAN ARUS KAS
31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan Umum		14.673.164.818	18.058.442.198
Penerimaan (Pembayaran) Piutang Lain-lain Jangka Pendek		1.223.226.682	(62.362.666)
Penerimaan Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		1.209.898.528	1.559.208.955
Penerimaan Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan Bermasalah		101.714.665	89.436.668
Penerimaan (Pembayaran) Kelebihan Angsuran		26.667.833	(7.492.820)
Penerimaan Pendapatan Lainnya		6.447.284	13.295.638
Penerimaan Pendapatan Bunga Jasa Giro		5.587.990	3.695.216
Pembayaran Penyaluran Pinjaman Pendanaan UMK		--	(14.355.000.000)
(Pembayaran) Penambahan Utang Lain-lain		(72.760.669)	130.825.758
Pembayaran Penyaluran Kolaborasi BRI		(17.000.000.000)	(7.000.000.000)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		**173.947.131**	**(1.569.951.053)**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		**173.947.131**	**(1.569.951.053)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		**2.376.931.554**	**3.946.882.607**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	3	**2.550.878.685**	**2.376.931.554**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

1. UMUM

1. a. Latar Belakang Pendirian

Kantor pos pertama di Indonesia didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal GW Baron pada tanggal 26 Agustus tahun 1746 yang pada waktu itu bernama Jawatan PTT. Terjadi pengambilalihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari pemerintah militer Jepang. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240 Tahun 1961, status Jawatan PTT berubah menjadi Perseroan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Pada tahun 1965, PN Pos dan Telekomunikasi dibagi dua menjadi PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978 mengubah status PN Pos dan Giro menjadi Perseroan Umum (Perum) Pos dan Giro. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tanggal 27 Februari 1995, Perum Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1984 dialihkan bentuknya menjadi Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Anggaran Dasar disusun sesuai dengan materi yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1995.

Bidang usaha Perusahaan sangat beragam antara lain:
a. Usaha jasa pos dan giro.
b. Usaha-usaha lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PT Pos Indonesia (Persero) ("Perusahaan") merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang *Postal Services*, yaitu surat, paket dan jasa keuangan. Sebagai BUMN, PT Pos Indonesia (Persero) berkewajiban ikut berperan serta menunjang program pemerintah dalam rangka melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk pemberdayaan masyarakat serta mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui usaha mandiri serta pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja. Selain itu, kegiatan TJSL diharapkan dapat memberikan kesempatan berusaha bagi usaha kecil dan koperasi, dan menjalankan tanggung jawab sosial korporat terhadap komunitas di lingkungannya.

Program ini digulirkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983 yang telah diamanatkan kepada semua BUMN untuk dapat turut membantu pengembangan usaha kecil dan sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1232/KMK.013/1989, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil oleh BUMN yang kemudian disusul dengan Surat Keputusan ("SK") Menteri Keuangan No. 316/XMX.016/1994, tanggal 27 Juni 1994, tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ("PUKK") melalui pemanfaatan laba BUMN.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan didirikan pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro No. 222/PEG/DIRUTPOS/1994 tanggal 28 Desember 1994 dengan nama Gugus Bina Mitra Pos. Berdasarkan Keputusan Direksi No.45/DIRUT/0803 tanggal 21 Agustus 2003 nama program diubah menjadi Unit Pembinaan Kemitraan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Kemudian pada tahun 2006 diubah kembali menjadi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (TJSL) sesuai dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No.65/DIRUT/1106 tanggal 10 November 2006. Selanjutnya pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Direksi No.45/DIRUT/0807 tanggal 31 Agustus 2007 Unit PKBL berubah nama menjadi Divisi PKBL.

1. UMUM (Lanjutan)

1. a. Latar Belakang Pendirian (Lanjutan)

Pada tanggal 17 Juni 2003, Menteri BUMN Republik Indonesia mengeluarkan SK Menteri No. 236/MBU/2003, tentang Program Kemitraan dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Republik Indonesia No. SE-433/MBU/2003, tanggal 16 September 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan, yang saat ini disebut dengan PKBL. Peraturan ini kemudian disempurnakan oleh Surat Keputusan Menteri No. 05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang kemudian mengalami beberapa perubahan. Perubahan selanjutnya dimuat dalam PER- 02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pada Bab II pasal 2 ayat (2) berbunyi: "Perseroan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)". Perubahan terakhir dimuat dalam PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Bab II Pasal 2: BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pelaksanaan Bina Lingkungan diatur dalam Surat Edaran Nomor SE.29/DIR-6/0519 tanggal 17 Mei 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* PT Pos Indonesia (Persero).

Pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, penamaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tidak dipakai lagi dan menjadi Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL). Kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/09/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya perubahan terakhir pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdomisili di Jl. Banda No. 30 Telp. (022) 4213640 Fax. (022) 87805094 Bandung 40115.

Maksud dan tujuan didirikannya Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah:

1. Merupakan wujud tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah bentuk konkrit BUMN dalam memberdayakan masyarakat agar tumbuh lebih mandiri dan diharapkan hubungan dengan para *stakeholders* menjadi lebih baik dan langgeng sehingga kelangsungan usaha Perusahaan dapat terjaga.
2. Untuk meningkatkan kemampuan tata kelola usaha para pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mandiri, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan sekaligus dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, inovatif dan dinamis bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
3. Untuk menciptakan hubungan saling menunjang antara PT Pos Indonesia (Persero), dengan para pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha mereka dan jangkauan layanan PT Pos Indonesia (Persero) dalam berbagai layanan jasa postel dan keuangan yang semakin luas.
4. Perbaikan mutu SDM di sekitar Perusahaan melalui Program Bina Lingkungan seperti pendidikan dan penelitian, peningkatan kesehatan dan pelestarian lingkungan.
5. Membantu masyarakat setempat yang berlokasi di sekitar Perusahaan, melalui bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan dan sarana peribadatan.

1. UMUM (Lanjutan)

1. b. Kegiatan Pembinaan

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK")

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari BUMN Pembina untuk disalurkan kepada usaha kecil dengan syarat-syarat berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000.
2. Milik Warga Negara Indonesia.
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi.
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan.
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*) atau lembaga keuangan non bank.

Ketentuan sebagaimana nomor 7 (tujuh), tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagai bagian dari PUMK BUMN Pembina.

Bentuk dan status bantuan dan pembinaan dalam Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 22, memuat hal- hal sebagai berikut:

1) Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:
   a. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
   b. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek paling lama 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

1. UMUM (Lanjutan)

1. b. Kegiatan Pembinaan (Lanjutan)

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") (Lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 22, memuat hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

2) Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki besaran jasa administrasi sebesar:
   a. 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun;
   b. Suku bunga *flat* yang setara dengan 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun; atau
   c. Ketentuan lain yang ditetapkan Menteri, dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.

3) Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan:
   a. Prinsip jual beli, maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
   b. Prinsip bagi hasil, maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

1. c. Susunan Pengurus

Agar tujuan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat tercapai seperti yang dinginkan, maka perlu dibentuk Divisi tersendiri yang bertugas khusus melaksanakan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau selanjutnya disebut sebagai Divisi Tanggung Jawab Sosisal dan Lingkungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perusahaan secara keseluruhan dengan satuan gugus tugas di bawah ini:

a. TJSL melakukan fungsi pembinaan (evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi dan lainnya termasuk fungsi administrasi dan keuangan).
b. TJSL dibentuk dengan memperhatikan jumlah dana yang dikelola, luas wilayah binaan dan jumlah mitra binaan serta mempertimbangkan kondisi Perusahaan.
c. TJSL bertanggung jawab langsung kepada Direksi Perusahaan yang ditetapkan dalam rapat Direksi, sedangkan karyawan yang ditunjuk untuk menangani divisi TJSL memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan karyawan lain di BUMN Pembina yang bersangkutan.

1. UMUM (Lanjutan)

1. c. Susunan Pengurus (Lanjutan)

Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT Pos Indonesia (Persero) dibawah Divisi PKBL PT Pos Indonesia (Persero), dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 222/PEG/DIRUTPOS/1994 tanggal 28 Desember 1994 dengan nama Gugus Bina Mitra Pos. Keputusan tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KD.013/DIRUT/0323 tanggal 1 Maret 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja di PT Pos Indonesia (Persero).

Sesuai dengan Surat Sekretaris Perusahaan tanggal 26 Mei 2017 Nomor: 1946/SETPER- 1/0517 terdapat pemberitahuan perubahan nomenklatur Direksi menjadi Direktorat Jaringan, Ritel, dan Sumber Daya.

Pada tanggal 21 Januari 2019, terdapat perubahan berdasarkan keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.008/DIRUT/0119 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Pada tanggal 12 Juli 2019, terdapat perubahan berdasarkan surat Nomor: KD.59/DIRUT/0719 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) dan Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero).

Pada tanggal 20 Oktober 2021, terdapat perubahan berdasarkan keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.103/DIRUT/1021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero).

Pada tanggal 30 Desember 2021, terdapat keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.123/DIRUT/1221 tentang Pembentukan Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Pos Indonesia (Persero).

Pada tanggal 1 Maret 2023, terdapat keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.013/DIRUT/0323 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero).

1. UMUM (Lanjutan)

1. c. Susunan Pengurus (Lanjutan)

Susunan Pengurus TJSL PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Anggota Direksi		
Direktur Pembina	Faizal Rochmad Djoemadi	Prasabri Pesti
Corporate Secretary	Tata Sugiarta	-
SVP Regulations, Universal Service Obligation, and Synergy Business	-	Riharsono Prastyantoro
Vice President Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Salman	Helly Siti Halimah
Manajer Perencanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Robertus Edhie Prijo Wardono	-
Manajer Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Selo Edi	-
Manajer Operasional Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Yadi Haryadi	-
Manajer Bina Lingkungan dan Umum	-	Selo Edi
Manajer Program Pendanaan UMK	-	Toni A.H. Nababan
FP Akuntansi	Dessyana	Dessyana
FP Akuntansi	Kusumatresna	-
FP Administrasi Mitra Binaan	Budy Eriawan	Budy Eriawan
FP Verifikasi dan *Data Entry*	Yana Dwi Santana	Yana Dwi Santana
FP Pengelola SIM TJSL	Rifat Ari Azhar	Ihsan Kusparman
FP Pelatihan dan Pendaringan	Dudin Saripudin	Dudin Saripudin
FP Keuangan dan Bina Lingkungan	Erni Patmawati	Erni Patmawati

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Pos Indonesia (Persero) diselenggarakan di 6 (enam) kantor regional yang terbagi dalam 26 unit daerah yang berkedudukan di kantor Regional dan KCU yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki masing-masing sejumlah 46 karyawan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam mengelola Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di PT Pos Indonesia (Persero) mengacu pada Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SE-02/NBU/WK/2012, tanggal 23 Februari 2012, tentang Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dan SE-01/D5.MBU/2012, tanggal 17 Maret 2012, tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012, dimaksudkan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK 45 Revisi 2011), serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Basis akuntansi dalam menyusun laporan keuangan menggunakan dasar akrual.

2. a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual kecuali laporan arus kas disusun menggunakan dasar kas dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang dikiasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disusun menggunakan metode langsung (*direct method*).

2. b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari uang kas dan uang yang ada di bank yang tidak dibatasi penggunaannya.

2. c. Piutang

Piutang Pinjaman Khusus dan Umum

Piutang pinjaman khusus dan umum pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya historis dan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang.

Pemberian pinjaman kepada Mitra Binaan dicatat sebagai piutang sebesar pokok pinjaman dan akrualisasi jasa administrasi pinjaman dengan status lancar dan kurang lancar setelah jatuh tempo, tapi tidak diakrual untuk status piutang diragukan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. c. Piutang (Lanjutan)

Piutang Pinjaman Mitra Binaan disajikan sebesar jumlah bersih dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) pada kelompok Aset Lancar yang diharapkan dapat ditagih dari Mitra Binaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pengelolaan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

a. **Lancar** apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau tidak terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
b. **Kurang lancar** apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
c. **Diragukan** apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
d. **Macet** apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Penyaluran pinjaman kepada mitra binaan dicatat sebagai piutang sebesar nilai pokok pinjaman yang diberikan dikurangi dengan penerimaan angsuran pokok pinjaman. Jasa Administrasi dari pinjaman akan dicatat sebagai penghasilan/pendapatan pada periode diterimanya pendapatan tersebut.

Pada Peraturan sebelumnya pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Pasal 12 yang berlaku pada periode tersebut memiliki besaran jasa admistrasi sebesar 6% (enam persen) pertahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun, dan telah berganti dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, besarnya Jasa Administrasi pinjaman dapat dirinci sebagai berikut:

– Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman memiliki besaran jasa administrasi sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun dengan suku bunga *flat* (tetap) yang setara dengan 3% (tiga persen) efektif per tahun.
– Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar jasa administrasi.
– Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10:90) sampai dengan paling banyak 50% (50:50) berdasarkan perjanjian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. d. Piutang Pinjaman Bermasalah

Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya dengan cara penjadwalan kembali *(Rescheduling)* dan pengkondisian kembali *(Reconditioning)* namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aset lain-lain dengan nama akun Piutang Pinjaman Bermasalah.

2. e. Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

2. e. 1) Penyisihan penurunan nilai piutang Mitra Binaan

Penyisihan piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih. Penyisihan piutang pinjaman yang dilakukan pada akhir tahun dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tingkat ketertagihan data historis yang ada (minimal 2 tahun). Penyisihan piutang pinjaman Mitra Binaan dihitung dan dicatat sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas pinjaman yaitu:

Kualitas Pinjaman Piutang	Jangka Waktu	2023	2022
Lancar	0-30 hari	0,98%	0,56%
Kurang Lancar	31-60 hari	3,23%	2,60%
Ragu-ragu	61-270 hari	9,43%	7,64%
Macet	diatas 270 hari	100,00%	100,00%

2. e. 2) Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Bermasalah

Alokasi pembentukan penyisihan piutang pinjaman bermasalah diukur dan dicatat sebesar 100% dari saldo piutang pinjaman bermasalah.

Alokasi pembentukan penyisihan piutang pinjaman bermasalah disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok akun Aset Lain-lain sebagai pengurang piutang pinjaman bermasalah.

Tata cara penghapusbukuan piutang pinjaman bermasalah mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN.

2. f. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dikelompokkan pada kategori piutang di atas. Termasuk piutang lain-lain adalah panjar dan piutang pendapatan jasa pinjaman.

2. g. Aset Neto

Aset Neto dinyatakan bahwa tidak ada pemisahan aset neto tidak terikat dan aset neto terikat.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. h. Aset Tetap

Aset tetap diakui berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap

Biaya perolehan mencakup pengeluaran untuk pengadaan baru dan pengeluaran untuk perbaikan, penggantian, atau pemugaran sepanjang dapat meningkatkan daya guna aset tetap dan jumlahnya signifikan. Termasuk juga dalam biaya perolehan adalah Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aset tetap tersebut yang tidak dapat dikreditkan atau tidak dikreditkan oleh Perusahaan.

Jenis Aset	Metode Penyusutan	Tarif
Inventaris Kantor	Garis Lurus	25,0%
Kendaraan	Garis Lurus	12,5%

2. i. Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal pada biaya. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, termasuk biaya pengembangan, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran tercermin dalam laporan laba rugi pada tahun di mana pengeluaran tersebut terjadi.

Masa manfaat dari aset takberwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai apabila terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mungkin terganggu. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat yang terbatas ditinjau setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan.

2. j. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat diterimanya jasa/prestasi selama tahun berjalan tetapi belum dilakukan pembayaran. Biaya yang masih harus dibayar diukur dan dicatat sebesar jumlah biaya tahun berjalan yang belum dibayar.

2. k. Kelebihan Pembayaran Angsuran

Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo piutang Mitra Binaan. Kelebihan pembayaran angsuran disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok Liabilitas Jangka Pendek. Kelebihan pembayaran angsuran akan dikembalikan kepada Mitra Binaan sebagai restitusi.

2. l. Angsuran Belum Teridentifikasi

Angsuran belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum dapat diklasifikasi atau diidentifikasi nama Mitra Binaannya sampai dengan tanggal Laporan Keuangan. Angsuran belum teridentifikasi disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai Liabilitas Jangka Pendek.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. m. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diukur dan dicatat sebesar nilai yang telah jatuh tempo yang disesuaikan dengan kontrak. Jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual hanya pada piutang dengan status lancar dan kurang lancar.

3. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara kas terdiri dari uang kas dan uang di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Seluruh kas dan bank merupakan penempatan giro di PT Pos Indonesia (Persero) unit operasional PT Pos Indonesia TJSL. Rincian saldo kas di bank per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Kas		
Kas Program Pendanaan UMK	7.989.370	6.193.947
Bank		
Program Pendanaan UMK		
Giro Pos Program (Pendanaan UMK)	1.822.549.959	1.708.351.929
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Program Pendanaan UMK	720.339.356	662.385.678
Sub Jumlah	**2.542.889.315**	**2.370.737.607**
Jumlah	**2.550.878.685**	**2.376.931.554**

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN – NETO

Rincian saldo piutang berdasarkan sektor usaha mitra sebagai berikut:

	2023	2022
Sektor Industri	10.189.166.975	11.630.770.188
Sektor Perdagangan	35.295.856.088	43.136.120.859
Sektor Pertanian	886.072.728	1.049.242.214
Sektor Peternakan	2.213.214.432	2.516.650.514
Sektor Perkebunan	929.978.087	1.230.737.303
Sektor Perikanan	2.690.242.431	3.141.912.808
Sektor Jasa	13.574.966.777	17.560.404.570
Sektor Lainnya	1.260.157.415	1.446.981.295
Sub Jumlah	**67.039.654.933**	**81.712.819.751**
Penyisihan penurunan nilai Piutang	(54.486.445.211)	(52.568.867.227)
Jumlah	**12.553.209.722**	**29.143.952.524**

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN – NETO (Lanjutan)

Rincian saldo piutang menurut Daerah Mitra Binaan sebagai berikut:

	2023	2022
Nanggroe Aceh Darussalam	3.466.377.953	4.711.336.780
Sumatera Utara	2.247.175.612	2.638.847.612
Sumatera Barat	1.630.495.584	1.898.852.584
Riau	2.941.741.105	3.053.604.768
Jambi	1.121.384.274	1.559.523.670
Bengkulu	2.879.174.547	3.634.630.984
Sumatera Selatan	3.146.719.475	3.534.462.162
Lampung	649.985.788	889.883.952
DKI Jakarta	4.048.248.217	4.371.004.531
Jawa Barat	10.097.786.148	14.252.084.158
Jawa Tengah	1.786.788.624	2.199.409.120
DI Yogyakarta	1.030.011.163	1.499.953.736
Jawa Timur	2.316.450.235	2.918.672.859
Bali	968.009.673	1.280.525.573
Nusa Tenggara Barat	2.135.874.231	2.783.203.717
Nusa Tenggara Timur	1.736.034.737	2.026.663.916
Kalimantan Barat	4.175.032.754	4.474.598.154
Kalimantan Tengah	1.851.749.841	2.051.833.649
Kalimantan Timur	1.191.620.768	1.422.270.216
Kalimantan Selatan	1.653.979.782	1.985.576.769
Sulawesi Utara	4.264.316.224	5.395.073.015
Sulawesi Tengah	2.515.701.281	3.027.720.881
Sulawesi Tenggara	3.343.413.461	3.615.663.961
Sulawesi Selatan	3.158.135.969	3.463.380.849
Maluku	1.178.662.885	1.292.970.311
Batam	342.851.721	569.138.943
Papua	1.161.932.881	1.161.932.881
Sub Jumlah	**67.039.654.933**	**81.712.819.751**
Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang	(54.486.445.211)	(52.568.867.227)
Jumlah Piutang Mitra Binaan Bersih	**12.553.209.722**	**29.143.952.524**

Kualitas pinjaman piutang mitra binaan sebagai berikut:

	2023	2022
Lancar	8.030.985.381	22.181.754.221
Kurang lancar	2.757.568.084	5.505.350.529
Diragukan	2.133.450.880	1.867.582.851
Macet	54.117.650.588	52.158.132.150
Jumlah	**67.039.654.933**	**81.712.819.751**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-06/MBU/09/2022 dan PER-1/MBU/03/2023 tingkat suku bunga/jasa administrasi penyaluran Program Pendanaan UMK dikenakan sebesar 3% per tahun terhitung sejak tanggal 8 September 2022 dan 3 Maret 2023.

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN – NETO (Lanjutan)

Rincian saldo Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Mitra Binaan berdasarkan tingkat kolektibilitas sebagai berikut:

	2023	2022
Alokasi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang		
Lancar	78.562.180	124.754.055
Kurang Lancar	89.108.463	143.342.531
Ragu-ragu	201.123.980	142.638.491
Macet	54.117.650.588	52.158.132.150
Jumlah Akhir Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Akhir Tahun	**54.486.445.211**	**52.568.867.227**

Rincian mutasi saldo Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Mitra Binaan berdasarkan tingkat kolektibilitas sebagai berikut:

	2023	2022
Alokasi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Awal Tahun	**52.568.867.227**	**52.062.101.920**
Kenaikan/(Penurunan) Alokasi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang		
Lancar	(46.191.875)	(284.186.780)
Kurang Lancar	(54.234.068)	(43.036.319)
Ragu-ragu	58.485.489	(4.056.668)
Macet	1.959.518.438	838.045.074
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Bersih	**1.917.577.984**	**506.765.307**
Jumlah Akhir Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Akhir Tahun	**54.486.445.211**	**52.568.867.227**

5. PIUTANG LAIN-LAIN

Merupakan kelebihan pembayaran angsuran-angsuran tahun 2023 dan 2022 yang masing-masing senilai:

	2023	2022
Uang Muka Operasional CSR	254.601.238	1.345.264.695
Uang Muka Operasional	242.446.431	380.311.656
Jumlah	**497.047.669**	**1.725.576.351**

5. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Uang muka operasional CSR pada tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp254.601.238 dan Rp1.345.264.695 merupakan biaya CSR. Saldo piutang lain-lain tahun 2022 sebesar Rp1.725.576.351 telah dilakukan penyelesaian pada periode bulan Januari dan Februari 2023.

Uang muka operasional pada tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp242.446.431 dan Rp380.311.656 merupakan biaya operasional yang dibiayai oleh Perusahaan.

6. PIUTANG JANGKA PANJANG

Berdasarkan surat Kementerian BUMN Nomor: S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK") yang telah ditindaklanjuti kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Pos Indonesia (Persero) dengan Nomor Surat BRI: PKS B 53/BMD/12/2022 dan Nomor Surat Pos Indonesia: PKS.266/DIR-6/1222 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani. Berita Acara Penyetoran Dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun 2022 dengan Nomor Surat BRI: B.304-MBD/PDT/12/2022 dan Nomor Surat Pos : 1338/DIR-6/1222 tanggal 29 Desember 2022 telah dilakukan penyetoran dana PUMK kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk senilai Rp7.000.000.000 per tanggal 30 Desember 2022.

Pada tahun 2023, PT Pos Indonesia (Persero) telah menyetorkan dana PUMK kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Surat BRI: B.604-MBD/09/2023 dan Nomor Surat Pos: 866/SETPER/0923 tanggal 1 September 2023 senilai Rp10.000.000.000 per tanggal 4 September 2023. Kemudian PT Pos Indonesia melakukan penyetoran dana PUMK kembali kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Surat BRI: B.853-MBD/11/2023 dan Nomor Surat Pos: 1312/SETPER/1123 tanggal 24 November 2023 senilai Rp7.000.000.000 per tanggal 24 November 2023.

Pada Laporan Penyaluran PUMK 2023 dengan Nomor Surat BRI: B.212/MBD/01/2024 tanggal 24 Januari 2024, pendapatan jasa administrasi atas penyaluran dana PUMK yang dilaporkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Pos Indonesia (Persero) senilai Rp94.016.266 untuk tahun 2023.

Saldo piutang jangka panjang yang merupakan saldo penyaluran dana PUMK kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan piutang pendapatan jasa admisnistrasi atas penyaluran dana PUMK tersebut per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai:

	2023	2022
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Kerjasama Program PUMK	24.000.000.000	7.000.000.000
Piutang Pendapatan Jasa Administrasi yang Akan Diterima	94.016.266	--
Jumlah	**24.094.016.266**	**7.000.000.000**

7. PIUTANG BERMASALAH - Neto

Akun ini merupakan pinjaman modal kerja yang diberikan kepada mitra binaan yang masuk ke dalam piutang bermasalah dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo awal piutang bermasalah	83.721.080.406	83.810.517.074
Pengurangan atas angsuran	(101.714.667)	(89.436.668)
Alokasi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	(83.619.365.739)	(83.721.080.406)
Piutang bermasalah Akhir tahun - Neto	**--**	**--**

8. ASET TETAP

	2023			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Biaya perolehan:				
Inventaris	1.691.367.579	--	--	1.691.367.579
Kendaraan	171.480.000	--	--	171.480.000
Sub Jumlah	**1.862.847.579**	**--**	**--**	**1.862.847.579**
Akumulasi penyusutan:				
Inventaris	1.691.367.578	--	--	1.691.367.578
Kendaraan	171.480.000	--	--	171.480.000
Sub Jumlah	**1.862.847.578**	**--**	**--**	**1.862.847.578**
Jumlah Tercatat	**1**			**1**

	2022			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Biaya perolehan:				
Inventaris	1.691.367.579	--	--	1.691.367.579
Kendaraan	171.480.000	--	--	171.480.000
Sub Jumlah	**1.862.847.579**	**--**	**--**	**1.862.847.579**
Akumulasi penyusutan:				
Inventaris	1.691.367.578	--	--	1.691.367.578
Kendaraan	171.480.000	--	--	171.480.000
Sub Jumlah	**1.862.847.578**	**--**	**--**	**1.862.847.578**
Jumlah Tercatat	**1**			**1**

9. ASET TAKBERWUJUD

	2023			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Biaya perolehan:				
Pemilikan langsung				
Aplikasi WEB SIM TJSL	395.000.000	--	--	395.000.000
Sub Jumlah	**395.000.000**	**--**	**--**	**395.000.000**
Akumulasi amortisasi:				
Pemilikan langsung				
Aplikasi WEB SIM TJSL	394.999.999	--	--	394.999.999
Sub Jumlah	**394.999.999**	**--**	**--**	**394.999.999**
Jumlah Tercatat	**1**			**1**

	2022			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Biaya perolehan:				
Pemilikan langsung				
Aplikasi WEB SIM TJSL	395.000.000	--	--	395.000.000
Sub Jumlah	**395.000.000**	**--**	**--**	**395.000.000**
Akumulasi amortisasi:				
Pemilikan langsung				
Aplikasi WEB SIM TJSL	394.999.999	--	--	394.999.999
Sub Jumlah	**394.999.999**	**--**	**--**	**394.999.999**
Jumlah Tercatat	**1**			**1**

10. KELEBIHAN PEMBAYARAN ANGSURAN

	2023	**2022**
Saldo Awal	404.365.111	411.857.931
Kelebihan (Kekurangan) Pembayaran Angsuran	26.667.834	(7.492.820)
Jumlah	**431.032.945**	**404.365.111**

Kelebihan pembayaran angsuran pada tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp431.032.945 dan Rp404.365.111 merupakan penerimaan angsuran yang melebihi saldo piutang Mitra Binaan akibat kesalahan pengakuan pembayaran piutang mitra binaan yang tidak sesuai dengan ID Mitra yang seharusnya, sedangkan pengurangan kelebihan pembayaran angsuran merupakan koreksi setelah ditemukannya ID Mitra yang melakukan pembayaran sebenarnya.

11. UTANG LAIN-LAIN

	2023	2022
Titipan angsuran mitra binaan	80.160.742	80.160.742
Lain-lain	10.818.979	24.595.647
Premi asuransi penyaluran	--	64.286.001
Jumlah	**90.979.721**	**169.042.390**

Utang lain-lain pada tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp90.979.721 dan Rp169.042.390 merupakan utang yang harus segera dibayar atas klaim, premi asuransi, dan angsuran Mitra Binaan untuk tahun 2022.

Titipan angsuran Mitra Binaan sebesar Rp80.160.742 digunakan untuk melunasi pinjaman Mitra Binaan yang bersangkutan.

12. ASET NETO

Aset Neto terdiri dari aset neto tidak terikat dan aset neto terikat. Aset Neto tidak terikat merupakan sumber dan yang penggunaanya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset Neto terikat merupakan sumber dan penggunaanya dibatasi, rincian Aset Neto Tidak Terikat sebagai berikut:

	2023	2022
Aset Neto Tidak Terikat		
Saldo awal	39.673.052.930	38.532.527.748
Kenaikan (penurunan) Aset Neto Tidak Terikat	(499.913.252)	1.140.525.182
Saldo Akhir	**39.173.139.678**	**39.673.052.930**

13. PENDAPATAN

Pendapatan tahun 2023 dan 2022 terdiri masing-masing sebesar:

	2023	2022
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	1.303.914.794	1.554.873.778
Pendapatan Bunga Jasa Giro	5.587.990	3.695.216
Pendapatan Lain-lain - *Fee-based Insurance*	6.447.284	13.295.638
Jumlah	**1.315.950.068**	**1.571.864.632**

14. BEBAN

Beban tahun 2023 dan 2022 merupakan penyisihan piutang masing-masing senilai Rp1.815.863.320 dan Rp431.339.450.

	2023	2022
Alokasi Penyisihan Penurunan Piutang (Catatan 4)	1.917.577.987	506.765.307
Pembayaran Angsuran Piutang Bermasalah (Catatan 7)	(101.714.667)	(89.436.668)
Penyesuaian Lainnya	--	14.010.811
Jumlah Beban Penyisihan Piutang	**1.815.863.320**	**431.339.450**

15. TANGGUNG JAWAB PENGURUS ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Pengurus Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2024.